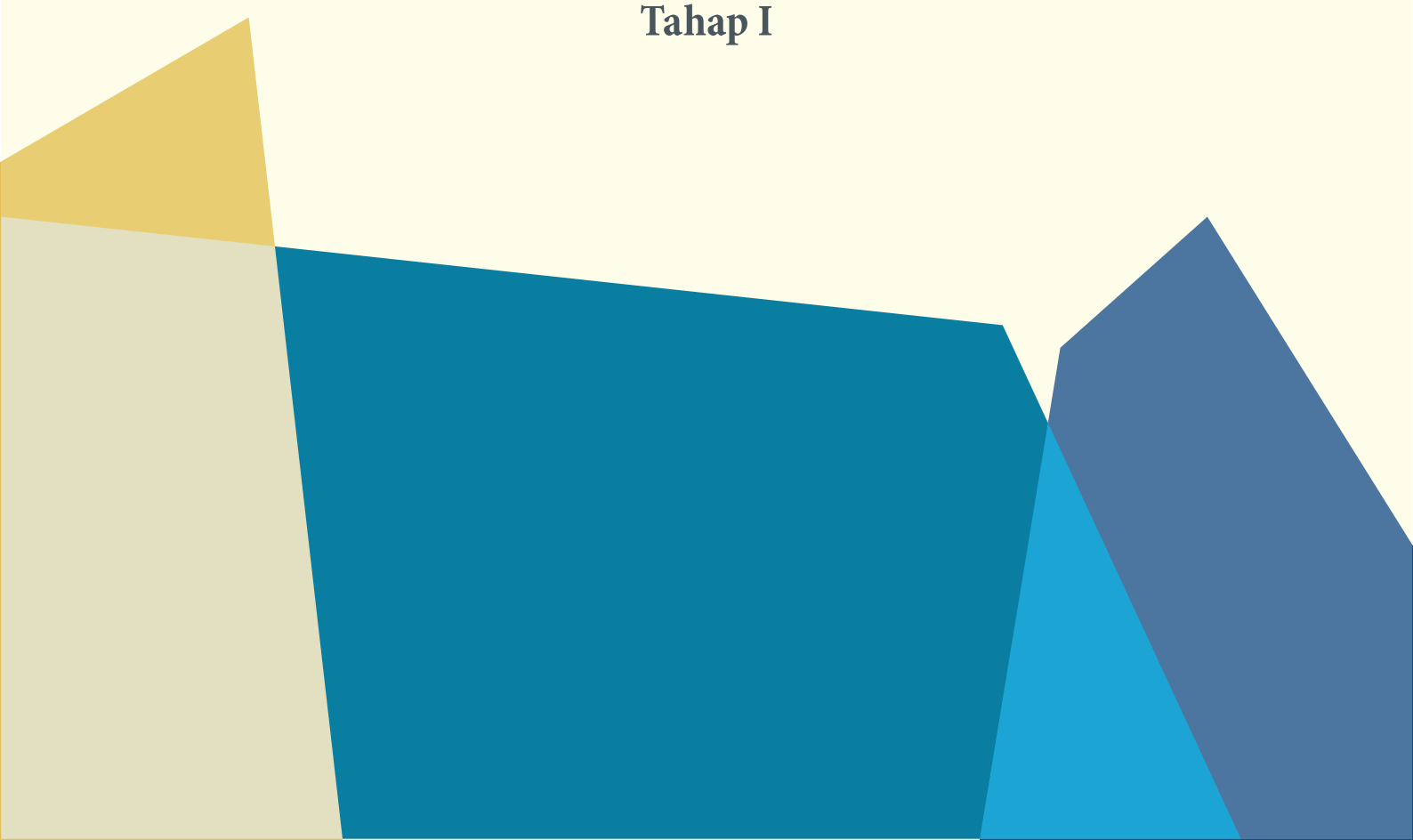


PROSIDING SEMINAR HASIL PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kebijakan Berbasis Bukti untuk Memperkuat Kemerdekaan Belajar
dan Ketahanan Budaya di Masa Pandemi

Tahap I



PROSIDING SEMINAR HASIL PENELITIAN TAHUN 2020

Kebijakan Berbasis Bukti untuk Memperkuat Kemerdekaan Belajar
dan Ketahanan Budaya di Masa Pandemi

Tahap I



PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

PROSIDING SEMINAR HASIL PENELITIAN TAHUN 2020

Kebijakan Berbasis Bukti untuk Memperkuat Kemerdekaan Belajar
dan Ketahanan Budaya di Masa Pandemi Tahap I

Pengarah

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

Penanggung Jawab

Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan

Reviewer

Ir. Heru Triyono, M.Sc., Dr. Aos Santosa, M.Pd., Prof. Karwono, Ph.D, Dr. Muktiono Waspodo, Prof. Dr. Sasmoko, M.Pd, Dr. Syaikhul Usman, Prof. Muchlas Samani, Dr. Ali Akbar, S.S., M.Hum

Penyunting Isi

Irsyad Zamjani, Ph.D, Nur Berlian VA, M.S.E, Relisa, S.S., Dyah Suryawati, S.Si., Untung Tri Rahmadi, S.Sos. Siska Fujianita, S.Pd., Genardi Atmadiredja, S.Sn., M.Sn

Penyunting Bahasa

Ninawati Syahrul, M.Pd, S.R.H. Sitanggang, M.A.

Panitia Pelaksana

Dra. Asri Ika Dwi Martini, Relisa, SS, Joko Purnama, M.Sc, Erni Hariyanti, S.Psi, Maya Indrya, A.Md, Genardi Atmadiredja, S.Sn, M.Sn, Fadhilah Darma Sulisty, S.Kom, Sumiyati

Desain Sampul dan Isi

Genardi Atmadiredja, S.Sn., M.Sn

xv + 430 hlm; 21,0 cm x 29,7 cm

ISBN: 978-623-6044-02-5

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung
E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Desember 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berbagai pemberian nikmat dan ridho-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Saya menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya panitia penyelenggara Puslitjak atas terlaksananya seminar ini sehingga Saya berkesempatan hadir dan bersilaturahmi serta dapat menyampaikan beberapa informasi penting/pesan dalam rangka peningkatan kualitas dan kebermanfaatan hasil penelitian/kajian

Kegiatan Seminar perlu menjadi salah satu program unggulan bagi para peneliti dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan untuk merumuskan beberapa opsi/saran kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal ini mengingat, seminar merupakan cara efektif dalam memberikan masukan konstruktif dalam mengemas ide-ide terkini melalui tukar menukar informasi (*sharing*) dalam rangka hasil penelitian sehingga lebih berkualitas dan memiliki nilai kebermanfaatan yang juga tinggi pula

Melalui seminar ini, Saya mengajak Saudara berpartisipasi aktif dan memanfaatkan seminar ini sehingga pembahasan isu-isu strategis hasil-hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan untuk menunjang terwujudnya kebijakan strategis Kemendikbud, dalam mendukung Pembangunan Nasional.

Setiap elemen kelembagaan perlu saling bekerja sama dan saling membutuhkan. Seminar ini memiliki fungsi yang penting sebagai wahana pertemuan ilmiah dan bertukar informasi terkait dengan hasil-hasil penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang dikembangkan oleh para peneliti, perekayasa, dan analis data dari Puslitjak dan Pusat-Pusat lain di Lingkungan Balitbang dan Perbukuan, serta para peneliti dari Lembaga Penelitian Mitra, dan Akademisi Perguruan Tinggi.

Peneliti, Perekayasa, dan Akademisi merupakan aset penting bagi suatu bangsa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mencari solusi bagi masalah bangsa. Untuk itu, agar hasil penelitian/perekayasaan berdampak pada kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), maka akan sangat baik jika hasil penelitian memberikan manfaat tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berorientasi pada pemecahan permasalahan pembangunan, khususnya pendidikan dan kebudayaan.

Untuk itu, hasil penelitian/rekayasa harus berkualitas dan tepat waktu. Artinya, manakala dibutuhkan maka hasil kerja penelitian/perekayasaan itu juga siap untuk dipergunakan sebagai bahan masukan rumusan kebijakan. Oleh karena itu, peneliti/perekayasa harus berkompeten dalam (1) mengidentifikasi permasalahan yang bermuara ke masa depan, dan (2) mampu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan hasilnya. Peneliti/perekayasa harus berorientasi pada upaya menyumbang atau menyempurnakan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, baik untuk penyempurnaan kebijakan yang sedang dilaksanakan maupun untuk mengantisipasi kebijakan ke depan.

Adanya pola pikir dan paradigma Balitbang harus dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Puslitjak Balitbang bukan hanya sekedar unit birokrasi yang bertugas sebagai unit pendukung (administrasi), namun harus menjadi "Lembaga yang tahu lebih dahulu" tentang masa depan Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia yang tentunya berangkat dari kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang didasarkan dari hasil-hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menjawab tantangan itu, peneliti dan perekayasa harus mampu menjadi sumber bagi ide/gagasan yang dapat diandalkan untuk alternatif solusi di lingkungan Kemendikbud. Pola pikir lama dalam penelitian harus diganti dengan pola pikir baru yang lebih memadai. Pola kerja Balitbang dalam memikirkan penelitian biasanya terjadi setelah peristiwa atau isu-isu baru bermunculan. *Pola pikir baru* yang perlu lahir bahwa Balitbang harus lebih proaktif dan terdepan dalam melakukan penelitian dengan kepekaan terhadap isu-isu terkini. *Pola pikir lain*, menyangkut identifikasi masalah yang biasanya hanya mengaitkan persoalan dalam lingkup terbatas/internal Balitbang harus diubah dengan cakupan lingkup eksternal dengan memperluas interaksi pada berbagai unit atau pemangku kepentingan lainnya.

Para peneliti/perekayasa, diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai masalah dan isu-isu kritis di bidang pendidikan dan kebudayaan yang baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai rencana strategis yang telah dicanangkan oleh Kemdikbud. Peneliti/Perakayasa harus mampu menemukan penyebab utama, dan alternatif solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Beberapa permasalahan yang sekarang tengah dihadapi dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi antara lain adalah perubahan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan sebagai dampak dari masa Pandemi COVID-19. Saat ini dan ke depan, penyelenggaraan Pendidikan tentunya tidak akan kembali lagi kepada masa normal sebelum pandemi. Untuk itu berbagai kebijakan telah ditempuh Kemdikbud dalam mengatasi dan mengantisipasi kondisi saat ini dan ke depan. Kebijakan yang telah ditetapkan adalah dalam rangka mendukung merdeka belajar dan ketahan serta pemajuan kebudayaan.

Kebijakan terkini yang baru dua minggu lalu diluncurkan adalah Surat Keputusan Bersama 5 Menteri, Kepala BNPB dan Ketua Gugus Tugas COVID-19 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19. Panduan tersebut antara lain menyatakan bahwa mulai Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/kanwil Kemenag, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan Pendidikan dan orangtua. Walaupun sudah diberikan izin untuk pembelajaran tatap muka, dalam penyelenggarannya tetap harus memperhatikan secara ketat penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.

Dalam kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi saya berharap agar kegiatan seminar hasil penelitian yang dilaksanakan Puslitjak ini dapat menghasilkan berbagai rekomendasi opsi kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta berkewajiban melahirkan berbagai alternatif inovasi. Oleh karena itu Peneliti/Perakayasa senantiasa mampu menganalisa "*big data*" yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan

Di samping itu, saya berharap kegiatan ini juga mampu menjadi atmosfer yang baik untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah Indonesia.

Irsyad Zamjani

Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan

TENTANG SEMINAR

Pusat Penelitian Kebijakan

Sebagai langkah mendukung pencapaian visi Indonesia Maju yang dicanangkan Pemerintah, pembangunan pada sektor pendidikan dan kebudayaan perlu diarahkan untuk peningkatan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengarusutamaan kebudayaan. Di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti, kualitas SDM akan sangat menentukan kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi. Peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan menjadi tantangan yang diemban oleh Kemendikbud dalam pembangunan SDM Indonesia. Diperlukan kolaborasi untuk melakukan ikhtiar bersama semua pihak guna melaksanakan amanah tersebut.

Upaya bersama yang dapat dilakukan dalam rangka menjawab tantangan peningkatan mutu dan pemajuan kebudayaan yaitu dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan. Kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pengkajian yang baik diyakini dapat meningkatkan kualitasnya serta ketepatan sasarannya. Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya menjadi tantangan utama dalam penyiapan SDM yang memiliki kemampuan daya saing yang tinggi. Dunia kerja di masa depan akan sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Kemendikbud dalam upayanya telah berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila, yaitu perwujudkan pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Dalam rangka menyediakan informasi untuk perumusan kebijakan, Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud pada tahun 2020 telah melaksanakan berbagai penelitian dan pengembangan, baik topik-topik yang terkait dengan akses pendidikan, mutu pendidikan, tata kelola pendidikan dan kebudayaan, pembelajaran dan pengajaran, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, merdeka belajar, serta perlindungan, revitalisasi, dan aktualisasi kebudayaan. Selain topik-topik tersebut, pada tahun 2020 Puslitjak juga menyelenggarakan penelitian dan kajian terkait dengan situasi dan kondisi terkini yang dihadapi dunia pendidikan dan kebudayaan, diantaranya yaitu topik-topik terkait dengan pendidikan di masa pandemi COVID-19, pendidikan di era digital, dan dampak pandemi COVID-19 terhadap kebudayaan. Sebagai upaya penyebarluasan dan pemanfaatan penelitian/kajian yang sudah dihasilkan, Puslitjak menyelenggarakan seminar sebagai sarana menyampaikan temuan dan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan bagi pengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Kegiatan seminar hasil penelitian merupakan tahapan akhir dari kegiatan penelitian. Kegiatan ini sebelumnya telah melewati tahapan penyajian hasil penelitian/kajian tahap awal yang bertujuan untuk mempertajam hasil penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang telah dilakukan oleh para peneliti dan perekayasa Puslitjak. Dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan, Puslitjak selalu berupaya melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan ilmiah, terutama dalam diseminasi hasil penelitian. Kegiatan diseminasi ditujukan kepada kelompok atau individu peneliti dan perekayasa terkait agar mereka memperoleh informasi, kemudian timbul kesadaran dan menerima, hingga akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Hasil penelitian akan memperkuat atau mengesampingkan asumsi-asumsi yang telah ada sebelumnya dengan informasi yang lebih ilmiah. Selain hasil penelitian dari Puslitjak, juga terdapat hasil penelitian dari lembaga-lembaga penelitian lain, baik dari lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang bermitra dengan Puslitjak. Terselenggaranya seminar hasil penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan akan mendukung perkembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang responsif terhadap tantangan serta kemajuan zaman.

Bentuk Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan dalam bentuk seminar dengan menampilkan para peneliti dan perekayasa Puslitjak dan lembaga penelitian mitra untuk memaparkan hasil-hasil penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Nama kegiatan ini adalah Seminar Hasil Penelitian Tahun 2020. Dalam rangka menyesuaikan dengan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19, seminar akan dilaksanakan dalam dua tahap. Selain itu, seminar juga akan dilaksanakan melalui dua metode, yaitu tatap muka di hotel dan webinar melalui aplikasi zoom.

Tujuan

Seminar hasil penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang sudah dilakukan Puslitjak dan lembaga penelitian mitra.

Topik Kajian

Topik hasil penelitian/kajian yang diseminarkan pada Seminar Hasil Penelitian Tahun 2020 ini meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran
2. Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun
3. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Penjaminan Mutu
5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan
6. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal
7. Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya
8. Peningkatan Budaya Literasi
9. Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19
10. Merdeka Belajar
11. Pendidikan di Era Digital
12. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi
13. Pemajuan Kebudayaan

Tempat dan Waktu

Seminar tahap pertama akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 Desember 2020. Seminar secara tatap muka diadakan di Hotel Mirah, Jl. Pangrango No.9A, RT.04/RW.04, Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Tema Seminar

Tema Seminar Hasil Penelitian Tahun 2020 yaitu:

“Kebijakan Berbasis Bukti untuk Memperkuat Kemerdekaan Belajar dan Ketahanan Budaya di Masa Pandemi”.

LAPORAN

KETUA PANITIA SEMINAR

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh, Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara Seminar Hasil Penelitian Tahun 2020 dengan tema “**Kebijakan Berbasis Bukti untuk Memperkuat Kemerdekaan Belajar dan Ketahanan Budaya di Masa Pandemi**”. Kami menyampaikan Selamat Datang, penghargaan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami dalam Seminar ini.

Seminar Hasil Penelitian Tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Sehingga untuk menghindari terjadinya kerumunan dan supaya dapat dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan maka pelaksanaan seminar tahun ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dimulai hari ini sampai dengan Jumat, 4 Desember 2020, dan tahap kedua akan dilaksanakan pada hari Senin, 7 Desember sampai dengan Rabu, 9 Desember 2020. Seminar dilaksanakan dengan gabungan metode secara luring di The mirah Hotel Bogor dan secara daring melalui aplikasi zoom.

Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiseminasikan hasil penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang sudah dilakukan Puslitjak dan lembaga penelitian mitra. Kegiatan Seminar ini diharapkan dapat menjadi forum pertemuan antara ilmuwan, peneliti, perekayasa, penentu kebijakan, dan pengguna hasil-hasil penelitian.

Pada kesempatan ini kami melaporkan kepada Bapak plt Kepala Puslitjak tentang rangkuman penyelenggaraan Seminar Nasional Hasil Penelitian Tahun 2020 Tahap pertama, yaitu :

1. Peserta yang hadir pada seminar kali ini terbagi menjadi 2 yaitu daring dan luring. Peserta secara luring berjumlah 344 orang, sesuai dengan daftar hadir yang telah terisi. Sedangkan **peserta secara daring dari undangan** yang berasal dari internal kemendikbud, kementerian dan lembaga lain, perguruan tinggi dan internal Puslitjak **sekitar 100 orang**, sedangkan **peserta umum yang sudah terkonfirmasi sebanyak 250 peserta** dari 500 lebih yang mendaftar secara daring. Peserta yang hadir di hotel alhamdulillah secara umum kondisi kesehatannya baik, karena semua peserta yang hadir diwajibkan melakukan rapid tes yang hasilnya non-reaktif;
2. Pada penyelenggaraan kegiatan seminar kali ini peserta dibagi dalam tiga sesi penyajian yang masing-masing sesi menyajikan dua sampai 3 kelompok topik secara panel sesuai dengan arahan Bapak Irsyad Zamjani, plt Kapuslitjak akan diselesaikan dalam waktu tiga hari. **Materi** setiap sajian dapat diunduh **website <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>**

Dari paparan dan diskusi setiap kelompok nantinya diharapkan dapat menggali dan menghimpun berbagai masukan, serta kontribusi pemikiran, yang digunakan sebagai bahan oleh Tim Perumus dalam memformulasikan rekomendasi yang selanjutnya akan kami buat dalam bentuk **Prosiding**.

Mengakhiri laporan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan seminar ini dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan seminar ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak/Ibu.

Akhirnya, kepada para peserta seminar saya ucapkan selamat berseminar dengan harapan semoga seminar ini mampu menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dan ada tindak lanjut yang konkret dari seluruh stakeholder.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

JADWAL SEMINAR

Kebijakan Berbasis Bukti untuk Memperkuat Kemerdekaan Belajar
dan Ketahanan Budaya di Masa Pandemi

JADWAL PELAKSANAAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TAHUN 2020 TAHAP I
"Kebijakan Berbasis Bukti untuk Memperkuat Kemerdekaan Belajar dan Ketahanan Budaya di Masa Pandemi"
 Bogor, 2 s.d. 4 Desember 2020

Rabu, 2 Desember 2020

WAKTU		ACARA		FASILITATOR
12.00 - 13.00	Registrasi Peserta			Panitia
13.00 - 13.10	Menyanyikan Indonesia Raya dan Doa	PEMBUKAAN		Panitia
13.10 - 13.20	Laporan Panitia			Koordinator Substansi Fasdis
13.20 - 13.45	Pembukaan dan Pengarahan: Sekretaris Balitbang dan Perbukuan			Kasubag Tata Usaha
13.45 - 14.00	BREAK UNTUK PERSIAPAN BREAK ROOM ZOOM WEBINAR			
14.00 - 16.30	PAPARAN SESI I			
		Kelompok 1: "Pembelajaran di Masa Pandemi"	Kelompok 2: "Tata Kelola Pendidikan"	Panitia
		Studi Evaluasi Belajar dari Rumah Tahun Ajaran 2020/2021	Pengelolaan Keragaman Peserta Didik Pasca-Zonasi	
		Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah Dalam Masa Kenormalan Baru	Analisis Kebutuhan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Analisis Kebutuhan Biaya PAUDD/ASMEN)	
	Judul	Pelaksanaan Pembelajaran dari Rumah dalam Masa Pencegahan COVID-19	Model Penguatan Pendidikan Karakter dengan Konsep Scaffolding 4N Ki Hadjar Dewantara selama Belajar dari Rumah	
		Monitoring Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh pada Masa Pandemi melalui Analisis Percakapan di media Sosial	Sistem PPDB, Partisipasi Seleksi, dan Akses Pendidikan	
Pembahas	Ir. Heru Triyono, M.Sc.			
Moderator	Sri Hidayati			
Host Zoom	Siska Lismayanti; Genardi Atmadiredja			
16.30 - 19.00	ISOMA			
19.00 - 21.00	Koordinasi Internal dan Evaluasi penyelenggaraan Sesi I			
				Manajemen dan Panitia

Kamis, 3 Desember 2020

WAKTU		ACARA				FASILITATOR
PAPARAN SESI II						
	Kelompok 3: "Merdeka Belajar"	Kelompok 4: "Digitalisasi Pembelajaran"	Kelompok 5: "Kampus Merdeka"	Panitia		
	Evaluasi Hasil Akreditasi Sekolah Penyaji: Ir. Siswantiari, M.Sc. Notulis: Dodi Setyawan	Pembelajaran Online melalui Platform Cultural Literacy for Digital Society (CLDS) Penyaji: Mochamad Aviandy, S.Hum.,M.Hum Notulis: Anggota Tim	Kesiapan Perguruan Tinggi dalam Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka Penyaji: Dr. Iskandar Agung, M.Si. Notulis: Noviyanti			
Judul	Kesiapan Sekolah menghadapi Assmen Kompetensi Minimal Penyaji: Meni Handayani, SS, M.Si. Notulis: Asma Aisha	Pengembangan Portal Pembelajaran Online Berbasis Artificial Intelligence dalam Kerangka Team Based Learning Penyaji: Dr. Bens Pardamean (BINUS) Notulis: Anggota Tim	Efektivitas Pembelajaran Daring di Perguruan Tinggi dalam Masa Pandemi Penyaji: Dr. Sarwanto, S.Pd, M.Si Notulis: Anggota Tim			
	Kinerja Guru dalam Mengimplementasikan Merdeka Belajar Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Pembiasaan Baru Penyaji: Dr. Sabar Budi Raharjo, M.Pd. Notulis: Joko Purnama	Pengembangan Model PECS Berbasis Aplikasi Digital sebagai Upaya Penguatan Kecerdasan Visual Spasial Bagi Anak Autistik Penyaji: Rudi Irawanto, S.Pd, M.Sn (UM) Notulis: Anggota Tim	Strategi Pembiayaan Pendidikan Tinggi Penyaji: Catur Dyah Fajarini Notulis: Khairuri Raziqin			
Pembahas	Yaya Kardiawarman, Ph.D		Prof. Dr. Sasmoko, M.Pd			
Moderator	Novrian Satria Perdana		Set. Ditjen Dikti			
Host Zoom	Siska Lismayanti; Joko Purnama		Ferdi Widiputera	Genardi Atmadiredja; Relisa		
12.00 - 13.30	ISOMA					
PAPARAN SESI III						
	Kelompok 6:	Kelompok 7:	Kelompok 8:	Panitia		
	"Tata Kelola dan Peningkatan Kompetensi Guru"	"Tata Kelola Pendidikan Vokasi"	"Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya"			
	Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Guru untuk menunjang Profesionalisme Guru Berbasis Teknologi AI (Artificial Intelligence) dalam Platform Andorid Penyaji: Prof. Dr. Suyanta, M.Si (UNY) Notulis: Anggota Tim	Kajian Alternatif Model Penggabungan SMK dengan SMA Penyaji: Dr. Idris HM Noor, M.Ed. Notulis: Sisca Fujanita	Promoting Culture of Peace Senior High School Students Through Intolerance Early Warning and Early Response System (i-EWERS) Penyaji: Muhammad Najib Azca, Ph.D (UGM) Notulis: Anggota Tim			
Judul	Program Pendampingan Literasi Berbasis Daring pada Masa Tatanan Baru bagi Guru SMPN (UNJ) Penyaji: Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.App.Ling (UNJ) Notulis: Anggota Tim	Pembelajaran Vokasi Fungsional melalui satuan pendidikan non-formal Penyaji: Dr. Etty Sisidiana Notulis: Fransisca Nur'ani Krisna	Pengayaan Seni dalam Mendukung Industri Kreatif Penyaji: Ihyia Ulumuddin, M.Si. Notulis: Genardi Atmadiredja			
	Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19 Penyaji: Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH., M.Si (UNJ) Notulis: Anggota Tim	Pendidikan Vokasi: Menjaga Relevansi SMK di Abad 21 Penyaji: Drs. Agus Amin Sulistiono, M.Pd. Notulis: Khairur Raziqin	Kampung Adat Di Tengah Pandemi Covid-19 Penyaji: Zaenal Abidin Eko Putro Notulis: Kaisar Julizar			
Pembahas	Dr. Syaikhul Usman		Dr. Ali Akbar, S.S., M.Hum			
Moderator	Set. Ditjen GTK		Set. Ditjen Kebudayaan			
Host Zoom	Teguh Supriyadi		Irawan Santoso Suryo Basuki	Genardi Atmadiredja; Relisa		
	Siska Lismayanti; Asri Ika Dwi Martini		Genardi Atmadiredja; Relisa			

WAKTU	ACARA	FASILITATOR
16.30 - 17.30	Perumusan Rekomendasi Hasil Seminar	Tim Perumus
17.30 - 19.30	ISOMA	
	PENUTUPAN	
19.30 - 21.00	Pembacaan Rekomendasi Hasil Seminar	Koordinator Substansi Fasdis
	Penutupan Seminar	plt. Kapusliljak
	Doa	Panitia

Jumat, 4 Desember 2020

WAKTU	ACARA	FASILITATOR
08.00 - 11.00	Penyelesaian administrasi	Panitia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tentang Seminar Pusat Penelitian Kebijakan	Iii
Laporan Ketua Panitia Seminar	vi
Jadwal Seminar	ix
Daftar Isi	xiv
 Pembelajaran di Masa Pandemi	
Evaluasi Hasil Belajar Dari Rumah Tahun Ajaran 2020/2021	1
Indah Pratiwi, Ika Hijriani, Diyan Nur Rakhmah, Siti Nur Azizah	
Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah dalam Masa Kenormalan Baru	11
Lukman Solihin, Joko Purnama, Ika Hijriani, Imelda Widjaja, Amaliah Fitriah	
Pelaksanaan Pembelajaran dari Rumah dalam Masa Pencegahan COVID-19	23
Irsyad Zamjani, Indah Pratiwi, Ika Hijriani, Diyan Nur Rakhmah, Siti Nur Azizah, Sri Hidayati	
Analisis Terhadap Tanggapan Masyarakat Di Twitter Secara Otomatis Berbasis Teknologi Nlp Tentang Topik Pembelajaran Online, Kuota Belajar, Dan Kurikulum Darurat	35
Ayu Purwarianti, Windy Gambetta, Yusrina Sabina, Sugih Biantoro, Relisa, Genardi Atmadiredja, Teguh Eko Budiarto, Dessi Puji Lestari, Achmad Ramdhan	
 Tata Kelola Pendidikan	
Pengelolaan Keragaman Peserta Didik Pasca-Zonasi	55
Herman Hendrik, Mikka W. Nurrochsyam, Romeyn P. Putra, Yunita Murdiyaningrum	
Analisis Kebutuhan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah	65
Herlinawati, Siti Nur Azizah, Catur Dyah Fajarini, Khairur Roziqin	
Analisis Penguatan Karakter Siswa SMP Di Yogyakarta Selama Belajar Dari Rumah	83
H. Robiasih, A. Setiawan, dan H. Dardjito	
Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020	91
Yufriidawati, Erni Hariyanti, Diyan Nur Rakhmah W., Siti Nur Azizah	
 Merdeka Belajar	
Kinerja Guru Dalam Mengimplementasikan Merdeka Belajar Pada Masa Pandemi COVID-19 Dan Pembiasaan Baru	125
Sabar Budi Raharjo, Etty Sofyatiningrum, Dyah Suryawati, Joko Purnama	
Evaluasi Hasil Akreditasi Sekolah	139
Siswantari, Subijanto, Darmawan Sumantri, Dodi Setiawan, Asri Ika Dwi Martini	
Kajian Kesiapan Sekolah Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum	151
Meni Handayani, Ikhyia Ulummudin, Novrian Satria Perdana, Asma Aisha	

Digitalisasi Pembelajaran	
Pembelajaran Online melalui Platform Cultural Literacy for Digital Society (CLDS) Mochamad Aviandy, Kresno Brahmantyo, Wina Aprilia Tirtapraja, Hilman Handoni, Genardi Atmadiredja	181
Pengembangan Portal Pembelajaran Online Berbasis Artificial Intelligence dalam Kerangka Team Based Learning Bens Pardamean, Harjanto Prabowo, Hery Harjono Muljo, Tjeng Wawan Cenggoro, Teddy Suparyanto, Kartika Purwandari, Alam Ahmad Hidayat, Digdo Sudigyo	193
Pengembangan Model PECS Berbasis Aplikasi Digital sebagai Upaya Penguatan Kecerdasan Visual Spasial Bagi Anak Autistik Rudi Irawanto, A.A.G. Rai Arimbawa, dan Moch. Abdul Rahman	205
Kampus Merdeka	
Kesiapan Perguruan Tinggi dalam Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka Iskandar Agung, Ferdi Widiputera, Parwanto, Noviyanti	221
Efektivitas Pembelajaran Daring di Perguruan Tinggi dalam Masa Pandemi Sarwanto1, Trisno Martono1, Salman Alfarizi Totalia1, Dwi Maryono1, Fairusy Fitria Haryani	229
Strategi Pembiayaan Pendidikan Tinggi C.D. Fajarini, Parwanto, Romeyn, Khairur Raziqin	239
Tata Kelola dan Peningkatan Kompetensi Guru	
Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Guru untuk menunjang Profesionalisme Guru Berbasis Teknologi AI (Artificial Intelligence) dalam Platform Andorid Suyanta, Anik Ghufon, Pujianto, Esti Swastika Sari, Woro Sri Hastuti	269
Program Pendampingan Literasi Berbasis Daring pada Masa Tatanan Baru bagi Guru SMPN Ilza Mayuni, Eva Leilyanti, Tara Mustikaning Palupi	281
Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19 Sylviana Murni, Nadiroh, dan Shandy Aditya	293
Tata Kelola Pendidikan Vokasi	
Kajian Alternatif Model Penggabungan SMK dengan SMA Idris HM Noor, Sri Hidayati, Relisa, Sisca Fujianita	311
Upaya Meningkatkan Kemandirian Lulusan PKBM Di Provinsi Papua Barat dan Papua Melalui Pembelajaran Vokasi Fungsional Etty Sisidiana, Yendri Wirda, Nur Listiawati, Fransiska Nur Aini	329
Pendidikan Vokasi: Menjaga Relevansi SMK di Abad 21 Agus Amin Sulistiono, Sudiyo, Widodo, Khairur Raziqin, Sri Merajiwaty Doenggio	343
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya	
Menyemai Damai, Menapis Intoleransi di Sekolah Muhammad Najib Azca, Hakimul Ikhwan, Mustaghfiroh Rahayu, Moh. Zaki Arrobi	381
Kampung Adat Di Tengah Pandemi COVID-19 Zaenal Abidin Eko Putro	393
Transmisi Pengetahuan Lokal pada Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang Muhammad Agus N., Mahmudah Nur, Abdul Basid	401

I

Pembelajaran di Masa Pandemi

EVALUASI HASIL BELAJAR DARI RUMAH TAHUN AJARAN 2020/2021

Indah Pratiwi, Ika Hijriani, Diyan Nur Rakhmah, Siti Nur Azizah

Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Pada tahun 2020 dunia pendidikan mengalami krisis akibat virus COVID-19. Penyebaran virus yang tak terkendali menyebabkan perubahan pembelajaran yang sangat cepat dari belajar tatap muka menjadi belajar dari rumah (BDR). Untuk itu, tulisan ini akan menggambarkan sejumlah aktivitas BDR dari sudut pandang guru dan murid di seluruh Indonesia. Metode yang digunakan merupakan survei dengan membandingkan pengumpulan data pada Mei--Juni 2020 dan Agustus 2020. Pada survei pertama pengumpulan data dari responden guru di wilayah 3T melalui daring sementara untuk wilayah 3T dilakukan melalui telepon. Survei kedua untuk responden guru dilakukan melalui telepon, baik di wilayah 3T maupun non-3T. Seluruh responden siswa data dihasilkan melalui survei daring. Hasil survei menunjukkan tiga hal. *Pertama*, cara guru lebih variatif dalam mengajar. *Kedua*, menurunnya interaksi siswa. *Ketiga*, jumlah siswa yang memahami pelajaran lebih sedikit dibandingkan dengan siswa yang tidak memahami pelajaran. Ketiga hasil kajian tersebut menunjukkan perlunya upaya mitigasi untuk mencegah kemunduran hasil belajar siswa lebih banyak lagi.

Kata kunci: COVID-19, belajar dari rumah, implementasi belajar dari rumah

A. Pendahuluan

Penyebaran wabah COVID-19 menyebabkan krisis pendidikan dalam waktu yang panjang. Lebih dari satu semester, Pemerintah tidak diberi pilihan selain menutup sekolah demi mencegah penularan virus. Menurut PBB, wabah COVID-19 telah menyebabkan lebih dari 91% siswa di dunia tidak bersekolah karena adanya penutupan sekolah di 188 negara (UN, 2020). Hal senada juga terjadi di Indonesia yang setidaknya 97% siswa tidak lagi belajar di sekolah demi mencegah penyebaran wabah (Zamjani, dkk., 2020). Cepatnya penyebaran wabah menyebabkan kekacauan sistem pendidikan secara global. Pemerintah dituntut untuk secara cepat merespons wabah dalam rangka memprioritaskan keselamatan, tetapi di sisi lain pendidikan harus terus berjalan untuk menghindari *learning loss* pascapandemi.

Learning loss adalah hilangnya pengetahuan dan keterampilan siswa dalam bidang akademik akibat terputusnya akses pendidikan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pada masa pandemi ini sejumlah isu memiliki potensi menyebabkan *learning loss*. Salah satu di antaranya rendahnya kualitas mengajar guru yang disebabkan oleh keterbatasan akses dan keterbatasan penguasaan teknologi yang rendah. Untuk menghindari terjadinya *learning loss*, sejumlah upaya perlu dilakukan. Upaya pertama adalah memonitor seluruh aktivitas belajar-mengajar agar upaya preventif dapat dilakukan.

Atas dasar uraian tersebut di atas, Pusat Penelitian Kebijakan telah melakukan Survei Pelaksanaan Pembelajaran dari Rumah pada Masa Darurat COVID-19 guna merekam aktivitas belajar dari rumah secara berkelanjutan. Survei implementasi belajar dari rumah pertama kali dilakukan pada Juni 2020 atau satu bulan setelah kebijakan belajar dari rumah berlangsung. Hasil survei menunjukkan bahwa

dalam waktu singkat hampir seluruh sekolah di Indonesia dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK telah merespons kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak lagi melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dalam implementasinya proses belajar dari rumah tidak sedikit guru yang masih gagap dalam menggunakan perangkat teknologi sehingga pembelajaran dari rumah belum optimal.

Dengan berkaca pada pengalaman BDR pada semester sebelumnya diharapkan ada proses adaptasi untuk menghadapi tantangan pembelajaran selama BDR. Proses adaptasi ini tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga bagi siswa. Pada Agustus 2020 Pusat Penelitian Kebijakan kembali melakukan survei untuk melihat perubahan yang terjadi pada tahun ajaran 2020/2021. Survei ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan tentang perubahan apa saja yang terjadi antara pada masa awal pandemi pada semester genap tahun 2019/2020 dan pada awal semester ganjil tahun ajaran 2020/2021.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survei telepon. Survei melalui telepon menggunakan dua cara, yaitu (i) pengumpulan data di wilayah tertinggal menggunakan teknik wawancara melalui telepon dan (ii) pengumpulan data di wilayah nontertinggal dilakukan melalui tautan survei. Teknik penyebaran tautan ini dilakukan dengan memberikan informasi kepada responden melalui telepon. Klasifikasi wilayah tertinggal dan nontertinggal didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Responden survei ini terdiri atas guru dan siswa di satu sekolah yang sama pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, baik di wilayah tertinggal maupun nontertinggal, kecuali untuk siswa PAUD tidak dijadikan responden pada penelitian. Siswa SD hanya diambil dari kelas tertinggi, yaitu kelas 6, sedangkan responden siswa SMP, SMA, dan SMK diambil dari perwakilan setiap tingkatan kelas. Guru yang menjadi responden pada penelitian ini dipilih secara acak melalui data pokok pendidikan (dapodik). Setiap satu sekolah diwakili oleh satu guru.

Survei ini menyasar siswa dan orang tua siswa di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, baik negeri maupun swasta, di seluruh wilayah Indonesia. Populasi sekolah sebanyak 217.544 sekolah. Besaran populasi ini didasarkan pada dapodik Kemendikbud dengan data per tanggal 31 Desember 2019. Responden guru dan siswa diambil menggunakan teknik acak bertingkat (*multistage random sampling*) dengan tingkat kepercayaan 95% dan batas galat (*margin of error*) sebesar 5%. Jumlah sampel penelitian sebanyak 384 sekolah.

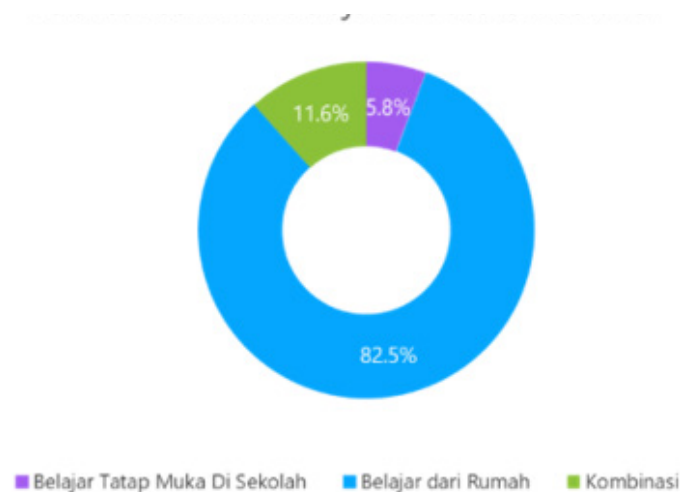
Jumlah sampel guru dan siswa masing-masing sebanyak 384 orang. Jumlah responden guru di jenjang PAUD sebanyak 19,5%; jenjang SD sebanyak 20,8%; jenjang SMP sebanyak 20,1%; dan jenjang SMA serta SMK masing-masing sebanyak 19,8%. Sementara untuk responden siswa di setiap jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sebesar 25%.

Survei pada penelitian ini digunakan untuk melakukan perbandingan data terhadap hasil survei BDR pada Mei 2020 yang juga dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan. Pelaksanaan survei ini memiliki beberapa keterbatasan: *Pertama*, tingkat responden siswa dari wilayah tertinggal tidak memenuhi proporsi ideal karena hambatan komunikasi. *Kedua* perbandingan data hasil survei ini dengan data survei yang telah dilakukan pada bulan Mei 2020, tidak menyasar pada responden yang sama. Selain itu batas galat yang digunakan di kedua survei ini tidak sama sehingga berimplikasi terhadap jumlah sampel yang digunakan.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan SKB 4 Menteri yang dikeluarkan pada Agustus 2020, pembukaan sekolah hanya diperbolehkan bagi daerah yang berstatus zona hijau dan zona kuning dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah daerah setempat. Mengingat bahwa proporsi daerah dengan risiko penyebaran yang cukup tinggi ataupun sedang (zona merah dan oranye) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan risiko rendah, tentu tidak mengagetkan bahwa sebagian besar sekolah masih menerapkan proses belajar dari rumah hingga saat ini. Belajar dari rumah sampai saat ini masih dianggap sebagai mekanisme pembelajaran yang paling aman. Namun, meskipun jumlahnya tidak banyak, ada pula sebagian sekolah yang sudah mulai menerapkan pembelajaran tatap muka, baik di sekolah maupun pembelajaran dengan metode kombinasi (sebagian di rumah dan sebagian di sekolah). Hal ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah dengan risiko penyebaran COVID-19 yang tergolong masih cukup rendah.

Pada awal tahun ajaran baru 2020/2021, sebagian besar sekolah masih menerapkan proses belajar dari rumah (BDR). Hasil survei menunjukkan 82,5% siswa masih melaksanakan proses belajar dari rumah. Angka tersebut merupakan angka yang lebih rendah jika dibandingkan dengan proses belajar dari rumah pada semester lalu yang berada pada angka 97% sekolah yang menerapkan proses belajar dari rumah.

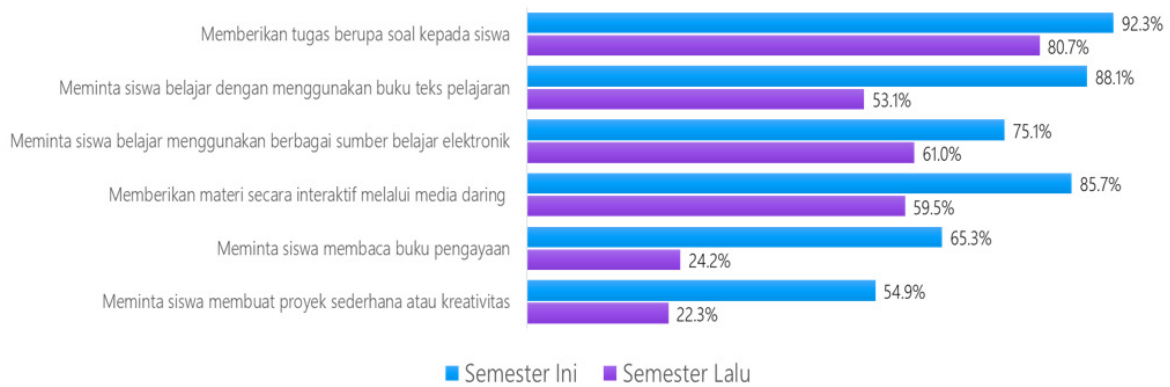


Gambar 1 Pelaksanaan Pembelajaran Secara Nasional

Selain penurunan angka yang menjalankan proses belajar dari rumah, sejumlah perubahan juga terjadi. Dalam hasil survei terdapat tiga perubahan mendasar yang dianggap paling berpengaruh terhadap kualitas belajar, yaitu metode belajar siswa, interaksi guru murid, pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru.

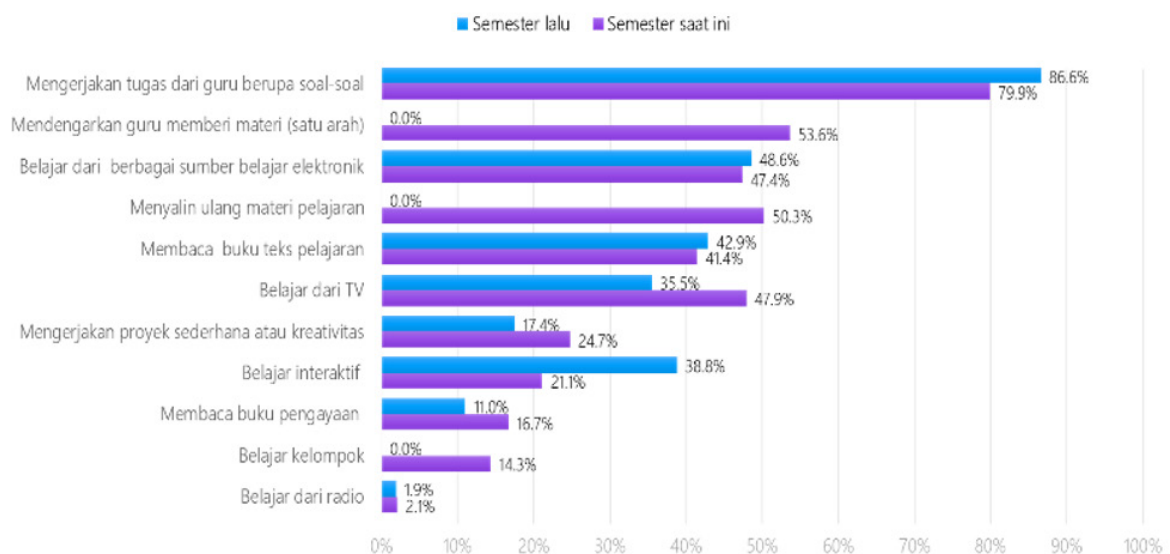
1. Metode Belajar

Metode pembelajaran selama BDR pada tahun ajaran baru ini juga disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas sekolah. Untuk sekolah yang cukup mampu melaksanakan pembelajaran secara daring, baik dari guru maupun siswa, pemanfaatan berbagai *platform* pembelajaran daring dapat diterapkan. Sekolah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara daring dapat melaksanakan BDR secara luring dengan memanfaatkan media komunikasi ataupun melalui pertemuan tatap muka secara terbatas antara guru dan siswa. Perbedaan kondisi ini tentunya turut memberi pengaruh terhadap cara guru mengajar selama masa BDR berlangsung.



Gambar 2 Cara Guru Jenjang Dasar dan Menengah Mengajar (Perbandingan Antarsemester)

Tidak jauh berbeda dengan proses BDR pada semester sebelumnya ketika masa awal pandemi, metode pemberian tugas berupa soal kepada siswa masih menjadi metode pengajaran yang paling banyak dilakukan oleh guru selama proses belajar dari rumah pada tahun ajaran baru ini, yaitu sebesar 92,3%. Namun, pada tahun ajaran baru ini tampaknya para guru sudah mulai beradaptasi dalam melakukan penyesuaian metode mengajar secara jarak jauh, misalnya dengan cara memberikan materi pelajaran secara interaktif melalui media daring kepada siswa. Dengan keterbatasan pertemuan fisik antara guru-murid, metode ini merupakan cara terbaik dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa, khususnya pada kondisi saat ini. Jika pada semester lalu belum banyak guru yang melakukan metode ini, pada semester ini sudah mulai terlihat tren positif dalam hal pemanfaatan teknologi untuk kegiatan pembelajaran, baik dengan menggunakan aplikasi *video conference* maupun *learning management system* (LMS). Pemanfaatan buku pengayaan dan juga pemberian tugas berupa proyek sederhana kepada siswa juga mulai banyak dipilih oleh guru sebagai alternatif metode pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada upaya dari para guru untuk lebih variatif dalam melakukan metode pengajaran kepada siswa dibandingkan dengan sebelumnya. Pelaksanaan proses BDR selama beberapa bulan pada semester yang lalu, menuntut para guru untuk dapat berinovasi dalam hal pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh.

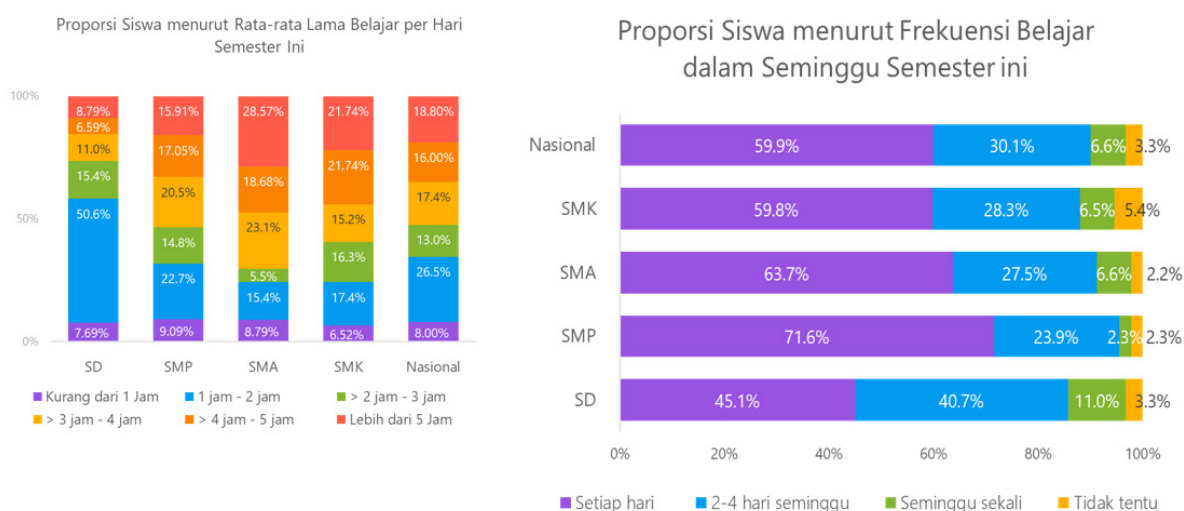


Gambar 3 Metode Belajar Siswa

Pada semester ini pola pembelajaran siswa juga sudah lebih beragam meskipun aktivitas mengerjakan tugas melalui soal-soal masih menjadi cara belajar yang paling banyak dilakukan oleh siswa (79,9%). Metode belajar konvensional yang masih banyak dilakukan oleh siswa adalah aktivitas menyalin ulang materi pelajaran, yaitu sebesar 50,3%. Adapun cara belajar yang sedikit berbeda dari yang biasa dilakukan siswa pada masa normal di antaranya adalah melalui aktivitas mendengarkan guru memberi materi secara satu arah (53,6%), misalnya melalui video pembelajaran yang dibuat dan/atau dikirimkan oleh guru untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, siswa juga sudah cukup banyak memanfaatkan sumber belajar elektronik (47,4%), di samping dari buku teks pelajaran (41,4%) dan buku pengayaan (16,7%).

2. Intensitas Belajar dan Media Ajar

Intensitas belajar merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan belajar siswa. Sardiman (2011: 85) menyatakan bahwa intensitas belajar siswa sangat menentukan tingkat pencapaian tujuan belajarnya, yakni tingkatan hasil belajarnya. Menjaga intensitas belajar siswa menjadi hal yang cukup penting sekaligus menjadi tantangan tersendiri pada masa penerapan BDR ini. Masih ada siswa yang menganggap proses BDR ini seolah-olah seperti masa “libur sekolah” dengan mengesampingkan kegiatan pembelajaran selama di rumah. Ketika di awal pandemi, masih banyak sekolah dan juga guru yang belum cukup siap memberikan pengajaran kepada siswa secara jarak jauh, misalnya belum ada penjadwalan kegiatan pembelajaran yang teratur dan belum menemukan metode pengajaran yang tepat kepada siswa. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga intensitas belajar siswa adalah melalui durasi dan frekuensi belajar yang diterapkan sebagai rutinitas belajar siswa.



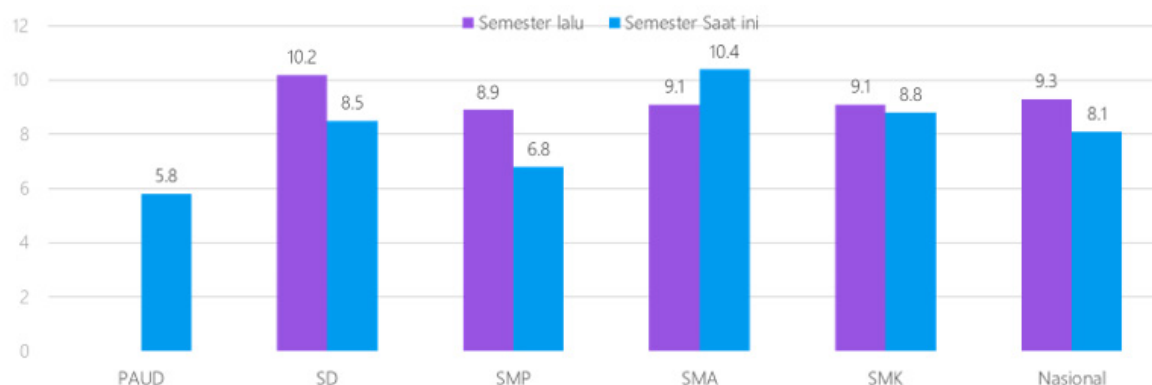
Gambar 4 Proporsi Siswa Menurut Rata-Rata Lama Belajar per Hari dan Menurut Frekuensi Belajar

Jika dibandingkan dengan semester lalu, frekuensi belajar siswa sudah semakin membaik. Berdasarkan hasil survei secara nasional, 59,9% siswa sudah melaksanakan pembelajaran setiap hari dalam seminggu. Sebagian lainnya melaksanakan kegiatan pembelajaran 2--4 hari dalam seminggu, yaitu sebanyak 30,1%. Secara umum mayoritas siswa sudah membentuk rutinitas kegiatan pembelajaran walaupun harus dilakukan secara jarak jauh. Namun, masih ada sebagian siswa yang melaksanakan pembelajaran hanya satu kali dalam seminggu, yaitu (6,6%), bahkan yang lebih parahnya lagi tidak melakukan pembelajaran sama sekali, yaitu sebesar 3,3%. Meskipun secara angka persentase terlihat kecil, kalangan siswa yang minim kegiatan pembelajaran ini perlu menjadi perhatian khusus agar tidak berlangsung berkepanjangan. Dengan menurunnya rutinitas belajar siswa, hal itu akan memengaruhi kualitas hasil belajarnya.

Dengan mencermati rata-rata lama belajar siswa dalam satu hari, ada peningkatan jika dibandingkan dengan semester sebelumnya, yang mayoritas siswanya hanya belajar sekitar 1--2 jam per hari. Untuk semester ini, apabila dilihat dari polanya, tampak ada perbedaan durasi lamanya siswa belajar berdasarkan jenjang pendidikan dan semakin tinggi jenjangnya semakin lama durasi belajar siswa per hari. Pada jenjang SMA dan SMK sebagian besar siswa belajar lebih dari tiga jam dalam satu hari. Jenjang SMP menunjukkan data yang cukup beragam dalam hal durasi lamanya siswa belajar dalam satu hari. Secara persentase siswa SMP paling banyak menjawab belajar selama 1--2 jam, yaitu sebesar 22,7%, tetapi tidak sedikit pula siswa yang menjawab 3--4 jam untuk rata-rata lama belajar dalam sehari, yaitu sebesar 20,5%. Pada siswa jenjang SD mayoritas siswa menjawab bahwa mereka belajar selama 1--2 jam dalam satu hari.

3. Interaksi Guru-Siswa

Dengan terbatasnya pertemuan langsung antara guru dan siswa selama masa pandemi ini, intensitas dalam berinteraksi adalah salah satu cara yang harus diupayakan agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Melalui interaksi yang intensif, guru dapat lebih memahami kondisi siswa, baik terkait penerimaan dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan maupun hal-hal lainnya yang memengaruhi efektivitas kegiatan pembelajaran, seperti halnya kendala perangkat ataupun sumber belajar yang dialami oleh siswa. Dengan demikian, guru dapat merancang model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap siswa sehingga proses kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal. Selain itu, dengan situasi yang mengharuskan siswa belajar dari rumah dan tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman sebagaimana biasanya, hal itu menyebabkan banyak siswa mengalami kejenuhan selama BDR. Tak jarang kejenuhan ini menyebabkan semangat belajar siswa menjadi menurun. Interaksi dengan dapat membantu siswa untuk tetap memiliki motivasi belajar selama di rumah (Iriantara, 2014).

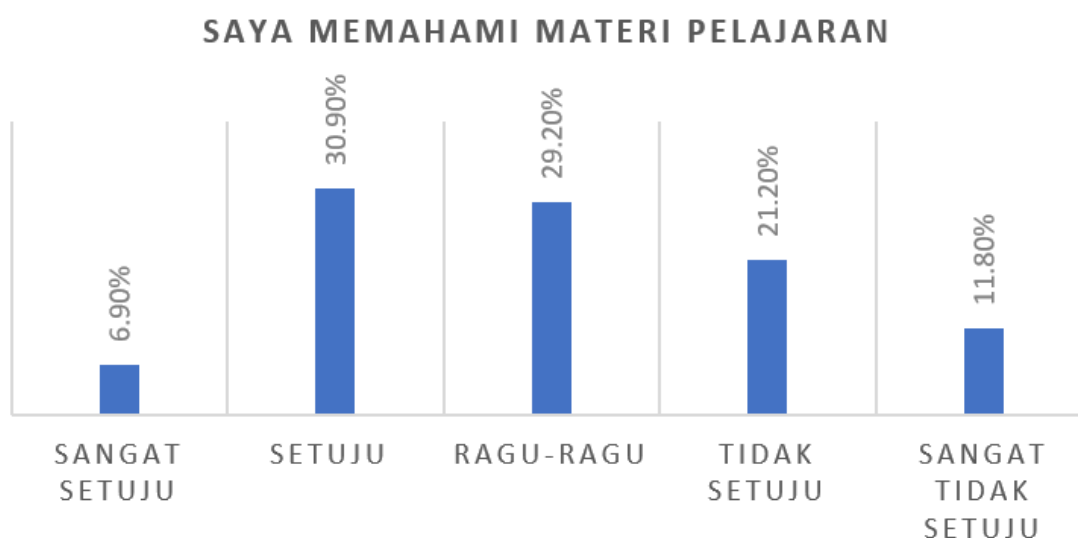


Gambar 5 Rata-Rata Lama Interaksi Guru dan Siswa

Jika dibandingkan dengan hasil survei pada semester lalu, secara nasional ditemukan sedikit penurunan rata-rata lamanya interaksi guru dan siswa. Pada semester lalu setiap guru rata-rata menghabiskan 9,3 jam per minggu atau 1,8 jam per hari untuk berinteraksi dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran (Puslitjak, 2020). Pada semester ini rata-rata guru berinteraksi dengan siswa selama 8,1 jam/minggu. Hampir pada semua jenjang mengalami penurunan rata-rata lamanya interaksi guru dan siswa, khususnya pada jenjang SMP, mengalami penurunan yang paling banyak, yaitu sekitar 2,1 jam/minggu. Hanya pada jenjang SMA saja yang mengalami peningkatan dalam hal rata-rata lamanya interaksi guru-siswa. Walaupun secara umum data menunjukkan adanya penurunan, berdasarkan wawancara dengan beberapa guru melalui metode FGD, tidak sedikit pula yang mengemukakan bahwa

selama masa pandemi ini waktu mereka untuk melayani siswa yang ingin berkonsultasi menjadi lebih panjang, bahkan bisa berlangsung hingga malam hari. Tidak seperti masa sebelum pandemi, interaksi guru dan siswa cenderung lebih terbatas pada saat jam sekolah saja, saat ini batasan waktu tersebut menjadi lebih samar. Interaksi yang terjalin sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Dalam rangka melihat kualitas belajar siswa, pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan dapat menjadi indikator keberhasilan kualitas belajar. Benjamin S. Bloom (Dimiyati dan Mudjiono, 2000). menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perubahan perilaku terkait keberhasilan belajar diantaranya adalah bertambahnya pengetahuan yang terekam dalam ingatan. Selain itu keberhasilan pendidikan juga ditandai dengan meningkatnya pemahaman dan kemampuan dalam memperoleh makna dari materi yang dipelajarinya



Gambar 6 Tingkat Pemahaman Siswa Menurut Persepsi Siswa

Tingkat pemahaman siswa menurut persepsi siswa selama proses belajar dari rumah berlangsung hanya 37,8% siswa merasa mampu memahami pembelajaran sementara 33% siswa merasa kesulitan memahami materi belajar, sisanya menjawab ragu-ragu. Banyaknya siswa yang tidak memahami pelajaran harus menjadi perhatian bersama karena proses memahami pelajaran akan membantu siswa menyerap informasi yang kemudian mewujudkan dalam perubahan perilaku. Pada masa yang akan datang siswa yang tidak memahami pelajaran akan sulit memahami materi belajar pada jenjang berikutnya.

Doepke (2020) pernah menuliskan dalam salah satu laporannya bahwa pola pembelajaran selama pandemi akan menghasilkan variasi kualitas belajar siswa. Pembelajaran jarak jauh memang memungkinkan berkurangnya kualitas pembelajaran sehingga berisiko mengurangi kecerdasan kognitif, sosial, dan spiritual siswa. Terhentinya proses belajar akan menyebabkan risiko berkurangnya pengetahuan pada mata pelajaran matematika sebanyak 4--7 poin. Hal ini biasanya terjadi saat liburan musim panas di negara-negara maju dan memiliki risiko serupa selama pandemi COVID-19

Meskipun telah dilakukan sejumlah adaptasi oleh guru, rendahnya pemahaman siswa selama masa pandemi akan menjadi akan menambah permasalahan pendidikan Indonesia semakin kompleks lagi. Sebelum pandemi menyerang Indonesia, kemampuan siswa Indonesia berada di bawah tiga tingkat jika dibandingkan dengan negara maju (OECD, 2020). Pandemi ini akan mengakumulasi potensi permasalahan pendidikan pada masa yang akan datang, kecuali tindakan mitigasi secara pesat terus dilakukan.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Survei Pusat Penelitian Kebijakan, Kemendikbud, setelah diterbitkannya SKB 4 Menteri pada Agustus 2020 yang mengizinkan pembukaan sekolah pada daerah zona hijau dan kuning menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun, survei kedua ini menunjukkan terjadinya beberapa perubahan dibandingkan dengan temuan survei pertama. Dari sisi metode pembelajaran pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran semakin masif misalnya dengan penggunaan aplikasi *video conference* maupun *learning management system* (LMS). Di kalangan siswa pemanfaatan sumber belajar elektronik juga semakin tinggi dibandingkan dengan survei pada awal pandemi. Pada tahun ajaran baru ini frekuensi belajar siswa relatif meningkat meskipun masih di bawah kondisi normal. Namun, jika dilihat dari sisi intensitasnya, interaksi guru-siswa justru mengalami penurunan.

Temuan survei kedua ini juga menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap tingkat pemahaman belajar selama BDR masih relatif rendah. Masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memahami dan mengikuti materi pelajaran selama PJJ berlangsung. Hasil ini menunjukkan adanya potensi *learning loss* selama masa pandemi ini. Untuk mengantisipasi dampak negatif ini, Kemendikbud perlu mendorong setiap satuan pendidikan untuk melakukan asesmen diagnostik terhadap hasil pembelajaran selama BDR berlangsung. Di tingkat satuan pendidikan asesmen diagnostik akan memudahkan guru dalam melakukan pendampingan belajar kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa tersebut. Di tingkat yang lebih tinggi (daerah dan nasional) asesmen diagnostik akan memudahkan perumusan intervensi/kebijakan yang berpihak pada pemerataan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jena, Pravat. 2020. Online learning during lockdown period for COVID-19 in India. *International Journal of Multidisciplinary Educational Research*. ISSN:2277-7881
- Puslitjak, 2020. Risalah kebijakan: Mengatasi risiko belajar dari rumah.
- Sardiman. 2012. *interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: Rajawali Press
- SKB 4 Menteri tentang Perubahan atas SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19
- Yasol Iriantara. 2014. *Komunikasi Pembelajaran: Intraksi Komunikasi dan Edukatif di Dalam Kelas*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- United Nation. 2020. Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Children. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf
- World Bank. 2020. Guidance Note on Education Systems' Response to COVID-19. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/450881585235950757/Guidance-Note-on-Education-Systems-Response-to-COVID-19.pdf>
- Zamjani, Irsyad, Miftahusururi, Santoso, dkk. 2020. *Laporan survei pelaksanaan pembelajaran dari rumah dalam masa COVID-19: Pandangan Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Pusat penelitian kebijakan
- Kurniasari, Asrilia, Priwibowo Fitroh, dan Deni Adi Putro. 2020. Analisis efektivitas pelaksanaan belajar dari rumah (BDR) selama pandemi COVID-19. *Jurnal Review Pendidikan Dasar*: Vol 6, No 3, September 2020 Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian
- OECD. 2020. Strengthening online learning when schools are closed: The role of families and teachers

in supporting students during the COVID-19 crisis. [Http://Www.Oecd.Org/Coronavirus/Policy-Responses/Strengthening-Online-Learning-When-Schools-Are-Closed-The-Role-Of-Families-And-Teachers-In-Supporting-Students-During-The-COVID-19-Crisis-C4ecba6c/](http://www.Oecd.Org/Coronavirus/Policy-Responses/Strengthening-Online-Learning-When-Schools-Are-Closed-The-Role-Of-Families-And-Teachers-In-Supporting-Students-During-The-COVID-19-Crisis-C4ecba6c/)

Dimiyati & Mudjiono. 2006. *Belajar dan pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta

Doepke, Mathias dan Zilibotti. 2020. COVID-19 and children's education. covid-19 and children's education | psychology today

KESIAPAN PEMBUKAAN KEMBALI SEKOLAH DALAM MASA KENORMALAN BARU

Lukman Solihin, Joko Purnama, Ika Hijriani, Imelda Widjaja, dan Amaliah Fitriah

Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Selama pandemi Bank Dunia (2020) memperkirakan 90% siswa di dunia belajar dari rumah dan sebagian dari mereka tidak mendapat layanan pendidikan yang memadai. Di Indonesia, sejak Maret hingga Juli 2020, diperkirakan sebagian besar siswa (97%) belajar dari rumah, sementara lainnya tidak melakukan pembelajaran sama sekali (Puslitjak, 2020). Siswa mulai mendapat kesempatan belajar di sekolah secara terbatas setelah Pemerintah mengumumkan kebijakan pembelajaran tatap muka di zona hijau yang kemudian diperluas ke zona kuning. Hingga tanggal 18 November 2020, pembelajaran tatap muka telah dilakukan oleh 75% sekolah di zona hijau dan 20% sekolah di zona kuning. Sebaliknya, terdapat pula sekolah di zona non hijau yang mulai melakukan tatap muka, yaitu sekitar 12% di zona oranye dan 8% di zona merah (Kemendikbud, 2020a). Perkembangan ini menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan Kemendikbud untuk menyerahkan kewenangan pembukaan kembali sekolah kepada pemerintah daerah—tidak lagi berdasarkan zona epidemiologi. Kebijakan ini tentu memerlukan dukungan kesiapan para pihak dalam penerapannya. Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud telah melakukan survei nasional guna mengetahui kesiapan dinas pendidikan, sekolah, guru, dan orang tua siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Dalam hal ini, ada beberapa aspek yang dikaji, yaitu wawasan mengenai prosedur pembelajaran tatap muka; pendataan warga sekolah; pencegahan dan penanganan COVID-19; kondisi kerentanan guru dan siswa; kesiapan sarana kesehatan dan kebersihan; serta kebiasaan melakukan protokol kesehatan. Secara umum hasil survei ini menunjukkan bahwa para pihak yang disurvei cenderung siap apabila kebijakan PTM dilakukan. Namun, terdapat beberapa catatan penting, seperti proses pendataan rutin warga sekolah yang belum sepenuhnya dilakukan, serta minimnya pemenuhan sarana sanitasi dan kesehatan untuk mendukung protokol kesehatan.

Kata kunci: pembukaan kembali sekolah, pembelajaran tatap muka, kesiapan sekolah, sarana sanitasi, pendataan warga sekolah.

A. Pendahuluan

Pada 20 November 2020 Pemerintah mengumumkan bahwa kebijakan pembukaan kembali sekolah pada semester genap tahun 2021 diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga tidak lagi berpatokan pada zona epidemiologi (Kemendikbud, 2020a). Sebelumnya, pada 7 Agustus 2020 Pemerintah telah membolehkan kabupaten/kota dengan zona hijau dan zona kuning untuk membuka kembali sekolah (Kemendikbud, 2020b dan 2020c). Data yang dihimpun Kemendikbud sampai 18 November 2020 menunjukkan bahwa kesempatan pembelajaran tatap muka di dua zona tersebut belum dilakukan secara optimal, yakni sekitar 75% sekolah di zona hijau dan 20% sekolah di zona kuning yang telah membuka sekolah. Sebaliknya, terdapat pula sekolah- di zona non hijau yang mulai melakukan belajar tatap muka, yaitu sekitar 12% di zona oranye dan 8% di zona merah (Kemendikbud, 2020a). Perkembangan implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka ini menjadi

salah satu bahan evaluasi Kemendikbud guna menyerahkan sepenuhnya kewenangan pembukaan kembali sekolah kepada pemerintah daerah. Hal itu disebabkan oleh pemerintah daerah dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya.

Sebagian kalangan menganggap bahwa pembukaan kembali sekolah merupakan hal yang mendesak karena pelaksanaan belajar dari rumah menimbulkan berbagai kendala dan masalah, seperti tidak meratanya akses internet, perangkat digital, serta rendahnya literasi digital guru sehingga menyebabkan pembelajaran tidak optimal (Puslitjak, 2020). Survei efektivitas belajar dari rumah (BDR) yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) menemukan bahwa mayoritas siswa yang melaksanakan belajar dari rumah hanya belajar antara dua sampai empat hari per minggu dengan jumlah jam per hari rata-rata kurang dari tiga jam. Sementara itu, rata-rata interaksi siswa dengan guru hanya dua setengah jam per hari (Puslitjak, 2020). , Komunikasi juga menjadi hambatan utama: 87% guru mengeluh orang tua tidak responsif dalam berkomunikasi selama kegiatan belajar dari rumah (SMERU, 2020).

Kesenjangan akses teknologi dan sistem pendukung lainnya merupakan faktor lain yang menghambat. Akses terhadap internet dan listrik belum merata, terutama bagi para siswa di wilayah tertinggal dan dari keluarga kurang mampu. Secara nasional 44% siswa tidak dapat menggunakan sumber belajar secara daring, sedangkan di daerah tertinggal persentasenya lebih tinggi, yaitu 62% (Puslitjak, 2020; Arsendy *et.al*, 2020).

Berbagai kendala dalam proses belajar dari rumah tersebut berdampak pada tidak optimalnya pembelajaran sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan belajar siswa. Survei OECD terhadap 59 negara menemukan bahwa meskipun tersedia pembelajaran alternatif, hanya kurang dari 50% siswa yang dapat mengejar ketuntasan kurikulum (survei OECD dikutip dalam *The Economist*, 18 Juli 2020). Di Indonesia Bank Dunia memperkirakan hasil capaian belajar dari rumah rata-rata hanya sebesar 33% dari capaian belajar normal di dalam kelas (World Bank, 2020). Hal ini memunculkan kekhawatiran hilangnya kemampuan belajar siswa (*learning loss*).

Menurut perkiraan Bank Dunia, penurunan capaian belajar akan berdampak pada menurunnya skor PISA siswa Indonesia, yakni dari skor membaca sebesar 371 pada 2018 diperkirakan akan menurun menjadi 360, 355, dan 350 secara berturut-turut apabila sekolah ditutup selama 4 bulan, 6 bulan, dan 8 bulan (World Bank, 2020). Selain itu, tidak efektifnya proses belajar dari rumah juga berimplikasi pada kesenjangan capaian belajar siswa antarwilayah dan antarkelompok sosial, terlebih bagi siswa yang kurang beruntung yang umumnya bersekolah di sekolah negeri yang berlokasi di perdesaan, khususnya di luar Pulau Jawa (SMERU, 2020).

Penutupan sekolah juga diyakini dapat menghilangkan potensi ekonomi akibat hilangnya kesempatan pendidikan yang optimal, terutama bagi anak dari keluarga miskin. Penutupan sekolah selama 4 bulan diperkirakan dapat mengakibatkan siswa Indonesia kehilangan pendapatan sekitar Rp 3,5 juta per tahun (US\$ 249) dan berpotensi kehilangan sebesar Rp 5,2 juta per tahun (US\$ 484) jika ditutup selama 8 bulan. Penurunan pendapatan itu diakibatkan oleh menurunnya kompetensi siswa yang dapat berdampak sepanjang karier mereka (World Bank, 2020).

Risiko lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah menurunnya kesehatan mental anak dan juga pendidik akibat penerapan pembelajaran jarak jauh. Survei di Indonesia menemukan bahwa proporsi orang dengan gejala depresi pada masa pandemi COVID-19 mencapai 35% (*Kompas.com*, 28/08/2020). Angka tersebut lebih tinggi lima sampai enam kali dibandingkan dengan kejadian depresi pada masyarakat umum berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 (Kemenkes, 2018).

Pandemi telah memicu berbagai tekanan mental sehingga dapat berdampak pada kesehatan jiwa dan psikososial. Dalam diskusi kelompok terpumpun yang dilakukan Puslitjak bersama guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pakar terungkap mengenai kekhawatiran dampak belajar dari rumah

terhadap kesehatan mental siswa dan guru. Data dari Satgas Ikatan Psikologi Klinis Indonesia untuk penanganan COVID-19 yang terlibat dalam diskusi tersebut juga menunjukkan meningkatnya permasalahan psikologis di kalangan anak/remaja. Kesulitan belajar merupakan keluhan paling umum dengan jumlah 25,76%, stres umum 23,43%, dan kecemasan 16,38%. Selain itu, terdapat pula persoalan psikologis seperti tekanan psikis karena mengalami tindakan kekerasan (4,71%), merasa kesepian (4,34%), bahkan kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri (*self harm*) (4,30%) (Data Satgas Ikatan Psikologi Klinis Indonesia belum diterbitkan). Tekanan mental ini, jika tidak ditangani secara saksama, dapat meletup menjadi persoalan yang lebih besar.

Berbagai kendala dan persoalan selama pandemi COVID-19 di atas mendorong Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur kebijakan pembelajaran tatap muka yang ditandatangani oleh empat menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. SKB 4 Menteri pertama kali diumumkan pada 15 Juni 2020 yang berisi keputusan membuka sekolah di zona hijau, kemudian pada 7 Agustus 2020 membolehkan pembukaan sekolah di zona kuning, dan pada 20 November 2020 kebijakan pembukaan kembali sekolah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah tanpa syarat zona epidemiologi.

Kebijakan pembukaan kembali sekolah merupakan masalah krusial karena berada dalam tegangan antara risiko kesehatan di satu sisi dan ancaman kerugian belajar di sisi yang lain. Guna meminimalisasi risiko, kebijakan tersebut memerlukan dukungan kesiapan dari berbagai pihak yang terkait langsung dengan pembelajaran tatap muka. Oleh sebab itu, artikel ini berupaya menyuguhkan hasil survei nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud, guna mengetahui kesiapan dinas pendidikan, sekolah, guru, dan orang tua siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dalam penerapan kebijakan pembukaan kembali sekolah. Melalui hasil survei ini diharapkan dapat diketahui-aspek yang relatif telah siap dan -aspek lain yang masih memerlukan dukungan. Temuan survei ini menjadi landasan rekomendasi kebijakan yang diperlukan guna meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.

B. Metode

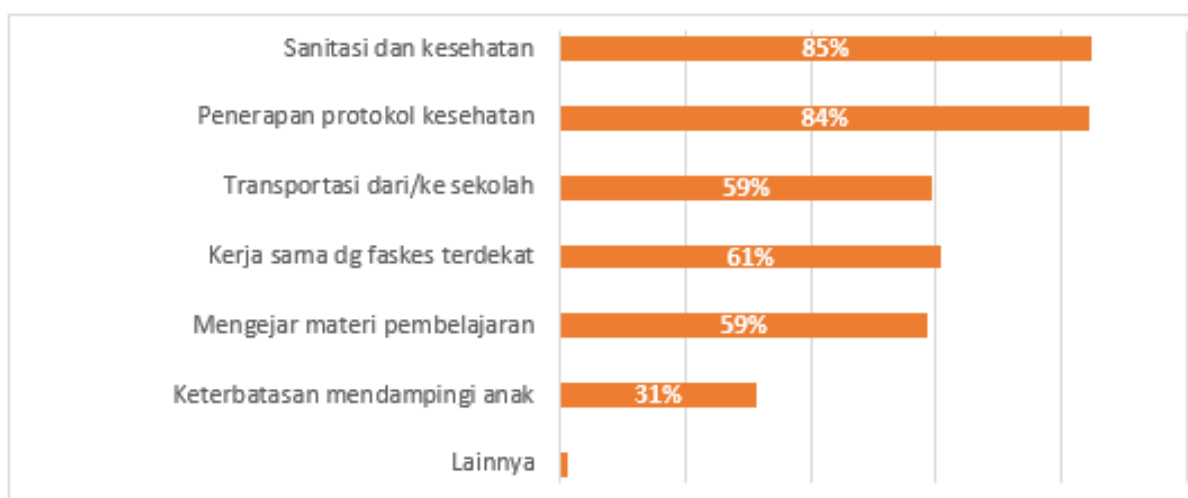
Survei kesiapan para pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan pembukaan kembali sekolah ini dilakukan pada Juli 2020 secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB). Aplikasi SIM PKB merupakan aplikasi yang digunakan oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Pemanfaatan aplikasi SIM PKB dalam penelitian ini dipandang menguntungkan karena instrumen pengumpulan data dapat langsung diakses oleh responden. Sementara itu, instrumen untuk orang tua dibuat terpisah, tetapi tautan survei disebarluaskan melalui aplikasi SIM PKB sehingga melalui perantara guru dan kepala sekolah, orang tua siswa dapat berpartisipasi dalam survei ini.

Survei dibatasi hanya pada jenjang pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Responden survei terdiri atas kepala sekolah, guru, orang tua, dan kepala dinas atau sekretaris dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota, yang jumlahnya diperoleh berdasarkan partisipasi. Secara berurutan jumlah responden survei ini ialah sebagai berikut: 5.527 kepala sekolah, 77.746 guru, 11.054 orang tua, dan 158 kepala dinas atau sekretaris dinas pendidikan kabupaten/kota.

Hasil survei kemudian didiskusikan dalam diskusi kelompok terpumpun (DKT) dengan para pemangku kepentingan: perwakilan dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Satgas Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Masukan dalam diskusi tersebut, selain bermanfaat untuk analisis, juga berguna untuk mempertajam rekomendasi kebijakan dari hasil survei ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan pembukaan kembali sekolah diatur melalui SKB 4 Menteri yang terakhir direvisi dan diumumkan pada 20 November 2020. Meskipun SKB tersebut telah beberapa kali diperbarui, secara umum persyaratan pembukaan kembali sekolah tetap sama. *Pertama*, sekolah harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan dari kanwil/kantor Kementerian Agama (Kemenag) bagi madrasah. *Kedua*, sekolah telah memenuhi daftar periksa, meliputi (a) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, (b) mampu mengakses fasilitas kesehatan terdekat, (c) kesiapan menerapkan protokol kesehatan, (d) memiliki pengukur suhu tubuh tembak (*thermogun*), (e) melakukan pemetaan dan pendataan kondisi warga sekolah, dan (f) membuat kesepakatan dengan komite sekolah. *Ketiga*, mengantongi persetujuan orang tua melalui komite sekolah. Apabila ada orang tua yang merasa keberatan, anaknya dapat tetap melanjutkan belajar dari rumah meskipun mayoritas orang tua melalui komite sekolah memutuskan mendukung pembelajaran tatap muka di sekolah.



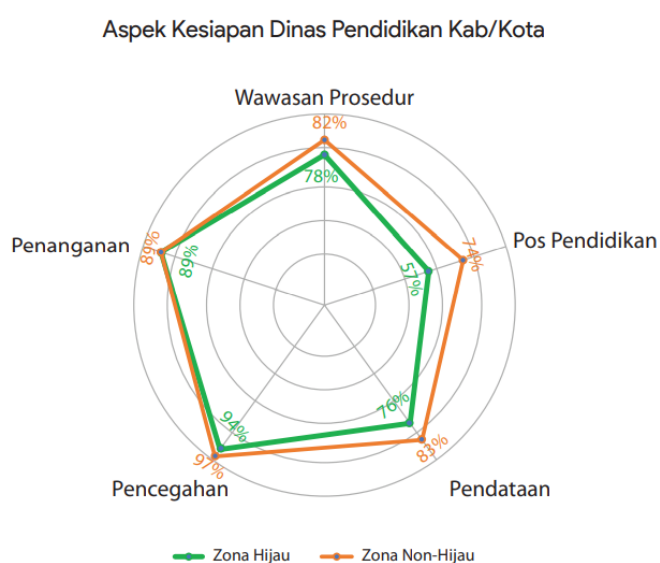
Grafik 1 Pertimbangan Orang Tua dalam Mengizinkan Anak Kembali ke Sekolah

Terkait dengan izin orang tua tersebut, survei ini menunjukkan bahwa faktor utama orang tua dalam mengizinkan anaknya belajar tatap muka di sekolah berkenaan dengan aspek pencegahan dan penanganan penularan COVID-19. Hal itu terlihat dari faktor yang dianggap penting oleh orang tua, antara lain kesiapan sekolah dalam menyediakan sarana sanitasi dan kesehatan (85%); penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, pembatasan jumlah siswa, dan mencegah kerumunan (84%); kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat (61%); dan keamanan transportasi anak menuju dan dari sekolah (59%). Di sisi lain, hanya sekitar 59% orang tua yang menaruh perhatian pada faktor ketertinggalan pembelajaran anak sebagai alasan untuk mengizinkan anak kembali sekolah, serta 31% yang memiliki alasan tidak memiliki waktu dan kemampuan mendampingi belajar dari rumah. Hasil ini menunjukkan bahwa orang tua lebih memprioritaskan aspek kesehatan dan keamanan dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan belajar anak.

Aspek pencegahan dan penanganan penularan COVID-19, sebagaimana menjadi aspirasi orang tua di atas, merupakan hal penting dalam kebijakan pembukaan kembali sekolah. Oleh sebab itu, kesiapan berbagai pihak dalam mendukung kebijakan ini perlu diperhatikan agar implementasinya dapat lebih optimal. Pembahasan berikut ini akan fokus pada kesiapan berbagai pihak terkait dengan kebijakan pembukaan kembali sekolah dengan membedakan hasilnya antara zona hijau dan non hijau. Perbedaan tersebut dalam beberapa hal penting untuk analisis agar terlihat kesamaan dan kontras yang mungkin muncul.

1. Kesiapan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka yang aman. Oleh sebab itu, survei ini menanyakan lima aspek penting terkait dengan peran dinas pendidikan tersebut, antara lain (1) wawasan mengenai prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka, mulai dari tahapan, syarat, serta prosedur pelaksanaan kebijakan pembukaan kembali sekolah; (2) keberadaan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 di bidang pendidikan; (3) pendataan kondisi warga sekolah, seperti kondisi kesehatan, aktivitas dan mobilitas, serta pembaruan pendataan secara berkala; (4) kebijakan pencegahan, antara lain melalui kebijakan dan dukungan untuk memastikan sekolah memiliki sarana kebersihan dan mampu menerapkan protokol kesehatan; serta (5) kebijakan penanganan bagi warga sekolah yang memiliki gejala atau potensi penularan, seperti melakukan deteksi dini dan menjalin kontak dengan fasilitas kesehatan terdekat.



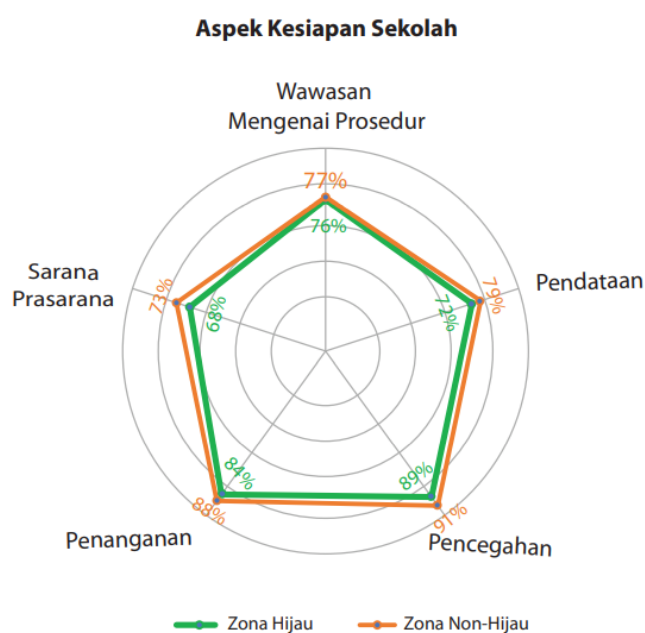
Grafik 2 Aspek Kesiapan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dari kelima aspek di atas, kesiapan dinas pendidikan dalam aspek pencegahan, penanganan, dan wawasan tentang prosedur pembukaan kembali sekolah sudah cukup baik. Sebaliknya, dua aspek lainnya, yakni pendataan warga sekolah dan keberadaan pos pendidikan masih perlu ditingkatkan. Pada kedua aspek ini, terdapat perbedaan mencolok antara zona hijau dan non hijau, yang dalam hal ini dinas pendidikan di zona non hijau relatif lebih baik dibandingkan dengan zona hijau. Zona hijau yang sejak awal telah diperbolehkan membuka sekolah justru belum maksimal melakukan pendataan dan pendirian pos pendidikan. Hal itu boleh jadi terkait dengan kondisi sebagian zona hijau yang tidak terdampak COVID-19 sehingga merasa tidak perlu mendirikan pos pendidikan.

Dari diskusi kelompok terpumpun yang dilakukan juga terungkap keberadaan pos pendidikan belum diketahui luas oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan, seperti guru dan kepala sekolah. Padahal, pos pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Dalam surat edaran itu disebutkan, pos pendidikan bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan yang antara lain bertugas melakukan koordinasi penanganan COVID-19 di daerah, koordinasi dengan Kemendikbud, serta pendataan kondisi sekolah dan warga sekolah pada masa pandemi.

2. Kesiapan Sekolah

Kesiapan sekolah dilihat melalui lima aspek: (1) wawasan mengenai prosedur pembelajaran tatap muka yang harus ditempuh oleh sekolah, seperti tahapan, syarat, dan prosedur pembukaan kembali sekolah; (2) pendataan kondisi kesehatan warga sekolah dan proses pembaruan pendataan secara berkala; (3) pencegahan penularan COVID-19 melalui upaya penyediaan sarana kebersihan dan penerapan protokol kesehatan; (4) penanganan jika warga sekolah memiliki gejala atau potensi penularan; serta (5) kondisi sarana kebersihan dan kesehatan ketika survei ini dilakukan.



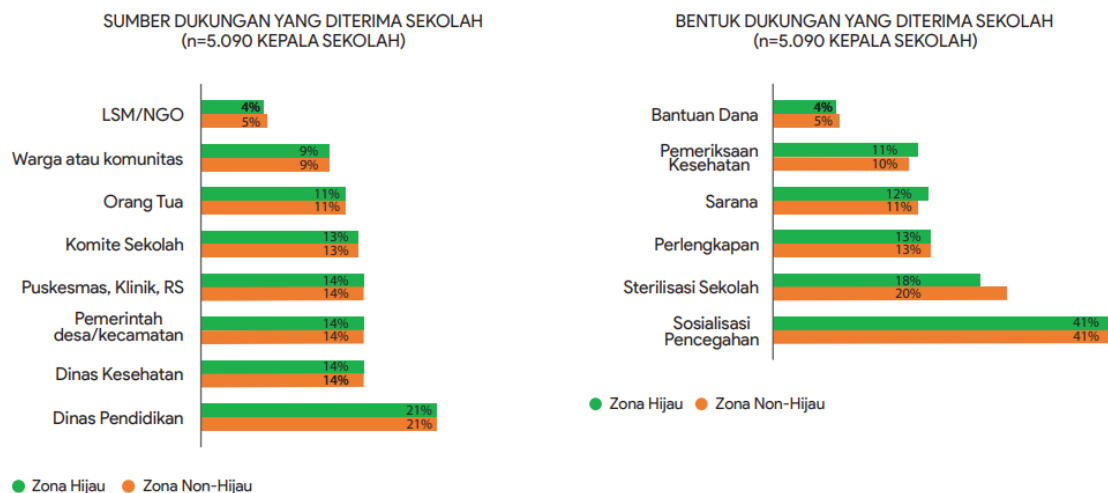
Grafik 3 Aspek Kesiapan Sekolah

Dari kelima aspek yang ditanyakan di atas, aspek pencegahan dan penanganan sudah relatif baik. Namun, tiga aspek lainnya masih perlu ditingkatkan, yaitu wawasan tentang prosedur belajar tatap muka, pendataan kondisi warga sekolah, serta kondisi sarana dan prasarana. Sebagian sekolah belum memahami dengan baik syarat dan prosedur pembukaan kembali sekolah. Selain itu, pendataan warga sekolah juga belum optimal dan tidak rutin dilakukan. Dalam diskusi dengan kepala sekolah dan guru yang kami lakukan terungkap bahwa proses pendataan hanya dilakukan apabila ada perintah dari dinas pendidikan. Pada umumnya sekolah melakukan pendataan di awal masa pandemi, yang sejauh ini belum dilakukan pendataan ulang.

Kondisi sarana kebersihan dan kesehatan juga perlu mendapat perhatian serius mengingat upaya pencegahan penularan COVID-19 sangat bergantung pada kecukupan air, tempat cuci tangan pakai sabun, toilet, desinfektan, alat pengukur suhu tubuh, dan ruang UKS di sekolah. Permendiknas 24/2007 sebetulnya telah mengatur bahwa setiap sekolah seharusnya memiliki ruang UKS yang dilengkapi termometer, toilet dengan ketentuan 1 jamban untuk setiap 60 murid laki-laki dan 1 jamban untuk setiap 50 murid perempuan, serta tempat cuci tangan sebagai kelengkapan di setiap ruang kelas. Namun, hasil survei ini menunjukkan, sebagian sekolah masih kurang atau belum memiliki berbagai sarana dan prasarana tersebut.

Temuan survei ini sejalan dengan hasil Survei Indikator Penyelenggaraan Layanan Pendidikan 2019 dari Bank Dunia yang memperlihatkan terdapat keterbatasan sumber air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan di sekolah. Hanya 50% madrasah di bawah Kementerian Agama dan 56% sekolah di bawah Kemendikbud yang disurvei memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun. Data itu juga menunjukkan

bahwa fasilitas kebersihan sekolah di perkotaan jauh lebih baik daripada sekolah di pedesaan (World Bank, Agustus 2020).

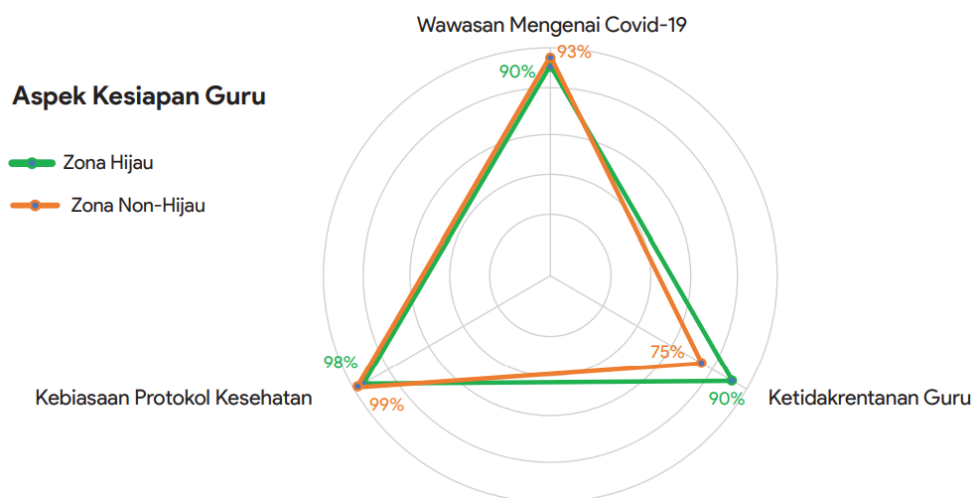


Grafik 4 Dukungan yang Diterima oleh Sekolah

Berkenaan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, sebagian besar sekolah mengaku telah menerima dukungan dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, pemerintah desa/kecamatan, puskesmas, lembaga nirlaba, serta orang tua dan komite sekolah. Dukungan itu sebagian besar berupa sosialisasi pencegahan, tetapi untuk dukungan berupa sterilisasi sekolah, bantuan perlengkapan, sarana, pemeriksaan kesehatan, hingga sokongan dana masih relatif kecil.

3. Kesiapan Guru

Guru merupakan aktor penting dalam pembelajaran yang sering berinteraksi dengan siswa. Untuk itu, ada tiga aspek penting guna mengetahui kesiapan guru, yaitu (1) wawasan guru mengenai gejala, penularan, dan pencegahan COVID-19; (2) kerentanan guru terhadap COVID-19, misalnya riwayat interaksi dengan pasien positif, memiliki komorbiditas, serta akses ke sekolah yang dapat berisiko terhadap penularan; dan (3) kebiasaan melakukan protokol kesehatan, seperti cuci tangan, menggunakan masker, menerapkan etika batuk-bersin, menghindari kerumunan, dan menerapkan jaga jarak fisik.



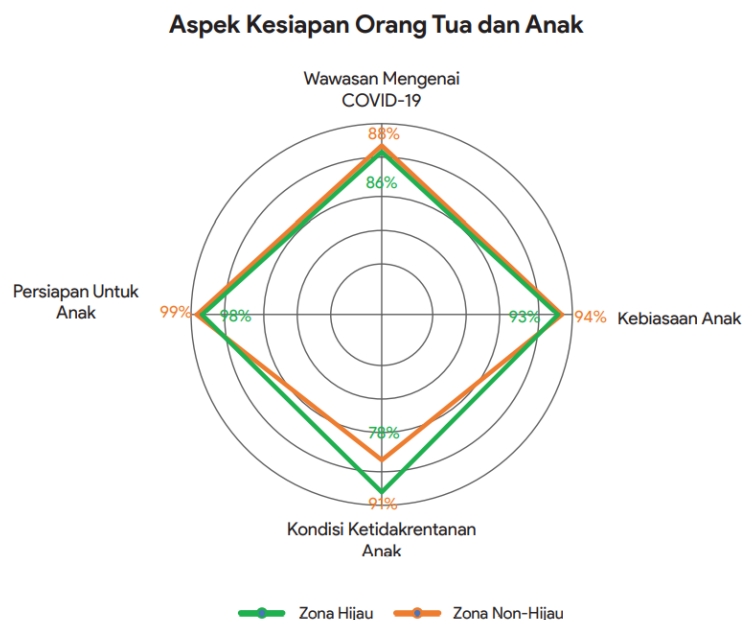
Grafik 5 Aspek Kesiapan Guru

Dari ketiga aspek di atas, aspek kebiasaan dan wawasan sudah relatif baik. Hampir semua guru menyatakan telah menerapkan protokol kesehatan. Begitu pula dari segi wawasan, sebagian besar guru telah paham mengenai gejala, penularan, dan pencegahan COVID-19. Namun, untuk aspek kerentanan, terdapat perbedaan antara zona hijau dan non hijau, di mana guru di zona non hijau memiliki kerentanan lebih tinggi. Aspek kerentanan guru di zona hijau terutama dipengaruhi oleh letak sekolah dan tempat tinggal guru yang berada di zona non hijau yang tingkat penyebaran COVID-19 berada pada level sedang hingga sangat tinggi. Sebagian kecil guru di zona non hijau (tidak sampai 6%) juga mengaku pernah berinteraksi dengan pasien positif dan memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

Terkait dengan isu kerentanan ini, guru dan kepala sekolah dalam diskusi terpumpun menekankan perlunya tes kesehatan sebelum sekolah dibuka, terutama bagi guru dan tenaga kependidikan. Usulan ini cukup masuk akal mengingat kondisi warga sekolah perlu selalu dipantau guna menjamin proses belajar tatap muka dilakukan dalam keadaan sehat dan aman. Beberapa dinas pendidikan juga telah menerapkan kebijakan tes kesehatan sebelum sekolah dibuka kembali meskipun dalam praktiknya sangat bergantung pada anggaran dan prioritas pemerintah daerah.

4. Kesiapan Orang Tua

Peran orang tua dalam memastikan kesiapan anak untuk kembali ke sekolah sangat penting. Dalam survei ini kesiapan orang tua dilihat melalui empat aspek, yaitu: (1) wawasan orang tua mengenai gejala, penularan, dan pencegahan COVID-19; (2) kebiasaan anak dalam melakukan protokol kesehatan; (3) kerentanan anak terhadap COVID-19; dan (4) persiapan orang tua bagi anaknya jika pembelajaran tatap muka dimulai, meliputi penyediaan masker, perlengkapan kebersihan, bekal makan-minum, dan pengetahuan pencegahan.



Grafik 6 Aspek Kesiapan Orang Tua dan Anak

Dari keempat aspek di atas, aspek persiapan untuk anak, kebiasaan anak dalam melakukan protokol kesehatan, serta wawasan tentang gejala, penularan, dan pencegahan COVID-19 sudah relatif baik. Seperti halnya guru, aspek kerentanan siswa antara zona hijau dan non hijau juga terdapat perbedaan cukup kontras. Siswa di zona non hijau cukup rentan karena tempat tinggal dan akses menuju sekolah berada di wilayah penyebaran COVID-19.

5. Disiplin di Luar Sekolah

Selain berbagai aspek yang telah dibahas di atas, hasil diskusi dengan guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan para pakar menyepakati bahwa kondisi di luar sekolah juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Sebagai lingkungan yang terbatas, sekolah diyakini dapat menerapkan protokol kesehatan. Sebaliknya, perilaku warga di luar lingkungan sekolah yang belum menunjukkan tertib dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan menerbitkan kekhawatiran berdampak negatif terhadap kebijakan pembukaan kembali sekolah. Asumsi ini berangkat dari kenyataan bahwa di banyak daerah kegiatan belajar dari rumah justru memicu anak-anak dan remaja banyak bermain di luar rumah.

Pengawasan orang tua dan lingkungan sangat terbatas sehingga disiplin dan protokol kesehatan tidak diindahkan. Jika tidak ditangani dengan baik, perilaku tidak disiplin tersebut dapat terbawa dan berdampak buruk ketika sekolah dibuka. Oleh karena itu, guru dan kepala sekolah meminta agar pembukaan kembali sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta masyarakat perlu bersama-sama mewujudkan disiplin protokol kesehatan.

Pakar kesehatan, kebencanaan, dan perlindungan anak hasil diskusi terpumpun juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan dan kesejahteraan bagi warga sekolah. Keamanan mengacu pada kesehatan fisik, sedangkan kesejahteraan mengacu pada kesehatan mental dan sosioemosional. Data dari Satgas Ikatan Psikologi Klinis Indonesia untuk penanganan COVID-19 menunjukkan meningkatnya permasalahan psikologis di kalangan anak dan remaja sebagaimana telah di sebutkan di bagian pendahuluan. Hal ini perlu menjadi perhatian dan pertimbangan terkait dengan kebijakan pembukaan sekolah. Pendataan dan pengecekan kondisi kesehatan dan kesejahteraan warga sekolah secara berkala merupakan langkah penting yang perlu dilakukan sebelum dan ketika sekolah dibuka.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kebijakan pembukaan kembali sekolah dilatarbelakangi oleh berbagai kendala dan hambatan dalam proses belajar dari rumah sehingga siswa tidak mendapatkan proses belajar yang optimal. Menurunnya kemampuan dan capaian belajar, dampak kerugian ekonomi dan sosial sebagai akibat penutupan sekolah, serta tekanan psikologis yang dihadapi oleh siswa, guru, dan orang tua siswa telah mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pembukaan kembali sekolah.

Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa kebijakan pembukaan kembali sekolah perlu memperhatikan aspirasi orang tua serta kesiapan berbagai pihak dalam implementasinya. Sebagian besar orang tua berpandangan bahwa kesiapan sekolah dalam melakukan upaya pencegahan dan menerapkan protokol kesehatan merupakan hal terpenting jika sekolah dibuka kembali. Untuk memenuhi aspirasi tersebut, dinas pendidikan, sekolah, guru, dan orang tua sendiri perlu menyiapkan diri agar pembukaan kembali sekolah dapat dilakukan secara aman.

Dari survei yang telah dilakukan, secara umum tampak bahwa kesiapan dinas pendidikan, sekolah, guru, dan orang tua dalam mengimplementasikan kebijakan pembukaan kembali sekolah sudah relatif baik. Namun, terdapat beberapa catatan penting yang menjadi rekomendasi dari hasil penelitian ini.

Pertama, pemerintah daerah yang akan melakukan pembukaan kembali sekolah perlu memastikan kondisi keamanan dan kesehatan di daerahnya, terutama tingkat penyebaran virus, serta disiplin dan penerapan protokol kesehatan. Sekolah yang aman dan sehat tidak hanya bergantung pada kondisi sarana dan penerapan protokol kesehatan di sekolah, tetapi juga kondisi di luar sekolah. Kesehatan mental siswa dan guru juga perlu mendapat perhatian.

Kedua, dinas pendidikan perlu membentuk pos pendidikan sebagai upaya serius menangani masalah pendidikan pada masa pandemi. Pos pendidikan merupakan bagian dari Satuan Tugas COVID-19 di daerah yang bertugas melakukan koordinasi untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 bagi warga sekolah serta melakukan pendataan kondisi sekolah dan kondisi kesehatan warga sekolah (SE Sekjen Kemendikbud 15/2020). Dalam membentuk pos pendidikan, dinas pendidikan dapat memaksimalkan struktur yang sudah ada sebelumnya, seperti gugus unit kesehatan sekolah di daerah yang dilengkapi dengan unsur lainnya.

Ketiga, dinas pendidikan perlu melakukan pendataan dan pengecekan kondisi kesehatan warga sekolah secara berkala. Pendataan kondisi kesehatan meliputi data: (a) orang tanpa gejala; (b) orang dalam pemantauan; (c) pasien dalam pengawasan; dan (d) terkonfirmasi positif. Jika dimungkinkan, dinas pendidikan bersama dinas kesehatan juga perlu melakukan tes kesehatan secara rutin, terutama bagi guru dan tenaga kependidikan, untuk menjamin dan memantau kondisi kesehatan sebelum dan selama pembukaan kembali sekolah.

Keempat, menjamin sekolah memiliki sarana kebersihan dan kesehatan yang memadai, meliputi kecukupan air, toilet, sarana cuci tangan pakai sabun, alat pengukur suhu tubuh tembak, dan ruang UKS. Jumlah dan kondisi minimum kelengkapan sarana dan prasarana tersebut telah diatur dalam Permendiknas 24/2007. Perbaikan dan pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana tersebut dapat menggunakan dana BOS sebagaimana diatur dalam Permendikbud 8/2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Kelima, memastikan sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dinas pendidikan setempat perlu melakukan evaluasi berkala dibantu oleh pengawas sekolah yang secara rutin memantau kondisi sekolah. Dinas pendidikan juga perlu membuka kotak pengaduan guna menerima masukan dari orang tua dan masyarakat.

Keenam, sekolah perlu melibatkan dukungan orang tua, baik dalam melakukan persiapan maupun pelaksanaan belajar tatap muka melalui komite sekolah. Dukungan tidak hanya berkenaan dengan “izin orang tua” dalam penyelenggaraan belajar tatap muka, tetapi terutama peran orang tua dalam menjamin siswa aman selama menuju dan pulang dari sekolah, membekali siswa dengan masker, makan dan minum, serta mendukung sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan dan memenuhi sarana dan prasarana kebersihan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsendy, Senza.; Gunawan, Jazzlyne, C.; Rarasati, Niken; dan I Suryadarma, Danie. 2020. Teaching and learning during school closure: Lessons from Indonesia, ISEA perspective, *Issue*: 2020, No. 89.
- Kemendikbud. 2020a. Panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19. (20 November 2020).
- Kemendikbud. 2020b. Penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. (7 Agustus 2020).
- Kemendikbud. 2020c. Panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19. (15 Juni 2020).
- Kementerian Kesehatan. 2018. *Hasil utama Riskedas 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan.
- Kompas.com (28/08/2020). Pemerintah diminta perhatikan kesehatan mental masyarakat saat pandemi Covid -19. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/11320291/pemerintah-diminta->

perhatikan-kesehatan-mental-masyarakat-saat-pandemi-covid

- Puslitjak. 2020. Mengatasi risiko belajar dari rumah. https://puslitjak.kemdikbud.go.id/produk/risalah_kebijakan/detail/313437/mengatasi-risiko-belajar-dari-rumah
- Satgas Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Preliminary results - pendataan psikolog klinis IPK. SMERU. 2020. Belajar dari rumah: Potret ketimpangan pembelajaran pada masa pandemi Covid -19. SMERU Research Institute. <http://smeru.or.id/id/content/belajar-dari-rumah-potret-ketimpangan-pembelajaran-pada-masa-pandemi-covid-19>
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Covid -19
- The Economist, the risk of keeping schools closed far outweigh the benefits, <https://www.economist.com/leaders/2020/07/18/the-risks-of-keeping-schools-closed-far-outweigh-the-benefits>, diakses 18 Juli 2020.
- World Bank. 2020. Temuan inti: Estimasi dampak Covid -19 pada sistem pembelajaran dan pendapatan di indonesia – cara mengubah arus. *The World Bank*, Agustus 2020.

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARI RUMAH PADA MASA DARURAT COVID-19

Irsyad Zamjani, Indah Pratiwi, Ika Hijriani, Diyan Nur Rakhmah, Siti Nur Azizah, Sri Hidayati
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Pada masa awal penyebaran COVID-19, Pemerintah langsung merespons cepat terkait dengan perubahan metode pembelajaran yang aman bagi anak, yaitu dengan ditetapkannya proses belajar dari rumah (BDR). Sebagai bentuk upaya mendapatkan gambaran cepat seputar pelaksanaan BDR, Pusat Penelitian Kebijakan melaksanakan kajian cepat dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei secara nasional. Hal itu sebagai dasar kebijakan Pemerintah berikutnya tentang layanan pendidikan kepada siswa pada masa pandemi. Survei dilaksanakan pada Mei-Juni dalam dua tahap, yang menyasar responden kepala sekolah dan guru pada tahap pertama, dan responden orang tua dan siswa pada survei tahap kedua. Pada survei tahap pertama, pengumpulan data dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi SIM PKB, sementara untuk responden di wilayah 3T dilakukan dengan survei melalui telepon. Untuk survei kedua, pengumpulan data juga dilakukan secara daring melalui aplikasi SIM PKB. Hasil survei menunjukkan, sebagian besar sekolah sudah menerapkan BDR. Kepala sekolah juga sudah melakukan penyesuaian anggaran selama BDR. Dalam proses pembelajaran BDR, metode guru mengajar lebih didominasi dengan cara memberikan tugas berupa soal kepada siswa. Hasil tersebut senada dengan apa yang dikemukakan siswa bahwasanya cara belajar mereka lebih banyak dengan cara mengerjakan tugas berupa soal dari guru. Dalam mendukung jalannya BDR, peran orang tua juga cukup penting. Sebagian besar orang tua sudah memberikan pendampingan kepada anak. Masa pandemi ini menjadi masa bahwa ekosistem pendidikan dituntut untuk melakukan adaptasi secara besar-besaran demi terlaksananya layanan pendidikan kepada anak.

Kata Kunci: COVID-19, belajar dari rumah (BDR), implementasi belajar dari rumah

A. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah mengubah pola aktivitas manusia di banyak bidang, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu dampak besar yang paling terasa adalah penutupan sekolah. Penutupan sekolah sering kali dianggap sebagai langkah taktis dalam menanggulangi penyebaran virus karena siswa cenderung paling potensial dalam transmisi penyebaran virus dibandingkan dengan orang dewasa (Fraser dkk.:2020). Di Indonesia penutupan sekolah dilakukan secara serentak dan berdampak langsung kepada 24.515.901 siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Meskipun keselamatan seluruh warga sekolah menjadi prioritas utama, pemenuhan hak pendidikan bagi siswa tetap harus berjalan. Untuk itulah, Pemerintah menyiapkan sebuah kebijakan Program Belajar dari Rumah (BDR).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Salah satu pokok penting dalam edaran tersebut adalah tentang proses BDR. Surat edaran tersebut menekankan empat ketentuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan BDR sebagai berikut.

1. BDR melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, baik kenaikan kelas maupun kelulusan.
2. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19
3. Aktivitas dari tugas pembelajaran BDR dapat bervariasi antar siswa sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar yang tersedia di rumah
4. Bukti atau produk aktivitas BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Dalam pelaksanaannya kebijakan BDR menuntut adanya inovasi dan penyesuaian aktivitas belajar siswa serta adaptasi interaksi antara guru, siswa, dan orang tua serta aktor lain yang mendukung proses pembelajaran. Bagi guru, diperlukan adaptasi dalam membuat rencana pembelajaran, terutama metode penyampaian atau proses pembelajaran, bahan pelajaran, serta mekanisme penilaian. Bagi orang tua, mereka harus menyisihkan waktu untuk mendampingi, membimbing, dan menyediakan sarana belajar serta memotivasi anak selama proses belajar di rumah. Bagi siswa, mereka harus terbiasa dengan tanggung jawab mengelola waktu belajar secara mandiri. Bagi penentu kebijakan di tingkat daerah, mereka harus memberikan dukungan kebijakan, terutama dalam hal pembinaan dan penyediaan fasilitas yang diperlukan.

Tidak ada satu pun negara yang siap terhadap situasi pandemi ini, termasuk Indonesia. Sebagai sebuah kebijakan baru pada masa darurat, kebijakan BDR tentu tidak luput dari berbagai masalah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), misalnya, melaporkan adanya ratusan aduan yang diterima selama masa pandemi, terutama menyangkut kesenjangan akses teknologi, juga kemampuan guru dan siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan pembelajaran baru (*kpai.go.id*). Selain itu, pemerintah daerah juga belum sepenuhnya siap menangani tantangan pendidikan di tengah wabah. Kemampuan beradaptasi dan ketersediaan sarana prasarana menjadi dua prasyarat utama agar kebijakan pendidikan pada masa kedaruratan ini dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Penelitian Kebijakan bersama unit terkait melakukan survei pelaksanaan pembelajaran dari rumah pada masa darurat penyebaran COVID-19. Hasil survei ini diharapkan dapat memberi gambaran utuh tentang pelaksanaan pembelajaran pada masa darurat COVID-19 yang dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi kebijakan pendidikan pada masa depan agar tetap relevan di tengah berbagai keterbatasan.

B. Metode

1. Teknik Pengumpulan Data

Survei ini merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Untuk survei tahap pertama, pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei daring dan survei melalui telepon. Survei daring dilakukan melalui aplikasi SIMPKB yang dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud. Survei melalui telepon dilakukan oleh tim kajian kepada responden dengan kategori wilayah 3T yang diasumsikan memiliki keterbatasan pada jaringan internet. Untuk survei tahap kedua, yang menyangkut responden siswa dan orang tua, survei daring dilakukan dengan cara memberikan tautan survei melalui dinas pendidikan yang kemudian disebarkan kepada guru. Selanjutnya, guru meneruskannya kepada siswa dan orang tua siswa. Responden survei ini terdiri atas siswa dan orang

tua siswa di satu sekolah yang sama. Untuk siswa SD hanya diambil dari kelas tertinggi, yaitu kelas 6, sedangkan responden siswa SMP, SMA, dan SMK diambil dari perwakilan setiap tingkatan kelas (7-12). Untuk responden orang tua siswa diambil dari perwakilan setiap tingkatan kelas (1-12). Analisis data hasil survei dilakukan dengan statistik deskriptif.

2. Populasi dan Sampel

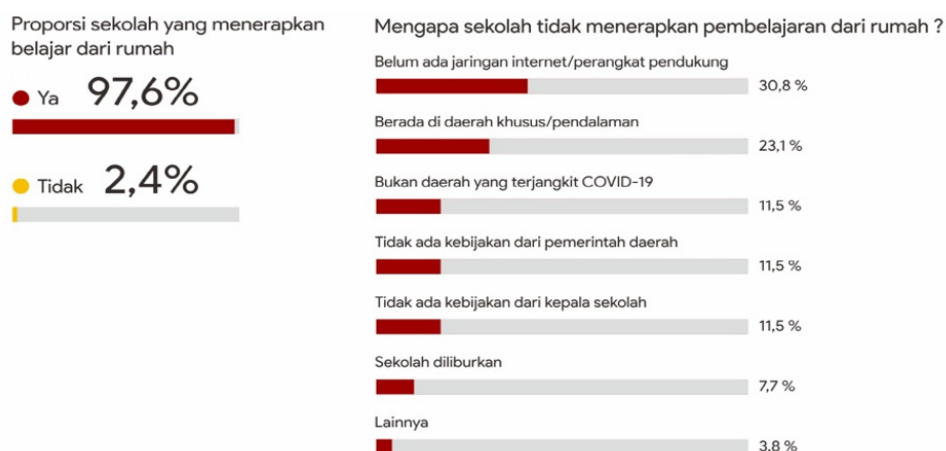
Survei tahap pertama menyasar responden kepala sekolah dan guru dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, baik negeri maupun swasta, di seluruh wilayah Indonesia. Populasi kepala sekolah sebanyak 311.933, sedangkan guru sebanyak 2.734.166. Besaran populasi ini didasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2020. Penghitungan jumlah sampel dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepercayaan (*confidence level*) sebesar 95% dan batas galat (*margin of error*) 3% sehingga dihasilkan jumlah sampel kepala sekolah sebanyak 1.063 dan sampel guru sebanyak 1.067 orang.

Survei tahap kedua menyasar responden siswa dan orang tua siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, baik negeri maupun swasta, di seluruh wilayah Indonesia. Populasi siswa sebanyak 24.515.901 orang yang didasarkan pada data publikasi Kemendikbud, yaitu Statistik Data SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun Ajaran 2019/2020. Responden siswa dan orang tua diambil dengan menggunakan teknik acak bertingkat (*multistage random sampling*) dengan tingkat kepercayaan 95% dan batas galat (*margin of error*) sebesar 3%. Penelitian ini menggunakan *oversample* sebanyak dua puluh kali lipat yang bertujuan untuk mengantisipasi adanya *response rate* yang rendah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Sekolah

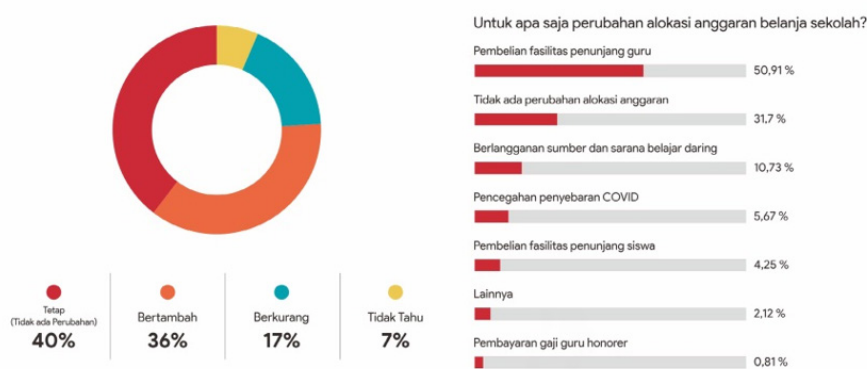
Pembelajaran dari rumah telah diterapkan di hampir seluruh sekolah di Indonesia. Pada umumnya pemerintah daerah mengeluarkan edaran tertulis untuk menindaklanjuti SE Mendikbud Nomor 4/2020 dalam rangka pemberlakuan BDR di sekolah yang berada di wilayah kewenangan mereka. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang belum menerapkan BDR dengan persentase kurang dari 3%. Kendala jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya menjadi alasan utama mengapa sekolah belum menerapkan pembelajaran dari rumah. Selain itu, daerah-daerah yang jauh dari pusat kota yang bukan wilayah terdampak COVID-19 juga kerap memilih untuk tidak melaksanakan BDR. Sekolah-sekolah tersebut pada umumnya berada di daerah khusus/daerah tertinggal.



Meskipun standar pencegahan COVID-19 menekankan pelaksanaan segala aktivitas di rumah, masih banyak sekolah yang secara aktif tetap pergi ke sekolah dengan cara bergantian. Hal ini hampir

terjadi di seluruh kawasan Indonesia, baik di wilayah kategori 3T maupun non-3T. Hasil survei menunjukkan bahwa 44% sekolah masih mengeluarkan kebijakan semi (guru dan tenaga kependidikan tidak bekerja dari rumah selama seminggu penuh) dan 2% lainnya masih mewajibkan guru dan tenaga kependidikan tetap datang secara penuh di sekolah. Kebijakan semi ini ditujukan untuk memastikan manajemen sekolah tetap berjalan.

Kebijakan BDR juga membuat sekolah melakukan berbagai penyesuaian pada aspek alokasi anggaran. Pada umumnya kepala sekolah mengaku tidak terdapat perubahan besaran anggaran belanja sekolahnya (40%). Namun, sebagian besar kepala sekolah mengaku melakukan realokasi anggaran, sedangkan 31,8% lainnya tidak melakukan perubahan alokasi anggaran. Realokasi paling banyak diarahkan pada pengadaan fasilitas pendukung guru untuk melakukan aktivitas pembelajaran jarak jauh, terutama paket data internet. Selain itu, 10,7% sekolah juga memberikan fasilitas berlangganan aplikasi untuk belajar daring seperti *zoom*, *google meet*, dan *edmodo*. Kegiatan pencegahan COVID-19, seperti penyemprotan disinfektan, perbaikan fasilitas sanitasi sekolah dan penyediaan bahan sosialisasi kesehatan untuk siswa dan orang tua, juga menjadi sasaran realokasi anggaran (5,7%).



2. Pengelolaan Pembelajaran oleh Guru

a. Cara Mengajar Guru

Secara umum sebagian besar guru (80,7%) menjalankan BDR dengan memberikan tugas berupa soal kepada siswa. Pada wilayah 3T praktik semacam ini dilakukan oleh hampir semua guru (90,4%). Akan tetapi, di wilayah non-3T, meskipun dengan angka lebih kecil (76,5%), pola yang sama tetap terjadi. Meskipun demikian, 67,1% guru pada wilayah non-3T menyatakan bahwa variasi pembelajaran tetap dilakukan dengan meminta siswa menggunakan berbagai sumber belajar elektronik. Angka ini terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan wilayah 3T yang hanya 46,8% guru melakukannya.

Rendahnya angka pembelajaran interaktif dan sumber belajar elektronik disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap internet dan perangkat digital lain di wilayah 3T. Oleh karena itu, guru meminta siswa belajar menggunakan buku teks pelajaran (63,1%). Untuk kategori wilayah non-3T, responden yang menggunakan buku teks sebagai sumber belajar juga cukup tinggi (48,8%), tetapi agaknya tidak lagi menjadi opsi utama.

b. Sarana Komunikasi

Hasil survei juga menunjukkan penggunaan media sosial di kalangan guru cukup tinggi. Secara nasional 86,6% guru menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi BDR. Jika dilihat dari kategori wilayah, persentase yang tinggi dalam penggunaan media sosial selama BDR ini terjadi, baik di wilayah non-3T (92,7%) maupun di wilayah 3T (72,4%). Hal ini menunjukkan penggunaan media sosial cukup potensial menjadi sarana dalam melakukan pembelajaran dari rumah secara interaktif.

Pemanfaatan sarana komunikasi pembelajaran seperti *platform learning management system* ataupun *video conference* masih terbilang cukup rendah, terutama di wilayah 3T. Padahal, kedua media ini

adalah masa depan pembelajaran interaktif jarak jauh, baik dalam kondisi darurat maupun normal. Selain karena kendala akses internet dan perangkat pendukung, hal lain yang juga turut menjadi kendala adalah minimnya kemampuan guru atau siswa dalam memanfaatkan sarana komunikasi digital sebagai media pembelajaran. Rendahnya komunikasi antara guru dan siswa ini perlu mendapatkan perhatian serius karena melalui interaksi guru dapat memastikan siswa telah menerima dan memahami informasi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, interaksi juga dapat membantu siswa untuk tetap memiliki motivasi belajar selama di rumah (Iriantara, 2014).

c. Penggunaan Aplikasi Belajar Daring

Pada masa pandemi aplikasi belajar daring menjadi sarana penting yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses belajar. Penggunaan aplikasi belajar daring ini memungkinkan siswa tetap mendapatkan hak pendidikan meskipun dari jarak jauh (UNESCO.org). Surat edaran Kemendikbud telah membuat daftar dua belas aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan pembelajaran jarak jauh. Sayangnya, tidak semua guru merekomendasikan aplikasi belajar daring tersebut. Sebanyak 35,2% guru mengaku tidak pernah merekomendasikannya kepada siswa. Adapun aplikasi yang secara nasional paling banyak direkomendasikan oleh guru adalah aplikasi milik Kemendikbud, Rumah Belajar (40,8%). Aplikasi belajar daring lain yang juga populer direkomendasikan oleh guru adalah Ruangguru (32,1%).

d. Ketuntasan Kurikulum

SE Mendikbud No. 4/2020 menyatakan bahwa proses BDR lebih mengutamakan pemberian pembelajaran yang bermakna kepada siswa tanpa terbebani oleh tuntutan ketuntasan materi dalam kurikulum. Sayangnya, tidak semua sekolah mampu menangkap pesan dalam surat edaran tersebut. Dalam praktiknya masih banyak guru (51,6%) yang masih berupaya untuk melaksanakan ketuntasan kurikulum yang bersifat pengetahuan dengan berpikir tingkat rendah dalam aktivitas BDR. Ketuntasan kurikulum masih menjadi target utama oleh sebagian besar guru. Kurikulum tetap dapat menjadi acuan utama pembelajaran tetapi bukan mengejar ketuntasan materi. Meskipun demikian, keterbatasan selama pandemi mendorong guru untuk melakukan penyederhanaan aktivitas belajar (86,4%) dan mengurangi cakupan materi yang diajarkan (45,1%). Pada sisi lain, guru juga sudah mulai mencoba mengintegrasikan pembelajaran kontekstual dengan mengaitkannya dengan materi COVID-19 pada setiap pelajaran (59,2%).

e. Penilaian Hasil Belajar

Umpan balik terhadap siswa tetap menjadi salah satu hal penting untuk dilakukan agar guru dapat memastikan bahwa siswa terlibat selama pembelajaran jarak jauh dan tidak ada satu pun siswa yang tertinggal. Umpan balik yang tepat juga dapat mendorong siswa untuk lebih memahami kelebihan, kekurangan dan keunikan yang dimilikinya, dan membuat siswa merasa mampu (Budiman, 2009). Pada masa pandemi ini umpan balik ditekankan hanya pada penilaian kualitatif untuk mengurangi tekanan siswa selama BDR. Pemberian umpan balik kualitatif dapat mengatasi hambatan emosional dan biasanya diberikan sesuai dengan konteks belajar yang dihadapi siswa (Teklan dkk., 2017). Sayangnya, meskipun anjuran ini telah tertulis dalam surat edaran, lebih banyak guru yang memberikan penilaian kuantitatif (28,1%) dibandingkan dengan kualitatif (21,3%). Namun, cara penilaian yang paling banyak dilakukan oleh guru adalah mengombinasikan kedua jenis penilaian tersebut (46,1%). Sisanya memilih tidak memberikan penilaian sama sekali, khususnya di kawasan 3T cukup banyak guru yang sama sekali tidak melakukan penilaian (12,8%).

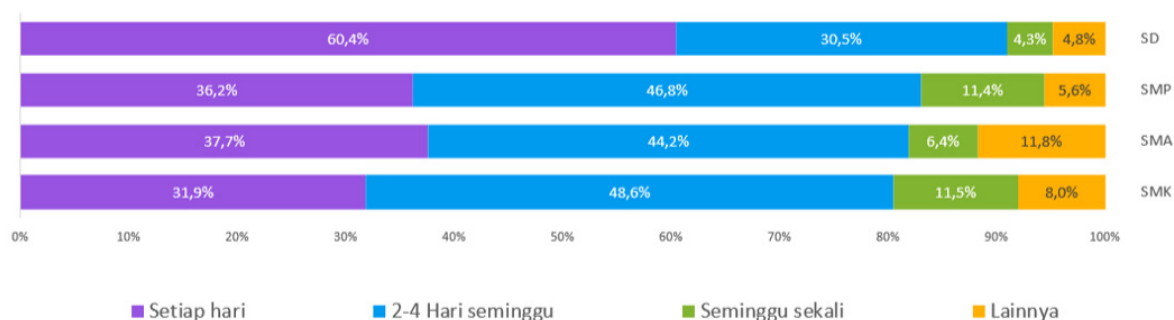
f. Pelaksanaan BDR oleh Siswa

Sejumlah studi menyebutkan bahwa intensitas belajar merupakan salah satu faktor dalam memengaruhi kualitas dan keberhasilan belajar siswa (Andrietti dan Su: 2018 dan Hoffman dan

Muhlenweg: 2017). Studi- tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas belajarnya, semakin tinggi pula peningkatan pengetahuan, pemahaman, kemampuan serta keterampilan siswa . Meskipun intensitas belajar bukan faktor tunggal, erat kaitannya dengan stimulus kinerja otak siswa sehingga meningkatkan kemampuan berpikir dan daya serap. Idealnya aktivitas belajar harus dilakukan setiap hari sehingga dapat membentuk pola kebiasaan dan rutinitas siswa.

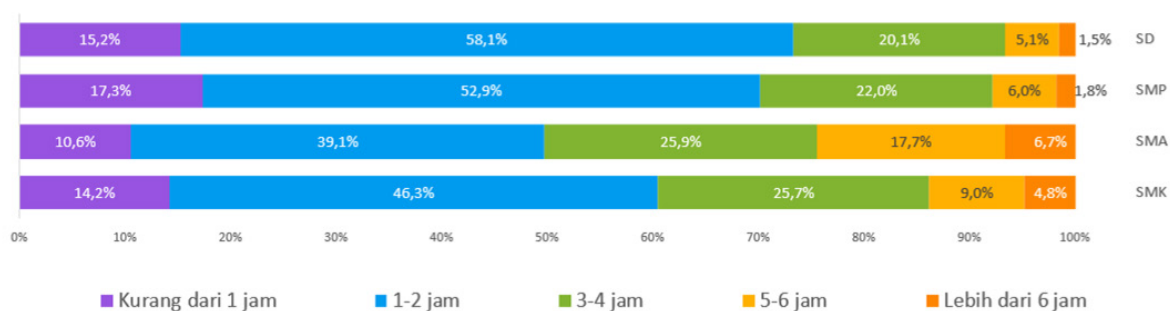
g. Frekuensi dan Durasi Belajar Siswa

Frekuensi siswa belajar dari rumah dalam 1 minggu menurut satuan pendidikan



Pada masa pandemi terdapat sejumlah perubahan, termasuk dalam frekuensi belajar siswa. Tidak semua siswa belajar setiap hari. Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikannya, tampak bahwa semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin rendah angka yang melakukan pembelajaran setiap hari. Pada jenjang SD sebagian besar siswa (60,4%) melaksanakan pembelajaran di rumah setiap hari. Pada jenjang SMP hingga SMA/K lebih banyak yang melakukan pembelajaran belajar 2--4 hari dalam seminggu. Namun, masih ada siswa yang bahkan tidak melakukan pembelajaran dalam satu minggu, terutama pada siswa di jenjang SMA yang mencapai hingga 11,8%.

Lama siswa belajar di rumah dalam satu hari menurut satuan pendidikan



Selain intensitas, durasi atau waktu belajar siswa juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan BDR. Sebagai bahan perbandingan, dalam kondisi normal durasi belajar siswa adalah tujuh jam setiap harinya (jika mengikuti metode lima hari belajar dalam satu minggu). Namun, pada masa pandemi ini sebagian besar siswa mengalami penurunan dalam durasi belajar. Jika dilihat berdasarkan jenjang, sebanyak 73.3% responden siswa SD durasi belajarnya di bawah 3 jam, hanya sekitar 26.7% siswa yang mengaku belajar lebih dari 3 jam. Pada siswa SMP 70.2% responden mengaku bahwa durasi belajar mereka lebih dari 3 jam sementara 29.8% lainnya belajar kurang dari 3 jam. Pada jenjang SMA siswa yang mengaku belajar di atas 3 jam lebih dari 50% responden, sedangkan di SMK hampir 40% responden. Hasil ini menunjukkan pola yang menarik, yaitu semakin tinggi jenjang sekolahnya semakin lama durasi belajar siswa per hari.

h. Cara Belajar Siswa Selama BDR

Dalam kondisi pandemi seperti ini guru dituntut untuk dapat mengelola proses pembelajaran sekreatif mungkin. Sayangnya, selama kebijakan BDR berlangsung, siswa lebih banyak dibebani tugas dan belajar mandiri. Hal ini terlihat dari hasil survei nasional yang menyatakan bahwa lebih dari 80% siswa menjalankan proses belajar dengan cara mengerjakan soal-soal dari guru. Selebihnya banyak siswa yang belajar dari buku teks pelajaran dan sumber media digital. Untuk kegiatan pembelajaran interaktif bersama guru hanya sebanyak 38,8% secara nasional. Di wilayah 3T pembelajaran interaktif dengan guru melalui media daring lebih rendah lagi, hanya sebesar 28%. Kondisi semacam ini tentu bukan kondisi ideal. Selama proses belajar berlangsung proses interaksi antara guru dan siswa merupakan bagian penting dalam transfer pengetahuan.

Cara-cara siswa belajar dari rumah	3T	Non-3T	Nasional
Mengerjakan soal-soal dari guru	93,2%	86,5%	86,6%
Belajar dari buku teks pelajaran	64,2%	42,4%	42,9%
Belajar interaktif bersama guru secara daring	28,3%	39,1%	38,8%
Belajar dari aplikasi sumber belajar daring (Rumah Belajar, Ruangguru, Zenius, dll)	20,2%	28,4%	28,2%
Membuat proyek sederhana/kegiatan praktik/kreativitas	15,3%	17,5%	17,4%
Belajar menggunakan berbagai sumber belajar digital (e-book, Youtube, Google, dll.)	38,6%	48,8%	48,6%
Belajar dari buku-buku non-teks pelajaran	14,8%	10,9%	11,0%
Belajar dari TV	22,2%	35,9%	35,5%
Belajar dari radio	2,5%	1,9%	1,9%
Lainnya	0,1%	0,4%	0,4%

Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan siswa, terdapat perbedaan cara belajar antara siswa jenjang SD dan siswa jenjang di atasnya. Jenjang SD, misalnya, selain mengerjakan tugas, sebagian besar siswa juga menghabiskan waktu belajar dengan belajar dari TV dan dari buku teks pelajaran. Pada jenjang di atasnya siswa belajar dari TV tidak cukup populer. Pada jenjang SMP, SMA dan SMK, metode belajar yang paling banyak digunakan, selain mengerjakan tugas adalah pemanfaatan sumber belajar digital, seperti *youtube* dan *google*. Hal ini tercermin dari hasil survei yang menunjukkan bahwa rata-rata pilihan tersebut dipilih oleh lebih dari 45% siswa.

Cara-cara siswa belajar dari rumah	SD	SMP	SMA	SMK
Mengerjakan soal-soal dari guru	85,9%	86,4%	87,5%	86,9%
Belajar dari TV	62,7%	39,0%	23,5%	13,8%
Belajar dari buku teks pelajaran	53,4%	43,2%	42,3%	31,5%
Belajar interaktif bersama guru	36,6%	35,1%	45,6%	44,6%
Belajar dari sumber belajar digital (Youtube, google, dll)	33,9%	47,1%	59,7%	49,1%
Membuat proyek sederhana	20,3%	16,5%	18,5%	16,5%
Belajar dari aplikasi sumber belajar daring (Rumah Belajar, Ruangguru, Zenius dll)	18,2%	25,6%	41,7%	24,2%
Belajar dari buku non-teks pelajaran	12,4%	10,7%	12,2%	8,4%
Belajar dari radio	1,9%	2,2%	1,4%	1,5%
Lainnya	0,2%	0,4%	0,6%	0,3%

Pada jenjang SD pilihan belajar dari sumber media digital hanya dipilih kurang dari 34%. Angka tersebut pada dasarnya cukup realistis mengingat pada sebagian besar siswa SD masih memiliki akses terbatas terhadap gawai karena dianggap masih membutuhkan pendampingan dibandingkan dengan siswa pada jenjang di atasnya.

3. Pelaksanaan BDR oleh Orang Tua

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar orang tua sudah melakukan pendampingan kepada anak selama proses BDR, yaitu sebesar 89,13%. Hal itu sudah dilakukan, baik oleh orang tua di daerah 3T maupun di daerah non-3T. Namun, masih ada sekitar 10,9% responden orang tua yang tidak bisa mendampingi anak selama proses BDR. Alasan yang paling banyak dikemukakan oleh orang tua adalah karena mereka harus bekerja. Kondisi ini ditemukan, baik pada daerah 3T maupun non-3T. Ada pula yang disebabkan oleh orang tua memiliki tanggung jawab lain di rumah sehingga tidak memungkinkan melakukan pendampingan anak ketika belajar di rumah. Alasan lainnya yang juga menjadi kendala orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah adalah karena tidak menguasai materi pelajaran anak. Pada umumnya hal ini dirasakan oleh para orang tua dari anak jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK. Semakin tinggi jenjang pendidikan anak, tentunya tingkat kesulitan materi pelajarannya pun semakin tinggi. Tidak semua orang tua memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami dan juga mengajarkan konsep materi pelajaran kepada anak.

Dalam memberikan pendampingan kepada anak selama BDR, terdapat perbedaan pola pendampingan yang dilakukan orang tua. Untuk anak pada jenjang SD, orang tua cenderung memberikan pendampingan dengan cara menemani anak ketika belajar dan juga menjelaskan materi pelajaran. Berbeda dengan orang tua dari anak jenjang SMP, SMA, dan SMK yang umumnya memberikan pendampingan dengan cara memotivasi anak. Namun, di sisi lain, orang tua juga merasa membutuhkan keterampilan dalam hal memotivasi anak dalam belajar. Hal ini dikemukakan oleh orang tua siswa dari jenjang SMP, SMA, dan SMK. Untuk orang tua dari anak jenjang pendidikan SD, kemampuan yang paling dibutuhkan oleh orang tua adalah kemampuan menguasai materi pelajaran anak. Mengingat sebagian besar orang tua dari anak jenjang pendidikan SD melakukan pendampingan dengan mengajarkan anak materi pelajaran, penguasaan materi amat diperlukan.

4. Hambatan dalam BDR

Dalam survei ini diupayakan menggali persepsi kepala sekolah, guru, dan siswa mengenai hambatan yang dialami selama proses BDR berlangsung, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal.

a. Kepala Sekolah

Berdasarkan persepsi kepala sekolah, pada umumnya guru terkendala pada keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan sarana digital (67,11%). Dalam hal ini, kepala sekolah merasa bahwa ketidakcakapan guru mengoperasikan perangkat digital menjadi tantangan tersendiri dalam proses belajar jarak jauh. Hal ini secara langsung menyebabkan pelaksanaan aktivitas pembelajaran di rumah terkendala dan sulit berjalan efektif. Keterbatasan dalam hal kepemilikan perangkat digital yang dimiliki siswa juga dianggap menyebabkan proses pembelajaran dua arah sulit dilakukan.

b. Guru

Temuan survei menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara guru dan kepala sekolah dalam melihat hambatan pembelajaran selama BDR. Jika dilihat dari persepsi kepala sekolah, kemampuan guru mengelola media digital menjadi isu utama, sedangkan dari persepsi para guru justru melihat isu kesenjangan akses terhadap internet dan perangkat digital justru lebih mengemuka. Pada persepsi guru, kurang memadainya fasilitas pendukung siswa menjadi sorotan hampir di seluruh wilayah Indonesia (88,7%). Di wilayah 3T hampir seluruh guru mengungkapkan adanya kesenjangan akses siswa terhadap perangkat digital (93,3%) S Pada wilayah non-3T isu ini juga dianggap menjadi masalah oleh sebagian besar guru (86,7%). Tidak sedikit guru juga mengeluhkan sulitnya akses internet, baik di wilayah 3T (73,4%) maupun non-3T (66,5%).

Isu lain yang menjadi tantangan guru selama BDR adalah tentang sulitnya guru mengamati perkembangan siswa (68,2%). Pengawasan terhadap perkembangan siswa di bidang akademik berkurang seiring dengan menurunnya intensitas interaksi langsung antara guru dan siswa. Sebagai akibatnya selama BDR berlangsung, guru mengalami kebingungan dalam melakukan penilaian kepada siswa karena merasa tidak dapat mengamati perkembangan siswa secara langsung. Hambatan lain yang dipicu oleh faktor orang tua juga dirasakan oleh 31,3% guru. Rendahnya dukungan keluarga untuk terlibat secara aktif dengan siswa juga turut menjadi kendala proses BDR.

c. Siswa

Selama menjalani BDR, hambatan utama yang paling banyak dirasakan oleh siswa adalah kesulitan memahami pelajaran, yaitu sebanyak 59%. Hal ini cukup dapat dipahami mengingat siswa harus beradaptasi secara cepat dengan perubahan metode pembelajaran jarak jauh yang memiliki keterbatasan dalam hal menjalin interaksi secara efektif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa juga merasa kesulitan untuk dapat bertanya secara langsung kepada guru terkait dengan pembelajaran. Temuannya 51,7% siswa menganggap hal tersebut sebagai kendala dalam pembelajaran. Hambatan lainnya yang juga banyak dirasakan oleh siswa adalah kesulitan berkonsentrasi ketika melaksanakan pembelajaran dari rumah, yaitu sebanyak 52%. Lingkungan rumah dirasa belum cukup kondusif bagi sebagian besar siswa sebagai tempat belajar. Rasa bosan selama BDR juga sering kali dialami oleh siswa pada saat BDR, yaitu sebanyak 46,7%.

Hambatan belajar dari rumah	3T	Non-3T	Nasional
Kurang konsentrasi	54,3%	51,9%	52,0%
Kesulitan memahami pelajaran	63,5%	59,8%	59,9%
Tidak ada yang mendampingi belajar di rumah	21,5%	17,5%	17,6%
Tidak dapat bertanya langsung kepada guru	55,9%	51,6%	51,7%
Tidak dapat bertanya langsung kepada teman-teman	32,5%	23,7%	24,0%
Bosan	36,3%	46,9%	46,7%
Tidak memiliki perangkat digital (smartphone, laptop, tablet, dsb)	16,8%	3,7%	4,0%
Jaringan internet kurang memadai	50,2%	38,6%	38,9%
Jaringan listrik kurang memadai	14,8%	3,0%	3,3%
Tidak ada hambatan	4,7%	5,5%	5,4%
Lainnya	0,0%	0,2%	0,2%

D. Penutup

Dengan berbagai informasi yang diperoleh melalui survei cepat ini, dapat direfleksikan beberapa hal penting bagi masa depan pembelajaran di Indonesia, terutama pada masa darurat pandemi ini.

1. Kesimpulan

- Hampir semua sekolah melaksanakan proses pembelajaran dari rumah, kecuali sebagian kecil sekolah karena tidak memiliki koneksi internet dan berada di daerah pedalaman.
- Kendala utama guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan pembelajaran dari rumah adalah keterbatasan fasilitas pendukung, keterampilan manajemen pembelajaran, dan pemanfaatan perangkat digital.
- Belum banyak guru yang melakukan pembelajaran secara interaktif dengan siswa meskipun banyak guru yang telah memanfaatkan berbagai sarana media sosial untuk berkomunikasi dengan siswa. Platform pembelajaran daring juga belum banyak dimanfaatkan oleh guru, terutama di daerah 3T.

- d. Siswa masih menganggap guru sebagai sumber belajar utama. Selama BDR siswa lebih banyak belajar dengan mengerjakan soal yang diberikan guru meskipun pembelajaran interaktif dengan guru belum terlalu banyak dilakukan. Akan tetapi, cukup banyak siswa yang juga belajar, baik melalui TV, buku, maupun sumber belajar lainnya.
- e. Orang tua memiliki peran yang cukup sentral dalam pelaksanaan BDR, terutama untuk siswa-jenjang pendidikan dasar. Sebagian besar orang tua siswa SD berperan aktif dalam mendampingi anak belajar dengan membantu menjelaskan materi pelajaran.
- f. Sebagian besar orang tua siswa SMA dan SMK lebih banyak memberikan motivasi. Hambatan orang tua secara umum adalah kesulitan memahami materi pelajaran anaknya.
- g. Kendala psikologis seperti kesulitan konsentrasi dan kebosanan menjadi hambatan utama siswa dalam proses BDR. Untuk itu, kemampuan memotivasi anak sangat penting dimiliki setiap orang tua.

2. Rekomendasi

Berikut ini disertakan beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan:

- a. menyediakan dan memperbaiki kondisi fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh seperti listrik, internet, gawai, dan perangkat komputer/laptop;
- b. membuat skema/model pembelajaran yang bisa dilakukan guru dan siswa yang tidak dapat menggunakan akses internet dengan memanfaatkan lingkungan rumah dan lingkungan sekitar, juga pelatihan dan pendampingan manajemen pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan media pembelajaran daring;
- c. mendorong guru untuk mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi, khususnya media sosial sebagai sarana pembelajaran yang lebih interaktif;
- d. memperkuat peran guru sebagai fasilitator yang dapat membimbing siswa menjalani proses pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih bermakna melalui pendekatan campuran (*blended learning*), yang dapat dilakukan dengan peningkatan kompetensi pedagogi dan penguatan literasi digital guru;
- e. mendorong setiap sekolah memiliki akun *aplikasi learning management system* (LMS) dan *video conference* untuk mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh pada masa krisis dan masa normal (kedua aplikasi ini tetap dapat digunakan untuk membantu guru mengelola pembelajaran secara lebih efektif);
- f. memperkuat peran serta orang tua dalam belajar anak selama dan sesudah masa pandemi, misalnya melalui kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas orang tua sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah, seperti kemampuan nonteknis memotivasi anak dan mengendalikan emosi serta kemampuan teknis memahami materi pelajaran dan literasi TIK;

sekolah perlu membantu orang tua melakukan pendampingan psikologis kepada siswa di bawah koordinasi dan bimbingan guru BK selama masa BDR dan masa transisi masuk sekolah setelah pandemi karena stabilitas emosional anak berpengaruh pada motivasi belajar

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Didin. (tanpa tahun). Perbandingan pengaruh pemberian umpan balik positif (positive feedback) dan umpan balik netral (neutral feedback) dalam pembelajaran penjas terhadap pembentukan konsep diri yang positif siswa SD. http://file.upi.edu/Direktori/fpok/jur._pend._olahraga/197409072001121-didin_budiman/jurnal_sept08.pdf
- Fraser C, Donnelly C.A., dan Cauchemez S. Pandemic potential of a strain of influenza a (h1n1): Early findings. *Science*. 2009;324:1557–1561.
- Sardiman. 2005. *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sarah, Hofmann dan ühlenweg, Andrea M. 2017. *Learning intensity effects in students' mental and physical health – evidence from a large scale natural experiment in Germany*. Essen Germany: CINCH – Health Economics Research Center
- Teklan, Ara *et.al.* 2017. Qualitative and quantitative feedback in the context of competency based education, *Journal of Medical Teacher*, Vol. 39, Issue 12, pp: 1245-1249
- Iriantara, Yasol. 2014. *komunikasi pembelajaran: intraksi komunikasi dan edukatif di dalam Kelas*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- UNESCO. 2020. *Distance learning solution*. <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions>

ANALISIS TERHADAP TANGGAPAN MASYARAKAT DI *TWITTER* SECARA OTOMATIS BERBASIS TEKNOLOGI NLP TENTANG TOPIK PEMBELAJARAN *ONLINE*, KUOTA BELAJAR, DAN KURIKULUM DARURAT

Ayu Purwarianti, Windy Gambetta, Yusrina Sabina, Sugih Biantoro, Relisa, Genardi Atmadiredja,
Teguh Eko Budiarto, Dessi Puji Lestari, Achmad Ramdhan
Institut Teknologi Bandung

ABSTRAK Pemantauan kebijakan yang menggunakan teknologi NLP mampu memberikan kemudahan bagi Pemerintah atau Kemendikbud untuk menemukan pendapat/tanggapan masyarakat dari *twitter*, lalu menganalisisnya dengan cepat. Namun, pada penelitian ini teknologi NLP yang telah ada belum dapat memperoleh akurasi yang tinggi karena data yang digunakan untuk membangun model NLP itu berada pada domain yang berbeda dengan domain tempat teknologi NLP ini diterapkan. Pada penelitian ini domain yang digunakan adalah kebijakan untuk topik pembelajaran *online*, kuota gratis, dan kurikulum darurat. Teknologi kecerdasan buatan tetap membutuhkan koreksi dari manusia karena akurasi yang dihasilkan tidak mencapai 100%. Puslitjak, Kemendikbud, melakukan evaluasi terhadap data yang dihasilkan untuk mengoreksi beberapa hasil klasifikasi sentimen yang kurang sesuai. Selain itu, terdapat kalimat yang apabila dilihat sebagai konteks bebas, sudah sesuai. Namun, jika dilihat dari sudut pandang penerbit kebijakan, maknanya menjadi berbeda. Sebagai contoh, pada konsep sekolah *online* dengan sentimen positif, terdapat ekspresi penanda sentimen *bisa sambil twitteran*. Jika dilihat sebagai kalimat biasa, ekspresi tersebut memang benar memiliki sentimen positif. Jika dilihat dari aspek penerbit kebijakan, hal tersebut menjadi catatan khusus dalam hal efektivitas pembelajaran jarak jauh. Teknologi NLP pada *platform* yang digunakan belum mampu menghasilkan kesimpulan rekomendasi atas hasil analisis.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Internet merupakan sumber informasi yang sangat kaya, di antaranya adalah ketersediaan data teks digital pada media sosial dan berita daring. Berbagai topik dan jenis informasi tersedia di internet, misalnya berita politik, ekonomi, dan nasional, baik bersifat fakta, opini maupun *hoax*. Pada tahun 2018, dari 264,16 juta jiwa penduduk ada sebanyak 171,17 juta jiwa yang sudah terhubung ke internet. Konten yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia bersumber dari media sosial (*nextdigitalmarketer.com*, 2017).

Berbagai informasi dapat diperoleh dari media sosial dan berita daring, contohnya adalah informasi mengenai opini, kondisi, atau keluhan masyarakat terkait dengan isu tertentu. Informasi ini dapat menjadi *feedback* bagi pemerintah/organisasi/perseorangan untuk mengevaluasi langkah-langkah terbaik yang dapat dilakukan. Hal tersebut lebih dibutuhkan ketika suatu isu marak pemberitaannya, sedangkan keputusan perlu diambil dengan taktis. Sebagai contoh, pada masa pandemi virus COVID-19 berlangsung sejak Februari 2020, seluruh pihak (pemerintah, organisasi, media massa, masyarakat) mengeluarkan berbagai topik informasi, opini, dan keluhan seputar COVID-19.

Penggunaan data media sosial sebagai salah satu bahan analisis terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sudah pernah dituangkan di dalam beberapa penelitian. Namun, belum ada yang melakukan analisis kebijakan terkait dengan pendidikan jarak jauh melalui data media sosial. Ada dua kelebihan utama dalam menggunakan data media sosial sebagai alat bantu penganalisisan kebijakan, yaitu jumlah/ukuran data yang besar serta pengambilan data yang bisa dilakukan berkali-kali dalam rentang waktu tertentu. Hal itu memudahkan pembuat kebijakan untuk melakukan analisis terhadap respons masyarakat atas tanggapan pembuat kebijakan dalam bentuk PDCA.

Ketersediaan data media sosial yang sangat besar tidak memungkinkan analisis kebijakan dilakukan secara manual karena setiap data teks harus diperiksa. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu berbasis teknologi *Natural Language Processing* (NLP) untuk melakukan analisis dasar terhadap data teks dari media sosial secara otomatis. Pada saat penelitian ini dilakukan, belum terdapat model NLP yang dibuat untuk menganalisis teks domain kebijakan. Strategi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan model NLP sejenis, tetapi pada domain yang berbeda. Kelemahan dari strategi ini adalah masih rendahnya nilai akurasi hasil yang dikeluarkan oleh model NLP. Oleh sebab itu, masih diperlukan campur tangan manusia untuk memperbaiki hasil dari teknologi NLP tersebut atau bisa disebut sebagai pendekatan *human in the loop*.

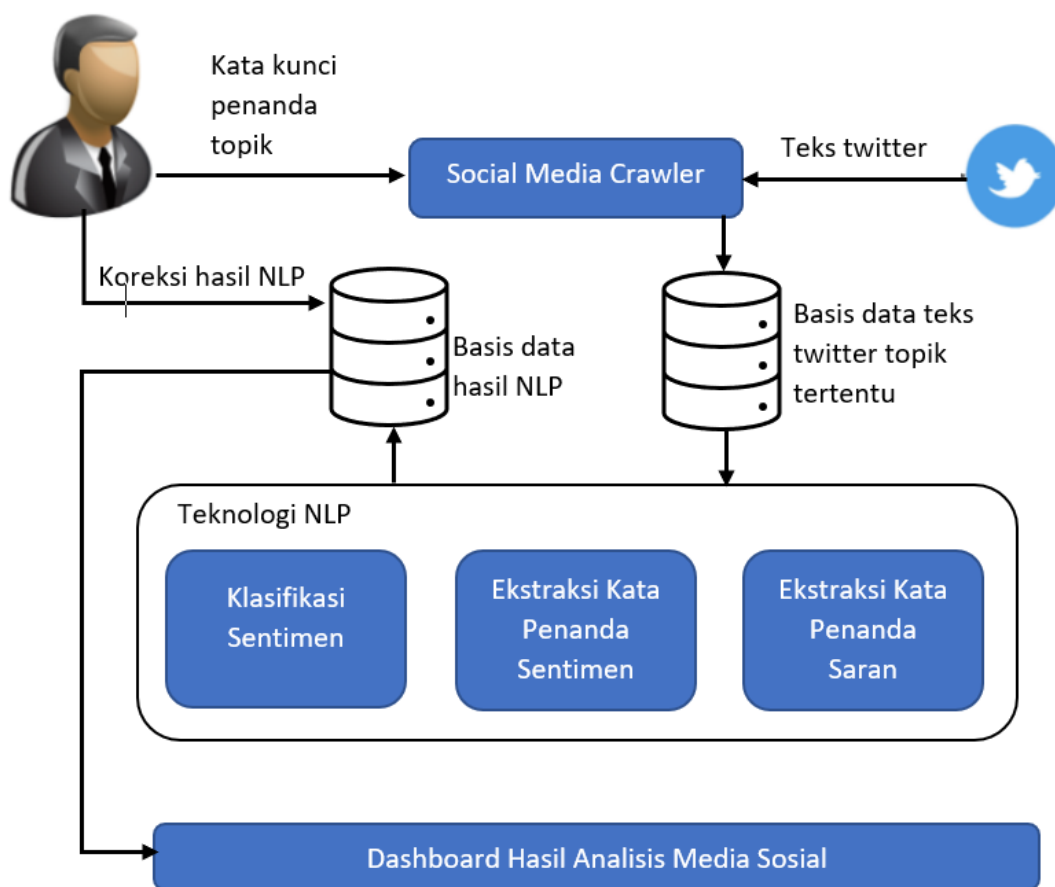
B. Metode

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, strategi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melibatkan peran manusia sebagai pengoreksi hasil teknologi NLP yang digunakan, klasifikasi sentimen/opini, ekstraksi penanda sentimen, serta ekstraksi saran. Klasifikasi sentimen/opini menghasilkan nilai positif/negatif/netral yang berupa pendapat masyarakat terhadap kata-kunci tertentu. Ekstraksi penanda sentimen menghasilkan kata-kata yang menunjukkan pendapat masyarakat pada sebuah teks *twitter*. Ekstraksi saran menghasilkan kata-kata yang menunjukkan saran masyarakat terkait dengan topik yang dimasukkan ke dalam kakas. Tabel di bawah menunjukkan contoh keluaran (*output*) dari setiap jenis teknologi NLP yang digunakan untuk kalimat *Alhamdulillah, pembagian kuota gratis sangat membantu. Mohon disumbangkan juga untuk madrasah*.

Tabel 1 Contoh Hasil Teknologi NLP untuk Analisis Teks Media Sosial

Klasifikasi sentimen	Positif
Ekstraksi sentimen	Sangat membantu
Ekstraksi saran	Disumbangkan juga untuk madrasah

Secara lengkap *flow* dari sistem ini dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini. Peneliti dapat memanfaatkan kakas NLP dengan memberikan kata kunci penanda topik ke dalam system. Dalam hal ini, komponen sosial media *crawler* akan mengambil data dari *twitter* berdasarkan kata kunci tersebut. Hasil dari *crawler* dimasukkan ke dalam basis data teks mentah. Setiap teks hasil *crawler* dianalisis oleh teknologi NLP, terutama untuk tiga fungsi yang hasilnya terlihat seperti dalam Tabel 1 di atas. Hasil dari teknologi NLP dimasukkan ke dalam basis data hasil NLP. Karena model NLP yang digunakan pada teknologi NLP ini sebelumnya dibangun dengan data teks dari domain yang berbeda, diperlukan koreksi terhadap hasil dari teknologi NLP ini. Hasil koreksi dimasukkan ke dalam basis data hasil NLP dan berikutnya isi basis data ini ditampilkan pada *dashboard* untuk memudahkan peneliti melakukan analisis lebih lanjut.



Gambar 1 *Flow Sistem Analisis Kebijakan dari Media Sosial Menggunakan Teknologi NLP dengan Human in the Loop*

Dalam membangun sistem di atas, penelitian ini dilakukan melalui tahap sebagai berikut.

1. Penentuan Topik dan Kata Kunci

Pengambilan data dari *twitter* membutuhkan kata kunci tertentu agar data yang didapatkan lebih spesifik. Pada pemantauan kebijakan, kata kunci perlu ditentukan dan dievaluasi secara berkala agar dapat menangkap perkembangan pendapat/tanggapan masyarakat dari waktu ke waktu dengan berbagai topik.

2. Pengumpulan Data Twitter

Pengumpulan data dari *twitter* dilakukan menggunakan *crawler machine* dengan kata kunci yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan oleh perangkat lunak yang merupakan bagian dari sistem yang ada pada Gambar 1.

3. Klasifikasi data Twitter Otomatis

Data yang telah diambil dari *twitter* kemudian dilakukan proses secara otomatis oleh *NLP engine* dengan mengambil atau mengekstraksi informasi sebagai berikut: klasifikasi sentimen, ekstraksi penanda sentimen, dan ekstraksi saran beserta alasannya (Gambar 1).

4. Koreksi Hasil Klasifikasi oleh Peneliti

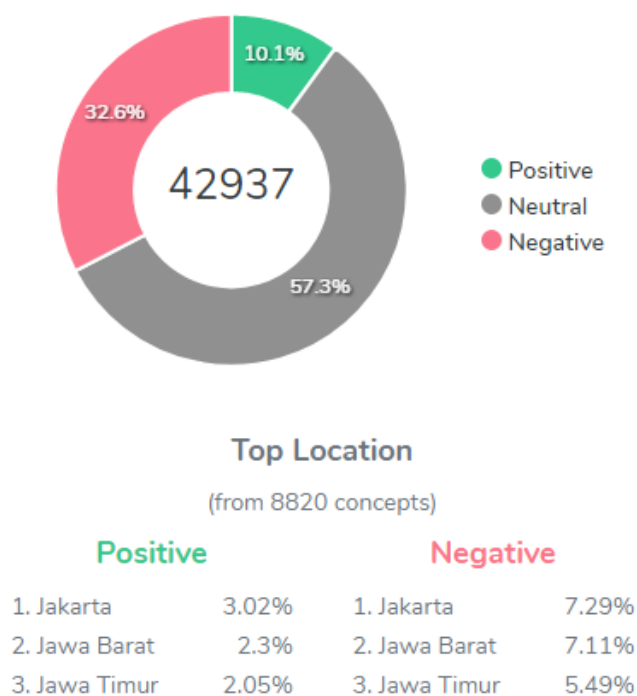
Karena *NLP engine* yang digunakan memiliki domain berbeda dengan topik yang akan diteliti, masih banyak hasil klasifikasi atau ekstraksi yang salah dan perlu dikoreksi oleh tim peneliti.

5. Analisis Hasil Klasifikasi oleh Peneliti

Dari data *twitter* yang berhasil diunduh dan hasil klasifikasi/ekstraksi oleh *NLP engine* akan analisis lebih mendalam yang bertujuan untuk mengambil inti sari penting terkait dengan kebijakan di bidang pembelajaran *online*, bantuan kuota, dan kurikulum darurat.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan 28 kata kunci yang telah ditentukan, data diambil pada rentang waktu 10 Agustus hingga 12 Oktober 2020 dari media sosial *twitter*. Total data yang diperoleh adalah sebanyak 40.053 data dengan 30.958 (77%) data yang mengandung sentimen (positif/negatif). Total data konsep sebanyak 42.937. Sepuluh konsep teratas yang dihasilkan adalah kuliah *online*, ospek *online*, sekolah *online*, pembelajaran jarak jauh, kuliah *offline*, pembelajaran *offline*, sekolah *offline*, bantuan kuota, kuota belajar, serta tugas.



Gambar 2 Hasil Data Secara Umum

Secara umum konsep netral mendominasi klasifikasi sentimen yang dihasilkan. Selain konsep netral, terdapat 14.007 (32.6%) konsep negatif serta 4.327 (10.1%) konsep positif. Dari 32.937 total data berdasarkan konsep, terdapat 8.820 (20.54%) data yang memiliki informasi lokasi. Berdasarkan data informasi lokasi tersebut, terdapat informasi persebaran lokasi di tiga provinsi teratas dilihat dari klasifikasi sentimen positif serta negatif. Pada konsep negatif tiga provinsi teratas adalah DKI Jakarta (7.29%), Jawa Barat (7.11%), dan Jawa Timur (5.49%). Begitu pula pada konsep positif dengan persentase DKI Jakarta (3.02%), Jawa Barat (2.3%), dan Jawa Timur (2.05%).

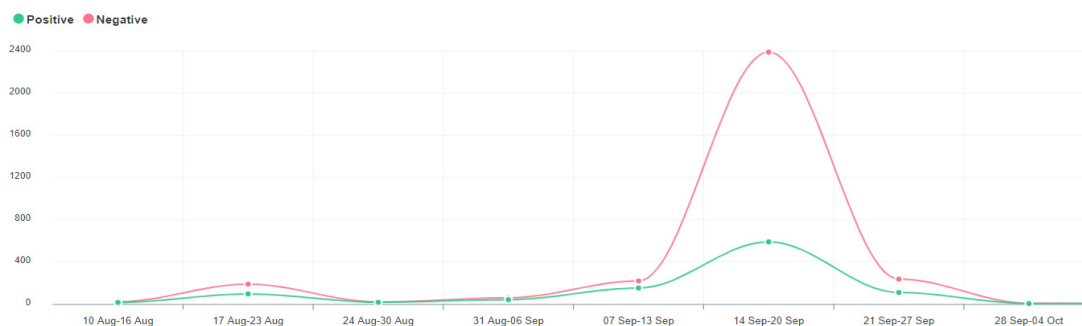
Dari konsep yang ter ekstraksi, akhirnya dipilih beberapa konsep yang akan dianalisis lebih lanjut dengan pertimbangan relevansi dan kebutuhan. Konsep tersebut kemudian dibagi menjadi tiga

kelompok, yaitu pembelajaran *online*, kuota belajar, dan kurikulum darurat dengan anggota konsep seperti yang terdapat pada Tabel 2.

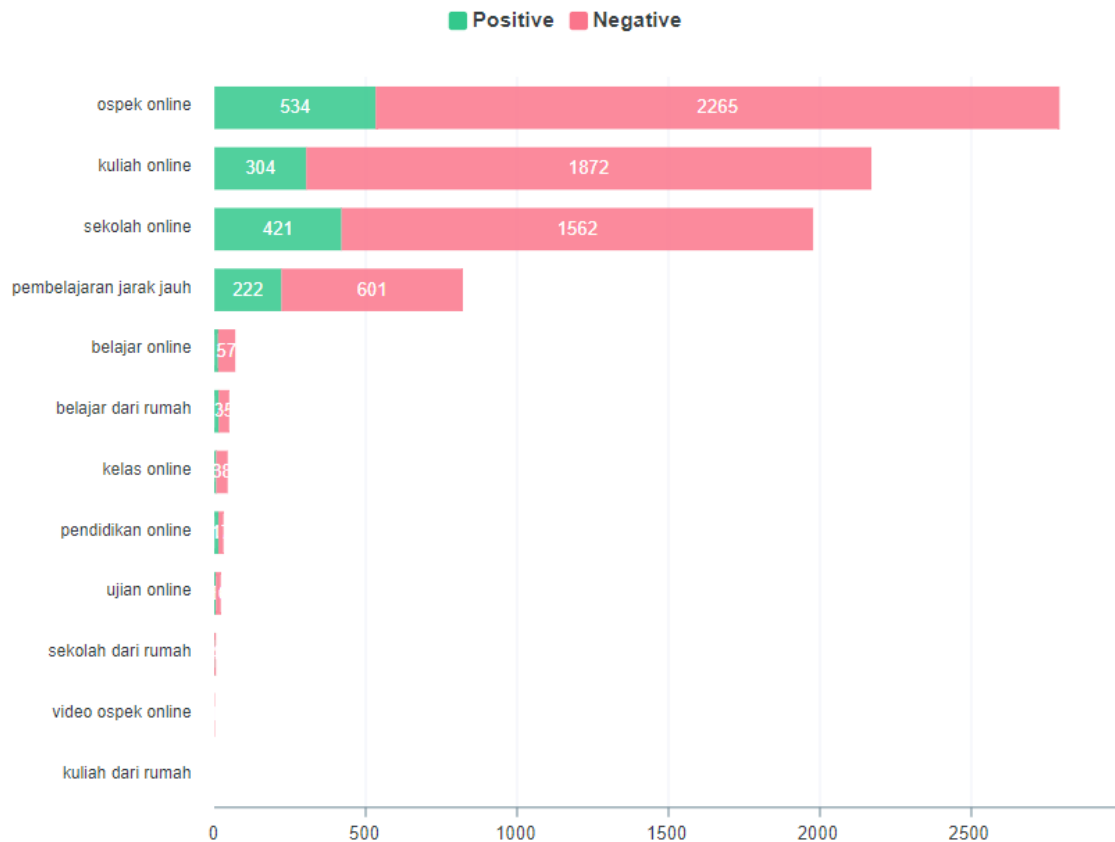
Tabel 2 Kelompok Konsep Pembelajaran Jarak Jauh

Kelompok Konsep		
Pembelajaran Online	Kuota	Kurikulum Darurat
Kuliah <i>Online</i>	Kuota Bantuan	Kurikulum Darurat
Sekolah <i>Online</i>	Bantuan Kuota	Kurikulum Covid
Ospek <i>Online</i>	Kuota Belajar	Kurikulum Kondisi Khusus
Pembelajaran Jarak Jauh	Subsidi Kuota	
Kelas <i>Online</i>	Kuota Subsidi	
Ujian <i>Online</i>	Kuota Internet Gratis	
Belajar <i>Online</i>	Kuota Internet Pendidikan	
Pendidikan <i>Online</i>	Kuota Gratis	
Video Ospek <i>Online</i>		
Belajar dari Rumah		
Sekolah dari Rumah		
Kuliah dari Rumah		

Pada kelompok konsep *pembelajaran online* terdapat 16.566 total konsep dengan 5.605 (33.8%) konsep negatif yang tersebar paling banyak di DKI Jakarta (8.43% dari 3.415 konsep) dan 1.319 (8%) konsep positif yang tersebar paling banyak di Jawa Barat (2.14% dari 3.415 konsep). Pembicaraan meningkat pada rentang waktu 31 Agustus hingga 20 September 2020, kemudian menurun hingga 4 Oktober 2020.

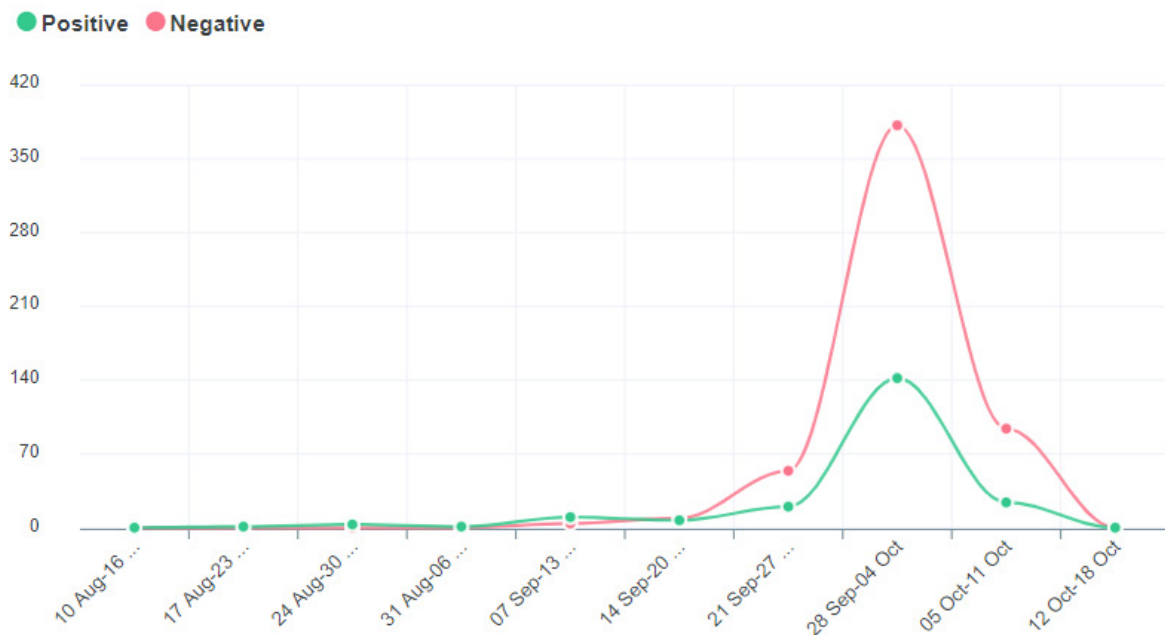


Gambar 3 Tren Data Sentimen pada Kelompok Konsep Pembelajaran *Online*



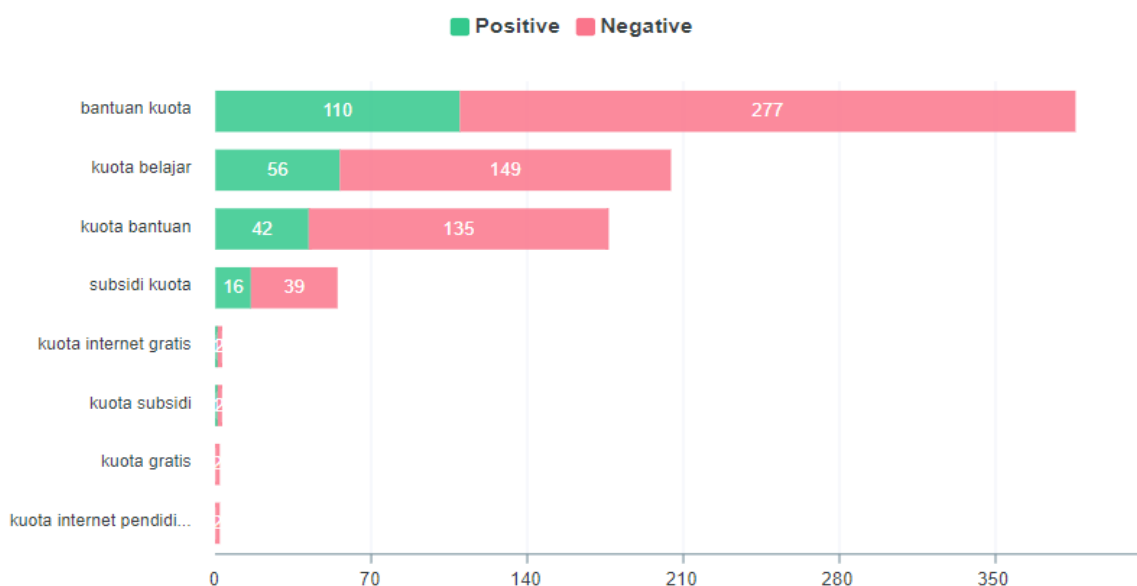
Gambar 4 Grafik Frekuensi Sentimen pada Kelompok Konsep Pembelajaran Online

Pada kelompok konsep *kuota belajar* terdapat 2.317 total konsep dengan 520 (22.4%) konsep negatif yang tersebar paling banyak di Jawa Barat (5.13% dari 429 konsep) dan 198 (8.5%) konsep positif yang tersebar paling banyak di DKI Jakarta (2.56% dari 429 konsep). Pembicaraan meningkat pada rentang waktu 21 September hingga 4 Oktober 2020 dan menurun hingga 12 Oktober 2020.



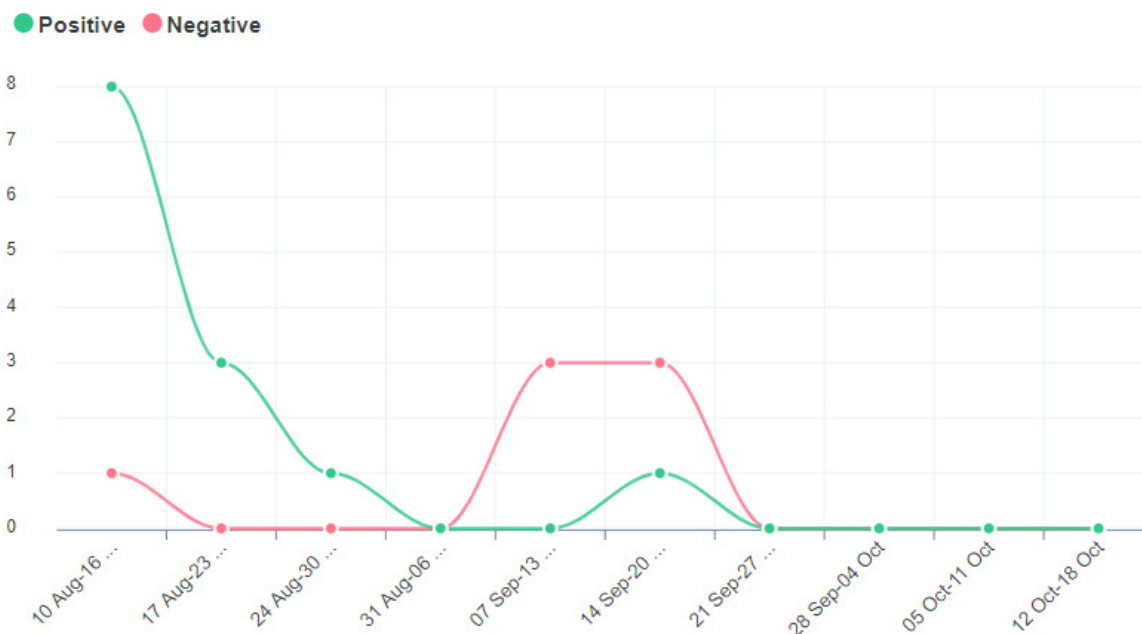
Gambar 5 Tren Data Sentimen pada Kelompok Konsep Kuota Belajar

Concept Sentiment Frequency

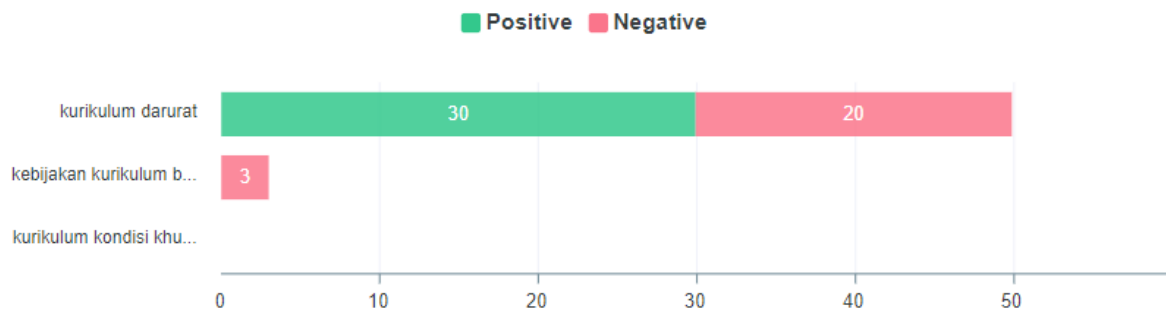


Gambar 6 Grafik Frekuensi Sentimen pada Kelompok Konsep Pembelajaran Online

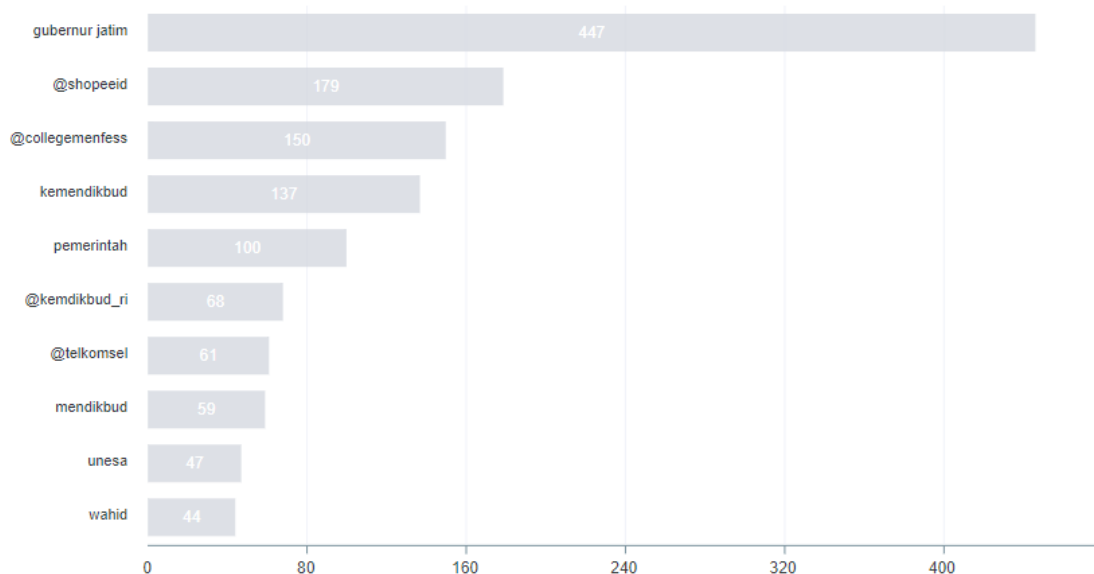
Pada kelompok konsep *kurikulum darurat* terdapat 207 total konsep dengan 15 (7.2%) konsep negatif yang tersebar paling banyak di Jawa Barat (2.41% dari 83 konsep) dan 23 (11.1%) konsep positif yang tersebar paling banyak di DKI Jakarta (3.61% dari 83 konsep).



Gambar 7 Tren Data Sentimen pada Kelompok Konsep Kurikulum Darurat



Gambar 8 Grafik Frekuensi Sentimen pada Kelompok Konsep Kurikulum Darurat



D. Kesimpulan

Pemantauan kebijakan yang menggunakan teknologi NLP mampu memberikan kemudahan bagi Pemerintah atau Kemendikbud untuk menemukan pendapat/tanggapan masyarakat dari *twitter*, lalu dan menganalisisnya dengan cepat. Namun, pada penelitian ini teknologi NLP yang telah ada belum dapat memperoleh akurasi yang tinggi karena data yang digunakan untuk membangun model NLP itu berada pada domain yang berbeda dengan domain tempat teknologi NLP ini diterapkan. Pada penelitian ini domain yang digunakan adalah kebijakan untuk topik pembelajaran *online*, kuota gratis, dan kurikulum darurat.

Teknologi kecerdasan buatan tetap membutuhkan koreksi dari manusia karena akurasi yang dihasilkan tidak mencapai 100%. Puslitjak, Kemendikbud, melakukan evaluasi terhadap data yang dihasilkan untuk mengoreksi beberapa hasil klasifikasi sentimen yang kurang sesuai. Selain itu, terdapat kalimat yang apabila dilihat sebagai konteks bebas, sudah sesuai. Namun, jika dilihat dari sudut pandang penerbit kebijakan, maknanya menjadi berbeda. Sebagai contoh, pada konsep sekolah *online* dengan sentimen positif, terdapat ekspresi penanda sentimen *bisa sambil twitteran*. Jika dilihat sebagai kalimat biasa, ekspresi tersebut memang benar memiliki sentimen positif. Jika dilihat dari aspek penerbit kebijakan, hal tersebut menjadi catatan khusus dalam hal efektivitas pembelajaran jarak jauh. Teknologi NLP pada *platform* yang digunakan belum mampu menghasilkan kesimpulan rekomendasi atas hasil analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Androutsopoulou, Aggeliki; Charalabidis, Yannis; dan Loukis, Euripidis N., using social media monitoring for public policy making - an evaluation. (2015). MCIS 2015 Proceedings. 8.
- Ceron, Andrea dan Fedra Negri. (2016). The Social side of public policy: monitoring online public opinion and its mobilization during the policy cycle. *Policy & Internet*. 8. 10.1002/poi3.117.
- Giovanetti, Roman. (2016). Model of computer architecture for social networks flexible data analysis: The case of twitter data. IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining
- Humbatov, Shahriyar (2015). *Brand management with social media: In service industry*. Hamburg, Anchor Academic Publishing.
- Leavey J. (2013). Social media and public policy: What is the evidence?, «Alliance for Useful Evidence». <http://www.alliance4usefulevidence.org/assets/Social-Media-and-Public-Policy.pdf>
- Wallis, Cara (2011). New media practices in China: Youth patterns, processes, and politics. *International Journal of Communication* 5, 406--436.
- Weyrauch, V. (2012). *Toolkit N°3: Design/establishing the pillars of media strategy. in: how to monitor and evaluate policy influence?* Buenos Aires: CIPPEC.
- William, Marcellino; Smith, Meagan L.; Paul, Christopher, dan Skrabala, Lauren (2017). Monitoring social media: Lessons for future department of defense social media analysis in support of information operations, Rand Corp.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Rabu/2 Desember 2020	
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 1	Panel No: 1 Ruang
	Kelompok	
Waktu	: 14.00 WIB	
Judul Penelitian :	1. Studi Evaluasi Belajar dari Rumah Tahun Ajaran 2020/2021 2. Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah dalam Masa Pencegahan COVID-19 3. Pelaksanaan Pembelajaran dari Rumah dalam Masa Pencegahan COVID-19 4. Analisis Pendapat Masyarakat (di Twitter) secara Otomatis Berbantuan Teknologi NLP untuk Topik Pembelajaran Online, Kuota Belajar dan Kurikulum Darurat	
Penyaji	:	1. Indah Pratiwi 2. Lukman Solihin, M.A. 3. Ika Hijriani 4. Ayu Purwarianti
Pembahas	: Heru Triyono	
Moderator	: Sri Hidayati	
Notulis	: Diyan Nur Rakhmah	

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : <i>(Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)</i>	1. Indah Pratiwi 1. Survei dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan BDR ketika dilakukan di tahun ajaran baru 2. Pembelajaran semakin beragam dan sudah terlihat adanya adaptasi dalam pembelajaran. Proses belajar siswa juga semakin variatif 3. Di daerah tertinggal, interaksi masih dilakukan secara manual 4. Interaksi siswa di tingkat SMA dan SMK, justru meningkat, padahal jenjang lainnya menurun. Padahal, interaksi guru siswa sangat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi belajar yang diberikan. 5. Pandemi akan mengakumulasi rendahnya capaian belajar siswa yang sudah rendah, dan proses BDR sangat memungkinkan terjadinya learning loss. 6. Asesmen diagnosis dapat dilakukan agar guru paham

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		metode pembelajaran apa yang tepat untuk siswa. 7. Kelemahan dari penelitian ini adalah tim membandingkan 2 sampel data dan wilayah pengambilan data yang berbeda. 2. Lukman Solihin, M.A. Latar belakang survei, adanya SKB 4 menteri tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Landasan kebijakan itu karena adanya resiko pada saat siswa terlalu lama belajar dari rumah. Riset ini ingin mendukung kebijakan tersebut dengan melihat kondisi sekolah, guru, dan orang tua untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.
		Ada 4 responden survei yang kami sasar, ada 158 Kabupaten/Kota diwakili kepala dinas atau sekretaris dinas, 5.527 Kepala sekolah, 77.746 Guru dan 11.054 orang tua. Responden dikelompokkan berdasarkan partisipasi responden. Sebagian besar responden dari zona non-hijau, karena proporsi zona hijau memang lebih sedikit, ini sesuai. Aspek kesiapan yang coba dilihat: (1) wawan mengenai prosedur pembukaan sekolah; (2) pendataan warga sekolah; (3) Pencegahan Covid-19; (4) Penangan Covid-19; dan (5) Pendataan kondisi warga sekolah. Aspek penting yang menjadi pertimbangan orang tua mengizinkan anaknya kembali belajar tatap muka di sekolah utamanya adalah ketersediaan sanitasi dan kesehatan dan kesiapan penerapan protokol kesehatan di sekolah.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Dari Dinas Pendidikan, aspek kesiapan yang perlu ditingkatkan diantaranya aspek Pos Pendidikan dan aspek Pendataan, justru angkanya lebih siap di zona non-hijau dibanding dengan zona hijau. Hal ini bisa jadi karena di zona hijau ada daerah yang belum terkena Covid-19 sehingga belum menyiapkan hal itu. Dari sisi Sekolah, Aspek yang paling kurang yaitu aspek sarana dan prasarana kebersihan dan kesehatan, selain beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan yaitu pendataan. Dukungan yang diterima sekolah dari berbagai pihak terbesarnya pada sosialisasi, daripada bentuk bantuan lain. Kesiapan guru kami lihat dari aspek pengetahuan wawasan mengenai Covid-19, aspek ketidakrentanan, dan aspek kebiasaan protokol kesehatan. Aspek ketidakrentanan paling rendah di zona non-hijau yang memang penyebaran Covid-19 cukup tinggi. Kesiapan orang tua siswa, kami melihat masih perlu ditingkatkan aspek kerentanan anak, sedangkan aspek lain sudah relatif baik. Dukungan orang tua kepada sekolah baik di zona hijau maupun non-hijau sama-sama relatif tinggi, dukungan utamanya berupa penyediaan makan dan suplemen dan membekali anak dengan masker dan perlengkapan kesehatan. Ketika kami melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru, muncul informasi persoalan disiplin di luar sekolah. Mereka yakin bisa menerapkan protokol kesehatan di dalam sekolah, tapi justru mereka khawatir ketika siswa berada di luar sekolah yang mana belum banyak yang disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kasi simpulkan secara umum seluruh pihak cukup memenuhi aspek kesiapan pembelajaran tatap muka di sekolah, namun masih ada beberapa aspek yang perlu mendapat dukungan dan perhatian. Kami rekomendasikan kepada pemda untuk memastikan kondisi kesiapan penerapan protokol kesehatan di sekolah, mendorong seluruh dinas membentuk Pos Pendidikan, dan memberikan dukungan kepada sekolah untuk melakukan penyiapan penerapan protokol kesehatannya. 3. Ika Hijriani Tujuan survei: Memberikan gambaran utuh tentang pelaksanaan pembelajaran di masa darurat COVID-19 yang dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi kebijakan pendidikan di masa pandemi. Survei ini dilakukan di bulan-bulan awal terjadinya pandemi. Hasil Survei: sebagian besar sekolah masih melakukan pembelajaran di rumah, termasuk guru. Perubahan terjadi pada

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		perubahan alokasi belanja sekolah, penggunaan metode belajar yang lebih fleksibel, dan media belajar daring (termasuk penggunaan media sosial). Di awal pembelajaran, sebagian besar guru masih mengejar ketuntasan kurikulum, dan siswa masih menganggap bahwa guru adalah sumber belajar utama di sekolah, sehingga mereka belum terbiasa untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan banyak siswa dan guru yang mengeluh dan mengalami hambatan dalam melakukan pembelajaran. 4. Ayu Purwarianti Pendapat masyarakat melalui media sosial dapat dimanfaatkan untuk melihat gambaran umum terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Untuk memproses pendapat masyarakat yang ditulis dalam teks bebas dan dalam jumlah yang tidak sedikit, diperlukan <i>tools</i> yang menggunakan teknologi <i>Natural Language Processing</i> (bagian dari <i>Artificial Intelligence</i>) yang mampu melakukan analisis teks (klasifikasi dan ekstraksi) secara otomatis. Penggunaan teknologi NLP untuk melihat gambaran opini masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (pada media sosial) masih memiliki akurasi yang belum baik karena teknologi NLP yang tersedia itu dibangun atas data industri, bukan kebijakan. Sehingga diperlukan pemrosesan manual tambahan setelah hasil teknologi NLP tersebut diperoleh. Penelitian ini memaparkan hasil dari analisis terhadap opini masyarakat yang diproses dengan teknologi NLP dengan melibatkan <i>human in the loop</i> untuk tiga topik yaitu pembelajaran online, kuota gratis dan kurikulum darurat. Data diambil dari Agustus hingga 12 Oktober 2020. Hasil analisis menunjukkan berbagai opini positif dan negatif dari masyarakat terkait tiga topik tersebut. Selain itu, teknologi NLP ini juga melakukan klasifikasi terhadap teks yang mengandung saran bagi pemerintah (kemdikbud) dalam menyelesaikan masalah penyelenggaraan pendidikan formal pada saat pandemi.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
2.	Pembahas : (Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)	Heru Triyono 1. Permasalahan sampel size, karena ini kajian kuantitatif. Karena yang harus dilihat bukan hanya sebaran sampelnya, tapi standar deviasinya (keragaman datanya). Ada tidak pertimbangan penarikan sampel yang dilakukan. 2. Belum ditampilkan beberapa pertanyaan yang penting, bagaimana uji statistiknya. Seharusnya uji statistik tersebut ditampilkan perbandingannya, karena ini kajian kuantitatif. 3. Perlu memunculkan tabulasi silang, dengan menampilkan dalam bentuk tabelnya, dan tidak hanya grafik saja. 4. Jika data yang ditampilkan banyak, maka kita bisa <i>mengkroscek</i> data kategori 3T dan Non 3T 5. Tampilan grafik batang, seharusnya di-sort dari yang tinggi ke yang rendah, agar mudah dibaca. Kajian ini sifatnya lebih banyak merupakan pendapat dari seluruh populasi yang memberikan respon/menjawab. Saya tertarik tentang makna angka yang ada di jaring laba-laba kesiapan itu. Misal, apa makna 82% dan 74%, apakah responden yang menjawab atau bagaimana. Sebelumnya belum dijelaskan makna angka-angka tersebut. Tanggapan: Arti angka tersebut lebih mengarah ke agregat responden yang menjawab pertanyaan dengan benar, karena ada beberapa variabel detail yang kami tanyakan di masing-masing aspek. Jika 100% berarti seluruh responden seluruhnya menjawab dengan benar. Kalau begitu berarti datanya memang data ordinal. Terus apa makna angka yang ada di dukungan, apakah rerata dukungan yang diperoleh atau bagaimana. Kalau begitu, ini bisa dibandingkan karena sudah merupakan data rasio, sehingga menjelaskannya sudah bisa <i>merefer</i> angka yang ada di data tersebut. Misalkan dukungan dari LSM/NGO yang rendah, mungkin artinya itu masih perlu di dorong. Pada simpulan dan rekomendasi, kesiapan persiapan pembukaan sekolah kalau saya lihat masih ada yang terlupa, dalam hal selama pandemi ada orang yang positif dan beberapa waktu kemudian meninggal, ada juga yang positif dan kemudian sembuh. Kemudian pertanyaannya, ternyata kalau sakit karena virus orang akan langsung sakit, sebenarnya terkait dengan imunitas, misal terkena flu satu kantor akan mudah tertular, dan pada saat saya minum obat herbal saya malah tidak sakit, padahal yang saya minum

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		untuk sakit mag. Kaitannya penelitian ini, sekolah perlu memikirkan bagaimana meningkatkan imunitas warga sekolah, mungkin bisa kerja sama dengan Kemenkes, tapi saya rasa kita bisa memberikan rekomendasi pada hal itu juga kepada sekolah, untuk meningkatkan imunitas tersebut. 1. Terkait data, sebaran data di daerah 3T sepertinya tidak merata. Hal ini perlu menjadi perhatian di survei berikutnya, karena ini berkaitan dengan manfaat hasil dari penelitian ini. Ini perlu dilakukan mengingat karakteristik daerah yang sangat beragam. Metode penarikan sampel harus dikaji ulang, karena datanya akan dilihat secara nasional. Sampel size perlu diperhatikan. 2. Rekomendasi yang disampaikan, masih umum, dan tidak berdasarkan karakteristik daerah. Jika intervensi ingin dilakukan pada setiap daerah, maka penelitian baru harus dilakukan, karena temuan dalam penelitian ini, sepertinya tidak didasarkan pada sampling yang tepat. 3. Dalam penyajian data, karena sifatnya masih nasional, perlu dibuatkan tabulasi silang antar daerah yang memiliki hasil survei yang kontras. Ini dilakukan agar hasil temuan dapat menggambarkan variasi yang ditemukan di setiap daerah. Empat tahun yang lalu sudah pernah ada wacana untuk memantau kebijakan pada media sosial, namun belum dilaksanakan. Tanya 1: apakah ada metode pembandingan NLP? apa kelebihan dan kekurangannya? Jawab 1: dalam NLP terdapat beberapa teknik, ada <i>rule-based</i> dan <i>machine learning</i>. <i>Machine learning</i> akan mempelajari <i>rule</i> tertentu. Model yang saat ini digunakan awalnya untuk industri, sehingga perlu disesuaikan lagi untuk kebijakan. Tanya 2: Apakah produk ini sudah dipasarkan? Jawab 2: Pusat AI sudah bekerja sama dengan industri, nanti akan bisa digunakan secara komersial. Tanya 3: Apakah ada teknologi tandingan? Jawab 3: <i>Deep learning</i>. secara akurasi lebih bagus dari <i>machine learning</i> Perlu ada pembaruan kata kunci. Dengan puslitjak sendiri kemarin

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		ada 3 kali pertemuan untuk membahas kata kunci yang perlu ditambahkan Catatan dari Pembahas: Ini menarik untuk digunakan oleh puslitjak, sebagai pendamping dari survei konvensional
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	1. Retno Weningsih: Masih ada kesulitan media dan teknik yang dapat digunakan tepat untuk pembelajaran di daerah pedesaan atau pegunungan yang terkadang sulitnya sinyal serta dan kondisi lingkungan keluarga yang kurang mendukung dalam pembelajaran online. Bagaimana pembelajaran dapat tetap efektif? Jawaban: Di berbagai wilayah, guru menggunakan TV dan Radio untuk menjembatani ketiadaan akses internet. Tidak sedikit guru juga mengunjungi siswa dari rumah ke rumah hanya sekedar untuk memberi motivasi dan menjaga interaksi siswa guru. Namun tentu saja cara tersebut pembelajaran tersebut tidak sepenuhnya ideal. 2. Lukas (Balar Maluku) Bagaimana terkait dengan sampling 3T, sepertinya belum mewakili? Jawaban: Sampling 3T memang ada kesulitan, karena di daerah-daerah tersebut aksesnya tidak baik, apalagi alam kondisi pandemik yang semakin memperburuk.
4.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 16.40 WIB.

II

Tata Kelola Pendidikan

PENGELOLAAN KERAGAMAN PESERTA DIDIK PASCAZONASI

Herman Hendrik, Mikka W. Nurrochsyam, Romeyn P. Putra, Yunita Murdiyaningrum
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Penelitian ini memaparkan pengelolaan keragaman peserta didik setelah penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. PPDB berbasis zonasi memberi peluang berubahnya kadar dan aspek keragaman peserta didik. Hal tersebut disebabkan oleh sekolah dipaksa untuk menerima siswa dengan kuota terbesar dari jalur zonasi. Artinya, komposisi siswa mencerminkan komposisi masyarakat di sekitar suatu sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan *focus grup discussion* (FGD) daring sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa sekolah yang berlabel unggulan dan berlokasi di tengah kota pada umumnya merasakan bahwa peserta didik mereka menjadi lebih beragam pascaimplementasi PPDB berbasis zonasi. Perubahan keragaman tersebut terjadi dalam aspek kemampuan akademik, latar belakang ekonomi, agama, etnik atau kedaerahan, serta siswa dengan status berkebutuhan khusus. Perubahan keragaman itu berdampak terhadap proses pembelajaran, kedisiplinan, pergaulan antarsiswa, serta interaksi antara siswa dan guru. Sekolah-s pun melakukan berbagai strategi dalam rangka mengelola keragaman peserta didik pascazonasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek yang banyak menjadi perhatian sehubungan dengan perubahan keragaman peserta didik pascazonasi adalah aspek kemampuan akademik dan dampaknya terhadap proses pembelajaran. Strategi pengelolaan keragaman yang banyak diungkapkan oleh sekolah juga kebanyakan menyangkut aspek akademik. Namun, meskipun perhatian sekolah-banyak tertuju pada aspek akademik, ternyata masih sedikit strategi yang dirancang secara khusus dan sistematis untuk pengelolaan keragaman peserta didik pascazonasi.

Kata kunci: pengelolaan keragaman, PPDB, zonasi, sekolah, guru

A. Pendahuluan

Sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di -sekolah di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan. Berdasarkan urutan dasar hukum, sistem tersebut dimulai dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2017 Tahun berikutnya, muncul Permendikbud No. 14 Tahun 2018, yang langsung disusul terbitnya Permendikbud No. 51 Tahun 2018. Untuk tahun ajaran 2019/2020 telah diterapkan sistem zonasi berdasarkan Permendikbud No. 20 Tahun 2019. Tidak berselang lama, terbit Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang akan diterapkan pada PPDB tahun 2020. Perbedaan utama dari setiap permendikbud itu pada dasarnya terletak pada persentase kategori peserta didik baru atau kuota jalur PPDB.

Secara umum sistem zonasi diterapkan dalam rangka menyediakan layanan pendidikan yang bermutu secara merata. Hal tersebut dimungkinkan karena dengan implementasi PPDB berbasis zonasi status

“sekolah favorit” yang disandang sekolah tertentu akan hilang, yang diiringi dengan upaya untuk meratakan setiap sekolah (PDSPK, 2018). Dengan semangat pemerataan ini, sekolah “dipaksa” untuk menerima peserta didik baru berdasarkan kriteria dan kuota yang sudah ditentukan oleh permendikbud yang berlaku, yang sebagian besar berdasarkan kriteria zonasi atau jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah yang dituju.

Dalam situasi seperti itu, penerapan sistem zonasi dalam PPDB diasumsikan memberi peluang pada bertambahnya keragaman siswa di suatu sekolah. Keragaman dimaksud dapat terjadi dalam aspek prestasi akademik, status sosial, latar belakang ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh komposisi siswa di suatu sekolah mencerminkan keragaman penduduk yang berdomisili di sekitar sekolah tersebut. Berbeda dengan era sebelum sistem zonasi ketika komposisi siswa cenderung homogen berdasarkan prestasi akademik dan mencerminkan status sosial-ekonomi tertentu.

Dalam buku *Mengelola Keragaman di Sekolah*, terbitan *Center for Religious and Cross-cultural Studies* (CRCS) Universitas Gajah Mada (UGM), diidentifikasi ada lima aspek keragaman di sekolah. Kelima aspek keragaman tersebut adalah agama, aliran agama, etnik atau asal daerah, kecerdasan, dan status anak berhadapan dengan hukum (Suhadi, 2016). Lebih jauh lagi, dengan adanya kebijakan sekolah inklusif, sekolah menjadi lebih beragam dengan adanya anak berkebutuhan khusus (ABK) (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa keragaman yang mungkin muncul di sekolah sehubungan dengan adanya sistem zonasi mencakup keragaman potensi akademik, latar belakang ekonomi, agama dan aliran dalam agama, etnik atau kedaerahan, status anak berhadapan dengan hukum, serta status ABK.

Uraian di atas telah memaparkan bahwa PPDB berbasis zonasi berdampak pada meningkatnya keragaman siswa di sekolah, baik dalam aspek akademik maupun nonakademik. Keragaman siswa seperti itu diasumsikan menuntut strategi pengelolaan tertentu. Untuk itu, menarik untuk mempertanyakan bagaimana guru dan kepala sekolah mengelola keragaman siswa di sekolah mereka.

Seperti telah dikemukakan pula, sistem zonasi sudah diterapkan setidaknya sejak tahun 2017. Artinya, hingga awal tahun 2020 telah dilaksanakan PPDB berbasis zonasi sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020. Sehubungan dengan itu, penelitian mengenai PPDB berbasis zonasi juga telah banyak dilakukan. Namun, sejauh ini penelitian mengenai PPDB berbasis zonasi lebih banyak berfokus pada implementasinya yang, dalam kadar tertentu, juga menampakkan dampaknya. Adapun bagaimana sekolah menyikapi dampak dari implementasi PPDB berbasis zonasi, yang telah berjalan selama tiga tahun ajaran itu, belum menjadi perhatian. Untuk itu, diperlukan kajian mengenai pengelolaan keragaman di sekolah pascazonasi. Dalam kaitan itu, tulisan ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kondisi keragaman peserta didik di sekolah pascapenerapan PPDB sistem zonasi dan (2) menganalisis pengelolaan keragaman peserta di sekolah pascapenerapan PPDB berbasis zonasi.

Penelitian mengenai PPDB, termasuk PPDB sistem zonasi, telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Puslitjak pada 2017 menemukan bahwa secara umum sekolah yang telah menerapkan PPDB sistem zonasi menerima siswa yang bertempat tinggal lebih dekat dengan sekolah (Puslitjak, 2017). Hasil penelitian Purwanti, Irawati, dan Adiwisastro (2018) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan implementasi kebijakan PPDB berbasis zonasi pada tahun ajaran 2017/2018 di Kota Bandung. Hal yang mengindikasikan peningkatan implementasi tersebut adalah (1) peningkatan dukungan tataran pelaksana (panitia PPDB) dalam mengaplikasikan kebijakan daerah (Dinas Pendidikan Kota Bandung); (2) peningkatan akses siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP) atau siswa miskin; dan (3) peningkatan angka mendekatkan sekolah dengan domisili siswa.

Hasil penelitian Pangaribuan dan Hariyati (2019) mengungkapkan bahwa sistem zonasi dalam PPDB jenjang SMP di Kabupaten Gresik telah dilaksanakan selama dua tahun dan telah berjalan dengan efektif, yang ditunjukkan dengan tampaknya pemerataan potensi peserta didik di wilayah Kabupaten Gresik.

Hal yang kurang lebih senada diungkapkan dalam hasil penelitian Azhari dan Suryanef (2020) bahwa secara umum pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kota Padang telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah cenderung memperpendek jarak rumah tinggal dengan sekolah berdasarkan acuan zonasi sekolah SD asal. Dari sisi mutu siswa juga menunjukkan keragaman sehingga mengurangi mutu siswa unggul yang sebelumnya mengelompok pada sekolah tertentu.

Demikian pula hasil penelitian Marini dan Utoyo (2019) bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah berjalan baik. Hasil penelitian Purwanti, Irawati, Adiwisastro, dan Bakti (2019) menunjukkan bahwa terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan. Dari segi ketepatan sasaran, implementasi kebijakan sistem zonasi pada tahun 2018 lebih baik jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan pada tahun ajaran 2017.

Hasil penelitian Bintoro (2018) tentang implementasi PPDB berbasis zonasi tingkat SMA di Kota Samarinda juga menunjukkan adanya permasalahan, yaitu bahwa kebijakan zonasi sekolah menimbulkan gejolak di masyarakat. Gejolak tersebut diakibatkan oleh: *pertama*, sosialisasi yang terbatas sehingga terjadi kurangnya pemahaman terhadap mekanisme PPDB dengan sistem zonasi; *kedua*, kekhawatiran akan tertutupnya kemungkinan bersekolah di luar zonasi; dan *ketiga*, karena standar pendidikan yang masih belum merata. Demikian pula dengan hasil penelitian Muammar (2019) tentang PPDB berbasis zonasi di Kota Mataram bahwa terdapat problematika dalam implementasi PPDB sistem zonasi di sekolah dasar di Mataram. Problematika tersebut adalah (1) terbatasnya jumlah sekolah yang dianggap favorit, (2) masih timpangnya kualitas pendidikan atau kualitas sekolah, dan (3) masih kurangnya sosialisasi mengenai PPDB sistem zonasi dari pemerintah. Hasil penelitian Adiputra, Karsidi, dan Haryono (2019) tentang PPDB berbasis zonasi di SMAN 2 Sukoharjo menunjukkan bahwa masyarakat mengalami *cultural lag* dalam pelaksanaan PPDB *online* sistem zonasi.

Berbagai literatur di atas menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam implementasi PPDB berbasis zonasi (Adiputra *et al.*, 2019; Azhari dan Suryanef, 2020; Bintoro, 2018; Marini dan Utoyo, 2019; Muammar, 2019; Pangaribuan dan Hariyati, 2019) meskipun ada juga peningkatan dalam implementasinya di daerah-daerah tertentu (Purwanti *et al.*, 2018, 2019). Namun, kajian mengenai kondisi keragaman dan strategi pengelolaan keragaman siswa di sekolah pascaimplementasi PPDB berbasis zonasi belum menjadi perhatian. Sehubungan dengan itu, tulisan ini bermaksud mengisi kekosongan literatur mengenai isu dimaksud.

B. Metode

Kajian yang menjadi dasar tulisan ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Data didapatkan dari kegiatan *focused group discussion* (FGD) dalam jaringan (*daring, online*), yang dilakukan sebanyak tiga kali melalui aplikasi *zoom meeting*. FGD menghadirkan perwakilan 17 SMA negeri dari berbagai daerah di Indonesia, yang dianggap dapat menjadi gambaran pengelolaan keragaman di sekolah setelah implementasi PPDB sistem zonasi. Sekolah tersebut dipilih untuk melihat perwakilan sekolah yang berlokasi di kota besar dan kota kecil, berstatus “unggulan” dan “nonunggulan”. Perwakilan dari sekolah dengan karakteristik seperti itu penting untuk dihadirkan dalam FGD untuk melihat variasi dampak PPDB berbasis zonasi dalam hal keragaman peserta didik terhadap sekolah dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sekolah tersebut mengirimkan perwakilan dengan jabatan yang bervariasi, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru mata pelajaran. Kegiatan kajian berlangsung dari bulan Juni hingga Oktober 2020.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keragaman Peserta Didik Pascazonasi

Sekolah (baca: SMA negeri) yang menjadi sasaran kajian ini adalah sekolah berlabel unggulan (favorit) dan sekolah yang dianggap bukan unggulan. Dari segi lokasi, sekolah tersebut ada yang terletak di tengah kota dan ada pula yang di pinggiran kota, bahkan di perdesaan. Pada umumnya sekolah yang dianggap unggulan berlokasi di tengah kota, sedangkan sekolah nonunggulan biasanya berada di pinggiran kota.

Tidak semua sekolah tersebut merasakan adanya perubahan pada keragaman peserta didik pascaimplementasi PPDB berbasis zonasi. Keragaman peserta didik pascazonasi di sekolah yang dikaji ada yang tetap dan ada yang berubah. Perubahan keragaman peserta didik itu ada yang cenderung seragam dan ada yang menjadi lebih beragam. Secara umum sekolah nonunggulan dan berlokasi di pinggiran kota tidak merasakan perubahan keragaman peserta didik. Hal yang menarik adanya beberapa sekolah nonunggulan yang merasakan perubahan keragaman peserta didiknya, tetapi perubahan itu justru ke arah keseragaman atau menjadi lebih homogen. Sekolah berlabel unggulan umumnya merasakan bahwa peserta didik di sekolah mereka menjadi lebih beragam.

Implementasi PPDB berbasis zonasi tidak berpengaruh terhadap perubahan keragaman peserta didik di sekolah nonunggulan dan berlokasi di pinggiran kota. Sekolah itu tidak merasakan adanya perubahan dalam karakteristik siswanya karena memang biasanya hanya menerima siswa yang tinggal di wilayahnya dan sekitarnya. Dengan kata lain, sebelum era zonasi pun sekolah itu sudah terbiasa menerima siswa yang berasal dari “wilayah zonasi”-nya saja. Lebih jauh lagi, karena sekolah tersebut bukanlah sekolah tujuan, tidak banyak siswa yang datang jauh-jauh dari wilayah lain untuk menempuh pendidikan di sana.

Hal yang menarik bahwa ada beberapa sekolah nonunggulan yang merasakan-- setelah penerapan PPDB berbasis zonasi--peserta didik di sekolah mereka cenderung menjadi homogen. Para siswa cenderung menjadi homogen dalam hal kemampuan akademik awal dan latar belakang ekonomi keluarga. Karakteristik para siswa itu benar-benar mencerminkan masyarakat yang tinggal di wilayah zonasi suatu sekolah, yaitu masyarakat dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Sekolah seperti itu merasa kehilangan -siswa yang secara kemampuan akademik awal relatif tinggi ternyata banyak yang berasal dari wilayah luar zonasi.

Adapun bagi sekolah yang merasakan adanya perubahan dalam karakteristik siswa pascazonasi, perubahan itu terjadi dalam aspek kemampuan akademik, latar belakang ekonomi, agama, etnik atau kedaerahan, dan status ABK. Dalam hal kemampuan akademik, sebelum era zonasi sekolah berlabel unggulan diisi oleh siswa dengan kemampuan akademik di atas rata-rata. Pada pascazonasi, kemampuan awal peserta didik sangat bervariasi. Dalam hal latar belakang ekonomi, sebelum era zonasi beberapa sekolah unggulan banyak diisi oleh kalangan menengah ke atas, tetapi pascazonasi latar belakang ekonomi siswa lebih bervariasi. Sebagai gambaran, sebelum era zonasi, para siswa di suatu sekolah unggulan di Jakarta sangat lazim memiliki telepon seluler, bahkan laptop. Pada pascazonasi, tidak semua siswanya memiliki telepon genggam (*handphone*).

Dari aspek agama, sebelum era zonasi, beberapa sekolah tidak pernah memiliki siswa dengan agama minoritas tertentu. Hal tersebut karena anak-anak dari keluarga dengan agama minoritas biasanya mencerminkan komunitas tertentu dan tidak memiliki kemampuan akademik yang baik sehingga tidak memenuhi syarat (baca: nilai UN relatif rendah) masuk ke sekolah unggulan. Keadaan itu berubah setelah pemberlakuan PPDB berbasis zonasi. Anak-anak beragama minoritas itu bisa masuk sekolah unggulan terdekat melalui jalur zonasi. Sebagai contoh kasus, para siswa beragama Sikh di Medan bisa masuk ke sebuah SMA negeri unggulan di Medan melalui jalur zonasi karena mereka tinggal di wilayah zonasi sekolah tersebut. Hal itu tidak terjadi pada era sebelum zonasi karena kebanyakan siswa Sikh kurang berprestasi untuk masuk ke sekolah tersebut.

Perubahan keragaman juga terjadi dalam aspek etnisitas atau kedaerahan. Sebelum era zonasi, etnik minoritas tertentu di suatu daerah tidak biasa masuk ke suatu sekolah yang ada di wilayah tempat tinggalnya karena terhambat prestasi akademik (baca: nilai UN relatif rendah). Namun, dengan adanya jalur zonasi dalam PPDB, anak-anak yang berasal dari etnik minoritas bisa masuk ke sekolah di sekitarnya melalui jalur zonasi. Contoh kasusnya adalah suatu SMA di Makassar sebelum zonasi hanya diisi oleh siswa dari etnik Bugis-Makassar, tetapi pada pascazonasi menerima siswa anak para pendatang dari NTT yang tinggal di wilayah zonasinya melalui jalur zonasi.

Jumlah siswa dengan status ABK juga dirasakan sebagai salah satu aspek perubahan keragaman peserta didik pascazonasi. Sebelum era zonasi, sekolah tertentu memang sudah menerima siswa berstatus ABK karena mereka memang menerima siswa inklusi. Namun, pascazonasi, sekolah tertentu tersebut memiliki siswa berstatus ABK lebih banyak karena selalu ada penerimaan siswa berstatus ABK di setiap tahun ajaran baru. Sebagai gambaran, seorang guru di suatu SMA negeri di Bandung menyatakan bahwa setiap tahun dipastikan mengajar siswa berstatus ABK, padahal sebelumnya hanya sekali-sekali saja dalam beberapa tahun ajaran.

2. Dampak Perubahan Karakteristik Peserta Didik

Perubahan keragaman peserta didik pascazonasi di beberapa sekolah berdampak terhadap beberapa aspek dalam kehidupan di sekolah. Aspek yang terdampak tersebut adalah pembelajaran, kedisiplinan, pergaulan antarsiswa, serta interaksi antara siswa dan guru. Dalam hal pembelajaran, beberapa sekolah merasakan adanya masalah sebagai dampak dari lebih beragamnya kemampuan akademik peserta didik hasil PPDB berbasis zonasi. Masalah-tersebut: *pertama*, pencapaian target pembelajaran membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan masa ketika para siswa memiliki kemampuan akademik yang relatif sama (baca: di atas rata-rata). *Kedua*, ada perubahan dalam motivasi belajar siswa.

Sebelumnya pada era zonasi, kebanyakan siswa berkemampuan akademik tinggi umumnya memiliki motivasi belajar tinggi. Pada pascazonasi motivasi belajar siswa lebih bervariasi sehubungan dengan bervariasinya kemampuan akademik mereka. Hal lainnya, yang masih terkait dengan penurunan motivasi siswa, adanya penurunan semangat belajar di antara para siswa sehingga kelas menjadi kurang kompetitif. Dampak lanjutannya adalah berkurangnya keaktifan di kelas. Keragaman dalam aspek latar belakang ekonomi siswa juga berdampak terhadap pembelajaran. Terungkap bahwa selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) siswa berlatar belakang ekonomi rendah terhambat dalam mengikuti pembelajaran daring karena ketiadaan atau kurang memadainya fasilitas penunjang, seperti perangkat komputer, telepon seluler, serta jaringan internet.

Dalam hal kedisiplinan siswa di sekolah, beberapa sekolah merasakan adanya masalah sehubungan dengan kehadiran siswa dengan kemampuan akademik rendah. Suatu sekolah mengistilahkan para siswa seperti itu sebagai “siswa yang susah diatur”. Adapun masalah yang dirasakan sehubungan dengan adanya siswa dengan karakter tersebut adalah meningkatnya frekuensi pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Pelanggaran tata tertib dimaksud, di antaranya membolos dan berkelahi. Dalam hal pergaulan antarsiswa, beberapa sekolah merasakan adanya masalah berupa terbentuknya kelompok atau geng tertentu. Kelompok- tersebut biasanya dibentuk berdasarkan asal sekolah di jenjang sebelumnya. Selain itu, ada pula kecenderungan para siswa yang berasal dari kalangan menengah ke atas untuk mengelompok secara tersendiri.

Selain dampak negatif, terungkap pula dampak positif. Beberapa dampak positif dari lebih beragamnya peserta didik pascazonasi disebabkan oleh hal berikut. *Pertama*, ada persaingan positif di antara para peserta didik untuk meningkatkan kompetensi akademik masing-masing, terutama dalam mengejar ketertinggalan. *Kedua*, siswa lebih berani dalam komunikasi dan interaksi. *Ketiga*, tumbuhnya empati

serta sikap saling menghargai dan toleransi antarsiswa. Hal tersebut dimungkinkan karena pergaulan mereka dengan teman-teman sekolah yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

3. Pengelolaan Keragaman Peserta Didik Pascazonasi

Uraian sebelumnya telah memaparkan perubahan keragaman peserta didik pascazonasi serta dampaknya terhadap kehidupan di sekolah. Lebih jauh lagi, dampak perubahan keragaman itu merupakan masalah tersendiri bagi beberapa sekolah dalam hal proses pembelajaran, kedisiplinan, dan pergaulan antarsiswa. Sehubungan dengan itu, beberapa sekolah melancarkan berbagai strategi pengelolaan keragaman peserta didik pascazonasi. Pengelolaan keragaman itu dapat dipilah berdasarkan aspek-keragaman peserta didik yang muncul pascaimplementasi PPDB berbasis zonasi, yaitu kemampuan akademik, latar belakang ekonomi, agama dan kebudayaan (termasuk di dalamnya etnik dan kedaerahan), serta status ABK.

Pertama, Dalam rangka mengelola keragaman peserta didik dalam aspek kemampuan akademik, beberapa sekolah melakukan intervensi terhadap aspek pembagian kelas, guru, kurikulum, ekstrakurikuler, metode pembelajaran, dan tata tertib. Dalam aspek siswa, ada sekolah yang membuat klasifikasi siswa berdasarkan kemampuan awal, yaitu siswa berkemampuan awal tinggi dan siswa berkemampuan awal rendah. Klasifikasi itu diwujudkan dalam pembagian kelas. Artinya, ada kelas tertentu yang diisi oleh para siswa berkemampuan awal tinggi dan kelas-tertentu yang diisi oleh para siswa berkemampuan awal rendah.

Tujuan dari klasifikasi tersebut adalah untuk menjaga mutu akademik sekolah yang bersangkutan. Dengan strategi seperti itu, diharapkan para siswa dengan kemampuan awal tinggi dapat meningkatkan prestasinya, sedangkan siswa dengan kemampuan awal rendah dapat mengejar ketertinggalan. Selain itu, ada pula sekolah yang menerapkan kebijakan bagi rata siswa, yaitu membuat -kelas yang ada menjadi beragam dengan cara menempatkan para siswa dengan latar belakang bermacam-macam—terutama kemampuan akademik—di dalam suatu kelas. Kebijakan ini ditujukan untuk menyediakan ruang perjumpaan bagi para siswa yang lebih beragam setelah penerapan PPDB berbasis zonasi.

Agar para guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sekolah berupaya untuk meningkatkan kompetensi, kepekaan, motivasi, serta peran para gurunya. Untuk meningkatkan kompetensi para gurunya, ada sekolah yang memfasilitasi keikutsertaan para gurunya dalam berbagai pelatihan—atau kegiatan lain yang serupa, seperti lokakarya, bimbingan teknis, dan seminar—yang dapat membantu mereka menghadapi peserta didik yang lebih beragam. Ada juga sekolah yang melakukan sosialisasi tentang berbagai jenis keragaman siswa—yang hadir pascazonasi—kepada para gurunya di awal tahun ajaran. Untuk meningkatkan kepekaan para guru, ada sekolah yang mengimbau para gurunya untuk melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran setiap harinya. Ada pula sekolah yang melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi seputar kegiatan sekolah, terutama pembelajaran. Adapun untuk meningkatkan motivasi para guru, ada sekolah yang mengundang pakar motivasi untuk memberi suntikan motivasi kepada para gurunya.

Selain dalam hal-hal tersebut di atas—kompetensi, kepekaan, dan motivasi—ada juga sekolah yang berupaya meningkatkan peran para guru bimbingan dan konseling (BK) serta wali kelas dalam menangani dinamika yang lahir pascaimplementasi PPDB berbasis zonasi. Khusus untuk peningkatan peran wali kelas, ada sekolah yang mengatur secara khusus penugasan wali kelas. Di sekolah tersebut, guru yang dijadikan wali kelas adalah guru yang dianggap “masih lincah”, dalam pengertian berusia relatif lebih muda dan tidak gagap dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Masih dalam rangka mengelola keragaman peserta didik pascazonasi dalam aspek kemampuan akademik, sekolah juga melakukan strategi dalam hal kurikulum. Strategi tersebut adalah penyelenggaraan

program *remedial teaching* dan peninjauan kriteria ketuntasan minimal (KKM). Penyelenggaraan program *remedial teaching* atau yang sejenis—misalnya ada sekolah yang menamakannya sebagai klinik bimbingan siswa atau program konsolidasi belajar—ditujukan untuk memfasilitasi siswa yang membutuhkan bantuan dalam belajar. Khusus untuk program konsolidasi belajar, para siswa yang mengalami kesulitan belajar diarahkan untuk mampu mengidentifikasi kesulitannya, kemudian berkonsultasi kepada teman dan/atau gurunya. Dalam pelaksanaannya, program-seperti itu bisa berupa pembukaan kelas tambahan atau kunjungan guru- ke rumah siswa. Peninjauan KKM dilakukan karena adanya rentang kemampuan akademik yang cukup jauh antara siswa berkemampuan awal rendah dan siswa berkemampuan awal tinggi sehingga diperlukan penyesuaian.

Sekolah memahami bahwa kemampuan akademik bukanlah satu-satunya potensi peserta didik yang dapat ditumbuhkembangkan. Prestasi peserta didik dapat pula dalam bidang ekstrakurikuler. Sehubungan dengan itu, beberapa sekolah memilih untuk menambah jenis ekstrakurikuler. Hal itu ditujukan untuk memfasilitasi minat dan bakat siswa, yang mungkin secara kemampuan akademik tergolong rendah, tetapi dapat diarahkan untuk berprestasi di bidang nonakademik.

Dengan menyadari adanya keragaman dalam kemampuan akademik para siswanya, sekolah melakukan penyesuaian dalam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mencakup strategi pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Ketika berada di kelas, para guru diharapkan untuk dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif. Sementara di luar kelas, ada intensifikasi program tutor sebaya.

Untuk menunjang proses pembelajaran di kelas dan kehidupan sekolah yang kondusif, beberapa sekolah melakukan penyempurnaan tata tertib sekolah. Penyempurnaan tata tertib ini ditujukan pula untuk mempertegas peraturan sekolah agar para siswa yang berkemampuan awal rendah dan cenderung “susah diatur” dapat dibina dengan baik. Hal tersebut diperlukan mengingat pelanggaran terhadap kedisiplinan sekolah dalam kadar tertentu berhubungan dengan kemampuan akademik siswa serta kelancaran proses pembelajaran.

Kedua, dalam mengelola keragaman peserta didik pascazonasi dalam aspek latar belakang ekonomi, beberapa sekolah memberlakukan pembebasan atau keringanan SPP bagi siswa tidak mampu. Dalam konteks pelaksanaan PJJ, beberapa sekolah juga memberikan bantuan kuota internet dan meminjamkan telepon seluler atau komputer tablet serta menyediakan laboratorium komputer bagi siswa yang tidak memiliki telepon seluler atau perangkat komputer di rumahnya.

Ketiga, dalam mengelola keragaman peserta didik pascazonasi dalam aspek agama dan kebudayaan—termasuk etnik dan kedaerahan--beberapa sekolah menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat/LSM) untuk mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan keragaman. Sebagai contoh, beberapa sekolah yang mendapatkan pendampingan dalam program “Sekolah Damai” yang digagas oleh Wahid Foundation. Selain itu, beberapa sekolah juga berusaha untuk memenuhi hak para peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing dengan cara menyediakan guru pendidikan agama yang sesuai. Hal tersebut biasanya terjadi di sekolah yang sebelum era zonasi tidak biasa menerima siswa dengan latar belakang agama tertentu karena faktor akademik (baca: nilai UN rendah), tetapi setelah ada jalur zonasi mereka mau tidak mau menerima siswa dari wilayah zonasinya sesuai dengan kuota yang ditentukan tanpa melihat kemampuan awal para siswa.

Keempat, dalam mengelola keragaman peserta didik pascazonasi dalam aspek siswa dengan status ABK, sekolah memfasilitasi para guru untuk mengikuti berbagai pelatihan atau yang sejenis, misalnya lokakarya, bimbingan teknis, atau seminar, mengenai pendidikan inklusi. Pelatihan semacam itu biasa disediakan oleh dinas pendidikan. Dalam konteks pandemi COVID-19, -pelatihan serupa banyak dilakukan secara daring.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, pascapenerapan PPDB berbasis zonasi keragaman peserta didik di suatu sekolah ada yang tetap ada yang berubah. Perubahan bisa menjadi lebih homogen dan bisa juga lebih heterogen. Sekolah yang tidak merasakan adanya perubahan keragaman peserta didik umumnya adalah sekolah nonunggulan yang berlokasi di pinggiran kota.

Demikian pula dengan sekolah yang merasakan adanya perubahan keragaman, tetapi ke arah homogen. Adapun sekolah yang berlabel unggulan dan berlokasi di tengah kota, pada umumnya merasakan bahwa peserta didik menjadi lebih beragam. Perubahan keragaman tersebut terjadi dalam aspek kemampuan akademik, latar belakang ekonomi, agama, etnik atau kedaerahan, serta siswa dengan status ABK.

Telah pula diuraikan bahwa perubahan keragaman tersebut berdampak terhadap proses pembelajaran, kedisiplinan, pergaulan antarsiswa, serta interaksi antara siswa dan guru. Sehingga dengan itu, sekolah telah melakukan berbagai strategi dalam rangka mengelola keragaman peserta didik mereka.

Temuan kajian tersebut menunjukkan bahwa aspek yang banyak menjadi perhatian sehubungan dengan perubahan keragaman peserta didik pascazonasi adalah aspek kemampuan akademik dan dampaknya terhadap proses pembelajaran. Strategi pengelolaan keragaman yang banyak diungkapkan oleh sekolah juga kebanyakan menyangkut aspek akademik. Namun, meskipun perhatian sekolah banyak tertuju kepada aspek akademik, ternyata masih sedikit strategi yang dirancang secara khusus dan sistematis untuk pengelolaan keragaman peserta didik pascazonasi.

Dengan bertitik tolak pada temuan di atas, tulisan ini merekomendasikan adanya pendampingan dan fasilitasi bagi sekolah dan guru dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola keragaman peserta didik dalam berbagai aspeknya. Selama ini, unit di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan berbagai pelatihan atau yang sejenis. Hal yang diperlukan adalah penekanan tentang materi berkenaan dengan keragaman peserta didik, dampaknya, serta strategi pengelolaannya, baik di level sekolah maupun level kelas (guru). Selain itu, diperlukan pula kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil yang selama ini sebetulnya telah bergerak dalam isu pengelolaan keragaman di dunia pendidikan, terutama keragaman dalam aspek non-akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, A. R., Karsidi, R., dan Haryono, B. (2019). Cultural Lag dalam program penerimaan peserta didik baru (ppdb) online dengan sistem zonasi tahun 2018 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo. *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, 3(1), 1–13. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/habitus/issue/view/2364>
- Azhari, A., dan Suryanef. (2020). Pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(5), 390–396.
- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA tahun ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 48–57.
- Marini, K., & Utoyo, B. (2019). Menimbang kembali kebijakan sistem zonasi: Studi penerimaan peserta didik baru di Bandar Lampung. *Administrativa*, 1(1), 87–100.
- Muammar. (2019). Problematika penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi di sekolah dasar (SD). *El-Midad: Jurnal PGMI*, 11(1), 41–60. Retrieved from <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/elmidad%0AVol>.

- Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–12.
- PDSPK. (2018). *Sistem zonasi: Strategi pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purwanti, D., Irawati, I., dan Adiwisastro, J. (2018). Efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan. *Dinamika*, 5(4), 1–7.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., dan Bekti, H. (2019). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12–23. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Gambaran sekolah inklusif di Indonesia: tinjauan sekolah menengah pertama. gambaran sekolah inklusif di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved from http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25_.pdf
- Puslitjakdikbud. (2017). *Evaluasi Implementasi PPDB sistem zonasi tahun 2017*. Jakarta.
- Suhadi. (2016). Pengantar: Kreativitas guru dalam mengelola keragaman di sekolah. In Suhadi, L. K. Pary, F. M. Imamah, dan M. Tahun (Eds.), *Mengelola keragaman di sekolah: gagasan dan pengalaman guru* (pp. iii–viii). Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Universitas Gadjah Mada.

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Herlinawati, Siti Nur Azizah, Catur Dyah Fajarini, Khairur Roziqin

**Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghitung besaran kebutuhan biaya operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen); dan (2) merumuskan strategi pemenuhan pendanaan penyelenggaraan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Penelitian ini merupakan *desk study* yang bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, penyebaran kuesioner *online*, dan diskusi kelompok terpusat (DKT). Survei *online* tersebut untuk mendapatkan data dan informasi terkait BOSDA yang ditujukan kepada dinas pendidikan provinsi dan/atau dinas pendidikan kab/kota. Total sampel pada survei online ini sebanyak 46 dinas pendidikan kab/kota dan 23 dinas pendidikan provinsi. Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan rata-rata biaya satuan operasional PAUD dan jenjang Dikdasmen serta strategi pemenuhan pendanaan PAUD dan Dikdasmen dengan menggunakan pendekatan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD). Hasil perhitungan menunjukkan: (1) adanya kesenjangan besaran biaya operasional, baik jenjang PAUD maupun Dikdasmen yang saat ini diberikan oleh pemerintah, masih cukup tinggi terhadap kebutuhan biaya operasional sekolah; (2) strategi pemenuhan pendanaan penyelenggaraan pendidikan pada PAUD dan Dikdasmen dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD). Studi ini merekomendasikan pemerintah daerah perlu memberikan dana BOPDA/BOSDA, terutama bagi daerah yang selama ini belum memberikan BOPDA/BOSDA tetapi memiliki kemampuan keuangan tinggi, Pemerintah Pusat perlu menanggung biaya pribadi yang dibayarkan orang tua ke sekolah, mengingat masih adanya sekolah yang menarik iuran sekolah, serta Pemerintah Pusat perlu menyesuaikan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD/bantuan operasional sekolah (BOS) dengan tingkat kemahalan daerah, di mana besarnya kontribusi memperhitungkan tingkat kemampuan daerah.

Kata kunci: Biaya Satuan, PAUD, Dikdasmen, BOP, BOS.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu baik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen), pemerintah memberikan bantuan

pendanaan pendidikan dalam bentuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Non-Fisik untuk PAUD dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk Dikdasmen. Besarnya bantuan tersebut ditetapkan sama untuk siswa di masing-masing jenjang pendidikan (lihat tabel 1). Pada tahun 2018, Kemendikbud menyediakan BOP bagi PAUD sebesar Rp 4,07 triliun dan di tahun 2019 mengalami kenaikan hingga menjadi Rp 4,80 triliun. DAK tersebut diperuntukkan bagi 7.459.167 anak dengan besaran Rp 600.000 per anak per tahun. Begitu pula besaran manfaat yang diterima oleh penerima BOS tidak ada perubahan dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019. Besaran dana BOS baru berubah pada tahun 2020, yaitu naik sebesar Rp 100.000.

Tabel 1. Besaran Dana BOP/BOS per Siswa per Tahun

No.	Jenjang	<i>Unit Cost</i> (Rp/siswa) BOS 2017	<i>Unit Cost</i> (Rp/siswa) BOS 2018	<i>Unit Cost</i> (Rp/siswa) BOS 2019	<i>Unit Cost</i> (Rp/siswa) BOS 2020
1	PAUD	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000
1	SD/MI	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 900.000
2	SMP/MTs	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.100.000
3	SMA	Rp1.400.000	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000	Rp 1.500.000
4	SMK	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000	Rp 1.600.000
5	SLB			Rp 2.000.000	Rp 2.000.000

Sumber: Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler 2020

Pemberian BOP dan BOS merupakan kewajiban pemerintah sebagai bentuk dari amanah undang-undang yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan berhak mendapatkan layanan pendidikan, oleh karenanya pemerintah menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu. Namun, dalam penyelenggaraannya pemberian BOP/BOS dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan riil siswa. Kenyataan tersebut disebabkan besaran bantuan per siswa tersebut hingga tahun 2019 belum berubah dan belum mengikuti berbagai kondisi perekonomian (inflasi). Selain itu, bagi sebagian daerah, besaran tersebut dirasakan tidak berkeadilan karena kebutuhan setiap daerah (indeks kemahalan) berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, Puslitjak melakukan penghitungan ulang kebutuhan biayanya berdasarkan kebutuhan saat ini. Kajian ini memperhitungkan proyeksi besaran kebutuhan biaya operasional PAUD dan Dikdasmen untuk 5 tahun ke depan (2020-2025), serta opsi kebijakan dalam rangka mendanai kebutuhan biaya tersebut. Hasil kajian ini diharapkan menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan pendidikan dalam memberikan bantuan BOP/BOS pada setiap jenjang pendidikan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang ada, tampaknya saat ini BOP/BOS menjadi sumber pendanaan utama bagi sekolah khususnya bagi pendidikan dasar yang tidak dapat menarik pungutan dari orang tua baik bagi sekolah yang didirikan pemerintah maupun masyarakat. BOS menjadi sumber pendanaan utama bagi daerah untuk membebaskan biaya operasional non-personil bagi siswa

khususnya bagi daerah yang masuk kategori memiliki kemampuan fiskal rendah. Namun, kenyataannya alokasi BOS saat ini masih dirasakan belum memadai untuk memenuhi total kebutuhan Biaya Operasional Non-Personalia di satuan pendidikan. Dana BOS yang digulirkan pemerintah untuk sekolah-sekolah dirasa kurang relevan dengan kebutuhan sesungguhnya dikarenakan pemberian dana tersebut sama untuk semua wilayah di Indonesia. Sementara, kondisi geografis di Indonesia sangat tinggi heterogenitasnya.

Penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang membutuhkan biaya pendidikan yang tidak sedikit, sementara anggaran pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah sangat terbatas. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan perhitungan tentang anggaran pendidikan. Kebutuhan biaya pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pernah dihitung oleh Abbas Ghozali (2013), sedangkan perhitungan biaya satuan pendidikan total faktual dihitung oleh Neti Budiwati dengan menetapkan kebutuhan tersebut secara total berdasarkan jenjang pendidikan meliputi penggabungan biaya satuan, biaya penyelenggaraan, dan biaya pribadi. Namun tampaknya, perhitungan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan perlu dilakukan pemutakhiran data. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan penelitian kembali terkait dengan skema pendanaan melalui kolaborasi antara pemerintah maupun masyarakat agar terciptanya kualitas pendidikan yang bermutu. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa besaran kebutuhan biaya operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah?
2. Bagaimana strategi pemenuhan pendanaan penyelenggaraan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah?

3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan:

1. Menghitung besaran kebutuhan biaya operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Hasil perhitungan tersebut diharapkan sebagai usulan dasar kebijakan untuk menaikkan besaran alokasi BOS agar efektif dalam menjawab kebutuhan biaya operasional sekolah.
2. Merumuskan strategi pemenuhan pendanaan penyelenggaraan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah agar lebih dapat memenuhi prinsip keadilan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. BOP PAUD

Untuk meningkatkan layanan PAUD yang inklusif, adil dan bermutu serta berkelanjutan bagi semua anak usia dini, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2016 berupaya membantu penyediaan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) melalui dana alokasi khusus Nonfisik (DAK Nonfisik). Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 46 ayat (1) UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan ayat (2) yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Pemberian BOP PAUD tersebut diharapkan bisa membantu penyediaan biaya operasional non-personalia bagi anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program PAUD, dan juga bisa meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal.

Sasaran program BOP PAUD adalah anak usia dini yang terlayani di satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD di seluruh wilayah Indonesia, baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau masyarakat. BOP PAUD tidak berlaku bagi anak usia dini yang terlayani di satuan pendidikan penyelenggara PAUD atas dasar kerja sama dengan lembaga pendidikan asing Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Pada tahun 2019 pengalokasian besaran BOP PAUD dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengikuti ketentuan bahwa:

1. Jumlah peserta didik yang dilayani satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD yang tercatat pada Dapodik PAUD dan Dikmas per akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya;
2. Satuan biaya BOP PAUD sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.

Pada tahun 2020, yang menjadi sasaran BOP PAUD yaitu peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Peserta didik yang dibiayai melalui BOP PAUD harus memenuhi syarat antara lain terdata dalam Dapo PAUD Dikmas, dan berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun (Permendikbud No 20 tahun 2020). Besaran dana yang disalurkan ke satuan pendidikan penyelenggara PAUD pada tahun 2020 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikali satuan biaya. Peserta didik merupakan peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas yang sudah diverifikasi oleh dinas pendidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan pemerintah daerah. Satuan BOP PAUD yang bersumber dari DAK nonfisik ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun (Permendikbud No 20 tahun 2020).

Penggunaan dana BOP PAUD untuk tahun 2019 dan 2020 di satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD didasarkan pada RKAS yang telah disusun dengan memperhatikan

komponen kegiatan-kegiatan berikut.

Tabel 1. Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD

KOMPONEN	PENGUNAAN	KETERANGAN
Kegiatan Pembelajaran dan Bermain (Minimal 50%)	1. Bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik (minimal 45%); 2. Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) (maksimal 40%); 3. Penyediaan alat mengajar bagi pendidik (maksimal 15%).	1. Bahan untuk pembelajaran peserta didik contohnya seperti: buku gambar, buku mewarnai, kertas lipat, krayon, spidol, pensil, domino, gambar/angka/huruf, stik es krim/tali elastis), pasir, kancing, kerang-kerangan, batu-batuan, biji-bijian, dan bahan habis pakai lainnya. 2. Alat Permainan Edukatif (APE) termasuk dalam dan luar ruang. 3. Penyediaan alat mengajar seperti <i>white board</i>, spidol, buku tulis, buku untuk pegangan guru, kertas dan lainnya.
Kegiatan Pendukung (Maksimal 35%)	1. Penyediaan makanan tambahan; 2. Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan <i>parenting</i>); 4. Memberi biaya transportasi pendidik dan/atau 5. Penyediaan buku administrasi.	1. Penyediaan makanan tambahan untuk siswa PAUD diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan terutama bagi anak usia 0 – 2 tahun. 2. Kegiatan pertemuan dengan orang tua murid untuk membiayai konsumsi pertemuan. 3. Biaya transportasi pendidik diberikan untuk pertemuan gugus, atau menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik. 4. Penyediaan buku administrasi seperti: buku induk peserta didik, buku laporan perkembangan anak, buku inventaris, dan yang lainnya. 5. Satuan pendidikan wajib menggunakan dana kegiatan pendukung minimal 4 jenis kegiatan.
Kegiatan Lainnya (Maksimal 15%)	1. Perawatan sarana dan prasarana; 2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD; 3. Langganan listrik, telepon/internet, air.	1. Perawatan sarana dan prasarana seperti: perbaikan dan pengecatan ringan, penggantian lampu, pegangan pintu, perbaikan meja dan kursi, dan yang lainnya. 2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD seperti: <i>leaflet</i>, <i>booklet</i>, poster, papan nama. 3. Satuan pendidikan wajib menggunakan

KOMPONEN	PENGUNAAN	KETERANGAN
		dana kegiatan lainnya minimal 2 jenis kegiatan.

Sumber: Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019 dan Permendikbud No. 13 Tahun 2020.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

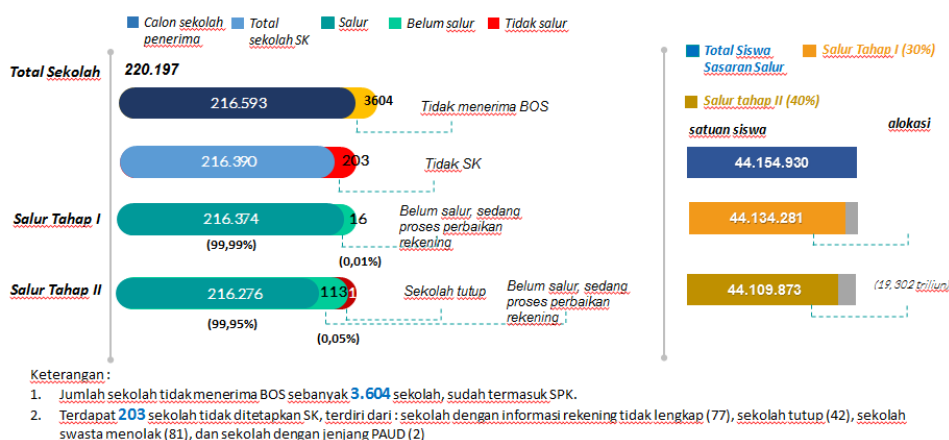
Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan, biaya operasional sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah. Biaya tersebut bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Regulasi ini juga mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler. Dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2018, tujuan pemberian BOS ke satuan pendidikan dibedakan antara lain:

1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk: a) membantu penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; b) membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah; c) meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau d) membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. SMA/SMALB/SMK untuk: a) membantu penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; b) meningkatkan angka partisipasi kasar; c) mengurangi angka putus sekolah; d) mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah; e) memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau f) meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Sasaran pemberian dana BOS adalah 1) SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kemendikbud, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik; dan 2) SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan. Sedangkan SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik

melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu di satuan pendidikan yang bersangkutan (Permendikbud No. 1 Tahun 2018). Pada tahun 2019, besaran alokasi BOS Reguler yang diterima Sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya. Satuan biaya untuk SD ditetapkan sebesar Rp800.000,00 per satu peserta didik setiap satu tahun. Untuk SMP sebesar Rp1.000.000,00 per satu peserta didik setiap satu tahun. Untuk SMA sebesar Rp1.400.000,00 per satu peserta didik setiap satu tahun. Untuk SMK ditetapkan sebesar Rp1.600.000,00 per satu peserta didik setiap satu tahun; dan untuk SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 per satu peserta didik setiap satu tahun. (Permendikbud No. 3 Tahun 2019).

Pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan dana BOS dalam APBN sebesar Rp54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa. Angka tersebut meningkat sebesar 6,03% dibanding tahun 2019. Dana BOS dibagi menjadi 3 jenis, yaitu BOS reguler, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi (Permendikbud No. 19 Tahun 2020). Bos Reguler diperuntukkan untuk pembelian alat multimedia pembelajaran, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah, dan penerimaan peserta didik baru. BOS Kinerja diberikan kepada sekolah yang berkinerja baik dalam meningkatkan rapor mutu pendidikan agar mencapai standar nasional pendidikan. Sedangkan BOS Afirmasi digunakan untuk mendukung operasional rutin sekolah di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T). Alokasi ini dibagi per *unit cost* (Rp/siswa) naik dari tahun 2019 ke 2020 di semua tingkatan dari SD hingga SMA, SMK sampai Pendidikan Khusus (Diksus) yaitu pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (Permendikbud No. 19 Tahun 2020). Besaran dana BOS reguler meningkat untuk siswa SD/MI, yaitu dari Rp800.000 per siswa di tahun 2019, menjadi Rp900.000 di tahun 2020. Untuk siswa SMP/MTs sebesar Rp1 juta menjadi Rp1,1 juta. Di tingkat SMA dari Rp1,4 juta di tahun 2019 menjadi Rp1,5 juta di tahun 2020. Sedangkan SMK sebesar Rp1,4 juta menjadi Rp1,6 juta. Terakhir untuk Diksus tidak berubah, yaitu sebesar Rp2 juta. Dana BOS 2020 dicairkan dalam 3 tahap, yaitu pada Tahap I; 30%, tahap II; 40% dan tahap III; 30% dengan syarat pencairan mengikuti ketentuan Kemendikbud (Permendikbud No. 19 Tahun 2020).



Gambar 1. Penyaluran Dana BOS (Sumber: Kemendikbud)

Peruntukan penggunaan dana BOS pada tahun 2020 cukup berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan: 1) pembiayaan langganan daya dan jasa seperti pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan 2) pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), serta masker atau penunjang kebersihan lainnya (Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020).

C. METODE PENELITIAN

Pada kajian ini Sumber data yang digunakan adalah Hasil Susenas MSBP 2018 (BPS 2018), Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 69/2009 tentang Standar Biaya Operasi nonpersonalia, Indeks Kemahalan Konstruksi (BPS 2019), PP No.48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, data laju inflasi 2009-2019, data BOP PAUD, data BOS Reguler, Banbel SLB Tahun 2020, PMK tentang IKFD 2019, dan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan survei *online* serta diskusi dengan informan dari BPS, Ditjen Dikdasmen, Bappenas, BPS, BI, dan Pusdatin.

Metode analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

- a. Data dianalisis untuk masing-masing jenjang berdasarkan data (i) BOP PAUD (ii) Hasil kajian BOP PAUD Puslitjakdikbud Tahun 2019 (iii) dana BOS reguler 2020, (iv) biaya pribadi diambil dari Susenas MSBP 2018, di mana komponen yang dipilih dari data biaya pribadi adalah komponen biaya pribadi yang dibayarkan ke sekolah, dan (v) hasil survei *online* BOSDA 2019.
- b. Perhitungan biaya operasional PAUD merupakan hasil kajian BOP PAUD yang dilakukan Puslitjakdikbud Tahun 2019 sedangkan perhitungan biaya operasional Dikdasmen merupakan penjumlahan dari BOS reguler, BOSDA, dan biaya pribadi.
- c. Biaya operasional PAUD dan Dikdasmen diestimasi dari tahun 2020-2025.
- d. Proyeksi kebutuhan biaya operasional setiap jenjang merupakan perkalian biaya operasional dengan proyeksi jumlah siswa. Proyeksi jumlah siswa menggunakan data proyeksi dari Pusat Data dan Informasi, Kemendikbud.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biaya Operasional PAUD

Biaya operasional PAUD merupakan total pengeluaran biaya operasional di satuan PAUD per siswa per tahun. Satuan biaya penyelenggaraan PAUD pada masing-masing satuan pendidikan berbeda, hal ini terkait dengan kegiatan dan aktivitas pembelajaran masing-masing. Besaran biaya satuan operasional PAUD disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Biaya Satuan dan Kebutuhan Anggaran BOP PAUD, 2020-2025

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Siswa PAUD	12.518.492	12.688.637	12.852.681	13.009.711	13.158.848	13.301.235
TK/RA	5.335.391	5.407.906	5.477.822	5.544.749	5.608.310	5.668.996
KB	3.468.064	3.515.200	3.560.646	3.604.149	3.645.465	3.684.911
SPS	3.651.912	3.701.547	3.749.402	3.795.210	3.838.718	3.880.255
TPA	63.125	63.984	64.811	65.603	66.355	67.073
BOP per Siswa (Rp)						
TK/RA	1.871.896	1.929.372	1.984.447	2.036.809	2.086.155	2.132.193
KB	1.042.479	1.074.488	1.105.160	1.134.321	1.161.803	1.187.442
SPS	1.084.572	1.117.873	1.149.783	1.180.122	1.208.713	1.235.387
TPA	2.149.445	2.215.443	2.278.684	2.338.810	2.395.473	2.448.337
Kebutuhan (Juta Rp)						
TK/RA	9.987.297	10.433.862	10.870.447	11.293.595	11.699.804	12.087.394
KB	3.615.384	3.777.040	3.935.084	4.088.262	4.235.312	4.375.618
SPS	3.960.762	4.137.859	4.310.999	4.478.811	4.639.908	4.793.617
TPA	135.684	141.753	147.684	153.433	158.952	164.217

Sumber: Puslitjak, 2020

Hasil analisis pada Tabel 3, BOP tertinggi adalah untuk satuan TK/RA yaitu sebesar Rp9.987.297 atau 56,4% dengan jumlah siswa sebesar 5.335.391 siswa. Sedangkan BOP TPA paling rendah dibandingkan BOP 3 satuan PAUD lainnya. Walaupun biaya satuan operasional per siswa satuan TPA paling tinggi, namun karena jumlah siswa TPA sedikit, maka kebutuhan anggaran BOP Satuan TPA hanya sebesar Rp135,7 miliar atau 0,8%. Dari sisi jumlah siswa, Satuan TPA memiliki jumlah siswa yang paling sedikit, yaitu hanya 0,5%, sedangkan dari sisi BOP, satuan TPA memiliki BOP paling besar. Bila dikaitkan dengan kontribusi satuan TPA terhadap APK PAUD yang sangat kecil, bentuk layanan yang minim pada layanan pendidikannya, keberadaan TPA yang cenderung terkonsentrasi di kota besar, serta kecenderungan kemampuan orang tua siswa TPA yang relatif mampu dari sisi finansial, maka cukup relevan bila pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih fokus untuk membantu atau mensubsidi ke 3 satuan PAUD lainnya.

2. Biaya Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah

a) Besaran Biaya Satuan Operasional Dikdasmen

Besaran biaya satuan operasional Dikdasmen untuk tahun 2020 diperoleh dengan melakukan pendekatan sumber pendanaan biaya operasional di sekolah selama ini. Sumber pendanaan di sekolah adalah dari Pemerintah Pusat (BOS Reguler), Pemerintah Daerah (BOSDA), dan orang tua siswa. Jumlah dari ketiga sumber pendanaan tersebut merupakan total biaya satuan operasional di tiap tingkat/jenjang Dikdasmen.

Tabel 4. Biaya Satuan Operasional Dikdasmen (Rp)

Jenis Satuan Pendidikan	Pemerintah Pusat (BOS Reguler)	Pemerintah Daerah (BOSDA)	Biaya Pribadi (Orang Tua)	Biaya Satuan Operasional
SD/MI	900.000	546.249	507.825	1.954.074
SMP/MTs	1.100.000	1.003.061	567.330	2.670.391
SMA/MA	1.500.000	2.166.432	795.143	4.461.575
SMK	1.600.000	2.166.432	973.908	4.740.340
SDLB	3.500.000	546.249	1.146.065	5.192.315
SMPLB	3.750.000	1.003.061	1.150.833	5.903.894
SMALB	4.250.000	2.166.432	1.206.210	7.622.642

Sumber: Puslitjak, 2020

Pada Tabel 4 terlihat bahwa biaya satuan operasional terbesar Tahun 2020 ada pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan menengah, yaitu SMA/MA, SMK, dan SMALB, dimulai pada SMA/MA sebesar Rp4.461.575, SMK sebesar Rp4.740.340, dan tertinggi pada SMALB sebesar Rp7.622.642.

b) Sumber Pendanaan Biaya Satuan Operasional Dikdasmen

Pendanaan biaya operasional di sekolah bersumber dari Pemerintah Pusat (BOS), Pemerintah Daerah (BOSDA), dan orang tua siswa.

Tabel 5. Sumber Pendanaan Biaya Satuan Operasional Dikdasmen

Jenis Satuan Pendidikan	Sumber Pendanaan (%)		
	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Orang Tua
SD	46,5%	25,4%	28,1%
SMP	41,5%	20,7%	37,8%
SMA	33,9%	17,4%	48,8%
SMK	34,0%	20,0%	45,9%
SDLB	67,9%	21,5%	10,6%

Jenis Satuan Pendidikan	Sumber Pendanaan (%)		
	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Orang Tua
SMPLB	63,9%	19,0%	17,1%
SMALB	56,1%	15,4%	28,5%

Sumber: Puslitjak, 2020

Pada Tabel 5 terlihat bahwa jenjang pendidikan dasar di luar SLB (SDLB dan SMPLB) kontribusi terbesar diperoleh dari sumber Pemerintah Pusat yaitu 46,5% di SD dan 41,5% di SMP, berikutnya dari sumber orang tua, 28,1% di SD dan 37,8% di SMP. Kontribusi dari Pemerintah Daerah adalah yang terendah, hanya 25,4% di SD dan 20,7% di SMP. Sementara untuk satuan pendidikan di jenjang Dikmen, kontribusi terbesar adalah dari orang tua siswa, yaitu 48,8% di SMA dan 45,9% di SMK. Hal ini wajar karena pemerintah belum menerapkan wajib belajar (Wajar) 12 tahun. Apabila Wajar 12 tahun diberlakukan, maka beban Pemerintah Pusat akan bertambah kurang lebih 2 kali lipat karena pemerintah berkewajiban untuk menanggung biaya pribadi yang selama ini ditanggung oleh orang tua siswa. Berbeda dengan satuan pendidikan SLB, kontribusi terbesar adalah dari Pemerintah Pusat, yaitu 67,9% untuk SDLB, 63,9% untuk SMPLB, dan 56,1% untuk SMALB. Besarnya kontribusi dari Pemerintah Pusat ini diberikan mengingat mahalanya bahan dan alat-alat pembelajaran di SLB, sehingga di luar dana BOS Pemerintah Pusat juga memberikan dana bantuan belajar.

c) Proyeksi Biaya Satuan Operasional Dikdasmen tahun 2020 s.d. 2025

Tabel 6. Proyeksi Biaya Satuan Operasional Dikdasmen tahun 2020 s.d. 2025

Satuan Pendidikan	Biaya Satuan Tahun (Rp)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SD/MI	1.954.074	2.014.073	2.071.566	2.126.227	2.177.740	2.225.799
SDLB	5.192.315	5.351.742	5.504.510	5.649.754	5.786.632	5.914.333
SMP/MTs	2.670.391	2.752.384	2.830.952	2.905.651	2.976.047	3.041.723
SMPLB	5.903.894	6.085.170	6.258.874	6.424.023	6.579.659	6.724.861
SMA/MA	4.461.575	4.598.566	4.729.834	4.854.637	4.972.252	5.081.980
SMK	4.740.340	4.885.890	5.025.360	5.157.961	5.282.924	5.399.509
SMALB	7.622.642	7.856.692	8.080.965	8.294.192	8.495.138	8.682.610

Cat: Setelah mengeluarkan biaya pribadi yang tetap ditanggung orang tua

Sumber: Puslitjak, 2020

Hasil analisis kebutuhan biaya satuan operasional di sekolah terendah adalah di SD/MI untuk tahun 2020 sebesar Rp1.954.074 per siswa per tahun dan yang tertinggi adalah kebutuhan biaya operasional di SMALB sebesar Rp7.622.642 per siswa per tahun. Kebutuhan biaya satuan operasional Dikdasmen pada sekolah luar biasa cenderung besar, yaitu mulai Rp5.192.315 untuk

SDLB, Rp5.903.894 untuk SMPLB, dan Rp7.622.642 untuk SMALB (lihat Tabel 6). Hal ini wajar karena satuan SLB memerlukan bahan dan peralatan pembelajaran khusus.

d) Proyeksi Anggaran Operasional Dikdasmen 2020 s.d. 2025 (Sistem Kemendikbud)

Tabel 7 menyajikan estimasi besaran kebutuhan anggaran operasional sekolah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (BOS) dan Pemerintah Daerah (BOSDA) baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Total kebutuhan anggaran operasional Dikdasmen di bawah pengelolaan Kemendikbud untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp127.154.599. Total kebutuhan anggaran operasional Dikdasmen ini akan meningkat setiap tahunnya sesuai dengan proyeksi inflasi pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 7. Proyeksi Anggaran Operasional Dikdasmen 2020 s.d. 2025 (Sistem Kemendikbud)

Satuan Pendidikan	Anggaran Tahun (Rp Juta)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SD	49.153.484	50.662.065	52.298.568	53.695.415	55.008.196	56.229.955
SDLB	466.768	501.817	531.730	561.851	591.689	620.940
SMP	28.195.363	29.165.698	29.795.454	30.375.300	30.754.406	31.434.612
SMPLB	203.076	216.827	228.174	134.545	250.422	260.999
SMA	23.775.815	24.577.188	25.465.077	26.466.177	27.297.937	27.883.673
SMK	25.216.840	26.049.528	27.009.772	28.125.236	29.062.444	29.730.716
SMALB	143.252	154.384	163.995	173.714	183.393	192.936
Total	127.154.599	131.327.506	135.492.769	139.532.237	143.148.487	146.353.831

Sumber: Puslitjak, 2020

e) Proyeksi Anggaran Operasional Dikdasmen 2020 s.d. 2025 (Sistem Kemenag)

Pengelolaan pendidikan tidak hanya dilakukan oleh Kemendikbud tetapi juga oleh Kementerian Agama yang mengelola pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Besaran kebutuhan biaya operasional sekolah per siswa di tiap satuan pendidikan tersebut sama dengan kebutuhan biaya operasional sekolah per siswa di sekolah di bawah pengelolaan Kemendikbud pada tiap satuan pendidikan yang setara, yaitu MI setara SD, MTs setara SMP, dan MA setara SMA. Dengan demikian, penghitungan total kebutuhan anggaran biaya operasional Dikdasmen harus juga memperhitungkan jumlah siswa pada satuan pendidikan MI, MTs, dan MA. Total kebutuhan anggaran operasional Dikdasmen di bawah Kemenag untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp22.042.655.

Tabel 8. Proyeksi Anggaran Operasional Dikdasmen 2020 s.d. 2025 (Sistem Kemenag)

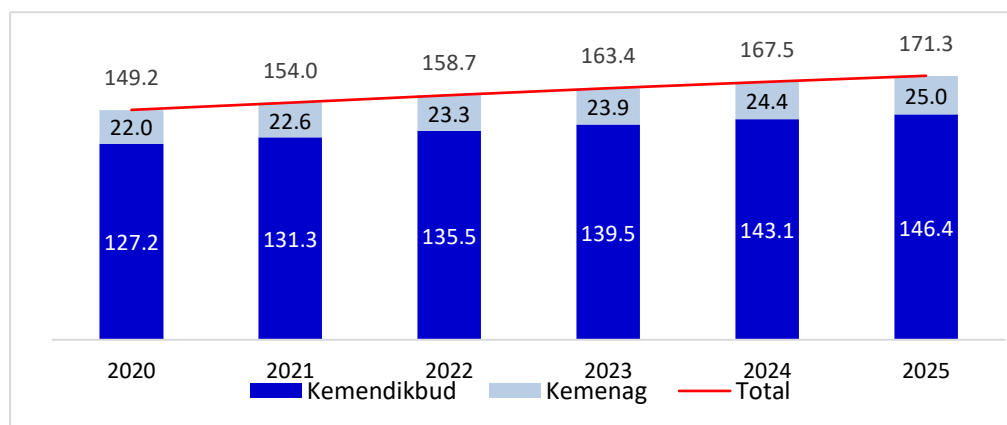
Satuan Pendidikan	Anggaran Tahun (Rp Juta)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MI	7.189.042	7.383.069	7.589.485	7.804.391	8.023.810	8.243.630
MTs	8.167.845	8.392.432	8.616.297	8.840.122	9.011.041	9.292.219
MA	6.685.769	6.849.803	7.047.145	7.210.146	7.347.939	7.455.921
Total	22.042.655	22.625.304	23.252.927	23.854.660	24.382.790	24.991.770

Sumber: Puslitjak, 2020

f) Total Kebutuhan Anggaran Operasional Dikdasmen Kemendikbud dan Kemenag

Total kebutuhan anggaran operasional Dikdasmen Kemendikbud dan Kemenag Tahun 2020 adalah sebesar Rp149,2 Triliun. Besaran kebutuhan anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Grafik 1 memperlihatkan bahwa total kebutuhan anggaran operasional dikdasmen Tahun 2020 sebesar Rp149,2 Triliun tersebut merupakan kebutuhan biaya operasional di sekolah di bawah pengelolaan Kemendikbud sebesar Rp127,2 Triliun (85,22%) dan di sekolah di bawah pengelolaan Kemenag sebesar Rp22,0 Triliun (14,78%). Total kebutuhan anggaran biaya operasional di tahun-tahun berikutnya meningkat sesuai dengan proyeksi laju inflasi dan jumlah siswa di masing-masing satuan pendidikan.

Grafik 1. Total Kebutuhan Anggaran Operasional Dikdasmen Kemendikbud dan Kemenag, Tahun 2020 (Rp Triliyun)



Sumber: Puslitjak, 2020

3. STRATEGI PEMBIAYAAN PAUDDASMEN

Penentuan besaran kontribusi antara pemerintah pusat dan daerah dilihat dari kategori Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sehingga kontribusi antara pusat dan daerah disesuaikan dengan tingkat kemampuan daerahnya berdasarkan kategori IKF dan IKK. Jika ketimpangan antara IKF dengan IKK suatu wilayah berada dalam kategori tinggi maka

kontribusi daerah dalam pembagian biaya bersama pemerintah pusat akan mempunyai porsi yang lebih rendah, sebaliknya jika kategori ketimpangan antara IKF dengan IKK rendah maka persentase pemerintah daerah lebih banyak dalam memberikan kontribusi pendanaan dibandingkan pemerintah pusat. Matriks dan Proporsi kontribusi pendanaan ini dapat dilihat pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9. Matriks Ketimpangan Berdasarkan IKK dan IKF

Kategori		IKK				
		1	2	3	4	5
IKF	1	0	-1	-2	-3	-4
	2	1	0	-1	-2	-3
	3	2	1	0	-1	-2
	4	3	2	1	0	-1
	5	4	3	2	1	0

Cat: Nilai dalam setiap sel = IKF-IKK.

Sumber: PMK 126/PMK.07/2019, BPS, diolah

Tabel 10. Proporsi Pendanaan Pusat dan Daerah berdasarkan IKF dan IKK

IKF-IKK	Kategori Kemampuan		Kontribusi	
			Pemerintah	Daerah
-4 dan -3	1	Sangat rendah	80%	20%
-2 dan -1	2	Rendah	60%	40%
0	3	Sedang	40%	60%
1 dan 2	4	Tinggi	20%	80%
3 dan 4	5	Sangat tinggi	0%	100%

Keterangan (IKF-IKK):

- (-4) = IKF sangat rendah IKK sangat tinggi
- (-3) = IKF sangat rendah IKK tinggi atau IKF rendah IKK sangat tinggi
- (-2) = IKF sangat rendah IKK sedang atau IKF rendah IKK tinggi atau IKF sedang IKK sangat tinggi
- (-1) = IKF sangat rendah IKK rendah atau IKF rendah IKK sedang atau IKF sedang IKK tinggi atau IKF tinggi IKK sangat tinggi
- (0) = IKF dan IKK berada dalam kategori yang sama
- (1) = IKF sangat tinggi IKK tinggi atau IKF tinggi IKK sedang atau IKF sedang IKK rendah atau IKF rendah IKK sangat rendah

- (2) = IKF sangat tinggi IKK sedang atau IKF tinggi IKK rendah atau IKF sedang IKK sangat rendah
- (3) = IKF tinggi IKK sangat rendah atau IKF sangat tinggi IKK rendah
- (4) = IKF sangat tinggi IKK sangat rendah

Jenjang PAUD berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sehingga IKK yang digunakan adalah IKK kabupaten/kota. Apabila digunakan metode pengkategorian dengan menggunakan IKK, terdapat 453 kabupaten/kota dengan kategori IKK moderat, yang mengindikasikan tingkat harga yang berlaku di kabupaten/kota tersebut berada di ambang rerata harga di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia, sedangkan 28 kabupaten/kota di antaranya memiliki indeks harga di bawah rerata nasional yang mengindikasikan tingkat harga yang lebih rendah di kabupaten/kota tersebut. Di samping itu, 16 kabupaten/kota memiliki IKK tinggi, dan 17 kabupaten/kota dengan IKK sangat tinggi.

Tabel 11. Sebaran Kab/Kota Menurut Kategori IKK dan IKFD

Kategori		IKK					Jumlah
		1	2	3	4	5	
IKFD	1	0	5	115	3	4	127
	2	0	9	110	6	1	126
	3	0	11	101	4	11	127
	4	0	2	81	2	1	86
	5	0	1	46	1	0	48
Jumlah		0	28	453	16	17	514

Sumber: PMK 126/PMK.07/2019, BPS, diolah

Apabila didasarkan dengan ketentuan PMK No. 126 tahun 2019, terdapat 253 kabupaten/kota dengan tingkat kemampuan keuangan (IKFD) di bawah rata-rata, dengan 127 kabupaten/kota dengan IKFD sangat rendah dan 126 kabupaten/kota dengan kategori IKFD rendah. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan kategori IKFD sedang, terdapat pada 127 kabupaten/kota, dan untuk kabupaten/kota dengan kategori IKFD di atas rata-rata terdapat pada 134 kabupaten/kota, di mana 86 kabupaten/kota di antaranya termasuk dalam kategori tinggi, dan 48 kabupaten/kota lainnya dalam kategori sangat tinggi. Setelah menggabungkan kedua indikator IKFD dan IKK, kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia kemudian dikelompokkan lagi, sehingga diperoleh

gambaran kemampuan daerah dalam membiayai operasional sekolah untuk tingkat PAUD, seperti dirangkum dalam Tabel 12.

Tabel 12. Sebaran Kab/Kota Menurut Kemampuan Membiayai Ketimpangan

Kriteria Kemampuan		Jumlah	%	Pusat	Daerah
1	Sangat Rendah	8	1.56	80	20
2	Rendah	252	49.03	60	40
3	Sedang	112	21.79	40	60
4	Tinggi	141	27.43	20	80
5	Sangat Tinggi	1	0.19	0	100
Jumlah		514	100.00		

Sumber: PMK 126/PMK.07/2019, BPS, diolah

E. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Simpulan

(i) Biaya Operasional Sekolah

Tabel 13. Biaya Operasional Sekolah PAUD dan Dikdasmen, 2020

Biaya Operasional PAUD	TK/RA	KB	SPS	TPA			
	1.871.896	1.042.479	1.084.572	2.149.445			
BOP Pusat	600.000	600.000	600.000	600.000			
Biaya Operasional Dikdasmen	SD	SMP	SMA	SMK	SDLB	SMPLB	SMALB
	1.954.074	2.670.391	4.461.575	4.740.340	5.192.315	5.903.894	7.622.642
BOS Pusat	1.000.000	1.100.000	1.500.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bantuan Belajar					1.500.000	1.750.000	2.250.000

(ii). Kontribusi Pendanaan Berdasarkan Kemampuan Daerah

PAUD (Rp)	TK/RA	KB	SPS	TPA			
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) IKK	763.797	756.382	774.110	763.211			
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) IKK-IKFD	600.597	600.214	600.234	600.727			
Dikdasmen (Rp)	SD	SMP	SMA	SMK	SDLB	SMPLB	SMALB
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) IKK	1.869.729	2.705.848	4.702.058	4.818.599	5.120.516	6.018.020	8.150.944
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) IKK-IKFD	1.581.291	2.230.197	3.855.345	3.956.996	4.275.859	4.975.211	6.627.560

Tabel 14. Kontribusi Pendanaan PAUD dan Dikdasmen berdasarkan Kemampuan Daerah, 2020

2. Rekomendasi

(i). Biaya Operasional Paudasmen:

- a) Untuk mengatasi ketimpangan pembiayaan operasional sekolah, pemerintah daerah perlu memberikan dana BOPDA/BOSDA, terutama bagi daerah yang selama ini belum memberikan BOPDA/BOSDA, namun memiliki kemampuan keuangan tinggi.
- b) Pemerintah Pusat perlu menanggung biaya pribadi yang dibayarkan orang tua ke sekolah, mengingat masih adanya sekolah yang menarik iuran sekolah.

(ii). Strategi:

BOS Perlu memperhitungkan:

- a) IKK kabupaten/kota: Biaya operasional sekolah berbeda di setiap wilayah bergantung dari tingkat kemahalan, untuk itu pemerintah pusat perlu menyesuaikan BOS dengan tingkat kemahalan daerah.
- b) IKK dan IKFD kabupaten/kota: Biaya operasional sekolah berbeda di setiap wilayah bergantung dari tingkat kemahalan. Pemerintah pusat perlu menyesuaikan BOS, besarnya kontribusi memperhitungkan tingkat kemampuan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. "Hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2018." Data Olah Tidak Diterbitkan.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kab/kota*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ghozali, Abbas. 2003. *Analisis Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas. Laporan Penelitian
- Kemendikbud. 2019. "Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah: Data Sekolah." Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Diakses pada 4 Februari 2019 dari: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp>.
- Menteri Keuangan. 2019. Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4/2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13/2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20/2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Menteri Pendidikan Nasional. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69/2009 tentang Standar Biaya Operasi non-Personalia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. *Laporan Kajian Efektivitas DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Penelitian.

ANALISIS PENGUATAN KARAKTER SISWA SMP DI YOGYAKARTA SELAMA BELAJAR DARI RUMAH

H.Robiasih, A. Setiawan, dan H. Dardjito

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Abstrak. Hasil belajar siswa di semua jenjang pendidikan harus terintegrasi antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Belajar tidak pernah mengenal kata berhenti dalam kondisi apa pun tanpa mengenal ruang dan waktu. Dalam kondisi darurat kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya, tetapi siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi sikap atau karakter apa yang sudah dikuatkan oleh sekolah untuk bekal siswa lulus serta strategi yang dibutuhkan dalam penguatan karakter selama belajar dari rumah (BDR). Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Responden yang terlibat adalah guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan pengawas jenjang SMP. Penggalan data menggunakan metode *focus grup discussion* (FGD) dengan bantuan pedoman wawancara, observasi, dan angket dengan jawaban terbuka. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif model Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dalam penguatan pendidikan karakter dari rumah dibutuhkan model serta sekolah harus mendesain model pembelajaran dengan mengintegrasikan karakter. Nilai-nilai karakter yang secara umum dianggap sudah ditanamkan oleh para guru selama BDR adalah disiplin, kerja keras, dan mandiri.

Kata kunci: penguatan karakter, BDR, pelajar Pancasila

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peranan yang amat penting dalam pembentukan karakter dan peradaban suatu bangsa. Dengan pendidikanlah nilai-nilai peradaban suatu bangsa akan tetap terjaga dan terpelihara secara konsisten di tengah perubahan sosial yang dinamis. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mendorong *how to know* dan *how to do*, tetapi yang amat penting adalah bagaimana *how to be* harus terwujud dalam realitas sosial. Pendidikan juga kunci pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang adil dan sejahtera, aman dan damai, serta maju dan mendunia. Pendidikan pulalah yang akan menentukan ke mana bangsa ini akan menyongsong masa depannya serta memperbaiki tatanan kehidupan yang relevan dalam perubahan kekinian tanpa harus kehilangan kepribadian jati diri bangsanya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1), menyebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Lebih lanjut Pasal 3 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, inilah profil pelajar Pancasila

Saat ini seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdampak penyebaran COVID-19. Dalam kondisi apa pun, negara berkewajiban melindungi segenap anak bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara berkewajiban mencari jalan keluar keberlangsungan pendidikan di sekolah. Dengan menyadari letak geografis wilayah Indonesia sebagai daerah kepulauan dengan keadaan yang berbeda-beda, perlu dirumuskan regulasi yang dapat menjadi solusi agar kegiatan pembelajaran tetap dapat dilaksanakan dengan baik di tengah kondisi darurat apa pun. Dikatakan demikian sebab belajar tidak pernah mengenal kata berhenti dan dalam kondisi apa pun tanpa menganal ruang dan waktu. Namun, dalam kondisi darurat, kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya, tetapi siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran.

Pada masa darurat COVID-19 setiap daerah telah menyiapkan sejumlah strategi dan program guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tengah kondisi darurat sesuai dengan kondisi dan kreativitas serta kemampuan sekolah. Kegiatan pembelajaran dan penilaian dilakukan dengan menugaskan siswa belajar dari rumah (BDR) dengan bimbingan dari guru dan orang tua hingga bentuk lain yang membuat keberadaan siswa tetap mendapat layanan atas kebutuhan belajarnya. Kegiatan pembelajaran tidak hanya dilaksanakan sepenuhnya di sekolah, tetapi siswa dapat BDR. Kegiatan pembelajaran yang semula lebih banyak dilaksanakan secara tatap muka antara guru dan siswa di kelas, kini berubah menjadi pembelajaran jarak jauh (BDR) secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) atau kombinasi keduanya. Upaya tersebut dilakukan dalam mengoptimalkan layanan pendidikan kepada setiap siswa pada masa darurat.

Dari beberapa informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan pelaksanaan BDR, belum semua sekolah dapat menjalankan kegiatan pembelajaran jarak jauh secara *online* secara penuh, bahkan sebagian besar masih secara luring. Beberapa yang kendala ditemukan, antara lain keterbatasan SDM, keterbatasan siswa memiliki sarana berupa laptop atau HP (*handphone*), kesulitan akses internet, dan keterbatasan kuota internet siswa. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa darurat COVID-19 antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya sangat bervariasi:

Berdasarkan Kepmendikbud No 719/P/2020, diperlukan perubahan paradigma terhadap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kegiatan BDR menuntut adanya kolaborasi, partisipasi dan komunikasi aktif antara guru, orang tua, dan siswa menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dengan prinsip bahwa “semua kita adalah guru, semua kita adalah murid, dan semua tempat adalah kelas”. BDR tidak sekadar memenuhi tuntutan kompetensi (KI-KD) pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, dan kemandirian siswa. Guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi pelajaran dan memberi tugas kepada siswa agar terwujud pembelajaran yang bermakna, inspiratif, dan menyenangkan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah di Indonesia yang juga terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan pembelajaran dan penilaian di DIY juga menerapkan konsep BDR. Jika pada kondisi normal, DIY merupakan provinsi yang mutu pendidikannya (baik secara akademik maupun nonakademik) sangat baik sejajar dengan siswa di DKI Jakarta. Apakah pada masa pandemi ini muncul permasalahan disparitas capaian pembelajaran BDR? Apakah masalah penguatan kompetensi sikap siswa ketika melakukan BDR juga dialami oleh para guru di DIY? Untuk mengetahui gambaran tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penguatan karakter yang telah dilakukan oleh sekolah pada masa BDR. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan dalam rangka mengembangkan model penguatan karakter siswa SMP di DIY melalui proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dengan Konsep Scaffolding 4N yang pernah digagas oleh Ki Hajar Dewantara.

B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian jenis ini memungkinkan peneliti mendeskripsikan berbagai data yang diperoleh secara detail dan terarah. Penelitian ini mengambil sampel sekolah menengah pertama (SMP) di tiga wilayah di DIY yang melakukan BDR, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Responden sebanyak 12 guru SMP, 3 kepala sekolah, 3 pengawas, 15 siswa, dan 3 orang tua siswa.

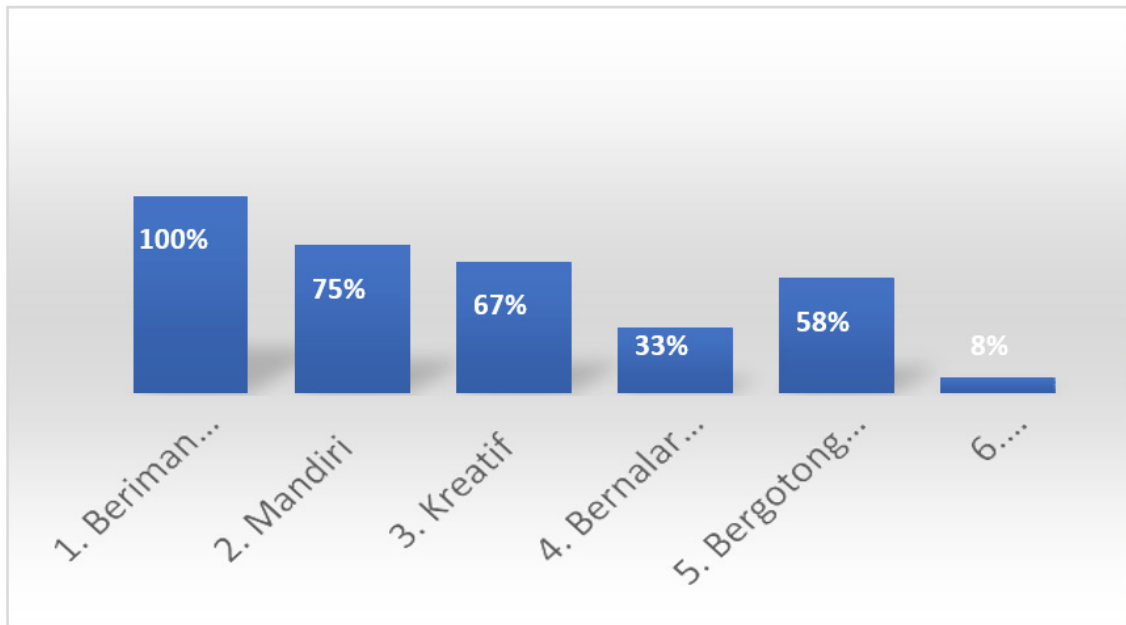
Pemilihan responden didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya status sekolah, penggunaan media daring selama BDR, dan keterwakilan dari wilayah sekolah berada. Hasilnya diharapkan dapat memberikan informasi lengkap terkait dengan penguatan karakter selama BDR. Pengambilan data dilakukan dengan metode *focus grup discussion* (FGD), telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik Miles dan Huberman. Menurut Miles & Huberman (1992: 16), analisis terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada dasarnya penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna individu yang terkait dengan masalah sosial (Creswell J. W. and Creswell J. D., 2018).

Data yang terhimpun akan dianalisis data penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil angket yang diperoleh dari telah responden isi-melalui *google form*, kemudian dilakukan pendalaman melalui FGD secara luring sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Hasil analisis tersebut dipadukan dengan hasil wawancara. Selanjutnya, dilakukan reduksi dengan membuat abstraksi untuk memperoleh kesimpulan. Abstraksi adalah rangkuman, proses, dan pernyataan tentang isi data yang ditemukan. Data divalidasi dengan menggunakan metode triangulasi. Ada dua strategi, yaitu memeriksa tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan pengecekan keakuratan sumber data.

C. Hasil dan Pembahasan

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi pada Era Revolusi Industri 4.0 dewasa ini, pola kerja masa depan tentu akan sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Perubahan besar pada Era Revolusi Industri 4.0 membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tidak mengenal batas geografis dan tidak terikat sehingga pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja. Untuk itu, siswa perlu disiapkan, selain mempunyai kemampuan akademik yang baik, juga harus ditunjang dengan karakter yang baik.

Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh kepala sekolah, sebagian besar sekolah menetapkan nilai karakter yang harus dikuatkan kepada siswa dalam KTSP sekolah bersumber dari KI 1, KI 2, PPK, visi misi sekolah, UU Sisdiknas, Permendikbud No. 37/2018, dan Permendikbud No. 20/2018. Karakter tersebut sejalan dengan apa yang telah ditetapkan Kemendikbud di dalam Renstra Kemendikbud 2020--2024. Kemendikbud telah menetapkan enam karakter yang menandai profil pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan pada diri peserta didik saat ini, yaitu (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; (2) mandiri; (3) kreatif; (4) bernalar kritis; (5) bergotong royong, dan (6) kebhinekaan global. Dari enam karakter profil pelajar Pancasila tersebut, prosentase guru yang menguatkan karakter tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini.

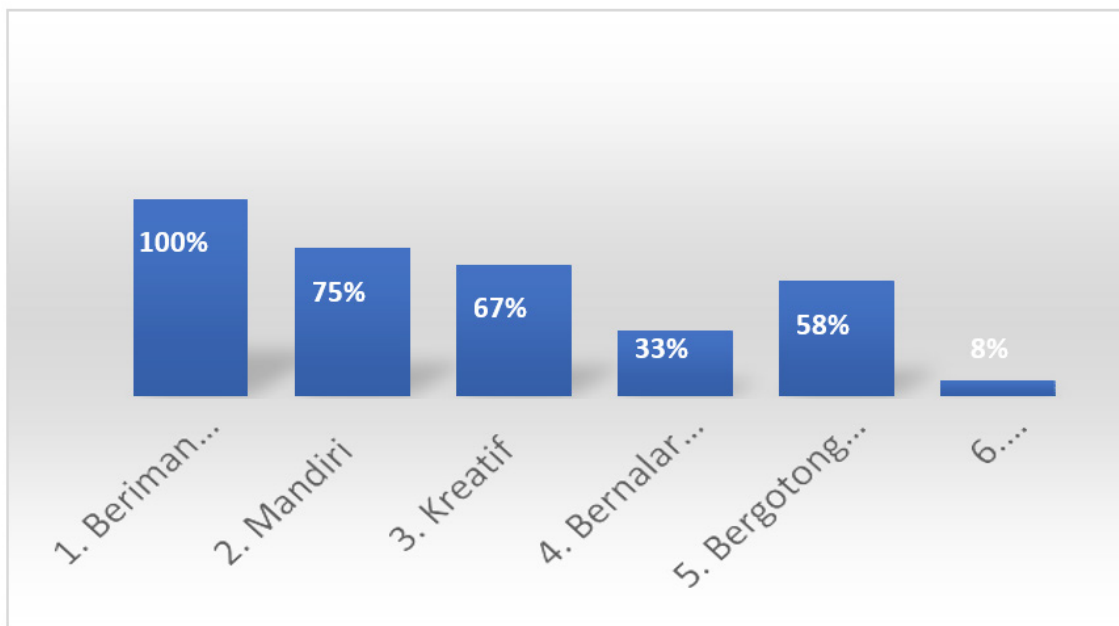


Gambar 1 Karakter siswa yang sudah dikuatkan oleh guru

Adapun bentuk penguatan yang dilakukan guru dibuktikan dengan menuangkan karakter dalam dokumen RPP. Pelaksananaanya sebagian besar dilakukan dengan meminta siswa berdoa, baik pada awal maupun akhir pembelajaran. Nilai-nilai beriman dan berakhlak mulia yang lain dilakukan ketika guru bertatap muka dengan siswa: Berdasarkan data tersebut, masih perlu diberi penguatan kepada guru dalam penguatan karakter lainnya hingga siswa mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut informasi, 75% guru menyatakan bahwa penguatan karakter melalui tatap muka dengan orang tua sangat sulit dilakukan, antar lain karena orang tua punya aktivitas sepanjang hari dalam memenuhi kebutuhan keluarga hingga tidak sempat memantau perkembangan karakter putra-putrinya.

Untuk menguatkan karakter siswa dukungan kepala sekolah dan pengawas terhadap para guru juga sangat besar. Proses monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah sebagian besar berorientasi pada administratif, yaitu mengecek apakah karakter yang akan dikuatkan itu sudah tertuang di dalam RPP guru. Kepala sekolah kadang-kadang juga melakukan kunjungan kelas saat pembelajaran dan penilaian serta menyampaikannya dalam rapat rutin. Kondisi BDR seperti ini membuat proses pengamatan di kelas tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan apa yang dirasakan oleh siswa, karakter yang dikuatkan adalah aspek religiositas, disiplin, mandiri, dan kreatif. Hal tersebut dilakukan oleh guru melalui kegiatan berdoa dan selalu berdoa, disiplin untuk belajar, suka meningkatkan kreatifitas, dan ketika diberi PR agar bekerja secara mandiri. Hal ini membuktikan bahwa para siswa kurang bisa memahami maksud nilai-nilai karakter lain yang harus dikuatkan. Berikut adalah gambaran tanggapan siswa tentang nilai karakter yang disampaikan guru secara lisan selama proses BDR.



Gambar 2 Pemahaman siswa terkait dengan karakter yang dikuatkan oleh guru

Penguatan pendidikan karakter yang dilakukan sekolah selama pembelajaran BDR masih terkesan insidental dan juga tidak terintegrasi, baik dengan pembelajaran maupun kesesuaiannya dengan kondisi siswa. Hal ini terlihat dari analisis data wawancara yang dilakukan dengan guru, siswa dan juga orang tua. Berdasarkan analisis data dari siswa, pendidikan karakter baru sebatas berdoa dan mengingatkan seputar karakter tertentu tanpa pembinaan yang berarti bagi siswa yang melanggar nilai-nilai karakter tersebut. Sebagai contoh, menurut siswa, guru tidak memberikan teguran bagi siswa yang terlambat mengumpulkan tugas atau tidak disiplin saat pembelajaran dari rumah.

Kondisi yang dikemukakan di atas, juga dibenarkan oleh orang tua bahwa tidak ada komunikasi efektif terkait dengan penanaman karakter selama BDR. Komunikasi guru-orang tua sebagian besar melalui WA group dan isinya sebagian besar adalah tugas yang harus dilakukan oleh siswa di rumah. Hal ini juga disadari oleh guru. Hasil wawancara dengan guru dari tiga wilayah menyatakan bahwa sebagian guru masih merasa kesulitan untuk memasukan penguatan karakter dan penilaiannya selama pembelajaran. Hal itu disebabkan oleh belum adanya, baik model atau strategi terencana yang disepakati bersama di sekolah maupun masukan dari pengawas. Pengawas juga sangat kesulitan melakukan monitoring terkait dengan penguatan karakter karena sebagian besar yang dikonsultasikan adalah bagaimana melakukan proses pembelajaran dan penilaian pada saat BDR.

Sesuai dengan hasil kajian, guru menghendaki adanya strategi baru, yaitu suatu desain atau model yang bisa dilakukan oleh guru sehingga dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter melalui pembelajaran dan mengurangi rasa kejenuhan, baik dari guru, siswa, maupun orang tua. Guru berharap sekolah bisa berkolaborasi dengan dinas pendidikan atau perguruan tinggi untuk membuat desain pembelajaran yang di dalamnya dapat diintegrasikan nilai-nilai karakter. Hal ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa dalam melaksanakan pembelajaran, pendidik hendaknya lebih mengutamakan pembentukan karakter sesuai dengan aspek pengembangan pengetahuan/keilmuan dan tata nilai. Guru perlu *scaffolding* agar siswa dapat melalui proses 4 N atau *Niteni*, *Niroke*, dan *Nambahi* serta *Nularke* (Badan Perjuangan dan Pembangunan Masyarakat, 2016; Panitia Penerbitan, 2013) agar nilai-nilai karakter itu dapat menjadi pendorong dan penggerak semangat dalam bersikap dan berperilaku.

Hasil dari penggalian data tentang karakter yang harus dikuatkan selama BDR ternyata mendapat respons yang beragam. Dari hasil wawancara dan telaah dokumen rencana pembelajaran bahwa

kecenderungan guru lebih menekankan adanya karakter disiplin, jujur, dan mandiri. Hal tersebut diyakini oleh guru bahwa karakter disiplin diperlukan sebagaimana dikemukakan oleh Nucci & Narvaez (2008: 197) *“developmental discipline can help teachers build the trusting relationships necessary for all students to learn and develop academically and morally”*. Hal ini berarti bahwa pengembangan disiplin bisa membantu guru dalam membangun kebutuhan hubungan kepercayaan dan semua siswa untuk belajar dan membangun secara akademik maupun secara moral. Pengembangan disiplin yang dilakukan oleh guru mampu membentuk siswa menjadi pribadi yang disiplin, sekaligus dapat meningkatkan prestasi mereka secara akademik. Siswa yang memiliki karakter disiplin dalam keseharian tentunya akan disiplin pula dalam belajar di sekolah dan di rumah sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan prestasinya di sekolah.

Menurut siswa, pengawas, dan kepala sekolah, karakter yang paling penting untuk dikuatkan adalah karakter mandiri dan kerja keras. Hal ini, menurut mereka, bukan tanpa alasan karena karakter mandiri perlu ditumbuhkan dalam diri anak-anak karena guru tidak dapat memberikan pendampingan ketika siswa BDR. Para siswa berpendapat, kemandirian merupakan bekal utama saat BDR. Namun, nilai karakter tersebut belum menjadi tabiat, dan bersifat tetap, atau sesuatu yang khas dalam diri setiap siswa.

Penguatan karakter yang memenuhi kriteria profil pelajar Pancasila belum terwujud sepenuhnya. Meskipun karakter mandiri, disiplin, dan kerja keras memang sangat penting dalam menentukan keberhasilan siswa, nilai-nilai karakter belum menjadi **tabiat** dan bersifat **tetap** serta **menjadi tanda khusus** bagi siswa yang satu dengan yang lain (Ki Hajar Dewantara, 1933). Para siswa cenderung hanya mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks pelaksanaan tugas sekolah. Di samping itu, nilai-nilai karakter yang terkait dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, mencintai diri sendiri, cinta pada sesama, gotong-royong, bernalar kritis dan kebinekaan global masih belum tersentuh dalam penguatan karakter selama siswa BDR. Karakter tersebut sesungguhnya mutlak dibutuhkan agar siswa sejak dini memiliki rasa saling menghormati, saling membutuhkan, dan saling ketergantungan pada orang lain.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Selama BDR, guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua sangat menyadari bahwa ada disparitas capaian hasil belajar siswa sekolah di DIY khususnya terkait dengan kompetensi sikap yang melahirkan karakter siswa. Penguatan karakter di sekolah membutuhkan strategi dan desain yang terintegrasi dalam pembelajaran sehingga diperlukan desain pembelajaran yang memuat unsur karakter. Nilai karakter yang perlu dikuatkan dan dimasukkan dalam desain pembelajaran selama BDR, di antaranya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME dengan mencintai diri sendiri dan sesama, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, gotong-royong, dan kebinekaan global. Nilai-nilai tersebut perlu dikembangkan –sebagai profil pelajar Pancasila. Setiap guru harus menguatkan semua nilai tersebut melalui pembelajaran selama kurun waktu satu tahun pelajaran. Penguatan tersebut perlu dievaluasi pada setiap akhir tahun agar diketahui perkembangan nilai sikap siswa dalam kurun waktu belajar di SMP untuk menghasilkan pelajar Pancasila.

2. Saran

Berbagai kendala penguatan karakter saat BDR memerlukan upaya sungguh-sungguh dari orang tua, guru, kepala sekolah, pengawas, bahkan semua pihak untuk tetap komitmen menjaga mutu pendidikan. Penguatan karakter selama BDR perlu mendapatkan perhatian yang serius, baik dalam desain pembelajarannya maupun nilai-nilai karakter apa yang harus ditanamkan. Perlu dipikirkan pula

bagaimana penguatan nilai-nilai karakter agar tidak hanya diyakini telah diberikan oleh guru, tetapi juga betul-betul dipahami dan diimplementasikan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perlu disusun model penguatan karakter efektif yang dapat menjadi panduan bagi para guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter itu dalam proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartel, J. (2018). Teaching soft skills for employability. *TESL Canada Journal*, 35(1), 78-92.
- Chaibate, H., Hadek, A., Ajana, S., Bakkali, S., & Faraj, K. (2020). A comparative study of the engineering soft skills required by Moroccan Job Market. *International Journal of Higher Education*, 9(1), 142-152.
- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. 2018 *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Los Angeles : SAGE)
- Depdikbud- 2020. *Renstra Kemendikbud 2020--2024*
- Gruzdev, M. V., Kuznetsova, I. V., Tarkhanova, I. Y., & Kazakova, E. I. (2018). University graduates' soft skills: The employers' opinion. *European Journal of Contemporary Education*, 7(4), 690-698.
- Hermiono, A. & Arifin, I. (2020). Contextual character education for students in the senior high school. *European Journal of Educational Research*, 9(3), 1009--1023.
- Kim, K., Harris, C. J., & Pham, L. (2018). How character education impacts teachers. *International Journal of Multidisciplinary Perspectives in Higher Education*, 3(1), xx-xx.
- Lickona, T. (2004). *Educating for haracter: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.
- Mailool, J., Retnawati, H., Arifin, S., Kesuma, A. T., & Putranta, H. (2020). *Lecturers' experiences in teaching soft skills in teacher profession education program (TPEP) in Indonesia. Problems of education in the 21st century*, 78(2), 215--234.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Nucci, L.P., & Narvaez, D. (2008). *Handbook of moral and character education*. New York: Routledge.
- Otty, R., & Milton, L. (2019). Promoting soft skills with the hot (higher order thinking) sheet assignment. *Journal of Instructional Pedagogies*, 22.
- P21Skills. (2020). Partnership for 21st century skills. Retrieved from <http://www.21stcenturyskills.org/>
- Panitia Penerbitan (Ed.) (2013). *Ki Hadjar Dewantara, bagian pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST Press) dan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Rolls, N., & Wignell, P. (2018). Learning and teaching through language. In N. Rolls, A. Northedge, & E. Chambers (Eds.), (in press) *Successful university teaching in times of diversity* (pp. 00): Palgrave Macmillan.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2012). *21st Century skills: Learning for life in our times*: John Wiley & Sons.

EVALUASI PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2020

Yufridawati, Erni Hariyanti, Diyan Nur Rakhmah W., Siti Nur Azizah

**Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Abstrak Pada 2020, DKI Jakarta mengadopsi mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB). PPDB tersebut mengganti syarat seleksi yang didominasi oleh nilai menjadi didominasi oleh usia. Penelitian ini mengkaji secara langsung sejauh apa perubahan tersebut terjadi di Jakarta. Untuk menganalisis perubahan tersebut, studi ini menggunakan data administratif yang dikelola oleh SIAP PPDB Online dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan meliputi data administrasi PPDB 2017, 2018, 2019, dan 2020. Perubahan sistem PPDB tersebut mengubah pola penerimaan sekolah negeri di Jakarta secara signifikan. Pertama, kebijakan tersebut mengurangi segregasi yang ada di sekolah negeri. Kedua, komposisi siswa sekolah negeri berubah dari didominasi oleh anak-anak berkemampuan tinggi menjadi diisi oleh anak-anak dengan beragam kemampuan. Ketiga, peluang diterimanya anak-anak dengan nilai rendah menjadi meningkat. Keempat, anak-anak miskin yang sebelumnya tidak memiliki prospek untuk masuk ke sekolah negeri, sekarang memiliki prospek dan berpartisipasi dalam seleksi.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Hak dasar manusia dalam mengakses pendidikan yang bermutu adalah sama sebagaimana tercantum pada Pasal 31 UU Dasar 1945, yakni guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka itulah, Pemerintah wajib mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dan membiayainya. Kewajiban Pemerintah ini diperkuat dengan amanah guna memberikan layanan dan kemudahan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara sebagaimana tertera pada UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11.

Membangun sistem pendidikan yang berkualitas dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing telah dilakukan oleh Pemerintah sejak lama sejalan dengan pembangunan di sektor pendidikan. Pembangunan pendidikan diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui dua agenda, salah satu di antaranya adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam hal ini, arah kebijakan difokuskan pada upaya peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui beberapa strategi. Strategi yang dimaksud, di antaranya melalui peningkatan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun serta penguatan penjaminan mutu pendidikan.

Pembangunan SDM melalui bangku sekolah membutuhkan lembaga pendidikan yang dapat diakses dan terjamin mutunya. Seberapa besar masyarakat dapat mengakses pendidikan ditunjukkan dari angka partisipasi pendidikan di setiap jenjang. Capaian angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) pada kelompok umur 3--6 tahun secara nasional meningkat menjadi 36,93%. Sementara itu, berdasarkan angka partisipasi sekolah (APS) menunjukkan bahwa hampir semua anak

pada kelompok usia pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) telah bersekolah (Susenas Maret 2019, BPS). APS tahun sebelumnya pada kelompok usia 7--12 sebesar 99,22% naik menjadi 99,24, kemudian kelompok usia 13--15 sebesar 95,36% bertambah menjadi 95,51%--dan kelompok usia 16--18 tahun sebesar 71,99% naik menjadi 72,36%.

Tingkat partisipasi pendidikan pada kelompok usia sekolah ini, jika dikaitkan dengan kemampuan lamanya penduduk usia 15 tahun ke atas bersekolah, sejak tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah mencapai 8,75 tahun dan sudah memenuhi target dari Rencana Strategis Kemendikbud.

Aspek mutu lembaga pendidikan dapat diukur dari akreditasi sekolah. Dalam hal ini, Kemendikbud telah mendorong upaya akreditasi sekolah guna meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Menurut Laporan Kinerja Kemendikbud (2019), jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi meningkat lebih dari enam belas kali lipat antara tahun 2015--2019. Bila dilihat dari capaian persentase terhadap total lembaga, rata-rata tingkat penambahan per tahun dalam periode 2015--2019 adalah 103%. Akreditasi pada jenjang pendidikan juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Persentase sekolah yang memiliki akreditasi minimal B terus meningkat pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK.

Persentase sekolah dengan akreditasi minimal B tertinggi ada di jenjang SD/MI, yaitu 80,84 %--pada tahun 2019. Namun, peningkatan paling banyak ditemui di jenjang SMA yang meningkat lebih dari dua kali lipat, yakni 28,23% pada tahun 2015 menjadi 73,39% pada tahun 2019. Capaian SMK telah melebihi target Renstra Kemendikbud. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan akreditasi yang sebelumnya berbasis program keahlian kemudian menjadi satuan pendidikan.

Keberadaan lembaga pendidikan, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 2 Tahun 2018 bahwa daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi layanan dasar di bidang pendidikan. Hal ini merupakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). Pembagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dibedakan atas pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, bahwa provinsi bertanggung jawab mengelola pendidikan menengah dan khusus, sedangkan pemerintahan kabupaten/kota mengelola PAUD dan non formal serta pendidikan dasar.

2. Permasalahan

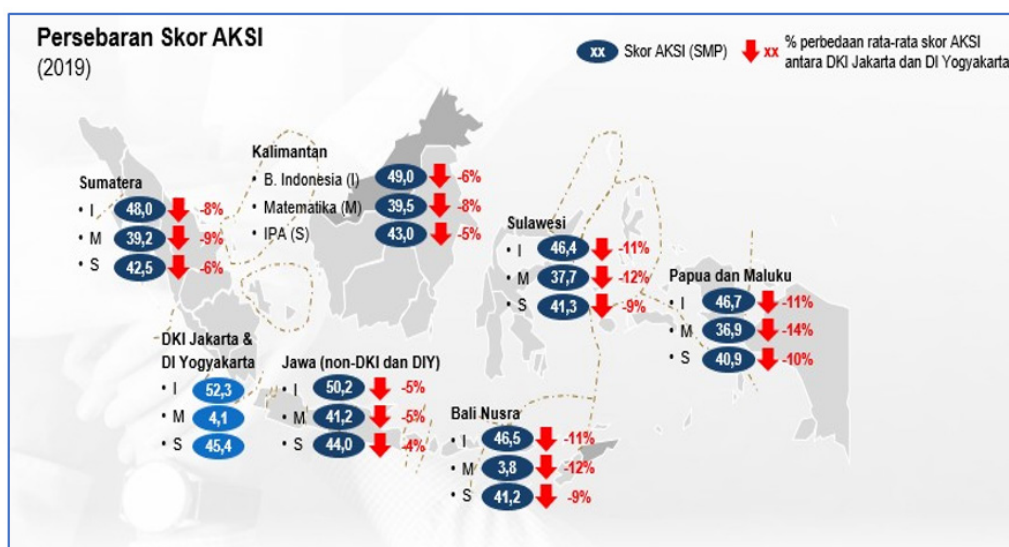
Negara perlu hadir dalam setiap permasalahan pendidikan di masyarakat mengingat sebesar apa pun dan kapan pun permasalahan akan selalu ada. Khususnya di sektor pendidikan terdapat salah satu masalah yang dari dahulu sampai kini ditemukan, yakni masalah pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan.

Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan telah menjadi arah pembangunan pendidikan yang mengacu pada RPJMN 2020--2024 sebagai tahapan terakhir dari RPJPN 2005--2025. Ke depannya fokus pembangunan pendidikan merupakan lanjutan pembangunan pendidikan sebelumnya, yakni mengutamakan peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas (RPJMN 2020--2024). Tingkat APK masyarakat telah membaik, tetapi belum menjangkau seluruh lapisan penduduk. Kesenjangan pendidikan antarpenduduk berekonomi berbeda masih menjadi permasalahan. Berdasarkan Susenas Tahun 2019 tampak bahwa terdapat kesenjangan pendidikan antarpenduduk yang status ekonomi berbeda. Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi pula APK setiap jenjang pendidikan. Kesenjangan tersebut semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini dijelaskan semakin meningkatnya kebutuhan finansial pendidikan seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan tersebut.

Tidak bisa dielakkan bahwa tinggi rendahnya status ekonomi rumah tangga memengaruhi proses pendidikan seorang anak. Sebagai contoh, jika sebuah keluarga yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah mengalami kesulitan, akan sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang juga cukup tinggi. Setiap keluarga tentu mempunyai kapasitas berbeda, termasuk dalam membiayai pendidikan anak-anaknya.

Kesenjangan pendidikan masih tinggi dalam kehidupan antarwilayah. Hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah mencapai APK SD melebihi angka 100%, kecuali Papua hanya mencapai 91,94%. Jika ditelaah lebih jauh, Papua juga memiliki APK SMP/ sederajat yang paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain (78,11%). Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada daerah yang memiliki partisipasi sekolah rendah, misalnya untuk provinsi Papua, agar dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain. Pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pendidikan masih menjadi hal utama dalam menunjang pendidikan mengingat kondisi geografis Papua yang berbukit-bukit dan banyak wilayah yang masih tertinggal.

Ada pula kesenjangan kualitas pendidikan antara Pulau Jawa dan pulau lainnya. Kondisi ini, antara lain, dapat terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). Penilaian AKSI menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Gambar 1 berikut memperlihatkan distribusi nilai AKSI SMP pada 2019 berdasarkan persentase perbedaan rata-rata skor AKSI Provinsi DKI Jakarta dan DIY.



Gambar 1 Persebaran skor AKSI SMP tahun 2019 (Sumber: Puspendik, 2019)

Pengelompokan nilai AKSI berdasarkan pulau dan dua provinsi yang memiliki nilai AKSI tertinggi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta), menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis. Pulau-pulau di timur Indonesia, seperti Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara menunjukkan kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dalam nilai AKSI. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan geografis, regulasi, dan tata kelola.

Dari segi geografis Kepulauan Indonesia memiliki sebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dan daerah lain. Dari segi regulasi pemanfaatan berbagai program pemerintah dalam pemerataan mutu belum tepat guna dan tepat sasaran. Dari segi tata kelola otonomi daerah memberikan kewenangan, pada pemerintah provinsi untuk mengelola pendidikan menengah maupun kabupaten/kota mengelola PAUD dan pendidikan dasar, serta membutuhkan kerja sama erat dengan Kemendikbud guna memajukan mutu pendidikan setiap daerah.

Dalam rangka pemerataan akses dan mutu pendidikan tersebut, Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi pada tahun 2017. Sistem ini mulai diterapkan melalui penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu disebabkan oleh adanya gejala favoritisme dan kastanisasi sekolah yang ditengarai oleh sistem PPDB sebelumnya mensyaratkan nilai (prestasi akademik) pada saat penyeleksian penerimaan siswa baru.

3. Tujuan dan Manfaat

Kajian ini terkait dengan pelaksanaan PPDB pada tahun 2020, dengan tujuan untuk menganalisis: (i) praktik baik PPDB di beberapa negara; (ii) regulasi PPDB di beberapa daerah; (iii) penerapan PPDB di daerah. Selanjutnya, hasil kajian ini dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam menyusun permendikbud tentang PPDB tahun 2021.

B. Tinjauan Pustaka

Beberapa konsep yang digunakan dalam kajian ini perlu diuraikan secara singkat agar dapat dipahami secara utuh sebagai dasar pemikiran penelitian. Konsep utama terkait dengan substansi permasalahan penelitian adalah akses dan mutu layanan pendidikan, kebijakan zonasi dalam bidang pendidikan, dan PPDB.

1. Sistem Zonasi dalam Pendidikan

Arti kata *zonasi*, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Zonasi dalam pendidikan merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).

Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut ditujukan agar tidak ada sekolah yang dianggap favorit dan nonfavorit. Dengan kata lain, penerapan sistem zonasi dalam pendidikan sebagai upaya untuk menghilangkan pola pikir kastanisasi dan favoritisme terhadap sekolah tertentu. Selain itu, sistem zonasi merupakan salah satu strategi pemerataan yang tidak hanya menyasar akses layanan, tetapi juga kualitas pendidikan.

Melalui sistem zonasi diharapkan ada kemudahan bagi masyarakat untuk bersekolah dan satuan pendidikan dapat memastikan anak usia sekolah di daerahnya bersekolah. Sistem ini juga bertujuan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru; mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran sesuai kondisi siswa yang heterogen; membantu pemerintah daerah dalam memberikan afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana (sarpras) pendidikan maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kemendikbud, 2018). Menurut Kepala BKLM, Kemendikbud, penetapan zonasi juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat sebagai penanggung jawab pendidikan. Hal ini merujuk pada pendekatan sistem zonasi yang mengutamakan kedekatan wilayah antara sekolah dan tempat tinggal. Penerapan sistem zonasi telah dimulai sejak tahun 2017 melalui pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

2. Urgensi PPDB Zonasi

Dalam rangka memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi penduduk usia sekolah dalam mendaftar ke satuan pendidikan yang diinginkan, Kemendikbud melakukan penerimaan peserta didik

baru (PPDB). Rekrutmen peserta didik (yang dimaksudkan sebagai PPDB) di lembaga pendidikan (sekolah) pada hakikatnya adalah proses pencarian, menentukan dan menarik calon peserta didik yang mampu menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut (Tim Dosen, 2014). Tujuan dari rekrutmen PPDB ini adalah untuk (i) mendapatkan siswa yang memiliki karakteristik sebagaimana ditetapkan dalam syarat penerimaan siswa baru; (ii) memberikan keadilan kepada masyarakat dan calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang tepat; dan (iii) meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak dan orang tua siswa.

Suryosubroto (2004) juga mengemukakan bahwa PPDB merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pada saat sebelum tahun ajaran baru melalui seleksi calon peserta didik. Penelitian lain dilakukan oleh Menurut Yufriawati dkk. (2019), PPDB merupakan proses awal yang harus dilalui sekolah dalam menjaring calon peserta didik. Dengan demikian, PPDB merupakan proses administrasi setiap tahun ajaran baru dari tingkat satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, sampai tingkat SMA/MA/SMK. Jadi, sistem PPDB merupakan salah satu bagian dari manajemen siswa untuk menjaring siswa baru melalui proses rekrutmen sesuai dengan ketentuan sekolah serta peraturan/kebijakan pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.

Proses rekrutmen peserta didik (PPDB) memiliki sejumlah tahapan yang harus diikuti semua peserta. Tahapan ini ditujukan untuk mendapatkan peserta didik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Proses PPDB yang dilakukan sekolah juga harus memenuhi prinsip dalam rekrutmen peserta didik (PPDB). Prinsip dalam rekrutmen peserta didik di antaranya adalah objektif, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, dan nondiskriminatif. Prinsip dalam rekrutmen ini juga sejalan dengan tujuan dari penerimaan peserta didik baru yang tertuang dalam Permendikbud PPDB, yakni untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Penerapan PPDB sistem zonasi, antara lain agar memudahkan daya tempuh (jarak) anak-anak ke sekolah, menghilangkan dikotomi sekolah favorit yang cenderung kelebihan siswa dan sekolah nonfavorit yang sering kekurangan siswa, menghilangkan diskriminasi dalam penerimaan siswa baru (baik berdasarkan kemampuan akademik maupun latar belakang sosial ekonomi), dan menjadi instrumen pemantauan pemerataan distribusi guru guna mendorong pemerataan kualitas sekolah.

Mekanisme PPDB terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika masyarakat. Perubahan itu ada, antara lain menyangkut kuota penerimaan. Jika PPDB pada tahun sebelumnya menjadikan nilai Ujian Nasional (UN) atau Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) dari jenjang sebelumnya sebagai kriteria penentu, PPDB sejak tahun 2017 lebih ditekankan pada akses anak usia sekolah yang berada dalam radius terdekat dengan sekolah yang dituju, yakni melalui jalur zonasi (Kemendikbud, 2018). Perubahan regulasi dilakukan pemerintah guna memberikan akses lebih pada anak-anak usia sekolah yang berada dalam radius terdekat dengan sekolah dan anak-anak dapat bersekolah tanpa adanya indikator yang diskriminasi (misalnya: prestasi siswa). Hal tersebut sesuai dengan tujuan PPDB untuk mendorong peningkatan pemerataan akses pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan haknya secara adil untuk bersekolah (Kemendikbud, 2017).

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mengingat data dan informasi yang terkumpul diperoleh melalui telaah dokumen yang relevan, seperti peraturan PPDB beberapa daerah dan sistem PPDB di sepuluh negara lain. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan, baik melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT) maupun wawancara secara daring terhadap informan (instansi) yang mengetahui pelaksanaan PPDB, seperti dinas pendidikan Kabupaten Banyumas, Bogor, Kota Bekasi,

Depok, Tangerang Selatan, Tangerang, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, dan Sumatra Barat. Pemilihan sumber data–didasarkan pada pertimbangan: (i) daerah dalam ruang lingkup Jabodetabek; (ii) daerah yang telah melibatkan sekolah swasta dalam PPDB Bersama; dan (iii) daerah yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan PPDB akibat ketidaksesuaian peraturan PPDB daerah dengan Permendikbud No. 44/2019. Kajian ini juga memanfaatkan data sekunder yang didapat dari PDSPK (sekarang Pusdatin) dan Telkom (Bidang Pendidikan).

Data dan informasi yang terkumpul diolah secara kualitatif dan kuantitatif. Informasi kualitatif bersumber dari hasil diskusi dan wawancara yang diolah secara deskriptif. Data sekunder adalah data kuantitatif yang bersumber dari data pokok pendidikan (dapodik) dan SIAP PPDB **Online**, kemudian diolah berupa statistik univariat. Setelah data terkumpul dan terolah, berikutnya semuanya dianalisis secara deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem PPDB di Negara Lain

Berikut diuraikan secara singkat sistem PPDB di sepuluh negara, baik yang berada di Asia maupun di luar Asia, yaitu Finlandia, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, India, Tiongkok, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kesepuluh negara tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan perkembangan dunia pendidikan sebagai negara maju, seperti Finlandia, Amerika Serikat, Inggris, dan negara yang berkembang, yaitu India dan Vietnam.

Pada umumnya sistem zonasi dalam pendidikan, menurut sepuluh negara ini, dianggap paling adil untuk memberikan hak pendidikan kepada masyarakat. Menurut undang-undang, semua anak usia sekolah wajib dan berhak didaftarkan di sekolah pemerintah pada zona yang telah ditetapkan. Di Finlandia, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia setiap siswa yang akan masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar didasarkan pada kedekatan rumah dengan sekolah yang ditunjuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, syarat masuk sekolah dasar hanya berupa wawancara terhadap siswa, orang tua, tidak berdasarkan nilai kompetitif antarsiswa. Di Thailand penerimaan siswa di jenjang sekolah dasar dilakukan dengan mengutamakan siswa yang tinggal tidak jauh dari sekolah (Michael, 2018). Penerimaan siswa untuk pendidikan menengah pertama ditentukan oleh hasil ujian sekolah, sedangkan untuk jenjang menengah melalui sistem lotere atau ujian masuk yang ditentukan setiap sekolah.

Pada jenjang menengah di Finlandia, proses penerimaan siswa didasarkan pada hasil evaluasi siswa selama jenjang pendidikan dasar serta nilai sertifikat kelulusan (*Finnish National Agency of Education*, 2018). Pada tingkat SMA di Inggris biasanya diselenggarakan tes masuk dan interviu. Orang tua di Jepang cenderung memilih sekolah swasta pada jenjang pendidikan menengah agar akses ke universitas lebih mudah. Sistem rekrutmen siswa pada jenjang pendidikan menengah didasarkan pada prestasi, kompetensi, atau nilai ujian akhir. Di Tiongkok, sistem PPDB masih berdasarkan nilai. Hasil Ujian Nasional SMP digunakan untuk seleksi masuk SMA dan, setiap SMA menentukan skor dan melaporkan hasilnya kepada dinas pendidikan kota/kabupaten untuk didaftarkan dalam bursa penerimaan siswa. Di Malaysia siswa baru yang akan masuk ke jenjang pendidikan menengah diseleksi berdasarkan nilai ujian UPSR (SD)/PMR (SMP) atau hasil tes seleksi yang diberlakukan oleh setiap sekolah. Sekolah negeri hanya diperuntukkan bagi warga negara Malaysia, sedangkan warga negara lain diarahkan masuk sekolah swasta/internasional.

Sistem zonasi (*school attendance boundaries/ catchment area*) di Amerika dibagi berdasarkan wilayah distrik sekolah, yaitu pemerintahan khusus. Dewan distrik sekolah menentukan pembagian zonasi di wilayahnya sesuai dengan karakteristik demografi setiap daerah. Siswa yang tidak tertampung akan

ditempatkan di sekolah yang bersebelahan atau di sekolah di luar zona yang masih memiliki daya tampung. Siswa yang terpaksa harus bersekolah di sekolah swasta karena gagal tertampung di sekolah negeri, pemerintah akan memberikan subsidi pendidikan bagi mereka. Begitu juga di Inggris, tidak ada pungutan biaya untuk pendidikan dasar. Semua anak dijamin mendapat sekolah. Tidak ada anak yang terpaksa masuk swasta dan harus membayar mahal. Jika ada siswa yang bersekolah di swasta, hal itu terjadi karena kehendak orang tua siswa. Di Malaysia, jika ada siswa berprestasi tidak tertampung di sekolah negara (karena alasan daya tampung penuh), anak itu diarahkan ke sekolah swasta yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah.

Di Jepang ada kebijakan tidak tertulis yang mengharuskan siswa SD dan SMP untuk berjalan kaki dari rumah menuju sekolah. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu-lintas pada pagi hari, tetapi juga membantu orang tua memanfaatkan waktu menjadi lebih produktif. Di Thailand banyak sekolah dijalankan dengan sistem satu atap, yang lulusannya secara otomatis akan terdaftar di sekolah jenjang lebih tinggi. Sekolah satu atap digunakan untuk perluasan dan pemerataan akses siswa, khususnya di daerah tertentu (kaum marginal, daerah terpencil, dll).

Penerimaan calon siswa jenjang pendidikan dasar di India hanya didasarkan pada ketentuan usia minimal enam tahun berhak bersekolah di sekolah negeri terdekat. Di jenjang pendidikan dasar, sekolah wajib menyediakan alokasi 25% untuk anak marginal, dan 75% dialokasikan untuk siswa yang rumahnya berdekatan dengan sekolah. Di jenjang pendidikan menengah penerimaan calon siswa didasarkan pada seleksi yang dilakukan oleh setiap sekolah. Hampir seluruh sekolah bersifat satu atap. Oleh karena itu, sekolah akan mengutamakan siswa internal ketimbang siswa eksternal dalam sistem penerimaan siswa baru. Lain halnya di Vietnam, jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama hanya didasarkan pada ketentuan usia minimal 6 tahun (SD) dan 11 tahun (SMP) (Mcaleavy *et al.*, 2018). Di jenjang pendidikan menengah atas, seleksi calon siswa melalui ujian masuk yang ketat berdasarkan hasil akademik, dan semakin meningkat pada sekolah menengah khusus yang menawarkan program yang berfokus pada mata pelajaran seperti bahasa asing. Calon siswa jenjang menengah atas harus mengikuti seleksi ketat melalui *Intermediate Graduation Examination* (IGE) (Trines, 2017) yang menentukan sekolah siswa dapat mendaftar.

Berdasarkan sistem PPDB di sepuluh negara di atas, terlihat perbedaan bentuk sistem pengelolaan pendidikan di negara maju dan berkembang. Pada umumnya negara maju memiliki karakteristik masyarakat yang lebih homogen dibandingkan dengan negara berkembang yang lebih heterogen. Hal ini berdampak pada bagaimana negara mengelola sistem pendidikannya. Selain itu, pemerintah di negara maju cenderung lebih berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang lebih merata, baik dalam akses maupun mutu, sesuai dengan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah, serta kualitas guru dan tenaga kependidikan. Berbeda dengan negara berkembang yang berkomitmen menyediakan akses dan mutu pendidikan secara merata sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi yang dimiliki. Kondisi ini memberikan pengaruh pada bagaimana pemerintah setiap negara melakukan seleksi penerimaan peserta didik yang merupakan bagian yang terintegrasi dari misi negara dalam menyediakan layanan pendidikan kepada warganya.

Setidaknya ada tujuh poin dari sistem PPDB di sepuluh negara tersebut yang dapat dipelajari dalam konteks Indonesia.

Pertama, di banyak negara, sistem zonasi diterapkan di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) untuk tujuan pemerataan akses dan kesempatan berpendidikan. Kebijakan ini melahirkan konsekuensi bahwa Pemerintah harus berkomitmen menyediakan pilihan sekolah dengan kualitas yang merata di setiap zona. Upaya ini dilakukan agar calon siswa bisa terjamin haknya bersekolah di sekolah dengan kualitas yang sama.

Kedua, sistem seleksi melalui nilai akademik atau tes masuk diterapkan di jenjang pendidikan menengah untuk tujuan menyeleksi siswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Hal ini berkenaan dengan persiapan ke perguruan tinggi atau penyerapan langsung ke dunia kerja. Beberapa alternatif kriteria seleksi jenjang menengah yang dapat digunakan adalah (i) sekolah membuat seleksi masuk mandiri, berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan daerah; (ii) seleksi berdasarkan nilai rapor yang dikalibrasi/capaian nonakademik; dan (iii) ada sertifikat kelulusan yang khusus digunakan sebagai syarat mengikuti seleksi masuk.

Ketiga, sistem zonasi perlu mengombinasikan aspek jarak, kondisi geografis, dan demografis.

Keempat, subsidi transportasi bagi siswa yang tinggal relatif jauh dari sekolah berupa bus sekolah atau transportasi publik lain dari dan menuju ke sekolah.

Kelima, pelibatan sekolah swasta dan sekolah di bawah kementerian lain dalam zona yang sama. *Keenam*, pemerintah perlu merancang mekanisme pendampingan bagi siswa yang gagal masuk pada sekolah yang dituju agar tetap bersekolah di sekolah yang kualitasnya relatif setara dengan sekolah yang dituju.

Ketujuh, sistem sekolah satu atap/*boarding school* menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan pemerataan akses di daerah. Selain itu, sekolah satu atap dapat dijadikan model sekolah bagi siswa cerdas/berbakat istimewa.

2. Dinamika Peraturan PPDB Daerah

Setiap daerah telah menyusun dan memiliki regulasi yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan PPDB setiap tahunnya, selain Permendikbud No. 44/2019. Informasi dan data berikut diperoleh dari beberapa daerah melalui diskusi kelompok terpusat dan wawancara secara daring. Adapun daerah yang menjadi sampel penelitian ini adalah Kabupaten Banyumas, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Jawa Barat (Jabar).

a. Kuota dan Jenis Jalur PPDB

Menurut peraturan PPDB, dari beberapa daerah yang menjadi sampel penelitian ini, ~~menunjukkan~~ ada empat daerah yang belum mengikuti besarnya kuota (persentase) jalur sesuai dengan Permendikbud PPDB 2020. Tabel 1 berikut memperlihatkan kuota setiap jalur berdasarkan peraturan PPDB daerah tersebut.

Idealnya setiap peraturan PPDB di daerah perlu mengacu pada Permendikbud 44/2019 yang memuat ketentuan penerimaan siswa baru melalui empat jalur, yaitu jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50%, jalur afirmasi dengan kuota paling sedikit 15%, jalur perpindahan tugas orang tua (PTO) dengan kuota paling banyak 5% dan sisanya diperuntukkan bagi jalur prestasi dengan kuota paling banyak 30%. Namun, ketentuan kuota per jalur ini belum didasari atas perhitungan data empiris.

Salah satu contoh peraturan PPDB daerah yang tidak sesuai adalah Provinsi DKI yang menetapkan jalur zonasi sebesar 40% dan afirmasi 25%. Penetapan kuota ini, menurut Kepala Dinas Pendidikan, dilakukan berdasarkan kajian sebelumnya. PPDB DKI Jakarta tahun 2020 dirancang untuk menghasilkan komposisi siswa yang proporsional dan sesuai dengan kemampuan umum guru di sekolah negeri agar pembelajaran berjalan optimal (SMERU, 2019).

Peraturan PPDB daerah yang menjadi sampel kajian menunjukkan bahwa PPDB telah dilaksanakan melalui empat jalur dengan variasi pada jalur tertentu. Sebagai contoh, pada peraturan PPDB Kota Bekasi, PPDB SMP dilaksanakan melalui (i) jalur zonasi 50%, (ii) jalur prestasi 20% yang meliputi 1%

akademik/nonakademik, 1% tahfidz, 18% ujian sekolah (15% dalam kota, 3% luar kota/perbatasan), (iii) jalur afirmasi 25% (penambahan kuota siswa miskin didasarkan pada DTKS), dan (iv) jalur perpindahan orang tua 5% (anak guru 3%, PTO 2%).

Tabel 1 Kuota per Jalur dalam Peraturan PPDB 10 Daerah

No.	Daerah	Kuota Jalur (%)			
		Zonasi	Afirmasi	PTO	Prestasi
	Permendikbud No. 44/2019	50	15	5	30
1	Prov Jabar	50	20	5	25
2	Prov DKI Jakarta	40	25	5	30
3	Prov Sumbar	50	15	5	30
4	Prov Gorontalo	50	15	5	30
5	Kab. Banyumas	65	15	5	15
6	Kota Bekasi	50	25	5	20
7	Kota Depok	50	15	5	30
8	Kota Tansel	50	15	5	30
9	Kab. Bogor	50	15	5	30
10	Kota Tangerang	50	15	5	30

Sumber : Juklak/Juknis PPDB 2020

Jalur PTO semua daerah telah memanfaatkannya sesuai dengan persentase kuota maksimal dalam Permendikbud PPDB 2020. Namun, dalam mencari keabsahan surat pindah tugas orang tua peserta didik yang bekerja di luar PNS/TNI/Polri (bekerja di perusahaan swasta), dinas pendidikan mengalami kendala. Seperti Provinsi DKI Jakarta telah mengantisipasi kemungkinan tersebut sehingga sejak awal dalam peraturan PPDB DKI untuk kuota jalur PTO dibatasi hanya bagi orang tua calon peserta didik baru yang pindah tugas sebagai PNS/TNI/Polri.

Jalur PTO tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki orang tua yang pindah tugas saja, tetapi juga diperuntukkan bagi anak guru. Dalam kenyataannya, persentase kuota anak guru disediakan sedikit lebih banyak (seperti di Kota Bekasi) dan diperuntukkan bukan hanya untuk anak guru yang orang tuanya mengajar di sekolah yang dituju saja.

Ditemukan juga adanya jalur inklusi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), yang kuotanya diambil dari jalur zonasi seperti di Kota Depok, Kota Bekasi, Provinsi DKI Jakarta. Namun, ada daerah yang telah menetapkan kuota ABK pada jalur tersendiri dalam peraturan PPDB-nya (seperti Kota Depok) dan ada pula yang tidak, seperti Kota Bekasi yang hanya menetapkan PPDB bagi ABK dari kuota jalur zonasi.

Pelaksanaan PPDB di setiap daerah diawali dengan jalur yang berbeda, ada daerah yang membuka PPDB dengan jalur zonasi (seperti Provinsi Sumbar, Kota Tangerang, Kota Tansel) dan ada pula yang memulai dengan jalur prestasi (seperti Kabupaten Bogor, Provinsi Jabar). Berdasarkan FGD, pertimbangan memulai dengan jalur zonasi karena PPDB didasari pada prinsip kedekatan jarak domisili dengan sekolah yang dituju. Dalam hal ini, jalur prestasi dibuka lebih dahulu dan membelakangkan jalur zonasi karena: (i) untuk memastikan terserapnya anak-anak yang memiliki prestasi, untuk menghargai siswa yang sudah belajar keras; dan (ii) jalur zonasi dimaksudkan untuk menerima sisa kuota dari jalur lainnya yang tidak terpenuhi secara maksimal.

b. Pelibatan Sekolah Swasta dalam PPDB

Beberapa daerah sampel ada yang menyatakan telah mengikursertakan sekolah swasta di wilayahnya untuk melakukan PPDB secara bersama-sama. Hal ini tampak melalui informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terkait dengan pelibatan sekolah swasta saat PPDB tahun 2020. Dalam sistem PPDB *online*, kedudukan sekolah swasta dan sekolah negeri adalah sama. Contohnya, pada PPDB 2020 terdapat 157 SMP negeri dan 33 SMP swasta di Kabupaten Banyumas yang dapat menjadi pilihan calon peserta didik baru. Pemilihan sekolah swasta yang dapat ikut serta dalam sistem layanan PPDB *online* ini tidak ada kriteria khusus. Mekanisme pelibatan swasta ini diawali dengan penawaran dinas pendidikan kepada sekolah swasta yang berminat dan bersedia melaksanakan PPDB bersama. Akibatnya, tidak semua sekolah swasta terlibat dalam pelaksanaan PPDB bersama, yang di dalamnya beberapa sekolah swasta telah lebih dahulu melaksanakan PPDB.

Pelaksanaan PPDB di Provinsi Gorontalo juga telah melibatkan sekolah swasta. Semua sekolah swasta diikutsertakan dalam sistem layanan PPDB *online*, yang sebelumnya dinas pendidikan menawarkannya kepada mereka. Dalam rangka pemerataan mutu sekolah, semua sekolah swasta bersedia mengikuti PPDB bersama karena tidak ada perbedaan mekanisme antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Begitu juga Provinsi Jabar telah melibatkan sekolah swasta dalam PPDB 2020. Hal ini didasari atas tujuan untuk mempercepat pemenuhan akses pendidikan dan layanan pendidikan (sesuai dengan tujuan kebijakan PPDB zonasi) serta “menyelamatkan” sekolah swasta yang kurang bermutu. Mekanisme dan prosedur pelibatan sekolah swasta juga dilakukan berdasarkan penawaran dari dinas pendidikan. Pelibatan swasta ini disosialisasikan bersamaan dengan PPDB sekolah negeri (Mei--Juni). Sekolah swasta dijadikan sebagai pilihan ketiga. Kriteria sekolah swasta yang terlibat adalah semua sekolah swasta di Provinsi Jabar yang terdaftar dalam dapodik (yang memiliki izin operasional).

Keterlibatan sekolah swasta dalam PPDB, antara lain sekolah swasta secara umum lebih efisien dalam hal anggaran, terlebih pada era pandemi ini. Hal itu juga suatu cara untuk mengatasi kekurangan daya tampung (bangku sekolah) bagi peserta didik di daerah, khususnya bagi daerah yang tidak memiliki sekolah negeri atau memiliki sekolah negeri yang jauh dari domisili peserta didik. Sehubungan dengan hasil FGD, sampai sejauh ini pola pikir masyarakat masih berorientasi pada “negeri” dengan pertimbangan biaya pendidikan. Akibatnya, tidak mengherankan bila masih ada daerah yang mengajukan izin penambahan siswa per rombongan atau jumlah rombongan seperti di Kota Tangerang, Provinsi Jabar. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya bangku, bahkan mematikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta.

c. Penetapan Wilayah Zonasi dalam PPDB

Dalam Pasal 16 Permendikbud PPDB 2020 telah jelas dinyatakan kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan wilayah zonasi setiap jenjang pendidikan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah yang dituju. Penetapan tersebut wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk satuan pendidikan keagamaan sesuai dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah setiap jenjang pendidikan di daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar (i) semua wilayah administrasi dipastikan telah masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan; (ii) semua sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Namun, dalam kenyataannya ada beberapa daerah belum dapat melakukan penetapan zonasi ini berdasarkan variabel ketersediaan daya tampung dan jumlah anak usia sekolah. Salah satu penyebabnya, sebagaimana dinyatakan dalam FGD, karena belum meratanya jumlah satuan pendidikan.

Contohnya adalah pelaksanaan PPDB zonasi di Provinsi Jabar sejak tahun 2017, yang dilakukan

pertama kali saat alih fungsi pengelolaan SMA/SMK dan SLB dari dinas pendidikan kabupaten/kota ke dinas pendidikan provinsi. Kondisi geografis dan sosial ekonomi Provinsi Jabar dapat memengaruhi jika PPDB dilakukan dalam konteks per zona. Hal itu, menurut hasil wawancara, disebabkan oleh letak sekolah kebanyakan di pusat kota atau pusat perkantoran, sementara lokasi perumahan pada umumnya berada di pinggiran kota. Kesulitan lainnya adalah masih ada kecamatan di Jabar yang belum memiliki sekolah, baik swasta maupun negeri.

Dalam Permendikbud PPDB 2020, bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah. Tentang hal itu ternyata belum ada daerah yang memiliki kesepakatan secara tertulis, sebagaimana ditengarai dalam FGD bahwa ada “arogansi” daerah tersebut.

d. Bukti Domisili Peserta Didik Baru

Ketentuan penggunaan surat keterangan domisili (SKD) dalam permendikbud sangat rentan dicurangi di banyak daerah. Data kependudukan ini banyak disalahgunakan karena ketentuan SKD dapat diterbitkan oleh RT/RW dan kelurahan setempat. Selain SKD, juga ditemukan penyalahgunaan kartu keluarga (KK). Beberapa daerah melaporkan rentannya pemalsuan bukti domisili ini dalam PPDB, seperti Provinsi Sumbar. Bila ditelaah permasalahan pelaksanaan PPDB 2020, sesuai dengan hasil kajian Itjen Kemdikbud dan informasi PPDB di media massa, permasalahan SKD sebesar 41% dan yang terkait dengan KK sebesar 32%-di 34 provinsi yang melaksanakan PPDB.

Permasalahan bukti domisili (SKD) yang setiap tahun muncul sejak adanya PPDB zonasi telah diantisipasi oleh beberapa daerah dalam ketentuan peraturan PPDB daerah tersebut. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membolehkan penggunaan SKD hanya untuk keluarga yang sedang melakukan proses mutasi karena urusan KK-nya belum selesai. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Depok membatasi penggunaan SKD hanya untuk calon peserta didik yang sejak SD ikut tinggal dengan keluarga luarnya di wilayah yang sama. Bahkan, Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan tidak menggunakan SKD sebagai syarat domisili dalam PPDB. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi ketidakabsahan bukti domisili sehingga calon peserta didik baru hanya menggunakan KK yang dikeluarkan Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta sesuai domisilinya.

e. Peran Pemerintah Daerah dalam PPDB

Menurut Pasal 27 Permendikbud PPDB 2020, pemerintah daerah (dinas pendidikan setempat) wajib menyalurkan calon peserta didik yang belum tertampung ke sekolah lain, baik dalam zonasi yang sama maupun zonasi terdekat, dengan melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (sekolah swasta). Kondisi ini selaras dengan regulasi tentang peranan pemerintah daerah dalam memenuhi layanan dasar di bidang pendidikan.

Di bawah ini merupakan contoh peran pemerintah daerah dalam menyerap anak usia sekolah untuk tetap bersekolah di zonasi yang ada. Pemerintah Kota Depok mempunyai kebijakan yang ditujukan bagi siswa dari keluarga miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri diarahkan untuk masuk ke sekolah swasta dengan memberikan bantuan Rp 3 juta per tahun/anak. Bagi sekolah swasta yang bersedia menerima anak-anak kurang mampu ini, pemerintah daerah akan memberikan tambahan insentif bagi para gurunya.

Menurut informasi dari Dinas Dukcapil, kebijakan Pemerintah Kota Depok tersebut harus lebih

dahulu diselaraskan dengan ketentuan/kriteria anak keluarga miskin yang telah ditetapkan sesuai dengan DTKS, yang datanya telah di-*input* berdasarkan NIK. Dalam hal ini, sekolah-tidak berkapasitas sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menetapkan bahwa seorang anak/siswa merupakan anak miskin yang bisa diajukan menerima bantuan.

Lain halnya dengan kebijakan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Dinas pendidikan ini memberikan kontribusi pada sekolah swasta yang terlibat dalam PPDB Bersama berbentuk pembangunan RKB, perpustakaan, laboratorium, bahkan berupaya melakukan pemerataan guru. Untuk itu pemerintah daerah telah membuat aturan/pemetaan wilayah dengan tidak membedakan kondisi antara sekolah negeri dan sekolah swasta

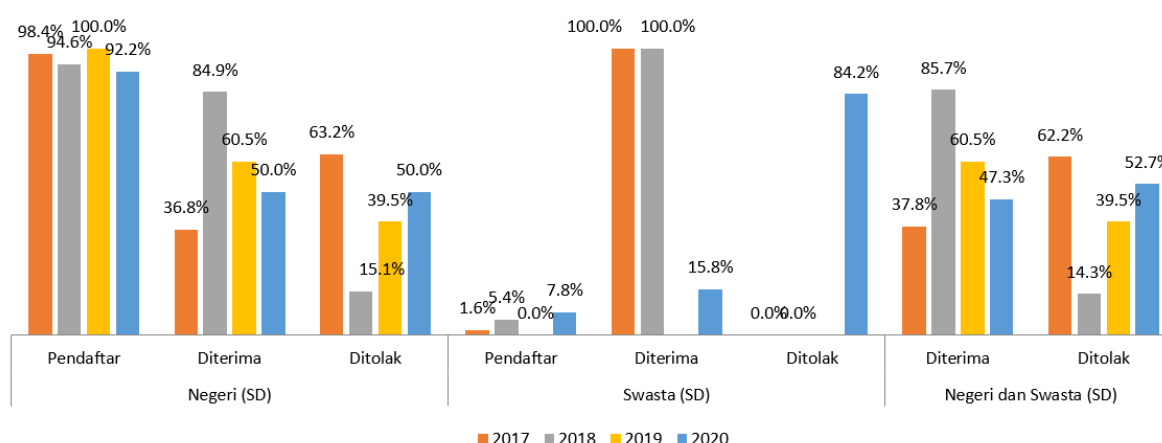
3. Penerapan PPDB di Daerah

Bagian ini menjelaskan secara singkat pelaksanaan PPDB di daerah yang telah menggunakan sistem layanan SIAP PPDB *online* pada tahun 2020. Uraian berikut memaparkan penerimaan peserta didik baru secara *online* melalui empat jalur sesuai dengan Permendikbud PPDB ditambah dengan jalur inkusi yang selama ini masih menjadi bagian dari jalur zonasi.

a. Peserta Didik (Siswa) Baru yang Diterima

1) Jalur Afirmasi

Berdasarkan data SIAP PPDB *online*, terlihat kenaikan dan penurunan jumlah siswa afirmasi di SD, baik yang diterima maupun ditolak, dari tahun 2017-2020. Jika dibandingkan persentase gabungan negeri dan swasta yang diterima dan ditolak setiap tahunnya, hasilnya tidak jauh berbeda dengan persentase siswa yang diterima di sekolah negeri (Grafik 2). Hal ini menandakan bahwa partisipasi sekolah swasta dalam PPDB masih sangat minim selama empat tahun PPDB zonasi ini diterapkan. Ternyata fenomena ini juga ditunjukkan pada ketiga jalur lainnya, baik di jenjang SMP maupun SMA.

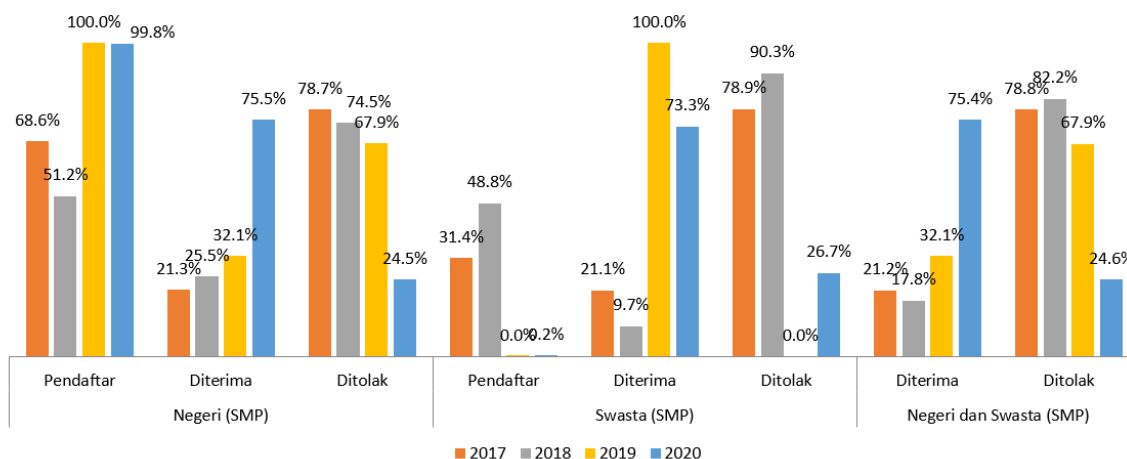


Grafik 2 Persentase Siswa SD Diterima dan Ditolak 2017-2020 Jalur Afirmasi (Sumber: SIAP PPDB, setelah diolah)

Pada jalur afirmasi jenjang SMP ditemukan bahwa persentase siswa ditolak mencapai 72,8%-pada tahun 2020, sedangkan persentase siswa SMP yang diterima pada setiap tahun kurang dari 50%. Pada jalur afirmasi jenjang SMA persentase siswa ditolak mencapai 62,6% pada tahun 2020. Siswa afirmasi jenjang SMA yang diterima pada tiga tahun terakhir tidak sampai 50%, hanya pada tahun 2017 yang mencapai 73%

2) Jalur Perpindahan Orang Tua (PTO)

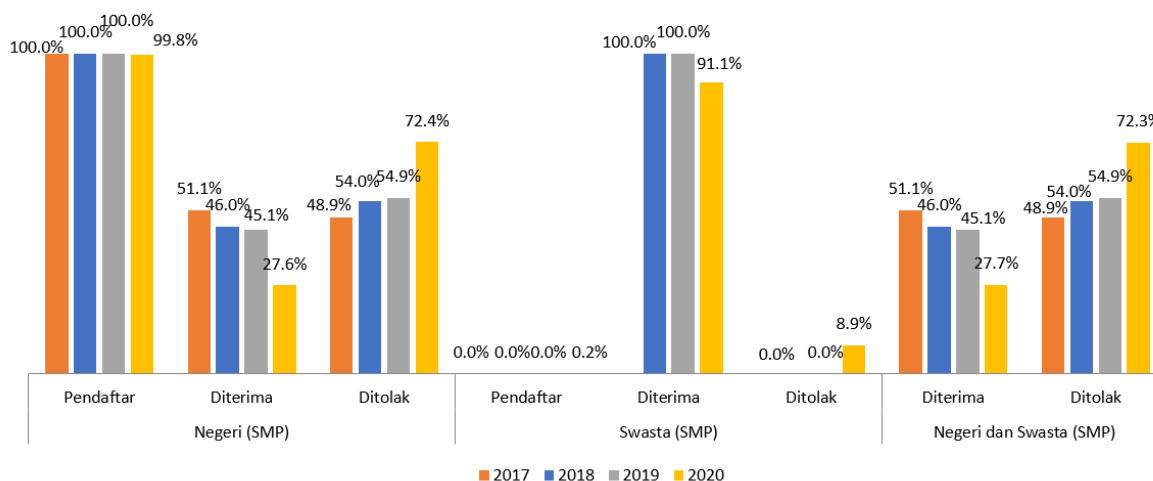
Berdasarkan data SIAP PPDB *online*, persentase siswa jalur PTO pada jenjang SD yang diterima semakin menurun dari tahun 2017 ke tahun 2020. Sebaliknya, yang terjadi pada siswa SMP cenderung meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2020 (Grafik 3). Untuk siswa SMA pada tahun 2017 ke tahun 2018 tampak meningkat, kemudian menurun kembali pada tahun 2019 serta kembali meningkat pada tahun 2020.



Grafik 3 Persentase Siswa SMP Diterima dan Ditolak 2017--2020 Jalur Perpindahan Orang Tua
(Sumber: SIAP PPDB, diolah)

3) Jalur Prestasi

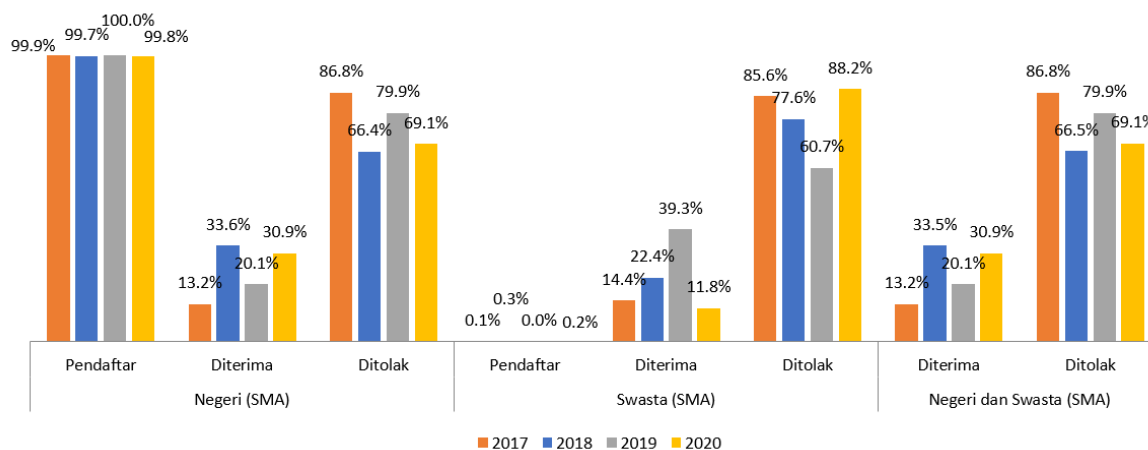
Jalur prestasi pada jenjang SD dalam PPDB zonasi tidak ada, kecuali pada jenjang SMP dan SMA. Untuk siswa SMP yang diterima pada jalur prestasi setiap tahunnya dari tahun 2017-- 2020 mengalami penurunan (Grafik 4). Pada jenjang SMA siswa yang diterima dari tahun 2017--2020 tidak berpola sebab, pada tahun 2017-- 2019 mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020.



Grafik 4 Persentase Siswa SMP Diterima dan Ditolak 2017--2020 Jalur Prestasi (Sumber: SIAP PPDB, diolah)

4) Jalur Zonasi

Untuk jalur zonasi, baik pada jenjang SD, SMP, maupun SMA, lebih banyak siswa yang ditolak dibandingkan dengan yang diterima. Pada tahun 2017--2020 persentase siswa yang ditolak pada jalur ini mengalami penurunan. Namun, siswa jalur zonasi yang ditolak masih di atas 50% pada setiap jenjangnya, seperti pada jenjang siswa SMA (Grafik 5).



Grafik 5 Persentase Siswa SMA Diterima dan Ditolak 2017--2020 Jalur Zonasi (*Sumber: SIAP PPDB, diolah*)

Dalam jalur zonasi juga terdapat kuota untuk ABK, hanya beberapa daerah yang menetapkan kuota tersendiri bagi ABK dalam PPDB-nya, seperti Provinsi DKI Jakarta. Untuk daerah yang melaksanakan PPDB bagi ABK dengan menggunakan sistem layanan SIAP PPDB *Online* pada tahun 2020 tampak sebagian besar siswa ABK diterima di sekolah yang dituju (di atas 90%) pada setiap jenjang pendidikan. Jumlah ABK yang diterima dalam PPDB selama empat tahun ini mengalami kenaikan dari tahun 2017—2020, baik di SD, SMP, maupun SMA.

b. Prestasi Akademik Siswa Baru

Dalam sistem layanan SIAP PPDB *online* juga terdapat nilai UN (sebelum 2020) dan nilai rapor (tahun 2020) pada jenjang SMP dan SMA bagi siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi karena jenjang SD tidak memiliki jalur prestasi. Nilai UN dan rapor ini dapat dijadikan indikator guna melihat prestasi akademik siswa. Perolehan nilai UN dan rapor siswa di sekolah negeri dan swasta dalam sistem layanan SIAP PPDB *online* ini disajikan pada Tabel 2.

Terlihat nilai rata-rata UN siswa SMP dan SMA yang diterima di sekolah negeri dan swasta pada umumnya menurun bila dibandingkan antara tahun 2017--2019. Selanjutnya, pelaksanaan UN pada tahun 2020 diadakan berdasarkan Surat Edaran Mendikbud No.4 Tahun 2020. Peniadaan UN tersebut menyebabkan jalur prestasi akademik pada PPDB tahun 2020 ditentukan berdasarkan nilai rapor (lima semester terakhir). Rata-rata nilai rapor siswa SMP dan SMA yang diterima berkisar antara 74 --84, yang dalam hal ini jalur prestasi memiliki rata-rata nilai rapor tertinggi untuk siswa yang diterima di SMP dan SMA. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Rataan Nilai Siswa yang Diterima Berdasarkan Jalur Tahun 2017-2020

Satuan Pendidikan	Jalur	Rataan UN			Rataan Rapor
		2017	2018	2019	2020
SMP	Afirmasi	73,59	67,58	68,95	74,41
	PTO	70,11	71,08	78,96	80,78
	Prestasi	78,87	77,12	76,45	84,14
	Zonasi	77,56	71,35	70,94	75,87
SMA	Afirmasi	-	53,38	62,20	79,91
	PTO	72,05	54,67	64,50	80,60
	Prestasi	69,12	55,51	62,00	83,41
	Zonasi	75,59	58,75	61,43	80,63

Sumber: SIAP PPDB, setelah diolah

E. Rekomendasi

Kajian ini memberikan beberapa pemikiran yang dapat menjadi bahan perbaikan/perubahan/penambahan dalam penyusunan Permendikbud PPDB tahun 2021.

1. Kuota dalam Jalur PPDB

Bervariasinya kuota dalam jalur PPDB di daerah disebabkan oleh, proporsi kuota jalur PPDB belum dihitung berdasarkan data yang akurat dan tidak mempunyai dasar yang jelas. Untuk itu, perlu perhitungan akurat dalam dapat menentukan kuota per jalur dalam PPDB sesuai dengan data empiris. Perhitungan tersebut didasarkan pada data dapodik, pusmenjar, SIAP PPDB, dan susenas (BPS).

Khusus untuk jalur afirmasi, terdapat berapa peraturan (seperti PP No. 66/2010) yang menyatakan kuota bagi siswa kurang mampu minimal 20%. Selain itu, kuota untuk setiap jalur perlu dibedakan per jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) mengingat jumlah dan penyebaran satuan pendidikan yang belum merata. Di bawah ini hasil estimasi proporsi kuota setiap jalur dalam PPDB.

Jalur/Jenjang Pendidikan	SD	SMP	SMA
Zonasi (min.)	54%-94,7% (70%)	33%-69,5% (50%)	32%-64,8% (50%)
Afirmasi (min.)	1,1%-29% (20%)	13,3%-49% (20%)	10,7%-39% (20%)
Prestasi (maks.)	-	16,2% - 36% (sisa kuota)	23,5%-48% (sisa kuota)
PTO (maks.)	5%	5%	5%

Dalam PPDB, siswa yang merupakan ABK perlu memiliki kuota dan jalur tersendiri. Untuk ABK diprioritaskan mendaftar pada sekolah reguler yang sudah siap memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, bagi sekolah regular lainnya secara bertahap diwajibkan untuk tetap memenuhi layanan tersebut, seperti memiliki guru dan sarana belajar bagi penyandang disabilitas.

2. Jalur PPDB yang Dijadwalkan Pertama

Daerah mengawali PPDB dengan membuka pendaftaran siswa baru pada tahap pertama melalui jalur yang berbeda-beda sehingga tidak mencerminkan arah komitmen untuk memastikan siswa kurang mampu secara ekonomi mendapatkan layanan pendidikan berkualitas. Untuk itu, perlu diatur urutan pelaksanaan PPDB secara bertahap dengan urutan (i) afirmasi, zonasi, prestasi atau (ii) afirmasi, prestasi, zonasi

3. Pengukuran Prestasi Akademik Siswa

Karena UN sudah dihapus, ~~sehingga~~ dibutuhkan alternatif lain untuk mengukur prestasi akademik siswa, khususnya yang akan mendaftar melalui jalur prestasi. Dalam hal ini, diusulkan adanya tes masuk sebagai seleksi jalur prestasi di SMP dan SMA, selain dapat pula menggunakan rapor sekolah.

4. Pelibatan Sekolah Swasta dalam PPDB

Daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi untuk mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Selain itu, masih adanya siswa yang tidak terserap dalam PPDB sehingga harus masuk ke sekolah swasta yang berbayar/kurang berkualitas. Untuk itu, diperlukan keterlibatan sekolah swasta dalam PPDB Bersama. Terdapat tiga opsi, yakni (i) seluruh sekolah swasta dilibatkan dalam PPDB Bersama; (ii) hanya sekolah swasta yang bersedia saja; (iii) sekolah swasta yang bersedia dan memenuhi persyaratan yang dilibatkan dalam PPDB Bersama. Selanjutnya, sekolah swasta yang ikut dalam PPDB Bersama mempunyai posisi yang sama untuk dipilih calon siswa baru dalam proses PPDB (bukan sebagai pilihan tertentu/pilihan ketiga). Disarankan pula untuk tidak memberikan izin penambahan jumlah siswa per rombel atau menambah jumlah rombel di sekolah negeri, dan bagi yang melanggar dapat dikenai sanksi edukatif.

5. Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam PPDB

Masih terdapat siswa kurang mampu yang tidak terserap dalam jalur afirmasi sehingga mereka didorong untuk masuk ke sekolah swasta dan akan terbebani secara finansial atau mendapatkan layanan pendidikan yang kurang berkualitas. Dalam hal ini, perlu adanya tambahan klausul dalam Permendikbud PPDB tahun 2021: (i) pemda mengembangkan mekanisme untuk mengidentifikasi siswa miskin bersekolah; (ii) tersedianya opsi untuk memastikan siswa kurang mampu yang tidak diterima dalam PPDB untuk: a) ditempatkan di sekolah negeri terdekat; b) ditempatkan di sekolah swasta terdekat sesuai ketersediaan daya tampung; (iii) pemda dapat memberikan dukungan bantuan finansial bagi siswa miskin yang diterima di sekolah swasta

6. Penetapan Zonasi

Daerah melakukan penetapan zonasi berdasar formulasi masing-masing dan sangat beragam mengingat belum ada panduan bagi daerah untuk melakukan pemetaan zonasi. Belum semua daerah melakukan pemetaan zonasi berdasarkan data yang akurat, seperti kapasitas daya tampung, penyebaran dan jumlah anak usia sekolah/lulusan, serta satuan pendidikan. Dalam hal ini, diperlukan tambahan klausul bahwa pemda harus menetapkan peta zonasi (tiga bulan) setelah pelaksanaan PPDB tahun berjalan. Penentuan wilayah zonasi tetap diserahkan pada daerah, tetapi Kemendikbud perlu menyusun pedoman pembagian wilayah sebagai referensi daerah dalam menentukan batas zonasi

7. Bukti Domisili Peserta Didik

Guna meminimalkan penyalahgunaan SKD dan kartu keluarga (KK), diperlukan penyesuaian dalam klausul permendikbud yang terkait dengan SKD dan KK bahwa domisili peserta didik dibuktikan hanya dengan KK. Penggunaan SKD hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang kerap berpindah-pindah tempat. Dalam hal ini, SKD bukan sebagai pengganti KK.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjanto, D. (2020). Kisruh PPDB Jakarta, komnas anak: Jalur zonasi seharusnya diulang - *Metro Tempo.co*. <https://metro.tempo.co/read/1362373/kisruh-ppdb-jakarta-komnas-anak-jalur-zonasi-seharusnya-diulang>
- Anggoro, Subuh. 2017. Keberhasilan \pendidikan Finlandia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. <https://www.researchgate.net/publication/321696140>
- Bakar, K. A. A., Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2019). The evaluation of admission student policy based on zoning sys-tem for acceleration education quality in Indonesia. *Journal of Management Info*, 6(2), 19–24. <https://doi.org/10.31580/jmi.v6i2.883>
- Beatty, A., Brekhout, E., Dharmawan, goldy f., Lim, D., Pradhan, M., Suryadarma, D., Tresnatri, Florischa ayu, & Liong, T. (2019). Infografis zonasi RISE.pdf. In Smeru Research Institute.
- BPS. (2018). Booklet survei angkatan kerja nasional tahun 2018. 335–358. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>
- BPS. (2019). *Potret pendidikan Indonesia 2019*. Statistik Pendidikan Indonesia 2019.
- CIPS Indonesia. (2019). Pelaksanaan sistem zonasi layak dievaluasi. <https://www.cips-indonesia.org/post/pelaksanaan-sistem-zonasi-layak-dievaluasi>
- CNN Indonesia. (2018). Kisruh zonasi sekolah PPDB buntut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180711083149-20-313178/kisruh-zonasi-sekolah-ppdb-buntut-permendikbud-14-2018>. Diakses 10 Juli 2020
- CNN Indonesia. (2020). Ragam masalah PPDB 2020: Gaptek hingga aturan diskriminatif. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200612131714-20-512611/ragam-masalah-ppdb-2020-gaptek-hingga-aturan-diskriminatif>
- Darmawan, G. F. (2019). Dampak sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri bagi para guru dan siswa. <https://theconversation.com/dampak-sistem-zonasi-penerimaan-peserta-didik-baru-di-sekolah-negeri-bagi-para-guru-dan-siswa-119294>
- Daud, RM. 2020. Sistem Pendidikan Finlandia suatu alternatif sistem pendidikan Aceh. *Jurnal Pendidikan*, jurnal.ar-raniry.ac.id
- Edukasi.kompas.com. (2019). Sistem zonasi kemendikbud dinilai langgar uu sistem pendidikan Nasional. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/19/18565641/sistem-zonasi-kemendikbud-dinilai-langgar-uu-sistem-pendidikan-nasional?page=all>. Diakses 12 Juli 2020
- Finnish National Agency of Education. (2018). Finnish education in a nutshell | finnish national agency for education. <https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/finnish-education-nutshell>
- Idris, F., Hassan, Z., Ya'acob, A., Gill, S. K., & Awal, N. A. M. (2012). The role of education in shaping

- youth's national identity. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 59, 443–450. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.299>
- Imron, A. (2012). *Manajemen peserta didik berbasis sekolah (Management of student based on school)*. Bumi Aksara.
- Iswara Zannurul dan Fatimah Siti. 2019. Zonasi dalam penerimaan peserta didik baru: Studi kasus di SMPN 1 Banguntapan Bantul, Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2054>. Diakses 11 Juli 2020
- Kemenag. (2019). Data pokok pendidikan Islam. emispendis.kemenag.go.id
- Kemendikbud. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017: Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 1–20.
- Kemendikbud. (2018). Kebijakan zonasi: Percepat pemerataan akses dan mutu pendidikan.
- Kemendikbud. (2019). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
- Kemendikbud. (2019a). Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB 2019.
- Kemendikbud. (2019b). Tanya jawab kebijakan zonasi. <https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya-jawab/kebijakan-zonasi-tahun-ajaran-20202021>
- Kemendikbud. (2020a). Percepatan peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui kebijakan pendidikan berbasis zonasi. 28.
- Kemendikbud. (2020b). Rekapitulasi data pokok pendidikan Nasional. <https://dapo.kemdikbud.go.id/>
- Kemendikbud, (2020c). *Hasil pemantauan PPDB jenjang SMA tahun ajaran 2020/2021*.
- Kemendikbud. *Publikasi statistik pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK tahun ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 dan 2019/2020*.
- Kemendikbud. *APK dan APM PAUD, SD, SMP, SM tahun ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 dan 2019/2020*.
- Kompas.com. (2019). Kejanggalaan PPDB 2019 di Bandung, 8 siswa pendaftar SMA favorit beralamat sama. <https://bandung.kompas.com/read/2019/06/20/09190851/kejanggalaan-ppdb-2019-di-bandung-8-siswa-pendaftar-sma-favorit-beralamat>, diakses 12 Juli 2019
- Liputan6.com. (2019). Selain Indonesia, 3 negara ini juga terapkan sistem zonasi sekolah. <https://www.liputan6.com/global/read/3995066/selain-indonesia-3-negara-ini-juga-terapkan-sistem-zonasi-sekolah>, diakses 10 Juli 2020
- Malaysia.gov. (2019). Mygov - getting formal education | Getting secondary education | Entering government secondary school | Getting general information on government secondary school. <https://www.malaysia.gov.my/portal/subcategory/125>

- Mcaleavy, T., Ha, T. T., & Fitzpatrick, R. (2018). Promising practice: government schools in Vietnam. www.educationdevelopmenttrust.com
- Mhrd.gov.in. (2020). School education | Government of India, ministry of human resource development. https://www.mhrd.gov.in/rte_rules
- Michael, R. (2018). Education in Thailand - WENR. <https://wenr.wes.org/2018/02/education-in-thailand-2>
- Mantalean, V. (2020). Federasi Serikat Guru: PPDB zonasi bina RW akan jadi masalah baru. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/04/12093851/federasi-serikat-guru-ppdb-zonasi-bina-rw-akan-jadi-masalah-baru>
- Medcom.id. (2019). Akhirnya aturan PPDB zonasi direvisi. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/MkMVYlpK-akhirnya-aturan-ppdb-zonasi-direvisi>. Diakses 12 Juli 2020
- Medcom.id. (2020). KPAI beberkan sejumlah masalah PPDB 2020 - Medcom.id. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8KyXwA3k-kpai-beberkan-sejumlah-masalah-ppdb-2020>
- Monitor.co.id. (2019). Mendikbud: Sistem zonasi hal tepat untuk perbaiki pendidikan secara radikal. <https://monitor.co.id/2019/08/28/mendikbud-sistem-zonasi-hal-tepat-untuk-per-baiki-pendidikan-secara-radikal/>. Diakses 12 Juli 2020
- Ombudsman.go.id. (2019). Ombudsman temukan beberapa pelanggaran PPDB sistem zonasi sekolah. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-temukan-beberapa-pelanggaran-ppdb-sistem-zonasi-sekolah>. Diakses 12 Juli 2020
- OECD. (2016). Education in Thailand | READ online. https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-in-thailand_9789264259119-en#page10
- Purwanto, N. (2006). Kontribusi pendidikan bagi pembangunan ekonomi negara. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(2), 1–7.
- Rakhmah, D. N. (2020). *Analisis Cepat Pelaksanaan PPDB 2020*.
- Regional Kompas.com. (2019). Fakta di balik sistem zonasi PPDB 2019: Jokowi akui banyak masalah. <https://regional.kompas.com/read/2019/06/21/15074081/7-fakta-di-balik-sistem-zonasi-ppdb-2019-jokowi-akui-banyak-masalah-hingga?page=all>. Diakses 12 Juli 2020
- Sisdiknas. (2003). Undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003. *Acta Pædiatrica*, 71, 6–6. <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1982.tb08455.x>
- Sururi. (2011). Manajemen rekrutmen peserta didik. <https://ilmucerdaspendidikan.wordpress.com/2011/03/12/manajemen-rekrutmen-peserta-didik>, diakses pada tanggal 13 Juli 2020.
- Suryosubroto. (2004). *Manajemen pendidikan di sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- The World Bank. (2018). Overview: Learning to realize education's promise. In *World development report 2018: learning to realize education's promise* (pp. 1–35). https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1_ov
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. (2014). *Manajemen pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Trines, S. (2017). The emergence of private higher education in Vietnam: Challenges and opportunities*. *Educational research for policy and practice*, 1(1/2). <https://doi.org/10.1023/A:1021130320485>
- Trines, S. (2018). Education system in India. <https://wenr.wes.org/2018/09/education-in-india>

Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Voa Islam.com. (2019). Membandingkan zonasi pendidikan antara Inggris dan Indonesia. <https://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2019/06/23/65034/membandingkan-zonasi-pendidikan-antara-inggris-dan-indonesia>, diakses 10 Juli 2020

Wahyuni, Dinar. 2019. Permasalahan dan upaya perbaikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru 2019. Info singkat: Kajian singkat terhadap isu aktual strategis Vol XI, Juli 2019. Jakarta.

Yufridawati, dkk. (2019). *Model pengelolaan pendidikan terintegrasi berbasis zonasi*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Rabu/2 Desember 2020	
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 1	Panel No: 1 Ruang
	Kelompok 2	
Waktu	: 14.00 WIB	
Judul Penelitian :	1. Pengelolaan Keragaman Peserta Didik Pasca-Zonasi 2. Analisis Kebutuhan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Analisis Kebutuhan Biaya PAUDDASMEN) 3. Model Penguatan Pendidikan Karakter Dengan Konsep Scaffolding 4n Ki Hajar Dewantara Selama Belajar Dari Rumah 4. Sistem PPDB, Partisipasi Seleksi dan Akses Pendidikan	
Penyaji	:	1. Herman Hendrik, S.Sos., MPP ME 2. Siti Nur Azizah Cq. Dr. Herlinawati 3. Dr. Rr. Hasti Robiasih, M.Pd. 4. Goldy Fariz Dharmawan
Pembahas	: Dr. Aos Santosa, M.Pd	
Moderator	: Yunita Murdiyaningrum	
Notulis	: Romeyn Perdana Putra	

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah <i>(Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)</i> :	1. Herman Hendrik, S.Sos., MPP ME • Permendikbud No. 44 Tahun 2019. • PPDB berbasis zonasi: sekolah-sekolah “dipaksa” untuk menerima peserta didik baru berdasarkan kriteria dan kuota tertentu yang sudah ditentukan oleh permendikbud yang berlaku, yang sebagian besarnya yaitu berdasarkan kriteria zonasi. • Sebelum zonasi: (1) PPDB berbasis akademik, (2) sekolah unggulan vs non-unggulan. • Peserta didik di suatu sekolah cenderung homogen. • Segregasi sosial di antara sekolah-sekolah berdasarkan status sosial-ekonomi. • Aspek keragaman: - kemampuan akademik - latar belakang ekonomi - agama/kepercayaan - etnik atau kedaerahan - status anak berhadapan dengan hukum - status ABK. • Tujuan penelitian - Mendesripsikan kondisi keragaman peserta didik di sekolah pasca penerapan PPDB sistem zonasi. - Menganalisis pengelolaan keragaman peserta di sekolah

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		pasca penerapan PPDB berbasis zonasi. • Metode: kualitatif.//Teknik pengumpulan data: FGD daring.//Narasumber FGD: perwakilan 17 SMA negeri.//Waktu: Juni s.d. Oktober 2020. • Hasil pembahasan: SMAN peserta FGD: Dahulu adanya sekolah unggulan dan non-unggulan. Sehingga keragaman peserta didik pascazonasi: (1) tetap, (2) berubah-homogen, (3) berubah-heterogen. Keragaman tetap di SMAN non-unggulan. Keragaman berubah-homogen di SMAN non-unggulan. Keragaman berubah-homogen di SMAN unggulan. • Aspek keragaman peserta didik pascazonasi: kemampuan akademik latar belakang ekonomi Agama etnis atau kedaerahan status ABK • Dampak perubahan keragaman: Pembelajaran Kedisiplinan pergaulan antarsiswa • Dampak perubahan keragaman peserta didik terhadap pembelajaran: Pencapaian target pembelajaran membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Penurunan “rata-rata” motivasi belajar siswa. Kendala dalam pelaksanaan PJJ. • Dampak perubahan keragaman peserta didik terhadap kedisiplinan: peningkatan frekuensi pelanggaran terhadap tata tertib sekolah (contohnya membolos dan berkelahi). • Dampak perubahan keragaman peserta didik terhadap pergaulan antarsiswa: terbentuknya geng-geng siswa berdasarkan asal sekolah dan latar belakang ekonomi. • Dampak positif perubahan keragaman peserta didik pascazonasi: Persaingan positif di antara para peserta didik untuk meningkatkan kompetensi akademik masing-masing, terutama dalam mengejar ketertinggalan. Siswa lebih berani dalam komunikasi dan interaksi. Tumbuhnya empati serta sikap saling menghargai dan toleransi di antara para siswa. • Pengelolaan keragaman kemampuan akademik: Pembagian kelas Guru Kurikulum Ekstrakurikuler Metode pembelajaran Tata tertib • Pengelolaan keragaman latar belakang ekonomi: Pembebasan atau keringanan SPP bagi siswa tidak mampu.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Bantuan kuota internet. Peminjaman telepon seluler atau komputer tablet serta menyediakan laboratorium komputer. • Pengelolaan keragaman latar belakang agama/etnis/kebudayaan/kedaerahan: Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Pemenuhan hak para peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya masing-masing. • Pengelolaan keragaman siswa dengan status ABK: sekolah-sekolah memfasilitasi para gurunya untuk mengikuti berbagai pelatihan atau yang sejenis—misalnya lokakarya, bimbingan teknis, atau seminar—mengenai pendidikan inklusi. • Aspek yang banyak menjadi perhatian yaitu aspek kemampuan akademik serta dampaknya terhadap proses pembelajaran. • Strategi pengelolaan keragaman yang banyak diungkapkan oleh sekolah-sekolah juga kebanyakan menyangkut aspek akademik. • Namun, masih sedikit strategi yang dirancang secara khusus dan sistematis untuk pengelolaan keragaman peserta didik pascapandemi. • Rekomendasi: pendampingan dan fasilitasi bagi sekolah dan guru dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola keragaman peserta didik dalam berbagai aspeknya. 2. Siti Nur Azizah Cq. Dr. Herlinawati - Pertimbangan penelitian karena masih konstannya pendanaan untuk pendidikan dari tahun ke tahun. - Biaya operasional mencakup biaya – biaya yang dikeluarkan oleh sekolah - Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menganalisis besaran pendanaan penyelenggaraan pendidikan pada PAUD dan Dikdasmen - Sebagai data acuan untuk melakukan proyeksi kebutuhan pendanaan pendidikan digunakan data primer yang bersumber dari BPS dan Dapodik untuk data penduduk usia sekolah, serta peserta didik 5 tahun terakhir, BI untuk data Inflasi, Sussenas MSBP 2018. - Perhitungan dibagi menjadi 2 strategi, yakni untuk pendanaan PAUD dan Pendanaan untuk Dikdasmen. - Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring kepada dinas – dinas pendidikan di berbagai daerah, dimana data yang didapatkan berasal dari 23 Propinsi dan 46 Kabupaten/Kota, ditambah dengan data – data primer terkait. - Sebagai pertimbangan pemerataan pendanaan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, maka penelitian memasukkan unsur IKF (Indeks Kapasitas Fiskal, setiap daerah yang ada di

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Indonesia), selain itu juga, IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) juga menjadi bahan pertimbangan besaran pendanaan atau besaran dana pendidikan yang menjadi biaya bagi siswa di masing – masing daerah. - Dengan memadukan IKK dan IKF dilakukan pengelompokan daerah – daerah dengan 5 jenis kriteria sesuai kemampuan daerah dalam pendanaan pendidikan. - Berdasarkan pengelompokan kriteria kemampuan pendanaan pendidikan, dapat diambil satu rekomendasi acuan sharing pendanaan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selain itu juga berapa perkiraan dana yang harus ditanggung oleh orangtua untuk mendukung proses pendidikan anak atau peserta didik. - Dari pengelompokan daerah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya diketahui terdapat lebih dari 50 % daerah dengan tingkat kemampuan pendanaan pendidikan yang rendah, dimana daerah dengan kemampuan rendah memperoleh alokasi pendanaan pendidikan yang lebih besar dari pemerintah pusat, dibandingkan daerah dengan kemampuan yang tinggi sampai sangat tinggi. - Proyeksi dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan pendanaan pendidikan sampai dengan tahun 2025. - Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka kebutuhan pendanaan pendidikan yang harus ditanggung oleh pemerintah, jauh lebih besar daripada yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selama ini. - Kondisi sebelum dan setelah pandemic juga menjadi perhatian tim penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap pendanaan pendidikan. - Dari tahun ke tahun secara historis jumlah peserta didik begitu juga jumlah kebutuhan pendanaan pendidikan terus meningkat. - Selain pendanaan pada pendidikan umum, penelitian juga menambahkan kajian kebutuhan pendanaan pendidikan berbasis agama, khususnya agama Islam, yang berada dalam supervise Kementerian Agama. - Untuk daerah yang belum memberikan BOPDA dengan perhitungan yang telah dilakukan, banyak yang perlu didorong untuk menyalurkan BOPDA kepada sector pendidikan di daerahnya masing – masing. 3. Dr. Rr. Hasti Robiasih, M.Pd. Dalam rangka memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran kepada siswa di masa Pandemi Covid-19, pembelajaran dilakukan dengan cara Belajar dari Rumah. Disparitas capaian pembelajaran khususnya terkait dengan kompetensi sikap sangat dirasakan ketika BDR. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai nilai sikap melalui pembelajaran dengan konsep scaffolding 4N Ki Hajar Dewantara untuk memperkuat karakter siswa SMP di DIY menjadi

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Pelajar Pancasila. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Responden penelitian ini adalah guru, kepala sekolah, siswa, orangtua dan pengawas jenjang SMP di DIY. Penggalan data menggunakan metode FGD dengan instrumen bantu pedoman wawancara, lembar observasi dan angket dengan jawaban terbuka. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif model Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam bahan ajar yang telah dikembangkan dengan model scaffolding 4N dapat menjadi pendorong dan penggerak jiwa siswa dalam berperilaku serta bersikap sehingga membentuk tabiat yang bersifat tetap sesuai profil Pelajar Pancasila. Model ini juga terbukti memudahkan Guru, Kepala Sekolah maupun Pengawas dalam melakukan monitoring penguatan nilai karakter oleh guru kepada siswa. 4. Goldy Fariz Dharmawan 1) PPDB zonasi digaungkan pada tahun 2017 namun belum semua daerah mengadopsinya di tahun tersebut. Jakarta sendiri mengadopsi penuh PPDB pada tahun 2020. Prioritas penerimaan siswa diseleksi berdasarkan usia (60-70%) bukan jarak. 2) Membedah Partisipasi • Berdasarkan data sistem PPDB, tren peminat sekolah negeri di Jakarta terus meningkat sejak 2017 meski kapasitas yang tersedia relatif tetap. • Pada 2020, Jakarta mengadopsi sistem PPDB yang mengurangi bias status sosial ekonomi dalam PPDB sekolah negeri bersubsidi. • Perubahan tersebut meningkatkan prospek penerimaan bagi anak-anak afirmasi berkemampuan rendah sehingga berhasil mendorong partisipasi mereka secara signifikan. • Dari 2017 sampai 2019, kursi sekolah negeri bersubsidi semakin dipadati oleh anak-anak dari keluarga berkecukupan. • Dengan sistem baru, pada 2020, Jakarta berhasil meningkatkan peluang anak afirmasi berkemampuan rendah untuk masuk ke sekolah negeri bersubsidi. 3) Menelusuri Hasil Seleksi • PPDB 2019 yang menggunakan nilai sebagai kriteria seleksi menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara peserta yang diterima dan yang tidak diterima. Peserta dengan nilai 40% terendah hampir dipastikan harus memilih sekolah swasta pada jenjang lanjutan, padahal, mayoritas anak-anak afirmasi memiliki nilai yang relatif rendah. Pada PPDB 2020, kesenjangan tersebut ditutup. Siswa dengan kemampuan beragam dapat masuk ke sekolah negeri. • Dengan mengadopsi komponen usia, kesenjangan usia (antara

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		anak yang diterima dan tidak diterima) melebar di 2020. Pada 2019, distribusi usia anak yang diterima dan tidak diterima mirip. Pada 2020, perbedaan distribusi terjadi pada anak-anak non-afirmasi dan afirmasi. Selain itu, kesenjangan ternyata lebih besar pada peserta afirmasi. • Pola penerimaan pada jenjang SMA dan SMK juga serupa dengan pola penerimaan jenjang SMP. Pada PPDB 2019, kesenjangan kemampuan juga begitu besar antara yang diterima dan tidak diterima. Pada PPDB 2020, kesenjangan tersebut ditutup. Siswa dengan kemampuan beragam dapat masuk ke sekolah negeri. • Pada jenjang SMA dan SMK, kesenjangan usia juga melebar di 2020. Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada pola penerimaan anak-anak afirmasi daripada anak-anak non-afirmasi. 4) Mengaktifkan Eskalator Sejak Dini • Terdapat perbedaan distribusi kemampuan antara anak-anak afirmasi dan non-afirmasi. Anak-anak afirmasi mendominasi kelompok kemampuan akademik rendah. Sedangkan, anak-anak non-afirmasi mendominasi kelompok kemampuan akademik tinggi. PPDB Jakarta 2019 secara sistemik memberikan peluang yang kecil bagi anak-anak afirmasi. Pada 2020, sistem didesain tidak hanya untuk memberikan kesempatan, tetapi juga memberikan lingkungan yang sesuai (smoothing). • PPDB 2020 juga memungkinkan anak-anak dari pendidikan masyarakat untuk kembali masuk ke pendidikan formal. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pendaftar afirmasi dari pendidikan masyarakat berhasil masuk ke pendidikan formal SMP dan SMA. Melihat tingginya minat untuk masuk ke SMK, Jakarta dapat menyusun kebijakan tambahan atau baru yang dapat mengakomodasi minat dan kebutuhan tersebut.
2.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	Dr. Aos Santosa, M.Pd. • Perlu penelitian tindak lanjut: untuk pengidentifikasian disparitas anak-anak dalam kelas. • Penguatan kemampuan guru, untuk pedagogic adalah mengidentifikasi keragaman siswa, sehingga pelatihan-pelatihan menuju pada solusi keragaman siswa • Dalam penelitian ini sudah dapat dilanjutkan menjadi: bagaimana zonasi ini memperkecil intra dan ekstra zonasi. Dengan sampel 1-2 kabupaten. Antar sekolah, antar zonasi dan antar kabupaten. • Sehingga pengambil kebijakan mampu mengidentifikasi strategi tata kelola ini dan pentingnya zonasi. Belum ada penelitian yang melihat bagaimana memperkecil disparitas zonasi ini. Ke depan harus direncanakan penelitian lanjutan.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		• Kritikan terhadap BOS bahwa selama ini yang disalurkan sama untuk setiap daerah, tanpa mempertimbangkan kemampuan daerah masing – masing. • Study ini perlu dilakukan penyusunan naskah akademik dan regulasi yang perlu direkomendasikan kepada pengambil keputusan, mulai dari tingkat pendidikan PAUD sampai sekolah menengah atas. • Perlu dipertimbangkan juga akses pendidikan, dengan indicator APK dan APM, untuk melengkapi study yang dilakukan. • Anggaran yang sudah dibelanjakan digunakan untuk apa saja, perlu ditelusuri lebih lanjut, untuk juga dapat mengetahui dampaknya terhadap mutu pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. • Perlu juga ditambahkan BOS Kinerja dan BOS afirmatif untuk melengkapi study yang dilakukan. • Sejauh mana analisis kebutuhan telah mempertimbangkan, fixed cost dan variable cost, perlu dikaji lebih mendalam. • Perlu ditinjaklanjuti dengan penyusunan naskah akademik untuk bahan aksi kebijakan. Penghargaan untuk penggunaan teori dalam negeri. Lebih maju dari Bloom dll karena sampai pada implementasi dan lebih kontekstual. Harus jadi masukkan signifikan untuk profil pelajar Pancasila. Nilai karakter dapat dicapai melalui materi mapel. Religius.dan keragaman dalam matematika atau fisika misalnya. Tri Pusat Pendidikan perlu dikenalkan lagi karena kemendikbud menghilangkan pendidikan keluarga. Hidupkan kembali pendidikan keluarga. Terobosan/aturan yang diterapkan DKI apakah melalui studi? Kebijakannya bagus, karena anak afirmasi yang sebelumnya tidak bisa masuk sekolah karena latar belakang keluarga/akademik pada tahun ini bisa masuk sekolah negeri. Apakah ada landasan akademik atau rasional penetapan kebijakan tersebut oleh DKI. Mungkin perlu dimunculkan di pendahuluan. Perlu diperkuat agar menjadi bahan pembelajaran. Studi lanjutan kenapa di Yogyakarta? Seharusnya di Jakarta. Adakah dampak terhadap hasil belajarnya.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	• <i>Abdulloh: menurut pendapat peneliti lebih baik mana kondisi sekolah antara PPDB sebelum zonasi atau paska zonasi.</i> • <i>Goldy Darmawan: Tergantung tujuan dari kebijakannya, Pak. Tujuan berbeda dicapai dengan kebijakan berbeda.</i> • <i>Yufriawati: Ikut urun rembuk: utk penelitian pengelolaan keragaman: 1. Terkait dgn tujuan kajian ini, maka ada baiknya dapat dideskripsikan juga bagaimana pengelolaan siswa tsb; 2. Hal ini dapat dilihat dalam 4 th penerapan PPDB zonasi; 3. Juga dapat dikaitkan dengan pengembangan model pengelolaan keragaman siswa dengan melihat praktik baik bbrp pengelolaan keragaman pasca kebijakan PPDB zonasi.</i> Tanggapan penyaji: A: Tergantung menggunakan ukuran apa? Namun apa yang berjalan sekarang sudah lebih baik. Masa transisi pasti menyulitkan banyak pihak. Semua stakeholder telah berusaha melalui transisi, dan ukuran capai belajar tidak menjadi focus penelitian ini. Ukuran lainnya juga menjurus pada keunikan tiap wilayah. G & Y: Sebagai masukan, diucapkan banyak terimakasih. Deskripsi dalam tulisan : pembagian kelas, ada kelas unggulan, akselerasi dan sebagainya. Tidak hanya akademik, ekonomi, dan juga Tidak ada Perubahan signifikan dari sekolah dari favorit dan non favorit. Non Akademik: contoh keragaman agama, sekolah-sekolah menjadi lebih banyak menyesuaikan dengan kebijakan. Danang: (Guru DKI, memiliki pengalaman mengajar selama 20 tahun) ingin berbagi tentang keragaman, kesimpulan belum komprehensif tentang rekomendasi: mengenai pendampingan dan fasilitasi sangat didukung. Karena dilapangan guru-guru masih mengadopsi Pola-pola konvensional dan tidak mampu mengupdate diri. - Kenapa biaya operasional SMA dan SMK selisihnya sedikit, padahal SMK ada biaya praktik. (Sudiyono) - Jawab : karena pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan sumber, bukan berdasarkan kompetensi keahlian. - terkait naskah akademik, data pada kajian ini sudah dijadikan dasar dalam perhitungan guna menghitung besaran BOS yang mempertimbangkan ukuran sekolah (permintaan staf khusus menteri) (jawaban untuk Pak AOS) - perhitungan proyeksi siswa sudah mempertimbangkan akses pendidikan (contohnya APK wajar 12 tahun) terkecuali untuk PAUD hanya melihat trend saja karena belum ada kebijakan wajib belajar (jawaban untuk Pak AOS) - kemudian untuk fixed cost dan variable cost penelitian ini juga tidak menggunakan itu, tidak dilakukan pemisahan kedua variabel tersebut. pemisahan variabel ini sedang dilakukan oleh

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		puslitjak dalam penelitian standar biaya operasional nonpersonalia sebagai usulan bahan revisi permendiknas 69 tahun 2009. (jawaban untuk Pak Aos) - untuk SMA dan SMK besarnya hampir sama karena pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sumber pendanaan bukan pengeluaran sekolah. selain itu juga tidak dipetakan berdasarkan kompetensi keahlian. sehingga hasilnya hampir atau menyerupai SMA. di kajian yang juga sedang berlangsung ini akan dihitung standar biaya berdasarkan kompetensi keahlian di jenjang SMK. (jawaban untuk Pak Aos) Saran pembahas untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam materi belajar sudah ada implementasinya dan telah direkomendasikan dalam penelitian. Misalnya nilai religiusitas dalam bentuk doa adalah yang selama ini dilakukan oleh guru. Materi ajar yang dikembangkan peneliti sudah mengintegrasikan nilai-nilai sikap di dalam materi sesuai saran pembahas. Demikian pula nilai karakter lain. Guru sekarang mengejar ketertinggalan atas kegagapan teknologi, keragaman termasuk karakter. Peneliti menyarankan guru perlu mengintegrasikannya dalam materi ajar. Pelaksanaannya: dengan materi yang sudah dipelajari dan mengintegrasikan nilai karakter, guru menuntun siswa pada konteks penerapannya dalam kehidupan lingkungan mereka dengan konsep 4N. Karakter perlu adanya spesifikasi karakter atau profil dan cara efektif. Ada contoh, regulasi yang diterapkan, dan control atas implementasinya. Perlu kerjasama semua pihak terlibat untuk pelaksanaan 4N tersebut. Guru atau tayangan tentang karakter tertentu perlu ditunjukkan sebagai contoh (Niteni). Kemudian bagaimana ditiru oleh siswa (Nirokke). Peran orang tua diharapkan ikut perkembangan karakter. Ini sudah disarankan peneliti dalam bentuk buku laporan mingguan yang ditandatangani orang tua. Kejuruan orang tua dan siswa perlu diterapkan supaya orang tua juga tidak merusak karakter kejujuran siswa karena mengejar nilai saja. 1) Tanggapan peneliti untuk pembahas: SMERU saat ini melakukan penelitian di 2 tempat dalam jangka waktu berbeda, DKI mulai 2019 dan DIY mulai tahun 2017. Hasil dari DKI saat ini memang ada kajian terdahulunya. SMERU mempelajari PPDB zonasi DKI sejak 2018. Selama 2 tahun melakukan berbagai simulasi PPDB. Dilihat juga apakah kebijakan yang diambil tidak hanya applicable tetapi sejalan dengan paying

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		hukum yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. DKI belajar banyak dari DIY. PPDB DIY 2018 sempat kisruh karena lebih dari seperempat siswa tidak bisa masuk sekolah negeri manapun. Di DIY kita turun langsung menggunakan data survey melibatkan 30ribu anak dari 3 angkatan berbeda. DKI data administrasi bekerja sama langsung dengan pemprov DKI. Double burden DKI: guru mendapat siswa beragam, dan pertama kali mengadopsi PJJ. → akan dilakukan riset untuk melihat dampak dari kedua hal tersebut. Temuan awal di DIY: ketika sekolah dizonasikan, siswa beragam, asumsi bahwa siswa membaur tetapi ternyata berdasarkan hasil temuan awal siswa malah berkelompok. Jangan-jangan kebijakan yang dibuat malah semakin mengotak-kotakan siswa. 2) Yufridawati Apakah hasil penelitian ini diambil dari kasus DKI Jakarta? Jika demikian, maka sebaiknya untuk studi lanjutan dari subtransi ini yang kini tengah dilakukan Smeru dilakukan di daerah yg sama pula (bukan di daerah lain), mengingat penerapan regulasi PPDB di daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Simpulan memang tidak dapat dibuat secara nasional, namun dapat dibuat kecenderungan umum mas, sehingga dapat dirumuskan rekomendasinya. Setahu saya ada persamaan pelaksanaan sistem PPDB di HKI dan DIY, yakni salah satunya juga menggunakan syarat usia (utama) dalam jalur zonasi. Namun ada hal lain yang membedakan yakni salah satunya adalah luas wilayah dan kepadatan penduduk. Saya berasumsi hal ini yang menyebabkan adanya temuan di DIY yang berbanding terbalik dengan filosofi kebijakan ini Jawaban: Betul, riset ini dilakukan secara bersamaan di Yogyakarta dan Jakarta. Riset tersebut melibatkan sekitar 30 ribu siswa di Yogyakarta dan 400 ribu siswa di Jakarta. Permasalahannya, kebijakan yang unik pada masing-masing daerah, kita tidak bisa membuat kesimpulan untuk tingkat nasional. Betul, melihat perbedaan kondisi di lapangan yang berbeda beda. Sepertinya kita butuh Permendikbud yang bisa adaptif untuk daerah-daerah dengan kondisi yang berbeda. Studi yang sedang di lakukan di Yogyakarta menunjukkan hasil awal yang cukup mengkhawatirkan. Meski secara umum kebijakan zonasi ini berusaha membuat anak-anak menjadi beragam, ternyata anak-anak mengelompok dengan sendirinya. Bisa jadi, Bu. Ada juga peluang/channel dampak dari perbedaan kultur dan produktivitas sekolah. Perlu cek lebih dalam ke data

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		yang ada dilapangan untuk dapat gambaran umumnya. Secara data, kebijakan zonasi ini pasti akan berdampak negatif bagi kelompok tertentu karena jumlah kursi < jumlah peminat.
4.	Penutupan	: Paparan seminar selesai pukul 16.40 WIB.

III

Merdeka Belajar

KINERJA GURU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN MERDEKA BELAJAR PADA MASA PADEMI COVID-19 DAN PEMBIASAAN BARU

Sabar Budi Raharjo, Etty Sofyatiningrum, Dyah Suryawati, Joko Purnama

**Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Abstrak. Kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dari rumah dimaksudkan untuk menyikapi terjadinya penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, peran aktif guru sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja guru dalam mengimplementasi merdeka belajar pada masa pademi COVID-19 dan pembiasaan baru. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena merupakan pedalaman hasil survei yang dilakukan Puslitjak 2020. Hasil dari kajian ini sebagai berikut. Pertama, kinerja guru dalam pembelajaran dari rumah masa pademi sudah berjalan dengan baik. Guru telah mempraktikkan empat kompetensi (profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian) walaupun belum maksimal. Guru telah melaksanakan proses pembelajaran melalui sistem daring, luring, dan kombinasi (daring dan luring). Penilaian dan umpan balik sudah dilakukan dalam pelaksanaan proses belajar. Guru merasakan tidak puas dengan hasil pembelajaran bila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Kedua, guru telah melakukan pembelajaran kreatif dan inovatif dengan pembelajaran kecakapan hidup. Materinya berkaitan dengan pemberdayaan potensi yang ada di sekitar rumah siswa (pertanian, perikanan, dan kewirausahaan). Namun, masih ada guru yang belum memahami pembelajaran kecakapan hidup. Ketiga, pembiasaan baru yang dilakukan guru dalam pembelajaran dari rumah, terutama tentang penerapan protokol kesehatan dan penyiapan pembelajaran daring.

Kata kunci: kinerja guru, daring, luring, pembiasaan baru

A. Pendahuluan

Kebijakan Merdeka Belajar dapat berjalan dengan efektif jika didukung oleh kinerja guru dengan baik. Kinerja guru pada sebagian daerah masih belum optimal-seperti disebut dalam hasil penelitian di Kabupaten Sleman (Badrun, 2011). Demikian juga hasil uji kompetensi guru (UKG) pada tahun 2017 juga menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan (Paparan Sekretaris Dikdasmen, 2019). Data menunjukkan bahwa kemampuan guru masih belum sesuai dengan Standar Kompetensi Minimal pada angka SKM 70. Sebagian besar guru capaian uji kompetensi di bawah rata-rata SKM yang dipersyaratkan.. Persoalan lain juga memperlihatkan distribusi guru yang masih belum merata pada tingkat daerah. Distribusi guru ini menjadi masalah yang harus di selesaikan oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan perkembangan kinerja guru, pada saat kajian ini dilakukan terjadi situasi dan kondisi wabah pandemi COVID-19. Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diberlakukan

sebagai salah satu langkah menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya jika *lockdown* dilakukan. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah *social distancing* dan *physical distancing* untuk membatasi interaksi sosial dengan orang lain, mengurangi kegiatan di luar rumah dan tetap di rumah saja. Hal ini yang memaksa sebagian besar sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi di Indonesia telah menghentikan sistem PBM (proses belajar mengajar), lalu diganti dengan sistem pembelajaran daring.

Pembelajaran *on-line* ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghentikan penyebaran virus melalui interaksi langsung di antara orang banyak. Peralihan proses pembelajaran yang dulunya melalui tatap muka menjadi *online* tentunya memaksa berbagai pihak supaya sistem pembelajaran tetap berjalan dengan baik.

Untuk mengetahui kinerja guru dalam masa pandemi COVID-19 diperlukan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. Dikatakan demikian karena guru adalah kunci utama pelaksanaan merdeka belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap kinerja guru seputar implementasi merdeka belajar pada masa pandemi COVID-19.

Kegiatan belajar-mengajar dalam masa pandemi COVID-19 harus tetap berjalan walaupun melalui pembelajaran jarak jauh. Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi guru dan kepala sekolah agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Konsekuensinya guru harus menguasai media *online* atau pembelajaran melalui internet dengan menyiapkan materi ajar dan peralatan media *online*. Pembelajaran tersebut dikenal dengan sebutan pembelajaran melalui jaringan internet atau daring.

Pemerintah melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) bahwa “Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.” Dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh, permasalahan dalam kajian ini adalah jawaban atas pertanyaan (1) bagaimana kinerja guru belajar dari rumah (BDR) pada masa pandemi COVID-19; (2) upaya apa yang telah dilakukan guru dalam masa kebisaaan baru; dan (3) bagaimana pembiasaan baru yang dilakukan oleh guru?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja guru dalam mengimplementasikan merdeka belajar pada masa pandemi COVID-19 dan pembiasaan baru. Secara lebih khusus tujuan kajian ini meliputi (1) kinerja guru BDR pada masa pandemi COVID-19; (2) upaya yang telah dilakukan guru dalam masa kebisaaan baru; (3) pembiasaan baru yang dilakukan oleh guru.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK pada masa pandemi COVID-19.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kinerja Guru

Banyak faktor yang memengaruhi kinerja individu. Gibson *et. al* dalam Rusdiana (2015) mengelompokkan variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu variabel individual, variabel psikologi, dan variabel organisasi. Robbins dalam Rusdiana (2015) menjelaskan bahwa kinerja merupakan fungsi interaksi antara kemampuan atau *ability* (A), motivasi atau *motivation* (M), dan kesempatan atau *opportunity* (O) yang dapat dinyatakan dalam formula kinerja = $f(A \times M \times O)$. Artinya, kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Dengan demikian, kinerja ditentukan oleh faktor kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Rivai dalam Rusdiana (2015) mengemukakan bahwa kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu kemampuan, keinginan, dan lingkungan. Bernadin dan

Russel dalam Rusdiana (2015) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil dan fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode. Menurut Rusdiana (2015: 116), kinerja mengajar (*teaching performance*) dapat dirumuskan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok orang dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Merebaknya kasus pandemi COVID-19 sejak Desember 2019 sampai saat ini mengharuskan semua proses kegiatan belajar-mengajar bagi peserta didik untuk sementara waktu dilakukan di rumah. Hal itu perlu dilakukan guna meminimalisasi kontak fisik secara massal sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.

Kinerja guru yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah hasil penilaian terhadap proses belajar di rumah terhadap tiga komponen, yaitu persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (*assesment*) yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya pada masa pandemi COVID-19.

2. Belajar dan Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, siswa berperan sebagai subjek yang harus berkembang, juga sebagai objek yang mendapat arahan dari gurunya. Sejalan dengan itu, menurut Djamarah dan Zain (2006), belajar pada hakikatnya adalah suatu “perubahan” yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas belajar. Pendapat lainnya yang lebih komprehensif dinyatakan oleh Ainurrahman (2013) bahwa “Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya”. Sehubungan dengan itu, pembelajaran yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah pembelajaran secara terencana mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada masa adaptasi pandemi COVID-19.

3. Hakikat Merdeka Belajar

Merdeka belajar memiliki harapan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia dan menyenangkan. Tujuan merdeka belajar agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Hal ini menuntut terciptanya suasana proses pendidikan yang membahagiakan. Merdeka belajar mengedepankan kemerdekaan berpikir, terutama kemerdekaan pada guru. Kemerdekaan guru dalam proses belajar-mengajar menjadi kunci utama sebab harus melekat pada subjek yang melakukan proses belajar, termasuk anak.

Kemerdekaan guru dalam jangka panjang berperan sentral untuk menumbuhkan kemerdekaan belajar peserta didik. Carl Rogers (1969) mengatakan dalam pengantar bukunya “sekolah kita umumnya sangat tradisional, konservatif, birokratis dan resisten terhadap perubahan. Satu cara yang harus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda ini adalah melalui kemerdekaan belajar”.

Strategi pembelajaran yang memerdekakan, menekankan penggunaan pengetahuan secara bermakna dan proses pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan atau pandangan siswa. Aktivitas belajar lebih menekankan keterampilan berpikir kritis, analisis, membandingkan, generalisasi, memprediksi, dan menyusun hipotesis. Merdeka belajar yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah kemerdekaan guru dalam menentukan strategi pembelajaran melalui pembelajaran daring, luring, dan kombinasinya.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan merupakan tindak lanjut kegiatan survei Puslitjak 2020. Data tentang kinerja guru dianalisis dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan *forum discstion group* (FGD). Sasaran dari kajian ini adalah guru, kepala sekolah, dan siswa. Data dari siswa diperoleh dari penyebaran kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis secara diskriptif untuk mendapatkan gambaran kinerja guru dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. pada masa pandemi COVID-19.

Lokus penelitian ditentukan secara proposif berdasarkan responden yang disebut dalam kegiatan survei Puslitjak 2020 dengan kategori daerah 3T dan non-3T. Daerah yang dipilih adalah Provinsi Banten pada daerah 3T dan non-3T, yaitu Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang. Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Gorontalo Utara daerah 3T dan Kota Gorontalo daerah non-3T. Unit analisis dari kajian ini pada tingkat sekolah, yaitu pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Penelitian dilaksanakan pada Juli--September 2020.

D. Hasil dan Pembahasan

Pokok bahasan dalam kajian ini meliputi 1) kinerja guru dalam pembelajaran dari rumah; 2) upaya yang telah dilakukan guru dalam masa pembiasaan baru; (3) pembiasaan baru yang dilakukan guru mulai jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam mendalami kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah ada tiga tema utama yang diperdalam, yaitu persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

1. Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD)

a. Penyiapan Pembelajaran

Pada jenjang SD penyiapan pembelajaran daring yang dilakukan guru sebelum proses pembelajaran: 1) melakukan penyiapan nomor telepon orang tua/wali atau peserta didik dan membuat grup *WhatsApp* (atau aplikasi komunikasi lainnya); 2) mendiskusikannya dengan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik terkait dengan (a) ketersediaan gawai/laptop/komputer dan akses internet, (b) aplikasi media pembelajaran daring yang akan digunakan, dan (c) cara penggunaan aplikasi daring, (d) materi dan jadwal pembelajaran daring; 3) membuat RPP yang sesuai dengan kondisi dan akses pembelajaran daring; (4) memastikan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik mendukung proses pembelajaran daring.

Pada pembelajaran daring di sekolah hampir seluruh orang tua siswa tidak memiliki gawai/laptop/komputer, tetapi berdomisili di daerah yang sinyal internetnya cukup baik. Untuk itu, dilakukan variasi sesuai dengan kondisi sekolah terkait dengan cara guru menyampaikan bahan ajar, jadwal, dan penugasan. Sebelumnya, sekolah melakukan kesepakatan dengan orang tua siswa dan komite sekolah mengenai penyediaan gawai/laptop/komputer agar materi pelajaran, jadwal, dan penugasan dari guru dapat sampai kepada siswa.



Gambar 1 Variasi dari pembelajaran secara luring yang disesuaikan dengan kondisi orang tua siswa

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru sesuai dengan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogi. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru telah menggunakan metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Guru membuat ringkasan/modul materi pelajaran dengan menggunakan *software ms word, excell, power point* atau video materi pelajaran menggunakan *smartphone* yang akan dibagikan kepada siswa melalui media pembelajaran seperti *whatsapp group/google classroom, google meet*, dan *zoom*.

Lama interaksi guru di SD dengan siswanya bervariasi bergantung pada pelaksanaan pembelajaran. Pada pembelajaran secara daring yang dilakukan oleh guru di daerah Non 3T pada umumnya selama 30--60 menit, tetapi dengan perjanjian bersama orang tua siswa lebih dulu. Guru lebih banyak menggunakan cara mengirimkan modul pelajaran berupa instruksi dan video melalui aplikasi di gawai/laptop/komputer yang dapat dibuka oleh siswa atau orang tuanya kapan pun mereka dapat mulai belajar setiap harinya. Materi pelajaran dalam bentuk *file video* juga tidak banyak digunakan oleh guru karena membutuhkan ketersediaan kuota internet yang besar bagi siswa untuk mengunduhnya. Aplikasi yang banyak digunakan oleh guru untuk memberikan ringkasan materi pelajaran, instruksi dan tugas, serta berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa dan orang tuanya adalah *Whatsapp*. Motivasi guru dalam pembelajaran rata-rata dalam kategori baik. Pembelajaran dari rumah sangat dirasakan dampaknya bagi siswa karena harus didampingi dan difasilitasi orang tua, tanpa bantuan orang tua pembelajaran tidak dapat berjalan.

c. Penilaian dan Umpan Balik

Penilaian yang dilakukan guru dengan menggunakan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Namun, pada pembelajaran daring, umpan balik tidak dapat dilakukan guru secara langsung pada saat siswa melakukan kesalahan. Umpan balik disisipkan dalam penilaian hasil tugas siswa yang dikumpulkan. Demikian juga pada saat luring, umpan balik dilakukan dengan cara diselipkan dalam penilaian hasil tugas siswa. Banyak guru merasa khawatir bahwa umpan balik yang diberikan tidak efektif sehingga dapat menurunkan capaian hasil belajar pada siswa.

*"... Untuk umpan balik pada masa BDR ini kami biasanya hanya memberikan pujian
 "bagus" kepada siswa agar mereka semangat dalam belajar..."*
 (Catatan lapangan)

Pada pembelajaran secara luring yang divariasikan dengan tatap muka antara guru dan siswa dalam kelompok kecil di rumah orang tua siswa, dapat dilakukan secara langsung pada saat siswa melakukan kesalahan.

d. Upaya Guru dalam Masa Pembiasaan Baru

Pada masa pembiasaan baru guru melakukan pembelajaran kecakapan hidup. Guru SD kelas rendah (tingkat 1, 2, dan 3) mengajarkan kecakapan hidup kepada siswanya dengan cara mengintegrasikannya dalam mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*). Kecakapan hidup yang diajarkan kepada siswa kelas rendah biasanya materi pelajaran yang sederhana, misalnya mandi, menyikat gigi, membersihkan sepatu, dan menyapu. Pada kelas tinggi (tingkat 4, 5, dan 6), pembelajaran kecakapan hidup yang diberikan biasanya ada dalam mata pelajaran prakarya dan dikaitkan dengan lingkungan, misalnya membuat wedang jahe untuk meningkatkan imunitas tubuh, membuat prakarya dari bahan bekas pakai seperti perca kain, dan botol plastik bekas.

e. Pembiasaan Baru pada Masa Pandemi COVID-19

Dalam pembiasaan baru sebagian besar guru menganjurkan agar peserta didik memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Kebiasaan baru lainnya, guru harus menyiapkan materi ajar dengan media *on line*.

2. Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

a. Penyiapan Pembelajaran

Penyiapan pembelajaran di empat kota/kabupaten hampir sama, yaitu menyeleksi kompetensi dasar esensial dan menganalisisnya, lalu menuangkannya di dalam RPP. Selain itu, para guru menyiapkan bahan ajar berupa fotokopi ringkasan dan fotokopi modul bagi yang luring; bahan ajar berupa *power point*, *video*, *youtube*, gambar bagi yang daring. Peralatan yang dipersiapkan guru yang luring adalah seperangkat papan tulis dan alat tulisnya, alat transportasi berupa motor, dan lembar kerja. Bagi yang menggunakan sistem daring, mereka mempersiapkan materi sesuai dengan peralatan dan media yang akan digunakan berupa HP/laptop, untuk *WAG*, *facebook*, *google meet*, *google form* dan jaringan internet. Untuk Kota Gorontalo ada TV lokal, TV Mimoja. Selain itu, guru melakukan pengecekan kesiapan siswa, seperti kehadiran atau *share* lokasi untuk mengetahui keberadaan dan kesiapan siswa. Beberapa guru menyusun RPP 3--5 lembar karena, menurut guru, RPP satu lembar kurang bermakna. Waktu belajar bervariasi, siswa menerima 2-- 3 mata pelajaran per hari dengan durasi 1--2 jam pelajaran.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran, hal yang telah dilakukan guru berkaitan dengan metode pembelajaran, kecakapan hidup yang dikembangkan, bentuk motivasi terhadap siswa, upaya guru, dan adaptasi kebiasaan baru. Untuk sekolah yang melakukan luring, baik di 3T maupun non-3T, guru mengunjungi kelompok siswa antara 3--4 orang di satu titik. Metode pembelajaran yang digunakan, baik yang luring maupun daring, antara lain tanya jawab, penugasan, diskusi, permainan, penugasan terstruktur, percakapan, *greeting*, dan penugasan mandiri. Selama pandemi, guru selalu memotivasi siswa dengan berbagai cara. Bentuk motivasi dalam pembelajaran luring, antara lain kunjungan ke rumah siswa yang tidak punya HP walau berjarak jauh, para siswa diberi semangat, dan pendekatan kepada orang tua siswa. Dalam hal ini, guru terlihat mampu memotivasi diri dan memotivasi siswa agar tetap belajar dalam situasi apa pun.



Gambar 2 Suasana belajar luring di SMP Plus Mabdail Falah, Kabupaten Lebak, Banten

Dukungan yang dirasakan selama pandemi di 3T, antara lain adanya fasilitas pelatihan IT dan *wifi* bagi sekolah yang punya *wifi*. Bagi guru swasta, gaji dan uang transpor tidak dipotong walau sekolahnya tidak punya *wifi* dan tersedia modul dari dinas pendidikan Kabupaten Lebak walaupun isinya masih terlalu ringkas. Untuk sekolah yang tersedia *wifi* dan non-3 T, sarana prasarana cukup memadai sehingga membantu kelancaran proses pembelajaran. Di Kota Gorontalo banyak guru yang sudah mahir IT, di sekolah SMP Muhammadiyah bahkan ada 32 komputer dan 5 laptop dengan 3 titik jaringan internet.

c. Penilaian dan Umpan Balik

Penilaian yang dilakukan guru berupa aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kehadiran. Untuk pelajaran Bahasa Inggris bentuknya berupa *reading* dan *speaking*. Teknik penilaian dengan cara siswa diminta memfoto hasil pekerjaannya, lalu mengirimkannya via WA. Waktu penilaian untuk pengetahuan umum dilakukan seminggu setelah tugas, sedangkan penilaian sikap dilakukan selama proses pembelajaran. Bentuk umpan balik yang dilakukan, antara lain mengoreksi pekerjaan siswa, mengomentari hasil kerja siswa, memberi pujian terhadap hasil kerja siswa, menyemangati siswa, dan membandingkan kriteria dengan hasil kerja siswa.

d. Upaya Guru dalam Masa Pembiasaan Baru

Guru sudah melakukan, antara lain pendekatan kepada orang tua secara persuasif, memancing siswa agar selalu semangat dan bergairah dalam belajar, menghargai hasil kerja siswa sekecil apa pun yang sudah dilakukan, meramu pembelajaran agar lebih menarik, dan mencari bahan ajar dari internet. Kecakapan hidup yang dikembangkan antara lain membantu orang tua, membuat alat kebersihan seperti sapu lidi, memperdalam mata pelajaran Agama, mencari materi di internet, menemukan masalah kesehatan, disiplin diri protokol kesehatan, membaktik, dan bekerja mandiri.

e. Pembiasaan Baru pada Masa Pandemi COVID-19

Adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan guru adalah melayani siswa secara ekstra, mengingatkan siswa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengatur jarak dengan siapa pun serta melakukan penyemprotan tempat tinggal/lingkungan sekitar secara berkala. Selain itu, dilakukan penyusunan bahan ajar dalam bentuk *power point*, *youtube*, menugaskan siswa membuat video sendiri, menyeleksi materi esensial yang kontekstual dan tidak memberatkan siswa

3. Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

a. Penyiapan Pembelajaran

Penyiapan pembelajaran ketika pembelajaran dari rumah ada beberapa tahap, seperti sebelum pembelajaran, guru menyiapkan sarana pembelajaran (HP atau Laptop). Guru melakukan pengecekan sinyal internet.

Sebelum mulai pembelajaran, guru melakukan pengecekan kesiapan siswa, seperti kehadiran atau *share* lokasi untuk mengetahui keberadaan dan kesiapan siswa. Sebagian besar guru telah menguasai IT dengan baik, terutama guru muda, tetapi untuk guru senior sebagian masih mengalami kendala. Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan kolaborasi dengan guru yang memiliki kemampuan IT lebih baik. Kurikulum yang digunakan K-13 dan sebagian besar guru sudah membuat RPP satu lembar dengan memuat pokok pembelajaran sesuai dengan KD.

Kendala bagi guru di daerah 3T ketika melakukan pembelajaran adalah sinyal internet lemah. Akibatnya, siswa harus mencari sinyal yang kuat agar dapat menerima pembelajaran seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3 Siswa SMA Negeri 1 Cigemblong, mencari sinyal internet di kebun di atas pohon dan pada malam hari di sekitar bukit Desa Cisaray, Cigemblong, Kabupaten Lebak

Untuk sekolah di daerah non-3 T atau di kota sebagian besar tidak ada masalah dengan sinyal internet. Pembelajaran daring untuk wilayah non-3T dapat dilakukan dengan baik. Namun, masih ada kendala yang ditemui, yaitu masih ada siswa yang tidak memiliki HP atau punya HP, tetapi paket data tidak cukup.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogi guru dalam pelaksanaan pembelajaran, yakni telah menggunakan metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 guru telah melakukan pembelajaran daring dari rumah, Akan tetapi, setelah pembiasaan baru atau saat tahun ajaran baru, guru dan melakukan pembelajaran daring dari sekolah, sedangkan peserta didik berada di rumah. Guru membuat (ringkasan materi atau *power point/video*) yang akan dibagikan melalui media sosial (*WhatsApp group/messenger facebook/ google classroom, zoom*, dan aplikasi lainnya) kepada siswa.

Pembelajaran dilakukan dengan cara kombinasi daring dan luring. Daring dilaksanakan bagi siswa yang memiliki sarana pembelajaran (HP/laptop) melalui jaringan internet. Siswa yang tidak memiliki HP/laptop guru mengunjunginya rumah siswa, lalu memberikan pembelajaran atau tugas Dalam hal ini, guru acapkali terkendala oleh kondisi geografis dan transportasi menuju rumah siswa yang jauh dari sekolah.



Gambar 4 Kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran SMA Negeri 7 Gorontalo Utara melalui luring dan daring

Lama interaksi guru dengan siswa rata-rata 30-- 90 menit karena menyangkut pemaparan materi dalam media sosial, kemudian siswa diminta menyimak. Mengapa Waktunya tatap layar tidak maksimal karena ada video lama yang menyedot paket data sehingga waktu interaksi terbatas. Guru lebih banyak menggunakan *WhatsApp Group*, sebagian menggunakan *google classroom* dan *zoom*. Motivasi guru dalam pembelajaran secara rata-rata dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari usaha guru dalam melakukan penyiapan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dengan semangat agar anak tetap belajar

c. Penilaian Dan Umpan Balik

Penilaian dilakukan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Namun, pembelajaran dari rumah melalui daring ada kecenderungan hasil pembelajaran menurun karena target pembelajaran tidak bisa maksimal, seperti terlihat dalam catatan lapangan di bawah ini.

" Memang sih terus terang hasil belajar yang diperoleh anak ketika tatap muka dengan belajar jarak jauh berbeda, hasilnya lebih baik waktu tatap muka. Skala minimal kita turunkan karena kendala waktu juga. Jadi materi disampaikan tidak terlalu mandalam...."
(catatan lapangan)

Dalam pelaksanaan BDR ada kecenderungan penurunan capaian hasil belajar. Penurunan hasil belajar diduga karena waktu tatap layar dengan durasi yang terbatas sehingga guru kurang luasan menjelaskan materi ajar kepada peserta didik.

d. Upaya Guru dalam Masa Pembiasaan Baru

Sebagian guru masih belum memahami tentang pembelajaran kecakapan hidup yang dikaitkan dengan mapel. Hanya sebagian kecil guru yang sudah mempraktikkan pendidikan kecakapan hidup, seperti kegiatan aktivitas sehari-hari di rumah dengan orang tua dan siswa membantu orang tua bekerja di ladang.

e. Pembiasaan Baru Masa Pandemi COVID-19

Pembiasaan baru yang dilakukan guru adalah disiplin dalam mempraktikkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Kebiasaan baru yang lain, guru menyiapkan perangkat pembelajaran melalui daring yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

c. Penilaian dan Umpan Balik

Sebagian besar guru menilai kualitas pembelajaran pada masa BDR sangat menurun karena pembelajaran yang dilakukan tidak optimal. Pada saat akhir semester, seluruh SMK juga melakukan penilaian akhir semester (PAS). Sebagian besar sekolah melaksanakannya secara daring. Sekolah melaksanakan PAS secara luring dengan mengirimkan soal ke rumah siswa pada hari pertama PAS dan pada hari terakhir pelaksanaan PAS diambil lagi jawaban dari rumah siswa. Penilaian juga tetap dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa atas materi pembelajaran yang diajarkan. Penilaian dilakukan dengan pemberian ulangan harian atau portofolio penugasan di setiap akhir sesi materi.

d. Upaya Guru dalam Masa Pembiasaan Baru

Pembelajaran kecakapan hidup belum menjadi fokus utama pembelajaran pada masa BDR. Muatan materi masih mengacu pada materi yang ada dalam Kurikulum 2013 meskipun sudah dilakukan penyederhanaan. Namun, sebagian guru sudah mencoba mendekatkan konteks materi dengan kondisi yang ada di sekitar lingkungan siswa. Inovasi guru dalam memilih berbagai media pembelajaran yang tepat ini masih terbatas pada kreativitas setiap guru. Ada guru yang meminta beberapa siswa untuk membantu pembudidayaan ikan yang ada di dekat rumahnya supaya memiliki keterampilan melalui praktik langsung. Di SMK Bina Taruna Kota Gorontalo guru berusaha memberikan pembelajaran sikap dan karakter pada masa BDR dengan memberikan jadwal kegiatan mingguan dan melaporkannya melalui buku kontrol yang dikumpulkan ke sekolah sekali dalam satu minggu. Muatan kegiatan mingguan ini meliputi aktivitas di rumah dan hafalan Alquran.

e. Pembiasaan Baru pada Masa Pandemi COVID-19

Pembiasaan baru yang paling dirasakan guru dalam pembelajaran adalah beragamnya penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi dan IT. Guru dan siswa dituntut untuk terbiasa memanfaatkan dan menguasai IT dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar. Dengan dilaksanakannya pembelajaran daring melalui berbagai metode dan sarana pembelajaran menjadikan guru lebih mengetahui berbagai macam sarana pembelajaran. Selain itu, siswa juga dituntut mandiri dan bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran. Pembiasaan baru ini menjadikan guru dan siswa terbiasa mencari tahu dan memanfaatkan sumber pembelajaran dari internet. Pada saat berlangsungnya pembelajaran, kebiasaan baru yang dilakukan adalah guru menyapa siswa dengan menanyakan kabar dan kesehatannya, terutama pada saat pembelajaran interaktif melalui media *video conference*. Dalam hal menerapkan protokol kesehatan, pada saat guru atau siswa datang ke sekolah, juga dilakukan pengecekan suhu dan menjaga jarak supaya tidak terjadi kerumunan.

Pola kinerja guru pada pembelajaran dari rumah mulai jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dalam kajian ini secara garis besar dapat digambarkan dalam alur pembelajaran seperti gambar di bawah ini.



Gambar 3 Pola kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah (BDR)

Pola kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah dimulai dari motivasi dan kemampuan guru dalam menyiapkan bahan ajar melalui media *online* (daring, luring, atau kombinasi). Penyampaian pembelajaran juga diperlukan motivasi dan kemauan peserta didik dalam mengikuti proses belajar-mengajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran diperlukan umpan balik untuk mengetahui daya serap pelajaran yang disampaikan. Dalam hal ini, ada hambatan dan tantangan, baik bagi guru maupun siswa. Hambatan itu berupa ketersediaan infrastruktur jaringan internet dan media yang digunakan oleh guru dan peserta didik.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- Kinerja guru dalam pembelajaran dari rumah masa pandemi sudah berjalan dengan baik. Guru telah mempraktekkan empat kompetensi (profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian) walaupun belum maksimal. Hal ini terlihat melalui kegiatan guru dalam menyiapkan proses pembelajaran dengan baik. Guru telah melaksanakan proses pembelajaran melalui sistem daring, luring, dan kombinasi (daring dan luring). Penilaian dan umpan balik sudah dalam pelaksanaan proses belajar. Guru merasakan tidak puas dengan hasil pembelajaran bila dibanding pembelajaran dengan tatap muka. Motivasi guru sangat baik ditunjukkan dengan penyiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.
- Guru telah berupaya melakukan pembelajaran kreatif dan inovatif dengan pembelajaran kecakapan hidup dengan penugasan terkait dengan pemberdayaan potensi yang ada di sekitar rumah siswa (pertanian, perikanan, kewirausahaan), tetapi masih ada guru yang belum memhami pembelajaran kecakapan hidup
- Pembiasaan baru yang dilakukan guru dalam pembelajaran dari rumah yang dilakukan, terutama pembelajaran penerapan protokol kesehatan dan penyiapan pembelajaran daring.

2. Saran

a. Peningkatan Kualitas Kinerja Guru dalam Pembelajaran dari Rumah

- 1) Dalam pembelajaran dari rumah perlu ada pelatihan bagi guru yang kurang terampil dalam menggunakan media sosial, misalnya menyiapkan materi ajar melalui *power point* dengan cara sederhana.-
- 2) Dalam pembelajaran dari rumah guru perlu menyusun modul atau ringkasan pokok mapel untuk disampaikan dalam pembelajaran dari rumah
- 3) Pembelajaran terkait dengan mapel hendaknya mengkaitkannya dengan potensi di sekitar rumah atau wilayah. Dengan demikian, pembelajaran dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari atau pembelajaran kecakapan hidup.
- 4) Pemerintah perlu melakukan pengukuran atau penilaian terhadap KD yang tidak bisa dicapai dalam pembelajaran karena keterbatasan waktu interaksi antara guru dan siswa. Dalam hal ini, perlu ada penekanan pada KD yang harus dikuasai siswa.
- 5) Khusus untuk SMK perlu diberi kesempatan kepada siswa untuk praktik di sekolah dengan menjaga protokol kesehatan
- 6) Kebiasaan baru dengan menggunakan IT dalam pembelajaran perlu ada *sharing* praktik setiap mapel pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- 7) Sebagai penghargaan profesional, guru yang melakukan kegiatan pembelajaran luring dan berprestasi bagus hendaknya diberi insentif berupa nilai angka kredit jabatan fungsional guru.

b. Dukungan Kinerja Guru dalam Pembelajaran dari Rumah

- 1) Kemendikbud telah mengeluarkan stimulus relaksasi pemanfaatan dana BOS dan BOP untuk pengadaan fasilitas pendukung BDR (Permendikbud No. 8/2020 dan No. 20/2020) perlu dilakukan monitoring supaya sekolah memberikan dukungan sarana pembelajaran daring kepada siswa yang terkendala tidak memiliki HP atau tablet. Selain itu, perlu juga diberi tambahan paket data untuk pembelajaran dari rumah.
- 2) Pemerintah daerah atau Pemerintah Pusat perlu bekerja sama dengan telkom atau telkomsel dalam memperkuat akses jaringan internet.
- 3) LPMP perlu memperluas cakupan penyampaian materi teknis pembelajaran dari rumah kepada guru (3T dan non-3T)
- 4) Perlu mendorong pengatikan peran KKG dan MGMP dalam pemberian materi teknis pembelajaran dari rumah sesuai dengan mapel masing-masing
- 5) Pemerintah daerah hendaknya lebih fokus pada penerima Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memastikan bahwa siswa dari keluarga berpenghasilan rendah menerima bantuan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Ainurrahman. 2013. *Belajar dan pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.

Badrun, Kartowagiran. Kinerja guru profesional (Guru pascasertifikasi), *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, November 2011, Th. XXX, No. 3

- Djamarah, Syaiful Bahri & Zain Aswan. 2006. *Strategi belajar mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemendikbud. 2019. Paparan Sekretaris Dikdasmen.
- Rusdiana, A. dan Heryati, Yeti. 2015. *Pendidikan profesi keguruan*. Bandung: Pustaka Setia,
- Rogers, Carl R. 1969. *Freedom to Learn. Columbus*. Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company
- Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid- 19)

EVALUASI HASIL AKREDITASI SEKOLAH

Siswantari, Subijanto, Darmawan Sumantri, Dodi Setiawan, Asri Ika Dwi Martini

**Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Abstrak. Evaluasi hasil akreditasi sekolah ini bertujuan untuk menemukan –variabel prediktor dalam memprediksi apakah suatu sekolah yang berakreditasi *sangat baik* dan *baik* tetap memiliki kinerja yang baik. Metode yang digunakan adalah dengan menggambarkan hubungan data sekunder akreditasi, UN, PMP (rapor mutu), dan UKG. Hasilnya bahwa akreditasi kedua dimulai 2013, artinya delapan tahun setelah akreditasi dimulai, jumlah akumulasi SMA yang diakreditasi dua kali pada 2019 sebanyak 24 persen, hubungan perubahan peringkat akreditasi dengan UN memperlihatkan gambaran yang konsisten, peringkat akreditasi di seluruh provinsi memperlihatkan beberapa kejanggalan, peringkat akreditasi memperlihatkan hubungan yang relatif konsisten dengan nilai 8 SNP, hubungan rapor mutu yang diklasifikasikan menjadi 5 kategori dengan nilai UN tidak selalu konsisten, peringkat akreditasi mempunyai hubungan yang positif dengan dengan UKG. Untuk itu, disarankan dilakukan pembenahan dapodik.

Kata kunci: akreditasi, prediktor, ujian nasional, pemetaan mutu pendidikan, uji kompetensi guru

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Manfaat penyelenggaraan akreditasi sekolah adalah sebagai acuan dalam (i) meningkatkan mutu dan rencana pengembangan sekolah; (ii) –memberikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah untuk menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah ; (iii) –memotivasi sekolah agar terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional; (iv) memberikan bahan informasi bagi sekolah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; serta (v) bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah/madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional (BAN-S/M b, 2017).

Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan/atau tidak terakreditasi. Nilai akreditasi sekolah diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu *sangat baik* (A), *baik* (B), dan *cukup* (C).

Jika dikaitkan dengan manfaat akreditasi yang pertama, kedua, dan ketiga, hasil evaluasi ini memperlihatkan bahwa SMA yang akreditasi pertamanya berperingkat A, peringkat akreditasi keduanya ada yang masih A, ada yang turun menjadi B dan ada juga yang menjadi C (Lihat Tabel 1). Demikian pula untuk SMA yang akreditasi pertamanya B, peringkat akreditasi keduanya bisa menjadi A, tetap B, atau turun menjadi C. Kondisi yang sama juga diperlihatkan oleh SMA yang akreditasi pertamanya C, peringkat akreditasi keduanya ada yang menjadi A atau B atau tetap C. Tampak bahwa yang berperingkat akreditasi bagus (A dan B) juga tidak selalu berupaya atau berhasil untuk

mempertahkannya. Artinya, manfaat akreditasi sebagai acuan meningkatkan mutu dan rencana pengembangan sekolah belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Tabel 1 Perkembangan Nilai UN SMA IPA dan IPS Menurut Perubahan Peringkat Akreditasi 2014--2019

Perubahan Akreditasi	Program Studi IPA						Program Studi IPS					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	63,63	64,56	56,42	52,97	51,67	53,40	60,43	59,74	54,60	50,15	48,23	49,85
A > A	62,69	65,59	57,44	54,25	53,24	55,26	59,28	60,55	55,78	52,09	50,26	52,18
A > B	54,24	57,26	49,08	44,24	42,17	44,65	51,52	52,91	47,28	41,48	41,08	42,33
A > C	51,17	50,02	46,24	42,12	38,48	39,86	49,03	47,22	42,85	39,39	38,06	40,18
B	56,93	56,51	48,80	45,74	42,95	44,57	54,98	53,33	48,24	43,90	41,57	42,07
B > A	58,37	59,64	51,00	46,60	44,14	46,48	55,32	55,20	50,05	44,50	41,92	43,18
B > B	57,73	59,16	48,78	44,10	40,39	43,12	54,91	54,60	48,56	43,24	39,80	40,80
B > C	54,49	55,90	48,15	42,26	37,31	40,04	53,71	52,43	44,83	39,00	37,51	39,04
C	53,11	52,45	45,11	44,07	41,64	41,93	52,54	50,77	45,08	42,60	40,46	40,36
C > A	58,88	57,93	49,23	47,52	44,73	44,44	55,62	53,08	47,35	45,93	42,22	42,79
C > B	53,72	55,79	46,83	43,40	40,65	41,67	53,01	51,66	46,52	42,78	40,13	40,27
C > C	58,55	57,35	46,51	43,17	37,92	38,89	52,67	50,56	44,77	41,54	37,90	38,50

Sumber: BAN S/M dan Pusmenjar, 2020 (setelah diolah)

Tujuan akreditasi di antaranya adalah mengukur kinerja sekolah dan untuk mengetahui -peringkat akreditasi sebagai hasil kinerja warga sekolah. Menurunnya peringkat akreditasi pada akreditasi yang kedua memperlihatkan manfaat akreditasi sebagai umpan balik dan sebagai motivator belum sepenuhnya efektif. Manfaat lain, untuk mengetahui apakah akreditasi, semakin berkurang - karena ditengarai ada hasil akreditasi tidak selalu mencerminkan kondisi sekolah yang sesungguhnya. Perlu diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 ketentuan penetapan akreditasi tersebut masih diterapkan sehingga dapat bahwa ada sekolah swasta yang berakreditasi C tidak diizinkan menyelenggarakan UN.

Hasil akreditasi yang belum mencerminkan kondisi sekolah terlihat melalui -hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan, (2018) berikut ini.

- Sekolah berakreditasi A belum sepenuhnya sesuai dengan implementasi SNP-nya. Dalam hal ini, ditemukan sekolah sampel berakreditasi A yang kekurangan ruang kelas. Artinya, prinsip akreditasi, yaitu objektif dan karakteristik akreditasi yang menyeimbangkan kelayakan dan kinerja sekolah, belum sepenuhnya diterapkan. Hal itu juga didukung oleh hasil penelitian Hartini (2011) yang menunjukkan bahwa akreditasi secara kuantitatif mengalami kenaikan, tetapi tidak tecermin dari kualitas secara aktual.
- Akreditasi masih berfokus pada kelengkapan dokumen dan sarpras belum sepenuhnya dikaitkan dengan proses pembelajaran (contoh bagaimana sarpras dimanfaatkan).
- Terdapat butir pertanyaan dalam standar proses, standar pembiayaan, dan standar penilaian yang perlu ditinjau kembali.

Permasalahan tersebut mengakibatkan akreditasi (i) belum dapat dijadikan sebagai indikator akuntabilitas satuan pendidikan secara maksimal, baik kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua siswa, maupun siswa; (ii) belum dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah oleh pemerintah daerah; dan (iii) belum sepenuhnya mampu menjadi alat ukur penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi tampaknya juga belum diselenggarakan secara efisien. Menurut aturan akreditasi

berikutnya, penentuan akreditasi suatu sekolah dilakukan setelah lima tahun. Namun, data memperlihatkan setelah delapan tahun baru dilakukan akreditasi berikutnya.

Kondisi tersebut menuntut dilakukannya reformasi sistem akreditasi yang diawali dengan evaluasi. Seiring dengan berbagai perubahan kebijakan pengelolaan sistem pendidikan yang digagas oleh Mendikbud, Nadiem A. Makarim, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mereformasi sistem akreditasi melalui-pengembalian fungsi akreditasi sebagai bagian dari penjaminan mutu. Implikasinya adalah instrumen akreditasi harus lebih mampu mengungkap indikator potensi sebuah sekolah dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang baik. Proses bisnis sistem akreditasi jugaharus lebih menekankan aspek tindak lanjut dari pelaksanaan akreditasi itu sendiri.

Terkait dengan instrumen akreditasi, reformasi perlu diperlihatkan dengan sistem akreditasi yang sejalan dengan era otomasi. Peringkat akreditasi lanjutannya diharapkan hanya menggunakan variabel prediktor yang memengaruhi skor akreditasi. Jika dikaitkan dengan tindak lanjut, nantinya tidak semua sekolah dikunjungi untuk penilaian akreditasi berikutnya. Hanya sekolah yang akreditasi C dan yang menurun kinerjanya yang divisitasi. Untuk sekolah yang akreditasi sebelumnya A dan B, akreditasi berikutnya cukup dimonitor dengan melihat variabel prediktor.

2. Tujuan

Evaluasi akreditasi sekolah dilakukan dengan tujuan - untuk menemukan variabel prediktor dalam memprediksi bahwa suatu sekolah tetap memiliki kinerja yang baik melalui penilaian variabel prediktor tersebut sebagai instrumennya.

3. Manfaat

Hasil kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan, baik oleh BAN S/M maupun Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen, Dikmas (Direktorat Pembinaan SMA) dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus).

4. Keterbatasan

Dalam pelaksanaan evaluasi ini ditemukan beberapa kendala untuk -memperoleh data, terutama dapodik, bahwa data yang ditemukan ternyata masih memperlihatkan beberapa kekurangan dan kelemahan.

5. Tinjauan Pustaka

Akreditasi sekolah dilakukan melalui tindakan membandingkan kondisi sekolah dalam kondisi nyata (riil) terkait dengan delapan kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP), yakni standar isi, proses, kompetensi lulusan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta penilaian pendidikan.

Menurut hasil penelitian Asrijanty (2018: 7--8) pada SMP (14.248 sekolah) yang diakreditasi oleh BAN-SM pada 2010 s.d 2014 dan menggunakan data UN tahun pelajaran 2014/2015, terdapat hubungan positif antara hasil akreditasi sekolah dan hasil UN. Meskipun demikian, indeks korelasi yang diperoleh tidak tinggi. Hal ini dapat dipahami karena sekolah hanya salah satu faktor yang memengaruhi

prestasi siswa. Faktor lain, seperti pola pikir dan perilaku siswa, merupakan faktor penting lain yang memengaruhi prestasi siswa.

Terkait dengan penyelenggaraan akreditasi, penelitian Asmani dkk. (2012) menunjukkan kebijakan akreditasi yang dimaksudkan untuk mendorong sekolah memenuhi standar minimal kualitas, oleh beberapa sekolah diperlakukan sebagai tujuan. Akibatnya, hasil akreditasi yang diperoleh tidak sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi objektif.

Simpulan penelitian Khusnah (2013) menjelaskan bahwa penyebab dari kondisi tersebut adalah masih banyak penyimpangan di lapangan, antara lain adanya manipulasi data atau sarana dan prasarana serta kasus penyuapan asesor. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan akreditasi menyimpang dari prinsipnya dan tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil analisis dari laporan yang diterima oleh mantan Ketua BAN-S/M Abdul Mu'ti bahwa titik terlemah dari kualitas standar mutu ada pada standar dan prasarana. Hal ini menjadikan sejumlah sekolah melakukan "kecurangan" misalnya dengan jalan menyewa sarana dan prasarana, ketika divisitasi (www.jppn.com, 2014). Hasil studi Nanang dan Rusman (2019) menunjukkan perlunya pemetaan mutu pendidikan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing terkait dengan pencapaian SNP.

Hingga awal 2020 ini, berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), banyak guru di Indonesia belum memiliki kompetensi minimum untuk mengelola pembelajaran yang berkualitas. UKG itu meliputi –penguasaan kompetensi pedagogik, kemampuan guru mengelola kelas dan menyiapkan strategi belajar untuk murid, dan kompetensi profesional, penguasaan guru terhadap materi, serta kemampuan mengevaluasi pembelajaran. UKG bukan satu-satunya indikator kualitas guru, tetapi juga dapat digunakan untuk membentuk seorang guru menjadi profesional atau meningkatkan profesionalismenya (Sumarlan, 2020).

B. Metode

Evaluasi dilakukan dengan bereksplorasi menghubungkan-hubungkan dan menganalisis berbagai variabel yang diperkirakan bisa menjadi prediktor dan data sekundernya (lihat Tabel 2). Tingkat pendidikan yang dianalisis adalah SMA.

Tabel 2 Data yang Digunakan untuk Bereksplorasi

No.	Data untuk eksplorasi	Keterangan
1.	Data hasil akreditasi	• Data 8 SNP dan nilai akhir. • Dari 2005 s.d. 2019.
2.	Dapodik dari Pusdatin	• Data individual SMA dan SLB. • Dari 2017 s.d. 2019. • Terdiri atas 53 variabel. • Ada identitas NPSN. • Sudah disinkronkan. • Jumlah 13.263 SMA/SLB.
3.	Data UN (UNKP dan UNBK)	• SMP, SMA, SMK. • Dari 2005 s.d. 2019
4.	Data Penjaminan Mutu Pendidikan (Rapor Mutu)	• SD, SMP, SMA dan SMK. • Dari 2016 s.d 2018

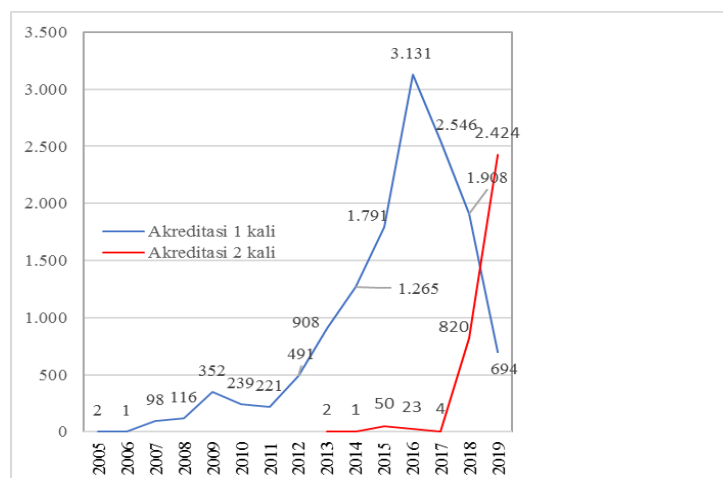
No.	Data untuk eksplorasi	Keterangan
5.	Data Uji Kompetensi Guru (UKG) dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	• SD, SMP, SMA, dan SMK. • Dari 2016 s.d. 2018. • Kompetensi profesional, pedagogi, dan sosial.
6.	Dapodik dari Set. Ditjen PAUD, Dikdasmen, Dikmas.	

C. Hasil Eksplorasi dan Pembahasan

1. Gambaran Umum

a. Jumlah SMA yang Diakreditasi

Data akreditasi yang tersedia hanya merupakan data besaran, dalam arti hanya nilai 8 SNP dan nilai akhir. Mengingat jarak waktu akreditasi setiap sekolah minimal 5 tahun, dan setelah data dibersihkan, diperoleh data SMA yang diakreditasi satu kali antara tahun 2005--2019 dan yang diakreditasi dua kali antara tahun 2013--2019 (Lihat Gambar 1). Tampak bahwa jumlah SMA yang diakreditasi satu kali secara menyeluruh meningkat terus dan mencapai puncaknya pada 2016 dengan jumlah SMA yang diakreditasi 3.131, kemudian menurun terus dan pada 2019 jumlah SMA yang diakreditasi 694 SMA.



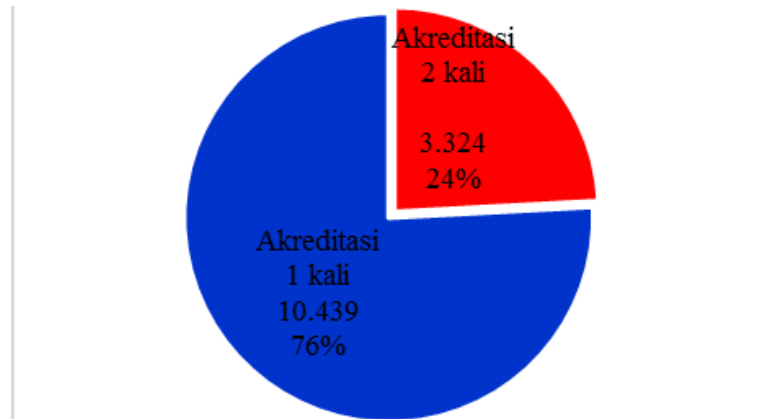
Gambar 1 Jumlah SMA yang Diakreditasi Satu Kali dan Dua Kali dalam Tahun 2005--2019
(Sumber: BAN S/M, 2020)

Jumlah SMA yang diakreditasi 2 kali dimulai 2013. Peningkatan yang mencolok terjadi pada 2017 dan mencapai puncaknya pada 2019 dengan jumlah SMA yang diakreditasi 2.424. Pada 2019 jumlah SMA yang diakreditasi untuk kedua kalinya sekitar 35% jumlah SMA yang diakreditasi satu kali.

Dengan dimulainya akreditasi yang kedua pada tahun 2013, berarti jarak waktu akreditasi pertama dan kedua 8 tahun, padahal menurut aturan, jarak waktu akreditasi idealnya adalah 5 tahun. Mengingat dana akreditasi saat itu, terutama dari pemerintah, kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan dana untuk menyelenggarakan akreditasi.

b. Proporsi SMA yang Diakreditasi Dua Kali dalam Tahun 2005--2019

Proporsi SMA yang diakreditasi dua kali pada 2019 sebanyak 24%, sementara yang diakreditasi satu kali 76%. Dengan demikian, jumlah SMA yang diakreditasi satu kali 4,17 kali lipat jumlah SMA yang diakreditasi dua kali.

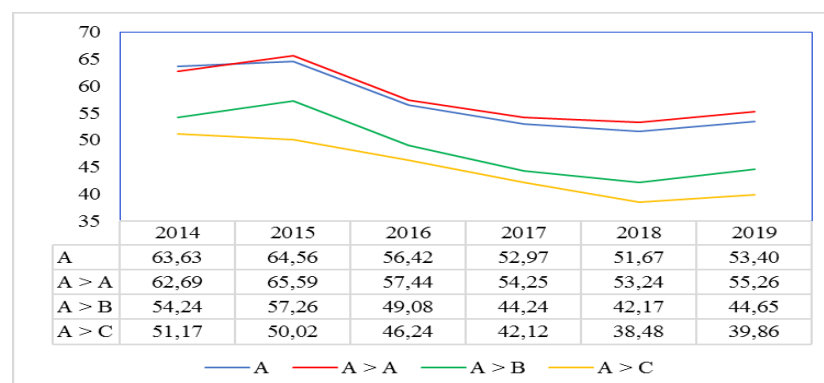


Gambar 2 Proporsi Akumulasi SMA yang Diakreditasi Satu Kali dan Dua Kali dalam Tahun 2005—2019 (Sumber: BAN S/M, 2020 (setelah diolah))

2. Hubungan Peringkat Akreditasi dengan Nilai Ujian Nasional

a. Hubungan Perubahan Peringkat Akreditasi dengan Perkembangan Rerata Nilai UN SMA

Tabel 1 memperlihatkan perubahan nilai UN SMA IPA dan IPS menurut perubahan peringkat akreditasi pertama dan kedua antara tahun 2014--2019. Tampak dalam Tabel 1 bahwa semua kondisi terjadi. Akreditasi pertama berperingkat A, kemudian akreditasi kedua berperingkat C ada, demikian pula yang sebaliknya. Gambar 3 memperlihatkan bahwa SMA yang diakreditasi pertama bernilai A, kemudian pada akreditasi kedua nilai UN-nya bernilai A cenderung meningkat meskipun sedikit. Terlihat konsisten untuk SMA yang akreditasi keduanya berperingkat B, nilai UN-nya juga lebih rendah dibandingkan dengan SMA yang berakreditasi A. Hal yang sama juga terjadi untuk SMA yang akreditasi keduanya bernilai C, nilai UN-nya juga lebih rendah dibandingkan dengan SMA yang berakreditasi B.



Gambar 3 Perubahan Rerata Nilai UN SMA IPA dalam Tahun 2014--2019 Menurut Perubahan Akreditasi (dari A) (Sumber: BAN S/M dan Pusmenjar, 2020 (setelah diolah))

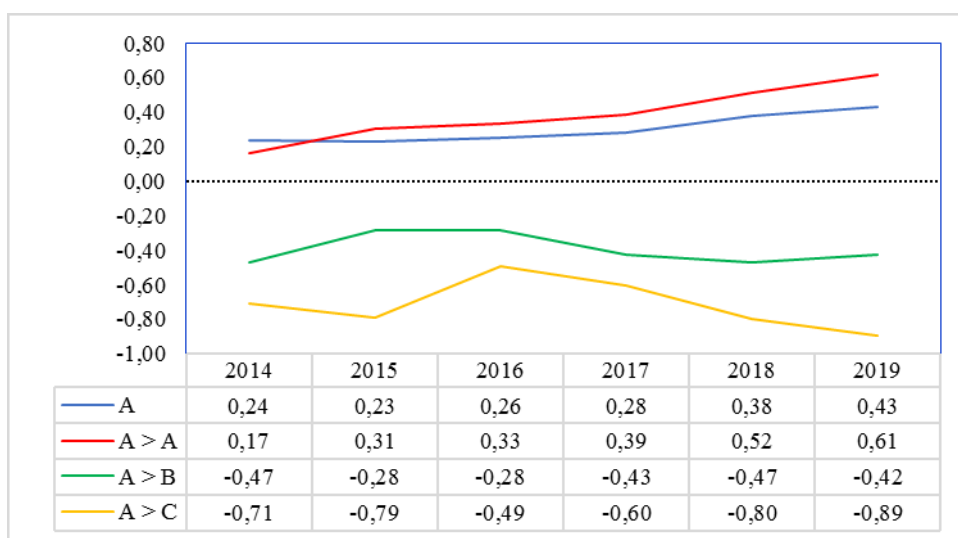
Secara keseluruhan - jumlah gambarnya ada 6. Intinya, baik SMA yang berperingkat A, B, maupun C pada akreditasi yang pertama dengan perubahan peringkatnya pada akreditasi yang kedua untuk SMA IPA dan IPS memperlihatkan pola yang sama.

b. Hubungan Perubahan Peringkat Akreditasi dengan Perkembangan Rerata Nilai UN SMA (Z-Skor)

Ketika diolah dengan menggunakan Z-skor, semua data yang dibandingkan memiliki titik nol yang sama. Tabel 3 memperlihatkan hasil pengolahan lengkap untuk SMA IPA dan IPS yang peringkat akreditasi pertamanya A, B, dan C. Gambar 4 memperlihatkan, meskipun trennya tidak selalu sama, hasilnya tetap konsisten bahwa nilai UN SMA IPA yang berakreditasi A cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan yang berakreditasi B dan nilai yang berakreditasi B lebih tinggi dibandingkan dengan SMA yang berakreditasi C. Kondisi yang sama juga diperlihatkan dalam variasi lainnya, yaitu SMA IPA akreditasi pertamanya B dan C, sedangkan SMA IPS akreditasi pertamanya A, B, dan C.

Tabel 3 Perubahan Nilai UN Menurut Perubahan Peringkat Akreditasi SMA IPA dan IPS dalam Tahun 2014--2019 (Sumber: BAN S/M dan Pusmenjar, 2020 (setelah diolah))

Perubahan Akreditasi	Program Studi IPA						Program Studi IPS					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	0,24	0,23	0,26	0,28	0,38	0,43	0,26	0,26	0,29	0,29	0,36	0,44
A > A	0,17	0,31	0,33	0,39	0,52	0,61	0,16	0,32	0,38	0,46	0,55	0,68
A > B	-0,47	-0,28	-0,28	-0,43	-0,47	-0,42	-0,47	-0,28	-0,31	-0,46	-0,34	-0,33
A > C	-0,71	-0,79	-0,49	-0,60	-0,80	-0,89	-0,68	-0,72	-0,67	-0,64	-0,63	-0,55
B	-0,27	-0,33	-0,30	-0,31	-0,40	-0,43	-0,19	-0,24	-0,23	-0,25	-0,29	-0,36
B > A	-0,16	-0,11	-0,14	-0,24	-0,29	-0,24	-0,16	-0,10	-0,08	-0,20	-0,26	-0,24
B > B	-0,21	-0,15	-0,31	-0,44	-0,63	-0,57	-0,20	-0,14	-0,20	-0,31	-0,47	-0,49
B > C	-0,45	-0,38	-0,35	-0,59	-0,90	-0,87	-0,29	-0,31	-0,51	-0,67	-0,69	-0,67
C	-0,56	-0,62	-0,58	-0,44	-0,52	-0,69	-0,39	-0,44	-0,49	-0,36	-0,40	-0,53
C > A	-0,12	-0,23	-0,27	-0,16	-0,24	-0,44	-0,14	-0,26	-0,30	-0,08	-0,23	-0,28
C > B	-0,51	-0,39	-0,45	-0,50	-0,60	-0,71	-0,35	-0,37	-0,37	-0,35	-0,43	-0,54
C > C	-0,15	-0,28	-0,47	-0,51	-0,85	-0,99	-0,38	-0,46	-0,51	-0,45	-0,65	-0,72

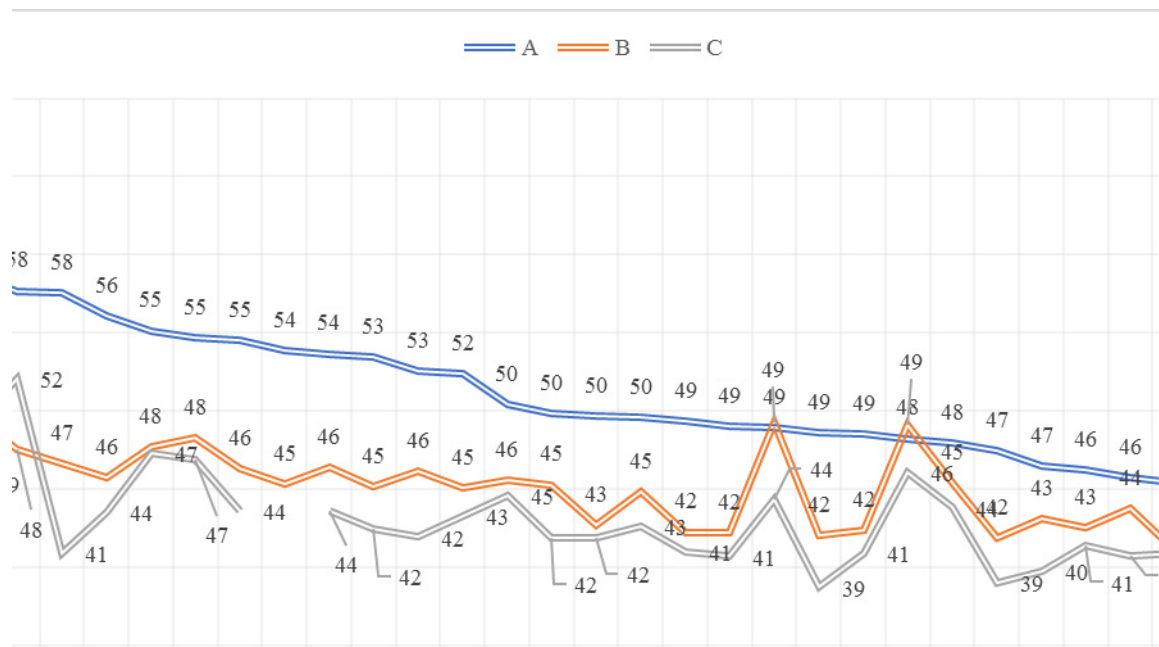


Gambar 4 Perkembangan Rerata Nilai UN (Z-skor) Menurut Perubahan Akreditasi SMA IPA dalam Tahun 2014--2019.(Sumber: BAN S/M dan Pusmenjar, 2020 (diolah))

Gambaran kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Asrijanty (2018) yang memperlihatkan adanya hubungan positif antara hasil akreditasi sekolah dan hasil UN. Meskipun demikian, indeks korelasi yang diperoleh tidak tinggi. Hal ini dapat dipahami karena sekolah hanya salah satu faktor yang memengaruhi prestasi siswa. Faktor lain, seperti pola pikir dan perilaku siswa, merupakan faktor penting lain yang memengaruhi prestasi siswa.

3. Nilai Akreditasi UN Antarprovinsi

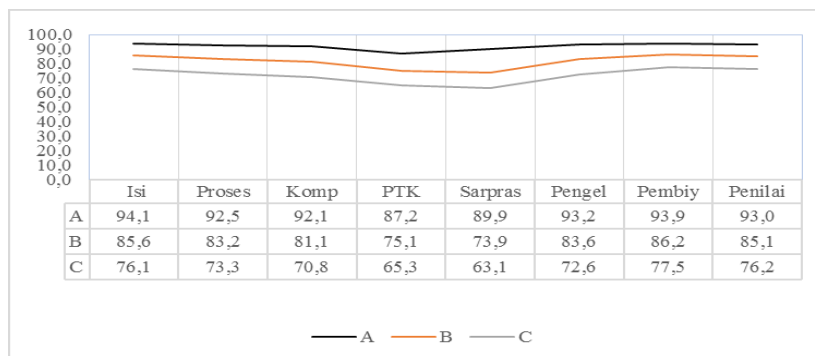
Gambar 5 memperlihatkan variasi nilai UN yang tinggi antarprovinsi dengan peringkat akreditasi sama. Pada kebanyakan provinsi nilai akhir SMA yang berakreditasi A lebih tinggi dibandingkan dengan yang berakreditasi B. Demikian pula dengan nilai akhir SMA yang berakreditasi B, lebih tinggi dibandingkan dengan yang berakreditasi C. Namun, - tampak ada kejanggalan bahwa nilai akhir SMA yang berakreditasi B melebihi A dan yang berakreditasi C melebihi yang berakreditasi B, terjadi masing-masing di satu provinsi yang berbeda. Pada tiga provinsi lain terjadi nilai akhirnya sama, tetapi ada yang berakreditasi A dan yang B dan ada pula yang berakreditasi B dan C. Diduga hal itu terjadi karena subjektivitas asesor. Hal itu juga menunjukkan bahwa salah satu prinsip akreditasi adalah objektivitas belum diterapkan sepenuhnya. Kondisi seperti itu didukung oleh temuan penelitian Khusnah (2013) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan, antara lain adanya manipulasi data atau sarana dan prasarana, dan kasus penyuapan asesor. Hal itu juga diperkuat oleh temuan mantan Ketua BAN-S/M Abdul Mu'ti bahwa titik terlemah dari SNP terletak pada standar sarpras. Kondisi standar sarpras tersebut mendorong sekolah melakukan "kecurangan" saat divisitasi, misalnya dengan jalan menyewa sarana dan prasarana (www.jppn.com, 2014). Dari sisi sekolah yang diakreditasi, Asmani dkk. (2012) menyatakan bahwa penyimpangan dapat terjadi bila sekolah menilai akreditasi sebagai tujuan, bukan upaya mendorong sekolah memenuhi standar minimal kualitas.



Gambar 5 Rerata Nilai Akhir SMA Berakreditasi A, B, dan C pada Tahun 2019 di Seluruh Provinsi di Indonesia (Sumber: BAN S/M, 2020 (setelah diolah))

4. Hubungan Akreditasi dan Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP)

PMP biasa juga disebut rapor mutu. Rapor mutu penting untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam pencapaian 8 SNP suatu sekolah (Nanang dan Rusman, 2019). Dalam menghubungkan akreditasi dengan rapor mutu, yang digunakan adalah nilai 8 SNP dari SMA yang berperingkat A, B, dan C serta akreditasi gabungan, dalam arti gabungan nilai 2 kali akreditasi. Untuk SMA yang baru diakreditasi satu kali digunakan nilai akreditasi itu saja (lihat Gambar 6).



*) Jika belum ada akreditasi kedua, digunakan nilai akreditasi pertama.

Gambar 6 Hubungan Rerata Nilai Akreditasi Gabungan*) dan Rapor Mutu (Sumber: BAN S/M dan Ditjen PAUD, Dikdasmen, Dikmas)

Gambar 6 memperlihatkan hubungan yang relatif konsisten, nilai 8 SNP yang berakreditasi A lebih tinggi dibandingkan yang berakreditasi B. Demikian pula halnya dengan yang berakreditasi B, nilai 8 SNP-nya lebih tinggi dibandingkan yang berakreditasi C. Sesuai dengan pernyataan Mu'ti bahwa titik terlemah di antara delapan SNP adalah standar sarpras. Gambar 6 memperlihatkan nilai standar sarpras SMA berakreditasi B dan C adalah yang terendah dibandingkan nilai SNP lain pada kelompoknya.

5. Hubungan UN dan Rapor Mutu

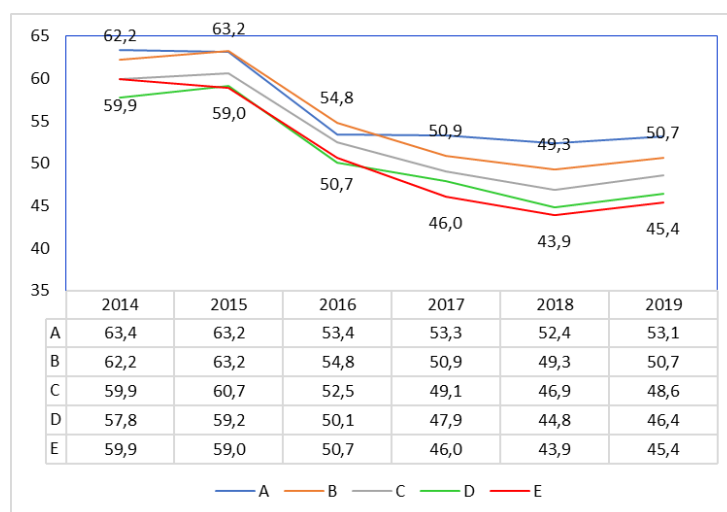
Dalam menganalisis data rapor mutu dibagi atas lima kategori, yaitu kelompok A--E dengan cara penghitungan seperti pada Tabel 4, rerata skor rapor mutu = 5,476 dan standar deviasi skor rapor mutu = 0,489

Tabel 4 Pengkategorian Rapor Mutu

1	E	Sangat Rendah	$\leq -1,5$ Standar Deviasi	$\leq 4,743$
2	D	Rendah	$\leq -0,5$ Standar Deviasi	4,743-5,232
3	C	Sedang	$\leq +0,5$ Standar Deviasi	5,232-5,721
4	B	Tinggi	$\leq +1,5$ Standar Deviasi	5,721-6,210
5	A	Sangat Tinggi	$> +1,5$ Standar Deviasi	$> 6,210$

Hubungan rapor mutu dan nilai UN dapat dikatakan tidak selalu konsisten. Dalam Gambar 7 tampak semakin tinggi rapor mutu akan semakin tinggi nilai UN, kecuali pada kategori C dan D tahun 2014, 2016, dan 2017 program studi IPA. Berbeda dengan kebanyakan yang lain bahwa nilai UN kategori C lebih tinggi dibandingkan kategori D pada 4 tahun tersebut, nilai UN kategori C lebih rendah dibandingkan kategori D. Rapor mutu kategori A sama

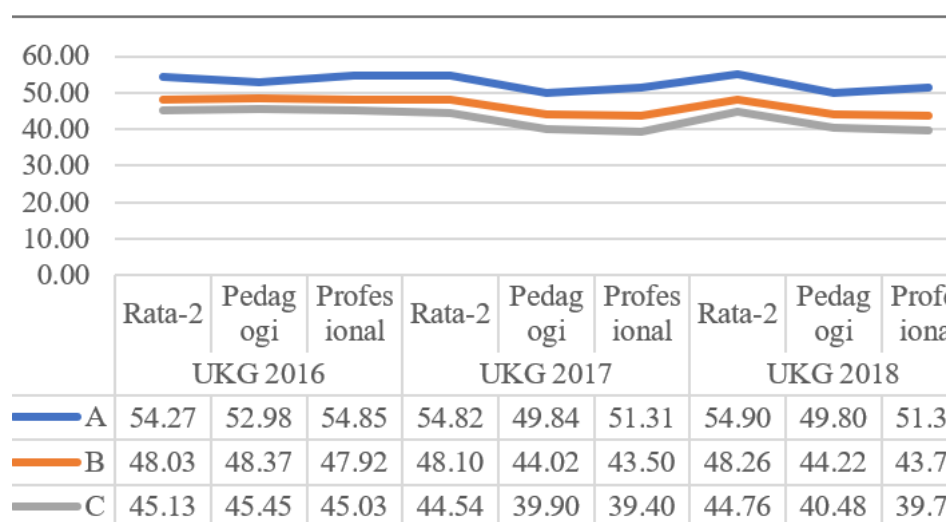
dengan yang berkategori B (tahun 2015) dan yang berkategori B lebih tinggi dibandingkan yang berkategori A (2016). Tahun 2014 nilai UN SMA dengan rapor mutu berkategori C sama dengan yang berkategori E. Ada kemungkinan hal itu dipengaruhi oleh moda UN meski bukan tahun pertama, tahun 2014 semakin banyak SMA yang menerapkan UNBK.



Gambar 7 Perkembangan Rerata Nilai UN SMA IPA dalam Tahun 2014--2019 Menurut Kategori Rapor Mutu (Sumber: Pusmenjar dan Ditjen PAUD, Dikdasmen, Dikmas)

6. Hubungan Akreditasi dan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)

Gambar 8 menunjukkan bahwa nilai rerata UKG tahun 2016--2018 SMA berakreditasi A lebih tinggi dibandingkan dengan SMA berakreditasi B. Demikian pula halnya dengan SMA yang berakreditasi B jika dibandingkan dengan yang berakreditasi C, nilai rerata, kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional UKG tahun 2016--2018 SMA berakreditasi B lebih tinggi dibandingkan SMA berakreditasi C. Kondisi itu memperlihatkan bahwa bahwa peringkat akreditasi mempunyai hubungan yang positif dengan dengan UKG.



Gambar 8 Hubungan Peringkat Akreditasi dengan Nilai Rerata UKG dalam Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Sumber: BAN S/M dan Ditjen. GTK, 2020 (setela diolah))

7. Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Tim telah memiliki dapodik tahun 2017--2019 dengan jumlah variabel 80 dan jumlah data (N) sebanyak 13.930. Setelah diproses, nilai N tahun 2017 dan 2018 sebanyak 13.398 dan tahun 2019 sebanyak 13.871. Statistik untuk validasi: minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Variabel dengan nilai (-) tidak bisa digunakan karena nilainya 0, variabel nomor 19, 432, 452, dan 510. Untuk data tahun 2017 dan 2018 dalam bentuk kategori sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Untuk tahun 2019 dalam bentuk skala ordinal 1-6 nilai variabel tidak dibedakan antara 0 dan *missing value*. Dalam perhitungan ini diber nilai 0. Selain itu, juga tampak sejumlah variabel yang nilainya sangat ekstrem.

Kondisi dapodik yang sedemikian rupa memang mungkin terjadi, hal itu didukung oleh beberapa hasil studi yang menyatakan bahwa operator menemui banyak kendala karena begitu rumit dan kompleksnya sistem pengisian dapodik (versi 2013) sehingga susah menyinkronisasi dan kurangnya pemahaman operator (Wahyuni, 2018).

Permasalahan lain terkait dengan dapodik (versi 2016) adalah kendala sarana pendukung implementasi, di antaranya masih banyak sekolah yang belum memiliki internet. Jika tidak memiliki internet, operator akan mencari modem. Jika koneksi internet pada modem tidak stabil dan bermasalah, operator sekolah akan kesulitan dalam meng-*input* data sekolah, padahal waktunya seringkali dibatasi. Kendala lainnya adalah kurangnya informasi terkait dengan dapodik. Sering terjadi informasi diperoleh dari -sekolah lain, -tidak secara resmi diumumkan oleh dinas pendidikan sehingga masih perlu dikonfirmasi.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi ini belum mencapai tujuannya secara maksimal karena belum menemukan variabel prediktor yang diharapkan meskipun sudah cukup banyak hasil eksplorasi yang diperoleh. Hasil eksplorasi tersebut, antara lain mencakup hal berikut. -

- a. Akreditasi kedua dimulai 2013, artinya 8 tahun setelah akreditasi dimulai, padahal idealnya adalah 5 tahun setelah akreditasi pertama.
- b. Tahun 2019 jumlah akumulasi SMA yang diakreditasi dua kali sebanyak 24 persen.
- c. Hubungan perubahan peringkat akreditasi dengan UN memperlihatkan gambaran yang konsisten. UN peringkat A lebih tinggi dari peringkat B, dan peringkat B lebih tinggi dari peringkat C.
- d. Peringkat akreditasi, menurut provinsi, memperlihatkan beberapa kejanggalan.
- e. Hubungan akreditasi dan PMP bahwa perangkat akreditasi memperlihatkan hubungan yang relatif konsisten dengan nilai 8 SNP yang berakreditasi A lebih tinggi dibandingkan yang berakreditasi B, dan yang berakreditasi B lebih tinggi dibandingkan yang berakreditasi C.
- f. Hubungan rapor mutu yang diklasifikasikan dalam lima kategori dengan nilai UN tidak selalu konsisten.
- g. Peringkat akreditasi mempunyai hubungan yang positif dengan dengan UKG.
- h. Pengolahand belum dapat dilakukan karena menghadapi beberapa permasalahan.

2. Saran

Saran berikut ini, terutama untuk dapodik, diperlukan sosialisasi, pemberian fasilitas, dan pemahaman terhadap operator sekolah dalam meng-input, menyinkronkan, meng-*update*, dan mengatasi berbagai permasalahan. Pemberian fasilitas berhubungan dengan sosialisasi, peningkatan pemahaman melalui pelatihan, ketersediaan petunjuk teknis penggunaan aplikasi dapodik untuk semua operator sekolah, pengadaan jaringan internet untuk sekolah yang berlokasi di daerah 3T atau mengembangkan aplikasi yang dioperasikan secara *offline*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, J.M., Lubis, N. 2012. Lubis, N. (ed.) *Tips lulus akreditasi sekolah/madrasah panduan manajemen mutu sekolah/madrasah berorientasi kompetitif*. Yogyakarta: Laksana
- Asrijanty. 2019. Hubungan akreditasi sekolah, hasil ujian nasional, dan indeks integritas ujian nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4 (1) 1-14.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2017. *Pedoman akreditasi: akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu*. Jakarta: BAN S/M.
- Hartini, N. 2014. Efektivitas pelaksanaan akreditasi sekolah menengah atas (studi tentang efektivitas pelaksanaan dan dampak akreditasi sekolah terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan SMA di Jawa Barat). Disertasi. Bandung: PPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Khusnah, L. 2013. Akreditasi sekolah antara harapan dan kenyataan. *Bioshell* 2 (1) 85-91
- Nanang, Rusman. April 2019. Analisis kebutuhan pelatihan standar penilaian berbasis data pemetaan mutu pendidikan (PMP) pada jenjang sekolah dasar (SD) di Kota Makassar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, UNY 12 (1) 24-37.
- Nisa, K. 2016. :Pengaruh manajemen sarana prasarana terhadap efektivitas dapodik di sekolah dasar Se-Kecamatan Sukasari, Bandung. Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Pusat Penelitian Kebijakan Dikbud. 2018. *Kajian akreditasi, pemenuhan standar nasional pendidikan, dan mutu satuan pendidikan*. Jakarta. Balitbang, Kemdikbud.-
- Sekolah curang saat visitasi akreditasi. www.jpnn.com/news/sekolah-curang-saat-visitasi-akreditasi. Diakses 3 November 2020.
- Sumarlan. 9 Maret 2020. Dongkrak kualitas pendidikan, mendesak dirumuskan indikator UKG. *Siedo*, hlm. 1 Siedoo: <https://siedoo.com/berita-29368-mendesak-dirumuskan-indikator-ukg-untuk-dongkrak-kualitas-pendidikan/> Diakses 8 November 2020,
- Wahyuni, E. Juli 2015. Pengaruh karakteristik pekerjaan dan pemberdayaan terhadap kinerja operator SD negeri di Jakarta Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6 (1) 997 – 1006.

KAJIAN KESIAPAN SEKOLAH ENGHADAPI ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM

Meni Handayani, Ikhya Ulummudin, Novrian Satria Perdana, Asma Aisha
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis persepsi guru dan siswa terhadap soal- AKM (kesesuaian soal dengan proses pembelajaran, tingkat kesulitan, dan keterbacaan); dan (2) menganalisis persepsi guru dan siswa tentang perubahan yang akan dilakukan pascakebijakan AKM. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif diawali dengan survei dan wawancara terhadap guru dan siswa di SMP, SMA, dan SMK dengan kategori *sekolah baik, sedang, dan kurang* berdasarkan nilai UN. Hasi survei menunjukkan lebih dari 50% guru menyatakan soal AKM tidak sesuai atau sebagian kecil sesuai dengan kompetensi dasar. Sebaliknya, lebih dari 50% siswa mengatakan sebagian besar atau seluruh soal AKM sesuai. Alasan guru yang mengatakan sesuai adalah “Pelajaran Matematika terintegrasi dalam soal numerasi, seperti persentase, peluang, dan kemampuan membaca diagram kartesius. Alasan guru yang mengatakan tidak sesuai adalah “Kebanyakan soal AKM adalah soal yang bersifat umum, tidak ada soal yang bermuatan soal kejuruan.” Mayoritas guru SMP mengatakan bahwa soal AKM sesuai dengan metode pembelajaran, tetapi mayoritas SMA dan SMK mengatakan sebaliknya. Hampir sama dengan siswa sekitar 50% mengatakan sesuai. Lebih dari 50% guru mengatakan soal AKM tidak sesuai atau sebagian kecil sesuai dengan penilaian guru. Sebaliknya, sekitar 50% siswa mengatakan sebagian besar atau seluruh soal AKM sesuai. Pada umumnya guru tidak menganggap soal AKM sulit. Namun, proporsi siswa yang mengaku tidak mengalami kesulitan dengan soal AKM lebih besar lagi. Sebagian besar guru mengaku akan menerapkan beberapa perubahan sebagai strategi menghadapi AKM, yaitu perubahan dalam hal alokasi waktu pembelajaran, metode mengajar, dan cara penilaian. Sebagian besar guru mengaku sekolah mereka siap menghadapi AKM. Meskipun demikian, cukup banyak pula guru, terutama pada jenjang SMA dan SMK (35%), yang mengaku bahwa sekolah mereka kurang, bahkan tidak siap dengan AKM.

Kata Kunci: kesiapan sekolah, asesmen kompetensi minimum

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Tahun 2021 Ujian Nasional (UN) direncanakan akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan survei karakter. Fungsi AKM dan survei karakter adalah untuk pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. AKM mengukur kompetensi bernalar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks, baik personal maupun profesional (pekerjaan), dengan kompetensi yang akan diukur adalah kompetensi bernalar tentang teks (literasi) dan angka (numerasi). Salah satu alasan perubahan tersebut karena kompetensi siswa Indonesia dalam keterampilan dasar literasi dan numerasi tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam 20 tahun terakhir. Hasil PISA Indonesia dari tahun 2015-- ~~ke tahun~~ 2018 mengalami penurunan, bahkan hingga 26 poin, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Perolehan skor PISA Indonesia dan perkembangannya

	MERGE SCORE IN PISA 2018			LONG-TERM : AVERAGE RATE OF CHANGE IN PERFORMANCE, PER THREE-YEAR-PERIOD			SHORT-TERM CHANGE IN PERFORMANCE (PISA 2015 TO PISA 2018)		
	READING	MATHEMATICS	SCIENCE	READING	MATHEMATICS	SCIENCE	READING	MATHEMATICS	SCIENCE
OECD Average	487	489	489	0	-1	-2	-3	2	-2
B-S-J-Z (China)	555	591	590	m	m	m	m	m	m
Singapore	549	569	551	6	1	3	14	5	-5
Macao (China)	525	558	544	6	6	8	16	14	15
Hong Kong (China)	524	551	517	2	0	-8	-2	3	-7
Chinese Taipei	503	531	516	1	-4	-2	6	-11	-17
Panama	377	353	365	1	-4	-2	6	-11	-17
Indonesia	371	379	396	1	2	3	-26	-7	-7
Morocco	359	368	377	m	m	m	m	m	m
Lebanon	353	393	384	m	m	m	7	-3	-3
Kosovo	353	366	365	m	m	m	6	4	-14
Dominican Republic	342	325	336	m	m	m	-16	-3	4
Philippines	340	353	357	m	m	m	m	m	m

Untuk meningkatkan kompetensi siswa di Indonesia, perlu dilakukan upaya khusus dalam meningkatkan kualitas siswa di level internasional. Salah satunya di antaranya melalui perubahan mekanisme asesmen siswa.

Reformasi sistem asesmen melalui perubahan UN menjadi AKM selaras dengan kebijakan merdeka belajar. Perubahan sistem asesmen ini terdiri atas tiga macam . Pertama, dari asesmen individu pada sistem asesmen. Asesmen individu dibedakan dari sistem asesmen. Ujian sekolah dikembangkan oleh guru atau sekolah sebagai asesmen individu, sedangkan Pemerintah mengembangkan sistem asesmen dalam bentuk asesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter. Kedua, dari asesmen terstandar yang bersifat *high-stakes* menjadi *low-stakes*. Hasil AKM bertujuan untuk mengetahui kualitas pembelajaran dan kinerja sistem secara umum, tidak menilai kinerja siswa secara individu. AKM bersifat *low-stakes* untuk siswa, tapi “mungkin” *high-stakes* untuk sekolah. Ketiga, fokus pada kompetensi dasar: literasi dan numerasi. AKM selaras dengan tujuan pembelajaran yang tidak berorientasi pada penguasaan materi pelajaran, tetapi pada kompetensi dan pemahaman konsep. AKM mengacu pada praktik pada level internasional, seperti PISA dan TIMMS.

Literasi *membaca* bertujuan untuk melihat kemampuan dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia sehingga dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi bertujuan untuk melihat kemampuan berpikir dengan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu, baik sebagai warga negara Indonesia maupun warga dunia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan kajian terkait dengan persiapan sekolah menghadapi asesmen kompetensi minimal. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kebijakan terkait dengan kesiapan sekolah dalam menghadapi asesmen kompetensi minimal.

2. Tujuan

Tujuan kajian ini adalah untuk (i) menganalisis praktik penerapan asesmen berskala nasional di berbagai negara; (ii) menganalisis persepsi guru dan siswa terhadap soal AKM (kesesuaian soal dengan proses pembelajaran, tingkat kesulitan, dan keterbacaan); dan (iii) menganalisis persepsi guru dan siswa tentang perubahan yang akan dilakukan pascakebijakan AKM.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner dan wawancara. Responden penelitian ini terdiri atas siswa dan guru. Jumlah responden siswa SMP sebanyak 1.118, SMA sebanyak 1.406, dan SMK sebanyak 635. Responden guru SMP sebanyak 221, SMA sebanyak 308, dan SMK sebanyak 244. Wawancara dilakukan di setiap daerah sampel dengan jumlah guru yang diwawancara sebanyak 16 guru dan 6 siswa tiap tingkat pada daerah sampel. Kriteria sampel sekolah dengan hasil nilai UN tahun 2019 mewakili kategori tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu, sampel sekolah juga yang mengikuti gladi bersih UNBK tahun 2020. Adapun lokasi sampel terdiri atas lima daerah, yakni Kota Jakarta Pusat, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Asesmen Berskala Nasional di Berbagai Negara

Beberapa negara yang akan dikaji dalam penelitian ini terkait dengan penerapan asesmen berskala nasional adalah Amerika Serikat, Australia, Inggris, Finlandia, dan Singapura.

a. Amerika Serikat

Asesmen berskala nasional yang diterapkan di Amerika Serikat adalah *National Assessment of Educational Progress (NAEP)*. Sifat asesmen tersebut adalah asesmen system, *low-stakes* untuk siswa dan *high-stakes* untuk sekolah. Subjek asesmen yang diujikan hampir semua mata pelajaran yang terdapat di sekolah. Dampak positif dari penggunaan asesmen tersebut, yakni menguatkan kapasitas guru dan sumber daya sekolah, bukan semata-mata akibat tekanan dari tes terstandar. Dampak negatifnya, yakni memicu penyempitan kurikulum, mendorong guru menekankan latihan soal, dan persiapan tes tertulis.

b. Australia

Asesmen berskala nasional yang diterapkan di negara Australia adalah *National Assessment Program for Literacy and Numeracy/NAPLAN*. Sifat asesmen tersebut adalah asesmen system, *low-stakes* untuk siswa dan *high-stakes* untuk sekolah. Subjek asesmen yang diujikan, yakni membaca, menulis, dan berhitung. Dampak positif dari penggunaan asesmen tersebut, yakni hasil penilaian menjadi referensi bagi siswa, orang tua, sekolah, dan sistem untuk memonitor hasil belajar siswa dan akuntabilitas sekolah. Dampak negatifnya, yakni *NAPLAN* mendorong pengurangan waktu dan nilai penting pelajaran yang dianggap tidak diuji. Selain itu, hasil asesmen internasional yang diikuti oleh Australia menurun. Hal ini dapat dilihat dari data PISA menunjukkan, baik literasi sains, matematika, maupun membaca di Australia mengalami penurunan.

c. Inggris

Asesmen berskala nasional yang diterapkan di negara Inggris adalah *National Curriculum Test (NCT)*. Asesmen ini terdiri atas empat *key stage*: *key stage* satu pada *year 1 dan year 2*, *key stage* dua pada *year 3 dan year 6*, *key stage* tiga ketika SMP, dan *key stage* empat ketika SMA. Sifat asesmen tersebut adalah sistem dan individu, *low-stakes* bagi siswa SD dan SMP dan *high-stakes* bagi siswa SMA, tidak menentukan kelulusan atau kenaikan kelas, dijadikan acuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Mata pelajaran yang diujikan pada *key stage 1 & 2*, Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris dan pada *key stage 3 & 4* pada semua mata pelajaran. Dampak positif pada asesmen ini, yakni memantau perkembangan siswa dalam perencanaan pendidikan tingkat berikutnya. Selain itu, siswa biasanya

tidak mengetahui ketika sedang dinilai karena penilaian tidak dilakukan khusus, tetapi melalui kegiatan kelas sehari-hari. Dampak negatifnya, yakni ada sekolah yang melakukan kecurangan agar nilainya tinggi.

d. Finlandia

Asesmen berskala nasional yang diterapkan di Negara Finlandia adalah *Sample based examination*. Sifat asesmen tersebut adalah asesmen system, *no stakes*, dilakukan dengan menguji sampel beberapa orang siswa, bertujuan untuk melihat motivasi siswa, kondisi kelas, dll. guna mengevaluasi efektivitas pengajaran guru. Subjek yang diujikan adalah seluruh mapel dengan menggunakan portofolio, yakni raport tahunan siswa dan kumpulan berbagai bukti hasil kerja siswa selama dua tahun terakhir. Dampak positifnya adalah penilaian komprehensif karena tidak berdasarkan pada skor nilai saja, tetapi mencakup komentar verbal dan skor angka skala 1 – 10. Selain itu, hasil penilaian guru dapat dibandingkan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

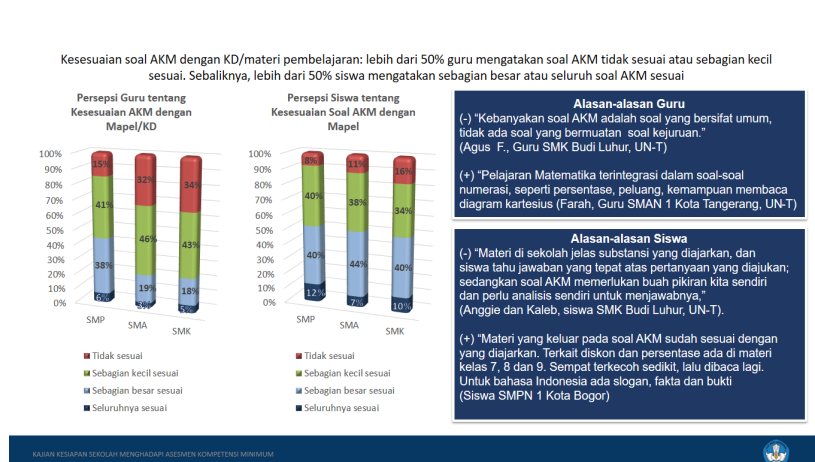
e. Singapura

Asesmen berskala nasional yang diterapkan di Negara Singapura adalah *Primary School Leaving Examination (PSLE)* dan *Singapore-Cambridge General Certificate of Education (GCE)*. Sifat asesmen tersebut adalah asesmen sistem dan individu, *high-stakes*, mengukur kelayakan siswa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Subjek asesmen yang diujikan adalah PSLE: Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Ibu, dan mata pelajaran sesuai dengan jurusan. Adapun GCE semua mata pelajaran. Dampak positifnya, yakni memotivasi belajar siswa, meningkatkan akuntabilitas sekolah dan semua siswa mengetahui hasil belajarnya dibandingkan siswa lain secara nasional. Dampak negatifnya, yakni mendorong kecenderungan mengajar dan belajar untuk mengikuti tes. Selain itu, memicu kondisi psikologis (*wellbeing*) yang kurang baik bagi siswa dan guru.

2. Persepsi Guru dan Siswa terhadap Soal AKM

Beberapa hal yang akan dijabarkan terkait dengan persepsi guru dan siswa terhadap soal AKM adalah kesesuaian soal AKM dengan materi pembelajaran, kesesuaian soal AKM dengan metode pembelajaran, kesesuaian soal AKM dengan soal penilaian harian, tingkat kesulitan soal AKM, tingkat keterbacaan soal AKM, kesesuaian soal AKM dengan konteks sosial budaya dan kondisi aktual.

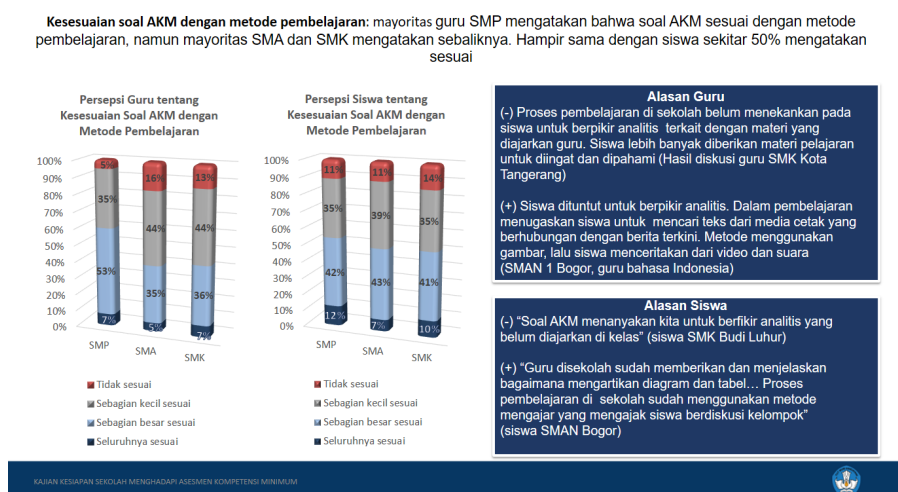
a. Kesesuaian Soal AKM dengan Materi Pembelajaran



Kesesuaian soal AKM dengan KD atau materi pembelajaran lebih dari 50% guru mengatakan soal AKM tidak sesuai atau sebagian kecil sesuai. Sebaliknya, lebih dari 50% siswa mengatakan sebagian besar atau seluruh soal AKM sesuai. Hal ini dapat ditunjukkan pada diagram berikut ini.

Alasan guru yang mengatakan tidak sesuai adalah guru menganggap kebanyakan soal AKM berupa soal yang bersifat umum, tidak ada soal yang bermuatan soal mata pelajaran atau kejuruan (Guru SMK Budi Luhur, UN-T). Adapun yang mengatakan sesuai seperti pelajaran Matematika yang terintegrasi dalam soal numerasi, seperti persentase, peluang, kemampuan membaca diagram kartesius (Guru SMAN 1 Kota Tangerang, UN-T). Alasan-siswa yang mengatakan tidak sesuai, yakni “Materi di sekolah jelas substansi yang diajarkan, dan siswa tahu jawaban yang tepat atas pertanyaan yang diajukan; sedangkan soal AKM memerlukan buah pikiran kita sendiri dan perlu analisis sendiri untuk menjawabnya,” (Anggie dan Kaleb, siswa SMK Budi Luhur, UN-T). Adapun alasan yang mengatakan sesuai bahwa materi yang keluar pada soal AKM sudah sesuai dengan yang diajarkan. Hal yang terkait dengan diskon dan persentase ada dalam materi kelas 7, 8, dan 9. Untuk Bahasa Indonesia ada slogan, *fakta dan bukti* (Siswa SMPN 1 Kota Bogor).

b. Kesesuaian Soal AKM dengan Metode Pembelajaran



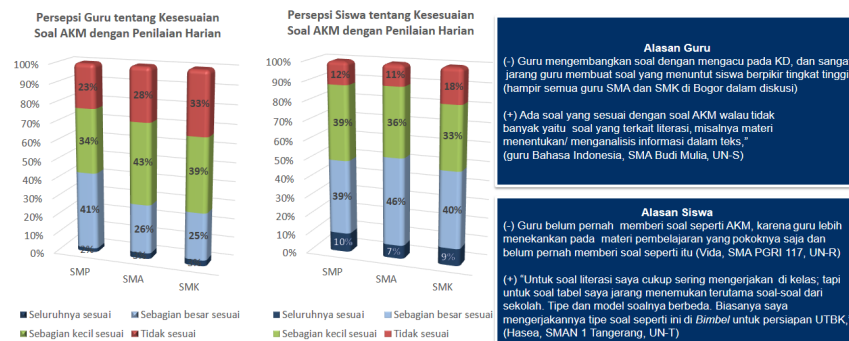
Mayoritas guru SMP mengatakan bahwa soal AKM sesuai dengan metode pembelajaran, tetapi mayoritas SMA dan SMK mengatakan sebaliknya. Hampir sama dengan siswa sekitar 50% mengatakan sesuai. Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut.

Alasan guru yang mengatakan soal AKM belum sesuai dengan metode pembelajaran karena guru menganggap proses pembelajaran di sekolah belum menekankan siswa untuk berpikir analitis terkait dengan materi yang diajarkan guru. Siswa lebih banyak diberi materi pelajaran untuk diingat dan dipahami (Hasil diskusi guru SMK Kota Tangerang). Adapun yang mengatakan sudah sesuai dengan alasan bahwa dalam pembelajaran siswa dituntut untuk berpikir analitis. Selain itu, guru menugaskan siswa untuk mencari teks dari media cetak yang berhubungan dengan terkini. Metodenya menggunakan gambar, lalu siswa diminta menceritakan isi suatu rekaman berita video (SMAN 1 Bogor, guru Bahasa Indonesia).

c. Kesesuaian Soal AKM dengan Soal Penilaian Harian

Lebih dari 50% guru mengatakan bahwa soal AKM tidak sesuai atau sebagian kecil sesuai. Sebaliknya, sekitar 50% siswa mengatakan sebagian besar atau seluruh soal AKM sesuai dengan soal penilaian harian. Hal ini dapat ditunjukkan pada diagram berikut.

Kesesuaian soal AKM dengan soal penilaian harian guru: lebih dari 50% guru mengatakan soal AKM tidak sesuai atau sebagian kecil sesuai. Sebaliknya, sekitar 50% siswa mengatakan sebagian besar atau seluruh soal AKM sesuai

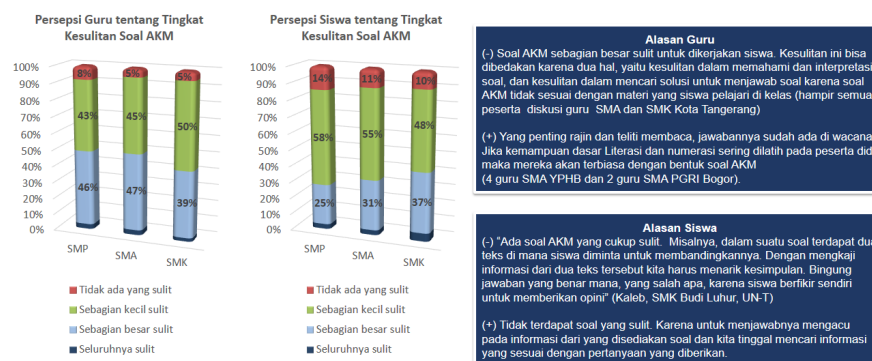


Alasan guru yang mengatakan bahwa soal AKM belum sesuai dengan penilaian harian karena guru mengembangkan soal dengan mengacu pada KD. Sangat jarang guru membuat soal yang menuntut siswa berpikir tingkat tinggi (hampir semua guru SMA dan SMK di Bogor dalam diskusi). Ada juga beberapa guru mengatakan ada soal yang sesuai dengan soal AKM walau tidak banyak, yaitu soal yang terkait dengan literasi, misalnya materi menentukan/menganalisis informasi dalam teks,” (guru Bahasa Indonesia, SMA Budi Mulia, UN-S). Alasan siswa yang mengatakan bahwa soal AKM belum sesuai dengan penilaian harian karena guru belum pernah memberikan soal seperti AKM. Guru lebih menekankan materi pembelajaran yang pokok saja, belum pernah memberikan soal seperti itu (SMA PGRI 117, UN-R). Adapun yang mengatakan sesuai dengan alasan bahwa “Untuk soal literasi saya cukup sering mengerjakan di kelas; tapi untuk soal tabel saya jarang menemukannya, terutama soal-soal dari sekolah. Tipe dan model soalnya berbeda. Biasanya saya mengerjakan tipe soal seperti ini di bimbingan untuk persiapan UTBK,” (SMAN 1 Tangerang, UN-T)

d. Tingkat Kesulitan Soal AKM

Pada umumnya guru tidak menganggap soal AKM sulit. Namun, proporsi siswa yang mengaku tidak mengalami kesulitan dengan soal AKM lebih besar lagi. Hal ini dapat ditunjukkan pada diagram berikut.

Tingkat kesulitan soal AKM: umumnya guru tidak menganggap soal-soal AKM sulit. Namun, proporsi siswa yang mengaku tidak mengalami kesulitan dengan soal-soal AKM lebih besar lagi

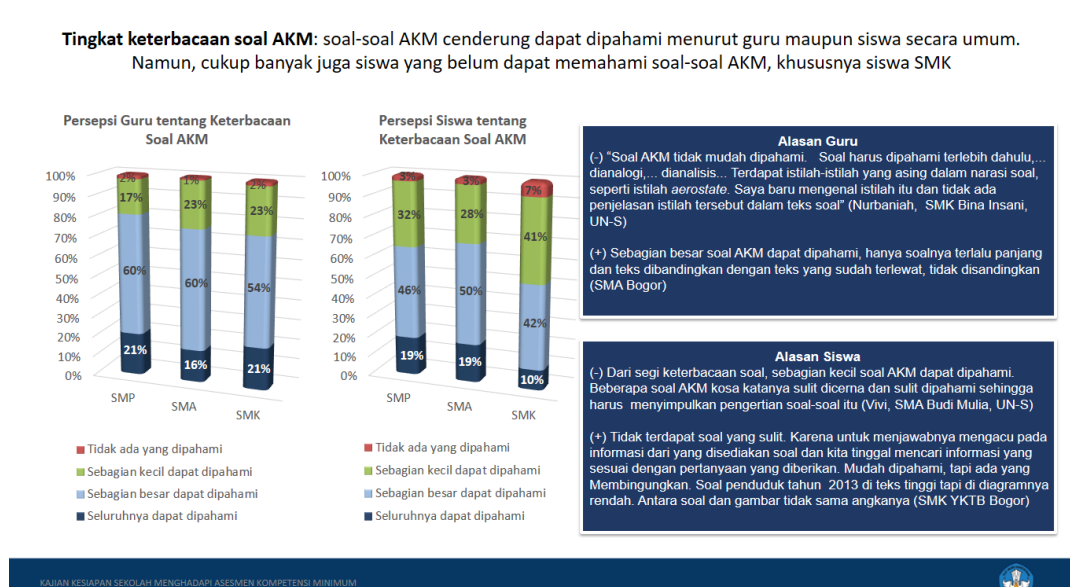


Alasan guru yang mengatakan bahwa soal AKM sebagian besar sulit untuk dikerjakan siswa ada dua hal, yaitu kesulitan dalam memahami dan menginterpretasi soal, dan kesulitan dalam mencari

solusi untuk menjawab soal karena soal AKM tidak sesuai dengan materi yang dipelajari siswa di kelas (hampir semua peserta diskusi guru SMA dan SMK Kota Tangerang). Guru yang mengatakan soal AKM mudah dengan alasan bahwa dalam mengerjakan soal yang penting rajin dan teliti membaca, jawabannya sudah ada di dalam wacana. Jika kemampuan dasar literasi dan numerasi sering dilatihkan pada peserta didik, mereka akan terbiasa dengan bentuk soal AKM (4 guru SMA YPHB dan 2 guru SMA PGRI Bogor). Adapun alasan siswa yang mengatakan sulit karena mereka harus dapat menyimpulkan “Ada soal AKM yang cukup sulit. Misalnya, dalam suatu soal terdapat dua teks di mana siswa diminta untuk membandingkannya. Dengan mengkaji informasi dari dua teks tersebut kita harus menarik kesimpulan. Bingung jawaban yang benar mana, yang salah apa, karena siswa berpikir sendiri untuk memberikan opini” (SMK Budi Luhur, UN-T). Adapun siswa yang menjawab mudah dengan alasan untuk cukup mengacu pada informasi yang disediakan dalam soal, tinggal mencari informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.

e. Tingkat Keterbacaan Soal AKM

Soal AKM cenderung dapat dipahami, baik menurut guru maupun siswa. Namun, cukup banyak juga siswa yang belum dapat memahami soal AKM, khususnya siswa SMK.



Alasan guru yang menganggap soal AKM tingkat keterbacaannya sulit dipahami karena memerlukan analisis. “Soal AKM tidak mudah dipahami. Soal harus dipahami terlebih dahulu, dianalogi, dan dianalisis. Terdapat istilah yang asing dalam narasi soal, seperti istilah *aerostate*. Saya baru mengenal istilah itu dan tidak ada penjelasan istilah tersebut dalam teks soal” (SMK Bina Insani, UN-S). Beberapa guru yang mengatakan soalnya mudah dipahami, hanya saja terasa panjang – dan teks dibandingkan dengan teks yang sudah terlewat, mestinya disandingkan (SMA di Bogor). Adapun alasan siswa yang mengatakan sulit keterbacaannya, - “Dari segi keterbacaan soal, sebagian kecil soal AKM dapat dipahami. Beberapa soal AKM kosa katanya sulit dicerna dan sulit dipahami sehingga harus menyimpulkan pengertian soal-soal itu” (SMA Budi Mulia, UN-S). Siswa yang mengatakan soalnya mudah dipahami karena jawaban nya mengacu pada informasi dari yang disediakan soal dan kita tinggal mencari informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Mudah dipahami, tapi ada yang membingungkan. Soal penduduk tahun 2013 di teks tinggi tapi di diagramnya rendah. Antara soal dan gambar tidak sama angkanya (SMK YKTB Bogor).

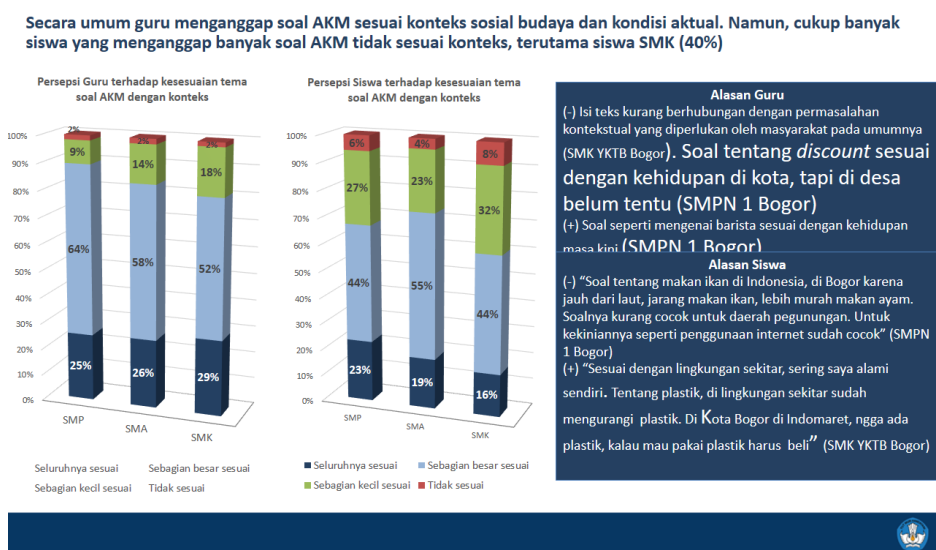
f. Hasil AKM Gladi Bersih Tingkat SMP dan SMA

Perbandingan yang kontras antara persepsi siswa bahwa soal AKM mudah dan rata-rata skor AKM yang rendah menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya memahami soal-soal yang mereka kerjakan. Berikut ini hasil AKM berdasarkan Gladi Bersih tahun 2020.

Rata-rata skor AKM siswa SMA sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan SMP. Hal ini juga berkebalikan dengan persepsi di mana proporsi siswa SMP yang menganggap mudah soal AKM lebih besar daripada siswa SMA.

g. Kesesuaian Soal AKM dengan Konteks Sosial Budaya dan Kondisi Aktual

Secara umum guru menganggap soal AKM sesuai dengan konteks sosial budaya dan kondisi aktual. Namun, cukup banyak siswa, terutama siswa SMK (40%), menganggap bahwa soal AKM tidak sesuai dengan konteks.



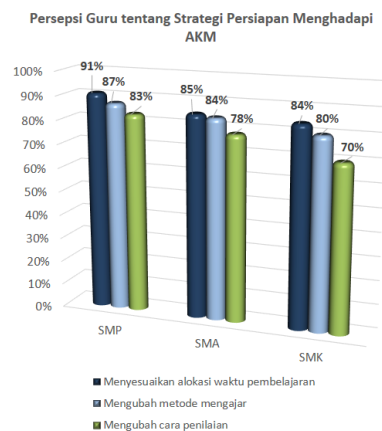
Alasan guru yang mengatakan soal AKM belum sesuai dengan konteks sosial budaya dan kondisi actual karena "Isi teks kurang berhubungan dengan permasalahan kontekstual yang diperlukan oleh masyarakat pada umumnya" (SMK YKTB Bogor). Soal tentang *discount* sesuai dengan kehidupan di kota, tetapi di desa belum tentu (SMPN 1 Bogor). Adapun yang mengatakan sesuai karena "Soal sesuai dengan kehidupan masa kini, misalkan mengenai barisan (SMPN 1 Bogor). Adapun alasan siswa yang mengatakan tidak sesuai karena tidak mewakili daerahnya, "Soal tentang makan ikan di Indonesia, di Bogor karena jauh dari laut, jarang makan ikan, lebih murah makan ayam. Soalnya kurang cocok untuk daerah pegunungan. Untuk kekinian seperti penggunaan internet sudah cocok" (SMPN 1 Bogor). Siswa yang mengatakan sesuai karena sudah selaras dengan lingkungan, "Sesuai dengan lingkungan sekitar, sering saya alami sendiri. Tentang plastik, di lingkungan sekitar sudah mengurangi plastik. Di Kota Bogor di Indomaret, *ngga* ada plastik, kalau mau pakai plastik harus beli" (SMK YKTB Bogor).

3. Persepsi Guru dan Siswa tentang Persiapan Menghadapi AKM

Beberapa hal terkait dengan persepsi guru dan siswa tentang persiapan menghadapi AKM, yakni persiapan siswa, guru, dan sekolah dalam menghadapi asesmen AKM.

a. Persiapan Guru Menghadapi Asesmen AKM

Persiapan guru: sebagian besar guru mengaku akan menerapkan beberapa perubahan sebagai strategi menghadapi AKM, yaitu perubahan dalam hal alokasi waktu pembelajaran, metode mengajar dan cara penilaian



Beberapa pernyataan tentang rencana guru mengubah

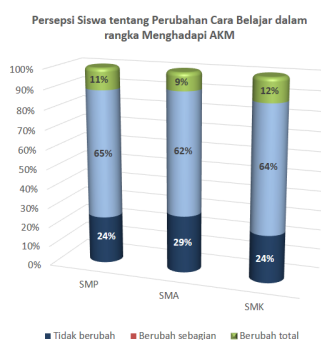
- Agar siswa dapat menuangkan pendapat atau mengutarakan ide, guru akan mengubah metode mengajarnya dengan diskusi.
- "Saya akan mengubah metode mengajar, yaitu menyesuaikan apa yang harus dipahami siswa dan apa yang harus dicapai dalam AKM," (Mutafiah, SMK Budi Luhur, UN-T)
- Berencana mengubah metode mengajar, yang mampu mendorong daya nalar siswa. Siswa dilatih memahami studi kasus sesuai materi ajar (Yanti dan Dewi, SMA Budi Mulia, UN-S)
- Mempersiapkan dengan matang sebelum pelaksanaan dengan memberikan soal-soal yang sesuai dengan AKM, mempelajari bentuk soal AKM, dan menyediakan modul untuk latihan soal AKM
- Memberikan materi sesuai kurikulum dengan mengajarkan cara berfikir analitis, kreatif dan terarah.
- Melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian harian disesuaikan dengan orientasi HOTS,
- Menyesuaikan mata pelajaran dengan tuntutan AKM, yaitu mengubah strategi dan metode mengajar, materi ajar, penugasan, dan penilaian agar dapat memenuhi kompetensi siswa untuk mengatasi soal-soal AKM

Sebagian besar guru mengaku akan menerapkan beberapa perubahan sebagai strategi menghadapi AKM, yaitu perubahan dalam hal alokasi waktu pembelajaran, metode mengajar dan cara penilaian. Hal ini dapat ditunjukkan melalui hasil kuesioner berikut ini.

Ada beberapa pernyataan tentang rencana guru -di antaranya agar siswa dapat menuangkan pendapat atau mengutarakan ide, guru akan mengubah metode mengajarnya dengan diskusi. "Saya akan mengubah metode mengajar, yaitu menyesuaikan apa yang harus dipahami siswa dan apa yang harus dicapai dalam AKM," (SMK Budi Luhur, UN-T). Guru berencana mengubah metode mengajar, yang mampu mendorong daya nalar siswa. Siswa dilatih memahami studi kasus sesuai dengan materi ajar (SMA Budi Mulia, UN-S). Selain itu, guru mempersiapkan dengan matang sebelum – memberikan soal yang sesuai dengan AKM, mempelajari bentuk soal AKM, menyediakan modul untuk latihan soal AKM, memberikan materi sesuai kurikulum dengan mengajarkan cara berfikir analitis, kreatif dan terarah, melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian harian disesuaikan dengan orientasi HOTS, serta menyesuaikan mata pelajaran dengan tuntutan AKM, yaitu mengubah strategi dan metode mengajar, materi ajar, penugasan, dan penilaian agar dapat memenuhi kompetensi siswa untuk mengatasi soal-soal AKM.

b. Persiapan Siswa Menghadapi Asesmen AKM

Persiapan siswa: sebagian besar siswa (lebih dari 70%) mengaku akan mengubah cara belajar mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi AKM



Bagaimana Siswa Berubah?

"... mengubah total, mengubah pola pikir saya untuk menggunakan nalar dan logika lagi... mengembangkan dengan teman-teman... lebih banyak membaca" (SMK YKTB Bogor)

"... Berubah total, banyak baca, membaca dan memahami dengan cepat" (SMA YPHB Bogor)

Mengapa Tidak Perlu Berubah?

"Tidak perlu berubah karena konsep dasar sudah paham tinggal menggunakan nalar dan logika (SMPN 1 Bogor)

"Tidak berubah, karena saya sudah nyaman dengan cara belajar saya saat ini" (SMAN 1 Bogor)

Sebagian besar siswa (sekitar 70%) mengaku akan mengubah cara belajar mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi AKM sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut.

Ada siswa yang mengubah total dan ada juga yang tidak berubah. “Mengubah total, mengubah pola pikir saya untuk menggunakan nalar dan logika lagi, mengembangkan dengan teman-teman, lebih banyak membaca” (SMK YKTB Bogor). “Berubah total, banyak baca, membaca dan memahami dengan cepat” (SMA YPHB Bogor). Siswa yang tidak berubah beralasan karena belajarnya selama ini sudah sesuai dengan AKM. “Tidak perlu berubah karena konsep dasar sudah paham tinggal menggunakan nalar dan logika (SMPN 1 Bogor). “Tidak berubah, karena saya sudah nyaman dengan cara belajar saya saat ini” (SMAN 1 Bogor).

c. Persiapan Sekolah Menghadapi Asesmen AKM

Sebagian besar guru mengaku sekolah mereka siap menghadapi AKM. Namun, cukup banyak pula guru mengaku bahwa sekolah mereka kurang, bahkan tidak siap dengan AKM, terutama pada jenjang SMA dan SMK (35%).



Guru mengatakan sekolah sudah siap dengan alasan sekolahnya sudah melaksanakan Kurikulum 2013 yang selaras dengan soal AKM. Lainnya mengatakan bahwa “Siap menghadapi AKM tahun 2021 dengan catatan mendapat bimbingan untuk mengatur strategi dan mengelola pembelajaran yang sesuai dengan AKM terutama dalam hal penilaian. Juga, berharap ada pelatihan guru untuk membuat soal AKM” (SMAN 1 Kota Tangerang, UN-T).

Adapun guru yang mengatakan sekolah belum siap karena “Ada siswa yang memiliki kemampuan berpikir sesuai dengan standar yang diharapkan, tetapi cukup banyak pula siswa yang kurang standar kepandaianya AKM tampaknya lebih cocok diperuntukkan bagi siswa yang mempunyai kemampuan kognitif tinggi, padahal di sekolah ini kecerdasan anak sangat variatif” (guru senior SMK Budi Luhur, UN-T). “Kurang siap, perlu pemahaman lebih pada setiap guru untuk membuat dan menyusun soal bentuk AKM dan melatih kepada peserta didik. Guru belum paham pengertian dan tujuan AKM. Kalau memang harus dijalankan guru perlu disosialisasikan tujuan dan proses AKM” (SMA YPHB Bogor).

D. Penutup

1. Kesimpulan

-Asesmen yang diterapkan di Australia (NAPLAN) dan Brazil (Prova dan Saeb) dalam beberapa hal relatif mirip dengan AKM. Keduanya memiliki, baik dampak positif, seperti meningkatkan motivasi guru dan akuntabilitas sekolah di satu sisi maupun dampak negative, seperti praktik penyempitan kurikulum. Penerapan asesmen kompetensi dasar (literasi dan numerasi) dalam sistem asesmen nasional di Australia dan Brazil tidak selaras dengan perbaikan performa PISA siswa di kedua negara.

Terdapat persepsi bahwa soal AKM hanya relevan dengan mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh pembelajaran dan penilaian yang menekankan keterampilan analitis berbasis HOTS yang menjadi kerangka AKM belum banyak diadopsi dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Terdapat persepsi yang cenderung berbeda antara guru dan siswa mengenai soal-soal AKM, termasuk dalam hal tingkat kesulitan soal. Guru cenderung melihat soal AKM sulit, sedangkan siswa cenderung memandang sebaliknya. Namun, dalam hal keterbacaan soal AKM, proporsi siswa yang belum memahami sebagian atau seluruh soal AKM cukup banyak (sekitar 30%). Hal ini menunjukkan banyak siswa yang menganggap mudah AKM meskipun pada dasarnya mereka tidak memahami soalnya. Beberapa kendala mencakup istilah baru, soal yang panjang dan kompleks, serta soal yang tidak relevan dengan konteks wilayah.

Secara umum para guru mengaku sekolah siap menghadapi AKM pada tahun 2021. Namun, cukup banyak pula yang mengaku belum siap, terutama pada jenjang SMA dan SMK (35%). Ada pula beberapa guru yang belum siap dengan alasan belum paham dengan tujuan AKM sehingga membutuhkan pelatihan membuat soal AKM. Baik guru maupun siswa telah merencanakan berbagai perubahan dalam pembelajaran untuk mempersiapkan diri menghadapi AKM. Perubahan tersebut menyangkut metode belajar mengajar, alokasi waktu, dan cara menilai.

2. Rekomendasi

Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya.

- a. Kemendikbud perlu mengantisipasi dampak penyempitan kurikulum karena, menurut sebagian guru, pembelajaran hanya akan difokuskan pada “mata pelajaran tertentu” yang diujikan dalam AKM dengan (i) mengintegrasikan konteks mata pelajaran lain (selain Bahasa Indonesia dan Matematika) dalam soal AKM dan (ii) memperkuat pemahaman literasi dan numerasi guru dan pengawas melalui pendampingan oleh LPMP.
- b. BSNP dan Pusmenjar dalam mengembangkan soal AKM hendaknya memperhatikan: (i) keterkaitan soal AKM dengan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran dalam Kurikulum 2013; (ii) level kognitif soal tingkat HOTS yang dikembangkan berdasarkan KD/materi mata pelajaran (yang terkait dengan literasi dan numerasi); (iii) keragaman jenis soal (*multiple answer*, esai, pilihan ganda, dll.) dengan bentuk soal tematik kontekstual; (iv) keterbacaan soal, seperti penggunaan kalimat/kosakata/istilah yang familiar di kalangan siswa, kejelasan tampilan gambar/tabel/diagram, dan kompleksitas wacana soal.
- c. Pusmenjar, Puskurbuk, dan Ditjen GTK hendak memberikan sosialisasi lebih intensif terkait dengan kebijakan AKM dan memberikan pelatihan kepada guru dalam melakukan pembelajaran dan penilaian yang selaras dengan tipe soal AKM.
- d. Kepala sekolah hendaknya mengoordinasikan guru mata pelajaran yang terkait dengan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi siswa untuk mengembangkan materi ajar terintegrasi dan

menyusun soal asesmen tematik kontekstual.

- e. Guru hendaknya melakukan inovasi pembelajaran (metode mengajar, cara penilaian, dan cara penugasan kepada siswa) yang selaras dengan bentuk penilaian AKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Syamsir. 2020. *Memahami Fungsi Penilaian*. Media Indonesia, 27 Januari 2020, 5.40 WIB.
- Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Addison Wesley Longman, Inc.
- Black, P. & Wiliam, D. (1998). *Inside the black box: Raising standards through classroom assessment*. Phi Delta Kappan.
- Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Krathwohl, D.R. (1956). *The taxonomy of educational objectives, the classification of education goal, Handbook 1: Cognitive domain*. Newyork: David McKey Company.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (2018). *Panduan penilaian untuk sekolah dasar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (2017). *Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Falchikov, N. (2005) *Improving Assessment through Student Involvement: Practical Solutions for Learning in Higher and Further Education*. Oxon: Routledge Falmer.
- Rakhmat, Jalaludin. (2004). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 51
- Juhanda, A. (2016). Analisis soal jenjang kognitif taksonomi bloom revisi pada buku sekolah elektronik biologi SMA. *Jurnal Pengajaran MIPA*, Volume 21, Nomor 1, April 2016, hlm. 61-66
- Kemendikbud, 2019. BASIS HUKUM. *Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Lusiana (2018). Analisis disposisi matematika berdasarkan higher order thinking taksonomi bloom. *Jurnal Phenomenon*, Tahun, Vol. 08 (No. 1), pp. 1-12.
- Mulyana, Dedy (2002). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 167-168.
- Netriwati (2018). Penerapan taksonomi bloom revisi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis". *Desimal: Jurnal Matematika*, 1 (3), 2018, 347-352.
- Puslitjakdikbud (2018). *Muatan HOTS pada pembelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.

NOTULA

Hari/Tanggal : Kamis/3 Desember 2020
 Jadwal Paparan : Sesi ke: - Panel No: 2 Ruang Kelompok 3
 Waktu : 09.00 WIB
 Judul Penelitian :
 1. Evaluasi Hasil Akreditasi Sekolah
 2. Kesiapan Sekolah menghadapi Asesmen Kompetensi Minimal
 3. Kinerja Guru dalam Mengimplementasikan Merdeka Belajar Pada Masa Kenormalan Baru
 Penyaji :
 1. Ir. Siswantari, M.Sc.
 2. Meni Handayani
 3. Dr. Sabar Budi Rahardjo, M.Pd.
 Pembahas : Yaya Kardiawarman, Ph.D.
 Moderator : Novrian Satria Perdana
 Notulis : Dodi Setiyawan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah <i>(Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)</i> :	1. Ir. Siswantari, M.Sc. - Akreditasi memiliki 5 manfaat yaitu (1)Sebagai acuan untuk meningkatkan mutu & rencana pengembangan sekolah; (2)Memberikan umpan balik dalam memberdayakan & mengembangkan kinerja sekolah; (3)Memotivasi sekolah agar terus meningkatkan mutu pendidikan; (4)Memberikan informasi bagi sekolah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak; (5)Mempertimbangkan kewenangan sekolah sebagai penyelenggara UN. - Permasalahan dalam penelitian ini adalah manfaat akreditasi sebagai acuan meningkatkan mutu, memberikan umpan balik dan memotivasi sekolah (manfaat ke 1, 2 dan 3) belum sepenuhnya dapat diwujudkan, salah satu indikasinya adalah menurunnya peringkat akreditasi pada akreditasi yang ke-2. - Pada tabel 1 Perkembangan Nilai UN SMA IPA & IPS Menurut Perubahan Peringkat Akreditasi 2014 s.d 2019, ditampilkan sekolah yang telah diakreditasi sebanyak 2 kali. Terdapat kondisi dimana sekolah dengan Akreditasi pertama A kemudian akreditasi kedua tetap atau berubah menjadi B, terjadi pada semua peringkat akreditasi. Kondisi tersebut dapat ditemui karena semua data lengkap terisi. Karena akreditasi dapat dikatakan sebagai indikator kinerja maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua sekolah bisa mempertahankan kinerjanya. - Pada manfaat ke-4, untuk memperoleh dukungan semakin berkurang penggunaannya, karena disinyalir hasil akreditasi tidak selalu mencerminkan kondisi sekolah yang sesungguhnya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan PUSLITJAK pada tahun 2018. Manfaat ke-5 sejak 2020 tidak berlaku lagi karena UN diganti dengan AKM.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		• Akibat belum sepenuhnya manfaat akreditasi dapat diwujudkan dan seiring perubahan pengelolaan sistem pendidikan oleh MENDIKBUD sebagai bagian dari penjaminan mutu, sistem Akreditasi memerlukan Reformasi yang diawali dengan EVALUASI. • Evaluasi sistem akreditasi lebih ditekankan pada Instrumen akreditasinya yang harus lebih mampu mengungkap indikator-indikator potensi sebuah sekolah dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang baik. Kemudian sistem akreditasi juga harus sejalan dengan era otomasi agar akreditasi selanjutnya hanya tinggal menggunakan variabel-variabel prediktor yang mempengaruhi skor akreditasi. Untuk sekolah-sekolah yang akreditasi sebelumnya berperingkat A & B, nantinya cukup dimonitor menggunakan variabel-variabel prediktor tersebut. • Tujuan Evaluasi yaitu menemukan variabel-variabel prediktor untuk memprediksi bahwa suatu sekolah tetap memiliki kinerja yang baik dengan menilai variabel-variabel prediktor tersebut sebagai instrumennya. • Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data, terutama Dapodik, setelah mendapatkannya pun ternyata masih memperlihatkan beberapa kekurangan & kelemahan yang menyulitkan pengolahan lebih lanjut. • Tinjauan pustaka yang utama adalah dari hasil Penelitian Asrijanty tahun 2018, terhadap 14.248 SMP yang diakreditasi oleh BAN-SM pada 2010 s.d 2014 & menggunakan data UN 2014/2015 memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara hasil akreditasi sekolah & hasil UN, meski indeks korelasi yang diperoleh tidak tinggi. • Tingkat pendidikan yang dianalisis adalah jenjang SMA dengan metode eksplorasi, menghubungkan & menganalisis variabel-variabel yang diperkirakan bisa menjadi prediktor & data sekunder yang tersedia. • Data yang digunakan dalam penelitian ini : - Data hasil akreditasi (Data 8 SNP & nilai akhir; 2005 s.d 2019) - Dapodik dari Pusdatin (Data individual SMA; 2017 s.d 2019) - Data UN (UNKP & UNBK) (SMA; 2005 s.d 2019) - Data Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP/Rapor mutu) (SMA; 2016 s.d 2018) - Data Uji Kompetensi Guru (UKG) dari Ditjen Guru & Tenaga Kependidikan (SMA; 2016 s.d 2018) - Dapodik dari Set. Ditjen PAUD, Dikdasmen Dikmas (masih dalam proses) • Hubungan Perubahan Peringkat Akreditasi dengan Perkembangan Rerata Nilai UN SMA terdapat konsistensi (sebelum diolah dengan Z score): - SMA yang di akreditasi pertama berperingkat A kemudian di akreditasi kedua bernilai A nilai UNnya cenderung meningkat meskipun sedikit. - Terlihat konsisten untuk SMA yang akreditasi kedua nya berperingkat B, nilai UNnya juga lebih rendah dibandingkan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		dengan SMA yang berakreditasi A. - Untuk SMA yang akreditasi keduanya bernilai C, nilai UNnya juga lebih rendah dibandingkan yang berakreditasi B. • Hubungan Peringkat Akreditasi dengan Nilai UN - Meskipun trendnya tidak selalu sama, namun tetap konsisten bahwa nilai UN SMA IPA yang berakreditasi A cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan yang berakreditasi B; nilai yang berakreditasi B lebih tinggi dibandingkan yang berakreditasi C. - Kondisi itu sejalan dengan hasil penelitian Asrijanty (2018) yang memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara hasil akreditasi sekolah & hasil UN. • Pada hubungan Nilai Akreditasi & UN antar Provinsi ditemukan bahwa : - Terdapat variasi nilai UN yang tinggi antar provinsi dengan peringkat akreditasi sama. - Di kebanyakan provinsi nilai UN SMA yang berakreditasi A lebih tinggi dibandingkan yang berakreditasi B. Demikian pula dengan UN SMA yang berakreditasi B, lebih tinggi dibandingkan dengan yang berakreditasi C. - Tampak ada kejanggalan dimana nilai UN SMA yang berakreditasi B melebihi A & yang berakreditasi C melebihi yang berakreditasi B, terjadi masing-masing disatu provinsi yang berbeda. - Di tiga provinsi lain terjadi nilai UN sama, namun ada yang berakreditasi A, B & C. Diduga hal itu terjadi karena adanya subjektivitas asesor. - Hal itu juga menunjukkan bahwa salah satu prinsip akreditasi yaitu objektivitas belum sepenuhnya diterapkan, sesuai penelitian Khusnah yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. • Hubungan Akreditasi gabungan (1&2) & Pemetaan - Rapor mutu penting untuk mengetahui kelemahan & kekuatan dalam pencapaian 8 SNP suatu sekolah. - Dalam menghubungkan akreditasi dengan rapor mutu, yang digunakan adalah nilai 8 SNP dari SMA yang berperingkat A, B, & C serta akreditasi gabungan (nilai 2 kali akreditasi). - Untuk SMA yang baru diakreditasi satu kali, digunakan nilai akreditasi itu saja. - Nilai 8 SNP yang berakreditasi A lebih tinggi dibandingkan yang berakreditasi B. Demikian pula halnya dengan yang berakreditasi B, nilai 8 SNPnya lebih tinggi dibandingkan yang berakreditasi C (hubungan relatif konsisten). • Hubungan UN & Rapor Mutu pada table 4, yaitu: - Hubungan rapor mutu & nilai UN tidak selalu konsisten. - Semakin tinggi rapor mutu akan semakin tinggi nilai UN, kecuali pada kategori C & D 2014, 2016 & 2017. - Berbeda dengan kebanyakan yang lain, dimana nilai UN kategori C lebih tinggi dibandingkan kategori D, di 2014, 2016 & 2017, nilai UN kategori C lebih rendah dibandingkan kategori D. - Ada titik dimana rapor mutu kategori A = kategori B (2015) &

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		yang berkategori B lebih tinggi dibandingkan yang berkategori A (2016). - Tahun 2014 nilai UN SMA dengan rapor mutu berkategori C = yang berkategori E. Ada kecurigaan kemungkinan hal itu dipengaruhi moda UN karena saat itu semakin banyak SMA yang menggunakan UNBK. • Hubungan Akreditasi dan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) - Nilai yang digunakan adalah nilai rerata UKG, kompetensi pedagogi, dan kompetensi profesional 2016 s.d 2018. Dimana SMA berakreditasi A lebih tinggi dibandingkan yang berakreditasi B. Yang berakreditasi B lebih tinggi dibandingkan yang berakreditasi C. - Kondisi itu memperlihatkan bahwa peringkat akreditasi mempunyai hubungan yang positif dengan dengan UKG. • Untuk Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), selain terdapat keterlambatan dalam mendapatkannya, ternyata terdapat banyak permasalahan, antara lain: - Dapodik yang dimiliki 2017 s.d 2019, dengan jumlah variabel 80 & jumlah data (N) 13.930. - Setelah diproses, nilai N 2017 & 2018 sebanyak 13.398 & tahun 2019 sebanyak 13.871. - Variabel dengan nilai (-) tidak bisa digunakan karena nilainya 0, ditemukan 4 variabel. - Data 2017 & 2018 dalam bentuk kategori sedang, rusak ringan & rusak berat. - Data 2019 dalam bentuk skala ordinal 1-6, nilai Variabel tidak dibedakan antara 0 & missing value, dalam perhitungan ini dinilai sebagai 0. - Sejumlah variabel nilainya sangat ekstrim. - Rumit & kompleksnya sistem pengisian Dapodik (versi 2013) sehingga sulit mensinkronisasi ditambah kurangnya pemahaman operator. - Dapodik (versi 2016) memiliki kendala sarana pendukung implementasi internet, masih banyak sekolah yang belum memiliki internet. - Kurangnya informasi resmi terkait Dapodik dari dinas terkait. • Simpulan - Hubungan perubahan peringkat akreditasi dengan UN memperlihatkan gambaran yang konsisten, termasuk setelah diolah dengan Zscore, UN peringkat A lebih tinggi dari peringkat B, & peringkat B lebih tinggi dari peringkat C - Peringkat akreditasi menurut provinsi memperlihatkan beberapa kejanggalan - Hubungan akreditasi & PMP, peringkat akreditasi memperlihatkan hubungan yang relatif konsisten dengan nilai 8 SNP dalam rapor mutu, yang berakreditasi A lebih tinggi dibandingkan yang berakreditasi B & yang berakreditasi B lebih tinggi dibandingkan yang berakreditasi C. - Hubungan rapor mutu yang diklasifikasikan menjadi 5 kategori dengan nilai UN tidak selalu konsisten.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		- Peringkat akreditasi mempunyai hubungan yang positif dengan UKG. - Pengolahan Dapodik masih dalam proses, karena menghadapi beberapa permasalahan. • Saran - UN dinilai potensial untuk dijadikan variabel prediktor akreditasi. Namun karena tahun 2021 UN digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM), maka dapat dikatakan juga bahwa AKM berpotensi menjadi variabel prediktor akreditasi. - PMP & UKG berpotensi menjadi variabel prediktor akreditasi. - Sosialisasi, pemberian fasilitasi & pemberian pemahaman terhadap operator sekolah dalam menginput, menyinkronkan, mengupdate & mengatasi berbagai permasalahan yang terkait DAPODIK sangat diperlukan. - Diantara pemberian fasilitasi: sosialisasi, peningkatan pemahaman melalui pelatihan, ketersediaan petunjuk teknis penggunaan aplikasi Dapodik untuk semua operator sekolah, juga diperlukan pengadaan jaringan internet untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah 3T atau mengembangkan aplikasi yang dioperasikan secara offline. 2. Meni Handayani ➤ Judul Penelitian yang dipaparkan yakni kajian kesiapan sekolah menghadapi asesmen kompetensi minimum. ➤ Latar belakang penelitian ini salah satunya karena hasil PISA mengalami penurunan, untuk itu ada perubahan UN menjadi AKM. ➤ Tujuan penelitian adalah 1) Menganalisis persepsi guru dan siswa terhadap soal-soal AKM (kesesuaian soal dengan proses pembelajaran, tingkat kesulitan, dan keterbacaan) dan 2) Menganalisis persepsi guru dan siswa tentang perubahan yang akan dilakukan pasca kebijakan AKM. ➤ Pendekatan penelitian kualitatif diawali dengan survey terhadap guru dan siswa di SMP, SMA dan SMK dengan kategori sekolah baik, sedang dan kurang berdasarkan nilai UN. Setelah itu dilakukan wawancara. ➤ Hasil survey menunjukkan lebih dari 50% guru mengatakan soal AKM tidak sesuai atau sebagian kecil sesuai. Dengan Kompetensi Dasar. Sebaliknya lebih dari 50% siswa mengatakan sebagian besar atau seluruh soal AKM sesuai. ➤ Alasan guru yang mengatakan sesuai adalah: "Pelajaran Matematika terintegrasi dalam soal-soal numerasi, seperti persentase, peluang, kemampuan membaca diagram kartesius. ➤ Alasan guru yang mengatakan tidak sesuai adalah: "Kebanyakan soal AKM adalah soal yang bersifat umum, tidak ada soal yang bermuatan soal kejuruan." Mayoritas guru SMP mengatakan bahwa soal AKM sesuai dengan metode pembelajaran, namun mayoritas SMA dan SMK mengatakan sebaliknya. ➤ Hampir sama dengan siswa sekitar 50% mengatakan sesuai. lebih dari 50% guru mengatakan soal AKM tidak sesuai atau sebagian kecil sesuai dengan penilaian guru. ➤ Sebaliknya, sekitar 50% siswa mengatakan sebagian besar atau

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		seluruh soal AKM sesuai. Umumnya guru tidak menganggap soal-soal AKM sulit. Namun, proporsi siswa yang mengaku tidak mengalami kesulitan dengan soal-soal AKM lebih besar lagi. ➤ Sebagian besar guru mengaku akan menerapkan beberapa perubahan sebagai strategi menghadapi AKM, yaitu perubahan dalam hal alokasi waktu pembelajaran, metode mengajar dan cara penilaian. ➤ Sebagian besar guru mengaku sekolah mereka siap menghadapi AKM. Namun demikian, cukup banyak pula guru yang mengaku sekolah mereka kurang dan bahkan tidak siap dengan AKM, terutama pada jenjang SMA dan SMK (35%). ➤ Berikut ini rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil dan simpulan kajian ini: ➤ Kemendikbud perlu mengantisipasi dampak penyempitan kurikulum oleh guru di mana pembelajaran hanya akan difokuskan pada “mata pelajaran tertentu” yang diujikan dalam AKM – dengan mengintegrasikan konteks mata pelajaran lain (selain bahasa Indonesia dan Matematika) dalam soal AKM dan memperkuat pemahaman literasi dan numerasi guru dan pengawas melalui pendampingan oleh LPMP. ➤ BSNP dan Pusmenjar dalam mengembangkan soal AKM hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: (i) Keterkaitan soal AKM dengan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran dalam Kurikulum 2013; (ii) Level kognitif soal tingkat HOTS yang dikembangkan berdasarkan KD/materi mata pelajaran (yang terkait literasi dan numerasi); (iii) Keragaman jenis soal (multiple answer, esai, pilihan ganda, dll) dengan bentuk soal tematik kontekstual; (iv) Keterbacaan soal, seperti: penggunaan kalimat/kosakata/istilah yang familiar di kalangan siswa, kejelasan tampilan gambar/tabel/diagram, dan kompleksitas wacana soal. ➤ Pusmenjar, Puskurbuk, dan Ditjen GTK memberikan sosialisasi lebih intensif terkait kebijakan AKM dan memberikan pelatihan kepada guru dalam melakukan pembelajaran dan penilaian yang selaras dengan tipe soal AKM. ➤ Kepala Sekolah mengkoordinasikan guru mata pelajaran yang terkait dengan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi siswa untuk mengembangkan materi ajar terintegrasi dan menyusun soal asesmen tematik kontekstual. ➤ Guru melakukan inovasi pembelajaran (metode mengajar, cara penilaian, dan cara penugasan kepada siswa) yang selaras dengan bentuk penilaian AKM. 3. Dr. Sabar Budi Rahardjo, M.Pd. Latar belakang kajian ini dalam rangka pencegahan covid-19 dilakukan pembelajaran dari rumah. Yang penting bagaimana kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Tujuan kajian ini, bagaimana kinerja guru dalam untuk kerja melaksanakan pembelajaran di masa kenormalan baru. Batasan penelitian ini, kinerja guru yang dinilai yaitu unjuk kerja yang

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		dilakukan guru dalam rangka pembelajaran dari rumah. Pendekatan kajian ini dengan metode kualitatif, yang melanjutkan kajian survei terkait dengan belajar dari rumah yang sebelumnya sudah disajikan dalam seminar ini. Yang didalami dalam kajian ini terkait dengan penyiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, metode pembelajaran, upaya yang dilakukan dalam masa pembiasaan baru, dan hambatan yang dihadapi guru dalam pembelajaran. Pembelajaran di SD juga dilakukan secara daring dan juga luring. Pada guru SD, yang paling banyak berperan dalam mendampingi siswa adalah orang tua. Guru berkomunikasi dengan orang tua dan menyampaikan materi yang dipelajari siswa melalui orang tua. Pada guru SMP, kinerja guru dalam penyiapan pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Upaya guru sudah terlihat dari berbagai materi yang disiapkan guna mengakomodir metode daring dan luring yang diterapkan. Pembiasaan baru juga dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan. Pada SMA, di daerah tertinggal seperti di Lebak mengalami kesulitan jaringan, sehingga siswa harus mencari jaringan sampai ke atas pohon. Awalnya guru mengharapkan bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Pada SMK, proses pembelajaran berjalan, namun dalam pelaksanaan praktek guru mengeluhkan terkendala. Pembelajaran lebih banyak dilakukan secara PJJ. Sehingga kinerja guru sangat dipengaruhi oleh motivasi dan kemampuan guru, utamanya dalam menyiapkan bahan ajar, sehingga dengan kecukupan fasilitas akan membantu maksimalnya pelaksanaan baik daring maupun luring. Sedangkan motivasi siswa dalam mengikuti belajar juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembelajaran, sehingga kondisi yang dihadapi siswa juga mempengaruhi metode pembelajaran yang dilakukan guru. Kesimpulannya, kinerja guru sudah berjalan baik namun masih ada perbaikan. Perlu ada praktik pembelajaran di SMK. Guru belum semuanya dapat memberikan pembelajaran yang bermuatan life skill. Rekomendasi dari kami, perlu di dorong guru dapat menghubungkan materi yang diajarkan dengan kondisi di sekitar lingkungan rumah siswa. Perlu ada sharing praktik baik antar guru pada setiap mapel.
2.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	Yaya Kardiawarman, Ph.D. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah akreditasi harus bergeser terkait 2 hal, yaitu instrument harus mampu mengukur kinerja dan otomatisasi. Apakah ada konsultasi juga dengan Ban S/M?? Penyaji (Ir. Siswantari, M.Sc) • Pada dasarnya penelitian ini adalah pesanan dari BAN S/M dan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		selalu dihadiri pihak BAN S/M pada setiap rapat/pertemuan pembahasan dengan tim. Biasanya diwakili oleh Pak Budi Susetyo yang juga sebagai penerus informasi ke tim pokja di BAN S/M. Pembahas (Yaya Kardiawarman P.hD) • Ban S/M pada dasarnya sudah dan sedang melaksanakan rekomendasi penelitian ini. Terdapat instrument IASP 2020 kemudian dashboard monitoring akreditasi yang sedang dikembangkan. • Pertama, hasil studi ini tidak sia-sia, karena rekomendasinya sudah/sedang dilaksanakan. Kedua, hasil penelitian sejalan dengan arah ke depan, namun memang hal ini masih harus di re-orientasi kembali. • Instrumen IASP 2020 yang fokus kedalam kinerja sekolah saat ini sudah memiliki KEPMEN, jadi tidak berbicara standar pembiayaan, standar sarpras lagi, tetapi lebih kepada dimensi/standar-standar yang berkaitan dengan kinerja sekolah • Dalam penelitian ini disebutkan bahwa terdapat pemilahan indikator-indikator mana saja yang baik untuk mengukur kinerja sekolah, apakah penelitian ini merujuk pada istilah “pohon indikator” yang di kembangkan oleh PUSMENJAR dan tim?? Penyaji (Ir. Siswantari, M.Sc) • Penelitian ini belum mengacu pada istilah “pohon indikator” yang dimaksud. Pembahas (Yaya Kardiawarman P.hD) • Berarti hasil penelitian ini tidak merujuk pada indikator- indikator utama yang dianggap akan berkontribusi kepada penilaian kinerja sekolah. Boleh sekiranya diinformasikan indikator mana yang digunakan dalam penelitian ini? Penyaji (Ir. Siswantari, M.Sc) Yang sudah kami analisis dalam penelitian ini antara lain hasil UN, UKG, kemudian Rapor Mutu Pembahas (Yaya Kardiawarman P.hD) • Berarti hasil penelitian ini merujuk pada dimensi yang besar bukan indikator. • Apabila pada sebuah penelitian, hasil dan rekomendasinya sudah ditindaklanjuti, secara akademik atau professional itu sudah bagus, berarti sudah diterima oleh yang bertanggung jawab melaksanakan rekomendasi tersebut. • Artikel-artikel /prosiding yang saya terima apakah sudah bisa diinformasikan kepada publik? Atau ke BAN S/M untuk penelitian ini

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Penyaji (Ir. Siswantari, M.Sc) Untuk Prosiding belum dapat dibagikan kepada publik karena masih banyak yang perlu diperbaiki dan dibahas lebih lanjut dengan tim. Untuk dibagikan kepada BAN S/M, Pak Budi dari BAN S/M dipastikan sudah mengetahui hal ini karena beliau juga ikut memberi masukan pada prosiding penelitian ini. Pembahas: Bertanya dulu atau mengklarifikasi dulu yah bu terkait dengan penelitian ini. AKM belum dilaksanakan secara nasional, bahkan desember masih ujicoba. Sementara ibu sudah menyajikan kesiapakan sekolah. Ini AKM yang mana yang ibu analisis ini. Setahu saya belum tuntas. Meni: Bulan februari – maret ada gladibersih UN, pusmenjar melakukan pengenalan soal-soal AKM pada sekolah. Diberikan kepada anak-anak yang akan melakukan UN. Kami ingin tahu bagaimana guru dan sekolah terkait dengan AKM. Mereka sangat Pembahas: Dulu ada aksi, kenapa tidak aksi. Berarti ini data hasil pengenalan. Apakah karakteristiknya sama? Meni: ya sama. Pembahas: ada kontradiksi guru dengan siswa. Ada bias, ketika ditanya mereka menjawab asbun. Atau mereka merasa benar. Mengapa mereka (siswa) mengatakan tidak sulit. Ada tidak kenapa kontra diksi terjadi. Meni: mengapa mereka jawab tidak sulit ternyata bukan pada materi isinya. Soal AKM bertanya tentang opini mereka. Contohnya tentang sampah, padahal ada teks tentang sampah. Ternyata mereka menjawab atas pendapat sendiri, bukan dari tulisan/teks. Kalau guru, mengetahui kemampuan anaknya, makanya menurutnya sulit. Pembahas: jawabannya persepsi. Ketika ditanya maka sesuai persepsi. Harus hati-hati dalam simpulan, jangan bilang anak-anak mudah, nanti rekomendasinya soalnya di persulit. Guru dinilai tidak? Pernyataan tidak sulit di kaitkan dengan yang lain, sehingga tidak menyebutkan bahwa soal sulit. Meni: ada wawancaranya yang mengkaitkan dengan hasil kuesioner, kalau guru tidak dinilai. Pembahas: tadinya saya ingin melihat bagaimana guru dan siswa untuk mencapai HOTs. Sehingga disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari akan nyambung. Kalau guru hamper guru mencapai C6 berarti sudah mendekati AKM. AKM namanya kompetensi hanya pengetahuan. Yang saya ketahui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apakah ibu menggali RPP? Sampai ke C-5. Sesuai atau tidak sesuai berdasarkan apa? Meni: pengakuan guru, misalnya: AKM sesuai dengan penilaian

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		sehari-sehari. Artinya masih belum siap. Pembahas: OK terimakasih. Saya melihat antara kinerja guru, dalam tayangan tabel Daerah 3T dan Non3T pada temuan di Guru, saya membayangkan Bapak menyampaikan bagaimana guru kemampuannya dalam menggunakan media sosial, karena di saran bapak menyampaikan untuk memberikan pelatihan. Sebetulnya yang bapak gali apakah kemampuan guru dalam menggunakan media itu atau pada apa nya. Karena pada saran bagian A, bapak sarankan perlu ada pelatihan guru, padahal di data yang disajikan pada penggunaan media yang dipakai guru. Tanggapan: Pada saat wawancara, ditemukan informasi bahwa guru yang muda tidak punya masalah dengan It, tetapi pada saat wawancara dengan guru yang lebih senior, mereka ada masalah menggunakan media tersebut. Namun saat ini melakukannya karena terpaksa, sehingga mereka mencoba untuk beradaptasi sambil berjalan. Sehingga kami rasa perlu memebrikan pelatihan kepada guru seperti itu, terutama dalam menggunakan media yang akan digunakan. Menurut saya rekomendasi yang bapak sampaikan tidak setara dengan temuan yang bapak sajikan, tidak ada pemetaan berapa guru yang sudah mahir dan yang maish gaptek, sehingga rekomendasi nomor 1 itu tidak terdukung dengan data. Sebenarnya bisa dilacak dari penggunaan modul-modul, apakah selama BDR hanya memberikan tugas, meminta merangkum, atau memberikan materi secara langsung. Tanggapan: Survei ini sebanrnya mendalami temuan yang dari hasil survei, terkait dengan temuan bahwa sebagian besar guru hanya memberikan tugas. Di temuan kami, ternyata memang ada kendala di penggunaan IT. Pada wawancara juga guru yang kurang terampil meminta untuk diberikan pelatihan penggunaan IT. Berarti sebaiknya bapak menyampaikan di slide atau di laporan sebuah tabel rangkuman kemampuan guru dalam menggunakan media IT, supaya nyambung dengan saran yang nomor 1. Itu yang akan mendukung rekomendasi tersebut.
3.	Diskusi/Tanya Jawab	: Peserta Yufriidawati • Pertanyaan: Apakah ada pemikiran/Opsi Lain untuk mengukur mutu sekolah sebagai pengganti proses akreditasi?

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
	<i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	• Jawaban penyaji: berdasarkan evaluasi kami, selain UN, yang tampaknya memiliki konsistensi dengan hasil akreditasi adalah UKG dan Rapor Mutu. Dapat dikatakan memiliki potensi namun hal ini perlu dikaji lebih lanjut Peserta Windawati • Pertanyaan: Hasil dari penelitian ibu mengambil dari data SMA negeri dan swasta atau SMA negeri saja? • Jawaban penyaji: kami menggunakan datanya yaitu data hasil akreditasi baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, demikian pula dengan UN-nya. Jadi data tersebut dipasang- pasangkan. Sekolah-sekolah yang masuk dalam analisis kami adalah sekolah yang memiliki data-data yang dapat dipasangkan. Sebagai contoh, sekolah A ada data nilai UN dan ada data hasil akreditasi. Peserta Bagyo Priyono • Pertanyaan: Fakta bahwa beberapa asesor dalam melaksanakan tugas akreditasi kurang obyektif (misalnya karena mendapatkan sesuatu), sudah lama diketahui. Mengapa dari tahun ke tahun masih saja terulang praktik seperti itu.? Bukankah hal tersebut menjadikan pendidikan kita semakin tertinggal jauh akibat salah "diagnose" dalam memotret mutu sebuah sekolah. • Jawaban penyaji: Harapannya dengan sistem yang sekarang, kondisi yang terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi. Dengan adanya otomatisasi, kecurangan-kecurangan tersebut diharapkan dapat dihilangkan. Sehingga kondisi objektif di lapangan bisa dicerminkan pada hasil akreditasi. Peserta Meni • Pertanyaan: Apakah ini khusus untuk SMA saja? • Jawaban penyaji: Pada dasarnya bukan hanya untuk SMA saja tetapi SD, SMP juga SMK. Namun karena keterbatasan data akhirnya sampai saat ini kita baru dapat mengerjakan yang SMA. Harapannya kita dapat menyarankan paling tidak langkah-langkah yang kami lakukan dapat dijadikan contoh untuk satuan pendidikan yang lain. Seperti sekarang ini DAPODIK terdapat banyak masalah, data yang kami terima ternyata sangat sulit sekali diolah. • Pertanyaan: untuk jenjang SMP pada tahun 2017, hasil penelitian 50% sekolah yang berakreditasi A memiliki nilai UN dibawah 60, jadi dapat dikatakan tidak berkorelasi. Namun kemungkinan setelah tahun 2017, sebagaimana telah terdapat perubahan pada instrumen akreditasi, jumlahnya berkurang, grade-nya pun menjadi lebih tinggi

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		sehingga sekolah-sekolah yang dinilai setelah tahun 2017 banyak mengalami penurunan hasil akreditasinya. Dalam hal ini dapat dikatakan lebih sesuai antara nilai akreditasi dengan nilai UN. Kemudian studi yang dilakukan pada jenjang SD oleh Bapak Sabar, antara penjaminan mutu dengan UN juga tidak sesuai. Karena pada saat itu responden atau jumlah SD yang sudah mengisi sebanyak 80%, sedang jenjang SMA tidak diolah. Pada jenjang SD tersebut, terdapat temuan SD dengan nilai SNPnya 1 namun akreditasinya A. Jadi mungkin terdapat hasil yang berbeda- beda antar jenjang. Apakah di SMA lebih banyak yang sesuai antara nilai Peta Mutu dengan UN? • Jawaban penyaji: Jadi memang terdapat kemungkinan perbedaan antar tingkat satuan pendidikan. Yang mungkin dapat diikuti adalah langkahnya, analisis lebih lanjut juga masih harus dilakukan seandainya reformasi sistem penjaminan mutu akan dijalankan sebagai langkah awal. • Diskusi: Tidak selarasnya hasil UN dengan hasil akreditasi dan hasil PMP dengan nilai UN itu yang membuat hasil reformasi itu ada. Jadi mudah-mudahan akreditasi kedepan tidak lagi seperti yang ditanyakan oleh Pak Bagyo sebelumnya, datanya lebih valid, tidak lagi bermacam data untuk bermacam penilaian, tetapi satu data untuk berbagai macam penilaian. • Jawaban penyaji: ya, terima kasih Bu Meni Lucas: Pertanyaan: 1) Sejauh mana dapat terukur program merdeka belajar dapat diimplementasikan kepada daerah diseluruh kota Kabupaten di Indonesia? Karena program ini terbentur dengan system otonomisasi dan kesiapan kota kabupaten dalam skema teknis. 2) ketika terjadi masalah di kota kabupaten di Indonesia tentang skema merdeka belajar. Bagaimana kebijakan hal tersebut? Kebijakan itu memikat. Meni: Pertanyaan besar tentang merdeka belajar, penelitian ini salah satu dari merdeka belajar yakni AKM. Untuk yang lainnya kami tidak dapat menjawabnya. Kalau diukur dapat melalui RPP selain AKM. Memang AKM kebutuhan akses internet dan computer, ini sedang di bahas. Kesiapan sekolah masih minim, itupun di sekolah besar. Apalagi di daerah terpencil. Kesiapan tersebut salah satunya menselaraskan proses pembelajaran dan penilaian. Yufriawati: Apakah secara substansi dan fungsi AKM dapat mengganti Ujian Nasional? Meni: AKM untuk mengevaluasi system sedangkan UN untuk siswa.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		AKM tidak kelulusan, tapi untuk pemetaan. AKM berkaitan dengan hasil PISA yang selalu menurun, sehingga perlu peningkatan literasi. Rencananya akan ada AKM kelas 12. Windawati: Kalau tidak salah tadi di hasil penelitian ibu mengenai kesesuaian materi AKM dengan KD menyatakan kalau lebih dari 50% guru menyatakan tidak sesuai dengan KD sedangkan lebih dari 50% siswa mengatakan sesuai. Menurut saya hasilnya tidak logis karena sebagian besar siswa mengetahui KD yang disajikan oleh guru dalam proses KKM? Meni: Guru itu ada guru olahraga, mesin, IPS. Mereka merasa materinya tidak ada di AKM. Kalau guru mapel Bahasa Indonesia sesuai. Yang mengatakan tidak sesuai karena KDnya tidak masuk. Kalau siswa diajarkan Bahasa Indonesia matematika dll, sehingga siswa lebih mengatakan sesuai. Moderator: Simpulan, Ternyata AKM dapat mempengaruhi pola pembelajaran guru dan siswa. Terimakasih kepada penyaji, pembahas, dan peserta. Lucas Wattimena Perlu diberikan paparan data, khususnya untuk daerah 3T. Tanggapan: untuk daerah 3T ini kami tidak memberikan data seluruh 3T, hanya dari 2 provinsi yang kami ambil, kami ambil dari 2 kab/kota yang mewakilinya. Yufridawati Perlu definisi operasional untuk kinerja guru. Tanggapan: Kinerjanya kami batasi unjuk kerja yang dilakukan guru dalam penyampaian materi pelajaran dan evaluasi yang dilakukan selama masa pembiasaan baru ini. Windawati Apa latar belakang bapak memilih Banten dan Gorontalo dibandingkan dengan provinsi lain. Apakah ada standar khusus sehingga Bapak memilih 2 provinsi ini? Apakah hasil penelitian dari 2 provinsi tersebut dapat mewakili seluruh provinsi di Indonesia? Tanggapan: Karena kajian ini merupakan tindak lanjut dari survei sebelumnya, dimana 2 provinsi itu adalah banyak responden yang berpartisipasi. Makanya kami memilih 2 provinsi itu. Namun memang tidak dalam rangka merepresentasikan kondisi keseluruhan di Indonesia, tetapi sudah dapat mewakili dua klasifikasi 3T dan Non-3T. Kami hanya mendalami informasi yang sudah ditemukan di

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		survei, terkait dengan media dan cara pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kinerja dalam merdeka belajar kami lihat apakah guru sudah bisa dengan mandiri menggunakan media dan memilih media yang paling tepat pada kelas yang diajarnya. Grace Wangge Apakah ada data mengenai dukungan orangtua kepada guru dalam melakukan pembelajaran dari rumah dan sejauh mana bagi guru hal itu memengaruhi kualitas kinerja mereka ? Terima kasih. Tanggapan: Orang tua memang mempengaruhi kkinerja guru, terutama adanya orang tua yang juga memberikan beban kepada anak untuk membantu orang tua, sedangkan anak harus belajar atau mengerjakan tugas. Sehingga diperlukan kerjasama antara guru dan orang tua supaya belajar anak di rumah bisa berjalan optimal.
4.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 11.25 WIB.

IV

Digitalisasi Pembelajaran

PEMBELAJARAN ONLINE MELALUI PLATFORM CLDS (CULTURAL LITERACY FOR DIGITAL SOCIETY)

Mochamad Aviandy, Kresno Brahmantyo, Wina Aprilia Tirtapraja, Hilman Handoni,
Genardi Atmadiredja
Universitas Indonesia

Abstrak. Pembelajaran berbasis daring di Indonesia masih terbatas. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memaksa para pemelajar dan pembelajar mengubah metode tatap mukanya menjadi daring (dalam jaringan). Salah satu *platform* pembelajaran daring yang umum digunakan di Indonesia adalah melalui kanal media sosial. Penelitian ini tidak menganalisis bagaimana pembelajaran daring telah berlangsung di Indonesia, tetapi menawarkan suatu *platform* metode pembelajaran daring bernama *Cultural Literacy for Digital Society*, yang bentuknya berupa modul pembelajaran daring dan *podcast* sebanyak dua *season*. Penelitian ini menghasilkan dua luaran: pembelajaran daring yang berkonsep audio+video+modul dan yang berkonsep audio atau *podcast* saja. Tujuan dari dua luaran yang berbeda ini agar *audience* lebih mudah memilih dan lebih fokus pada audio atau yang gabungan seluruhnya terkait dengan keterbatasan data jaringan di wilayah Indonesia.

Kata kunci: *podcast*, *CLDS*, *online learning*, pembelajaran daring

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Literasi, baik digital maupun tidak, merupakan permasalahan kompleks yang terjadi saat ini. Literasi antara negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, rupanya masih di bawah negara Skandinavia dan Baltik dalam ranah literasi daring. Negara Baltik dan Estonia merupakan negara tertinggi dalam ranah literasi daring, diikuti oleh Finlandia dan Denmark. Bahkan, ketiga negara tersebut mendapatkan predikat sebagai negara terbaik bagi pekerja yang memfokuskan diri pada ranah digital, sudah lebih tinggi daripada tingkatan literasi semata, tetapi masuk ranah *working society* (<https://www.tallinn.ee/eng/Uudis-Estonia-is-the-best-country-in-the-world-for-digital-life.-new-Internations-2019-report-says>, 2020). Salah satu faktor yang menyebabkan suatu masyarakat mendapatkan status berliterasi daring tinggi adalah sudah tersedia akses pembelajaran daring secara masif bagi pembelajarnya. Faktor lain adalah kemudahan akses internet dengan kecepatan tinggi, layanan pemerintah dengan daring, dan pilihan pembayaran *cashless* yang menggantikan uang kartal. Dari seluruh faktor tersebut, yang paling mungkin digerakan oleh lembaga pendidikan adalah penyediaan pembelajaran daring secara masif.

Kehidupan daring di Indonesia, terutama di kota-kota besar, seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan sepertinya sudah menjadi gaya hidup yang lumrah. Kegiatan ekonomi, seperti berbisnis dan berbelanja, sudah terlaksana. Kegiatan pelayanan pun sudah berjalan secara daring, baik pihak swasta maupun pihak pemerintah. Begitu pula dengan pembelajaran, sistem pembelajaran daring dari mulai yang gratis hingga berbayar tersedia secara masif di kota-kota besar di Indonesia. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika membahas daring dengan wilayah nonperkotaan. Artinya, tidak perlu

mencapai daerah dengan klasifikasi 3T, cukup di Pulau Jawa saja akses terhadap internet masih tidak merata. Daerah pedesaan, yang notabene dihuni oleh petani dan usaha perkebunan hingga daerah industri, seperti Karawang dan daerah pantura di Jawa Tengah – Timur, masih kesulitan mengakses secara daring. Saluran internet cepat dan stabil berpita lebar (*broadband*) sejauh ini hanya tersedia di kota-kota besar. Di sisi lain, akses dengan menggunakan *smartphone*, meskipun sudah sampai ke kota-kota terpencil, masih terbatas pada kekuatan jaringannya. Jaringan di kota-kota kecil dan pedesaan cenderung jauh lebih lambat dibandingkan dengan kota-kota besar. Pada umumnya jaringan 4G dan/atau pita lebarlah yang mampu mendukung pembelajaran daring secara sistemik dan masif. Namun, dengan jaringan 3G di pedesaan pun pembelajaran daring masih bisa dimaksimalkan dengan cara meminimalisasi penggunaan data. Dalam sistem kami, *cultural literacy for digital society*, penggunaan pembelajaran via *podcast* dapat dimanfaatkan bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan jaringan karena berfokus pada ranah *audio*. Serial *Humanities Explained* akan lebih maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat dengan akses jaringan 4G atau pita lebar.

Revolusi 4.0 tidak berarti membatasi diri pada ranah sains dan teknologi semata. Revolusi industri generasi keempat memiliki ciri pemanfaatan teknologi cerdas sebagai dasar pengembangan industri (*smartisation*) yang berkelindan dengan terjadinya integrasi antara manusia, barang, dan mesin untuk menghasilkan sesuatu barang/jasa yang bersifat digital dan cenderung personal. Pendidikan 4.0 merupakan sistem pendidikan yang memiliki peran dan harus mampu menghubungkan antara manusia, barang, dan mesin untuk menghasilkan inovasi pembelajaran baru yang bersifat digital dan masif (Lee, 2015). Dengan adanya revolusi pendidikan ini, sivitas akademika universitas harus mampu menyediakan model pembelajaran yang lebih terbuka, dinamis, saling terhubung lintas bidang, dan memberi ruang seluas-luasnya untuk terjadinya interaksi antardisiplin dan keilmuan (Laurillard, 2013). Interaksi yang akan dilakukan dalam hibah ini adalah interaksi antara masyarakat tani dengan ilmu humaniora serta inovasi digital.

Karena kekuatan manusia bersandar pada kemajuan berpikir untuk berinovasi, proses pencerdasan adalah proses memanusiakan manusia. Di dalamnya sendiri terdapat watak dasar manusia layaknya *eager to know* sehingga inovasinya juga untuk mendukung hal tersebut. Lewat sifat dasar inilah manusia dapat mengembangkan hidup dan memperjuangkan kehidupannya, termasuk dalam mengkreatifkan kearifan lokal. Upaya pencerahan dan edukasi inovatif bagi kemajuan berpikir manusia adalah sebuah proses melawan kebodohan dan pembodohan. Pencerahan mengajarkan cara berpikir yang kritis-kreatif dan bersifat advokasi agar mampu mendorong seseorang untuk mengembangkan pemikiran dan inovasi lokal serta bersinergi ditingkat global.

Advokasi dilakukan dalam usaha menjaga keseimbangan kehidupan yang didasari nilai-nilai kearifan lokal. Karena zaman semakin berkembang, pada satu sisi kita tidak mungkin akan menolak perkembangan dan kemajuan. Namun, di sisi lain juga tidak serta-merta meninggalkan kearifan lokal itu sendiri. Ada kearifan lokal yang arif dan ada yang kurang /tidak arif. Oleh karena itu, advokasi kearifan lokal dilakukan agar pemikiran/nilai dan produk kearifan lokal yang sejalan dengan pengembangan kebudayaan dan kemanusiaan tidak ditinggalkan dan dapat terpelihara keseimbangannya.

Kearifan lokal akan tercerahkan melalui spirit progresivitas dalam menyongsong masa depan dengan berbagai masalah sosialnya yang lebih condong pada segi-segi budaya materialistik. Pencerahan budaya seyogyanya diperjuangkan dengan cara advokasi filosofis menuju kearifan lokal yang humanistik. Kearifan lokal tanpa advokasi akan mengalami kebekuan dalam kreativitas. Oleh karena itu, dirasakan perlu melakukan pencerahan di segala bidang, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kearifan lokal.

Kemampuan untuk dapat berpikir kritis dan berlaku kreatif akan memberi petunjuk kepada manusia sebagai pelaku dari kearifan lokal tersebut untuk mampu selektif, memilah dan memilih secara rasional dan logis mana kearifan yang benar-benar bersifat arif. Di sinilah peran pentingnya watak kritis-kreatif

agar dapat memajukan kearifan lokal tanpa harus kehilangan substansi dan tetap mengedepankan kemanusiaan.

Solusi yang akan kami tawarkan adalah melakukan inovasi dalam ranah pertanian dengan mengaitkannya pada program *Cultural Literacy for Digital Society*, artinya mencoba memasyarakatkan konsep digital agar dapat dimanfaatkan oleh. Kami akan memberikan informasi bahwa saat ini konten adalah segalanya. Kemampuan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sudah merupakan suatu keunikan tersendiri apabila dikemas dalam konten yang baik dengan penulisan *storyline* yang menarik, serta pemaparan yang juga menarik. Edukasi akan menitikberatkan bagaimana suatu konten dapat dikemas, tetapi tidak berarti membohongi publik (memproduksi hoaks/info palsu asalkan menarik). Harapannya masyarakat dapat terliterasi dan dapat mandiri dalam memilah konten pembelajaran yang ada. Pada saat ini *spotify* sudah setara dengan *youtube* dan *instagram*. Hampir setiap kelas menengah kota besar menggunakan ketiga aplikasi ini. Kami akan mengedukasi bagaimana caranya menyusun konten *podcast* yang murni narasi suara, tetapi tetap dapat dimonetisasikan untuk pemberdayaan kemandirian mereka nantinya. Keterangan tentang metode lebih lanjut dapat mengacu pada bagian metode dari proposal pengabdian masyarakat kami ini.

2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi pada ekosistem masyarakat ini adalah terjadinya perbedaan konsep literasi dalam masyarakat kota yang saat ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan melalui Revolusi Pendidikan 4.0 Merdeka belajar di kota-kota besar seperti tidak bermasalah sebab akses jaringan memadai dan lancar. Akan tetapi, merdeka belajar dengan konsep literasi masyarakat desa masih tradisional. Literasi di desa masih berputar pada bagaimana mendidik masyarakat untuk menulis, berpikir kritis, dan mendalami teori kefilosofan Barat/Timur yang pada intinya masih dalam ranah teoretis. Di pihak lain masyarakat perkotaan pada umumnya tidak lagi pada ranah tersebut, tetapi sudah pada ranah bagaimana memanfaatkan ruang digital sebagai suatu yang bermanfaat, seperti pergerakan, komersialisasi, hingga revolusi pembelajaran. Di sisi lain, bagi masyarakat Indonesia, literasi saat ini yang paling dibutuhkan adalah literasi digital yang akhirnya akan berujung pada menginovasi produk/kegiatan masyarakat itu sendiri, baik di kota maupun di desa. Terjadinya perbedaan literasi, terutama literasi digital, pada masyarakat perkotaan dan perdesaan merupakan salah satu permasalahan utama bangsa Indonesia, dan generasi milenial, saat ini. Salah satu cara meminimalisasi perbedaan *gap* literasi digital antara kota dan desa adalah dengan menghadirkan sistem pembelajaran daring yang *user friendly* dan tentunya dibuat oleh anak bangsa sendiri.

3. Tujuan, Sasaran, dan Luaran

Perbedaan literasi yang terjadi antara perdesaan dan perkotaan akan dicoba dijembatani melalui suatu sistem program pendidikan daring yang bernama *cultural literacy for digital society*. Literasi akan tetap dilakukan bagi masyarakat desa, tetapi tidak lagi fokus pada literasi klasik/tradisional. Kami akan menggunakan literasi digital yang akan berujung pada inovasi digital. Beberapa solusi inovasi digital akan kami pecah sebagai berikut.

a. Seri Video/ Podcast/ Media Sosial

Masyarakat desa akan kami bina untuk membuat kanal daring berupa konten video dengan struktur naratif dan pengaturan gambar serta pengeditan yang menarik untuk diunggah dalam bentuk video penuh (YouTube) dan video singkat (instagram). Kuantifikasi dari dua unggahan ini adalah jumlah

pemirsa (*views*) serta berapa banyak *ads* (iklan) yang ditawarkan oleh *youtube* apabila video tersebut sudah masuk perhitungan untuk mendapatkan iklan, yang berakhir pada didaptkannya uang dan bisa dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat desa.

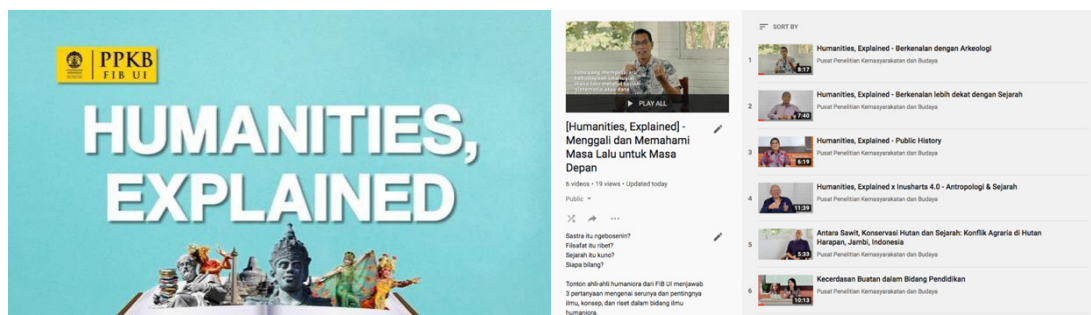
b. Gambaran Ipteks

Untuk mengeksplorasi potensi yang ditawarkan serta menjawab tantangan yang dimunculkan oleh Era Digital 4.0 ini, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya (PPKB), FIB UI, berinisiatif untuk menciptakan sebuah *platform* konten digital bertemakan ilmu-ilmu humaniora: *cultural literacy for digital society (CLDS)*

4. Ruang lingkup/batasan

Riset ini akan membatasi cakupannya terkait dengan sumber yang akan berakhir pada *output* seperti

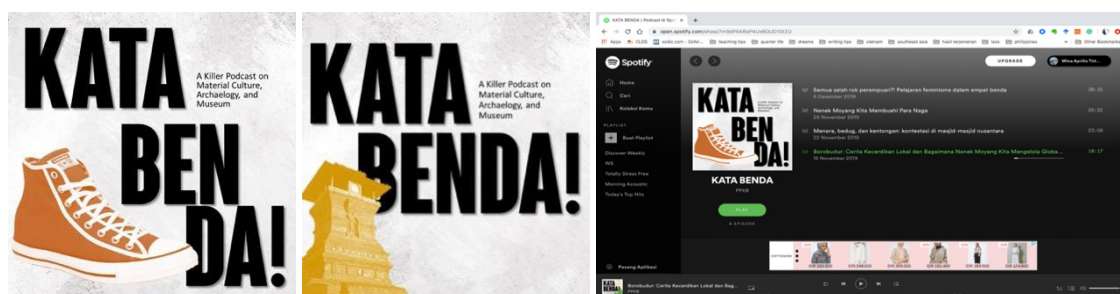
Seri Video Humanities, Explained



Humanities explained adalah seri video yang dibuat untuk memperkenalkan dan memopulerkan kembali ilmu humaniora yang kini dianggap kurang menarik jika dibandingkan dengan ilmu sains dan teknologi. Seri video ini menjelaskan secara sederhana ilmu/ konsep/ riset dalam ilmu humaniora yang masih sangat relevan dan krusial untuk masa sekarang.

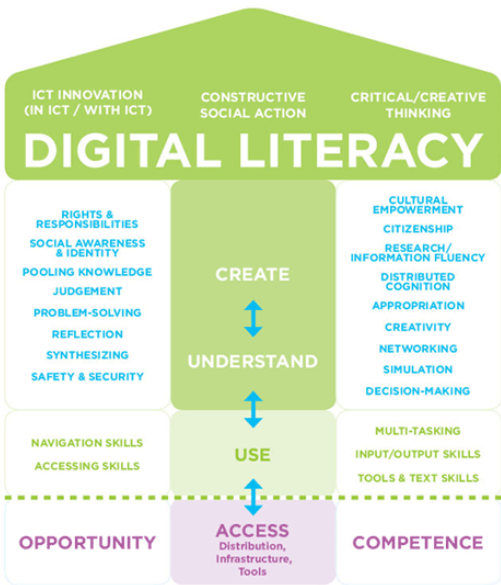
Untuk *season 1*, seri video ini membahas ilmu sejarah dan arkeologi dengan judul “Menggali dan Memahami Masa Lalu untuk Masa Depan”. Seri video ini dapat ditonton di youtube

Podcast Kata Benda!



Cerita beduk dan kentongan, Borobudur dan penjara orang buangan, mesin jahit dan panel-panel di museum perjuangan. Ikhtiar mengakrabkan (pengetahuan dan kearifan) masa lalu dengan tantangan masa kini. *Podcast* yang menjelajahi tema arkeologi, museum, dan kebudayaan materi dalam format perbincangan santai bersama para ahli dan akademisi. *Podcast* ini dapat didengarkan di *spotify*.

5. Metode Pelaksanaan Riset

P R O S E S	- Identifikasi pengetahuan dan/ atau potensi lokal masyarakat melalui eksplorasi lapangan serta pemetaan yang dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat dan Universitas Indonesia. - Tim Universitas Indonesia dan masyarakat bekerja dalam kelompok. - Sosialisasi definisi budaya dan kearifan lokal untuk membantu identifikasi. <i>(Cultural empowerment, citizenship, and research)</i> - Pembuatan konsep konten digital: mengemas pengetahuan dan/ atau potensi masyarakat menjadi konten digital. - Setelah secara kolaboratif memilih potensi lokal yang ingin diangkat, tiap kelompok menentukan konsep konten digital yang sesuai dan berkelanjutan. - Pemilihan media (audio/ grafis/ video/ tulisan) serta media publikasi (media sosial seperti <i>instagram/ youtube/ spotify/ blog</i>,) <i>(creativity, appropriation, decision making)</i> - Pembuatan konten digital - pelatihan digital dan praktik bersama menggunakan perangkat sederhana, tetapi tersedia seperti <i>smartphone</i>. - Pelatihan dan praktik bersama menggunakan aplikasi <i>editing</i>. <i>(Access and use of digital tools)</i> - Strategi Promosi dan Publikasi Konten - Membangun jaringan <i>(networking)</i> - Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Proses mengacu pada <i>Digital Literacy Model</i> dari Media Smarts, Pusat Literasi Digital dan Media di Kanada. (Media Smarts, 2017) https://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/general-information/digital-media-literacy-fundamentals/digital-literacy-fundamentals  The diagram illustrates the Digital Literacy Model as a house structure. The roof is labeled 'DIGITAL LITERACY'. The three pillars are: ICT INNOVATION (IN ICT / WITH ICT): Includes Rights & Responsibilities, Social Awareness & Identity, Pooling Knowledge, Judgement, Problem-solving, Reflection, Synthesizing, and Safety & Security. CONSTRUCTIVE SOCIAL ACTION: Includes the central stages of CREATE, UNDERSTAND, and USE, connected by double-headed arrows. CRITICAL/CREATIVE THINKING: Includes Cultural Empowerment, Citizenship, Research/Information Fluency, Distributed Cognition, Appropriation, Creativity, Networking, Simulation, and Decision-making. The base of the house is labeled 'ACCESS' (Distribution, Infrastructure, Tools), which leads to 'OPPORTUNITY' and 'COMPETENCE'.

Output	Kanal media sosial desa yang produktif dan diterima baik. » Produktif: menghasilkan <i>post</i> yang konsisten, misalnya menerbitkan 1 audio <i>podcast</i> setiap minggu, atau 1 video <i>youtube</i> setiap 2 minggu. » Menerbitkan modul: dalam riset ini <i>drakologi</i> dan <i>public history</i> » Diterima baik: target jumlah <i>view/ like/ subscribe</i>
Outcome	» Mahasiswa Universitas Indonesia dan masyarakat yang mampu mengidentifikasi dan mempublikasikan potensi kearifan lokal . » Masyarakat kota dan desa yang melek digital dan menjadi pembelajar seumur hidup (<i>life long learner</i>).

6. Tinjauan Pustaka

Salah satu riset yang memperlihatkan baiknya literasi digital di perkotaan dilakukan oleh Kurnianingsih, Rosini, dan Ismayati (2017). Riset mereka melihat bagaimana literasi informasi bagi tenaga kependidikan, pustakawan, dan guru di wilayah Jakarta Pusat diberlakukan. Menjadi catatan utama bahwa peserta didik di Jakarta, baik itu bimbel maupun siswa, sudah mendapatkan literasi digital yang tinggi. Permasalahan yang muncul pada literasi di kota Jakarta adalah bagaimana mengimbangi literasi siswa yang sudah tinggi sehingga kadang dimanfaatkan untuk kegiatan plagiarisme. Di sisi lain, literasi daring di desa, jika dibandingkan dengan Jakarta, terutama Jakarta Pusat, terlihat sekali ketimpangannya. Tidak perlu sampai pada tahapan plagiarisme, tetapi pada tahapan mengakses konten pembelajaran daring pun sudah tertinggal jauh.

Riset berikutnya yang membahas literasi di Indonesia adalah Kurnia dan Astuti (2017). Riset ini membahas peta gerakan literasi di Indonesia yang fokus kepada pelaku literasi daring, kegiatan literasi daring, hingga kelompok sasaran dari gerakan literasi tersebut. Hasil riset ini menemukan bahwa pada masyarakat Indonesia, kecenderungan yang muncul dari maraknya akses daring, baik di kota besar maupun kota kecil, justru membawa tendensi negatif. Penyebaran berita palsu (*hoax(es)*), konten pornografi, pendurungan secara daring (*cyberbullying*), hingga adiksi terhadap internet lebih banyak ditemukan pada masyarakat Indonesia dibandingkan dengan kegiatan literasi bertema positif, seperti pembelajaran daring. Konten pembelajaran daring, selain belum didorong oleh para peng edukator secara masif di Indonesia, juga belum mendapatkan tempat utama bagi pembelajar.

Momentum pembelajaran daring baru mendapatkan pangungnya pada saat pandemi COVID-19 semarak, khususnya sejak akhir Maret 2020 lalu di Indonesia. Namun, sebelum momentum itu agak sulit mencari pembelajaran daring yang sudah tepat di Indonesia. Sejauh ini pembelajaran daring di Indonesia hanya dikenal oleh Universitas Terbuka saja. Terdapat pula riset dari Setyaningsih *et al.* (2019) yang melakukan penelitian pembelajaran daring Pondok Pesantren Gontor. Temuan penting dari riset ini adalah dalam pelaksanaan pembelajaran daring, *skill* komunikasi, teknologi, dan kolaborasi amat menentukan jalannya proses pembelajaran. Penerapan *e-learning*, baik secara penuh maupun parsial, artinya kelas masih *blended* dengan menggabungkan elemen pembelajaran daring dan tatap muka, mengutamakan kemampuan dosen/pengajar dalam mengkomunikasikan materinya, baik melalui teknologi maupun langsung, dan kemampuan dosen/pengajar mengkolaborasikannya dengan para peserta pembelajaran daring tersebut. Riset Agarwal dan Khausik (2020), yang dilakukan pasca pandemi COVID-19 berlangsung, menyimpulkan bahwa kegagapan yang didapat, baik itu oleh pengajar maupun pembelajar, ternyata menghasilkan tantangan tersendiri, yaitu harus disediakannya sebuah sistem pembelajaran daring yang sederhana, murah, dan dapat diakses bagi seluruh pembelajarnya.

Saran tersebut dapat dilaksanakan dengan salah satu luaran penelitian ini, yaitu CLDS.

Riset terdahulu Santoso (2016), Isal dan Schrepp (2016) memperlihatkan bahwa pada ranah pendidikan tinggi, penggunaan pembelajaran daring, terutama yang melakukan interaksi dua belah pihak, tidak satu arah, memperlihatkan dampak yang signifikan bagi pesertanya. Penelitian terhadap kasus *platform Scele (Student Centered e-Learning Environment)* ternyata tidak saja berdampak positif terhadap mahasiswa, namun juga terhadap dosen dan para staf administrator fakultas. Perlu menjadi catatan penentuan platform daring akan menentukan efektivitas berjalannya suatu kelas/modul perkuliahan. Penggunaan *sceLe*, yang awalnya dipandang sebelah mata oleh para mahasiswa, staf, dan dosen, ternyata dapat memberikan dampak yang positif. Kunci perubahan ini terletak pada kemampuan dosen mengubah pembelajarannya menjadi menarik, dengan memusatkan pusat pembelajaran pada mahasiswa (*student centered active learning*).

Pembelajaran atau proses penyuluhan interaktif secara daring tidak terbatas pada ranah pendidikan tinggi saja. Riset Lawanto, Santoso, dan Yang Liu (2012) memperlihatkan bahwa pelajar tingkat 9-12, setara dengan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Indonesia, justru mengalami peningkatan signifikan dalam pembelajaran teknik, seperti fisika, ketika dipindahkan secara daring. Penelitian ini menemukan bahwa *intrinsic goal orientation* serta *task value* pemelajar akan meningkat ketika pembelajaran dipindahkan pada ranah daring dengan catatan diberi *goal orientations* yang menarik dan mampu memecah tingkat berpikir kritis pembelajarannya. Dapat pula diambil kesimpulan bahwa pembelajaran daring dengan menggunakan pembelajaran terpusat pada mahasiswa/pembelajar dan siswa akan memberikan dampak positif, baik pada ranah tingkat pendidikan tinggi maupun menengah.

Riset ini, yang akan dikerjakan dengan kelompok peserta yang beragam, dari mulai tingkat pendidikan rendah hingga tinggi akan bermanfaat di tengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang. Dengan mengacu pada dua tinjauan pustaka di atas, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan pembelajaran daring terhadap beragam pembelajar, baik siswa maupun mahasiswa. Kunci keberhasilan suatu pembelajaran daring terletak pada pilihan *platform* dan metode yang membuat peserta tidak merasa bosan, jenuh, serta mengetahui tujuan utama *goal orientations*-nya.

Platform pembelajaran yang mengutamakan *active learning*, seperti penggunaan *problem based learning* Brenda (2012), akan mengubah persepsi mahasiswa agar menjadi lebih kritis dan aktif. Pembelajaran aktif akan membuat peserta, baik siswa maupun mahasiswa, terlibat lebih jauh dengan kegiatannya. Metode pembelajaran yang berpusat pada pembelajar (*student centered active learning*), tidak berpusat pada pengajar (*teacher centered learning*) diharapkan akan mengubah paradigma pembelajar terhadap konsep pembelajaran daring. Selain itu, riset ini akan mengutamakan kemampuan fasilitator/narasumber, tidak saja dalam menyampaikan materi, tetapi juga dalam sisi kemampuan *soft skills*, seperti bagaimana menyampaikan kontennya secara menarik. Hal ini akan membuat dua pihak, yaitu penerima hibah dan target objek riset hibah, menjadi produktif, terutama terkait dengan kebiasaan baru bernama pembelajaran daring.

B. Metode

Untuk mengeksplorasi potensi masyarakat rekan riset, kami akan mencoba memanfaatkan media daring yang ditawarkan serta menjawab tantangan yang dimunculkan oleh era digital 4.0 ini, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya (PPKB), FIB UI berinisiatif untuk menciptakan sebuah *platform* kursus daring dan konten digital bertemakan ilmu-ilmu humaniora: CLDS. Dalam menyelesaikan riset ini, kami akan menggunakan metode riset pembelajaran daring dengan konsep CLDS yang dapat berbentuk *Massive Open Online Course* (MOOC), seri video *humanities, explained*, dan *podcast kata benda!* Konsep CLDS menggunakan konten, yang direkam dari para narasumber ahli di bidangnya. Selanjutnya, konten tersebut akan diunggah dalam beberapa kanal, antara lain *podcast kata benda!* dan seri *humanities explained*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Platform Pembelajaran Daring CLDS Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menawarkan peluang serta tantangan yang baru dalam dunia pendidikan. Di satu sisi, mudahnya akses dalam mengonsumsi dan memproduksi informasi ini beriringan dengan melimpahnya informasi yang ada di internet. Sayangnya, minimnya saringan dan *gatekeeping* di internet menyebabkan banyaknya informasi yang tidak berkualitas baik. Di berbagai belahan dunia, radikalisme, ultranasionalisme, serta polarisasi tumbuh subur, dan persebaran serta dinamika informasi di internet menjadi salah satu faktor pendorongnya. Oleh sebab itu, salah satu kemampuan yang kini sangat dibutuhkan dalam era digital adalah kemampuan untuk berpikir kritis. Di sinilah ilmu humaniora, seperti filsafat, sastra, dan sejarah berperan penting dalam menumbuhkan kemampuan untuk berpikir secara mandiri dan kritis. Ilmu humaniora mengajarkan pelajar untuk melihat suatu hal dari berbagai sisi dan lebih dalam, menoleransi ambiguitas, memahami asal-muasal dari suatu hal, dan mengetahui bagaimana manusia berakal. Hal ini mengajarkan seseorang agar mampu berpikir dan menyiapkan dirinya untuk menjaga serta hidup dalam alam demokrasi. Oleh sebab itu, untuk mengeksplorasi potensi yang ditawarkan serta menjawab tantangan yang dimunculkan oleh era digital ini, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya (PPKB), Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, berinisiatif untuk menciptakan sebuah *platform* kursus *online* dan konten digital bertemakan ilmu humaniora, CLDS. CLDS mempunyai tiga fitur yang diusung, yakni (1) *engaging*: CLDS menggunakan konten- multimedia, seperti teks, gambar, audio, video, dan infografik berkualitas tinggi yang didesain sesuai dengan kaidah desain instruksional sehingga menarik dan efektif untuk dipelajari; (2) *interactive*: CLDS percaya bahwa pemahaman dibentuk dari makna yang muncul dari interaksi antarpelajar, antarpembelajar dan bahan pembelajaran. Oleh sebab itu, CLDS secara optimal memfasilitasi interaksi antarpengguna melalui fitur seperti forum diskusi, *group chats*, *wiki*, video konferens, serta *live discussion*; dan (3) CLDS percaya bahwa pertemuan dengan ilmu atau pengalaman tidaklah cukup untuk menciptakan makna dalam pembelajaran. Waktu untuk berefleksi dibutuhkan bagi pembelajar berpikir secara kritis dan dalam mengkaitkannya dengan ilmu yang sudah dipahami oleh pembelajar. Untuk memfasilitasi ini, CLDS memiliki fitur seperti *learner's journal & blog* dan *mapping tool* untuk memudahkan para pembelajar berefleksi dan membuat koneksi di antara hal-hal yang sudah dipelajari.

Bagi sivitas akademika penciptaan *platform* pembelajaran daring ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan para ahli kajian ilmu di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, terutama dalam hal pembelajaran *online* serta literasi digital. Selain itu, CLDS menjadi wadah bagi dosen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Bagi peserta didik, penciptaan *platform* pembelajaran daring ini bertujuan untuk (1) memberikan akses kepada pelajar yang terhalang waktu, jarak, dan uang untuk mempelajari ilmu humaniora secara kolaboratif dengan sesama pelajar dan para ahli; (2) menciptakan jaringan pembelajaran personal (*personal learning network*) bagi setiap peserta dengan sesama pelajar, sumber pembelajaran dan para ahli untuk mendukung pembelajaran sepanjang

hayat (*lifelong learning*) yang disokong oleh internet, dan; (3) meningkatkan literasi digital para pemelajar dalam menggunakan, mengonsumsi, dan memproduksi informasi di internet. Pengguna yang disasar oleh CLDS adalah masyarakat umum, baik di dalam maupun di luar lingkungan FIB UI. Segmen-pasar yang menjadi target CLDS adalah: (1) akademisi dan periset, (2) masyarakat umum, (3) komunitas (4) mahasiswa, dan (5) korporasi/ lembaga.

D. Sejarah Publik

Pada dekade belakangan ini kehidupan sosial masyarakat dikembalikan pada publik atau menjadi ranah publik. Demikian juga aktivitas kesejarahan, sejarah dikembalikan atau melibatkan publik. Sejarah publik telah dikenal dan berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an sebagai bagian dari sejarah terapan (*applied history*), yang belakangan berkembang juga di Eropa dan Australia pada tahun 1990-an. Sebagai *sejarah terapan*, ruangnya berada di luar dunia akademik. Praktisi sejarah publik adalah mereka yang memperoleh pendidikan sejarah di universitas, tetapi melakukan kerja kesejarahan di luar universitas. Metodologi yang dikembangkan sejarawan publik telah membuka batas antara sejarawan profesional dan sejarah publik dengan menjadikan sejarah dapat diakses publik secara luas. Sejarah dapat menjadi agen perubahan dan memiliki peran yang signifikan dalam pengetahuan sejarah di masyarakat. Sejarah publik adalah sesuatu yang aktif, reaktif, dan sangat relevan bagi masyarakat luas yang memungkinkan mereka terhubung dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan (Sayer, 2015).

Akar dari sejarah publik adalah pelestarian objek sejarah, situs atau gedung bersejarah, arsip dan dokumen sejarah, sejarah lisan dan kurator di museum yang berkaitan erat dengan sejarah. Mereka yang terlibat dalam aktivitas ini di negara maju, seperti Amerika dan Kanada, telah menjadi para profesional yang paham betul kedudukan mereka dalam sejarah di dunia serta peran mereka di masyarakat sejak akhir 1970-an. Beberapa profesi kesejarahan ini memperluas jaringan kerja mereka dalam sejarah publik sebagai profesional yang bekerja di museum, situs bersejarah (termasuk rumah tokoh pahlawan), taman yang berhubungan erat dengan sejarah, bekas lokasi pertempuran, film dan program di televisi dan semua program pemerintah yang berhubungan dengan pelestarian. Sebagaimana kita mahfum, sejarah satu bangsa dan pelestarian peninggalan sejarah di -negara maju sangat dijunjung tinggi dan dilindungi. Peninggalan bersejarah adalah cermin perkembangan satu bangsa dari waktu ke waktu.

Sejarah publik didefinisikan sebagai “bentuk dari praktek ilmu sejarah yang dilakukan oleh sejarawan akademis yang bekerja untuk lembaga-publik (masyarakat) atau para “sejarawan” yang bekerja sebagai tenaga lepas (*freelancers*). Sejarawan publik bekerja di bidang pelestarian peninggalan masa lampau, museum, media, pendidikan, radio dan film dan media interaktif multimedia dan bidang lain yang berhubungan erat dengan kesejarahan dan penyebarluasannya kepada publik. Sejarah publik juga berkaitan dengan bagaimana memperkenalkan hubungan antara publik sebagai audiens, praktik kesejarahan dan konteks sosial yang saling berhubungan. Menurut Ludmilla (2006), sejarah publik pada dasarnya merupakan pengetahuan sejarah yang disebarluaskan ke khalayak ramai dalam berbagai bentuk yang kemudian membangkitkan kesadaran tentang masa lalu yang tentu saja berbeda dari setiap individu, kelompok, bahkan satu negara dengan negara lain. bagaimana memperkenalkan hubungan antara publik sebagai audiens, praktik kesejarahan dan konteks sosial yang saling berhubungan.

E. Modul Daring Sejarah Publik

Modul daring sejarah publik terbagi atas empat topik yang dilaksanakan selama empat minggu. Pada setiap minggu kelas daring ini akan membahas satu topik. Dalam setiap topik terdapat

beberapa subtopik yang masing-masing dibahas oleh berbagai akademisi dan praktisi internasional yang menguasai subtopik tersebut. Selain itu, pembelajaran juga menggunakan media belajar yang bervariasi, seperti video, artikel, forum, podcast, serta webinar.

Topik pertama adalah pengenalan kepada sejarah publik. Pembelajaran dibuka dengan paparan Definisi dan Cakupan Sejarah Publik oleh Prof. Thomas Cauvin, *Associate Professor of Public History* dan Presiden *International Federation of Public History*. Pembahasan dilanjutkan dengan subtopik Peran Sejarawan yang dipaparkan oleh Prof. David Dean, *Professor of Public History* di Carleton University, Canada. Selanjutnya, peserta didik akan membaca artikel “Sejarah Publik: Pendekatan dan Perspektif” yang membahas berbagai teori dan konsep sejarah publik. Topik pertama ini ditutup dengan sebuah webinar berjudul “Praktik Sejarah Publik” yang dibawakan oleh Prof. Susanto Zuhdi, Departemen Sejarah, Universitas Indonesia. Pada akhir topik pertama ini, peserta didik akan menulis sebuah refleksi “Apakah Anda Bagian dari Sejarah Publik?” Forum diskusi ini bertujuan agar para peserta didik dapat berbagi pengalaman dalam bidang kesejarahan.

Topik kedua berjudul Pelestarian Sejarah. Subtopik pertama membahas Warisan dan Pelestariannya yang akan dipaparkan oleh Prof. Paul Ashton. Pembahasan dilanjutkan dengan subtopik Museum oleh Dr. Kresno Yulianto, Program Studi Arkeologi, Universitas Indonesia. Pembahasan berikutnya adalah mengenai Museum Virtual yang dibawakan oleh Dr. Ali Akbar, Program Studi Arkeologi, Universitas Indonesia. Subtopik keempat adalah Museum Rumah Bersejarah yang dibahas oleh Prof. Dr. Irmawati Marwoto, Program Studi Arkeologi, Universitas Indonesia. Topik kedua ditutup dengan diskusi mengenai “Museum Favorit Anda.” Peserta diminta untuk bercerita dan memaparkan museum favoritnya terkait dengan paparan- mengenai museum sebelumnya.

Topik ketiga berjudul “Produksi Radio, Film, Dokumenter, dan Audio”. Topik ini diisi dengan berbagai narasumber yang ahli dan berpengalaman di bidang produksi media kesejarahan. Subtopik pertama membahas Arsip Suara yang dibawakan oleh Jajang Nurjaman, M.A. dari Arsip Nasional RI. Subtopik kedua membahas Dokumenter: *History on The Screen* oleh Erry Sandra Moeis dari Kompas TV. Subtopik ketiga adalah Film Sejarah dan Partisipasi Publik yang dibahas oleh Agus Mediarta dari Universitas Multimedia Nusantara. Subtopik keempat adalah *podcasting* yang diisi oleh Himan Handoni, M.Hum.

Topik keempat adalah “Digital Public History”. Topik keempat dan yang terakhir ini dibuka dengan pengantar “Apa Itu Sejarah Digital” oleh Prof. Serge Noiret. Pembahasan dilanjutkan dengan subtopik Digital Web Repository oleh Kresno Brahmantyo. Topik keempat ini ditutup dengan topik yang cukup aktual mengenai wabah COVID-19, yakni subtopik History in the Making: Coronarchives Initiatives oleh Prof. Thomas Cauvin.

F. Saran

Pembelajaran daring seperti ini mempunyai dua luaran, yaitu serial modul dan kanal *podcast* yang berfokus pada audio perlu dikembangkan lebih lanjut. Riset tahun ini telah menghasilkan dua seri modul, yaitu *drakologi* dan *public history*. Kanal *podcast* yang dihasilkan adalah dua: Katabenda! dan Tergantung pada Kata dengan tautan kanal *podcast* berikut ini:

<https://open.spotify.com/show/7m9dPAK6qP4Ux6OUD10tZU> (Kata Benda!)

<https://open.spotify.com/show/1MxqOCpN8YEykrTfeH5Zi5> (Tergantung Pada Kata), saat ini belum dirilis, akan dirilis setelah 30 November 2020.

Saran dari kami, apabila tahun depan bisa dikembangkan, kami akan membuat lebih banyak lagi, entah modul ataupun kanal *podcast* yang diinginkan oleh Kemdikbud-Puslitjak dalam rangka mengembangkan semangat Merdeka Belajar milik Menteri Nadiem Makarim.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, Sakshi; Kaushik, Jaya. (2020). Student's perception of online learning during COVID-19 pandemic. *The Indian Journal of Pediatrics*. July, 2020 (87),4, 554-588.
- Anonim. (2020). <https://www.tallinn.ee/eng/Uudis-Estonia-is-the-best-country-in-the-world-for-digital-life,-new-Internations-2019-report-says>, diakses 14 Agustus 2020.
- Anonim. (2020). <https://www.eas.ee/expats-estonia-is-the-best-place-for-digital-life/?lang=en>, diakses 14 Agustus 2020.
- Brenda, Kumar. (2017). Problem based learning pedagogy fosters students critical thinking about writing. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, Vol. 11, Issue 2, Article 1.
- Kurnianingsih, et al. (2017). Upaya peningkatan kemampuan literasi digital bagi tenaga perpustakaan sekolah dan guru di wilayah jakarta pusat melalui pelatihan literasi informasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2017, Vol 3, no.1.
- Lee, L. et al. (2015). Understanding new media literacy: The development of a measuring instrument. *Computers & Education*, 85, pp.84–93. [online]. Available from: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360131515000494>.
- Laurillard, D. (2013). *Rethinking university teaching: A conversational framework for the effective use of learning technologies*. Routledge.
- Media Smarts. (2017). Digital literacy fundamentals. [online]. Available from: <https://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/general-information/digital-media-literacy-fundamentals/digital-literacy-fundamentals>
- Santoso, Schrepp, Isal dan Priyogi. (2016). Measuring user experience of student centered e learning environment. *The Journal of Educators Online-JEO*, Januari 2016.
- Setyaningsih et al. (2019). Model penguatan literasi digital melalui pemanfaatan e-Learning. *Jurnal ASPIKOM*. Vol.3, No.6, Januari 2019, hal 1200-1214.
- Quinn, F.M. (1988/2000) Reflection and reflective practice. In C.Davies, L.Finlay and A. Bullman (eds.) *Changing practice in health and social care*. London: Sage.
- Yang Liu, Santoso, dan Lawanto. (2012). Understanding of the relationship between interest expectancy for success in engineering design activity in grades 9-12. *Educational Technology & Society*, 15 (1), 152-161.

PENGEMBANGAN PORTAL PEMBELAJARAN ONLINE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM KERANGKA TEAM-BASED LEARNING

Bens Pardamean, Harjanto Prabowo, Hery Harjono Muljo, Tjeng Wawan Cenggoro, Teddy Suparyanto, Kartika Purwandari, Alam Ahmad Hidayat, Digdo Sudigyo

Bioinformatics and Data Science Research Center,
Bina Nusantara University

Abstrak. Dewasa ini pembelajaran *online* semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Pengembangan pembelajaran *online* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan portal pembelajaran *online* berbasis *artificial intelligence* (AI) dalam kerangka *team based learning* (TBL). Pemanfaatan AI dalam menciptakan *personalize learning* sesuai dengan gaya belajar siswa. Penggunaan metode pembelajaran TBL diarahkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini menerapkan metode pengembangan dengan cara mengembangkan portal pembelajaran *online* dengan menggunakan MOODLE sebagai *learning management system* (LMS). Pengembangan teknologi AI dilakukan dengan menggunakan algoritma berbasis *collaborative filtering* untuk memprediksi gaya belajar berbasis *evolutionary algorithm* dalam menganalisis pembentukan kelompok siswa. Sampel penelitian sebanyak 262 siswa SD dari sepuluh sekolah di tiga provinsi yang berbeda. Analisis data dilakukan melalui uji *paired t-test* antara hasil pre-test dengan post-test dengan menggunakan aplikasi analisa data R. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran *online* berbasis AI dalam kerangka TBL dapat meningkatkan rata-rata hasil belajar siswa secara signifikan.

Kata kunci: *pembelajaran online, artificial intelligence, team based learning, MOODLE, learning management system, personalize learning*

A. Pendahuluan

Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistem pendidikan agar dapat memberdayakan semua warga negara Indonesia dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (UU No. 20 Tahun 2003). Kualitas pendidikan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan suatu sistem pendidikan. Dalam misi pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003), peningkatan kualitas proses pendidikan juga diarahkan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif. Hasil dari penelitian kami sebelumnya menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif akan tercapai jika siswa aktif dalam proses pembelajaran (Pardamean, 2017). Guru sebagai pengelola pembelajaran harus mampu memilih secara kreatif metode pembelajaran yang tepat dan siswa dapat memanfaatkan kemajuan teknologi hasil belajar secara maksimal. Salah satu metode pembelajaran yang mendorong keaktifan siswa adalah metode *team based learning* (Pardamean, 2017).

Metode *team-based learning* (TBL) dapat diterapkan sebagai salah satu strategi untuk memecahkan permasalahan di atas. TBL memberikan peluang untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bekerja secara tim dan meningkatkan pembelajaran yang aktif (Fink, 2004). Proses pembelajaran

bertujuan agar terbentuk perpaduan antara pemahaman atas proses pengelolaan -tema perencanaan dan pengelolaan spesifik setiap kelompok sebagai bentuk *hard skill* dan kemampuan *soft skill* terkait dengan kerja sama, inisiatif, komunikasi, dan presentasi (Mayona, 2012). Tahap awal pembelajaran dengan metode TBL, guru memberikan sumber belajar yang bervariasi untuk tahap pembelajaran mandiri sebelum tatap muka di kelas. Jenis sumber belajar yang dimaksud antara lain pembelajaran melalui *lecture video*, video animasi, *slide*, *e-book*, dan artikel internet. Sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam pembelajaran, sumber belajar tersebut dapat diorganisasi oleh guru dalam suatu portal *online learning management system* (LMS) agar lebih mudah diakses oleh siswa.

Proses belajar mandiri dalam TBL dapat berjalan sukses apabila ada pilihan sumber belajar yang bervariasi untuk setiap materi ajar yang didasarkan pada gaya belajar setiap siswa. Agar dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan metode prediksi gaya belajar yang akurat untuk setiap siswa. Prediksi gaya belajar juga akan membantu proses pembentukan kelompok atau tim. Selain itu, pemanfaatan gaya belajar juga dapat meningkatkan keaktifan siswa (Wibowo, 2016). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, salah satu kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru adalah kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran siswa. Setiap siswa tentu memiliki gaya belajar yang berbeda sehingga guru perlu melakukan identifikasi sebelum menentukan strategi mengajar.

1. Tujuan Penelitian

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan menciptakan suasana belajar siswa aktif. Keaktifan siswa ini dapat ditingkatkan melalui pemilihan metode pembelajaran yang tepat dengan memperhatikan gaya belajar siswa. Dalam upaya meningkatkan keaktifan siswa dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, penelitian dilakukan untuk mengembangkan dan mengukur dampak dari pengembangan portal pembelajaran berbasis AI dalam kerangka TBL. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk membentuk sebuah sistem pembelajaran digital berbasis AI dalam menjawab permasalahan :

- a. membuat sistem rekomendasi sumber belajar pada portal pembelajaran *online* berdasarkan gaya belajar dan prestasi dari setiap siswa sesuai dengan prinsip *personalized learning* pembelajaran mandiri dalam metode TBL;
- b. membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar dan prestasi setiap siswa.

Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini berupa aplikasi pembelajaran digital dalam kerangka TBL yang dilengkapi teknologi AI untuk merekomendasikan sumber belajar dan memprediksi gaya belajar setiap siswa. Sasaran dari penelitian ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan, keaktifan siswa, hasil belajar dan membantu guru dalam mengidentifikasi gaya belajar siswa. Ruang lingkup penelitian adalah mengembangkan dan mengevaluasi sistem pembelajaran digital berbasis AI dalam kerangka TBL.

2. Tinjauan Pustaka

a. Team-Based Learning

TBL adalah suatu pembelajaran yang melibatkan beberapa siswa sehingga terbentuk sebuah tim belajar dalam mengembangkan *hard skill* dan *soft skill* dari setiap pribadi siswa. TBL sangat berbeda dari *project-based learning* (PBL) dan pendekatan kelompok kecil lainnya, yang tidak memerlukan beberapa ruangan dan kesiapan siswa di kelas. Individu atau kelompok kecil siswa (tim) sangat bertanggung jawab dan aktif berkontribusi terhadap produktivitas tim. Instruktur harus ahli dalam pemberian

konten, tetapi tidak perlu memiliki pengalaman atau keahlian khusus. Siswa tidak memerlukan instruksi khusus dalam kerja tim karena mereka belajar berkolaborasi dalam proses tersebut. TBL dapat menggantikan atau melengkapi kursus atau kurikulum berbasis kuliah (Parmalee, 2012).

Tujuan utama pembelajaran TBL adalah untuk mencapai lebih dari sekadar meliputi konten dan perubahan yang memastikan bahwa siswa memiliki kesempatan mempraktikkan konsep kursus melalui pemecahan masalah (Pardamean, 2017). TBL dirancang untuk memberi siswa pengetahuan konseptual dan prosedural (Michaelson, 2008). Meskipun sebagian dari waktu kelas masih dihabiskan untuk memastikan bahwa siswa menguasai konten kursus, sebagian besar waktu kelas dikhususkan untuk tugas tim yang berfokus pada pembelajaran berbasis masalah dengan menyimulasikan pertanyaan kompleks yang akan dihadapi siswa saat kursus penilaian perkembangan (Pardamean, 2017).

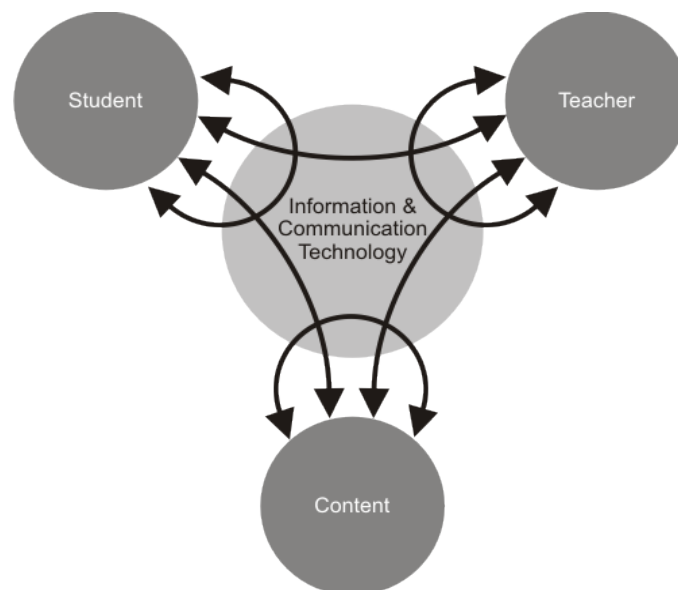
b. *Personalized Learning*

Personalized learning dapat dipandang sebagai komprehensif integrasi di seluruh sekolah dan intensifikasi gagasan ini di semua nilai dan bidang studi. Sistem ini menjadi lebih layak baru-baru ini karena dukungan dan ketersediaan teknologi (Pane, 2018). *Personalized learning* memungkinkan siswa untuk mendapatkan instruksi dan arahan ketika mereka membutuhkannya (Kim, 2015). Oleh karena itu, seorang siswa yang akan mengambil kursus kalkulus, statistik, atau akuntansi, dengan sistem berbasis penguasaan siswa dapat mempelajari mata pelajaran sesuai dengan minat dan keinginannya (Pane, 2018).

Personalized learning, khususnya *digital personalized learning* dengan kurikulum yang telah dikemas sebelumnya, penilaian, dan pengumpulan data terus-menerus, saat ini merupakan area dari pertumbuhan siswa dalam pembelajaran (Boninger, 2019). *Personalized learning* dalam *platform* digital bisa diwujudkan dengan menggunakan AI. Salah satunya digunakan untuk mengetahui gaya belajar dan siswa yang bersangkutan. Gaya belajar dapat diartikan sebagai kecenderungan dalam menyerap dan mengomunikasikan informasi yang dapat direpresentasikan pada pola bicara, cara belajar, cara mengerjakan tugas, cara merespons orang lain, dan kegiatan lain (Nugraheni, 2006).

c. *E-Learning dan Learning Management System*

Di Indonesia, sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2005, *e-learning* lebih dekat pada definisi *pendidikan jarak jauh* (PJJ). Menurut UU No. 20 Tahun 2013, PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Namun, saat ini *e-learning* banyak dipahami sebagai pembelajaran melalui jaringan internet (*daring*) atau *online*. Dalam *e-learning* teknologi informasi menjadi jembatan interaksi antara guru, siswa, dan konten pembelajaran. Gambar 2.1 menunjukkan interaksi antara siswa, guru, dan konten pembelajaran dalam *e-learning*. *E-learning* juga menjadi media komunikasi antarsiswa, antarguru, dan antarkonten pembelajaran itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, *e-learning* membutuhkan aplikasi learning management system (LMS).



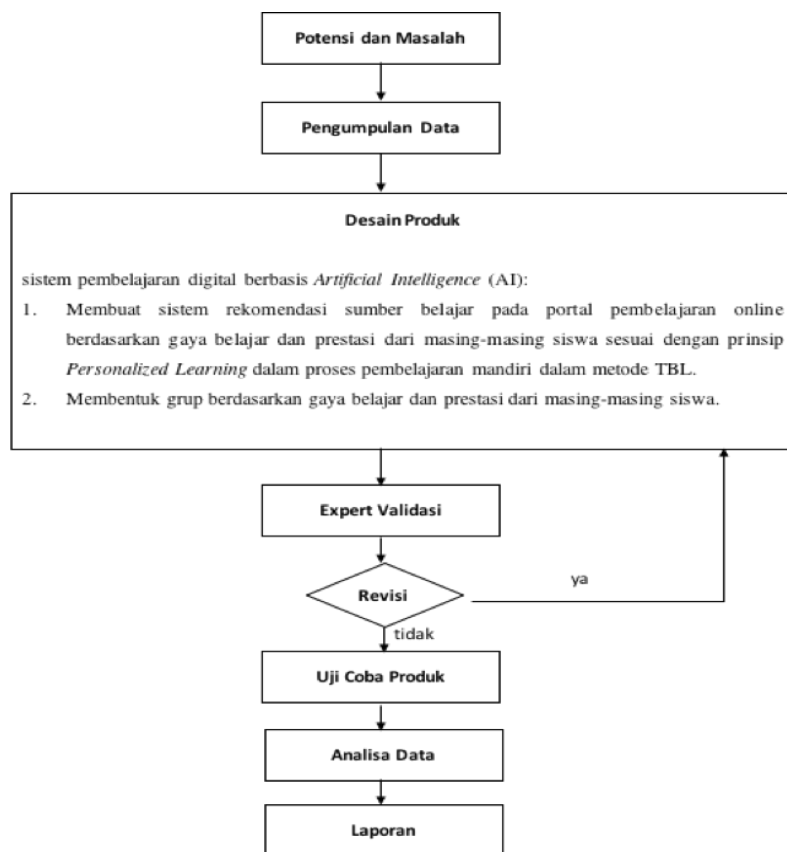
Gambar 2.1 Interaksi Siswa, Guru, dan Konten Pembelajaran dalam *e-Learning* (Suparyanto & Pardamean, 2010)

LMS adalah “sistem informasi yang mengelola kursus *online* (pembelajaran daring/pembelajaran *online*) yang dipimpin oleh instruktur/guru dan melacak kemajuan siswa” (Brown & Johnson, 2003). Salah satu aplikasi yang dapat digunakan sebagai LMS adalah MOODLE, yaitu . sistem manajemen kursus (CMS) *open source*, yang juga dikenal sebagai LMS atau *virtual learning environment* (VLE) (Moodle, 2020). MOODLE adalah aplikasi open source yang dibangun di PHP dan MySQL (Selvi, Balasubramanian, & Manohar, 2008). Pada saat pertama dikembangkan, MOODLE dibuat dengan menggunakan perangkat lunak *open source*, termasuk Linux (www.linux.com) untuk sistem operasi; Zope (www.zope.org) sebagai server aplikasi; Python (www.python.org) sebagai lingkungan pemrograman; Apache (www.apache.org) sebagai *gateway web server*; dan sejumlah skrip *shell* Unix untuk mengontrol sistem (Dougiamas, 2000). Saat ini MOODLE dapat diinstal di *platform* Windows.

B. Metode

Metode penelitian dalam penelitian ini mengadopsi enam langkah dari sepuluh langkah penelitian pengembangan yang ditawarkan oleh Sugiyono (2011) sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.1 berikut ini.

Penelitian ini menggunakan sampel dari tiga provinsi yang berbeda, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Sampel penelitian terdiri atas 262 siswa yang akan dipandu oleh 11 guru dari 10 sekolah dasar. Uji *t-test* antara *pre-test* dan *post-test* dilakukan untuk melihat apakah ada peningkatan hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini juga dilakukan pembuatan model dengan AI untuk menciptakan *personalized learning* sesuai dengan gaya belajar siswa. Pembuatan model dengan AI juga dilakukan untuk melihat distribusi sebaran gaya belajar yang efektif dalam proses pembentukan kelompok.



Gambar 3.1 Langkah Penelitian Pengembangan

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pengumpulan Data

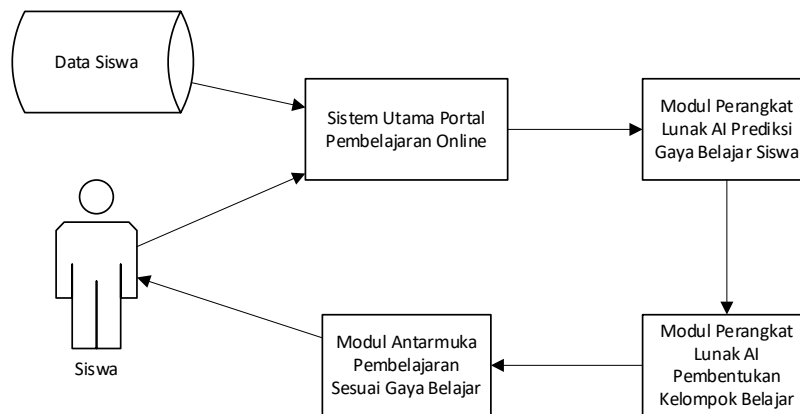
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan studi pustaka mengenai TBL, MOODLE, AI, keaktifan siswa, dan gaya belajar siswa. Gaya belajar yang diamati meliputi auditori, visual, dan kinestetik. Penentuan gaya belajar siswa yang dominan didasarkan pada pengamatan guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, materi yang dipilih adalah bilangan yang termasuk dalam mata pelajaran Matematika. Pemilihan ini atas pertimbangan bahwa materi bilangan diajarkan pada tiga level kelas yang berbeda dan Matematika merupakan mata pelajaran yang sering dianggap sebagai pelajaran yang paling tidak disukai siswa.

2. Desain Produk

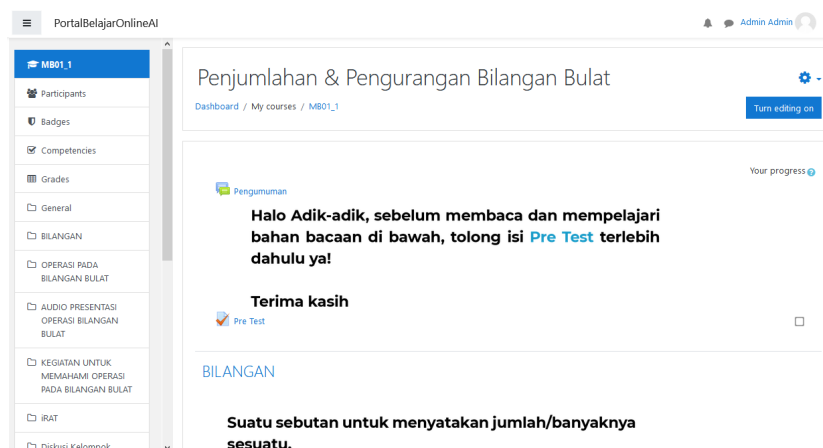
Portal pembelajaran *online* yang dibangun dengan menggunakan *framework* Moodle. Portal ini kemudian diinstalasi pada server dengan spesifikasi prosesor Intel Xeon E5-2620, *graphical processing unit* NVIDIA Tesla K40, RAM sebesar 32GB, dan media penyimpanan sebesar 4TB dengan konfigurasi RAID 5. Instalasi dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis *cloud computing* dan teknologi virtualisasi *Docker*. Proses instalasi dimulai dengan pembentukan *container* yang berisikan *framework* Moodle versi terbaru. Modul perangkat lunak tambahan kemudian dipasangkan ke dalam *container* tersebut untuk membentuk portal pembelajaran *online* sesuai dengan tujuan penelitian

Untuk mengakomodasi proses otomatis penentuan gaya belajar siswa, kami menambahkan modul perangkat lunak baru berbasis AI yang mampu memprediksi gaya belajar siswa. Modul ini menggunakan

algoritma AI berbasis *collaborative filtering*, yaitu sebuah algoritma yang mampu memprediksi gaya belajar siswa dengan memperhatikan kemiripan pola belajar antarsiswa. Pada modul perangkat lunak AI pembentukan kelompok belajar digunakan algoritma AI berbasis *evolutionary algorithm*. Arsitektur lengkap dari portal pembelajaran *online* ini dapat dilihat pada Gambar 4.2.1. Portal dapat diakses dengan menggunakan tautan <http://bdsrsrc.binus.ac.id:7001>. Gambar 4.2.2 merupakan contoh tampilan dari portal pembelajaran yang dikembangkan.



Gambar 4.2.1 Arsitektur Portal Pembelajaran *Online* yang Dikembangkan



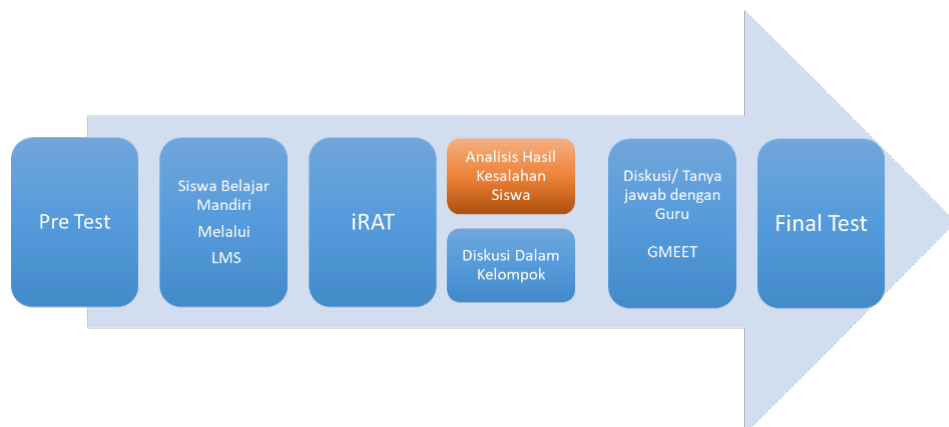
Gambar 4.2.2 Contoh Tampilan Portal Pembelajaran *Online* yang Dikembangkan

3. Expert Validasi

Materi ajar dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah divalidasi oleh dua ahli bidang pendidikan dasar dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan Universitas Satya Wacana Salatiga. Materi ajar yang telah divalidasi meliputi (1) materi ajar operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat untuk siswa dengan gaya belajar visual; (2) materi ajar operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat untuk siswa dengan gaya belajar audio; dan (3) materi ajar operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik. Ketiga jenis materi ajar telah dinyatakan memenuhi persyaratan validasi isi oleh ahli. Selain itu, ahli juga telah melakukan validasi terhadap sepuluh soal yang ada pada instrumen *pre-test* dan *post-test*. Kedua instrumen pengukuran tersebut telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kisi-kisi kemampuan yang akan diukur.

4. Uji Coba Produk

Penelitian ini mengikuti petunjuk pelaksanaan TBL dengan modifikasi menggantikan proses *face-to-face* dengan diskusi melalui *teleconference*. Gambar 4.4.1 menunjukkan alur pelaksanaan uji coba LMS dengan TBL. Uji coba dilakukan pada tanggal 18 November 2020.



Gambar 4.4.1 Alur Uji Coba Penelitian

Pada Gambar 4.4.1 tampak bahwa setiap siswa didorong untuk mempelajari sendiri materi yang sesuai dengan gaya belajar setiap siswa. Diharapkan dengan implementasi dari TBL ini, siswa sudah siap sebelum melakukan diskusi, baik diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Peran guru hanya sebagai fasilitator dan melakukan evaluasi atas kesalahan siswa. Melalui *platform* LMS yang dikembangkan, proses evaluasi dilakukan oleh sistem sehingga guru terbantu melakukan identifikasi bagian-bagian yang masih belum dipahami oleh siswanya. Proses identifikasi tidak hanya dapat diketahui guru dari hasil tes, tetapi dapat melihat seluruh aktivitas belajar siswa melalui fitur *outline report* yang ada pada sistem. Melalui fitur tersebut, guru dapat mengetahui seluruh aktivitas setiap individu dalam LMS. Guru dapat mengetahui kapan dan berapa lama siswa menyediakan waktu untuk belajar suatu materi.

Penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dari tiga provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Adapun sekolah di Jawa Tengah yang terlibat dalam penelitian ini adalah SDN Salatiga 05, SDN Kupang 04, dan SDN Langensari 02. Sekolah di DI Yogyakarta yang dijadikan sampel adalah SDN Sariharjo, SD Kanisius Sorowajan, dan SD Marsudirini. Sekolah di DKI Jakarta yang terlibat ada empat, yaitu SD Tarakanita 5, SD Putra 1, SDN Cipinang Muara 4, dan SDN Menteng Dalam 01. Distribusi sebaran sampel tertera pada Tabel 4.4.1.

Tabel 4.4.1 Distribusi Sampel Penelitian

Asal Provinsi	Jumlah Sampel (Siswa)	Jumlah Sampel yang dapat Menggunakan LMS (Siswa)
DKI Jakarta	115	108
DI Yogyakarta	76	43
Jawa Tengah	71	53
Total	262	204

Dari Tabel 4.4.1 tampak bahwa jumlah sampel yang terlibat adalah 262 siswa. Namun, hanya 204 siswa yang dapat mengakses LMS yang dibuat. Kendala umum yang dihadapi adalah keterbatasan

waktu dan alat yang dapat digunakan siswa. Dari laporan pelaksanaan uji coba yang disampaikan para guru, sebagian siswa masih bergantung pada gawai yang dimiliki oleh orang tua masing-masing. Dari 204 siswa yang dapat *log in* ke sistem LMS, hanya 138 data siswa yang dapat menggunakan LMS sesuai dengan petunjuk guru. Berdasarkan diskusi dengan beberapa guru, tidak semua siswa dapat mengikuti petunjuk yang disampaikan melalui video atau tuntunan dengan menggunakan portal *web meeting*. Beberapa siswa belum terbiasa mengikuti petunjuk dengan baik.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan untuk melihat apakah ada peningkatan signifikan dari hasil belajar siswa melalui *paired t-test* terhadap hasil *pre-test* dan *post-test*. Pada Tabel 4.5.1. ditampilkan hasil *paired t-test* yang diolah dengan aplikasi R. Jumlah sampel yang dapat menyelesaikan aktivitas LMS dengan baik adalah 138 siswa.

Tabel 4.5.1 Hasil Uji *Paired T-test* terhadap Hasil Belajar

N	Pre-Test (Mean)	Post-Test (Mean)	t	p-value
138	7,49	7,97	3,92	0,0001409*

*terindikasi p-value < 0,05, perbedaan secara rata-rata signifikan

Dari Tabel 4.5.1 tampak bahwa telah terjadi peningkatan secara rata-rata yang signifikan (*p-value* kurang dari 0,05) antara hasil *pre-test* dan *post-test*. Dapat disimpulkan bahwa LMS yang disusun dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan secara rata-rata memang tampak kecil karena keterbatasan waktu yang diberikan kepada siswa untuk mempelajari materi ajar yang telah disiapkan pada portal LMS tersebut.

6. Hasil Prediksi Gaya Belajar oleh AI

Pembuatan model AI dilatih dengan menggunakan data yang didapat dari sistem LMS yang dikembangkan. Dengan menggunakan algoritma berbasis *collaborative filtering*, model AI dapat memprediksi dengan akurasi 14,42% dibandingkan dengan prediksi guru. Jika dibandingkan dengan prediksi guru, model AI memberikan prediksi berdasarkan data pada LMS sehingga berpotensi lebih objektif dalam pemberian rekomendasi. Detail perbandingan hasil prediksi dapat dilihat dalam Tabel 4.6.1 bahwa prediksi guru tentang siswa dengan gaya belajar visual ternyata banyak yang memiliki gaya belajar auditori.

Tabel 4.6.1 Perbandingan Hasil Prediksi Gaya Belajar

Visual		Prediksi Guru		
		Auditori	Kinestetik	
Prediksi AI	Visual	12%	3%	7%
	Auditori	36%	4%	11%
	Kinestetik	14%	9%	4%

7. Hasil Pembentukan Kelompok oleh AI

Tabel 4.7.1 menunjukkan persebaran rata-rata kepercayaan dalam kelompok yang dibentuk oleh AI berbasis *evolutionary algorithm*. Kelompok dibentuk dengan asumsi bahwa sampel siswa dibagi ke dalam lima kelompok. Terlihat bahwa persebaran kepercayaan di setiap kelompok untuk setiap kategori gaya belajar tersebar dengan merata. Dalam hal ini, model AI yang digunakan untuk pembentukan kelompok telah memenuhi standar pembagian kelompok menurut TBL, yaitu anggota kelompok harus heterogen dan seimbang.

Tabel 4.7.1c Persebaran Kepercayaan Gaya Belajar Berdasarkan Kelompok

	Visual	Auditori	Kinestetik
Kelompok 1	34%	37%	29%
Kelompok 2	30%	36%	34%
Kelompok 3	32%	37%	31%
Kelompok 4	31%	38%	31%
Kelompok 5	31%	37%	32%

D. Kesimpulan

Penggunaan portal pembelajaran *online* berbasis *artificial intelligence* dalam kerangka TBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari hasil uji *paired t-test* antara *pre-test* dan *post-test* tampak adanya kenaikan nilai rata-rata yang signifikan. Dari hasil uji coba juga didapatkan data hanya 78% siswa yang memiliki gawai atau perangkat untuk mengakses LMS yang telah dibuat sehingga masih ada 22% siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran *online*.

Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa SD dalam memahami petunjuk penggunaan LMS melalui video, petunjuk tertulis, dan pengarahan guru melalui *web-meeting* ternyata tidak dapat diterima dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil uji coba hanya 68% sampel yang mampu melaksanakan pembelajaran *online* dengan baik.

Model AI yang dikembangkan menggunakan algoritma berbasis *collaborative filtering* mampu melakukan prediksi gaya belajar berdasarkan aktivitas siswa dalam LMS. Model AI yang dikembangkan berbasis *evolutionary algorithm* juga dapat digunakan dalam proses pembentukan kelompok dalam pembelajaran TBL.

E. Saran

Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak dilakukan analisis yang mendalam. Pada penelitian tahap selanjutnya hendaknya melibatkan data demografi siswa, seperti jenis kelamin, usia, status ekonomi, dan kemampuan awal siswa.

Hal lain yang perlu menjadikan pertimbangan sekolah ketika akan melakukan pembelajaran *online* adalah kesiapan perangkat dan kemampuan siswa dalam menjalankan LMS yang ada. Sebaiknya pada awal pembelajaran *online* berbasis AI dengan TBL, siswa diberi pendampingan lebih intensif. Setelah siswa terbiasa dengan pembelajaran *online* diharapkan kendala teknis penggunaan perangkat tidak terjadi. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan menganalisis perangkat yang dipakai siswa untuk mengikuti pembelajaran *online* berbasis AI dalam kerangka TBL.

Model AI yang dikembangkan dalam penelitian ini hanya berdasarkan sampel yang relatif sedikit. Agar tingkat kepercayaan prediksi model AI dapat ditingkatkan, diperlukan sampel data yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Boninger, F., Molnar, A., & Saldaña, C. M. (2019). *Personalized learning and the digital privatization of curriculum and teaching*. National Educational Policy Center. Diakses dari <https://Nepc.Colorado.Edu/Publication/Personalized-Learning>.
- Brown, A. & Johnson, J. (2003). *Five advantages of using a learning management system. microburst learning*. Diakses pada 15 Agustus dari www.microburstlearning.com.
- Dougiamas, M. (2000). Improving the effectiveness of tools for internet based education. In A. Herrmann, & M. Kulski (Ed.), *9th annual teaching learning forum*. Perth: Curtin University of Technology.
- Fink, L D. (2004). *Creating significant learning experiences: An integrated approach to designing college courses*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Kim, Anthony. (2015). *Personalized learning playbook. 1st ed. Education Elements*. San Francisco : Blurb Publisher.
- Leeuwe, M. (2009). *E-Learning fundamentals*. Diakses pada 15 Agustus 2020, dari Leerbeleving: <http://www.leerbeleving.nl/wbts/1/index.html>
- Mayona, E L., & Irawati, I. (2012). Penerapan model team based learning pada mata kuliah pengantar pengelolaan pembangunan. Seminar Nasional ASPI 2010. Diakses dari <http://lib.itenas.ac.id/kti/?p=942>
- Michaelsen, L.K., & Sweet, M. (2008). The essential elements of team-based learning. *New Directions for Teaching and Learning*, 116, 7–21.
- Moodle. (2010). *Moodle doc*. Diakses pada 15 Agustus 2020, dari Moodle: <http://docs.moodle.org/en>
- Nugraheni, E., & Pangaribuan, N. (2006). Gaya belajar dan strategi belajar mahasiswa jarak jauh: Kasus di Universitas Terbuka. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 7(1), 68 – 82.
- Pardamean, B., Prabowo, H., Muljo, H., Suparyanto, T., Masli, E., Donovan, J. (2017). Team based learning as an instructional strategy: A comparative study. *The New Educational Review*, 7(1), 30 – 43.
- Parmalee, D., Michaelsen, L., Cook, S., Hudes, P. (2012). Team-based learning: A practical guide: AMEE Guide No. 65. *Medical Teacher*, 34 (5) : e275 - 87.
- Pane, John F. (2018). *Strategies for implementing personalized learning while evidence and resources are underdeveloped*. Expert insights on a timely policy issue. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Diakses dari <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE314.html>.
- Selvi, R. T., Balasubramanian, D. N., & Manohar, G. T. (2008). Framework and architectural style metrics for component based software engineering. *International MultiConference of Engineers and Computer Scientists. 1*. Hongkong: IMECS.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Suparyanto, T. & Pardamean, B. (2010). The effects of computer skill in student's achievement through the use of learning management system. *Conference: International Seminar on Integrating Technology in to Education, Jakarta*.
- Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Jakarta.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4301. Jakarta.

Wibowo, Nugroho. (2016). Upaya Peningkatan keaktifan siswa melalui pembelajaran berdasarkan gaya belajar di SMK Negeri 1 Saptosari. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 1, 128-139. 10.21831/elinvo.v1i2.10621.

PENGEMBANGAN MODEL *PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM* (PECS) BERBASIS APLIKASI DIGITAL SEBAGAI PENGUATAN KECERDASAN VISUAL SPASIAL BAGI ANAK AUTISTIK

Rudi Irawanto, A.A.G. Rai Arimbawa, dan Moch. Abdul Rahman
Universitas Sebelas Maret, Solo

Abstrak. Keberadaan lembaga inklusi untuk autisme sangat terbatas di Indonesia. Lembaga tersebut lebih banyak terdapat di kota-kota besar, sedangkan di kota kecil relatif jarang ditemui, tidak berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah penyandang autisme di Indonesia. Anak berkebutuhan khusus, khususnya autisme, adalah siswa yang secara fisik atau sosial memiliki perbedaan sehingga dibutuhkan perlakuan khusus dalam layanan pendidikannya. Salah satu hal yang menjadi kekurangan anak berkebutuhan khusus adalah kemampuan berkomunikasi verbal. Keterbatasan dalam komunikasi dan interaksi sosial dikawatirkan akan menghambat perkembangan kepribadiannya. Berkenaan dengan itu, dibutuhkan media bantu sebagai terapi untuk mengoptimalkan perkembangan anak autisme. Penelitian ini berupaya menghasilkan aplikasi digital *picture exchange communication system* (PECS) bagi anak-anak autisme untuk memperkuat kecerdasan visual spasialnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis isi untuk menghasilkan aplikasi PECS. Aplikasi PECS sebagai produk penelitian ini diharapkan dapat membantu orang tua penderita autisme yang tidak memiliki akses dengan lembaga terapi. Produk penelitian ini adalah aplikasi digital PECS yang dapat diunduh melalui *playstore*.

Kata kunci: PECS, visual spasial, aplikasi

A. Pendahuluan

Autisme merupakan gangguan perkembangan saraf pada anak yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial mereka. Salah satu masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus adalah kemampuan adaptasi visual yang tidak optimal dan kemampuan berkomunikasi secara verbal yang relatif terhambat. Anak-anak penderita autisme memiliki kelemahan dalam memahami objek visual di sekitarnya (Gradin, 2006: 10) dan cenderung tidak mengenali objek visual secara utuh. Kasus pada anak autistik menunjukkan bahwa kemampuan mengenali objek visual di sekitarnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan anak-anak normal. Anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu subjek didik dalam model pendidikan inklusi. Salah satu terapi yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan cerapan visual anak autisme adalah terapi visual dengan menggunakan metode *picture exchange communication system* (PECS). PECS adalah suatu pendekatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan simbol verbal (Bondy dan Frost, 1994:2). PECS dirancang oleh Andrew Bondy dan Lori Frost pada tahun 1985 dan mulai dikenalkan pada publik pada tahun 1994 di Amerika Serikat. Pada awalnya PECS digunakan untuk siswa prasekolah yang mengalami autisme dan kelainan lainnya yang berkaitan dengan gangguan komunikasi. Siswa yang menggunakan PECS ini adalah mereka yang perkembangan bahasanya tidak menggembirakan dan tidak memiliki kemauan untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Pada prinsipnya PECS merupakan upaya untuk merangsang komunikasi anak secara spontan.

Penggunaan bahasa visual sebagai ganti bahasa verbal merupakan mediasi awal menuju proses komunikasi yang lebih rumit. Proses visual dalam berkomunikasi pada gilirannya menjadi pemicu ungkapan secara verbal. PECS dapat dilihat sebagai pemberian rangsangan secara visual. Proses tersebut dapat dikerjakan dalam beberapa fase. Fase yang berbeda menunjukkan tingkat levelisasi kemampuan dan perkembangan anak. Pada tahap awalnya anak diperkenalkan dengan simbol nonverbal. Namun, pada fase akhir dalam penggunaan PECS ini, anak dimotivasi untuk berbicara.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan dampak negatif dari penggunaan PECS (Bondy, 2001). Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak autisme yang menggunakan PECS perkembangan keterampilan bicaranya lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak menggunakan PECS (Bondy, 2001). Yoder dan Stone (2006) membandingkan antara anak-anak yang menggunakan PECS dengan sistem yang lain. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak autisme yang dilatih dengan PECS memiliki kemampuan verbal yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. PECS ini akan lebih efektif mendorong anak autisme memiliki kemampuan verbal jika dilatihkan pada anak berusia di bawah enam tahun.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa jumlah lembaga layanan inklusi yang menangani anak berkebutuhan khusus relatif masih terbatas, sedangkan jumlah anak autisme semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banyak orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidak dapat mengakses lembaga layanan inklusi dengan baik, terutama para orang tua yang tinggal di kota-kota kecil. Jumlah lembaga layanan inklusi, khususnya bagi anak-anak autisme, yang terbatas dan membuat beberapa orang tua tidak memiliki akses yang cukup ke lembaga layanan inklusi yang memadai. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah menghasilkan media aplikasi PECS. Penggunaan aplikasi PECS sebagai basis pengembangan terapi dapat dijadikan pilihan mengingat aplikasi PECS pada beberapa individu tidak mensyaratkan levelisasi pengetahuan yang tinggi. Orang tua siswa dapat berperan sebagai terapis bagi putra-putrinya secara optimal.

Beberapa bentuk terapi dengan model PECS yang telah dilaksanakan di luar negeri terbukti mampu menguatkan persepsi visual anak berkebutuhan khusus, terutama pada penderita autisme (Thien, 2008:75). PECS dirancang bukan sebagai pengganti kemampuan verbal anak, melainkan sebagai mediasi menuju kemampuan verbal. Proses tersebut membutuhkan objek yang dekat dengan lingkungan visual anak. Perancangan PECS sebagai satu sistem yang utuh membutuhkan pemahaman total terhadap lingkungan sosial budaya dari siswa yang bersangkutan. Penonjolan objek visual yang akrab di lingkungan siswa terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap dengan signifikan (Thien, 2008:77).

Penelitian tentang pengembangan PECS di Indonesia relatif jarang dilakukan. PECS lazimnya dipergunakan untuk membantu anak dalam mengekspresikan kemampuan verbalnya. Penelitian yang berkaitan dengan PECS di antaranya dilakukan oleh Meimulyani (2009) yang melihat bahwa PECS mampu meningkatkan tiga aspek kemampuan berkomunikasi, yaitu kemampuan menciptakan perhatian bersama, menyampaikan permintaan, dan kemampuan mengembangkan inisiatif.

Penelitian tentang PECS lebih banyak terfokus pada aplikasi media PECS pada anak berkebutuhan khusus. Penelitian Indriani (2011) menemukan bahwa penggunaan PECS terbukti dapat meningkatkan aspek ekspresif kemampuan berkomunikasi anak retardasi mental, tetapi PECS belum berhasil meningkatkan aspek reseptif kemampuan berkomunikasi. Penggunaan PECS juga terbukti mampu menekan sifat agresif pada anak tunarungu. Ketidakmampuan berkomunikasi secara verbal dapat dijemput dengan penggunaan PECS. Penelitian yang dilakukan oleh Adkins, T. & Axelrod (2002) menunjukkan bahwa penggunaan PECS mampu meningkatkan respons verbal secara bertahap pada anak-anak berkebutuhan khusus. Anderson, A, Moore, D & Bourne, T. (2007) menunjukkan hal yang sama bahwa PECS mampu secara signifikan meningkatkan kemampuan verbal anak.

B. Metode

Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan aplikasi PECS sebagai upaya penguatan terapi visual spasial bagi anak autisme di Jawa Timur. Produk akhir penelitian ini adalah aplikasi PECS yang dapat dioperasikan melalui *smathphone* dalam bentuk cetak

Penelitian menggunakan rancangan penelitian pengembangan model prosedural yang dimodifikasi dalam dua langkah. Kedua langkah tersebut adalah (1) tahap studi pendahuluan sebagai *need and contents analysis*; dan (2) tahap pengembangan sebagai *design, development, dan evaluation stages*. Subjek penelitian ialah media PECS anak berkebutuhan khusus, terutama siswa penderita autisme di Kota Malang dan Kabupaten Tulungagung, yang akan dijadikan model pengembangan aplikasi PECS.

Sumber data penelitian ini ialah siswa autisme, orang tua penderita autisme, para pengajar atau terapis serta lembaga layanan inklusi. Data dikumpulkan melalui tiga metode, yaitu wawancara mendalam, pengamatan langsung atau observasi dan studi pustaka/ dokumentasi.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara, catatan observasi, dan studi dokumentasi. Tahap berikutnya merupakan tahap perancangan, pengembangan, dan evaluasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket terbuka, angket skala likert, dan format catatan diskusi terfokus.

C. Hasil dan Pembahasan

Penganalisisan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis semiotika dan kebudayaan dengan langkah kerja: (1) penelaahan dan reduksi data, (2) pengidentifikasian data; (3) pengkategorian dan pemilahan data, dan (4) penyimpulan analisis data

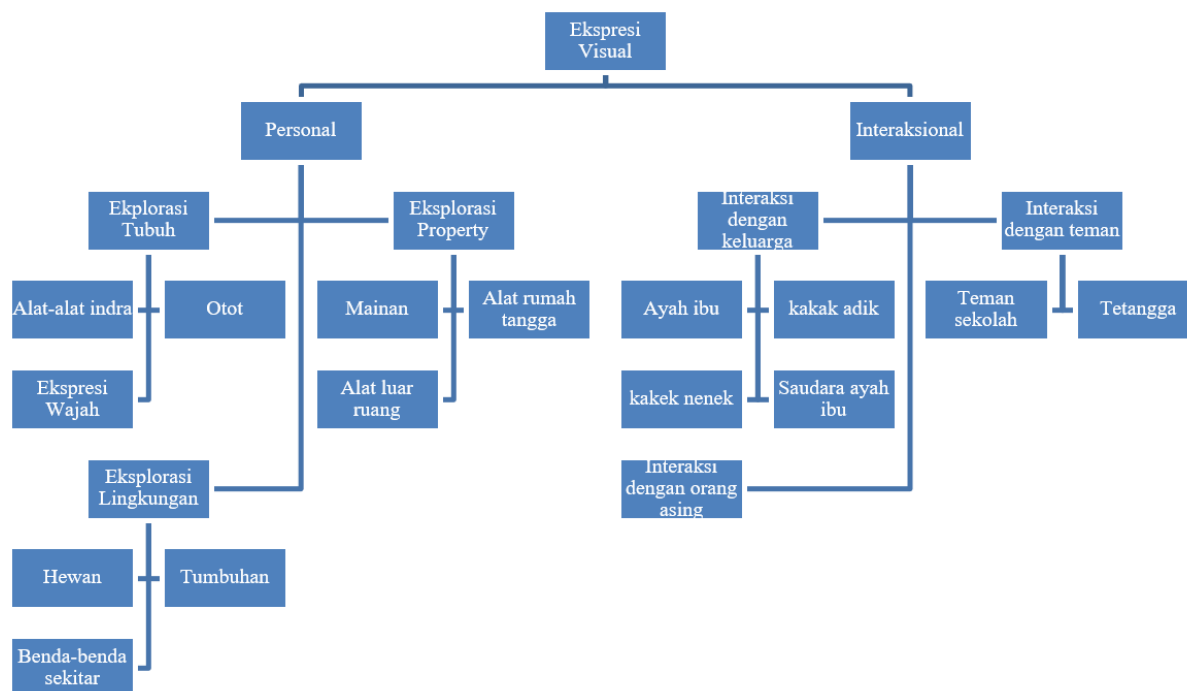
1. Konsep Perancangan Produk

PECS dipandang merupakan media yang cukup efektif untuk memacu referensi verbal siswa berkebutuhan khusus. Persoalan yang mengemuka di lapangan adalah ketersediaan media PECS yang relatif terbatas, bahkan tidak semua lembaga inklusi mengenal atau memiliki media tersebut. PECS yang tersedia di pasaran merupakan produk- impor yang tidak menampilkan ilustrasi khas Indonesia.

Penelitian ini dimulai dengan perancangan PECS berdasarkan alokasi kebutuhan peserta dan lingkungan yang dihadapi siswa. Kebutuhan yang dihadapi siswa berkebutuhan khusus dialokasikan menjadi dua kebutuhan utama, yaitu kebutuhan untuk mengungkapkan ekspresi personal dan ekspresi interaksional. Lingkungan dalam perspektif PECS merupakan variabel yang dibentuk berdasarkan situasi yang dihadapi siswa sehari-hari. Lingkungan dalam konteks ini diwujudkan dalam penggunaan ilustrasi yang dapat dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Rancangan aplikasi PECS ini pada bagian ekspresi personal terbagi atas eksplorasi bagian tubuh, interaksi tubuh dan *property* (alat), dan interaksi tubuh dan lingkungan. Eksplorasi bagian tubuh, misalnya aktivitas yang menunjukkan bagian tubuh dan gerakan motorik kasar. Interaksi tubuh dalam *property* di antaranya gerakan memainkan peralatan, mainan, dan benda-benda di sekitar. Aktivitas interaksi tubuh dan lingkungan di antaranya interaksi dengan rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar.

Ekspresi interaksional dikelompokkan atas interaksi dengan keluarga, interaksi dengan teman, dan interaksi dengan orang asing. Struktur ekspresi visual yang digunakan dalam penyusunan aplikasi PECS ini digambarkan dalam bagan berikut.



Bagan Struktur Aplikasi PECS

Konsep perancangan aplikasi PECS merupakan pepaduan konsep perancangan komunikasi visual dan konsep komunikasi verbal. Berdasarkan observasi dan uji coba produk pada khalayak terbatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa tipe komunikasi visual yang menarik perhatian anak berkebutuhan khusus (autisme). Berdasarkan analisis produk hasil uji coba diputuskan beberapa pertimbangan teknis dalam perancangan ini.

- Gaya ilustrasi desain menggunakan gaya karikatural dengan penghilangan elemen gender dalam gambar, terkecuali untuk gambar orang tua atau orang yang dituakan.
- Pewarnaan gambar dibuat dengan menggunakan warna-warna primer dan sekunder. Kondisi tersebut dilandasi oleh pemahaman bahwa pada rentang prasekolah anak-anak lebih mudah menangkap struktur warna primer.
- Atribut pakaian dibedakan berdasarkan kelaziman, yang dibagi menjadi pakaian untuk aktivitas rumah, aktivitas sekolah dan aktivitas khusus (ibadah dan olahraga).
- Proporsi tubuh menggunakan proporsi anak-anak dengan perbandingan 1 : 5 (proporsi kepala dan badan).
- Secara umum gaya ilustrasi digunakan mode gambar dua dimensional. Kondisi tersebut dilandasi oleh kemampuan beripikir spasial yang relatif baik pada siswa berkebutuhan khusus.
- Tipografi menggunakan huruf sanserif karena anak-anak lebih mudah memahaminya dibanding kan huruf serif.

1. Tujuan Komunikasi Visual

Perancangan aplikasi PECS bertujuan untuk menghasilkan produk aplikasi yang berfungsi sebagai media bantu bagi anak-anak autisme yang dapat dioperasikan oleh orang tua dengan mudah dan memiliki Berdasarkan wawancara dengan para pengajar dan terapis di lembaga pendidikan authis,

-buku PECS yang selama ini tersedia menggunakan kaidah Barat yang cenderung berjarak dengan lingkungan setempat sehingga diperlukan media aplikasi PECS yang lebih mudah dicerna

Pada penelitian ini komunikasi visual yang hendak disampaikan kepada pengguna dan para siswa berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut.

- a. Anak menyadari tentang eksistensi dirinya sebagai individu yang berbeda dengan yang lain. Aspek ini ditunjukkan dengan intensitas komunikasi rutin dengan orang tua dan para guru dengan media bantu.
- b. Media aplikasi PECS dirancang sebagai media antara yang menjembatani keterbatasan komunikasi verbal siswa. .
- c. Media aplikasi PECS tidak menggantikan fungsi dan peran orang tua atau guru, tetapi merupakan wahana melengkapi fungsi edukasi yang tengah dijalankan.
- d. Media aplikasi PECS merupakan *prototype* yang pada kesempatan awal masih membutuhkan koreksi, terutama menyangkut aspek lokalitas ilustrasi yang digunakan. Pada beberapa contoh visual digunakan lingkungan di kawasan Kota Malang dan Kabupaten Tulungagung. Faktor lingkungan yang tepat sangat membantu anak autisme untuk menguatkan kemampuan visual spasial yang dimilikinya.

2. Strategi Komunikasi Visual

Strategi komunikasi visual merupakan model pengembangan produk yang disesuaikan dengan tujuan komunikasi visual yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Strategi komunikasi yang dijabarkan dalam konsep ilustrasi dan unsur komunikasi visual lainnya meliputi hal berikut.

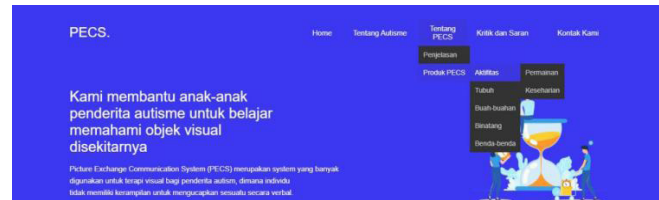
- a. Aspek ilustrasi yang pertama adalah pengenalan diri, yang meliputi bagian tubuh atau aktivitas tubuh. Pada konteks ini ilustrasi yang digunakan adalah *prototype* untuk siswa laki-laki walaupun secara struktural tidak terdapat konotasi gender yang jelas.
- b. Ungkapan visual yang digunakan dalam aplikasi PECS berisikan wujud ikonitas yang mudah dalam hal pembacaan dan tidak memiliki makna ganda (ambigu).
- c. Penggunaan aplikasi PECS ini membutuhkan aspek pembiasaan dari para siswa sehingga pada bagian awal diutarakan mode penggunaannya dan hal-hal yang harus dilakukan oleh pengajar atau orang tua.
- d. *Prototype* PECS ini menggunakan model nongender, tetapi pada beberapa kesempatan konotasi jenis kelamin tidak dapat dihindari mengingat ada beberapa aspek yang melibatkan peran gender. Aktivitas peribadahan dan permainan melibatkan konotasi gender secara jelas.

3. Eksekusi Visual

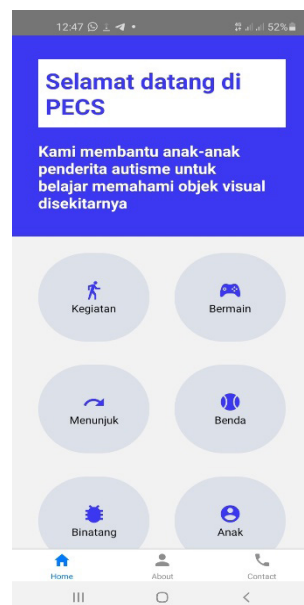
Eksekusi visual merupakan tahapan perwujudan desain berdasarkan konsep visual yang telah ditentukan. Pada bagian ini eksekusi visual meliputi gaya ilustrasi, layout, dan frekuensi. Gaya ilustrasi merupakan elemen pembentuk figur dalam gambar yang disajikan. Gaya ilustrasi dalam tampilan PECS digambarkan dalam dua versi, yaitu bentuk *outline* hitam putih dan berbentuk warna. Bentuk hitam putih disajikan untuk memudahkan dalam penyerapan persepsi visual yang dihasilkan, sedangkan bentuk berwarna dimaksudkan untuk menambah wawasan visual. *Layout* merupakan tampilan penataan gambar dan proporsi gambar dalam suatu bidang gambar. Pada penelitian ini digunakan

tipe *mondrian layout*, yang merupakan penataan gambar dengan model grid. Model ini memudahkan guru atau orang tua dan siswa untuk mengidentifikasi gambar secara lebih cepat.

Produk aplikasi PECS ini telah melalui fase uji coba secara terbatas, yang terdiri atas menu beranda (home), menu penjelasan PECS, menu produk PECS, dan menu kontak kami. *Website* PECS juga memiliki lima menu utama, yaitu home, tentang autisme, tentang PECS, kritik dan saran, serta menu kontak kami.



Gambar Tampilan aplikasi PECS pada website www.pecsindonesia.id



Gambar Tampilan aplikasi PECS pada *smartphone*

D. Kesimpulan dan Saran

Aplikasi PECS yang dikembangkan pada penelitian ini berangkat dari kasus lokal yang terjadi di wilayah Malang dan Tulungagung sehingga perlu menggunakan pendekatan kultural. Berdasarkan kasus autisme di kawasan tersebut, media PECS dibuat dalam tiga bentuk, yaitu berbasis aplikasi yang dapat dioperasikan di *smartphone*, *website* PECS yang dapat diakses tanpa berbayar, dan PECS yang dicetak dalam bentuk modul dan dibagikan pada beberapa lembaga terapi.

Model aplikasi PECS dapat dikembangkan dengan menyesuaikannya dengan kasus anak, baik dengan pertimbangan lingkungan sosial budaya siswa maupun kasus individual. Pengembangan aplikasi PECS ini mengikuti pola yang telah ada, yaitu disajikan secara simultan dan berkesinambungan karena aplikasi PECS masih terbatas pada sekolah autisme dengan fasilitas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkins, T. & Axelrod, S. 2002. *Topography- versus selection-based responding: Comparison of mand acquisition in each modality*. *The Behavior Analyst Today*, 2, 259-266.
- Anderson, A, Moore, D & Bourne, T. 2007. *Functional communication and other concomitant behavior change following PECS training: A case study*. *Behaviour Change*, 24, 1–8.
- Beck, A., Stoner, J., & Bock, S. 2008. *Comparison of PECS and the use of a VOCA: A replication, education and training in developmental disabilities*, 43 (2), 198-216.
- Bondy, A., & Frost, L. 1993. Mands across the water: A report on the application of the picture exchange communication system in Peru. *The Behavior Analyst*, 16, 123-128.
- Bondy, A., & Frost, L. 1994. The picture exchange communication system. *Focus on Authentic Behavior*, 9(3), 1-19.
- Borg, Walter R. 1983. *Educational research: An introduction*. New York: Longman
- Chaabane, D. Ben, Alber-Morgan, S., & DeBar, R. (2009). The effects of parent-implemented PECS training on improvisation of mands by children with autism. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 42, 671-677
- Didi Suprijadi, 2009. pengaruh penggunaan media pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus (ABK) terhadap hasil belajar Matematika dengan konsep pendidikan inklusi. *Jurnal Ilmiah Exacta* Vol 2 (1) Mei 2009.
- Grandin, Temple. 1996. *Thinking in pictures: and other report from my life with autism..* Vintage Press Edition
- Heneker, S. & MacLaren Page, L. 2003. Functional communication: The impact of PECS', *Speech & Language Therapy in Practice* Autumn (II), 12-14,
- Kemmis, S. & McTaggart, R. 1988. *The action research planner*. Third Edition. Deakin University Press. Victoria.
- Leshin, C.B., Pollock, dan Regeluth, C.M. 1992. Instructional design strategies and tactics. *Educational Technology Publications*. Englewood Cliffs.
- Meimulyani, Yani. *Meningkatkan ketrampilan komunikasi melalui PECS pada anak yang tidak berkomunikasi secara verbal*. Thesis. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nur, M., Wikandari, Prima, R., Sugiarto. 1998. *Teori Pembelajaran Kognitif*. IKIP Surabaya: Surabaya.
- Stubbs, Sue. 2002. *Inclusive education where there are few resources*. The Atlas Alliance.
- Thien, Kai-Chien. 2008. Effectiveness of the picture exchange communication system as a functional communication intervention for individuals with autism spectrum disorders: A practice-based research synthesis. *Jurnal Education and Training in Developmental Disabilities* Vol 43(1), 61-76.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Kamis, 3 Desember 2020
Jadwal Paparan	: Panel No: 1
Ruang	: Kelompok 4
Waktu	: 09.00 – 12.00 WIB
Judul Penelitian	: 1. Pembelajaran Online Melalui Platform CLDS 2. Pengembangan Portal Pembelajaran Online Berbasis Artificial Intelligence Dalam Kerangka Team-Based Learning 3. Pengembangan Model <i>Picture Exchange Communication System</i> (Pecs) Berbasis Aplikasi Digital Sebagai Upaya Penguatan Kecerdasan Visual Spasial Bagi Anak Autistik
Penyaji	: 1. Mochamad Aviandy 2. Dr. Bens Pardamean 3. Rudi Irawanto, S.Pd., M.Sn.
Pembahas	: Dr. Muktiono Waspodo, M.Pd.
Moderator	: Dyan Nur Rakhmah
Notulis	: 1. Kresno Brahmantyo 2. Tjeng Wawan Cenggoro 3. Ana Arista

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : (Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)	1. Mochamad Aviandy Pemaparan mengenai output platform CLDS, baik yang fokus pada audio (Podcast Kata Benda! Dan Tergantung Pada Kata. Serta modul pembelajaran daring Sejarah Publik/Public History, serta program <i>humanities explained</i> Drakologi. 2. Dr. Bens Pardamean - Latar belakang: meningkatkan keaktifan siswa dengan menggunakan AI dan Team Based Learning (TBL) - Tujuan: - Membuat sistem rekomendasi konten belajar dengan portal pembelajaran online berbasis AI untuk personalized learning dalam metode TBL - Membentuk kelompok berdasarkan TBL menggunakan AI - Penelitian menggunakan sampel dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta - Sampel sebanyak 262 siswa - Sistem AI untuk prediksi gaya belajar siswa dan pembentukan kelompok telah terbentuk - Telah terbentuk portal pembelajaran online berbasis AI menggunakan server di BINUS

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		• Pembelajaran menjadi teleconference, menggantikan face-to-face • Siswa diberikan pre-test di dalam portal, setelah melakukan pembelajaran mandiri, diberikan post-test untuk melihat peningkatan kemampuan • dari 262 siswa, 204 selesai menggunakan portal ◦ tidak semua bisa menggunakan portal hingga selesai karena kendala alat akses yang terbatas yang bisa digunakan siswa, ◦ hanya 78% siswa memiliki perangkat yang bisa mengakses portal • Hasil penelitian menunjukkan peningkatan prestasi siswa setelah menggunakan portal ◦ hasil signifikan secara statistik dengan p-value < 0,05 • Prediksi gaya belajar oleh guru berbeda cukup banyak dibandingkan dengan prediksi dari AI ◦ Prediksi AI berpotensi lebih subjektif karena berdasarkan data di portal ◦ Banyak siswa yang diprediksi visual ternyata menjadi auditori berdasarkan prediksi AI, mungkin karena siswa rindu untuk mendengarkan guru secara langsung akibat secara tiba-tiba pembelajaran diubah menjadi online. AI berhasil membagi siswa ke dalam kelompok sehingga gaya belajar tersebar secara merata, sesuai dengan prinsip dalam TBL 3. Rudi Irawanto, S.Pd., M.Sn. Keberadaan lembaga terapi yang terbatas di beberapa kota kecil di Jawa Timur memerlukan media bantu terapi yang dapat dioperasionalkan oleh orangtua siswa dengan lebih mudah. PECS merupakan salah satu media bantu terapi untuk anak autistic untuk meningkatkan kemampuan verbal dan visual spasialnya. Aplikasi PECS menjadi salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk mengurangi kesenjangan dan keterbatasan lembaga terapi. Aplikasi PECS dirancang dengan pertimbangan teknis visual yang memperhatikan prinsip-prinsip perancangan bagi anak autism. Produk penelitian ini adalah aplikasi PECS, website PECS dan modul PECS.
a.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	1. Mochamad Aviandy Konten sangat bagus. Platform yang ditawarkan perlu diteruskan karena menawarkan kebaruan dalam pembelajaran. Perlu ditampilkan proses dengan puslitjak saat review, saat diskusi. CLDS perlu didorong. Hambatan, reaksi, dan respon cepat dari tim pengembang. Ada perspektif tim ahli, cukup baik. Sampai kapan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		proses pengembangan? Kapan bisa diseminasi? 3 Hal inovasi, aksi sosial, proses berfikir kreativitas. Kompetensi 2. Dr. Bens Pardamean • Pembahas: bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala akibat pandemi? ◦ Penyaji: ▪ TBL seharusnya butuh face-to-face, ini menjadi kendala. ▪ Di beberapa kelas bisa face-to-face karena jumlah siswa kecil ▪ Di kelas lainnya terpaksa online secara penuh ▪ Untuk kelancaran, guru-guru sebagai mediator merupakan guru-guru terseleksi yang berkemampuan tinggi dan melek teknologi ▪ sistem dibangun dengan feedback dari guru-guru tersebut agar lebih mudah digunakan oleh siswa • Pembahas: sampai kapan proses pengembangan hingga produk layak digunakan? ◦ Penyaji: ▪ produk sudah layak digunakan dan sudah sesuai dengan yang dijanjikan dalam proposal ▪ sistem terus dilanjutkan untuk mengumpulkan data agar sistem menjadi lebih handal • Pembahas: feedback dari pengguna? ◦ Penyaji: data feedback telah diolah dan sudah dilaporkan dalam presentasi • Pembahas: apa persyaratan minimal agar produk dapat digunakan? ◦ Penyaji: ▪ portal ini bisa digunakan dengan kemampuan penggunaan teknologi dan perangkat akses oleh siswa yang memadai ▪ karena sebab itu, portal ini akan memberikan tantangan jika diterapkan di luar pulau Jawa dengan kesenjangan kemampuan penggunaan teknologi dan perangkat akses yang tinggi • Pembahas: prestasi siswa hanya naik sedikit mungkin juga karena keterbatasan akses siswa, bukan hanya keterbatasan waktu • Pembahas: pengalaman pengembangan dapat menjadi rekomendasi ke tim puslitjak, misalnya spesifikasi server • Pembahas: ke depannya, hasil penelitian harus diusahakan agar mendukung program pemerintah Pembahas: Pusdatin sedang mempersiapkan big data untuk yang bisa digunakan tim pengembang di masa depan.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		3. Rudi Irawanto, S.Pd., M.Sn Perlu dipertegas target waktu pengembangannya sampai jangka waktu tertentu dengan indicator yang pasti. Bagaimana reaksi publik terhadap hasil penelitian tersebut, untuk melihat respon masyarakat, sebagai pijakan untuk menentukan rekomendasi penelitian. Penelitian yang dikembangkan masti memiliki keterbatasan sehingga perlu dijelaskan aspek keterbatasannya. Metode penelitian dan langkah-langkah yang ditempuh perlu digambarkan secara detil, termasuk efek dari masa pandemic terhadap dampak dan proses penelitian yang dilangsungkan
b.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	1. Pertanyaan di atas terjawab seluruhnya. Bangun konflik ide dengan kolaborasi, harus tersampaikan dalam laporan utuh. Pengakuan menunjukan kualitas. Kompetensi disampaikan. Diceritakan di laporan utuh. Dari 5 pertanyaan pembahas, semua dijawab, dan pembahas merasa puas. Kompetensi minimal analisis (kognitif 4 dlm tax bloom), proses diseminasi sudah bisa dimulai; Proses pembelajaran terus berlangsung karena menganut aliran <i>lifelong learning</i> (pembelajaran seumur hidup), pemaparan hambatan sudah jelas, kolaborasi terlihat jelas. 2. Bagaimana meminimalisasi potensi distraksi akibat internet? ○ Terbantukan karena guru-guru proaktif menjangkau siswa. Guru-guru dapat secara kreatif mengajak siswa untuk aktif. ○ Siswa yang menjadi sampel masih di usia sekolah dasar, harusnya belum terlalu fasih menggunakan teknologi. Tetapi ternyata lebih dari 50% bisa mengikuti hanya dari petunjuk berupa video dan teks. Ini kemungkinan karena dibantu oleh kreatifitas dari guru-guru. ○ Platform dibuat fleksibel untuk digunakan, sehingga bisa dibuka kapan saja dan materi sesuai gaya belajar siswa sesuai dengan algoritma AI. Ini membantu untuk menjaga keaktifan siswa dalam penggunaan portal. 3. Apakah tidak sebaiknya menggunakan AR agar lebih mudah dipahami bagi siswa autisme? Penggunaan AR lebih baik secara visual tetapi membutuhkan kapasitas memori smartphone dengan spesifikasi yang baik, sedangkan di beberapa kawasan pedesaan tidak semua orang tua memiliki smartphone dengan spesifikasi yang baik.
c.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 12.00 WIB.

V

Kampus Merdeka

KESIAPAN PERGURUAN TINGGI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA

Iskandar Agung, Ferdi Widiputera, Parwanto, Noviyanti
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka yang meliputi empat aspek, yaitu pembukaan program studi baru, akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan pemenuhan hak belajar mahasiswa untuk tiga semester di luar program studi (satu semester di luar program studi di kampus yang sama, dan dua semester di luar program studi dan di luar kampus). Kebijakan ini dianggap sebagai terobosan agar perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkualitas, berdaya saing, dan mampu terserap ke dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan perguruan tinggi dalam menyikapi kebijakan Kampus Merdeka, kendala, dan masalah yang masih perlu diatasi untuk operasional Kampus Merdeka. Tulisan ini merupakan studi kasus dari tiga universitas terakreditasi A dan B, dengan pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui diskusi *online*, membagikan daftar isian, dokumentasi, dan *literature* yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kampus Merdeka masih mengalami kendala, terutama terkait dengan pembukaan program studi baru, perubahan kurikulum, penjabaran program pilihan hak belajar, pendanaan mahasiswa, penjaminan mutu setiap program, dan sosialisasi kebijakan untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan (pelaku usaha dan industri, instansi / lembaga perkantoran, lembaga penelitian, organisasi sosial dan kemanusiaan, dan lain-lain). Berbagai kendala perlu segera diselesaikan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan mulai tahun ajaran 2021

Kata kunci: *kampus merdeka, program studi, akreditasi, badan hukum, hak belajar.*

A. Pendahuluan

Kemendikbud telah mencetuskan kebijakan Merdeka Belajar, tidak hanya tertuju pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga pendidikan tinggi. Khusus yang terakhir itu dikemukakan sebagai konsep Kampus Merdeka dengan empat kebijakan pokok, yaitu pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi (PT) negeri badan hukum (PTNBH), dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan yang dikeluarkan dapat merupakan angin segar dan terobosan pemikiran, tetapi juga membawa perubahan dan kesibukan bagi PT untuk menjabarkan dan mengoperasionalkannya lebih lanjut. Melalui kebijakan baru diharapkan PT dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, berdaya saing, dan siap memasuki dunia kerja.

Kebijakan Kampus Merdeka merupakan tantangan yang diemban oleh PT agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten. Simak saja saat ini terdapat kurang lebih 1.316 PT (negeri dan swasta di Indonesia) dengan sebanyak 11.709 program studi. Di PT negeri dari sebanyak 87 di Indonesia, 36 di antaranya berstatus akreditasi A dan 51 berstatus akreditasi B dan C. PT swasta sebanyak 30 berstatus akreditasi A, dan 1.286 berstatus akreditasi B dan C. Di PT (negeri dan swasta) ini lebih dari separuh belum memiliki akreditasi. Dari sisi prodi, di PT negeri sebanyak 3.254 prodi berstatus akreditasi B dan C, sedangkan PT swasta sebanyak 10.906 prodi (lihat Tabel 1). Tidak mengherankan apabila mayoritas perguruan tinggi dan prodi masih cenderung mencetak lulusan

yang kurang berkualitas, berdaya saing lemah, dan kurang mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja. Bahkan, di sektor pemerintahan pun persoalan rendahnya kualitas dan produktivitas pegawai ini banyak dikeluhkan. Saat ini Pemerintah sedang menggalakkan program manajemen talenta untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai negeri.

Tabel 2 Akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi di Indonesia Tahun 2018

Jenis	Negeri				Swasta			
	Akreditasi			Jumlah Total	Akreditasi			Jumlah Total
	A	B	C		A	B	C	
PT	36	45	6	87	30	479	807	1,316
Prodi	2,292	2,806	448	5,546	803	6,703	4,203	11,709

Pertanyaannya bagaimana kesiapan PT dalam mengantisipasi dan merespons kebijakan Kampus Merdeka? Hambatan apa yang dihadapi PT dalam mewujudkan kebijakan tersebut terkait dengan pembukaan prodi baru, akreditasi PT dan prodi, menuju PTNBH, dan merealisasikan hak belajar tiga semester di luar prodi? Alternatif apa yang perlu dilaksanakan dalam mengoperasikan Kampus Merdeka? Penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan tersebut.

B. Metode

Tulisan ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan September 2020 terhadap tiga universitas, yakni UNY Yogyakarta, UNS Solo, dan UNIB. Meski telah terakreditasi A, dua perguruan tinggi (UNY dan UNS) memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dari jumlah program studi yang terakreditasi. UNS memiliki separuh dari total program studi berstatus A, sedangkan separuh lainnya masih terakreditasi B atau C, di UNY sebanyak 80% program studi sudah terakreditasi A dan 20% terakreditasi B. Di UNIB sebagian besar program studi masih terakreditasi B atau C.

Karena situasi pandemi COVID-19 dengan dikeluarkannya larangan bepergian dan melaksanakan kerja dari rumah (WFH), studi ini juga menyesuaikan strateginya untuk mengumpulkan data dan informasi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi *online*, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi terkait dengan Kampus Merdeka. Informan kunci yang diundang untuk berdiskusi, antara lain pembantu rektor, dekan, tim pembina kampus mandiri, dan ketua program studi.

Analisis dilakukan melalui teknik kualitatif berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari diskusi *online*, pengisian kuesioner, dokumentasi, dan literatur yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

Keterbatasan waktu, lokasi, dan teknik penelitian, terutama sebagai dampak dari pandemik wabah COVID-19, upaya perolehan data dan informasi hanya dilaksanakan di tiga PT dengan menitikberatkan pemanfaatan fasilitas online (*daring*). Ketiga PT yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Jawa Tengah; Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), DI Yogyakarta; dan Universitas Bengkulu (UNIB), Bengkulu. Dari data dan hasil diskusi jarak jauh (*online*) dengan sejumlah narasumber ketiga PT tersebut, diperoleh temuan sebagai berikut.

1. Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Jawa Tengah

Kondisi umum di UNS pada awal tahun 2020 sudah mulai bergerak, sekitar bulan Maret 45 prodi di UNS sudah harus melaksanakan Merdeka Belajar. Dalam aspek pembukaan prodi baru UNS sedang

melakukan analisis kebutuhan, terutama terkait dengan ketersediaan dan kelayakan kualifikasi SDM, sarana-prasarana, dan animo masyarakat. Sebagian besar prodi sudah terakreditasi A. Kebijakan universitas bagi prodi yang sudah dua priode terakreditasi A diarahkan menuju akreditasi internasional, sedangkan masih terakreditasi B dan C diupayakan untuk meningkatkan peringkat akreditasi. Untuk itu, UNS didampingi oleh 50-an asesor BAN-PT UNS untuk akreditasi nasional/internasional.

UNS sebenarnya sudah mendapatkan status PTNBH. Namun, karena masih adanya penambahan syarat PT yang harus dipenuhi, terutama dalam pengelolaan biaya lembaga secara mandiri, diharapkan pada Juli--Agustus 2020 sudah diterbitkan status UNS sebagai PTNBH.

Pemenuhan hak belajar tiga semester di luar prodi sudah disiapkan oleh pihak UNS dan prodi. Pada tingkat universitas sudah dibuat *guideline* Merdeka Belajar dan bagaimana pelaksanaannya. Asosiasi Prodi melakukan pertemuan untuk membicarakan bahan kajian, penilaian, administrasi pelaporan, dan sebagainya. Semua prodi sudah menyiapkan dokumen tiga semester di luar prodi. Pada semester 5 mahasiswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran di luar prodi dalam universitas yang sama dan pada semester 6, khususnya kejuruan bisa magang industri. Terutama dalam pelaksanaan hak belajar dua semester di luar prodi di luar kampus, sesuai dengan Permendikbud No. 3/2020 Pasal 15 (1) terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan, antara lain (1) pertukaran pelajar, (2) magang/praktik kerja, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) penelitian/riset, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independen, dan (8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Untuk pelaksanaan hak belajar dua semester direncanakan dalam tiga pola, yakni (1) model blok pembelajaran di luar PT, model nonblok pembelajaran di luar PT, dan model percepatan.

2. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), DI Yogyakarta

Pada dasarnya UNY telah mengantisipasi, merespons, serta menyiapkan penerapan kebijakan Kampus Merdeka. Dalam pembukaan prodi baru UNY selalu mendorong fakultas dan pascasarjana untuk membuka prodi baru untuk memenuhi tuntutan/kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu dan teknologi, asal saja disesuaikan dengan ketersediaan dosen yang memenuhi syarat pembukaan prodi baru. Tahun 2019 Fakultas Teknik UNY telah membuka tiga program studi berlatar belakang teknik murni, yaitu Teknik Manufaktur, Teknologi Informasi dan Teknik Elektro. Dikatakan oleh Dekan FT UNY, “Kehadiran ketiga prodi ini diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional dalam bidang manufaktur, elektro dan informatika dimana ketiga aspek ini merupakan perwujudan sistem pendidikan berbasis *Science, Technology, Engineering and Mathematics* atau STEM, yakni sebuah model pembelajaran populer di tingkat dunia yang efektif dalam menerapkan Pembelajaran Tematik Integratif dengan menggabungkan empat bidang pokok dalam pendidikan”. Pendekatan tersebut ditujukan untuk menciptakan sebuah sistem pembelajaran secara kohesif dan aktif karena keempat aspek dibutuhkan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah.

Dari sisi akreditasi, perguruan tinggi UNY dan sebagian besar prodi telah terakreditasi A. Bahkan, UNY telah memiliki prodi berkelas internasional. Untuk akreditasi prodi dan institusi, baik lingkup nasional maupun internasional, terdapat unit kerja yang mengurus dan sejumlah asesor yang mengawal proses akreditasi prodi/institusi. Akreditasi merupakan bagian dari penjaminan mutu akademik dan nonakademik. Secara institusional, UNY berkomitmen untuk meningkatkan status menjadi World Class University (WCU) dan terus berupaya meningkatkan status globalnya tersebut.

Dengan mengacu pada *grand design* pengembangan UNY 2025, tahun 2020 telah mengajukan perubahan status menjadi PTNBH. Persiapan telah dilakukan sejak lima tahun lalu untuk melakukan perubahan dari Satker BLU ke PTNBH. Persiapan yang relatif lama karena UNY cukup berhati-hati, terutama memperhitungkan konsekuensi yang akan diperoleh apabila bertatus PTNBH.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo No. 1, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : humas@uny.ac.id



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

POLA MASA BELAJAR DI UNY

No Pola	Dalam Program Studi di UNY	Luar Program Studi di UNY	Luar Institusi UNY (Perguruan Tinggi Lain/ DUDI/Masyarakat)	Total Semester
1	5	1	2	8
2	6	1	1	8
3	6	0	2	8

akwa, Mandiri, Cendekia

www.uny.ac.id 2020

Untuk implementasi MBKM Rektor UNY telah mengeluarkan produk regulasi No. 5/2020 tentang kurikulum Merdeka Belajar, No. 6/2020 tentang rekognisi pembelajaran lampau bagi mahasiswa UNY, dan panduan implementasi kurikulum merdeka belajar – kampus merdeka. Sama dengan di atas, pelaksanaan hak belajar dua semester di luar prodi di luar kampus sesuai dengan Permendikbud No. 3/2020 Pasal 15 (1) dilakukan melalui program: (1) pertukaran pelajar, (2) magang/praktik kerja, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) penelitian/riset, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independen, dan (8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Untuk itu, direncanakan akan dilaksanakan dengan tiga pola sebagai berikut.

Mahasiswa diberi hak sebebannya untuk memilih pola yang ada. Dekan, wadek, koordinator prodi sudah menyosialisasikannya, dan Merdeka Belajar akan dilaksanakan untuk mahasiswa tahun 2020/2021 atau mahasiswa sebelumnya. Saat ini telah diterapkan praktik kependidikan, KKN, dan tugas akhir secara simultan. Terkait dengan tiga mata kuliah (20 sks), terdiri dari: praktik kependidikan, KKN dan tugas akhir, pelaksanaan KKN, PKL dan tugas akhir. Pelaksanaan disesuaikan dengan karakteristik prodi masing-masing secara simultan.

3.Universitas Negeri Bengkulu (UNIB), Bengkulu

Implementasi kebijakan Kampus Merdeka (KM) di Universitas Bengkulu saat ini sedang dikaji dengan tujuan untuk menghadirkan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih kompetitif dengan tata kelola efektif.

Pembukaan prodi baru belum dapat dilaksanakan meski memiliki potensi dan kelayakan. Salah satu kendalanya adalah tidak dapat memenuhi syarat dosen *homebase* harus sebanyak 5 orang, mengambil ratio dosen induk, kecuali kebijakan dosen *homebase* bisa < 5 orang. Dalam kebijakan tiga semester hak belajar mahasiswa di luar prodi salah satunya sedang dikaji bagaimana implementasinya, tantangan dan adaptasi yang perlu dilakukan, proses dan kerangka kebijakan yang perlu dikeluarkan. KM di Universitas Bengkulu direncanakan akan diterapkan tahun ajaran yang akan datang. Saat ini sedang disusun panduannya dan menyosialisasikannya di level universitas. KM minggu ini ke fakultas untuk ditelaah dan dicermati, pada bulan Juli dilakukan FGD yang hasilnya akan dibawa ke senat untuk dibahas sebagai pedoman kebijakan MBKM.

Pada diskusi awal universitas sudah menyiapkan peraturan rektor sebagai payung regulasi. Dalam Pasal 7 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, ada mata kuliah alternatif dengan delapan kegiatan pembelajaran, yaitu (1) pertukaran pelajar, (2) magang/praktik kerja, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) penelitian/riset, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independen, dan (8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Implementasi kebijakan MBKM akan menimbulkan dampak sehingga perlu kesamaan persepsi lebih dahulu; penyesuaian kurikulum agar ciri khas prodi tidak hilang sesuai dengan CPL; memenuhi beban kerja dosen (BKD); dan menyiapkan SOP.

4. Hambatan Penerapan Merdeka Belajar

Hambatan yang dihadapi oleh ketiga PT di atas berbeda satu sama lain. Dalam pembukaan prodi baru salah satunya, mungkin bagi UNY, tidak mengalami permasalahan dan hambatan berarti untuk menambah pembukaan prodi baru, bahkan fakultas didorong untuk merealisasikannya sebagai antisipasi dan respons terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat, UNY relatif memiliki tenaga dosen dan sarana-prasarana yang masih memadai untuk pembukaan prodi baru tersebut.

Pembukaan prodi baru itu masih merupakan masalah bagi UNS dan UNIB, terutama dari sisi pemenuhan persyaratan jumlah dosen serta pembatasan terhadap pembukaan prodi baru STEM. Terutama di UNS, PT ini mendorong dibukanya prodi baru dengan prioritas pada prodi STEM (*Science, Technology, Engineering, dan Math*), tetapi persyaratan minimal lima dosen *homebase* masih menjadi persoalan. Di UNS prodi baru yang terakreditasi minimal jenjang S-1 ada tiga prodi, tetapi kebijakan rektor lebih mengarah pada pengembangan keilmuan tingkat magister dan doktor. Untuk memenuhi kebutuhan dosen, UNS membuka penerimaan dosen yang berkualifikasi doktor dan beberapa persyaratan lainnya, . Di UNIB belum ada upaya membuka prodi baru sebab jumlah dosen *homebase* yang belum memadai.

Kesamaan dari ketiga PT adalah variasi prodi yang telah memiliki akreditasi A, B, atau C. Akreditasi nasional dan internasional dikoordinasikan oleh lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan di setiap PT. UNS dan UNY telah mengajukan lembaga pendidikan tingginya untuk menjadi PTNBH, tetapi harus berhati-hati dengan konsekuensinya terhadap perubahan status ini. Hambatan yang dihadapi adalah bagaimana kemungkinan menggali sumber dana sendiri untuk biaya penyelenggaraan pendidikan di lembaganya. Khusus UNIB saat ini sedang berusaha meningkatkan status akreditasi B dan C.

Sebagian besar (lebih 50%) prodi yang ada di UNS dan UNY sudah terakreditasi A. Di UNS sebanyak 96 (53,63%) sudah berstatus A, sedangkan sisanya 83 prodi (46,37%) masih berstatus akreditasi B dan C. Untuk prodi baru di UNS paling lambat dua tahun sudah harus mengajukan akreditasi pertama ke BAN-PT, dan belum diperkenankan meluluskan mahasiswanya jika belum memiliki SK akreditasi. UNY sebagian besar (78,38%) sudah memiliki prodi berstatus akreditasi A, sedangkan sisanya (21,62%) berstatus akreditasi B. Di UNIB dari sekitar 80-an prodi yang ada, baru sekitar 15 prodi berstatus akreditasi A, sedangkan sisanya masih berstatus B dan C. Dari 44 prodi S-1 di UNIB, baru sekitar 12 prodi yang berstatus A. Sejumlah prodi di UNS dan UNY saat ini sedang berusaha keras menjadikan lembaganya berkelas dunia, sedangkan UNIB masih berusaha meningkatkan akreditasi nasional sebagian besar prodi yang dimiliki. UNIB pun menghadapi kesulitan dalam meningkatkan akreditasi lembaga pendidikannya menjadi PTNBH, terutama apabila harus membiayai pendidikannya secara mandiri.

Dari sisi pemenuhan hak belajar tiga semester di luar prodi, ketiga PT menghadapi permasalahan yang hampir serupa. Mungkin tidaklah begitu sulit bagi PT menerapkan pemenuhan hak belajar satu

semester di luar prodi dalam satu kampus karena sudah terbiasa dilaksanakan dalam perkuliahan sistem SKS. Dalam sistem ini mahasiswa memiliki beban mata kuliah pilihan yang bisa diambil dari prodi lain dalam satu fakultas atau fakultas lain. Persoalan yang masih muncul adalah berkaitan dengan berikut.

- a. Penyusunan kurikulum perubahan, yang perkuliahan yang sebelumnya dilaksanakan delapan semester dengan 140 SKS, dikurangi menjadi lima semester. Perubahan ini tidaklah mudah dan harus dilakukan secara hati-hati, terutama perlu menghindarkan agar jangan sampai prodi tercerabut dari *core*-nya. Di sisi lain prodi pun harus memikirkan solusi terhadap mata kuliah yang terpaksa tidak diajarkan lagi karena penciutan yang terjadi;
- b. Pemenuhan hak belajar dua semester sebanyak 40 SKS. Meski SKS didefinisikan sebagai jam kegiatan, bagaimana mengoperasionalkannya masih permasalahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan oleh mahasiswa dalam hak belajar dua semester memunculkan pertanyaan dari segi pendanaan. Sebagai contoh, apabila mahasiswa mengambil mata kuliah di PT lain, selain persoalan perolehan SKS (apakah harus 20 SKS, padahal mungkin saja di PT yang bersangkutan hanya memperoleh 2 – 4 SKS). Bagaimana dengan pendanaan kegiatan apakah harus ditanggung sendiri oleh mahasiswa atau oleh PT? Bagaimana pula dengan kewajiban mahasiswa untuk membayar uang kuliah? Jawaban pertanyaan ini masih memerlukan penjelasan.
- d. Sosialisasi yang kuang meluas untuk membuka pemahaman dan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap kebijakan Kampus Merdeka, terutama pemenuhan hak belajar dua semester di luar prodi dan di luar kampus.

D. Rekomendasi

Kebijakan Kampus Merdeka merupakan suatu terobosan untuk menghasilkan lulusan PT yang berkompeten, berkualitas, berdaya saing, dan tenaga kerja siap pakai. Namun, kebijakan ini masih menuai permasalahan yang perlu diatasi, baik terkait dengan aspek pembukaan prodi baru, akreditasi PT dan prodi, PTNBH, maupun pemenuhan hak belajar tiga semester di luar prodi. Sehubungan dengan penerapan kebijakan Kampus Merdeka, dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Penyederhanaan jumlah dosen *homebase* dalam pembukaan prodi baru agar lebih fleksibel tidak harus memenuhi persyaratan minimal lima orang, tetapi disertai kemudahan memperoleh akreditasi agar dapat meluluskan mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi.
2. Pembukaan prodi baru tidak hanya terfokus pada bidang studi STEM, tetapi juga bidang studi utama sosial, humaniora, dan lain-lain untuk membuka prodi S-2 dan S-3, selain sudah siap juga menjaga kesinambungan linearitas bagi mahasiswa (juga dosen) yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
3. Perluasan pemberian insentif dana pendampingan bagi mahasiswa yang akan mengambil hak belajar selama dua semester di luar prodi dan di luar kampus sesuai dengan pilihan dan pengembangan kompetensinya. Pihak Ditjen Dikti telah mencanangkan pemberian bantuan dana kepada mahasiswa (UKT, pulsa, dan uang transpor), tetapi jumlah mahasiswa yang dapat menerima hanya sekitar 20 – 30 orang. Hal ini menjadi persoalan bagi PT yang memiliki jumlah mahasiswa besar.
5. Sejauh ini ekuivalen SKS dan jam kegiatan masih menjadi persoalan. Pengalaman PT dalam pemberian SKS mata kuliah berkisar antara 2 – 4 SKS disesuaikan dengan jam kuliah dosen.

Ditinjau dari jam kegiatan ini hanya menempuh waktu antara 32 – 64 jam kuliah untuk pemenuhan 2 – 4 SKS sehingga keterlibatan mencapai jumlah 20 SKS memerlukan jam kegiatan yang relatif besar. Untuk itu, perlu ditinjau kembali dan disederhanakan pencapaian 20 SKS/semester dalam pemenuhan kebijakan kampus. Rekognisi memang bisa dilakukan untuk mencapai 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun, tetapi itu juga diperkirakan akan memberatkan beban mahasiswa dan dosen pembimbing. Perluasan mata kuliah melalui rekognisi memerlukan sistem, baik di dalam maupun di luar prodi/kampus, yang akan mengarahkan pilihan dan panduan mahasiswa dan dosen.

6. Perlu adanya penjaminan mutu terkait dengan pengembangan kompetensi dalam pelaksanaan Permendikbud No. 3/2020 mengenai program pilihan: (1) pertukaran pelajar, (2) magang/praktik kerja, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) penelitian/riset, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independen, dan (8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
7. Perlu adanya aturan terbaru beban dosen sesuai dengan perubahan kurikulum dari penerapan kebijakan Kampus Merdeka, terutama pemenuhan hak belajar mahasiswa tiga semester belajar di luar kampus;
8. Perlu pengembangan sistem yang lebih sistematis, jelas, dan terarah untuk penerapan pertukaran pelajar antarprodi, baik di dalam maupun di luar kampus (dengan perguruan tinggi lain).
9. Perlu sosialisasi meluas dan pemahaman melalui pembuatan MOU antara pihak Kemendikbud, PT, pemerintah daerah dengan pihak eksternal (terutama DUDI, instansi/lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya) mengenai hak belajar mahasiswa dua semester di luar prodi di luar kampus agar pelaksanaannya oleh prodi dapat memperoleh kelancaran dan dukungan dari mereka.
10. Penerapan otonomi perguruan tinggi, khususnya dalam membina hubungan dengan lembaga dan universitas bereputasi internasional dan penentuan kompetensi program pilihan Kampus Merdeka oleh setiap PT.

DAFTAR PUSTAKA

- BAN PT (2012). 2012. *Borang akreditasi*, Jakarta: BAN PT.
- BAN PT (2018). *Persebaran akreditasi PT dan program studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Bargh, Catherine dkk. 199. *Governing Universities: Changing the culture*. Bristol USA: The Society for Research Into Higher Education & Open University Press.
- Brady. (1997). *Curriculum development*. Australia: Impact printing, Brunswick.
- Claudia, F (2020). Division of work in management: Definition & explanation, Chapter 7, Lesson 24. <https://study.com/academy/lesson/division-of-work-in-management-definition-on-lesson-quiz.html>
- <http://www.uin-suska.ac.id/index.php/pengumuman1/43-kurikulum-harus-mengikuti-perkembangan-dunia>
- Jarvis, P. (2002). *Universities and corporate university: The higher learning industry in global society*, London: Print and Design (Wales) Ebbw Vale.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen akreditasi perguruan tinggi.

Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum.

Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Permendikbud No. 6 Tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri.

Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

Permendikbud No. 88 Tahun 2014 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum.

Scott, P. (2000). *Higher education re-formed*. London and New York: Falmer Press.

Schein, E. H. (2004). *Organizational culture and leadership*. San Fransico: Jossey-Bass publishers.

Sukirman, H. (2000). *Manajemen tenaga pendidikan*. Yogyakarta: FIP UNY.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi.

Warner, D., David, P. (1996). *Higher education management: The key elements*. Bristol USA: The Society for Research Into Higher Education & Open University Press.

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING DI PERGURUAN TINGGI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Sarwanto, Trisno Martono, Salman Alfarizi Totalia, Dwi Maryono, Fairusy Fitria Haryani
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Abstrak. Sejak pandemi COVID-19 di Indonesia, perguruan tinggi mengubah pembelajaran tatap muka menjadi daring. Namun, disparitas pendidikan tinggi di Indonesia dalam menjalankan pembelajaran daring sangat besar, baik dari kondisi geografis maupun sistem pengelolaan pembelajaran daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil, indikator pembentuk dan perbedaan efektivitas pembelajaran daring perguruan tinggi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *mix method* dengan menggunakan metode *neuroresearch* terhadap 201 dosen dan 1.983 mahasiswa di 18 pendidikan tinggi melalui survei daring dan wawancara dengan dosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19 telah terjadi perubahan pada perilaku pembelajaran, perubahan capaian pembelajaran mata kuliah, dan proses penilaiannya. Berdasarkan keadaan ini, mahasiswa, dosen, kaprodi dan dosen dapat menerima kondisi yang ada sehingga menilai proses pembelajaran daring yang efektif. Faktor pembentuk efektivitas tersebut adalah penguasaan kemampuan informatika, ketersediaan pedoman penilaian, pedoman penyusunan RPS, sertifikasi dosen, jenis publikasi dan beban kerja dosen. Selain itu, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dari segi geografis, kelembagaan dan klaster perguruan tinggi. Pembelajaran daring tersebut mengalami kendala yang beragam, baik dari segi kesiapan sistem, kondisi geografis, profil dosen maupun mahasiswa. Upaya yang bervariasi dilakukan sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk kebijakan pembelajaran daring dan capaian pembelajaran tetap dapat tercapai.

Kata kunci : efektivitas, pembelajaran daring, perguruan tinggi, pandemi COVID-19

A. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia pada awal Maret 2020. Sampai saat ini (28 November 2020) telah mencapai 527.999 orang yang terkonfirmasi positif dan sebesar 13,1% di antaranya masih tergolong kasus aktif (Satgas Penanganan COVID-19, 2020). Dampak pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia (Herliandry, Nurhasanah, Suban, Kuswanto, 2020). Salah satunya dalam aspek pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, yaitu perubahan pola pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan (daring).

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media internet (Putria, Maula, dan Uswatun, 2020). Riyana (2019) menambahkan bahwa pembelajaran daring lebih menekankan aspek penerimaan dan pengolahan informasi peserta didik secara *online*. Pembelajaran daring membawa suasana baru bagi peserta didik sehingga mampu meningkatkan antusiasnya dalam belajar (Sari, 2015). Perpaduan teknologi dan berbagai inovasi merupakan ciri dari pembelajaran *online* (Banggur dkk. 2018).

Peraturan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi telah diatur melalui UU Nomor 12 Tahun 2012 dan ditindaklanjuti dengan Permendikbud No 109 Tahun 2013. Pelaksanaan pembelajaran daring juga menjadi salah satu aspek penilaian dalam klasterisasi perguruan tinggi pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring di perguruan tinggi pada hakikatnya telah dikembangkan jauh sebelum pandemi COVID-19. Platform berbasis moodle telah banyak digunakan sebelumnya oleh perguruan tinggi sebagai media sistem pembelajaran daring (spada). Meskipun demikian, kajian *e-learning* sebelum masa pandemi COVID-19 terkait dengan pemanfaatan kegiatan *asynchronous* dalam mengatasi berbagai keterbatasan selama pembelajaran tatap muka di kelas (Edy, 2011; Agustina, 2013). Berbeda halnya dengan kondisi pandemi COVID-19, *e-learning* merupakan satu-satunya solusi yang ditawarkan dan wajib dilaksanakan oleh semua pemangku pendidikan dalam proses pelaksanaan pembelajaran.

Pembelajaran daring sangat bergantung pada ketersediaan dan kelancaran jaringan internet (Riyanda, dkk. 2020). Akibat indeks pembangunan sarana dan prasarana terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berbeda-beda pada wilayah geografis di Indonesia, hal ini jelas akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. Pembelajaran daring juga tidak dapat dilepaskan dari media dan *platform* teknologi informasi, dan berpengaruh terhadap layanan pembelajaran (Anhusadar, 2020). Permasalahan terkait dengan kesiapan pengelolaan *platform e-learning*, baik dari profil perguruan tinggi maupun profil dosen, juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan proses pembelajaran daring. Oleh karena itu, disparitas pendidikan tinggi di Indonesia dalam menjalankan pembelajaran daring sangat besar.

Meskipun pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring selama masa pandemi COVID-19, kualitas pendidikan di perguruan tinggi tetap harus mengutamakan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui pembelajaran yang efektif (Ko dkk. 2016). Pendidikan tinggi di wilayah Indonesia bagian barat menekankan pembelajaran efektif dan mengevaluasi seberapa efektif proses pembelajaran tersebut (Chen, 2017). Evaluasi tersebut perlu dilakukan secara rutin untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya (Watkins, dkk, 2007; Rohmawati, 2015). Proses pembelajaran dikatakan efektif jika dapat membangkitkan kegiatan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif mengacu pada indikator yang dikembangkan oleh *Council for Accreditation of Educator Preparation* (CAEP) terdiri atas: pengetahuan substansi materi, rencana pembelajaran, penyajian materi, lingkungan belajar, penilaian, dan profesionalisme.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana profil kecenderungan kondisi efektivitas pembelajaran daring perguruan tinggi di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19; (2) indikator apakah yang menentukan terbentuknya kondisi efektivitas pembelajaran daring perguruan tinggi di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19; dan (3) apakah ada perbedaan efektivitas pembelajaran daring di perguruan tinggi dalam masa pandemi di Indonesia ditinjau dari geografis PT, kelembagaan PT, dan klaster PT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis profil efektivitas pembelajaran daring perguruan tinggi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19; (2) menganalisis indikator pembentuk efektivitas pembelajaran daring perguruan tinggi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19; dan (3) menganalisis perbedaan efektivitas pembelajaran daring perguruan tinggi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan dan wawasan terkait dengan efektivitas pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 di perguruan tinggi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi pembuat kebijakan, tetapi juga pelaksana kebijakan, seperti perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 di perguruan tinggi.

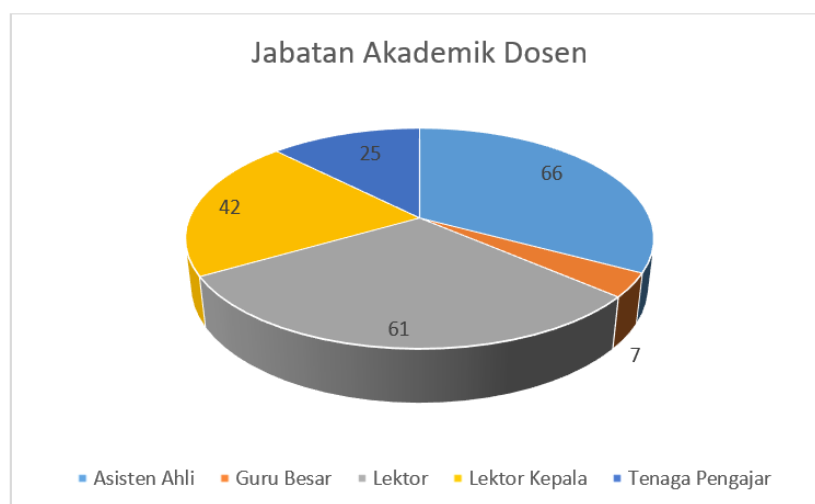
B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* dan metode *neuropsychology*. Dengan menggunakan metode ini data kuantitatif dari hasil survei terhadap responden dianalisis secara eksploratori, eksplanatori, dan konfirmatori. Survei dilakukan secara daring terhadap 201 dosen dan 1.983 mahasiswa yang tersebar di 18 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di berbagai wilayah di Indonesia (Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Nusa Tenggara) dan dari keempat klaster. Penentuan klaster tersebut menjadi penting karena salah satu penentuannya didasarkan pada mata kuliah yang disajikan dalam sistem pembelajaran daring (spada). Selain menggunakan survei daring, teknik pengumpulan data lainnya berupa wawancara terhadap penjamin mutu, pimpinan program studi, dan dosen pengampu mata kuliah pada empat perguruan tinggi yang mewakili tiap klaster. Variabel dalam penelitian ini efektivitas pembelajaran daring dengan enam indikator, yaitu pengetahuan substansi materi, rencana pembelajaran, penyajian pembelajaran, lingkungan belajar, penilaian, dan profesionalisme. Variabel moderat penelitian ini adalah letak geografis PT, kelembagaan, dan klaster.

Data yang diperoleh melalui survei selanjutnya dikelola, diolah, kemudian dianalisis. Analisis kualitatif dilakukan terhadap hasil survei pembelajaran daring di semua PT di Indonesia (eksploratori) untuk menjawab rumusan masalah pertama. Analisis kuantitatif dengan analisis jalur dari ekspektasi antardimensi dilakukan untuk mendapatkan pengaruh terhadap efektivitas pembelajaran daring. Pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi *editing* (pengecekan dan penyesuaian data sesuai dengan tujuan), *coding* (pemberian tanda berupa value), *scoring* (konversi data kualitatif ke skor), dan *tabulating* (menyajikan data dalam bentuk tabel). Setelah data tertata dengan baik, dilanjutkan pengolahan data dengan menggunakan *software* SPSS yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji persyaratan analisis. Uji persyaratan analisis meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk mendapatkan faktor yang memengaruhi efektivitas pembelajaran daring digunakan analisis regresi ordinal.

C. Hasil dan Pembahasan

Survei dalam penelitian melibatkan dosen dari delapan belas PT dengan jabatan akademik dari tenaga pengajar sampai sampai guru besar dengan distribusi sebagaimana disajikan dalam Gambar 1. Distribusi ini sebanding dengan distribusi dosen di Indonesia bahwa sebagian besar dosen di Indonesia memiliki jabatan akademik lektor.



Gambar 1 Distribusi Dosen Responden Berdasarkan Jabatan Akademik

Selain jabatan akademik, survei yang dilakukan ini juga ditinjau berdasarkan pengalaman mengampu mata kuliah, pendidikan terakhir, kepemilikan publikasi, pelatihan pembelajaran yang pernah diikutinya, adanya pedoman penyusunan RPS, sosialisasi RPS, pelatihan pembelajaran daring, usia, penguasaan IT, *platform e-learning*, peraturan pembelajaran daring, panduan penilaian, lamanya menjadi dosen, beban kerja dosen, sertifikasi dosen, dan status dosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang dapat digunakan untuk menentukan kategori keefektifan pembelajaran daring meliputi penguasaan IT (0,001), jabatan akademik (0,027), pelatihan pembelajaran daring (0,018), pedoman penyusunan RPS (0,017), dan sertifikasi dosen (0,014).

Tiga faktor yang diduga memengaruhi efektivitas pembelajaran daring adalah faktor geografis PT, kelembagaan PT, dan klaster PT. Hasil analisis ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan efektivitas pembelajaran daring dari ketiga faktor ini pada saat menghadapi pandemi Covid-19. Dari hasil di atas, tidak ada perbedaan keefektifan pembelajaran daring antar perguruan tinggi dilihat dari kelembagaan (0,509), akreditasi perguruan tinggi (0,819), dan klaster perguruan tinggi (0,678).

Pengampunan mata kuliah yang lebih dari satu mata kuliah mengakibatkan efektivitas perkuliahan bervariasi antara satu mata kuliah dan mata kuliah yang lain. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan skor efektivitas pembelajaran seorang dosen yang mengampu lebih dari satu mata kuliah.

Tabel 1 Efektivitas Pembelajaran Dosen yang Mengampu Mata Kuliah

Dosen	MK 1	MK 2	MK 3	MK 4
A	90,55	88,33	82,77	67,77
B	97,22	86,6	82,77	
C	81,14	75,5		

Hasil ini menunjukkan semakin banyak mengampu mata kuliah, selisih efektivitas perkuliahan juga semakin jauh. Sebaiknya perlu dilakukan batasan jumlah pengampunan mata kuliah dosen, tidak hanya dibatasi oleh batas bawah (12 SKS), tetapi juga oleh batas atasnya (16 SKS).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19 telah terjadi perubahan pada perilaku pembelajaran, perubahan capaian pembelajaran mata kuliah, dan proses penilaiannya. Berdasarkan keadaan ini, mahasiswa, dosen, kaprodi, dan dosen dapat menerima kondisi yang ada sehingga menilai proses pembelajaran daring yang efektif. Faktor pembentuk efektivitas tersebut adalah penguasaan kemampuan informatika, ketersediaan pedoman penilaian, pedoman penyusunan RPS, sertifikasi dosen, jenis publikasi dan beban kerja dosen. Selain itu, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dari aspek geografis, kelembagaan dan klaster perguruan tinggi. Pembelajaran daring tersebut mengalami kendala yang beragam, baik dari segi kesiapan sistem, kondisi geografis, profil dosen, maupun mahasiswa.

Penyamaan persepsi merupakan poin awal dalam menyiapkan pembelajaran daring yang efektif selama masa pandemi COVID-19 di perguruan tinggi. Pembelajaran daring tidak hanya sekadar memindahkan pembelajaran tatap muka (konvensional) ke dalam pertemuan *online* atau hanya sekadar materi diberikan dalam bentuk PPT, kemudian dengan pemberian tugas kepada mahasiswa. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang mampu menciptakan interaksi antara pendidik dan peserta didik melalui jaringan internet (Kuntarto, E, 2017; Rabiha dkk. 2018; Sadikin & Hamidah, 2020). Interaksi tersebut dapat dilakukan secara langsung/*synchronous* dan secara tidak langsung/*asynchronous* (Rosali, 2020). *Synchronous* memungkinkan adanya interaksi secara langsung antara pendidik (dosen) dan peserta didik (mahasiswa) atau proses pembelajaran diakses secara bersamaan (Briliannur dkk. 2020).

Kegiatan *asynchronous* dapat dilakukan dengan memberikan materi kepada peserta didik yang bisa dipelajari secara mandiri (Suranto, 2009). Artinya, kegiatan *asynchronous* menawarkan keleluasaan waktu atau lebih fleksibel karena tidak harus secara bersamaan mengakses internet dan bersifat mendukung kegiatan *synchronous*. Selain itu, pembelajaran daring juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses dan perluasan pendidikan (Argahaeni, 2020). Namun, dalam pelaksanaannya pertemuan *online* atau *synchronous* dilakukan setiap pertemuan. Apabila terdapat 16 kali pertemuan dalam satu mata kuliah, artinya terdapat 16 kali pertemuan *online* dengan *zoom* atau *google meet*. Selain itu, akibat pembelajaran *online* yang bersifat fleksibel dalam hal waktu dan tempat, pertemuan *online* atau diskusi serta tugas yang diberikan melebihi batas ketentuan jumlah SKS yang diambil mahasiswa. Sari (2020) mengungkapkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami stress akibat kesulitan memahami materi secara daring. Menurut Argahaeni (2020), pemberian banyak tugas akan membuat mahasiswa kewalahan mengikuti pembelajaran daring. Hal ini semakin menguatkan perlunya penyamaan konsep mengenai pembelajaran daring. Jumlah kegiatan *synchronous* dan *asynchronous* harus proporsional dan disesuaikan dengan konten mata kuliah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi adalah melalui kebijakan dan pedoman terkait dengan mekanisme pelaksanaan pembelajaran daring. Perguruan tinggi di klaster 1 dan 2 mengeluarkan batasan mengenai jumlah pertemuan *online* dengan *zoom* atau *google meet* yang wajib dilakukan selama pembelajaran *online*.

Pembelajaran di perguruan tinggi selama pandemi COVID-19 dilakukan oleh dosen telah mengubah perilaku pembelajaran dosen dan mahasiswa. Memang sebelum datangnya pandemi COVID-19, Pemerintah telah membuat kebijakan sistem pembelajaran dalam jaringan (SPADA), tetapi perkembangannya tidak optimum. Pembelajaran *blended learning* tetap menjadi pilihan utama, apalagi berdasarkan SN Dikti Tahun 2015 dan SN Dikti Tahun 2020 dalam standar proses pembelajaran masih tatap muka (Pasal 16). Sebagian perguruan tinggi menerjemahkan tatap muka ini adalah pertemuan fisik antara dosen dan mahasiswa (*face to face learning*). Peraturan ini dianggap menghambat keluarnya kebijakan *full online learning*. Bahkan, SN Dikti tidak menyinggung penggunaan *e-learning* atau *blended learning* dalam pembelajaran, padahal di lain pihak ada kebijakan menghadapi era industri 4.0. Bagaimanapun juga COVID-19 telah memicu perubahan proses pembelajaran luring menjadi daring, serta pembelajaran daring yang sudah mulai stabil di semester gasal tahun 2020/2021 sehingga standar proses pembelajaran perlu disesuaikan. Meskipun pandemi sudah berakhir, perguruan tinggi tetap akan melanjutkan proses pembelajaran daring sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran luring. Aturan SN Dikti mengenai pembelajaran daring ini akan mengikat dosen dalam melakukan proses pembelajaran.

Penggunaan sarana teknologi informasi dalam pembelajaran perlu standardisasi. Sampai saat ini standar sarana dan prasarana PT yang berkaitan dengan TI belum dikeluarkan oleh Dirjendikti sebagai amanah SN Dikti. Standardisasi ini sangat diperlukan oleh dosen dalam melakukan pembelajaran *online*.

Pengetahuan mengenai netiket (*netiquette*), baik bagi dosen maupun mahasiswa, juga perlu menjadi fokus dalam penentuan kebijakan dan pedoman pembelajaran *online*. Netiket adalah etika dalam melakukan komunikasi melalui jejaring (*network*) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial (Linek, 2018). Telah terjadi pergeseran etika dalam proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 dengan adanya kemudahan berkomunikasi melalui perangkat gadget. Beberapa dosen memberikan kuliah, padahal tanggal merah yang seharusnya libur, bahkan ada yang menggeser jadwal kuliah ke malam hari atau pagi hari di luar jadwal perkuliahan. Demikian juga mahasiswa, juga mengikuti bimbingan tugas akhir. Dibatasinya pertemuan antara dosen dan mahasiswa karena perintah di rumah saja. Salah satu cara komunikasi dalam bimbingan tugas akhir adalah menggunakan sosial media. Namun, kemudahan ini tidak diikuti dengan etika komunikasi dengan teknologi informasi (netiket), mahasiswa menghubungi dosen di luar jam wajar (di atas pukul 10 malam) atau menjelang fajar.

Interaksi dosen dan mahasiswa secara daring berbeda dengan luring. Etika dalam pembelajaran melalui teknologi informasi (netiket) masih belum dipatuhi oleh mahasiswa dan dosen. Banyak dosen dan mahasiswa meniggalkan begitu saja forum pembelajaran sebagai pertanda n etika netizen masih rendah. Kepatuhan dosen dalam pembelajaran, meskipun proses pembelajaran dapat dilakukan 24 jam, perlu dibedakan bagian mana yang *syncromus* dan *asynchronous*. Kompetensi pedagogik pembelajaran daring (*netpedagogy*) dan personal perlu didesain sebagai bagian dari standar kompetensi dosen.

Kepribadian (*personality*) dosen pada masa pandemi juga mengalami beberapa pergeseran dan pada umumnya dipisahkan dalam gradasi takut akan tertular dan berani karena patuh pada protokol kesehatan (Jeronimus, 2020). Dosen muda dengan imunitas yang baik sudah banyak beraktivitas di kampus, bahkan selama pandemi lebih sering bekerja di kampus. Dosen muda ini lebih banyak membantu prodi melaksanakan praktikum terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Dosen senior yang menyadari imunitasnya rendah lebih banyak melakukan pembelajaran dari rumah. Diperlukan waktu yang lama bagi dosen senior, khususnya yang memiliki penyakit tertentu (hipertensi, diabetes, asma, dan jantung), untuk kembali beraktivitas di kampus. Proses praktikum selama masa pandemi dapat dilakukan melalui kegiatan *asynchronous*. Kegiatan *asynchronous* dalam *e-learning* dapat mendorong mahasiswa untuk lebih memahami materi dengan cepat dan akurat dengan memanfaatkan animasi video atau simulasi (Clark, 2008). Kegiatan praktikum melalui *asynchronous* dilakukan melalui virtual laboratoium, praktikum mandiri, atau proyek individu lainnya yang minim interaksi antarmanusia. Saril dan Fahrullah (2020) mengungkapkan bahwa adanya sikap positif mahasiswa karena merasa mudah melaksanakan kuliah praktikum *online*. Selain itu, mahasiswa lebih leluasa mengelola materi praktikum secara kreatif dan mandiri (Retnaningsih, 2020). Selain itu, dengan menambahkan video untuk kegiatan praktikum mandiri dapat mempermudah peserta didik memahami prosedur kerja praktikum. Namun, kendala yang dialami adalah jika praktikum bertujuan untuk menghasilkan sampel tertentu di laboratorium khusus atau capaian pembelajarannya terkait dengan kemampuan kognitif tertentu, Atas dasar itu, beberapa perguruan tinggi mengeluarkan kebijakan dengan memperbolehkan praktikum di laboratorium untuk kondisi khusus, seperti penyelesaian tugas akhir atau praktikum untuk capaian pembelajaran tertentu.

Praktikum dapat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mengurangi jumlah kpengguna laboratorium menjadi setengahnya dan mengatur jadwal praktikum. Kebijakan tersebut tidak boleh kendur mengingat pernah terjadi klaster COVID-19 di laboratorium akibat mahasiswa yang masih dapat berinteraksi saat keluar masuk laboratorium.

Keluhan yang dialami mahasiswa pada hampir semua klaster perguruan tinggi adalah mengenai kuota internet. Pemerintah telah memberikan bantuan kuota internet bagi dosen dan mahasiswa melalui Peraturan Sekjen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020, tetapi masih banyak mahasiswa yang belum menerima bantuan kuota tersebut. Perguruan tinggi klaster 3 dan 4 menyatakan bahwa kendala yang dialami adalah mengenai mekanisme *input* data di perguruan tinggi masing-masing sehingga pembaruan data minim dilakukan. Oleh karena itu, perlu disediakan tempat aduan yang terpusat dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 dan respons yang cepat oleh perguruan tinggi dalam menyikapi kendala. Karena dosen juga berperan sebagai pembimbing akademik mahasiswa juga mengaku tidak mengetahui secara jelas penanggung jawab atau pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di perguruan tinggi. Artinya, sosialisasi penyampaian informasi terkait dengan kuota bantuan paket data Kemendikbud oleh perguruan tinggi belum dilakukan secara optimal. Ketidakjelasan ini mengakibatkan data pada PDDikti tidak *ter-update* dengan baik sehingga bantuan kuota belum diterima oleh mahasiswa. Selain itu, laman *website* yang digunakan dalam referensi belajar atau pengerjaan tugas tidak termasuk dalam daftar aplikasi atau situs bantuan data internet meskipun selama pelaksanaan pertemuan daring menggunakan situs *google classroom*, *zoom* atau LMS internal yang dikembangkan perguruan tinggi masing-masing. Rosali (2020), Jamaluddin, Ratnasih, Gunawa, Paujiah (2020) dan Sadikin dan

Hamidah (2020) mengungkapkan kendala yang dialami dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 adalah kuota internet dan jaringan yang tidak stabil, terutama di daerah pelosok. Selain itu, bagi sebagian mahasiswa tersebut, faktor keluarga juga menjadi kendala, yaitu ketidakpahaman orang tua dalam menyikapi kondisi pembelajaran daring. Sebagian besar orang tua yang berasal dari pelosok berprofesi sebagai petani atau peternak dan berpikir mahasiswa sedang berlibur atau tidak ada aktivitas perkuliahan saat mahasiswa berada di rumah sehingga banyak mahasiswa yang diminta membantu orang tuanya bekerja. Akibatnya, sebagian besar mahasiswa itu memutuskan untuk kembali ke kota dekat lokasi kampus supaya pembelajaran daring dapat diikuti dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kesungguhan dan kesiapan belajar mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran daring.

D. Kesimpulan

Proses pelaksanaan pembelajaran daring di perguruan tinggi menjadi salah satu solusi dalam memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa (1) efektivitas pembelajaran daring perguruan tinggi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 diukur berdasarkan korelasi ekspektasi antara dosen pengampu mata kuliah, kaprodi, dosen, dan mahasiswa. Meskipun pembelajaran pada masa pandemi Covid 19 penuh dengan keterbatasan, mahasiswa, dosen, dan kaprodi dapat menerima kondisi ini, Pembelajaran selama masa pandemi Covid 19 telah menumbuhkan kompetensi pedagogik daring (*netpedagogy*) dan kompetensi kepribadian baru (*netpersonality*), serta etika baru (*netiket*); (2) faktor yang menentukan terbentuknya kondisi efektivitas pembelajaran daring perguruan tinggi di Indonesia dalam masa pandemi covid-19 adalah penguasaan IT, ketersediaan pedoman penilaian, pedoman penyusunan RPS, sertifikasi dosen, jenis publikasi dosen, dan beban kerja dosen; (3) tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menentukan efektivitas pembelajaran daring di perguruan tinggi dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia ditinjau dari geografis PT, kelembagaan PT, dan kluster PT. Pada masa pandemi COVID-19 semua perguruan tinggi mengalami keadaan yang sama dan tidak mengantisipasi kejadian luar biasa ini sehingga tidak ada perbedaan efektivitas pembelajaran ditinjau dari profil PT. Upaya yang variatif dan responsif perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala selama proses pembelajaran. Kendala yang timbul tidak hanya dari segi kesiapan sistem *e-learning*, tetapi juga dari profil dosen dan mahasiswa.

E. Saran

Meskipun beberapa perguruan tinggi telah membuat kebijakan masing-masing dalam menyikapi pembelajaran secara daring, perlu adanya penyamaan persepsi mengenai konsep pembelajaran daring. Hal ini menyangkut netiket dan regulasi mekanisme pelaksanaan pembelajaran daring. Proporsionalitas terkait dengan kegiatan sinkronos dan asinkronos dalam proses pembelajaran daring juga perlu diatur dengan baik supaya tidak terjadi tumpang tindih beban dosen dan mahasiswa. Kemampuan IT dalam pengelolaan *e-learning* menjadi wajib untuk terus dikembangkan. Di samping itu, pembatasan pengampuhan mata kuliah dapat menjadi pertimbangan untuk beban kerja, mengingat semakin banyak jumlah mata kuliah dan efektivitas perkuliahan juga menurun. Berbagai *platform* yang disediakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh dosen supaya model pembelajaran daring yang dilakukan lebih variatif. Oleh karena itu, pelatihan dosen tidak hanya dalam hal pengelolaan sistem *e-learning*, tetapi model dan media pembelajaran yang inovatif dan mampu mengoptimalkan proses pembelajaran. Respons cepat, tanggap, dan pelayanan terpadu terkait dengan aduan selama proses pembelajaran daring perlu diupayakan oleh perguruan tinggi dan pemerintah. Materi yang lebih bersifat teoretis dapat dilakukan secara penuh dengan pembelajaran daring dan dengan pilihan

kegiatan yang bervariasi. Materi yang lebih bersifat praktis sebagian dapat dilakukan melalui virtual laboratorium atau dengan model pembelajaran berbasis proyek dengan melibatkan unsur di sekitar lokasi mahasiswa dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Namun, sebagian materi yang bersifat praktis yang melibatkan kemampuan kognitif dan *skill* dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium atau studi kesehatan akan sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, regulasi ketat terkait dengan pelaksanaannya perlu disusun supaya capaian pembelajaran dapat tetap terlaksana dengan baik. Demikian juga dengan SN Dikti tentang standar proses pembelajaran dan sarana prasarana perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan sesudah masa pandemi COVID-19 berakhir. Kompetensi sosial, kepribadian, dan pedagogik dosen perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kebiasaan baru (*new normal*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. (2013). *Pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta 15 Juni 2013, 9-12.
- Anhusadar, L. O. (2020). Persepsi mahasiswa PIAUD terhadap kuliah *online* di masa pandemi. *Kindergarten: Journal of Islamic Early Childhood Education*. Vol 3 no (1), hal 44 – 58
- Argahaeni, N.B. (2020). Sistematis review: Dampak perkuliahan daring saat pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa Indones. *Placenum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*. 8(2), 99 – 108
- Banggur, M. D. V., Situmorang, R., & Rusmono. (2018). Pengembangan pembelajaran berbasis blended learning pada mata pelajaran etimologi multimedia. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 20(2), 152–165
- Brillianur, D.D, Amelia, A., Hasanah, U., Putra, A.M., Rahman, H. (2020). Analisis keefektifan pembelajaran *online* di masa pandemi COVID-19. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1), 28-37
- Chen, Yaoyuan, (2017), The application of effective teaching theory in higher education, *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 13 (12), 8185 – 8191
- Edy, I. C. (2010). *Studi pemanfaatan web site e- learning dan pengaruhnya terhadap motivasi, kinerja dan hasil belajar pada guru dan siswa SMK di Provinsi Jawa Tengah*
- Heliandry, L.D., Nurhasanah, Suban, M.E., & Kuswanto, H. (2020) Pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 22(1). 65-70
- Jamaluddin, D., Ratnasih, T., Gunawan, H., & Paujiah, E. (2020). Pembelajaran daring masa pandemik COVID-19 pada calon guru: Hambatan, solusi, dan proyeksi. Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1–10.
- Jerominus, B.F. (2020). *Personality and the Coronavirus COVID-19 pandemic*. University of Groningen Press. <https://www.doi.org/10.21827/5ed9ebc01d65f>
- Ko, J, Sammons, Pamela & Bakkum, L. (2016). Oxford University Department of Education. *Effective Teaching*. Highbridge House: Education Development Trust
- Kuntarto, E. (2017). Keefektifan model pembelajaran daring dalam perkuliahan Bahasa Indonesia di perguruan tinggi. *Indonesian Language Education and Literature (ILEaL)*, 3(1), 99-110
- Linek, SB; Ostemari-Grabow, A. (2018) Netiquette between students and their lecturers on facebook: injunctive and descriptive social norms. *Sosial Media + Society*, 4(3) DOI [2056305118789629](https://doi.org/10.20563/05118789629)

- Putria, H., Maula, L.H, & Uswatun, D.A. (2020) Analisis proses pembelajaran dalam jaringan masa pandemi COVID-19 pada guru sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4) 861--872.
- Riyana, C. (2019). *Produksi Bahan Pembelajaran Berbasis Online*. Universitas Terbuka.
- Riyanda, AR. Herlina, K, Wicaksono. (2020). Evaluasi implementasi sistem pembelajaran daring Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. *Ikra-Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 66-71
- Retnaningsih, R. (2020). E-Learning system sebuah solusi pragmatis program vokasional semasa pandemi COVID-19. *Jurnal Taman Vokasi*, 8(1), 28-34
- Rohmawati, A. (2015). Efektivitas pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 9(1), 15-32.
- Rosali, E.S. (2020). Aktivitas pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. *Geography Science Education Journal (GEOSEE)*, 1(1). 21 – 30
- Sadikin, A. & Hamidah, A. (2020). Pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi (Biodik)*, 6 (2), 214 – 224
- Sari, P. (2015). Memotivasi belajar dengan menggunakan elearning. *Jurnal Ummul Quro*, 6(2), 20-35
- Sari, M.K. (2020). *Tingkat stress mahasiswa S1 keperawatan tingkat satu dalam menghadapi wabah Covid 19 dan perkuliahan daring di STIKES Karya Husada Kediri*.
- Rabiha, S.G., Yossy, E.H, Sasmoko, Widhoyoko, S.A., & Indrianti, Y. (2018). Desain aplikasi e-learning sasmoko.com. *SYSTEMIC: Information System and Informatics Journal*, 4(2), 18-23
- Suranto, B. (2009). *Virtual classroom: Strategi pembelajaran berbasis synchronous e-learning*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi dan Informasi 2009, Yogyakarta 20 Juni 2009, 78- 86
- Watkins, C., Carnell, E., & Lodge, C. (2007). *Effective learning in classrooms*. Paul Chapman Educational Publishing

STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

C.D. Fajarini, Parwanto, Romeyn, Khairur Raziqin
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi kebutuhan biaya operasional pendidikan tinggi; (2) mengidentifikasi sumber pembiayaan pendidikan tinggi; dan (3) merumuskan strategi pembiayaan pendidikan tinggi. Terkait dengan kondisi pandemi Covid 19, Kemendikbud menetapkan kebijakan keringanan biaya UKT untuk mahasiswa PTN yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, antara lain: (1) mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil SKS sama sekali; (2) mahasiswa pada masa akhir kuliah hanya membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil sebanyak atau kurang dari 6 SKS dengan ketentuan semester 9 bagi mahasiswa S-1 dan D-4, serta semester 7 bagi mahasiswa D-3. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif, populasi semua PTN dan PTS di seluruh Indonesia dengan sampel PTN dan PTS terakreditasi A dan B, umum, dan vokasi. Data primer dikumpulkan melalui diskusi dengan narasumber, sedangkan data sekunder berupa dokumen pembiayaan pendidikan tinggi PTN dan PTS sampel. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis komparatif antarberbagai variasi pembiayaan. Hasil kajian ini adalah besaran biaya operasional dan sumber pembiayaan pendidikan tinggi yang bervariasi antarpendidikan tinggi sesuai dengan kondisi setiap pendidikan tinggi, baik PTN maupun PTS. Strategi penggalan dana dilakukan melalui UKT/SPP dari mahasiswa, kerja sama antarperguruan tinggi, kerja sama penelitian, dan kerja sama dengan DUDI.

Kata kunci: biaya operasional, sumber pembiayaan, strategi penggalan dana

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk mencapai suatu tingkatan dalam hidup. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap orang sehingga semua orang bisa mengenyam pendidikan yang semestinya. Pendidikan selalu ada di semua negara sebab pendidikan adalah jalan utama untuk memajukan kehidupan generasi penerus bangsa.

Pendidikan tinggi di Indonesia adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (PPRI no 4 Tahun 2014). Menurut Albatch (1989), pendidikan tinggi menjadi sangat penting karena di situlah individu ditempa menjadi seorang profesional pada banyak bidang, berbagai macam ilmu dihasilkan dan dikembangkan, sekaligus tempat berbagai macam dinamika bangsa dimulai. Oleh karena itu, negara-negara di dunia menaruh perhatian khusus untuk terus meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia karier serta menyiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dan hidup dengan baik di dalam masyarakat. Sistem pendidikan tinggi diharapkan mampu memudahkan seseorang menuntut pendidikan tinggi sesuai dengan bakat, minat, dan tujuannya meskipun dengan tetap mempertahankan persyaratan pendirian program studi yang bersangkutan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, telah mencetuskan kebijakan Merdeka Belajar, bukan hanya tertuju pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga pendidikan tinggi. Kebijakan Merdeka Belajar pendidikan tinggi ini meliputi empat kebijakan pokok, yaitu (1) pembukaan program studi baru; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi; (3) perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH); dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendikbud dapat merupakan angin segar dan terobosan pemikiran yang perlu dijabarkan dan dioperasionalkan lebih lanjut oleh perguruan tinggi, tidak hanya untuk menciptakan dan menyerap lulusan perguruan tinggi, tetapi juga menjawab tantangan global yang membutuhkan sumber daya manusia (khususnya tenaga kerja) yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dengan mengusung Kebijakan Merdeka Belajar, penyelenggaraan pendidikan tinggi membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan proses belajar, baik biaya operasional maupun biaya investasi.

Pengaturan pendanaan pendidikan tinggi yang tertuang dalam UU No.12 Tahun 2012 pada Bab V, Pasal 83--Pasal 89 meliputi: (1) tanggung jawab dan sumber pendanaan pendidikan tinggi; dan (2) pembiayaan dan pengalokasian. Sumber dana pendidikan tinggi dapat berasal dari: (a) APBN, (b) APBD, (c) masyarakat, (d) perguruan tinggi, dan (e) mahasiswa. Pada pengalokasian dana, Pasal 89 ayat (1) menyebutkan bahwa dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:

1. PTN, sebagai biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Anggaran untuk PTN dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN dan/atau APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk PTN-BH diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN-BH diatur dalam peraturan pemerintah. Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan. Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana operasional tersebut untuk penelitian di PTN dan PTS. Dana penelitian yang dimaksud, dikelola oleh Kementerian.
2. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan professor, serta investasi dan pengembangan. Anggaran untuk PTS dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN dan/atau APBD dalam bentuk, antara lain hibah, bantuan program kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain bantuan pendanaan, PTS dapat memperoleh bantuan tenaga dosen yang diangkat oleh Pemerintah.
3. mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi. Dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi bagi mahasiswa dapat diberi dalam bentuk beasiswa, bantuan, atau membebaskan biaya pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga.

Pendanaan PTN Badan Hukum (PTNBH) tertuang dalam PPRI 26 Tahun 2015, yaitu penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi oleh PTNBH. Pendanaan PTNBH dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan selain APBN. Pendanaan PTNBH yang bersumber dari APBN diberikan dalam bentuk bantuan Pendanaan PTNBH dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan bantuan pendanaan PTNBH berupa subsidi yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Bantuan pendanaan PTNBH tersebut dialokasikan dalam APBN setiap tahun anggaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Bantuan Pendanaan PTNBH ini merupakan penerimaan PTNBH yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang digunakan untuk mendanai: biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan. Selain itu, pendanaan PTNBH yang bersumber dari selain APBN dapat

bersumber dari: a. masyarakat; b. biaya pendidikan; c. pengelolaan dana abadi; d. usaha PTN Badan Hukum; e. kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi; f. pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum; g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau h. pinjaman.

Dalam rangka menggali dana penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu dilakukan penelitian untuk menggali berbagai sumber dana dan merumuskan strategi pembiayaan pendidikan tinggi agar dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh strategi pembiayaan pendidikan tinggi, yang dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan biaya operasional pendidikan tinggi; mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan pendidikan tinggi; dan merumuskan strategi pembiayaan pendidikan tinggi. Ruang lingkup penelitian ini adalah pembiayaan operasional pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta, khususnya biaya operasional dalam proses pembelajaran.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan biaya operasional dan sumber pendanaan pendidikan tinggi dari beberapa perguruan tinggi yang bervariasi berdasarkan status pendidikan tinggi (negeri dan swasta), status akreditasi, dan jenis pendidikan tinggi. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi penggalan dana pendidikan tinggi.

Fokus penelitian ini akan menelaah strategi pendidikan tinggi dalam menggali sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya biaya operasional dalam proses pembelajaran. Data penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa pendapat narasumber terkait dengan strategi pembiayaan pendidikan tinggi. Data sekunder berupa data kebutuhan biaya operasional pendidikan tinggi dari perguruan tinggi sampel, baik negeri maupun swasta, khususnya kebutuhan biaya operasional dalam proses pembelajaran. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara diskusi dengan narasumber yang kompeten terkait dengan pendanaan pendidikan tinggi. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengkaji dokumen pembiayaan pendidikan tinggi dari berbagai lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, serta analisis komparatif antara berbagai macam variasi pembiayaan pendidikan tinggi sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid 19. Hasil analisis didukung dengan menggunakan tampilan tabel dan grafik. Dalam rangka melengkapi kebutuhan analisis, penelitian ini juga akan memperhatikan masukan dan informasi dari pihak yang berkepentingan dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi, baik dari perguruan tinggi sendiri, pemerintah, serta pihak terkait dengan lainnya dengan menggunakan bantuan media daring.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari 6 perguruan tinggi yang terdiri atas 3 perguruan tinggi negeri dan 3 perguruan tinggi swasta diperoleh gambaran tentang profil keenam perguruan tinggi sampel, kebutuhan biaya operasional, sumber pendanaan, dan strategi penggalan dana untuk membiayai kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya biaya operasional proses pembelajaran.

1. Biaya Operasional

Biaya perguruan tinggi (PT) terdiri atas 1) biaya nonsumbu daya manusia (non-SDM), 2) biaya SDM, dan 3) biaya operasional. Biaya non-SDM terdiri atas empat variabel, yaitu 1) biaya kelas, 2) biaya

laboratorium/studio/bengkel/lapangan, 3) biaya tugas akhir/skripsi, dan 4) biaya bimbingan konseling dan kemahasiswaan. Biaya SDM terdiri atas 12 variabel, yaitu 1) biaya kuliah tatap muka, 2) biaya UTS dan UAS, 3) biaya tutorial, 4) biaya tugas, kuis, 5) biaya praktikum laboratorium/praktik bengkel/tugas gambar/desain, 6) biaya praktik lapangan/kerja praktik/magang, 7) biaya kuliah kerja nyata, 8) biaya tugas akhir/skripsi, 9) biaya ujian komprehensif, 10) biaya seminar proposal, sidang skripsi/ujian tugas akhir, 11) biaya wisuda, dan 12) biaya bimbingan akademik. Biaya operasional terdiri atas lima variabel, yaitu 1) biaya orientasi mahasiswa baru, 2) biaya pengembangan diri mahasiswa dan dosen, 3) biaya administrasi umum seperti gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional, 4) biaya pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana, seperti pemeliharaan/perbaikan gedung, jalan lingkungan kampus dan peralatan, bahan bakar generator dan angkutan kampus, dan utilitas (air, listrik, telepon) langganan *bandwidth* koneksi internet ; 5) biaya pengembangan institusi, dan 6) biaya operasional lainnya.

PT yang dibahas adalah PT negeri dan PT swasta. PT negeri yang tersedia datanya ada tiga, yaitu Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Bengkulu (UNIB). Demikian juga PT swasta yang tersedia datanya adalah Universitas Bina Nusantara (Ubinus), Universitas Bina Insani (UBI), dan Politeknik Lembaga Pendidikan, Pengembangan dan Profesi Indonesia (LP3I).

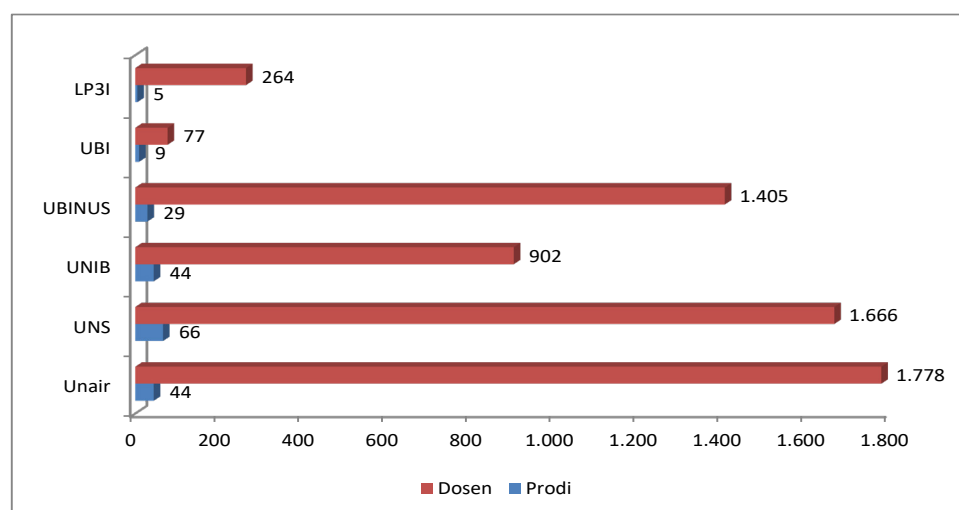
Pembahasan diawali dengan data program studi (prodi), perkembangan jumlah mahasiswa, dan jumlah dosen tetap pada tahun 2020. Selanjutnya, dibahas setiap perkembangan biaya dan indikator tiga PT negeri dan perkembangan biaya dan indikator tiga PT swasta serta perbandingan biaya antara tiga PT negeri dan tiga PT swasta.

Data prodi, perkembangan mahasiswa, dan dosen tetap digunakan untuk menghitung tiga indikator, yaitu 1) rasio biaya terhadap prodi, 2) rasio biaya terhadap mahasiswa, dan 3) rasio biaya SDM terhadap dosen tetap.

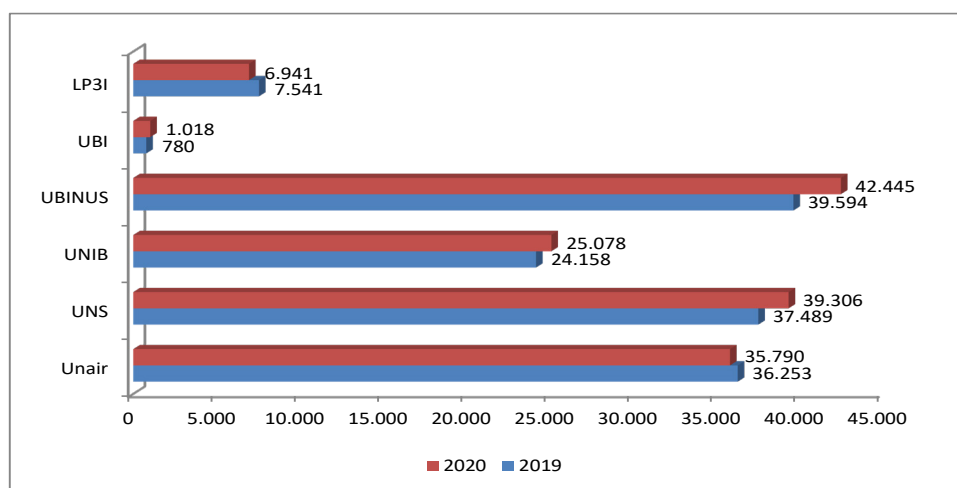
a. Program Studi, Mahasiswa, dan Dosen Tetap

Berdasarkan Grafik 1, dari 3 PT negeri, prodi terbesar pada UNS sebesar 66 dan terkecil adalah Unair dan UNIB masing-masing sebesar 44. Untuk 3 PT swasta, prodi terbesar pada Ubinus sebesar 29 dan terkecil adalah LP3I sebesar 5. Bila dilihat 6 PT, prodi terbesar juga UNS sebesar 66 dan terkecil adalah Politeknik LP3I sebesar 5. Namun, dosen tetap 3 PT negeri terbesar pada Unair sebesar 1.778 orang dan terkecil pada UNIB sebesar 902 orang. Dosen tetap 3 PT swasta terbesar pada Ubinus sebesar 1.405 orang dan terkecil pada UBI sebesar 77 orang. Bila dilihat 6 PT, dosen tetap terbesar pada Unair sebesar 1.778 orang dan terkecil adalah UBI sebesar 77 orang.

Grafik 1 Jumlah Program Studi dan Dosen Tetap di 6 PT Tahun 2020



Grafik 2 Perkembangan Jumlah Mahasiswa di 6 PT Tahun 2020

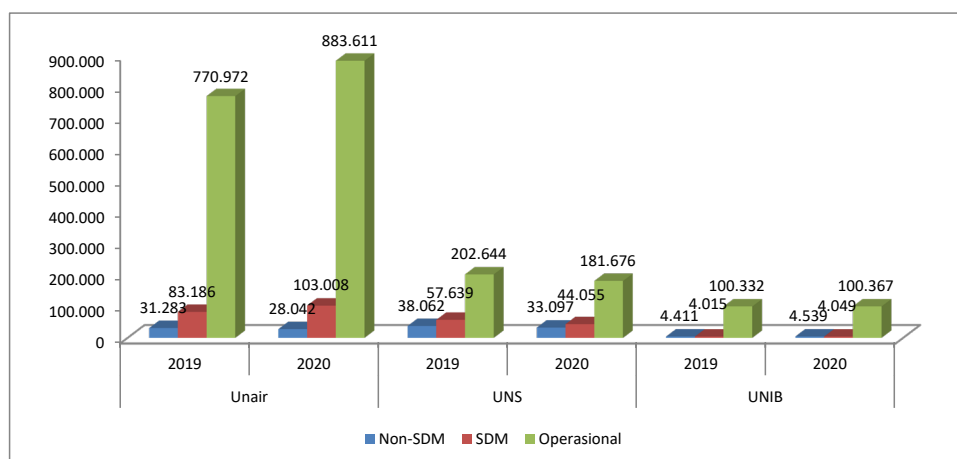


Berdasarkan Grafik 2, dari 3 PT negeri mahasiswa tahun 2019 terbesar pada UNS sebesar 37.489 dan terkecil adalah UNIB sebesar 24.158. Hal yang sama pada tahun 2020 terbesar pada UNS sebesar 39.306 dan terkecil pada UNIB sebesar 25.078. Untuk 3 PT swasta, mahasiswa tahun terbesar pada Ubinus sebesar 39.594 dan terkecil adalah UBI sebesar 780. Pada tahun 2020 terbesar juga pada Ubinus sebesar 42.445 dan terkecil adalah UBI sebesar 1.018. Bila dilihat 6 PT, mahasiswa terbesar juga pada UNS sebesar 37.489 tahun 2019 dan 39.306 tahun 2020 dan terkecil adalah pada UBI sebesar 780 tahun 2019 dan 1.018 tahun 2020.

b. Perkembangan Biaya dan Indikator 3 PT Negeri

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada tiga jenis biaya, yaitu non-SDM, SDM, dan operasional. Tabel 1 dan Grafik 3 menunjukkan perkembangan biaya berdasarkan tiga jenis biaya. Berdasarkan Tabel 4.3, biaya non-SDM terbesar pada Unair dari sebesar Rp 885,4 juta tahun 2019 menjadi Rp1,0 miliar tahun 2020 atau meningkat 15,59% dan terkecil pada UNIB dari sebesar Rp108,8 juta tahun 2019 menjadi 108,95 juta tahun 2020 atau meningkat 0,18%. Biaya operasional menunjukkan biaya yang terbesar di semua 3 PT negeri dengan rincian terbesar pada Unair dari Rp770,92 juta tahun 2019 menjadi Rp883,6 juta pada tahun 2020 atau meningkat 14,61%. Biaya non-SDM yang terkecil, kemudian UNS dari Rp202,6 juta tahun 2019 menjadi Rp181,7 juta pada tahun 2020 atau menurun 10,24%, dan UNIB dari Rp100,3 juta tahun 2019 menjadi Rp100,4 juta pada tahun 2020 atau meningkat 0,04%.

Grafik 3 Perkembangan Biaya Menurut Jenis Tiga PT Negeri Tahun 2019-2020 (Jutaan Rupiah)



Tabel 1 Perkembangan Biaya menurut Jenis dan Rinciannya 3 PT Negeri Tahun 2019-2020

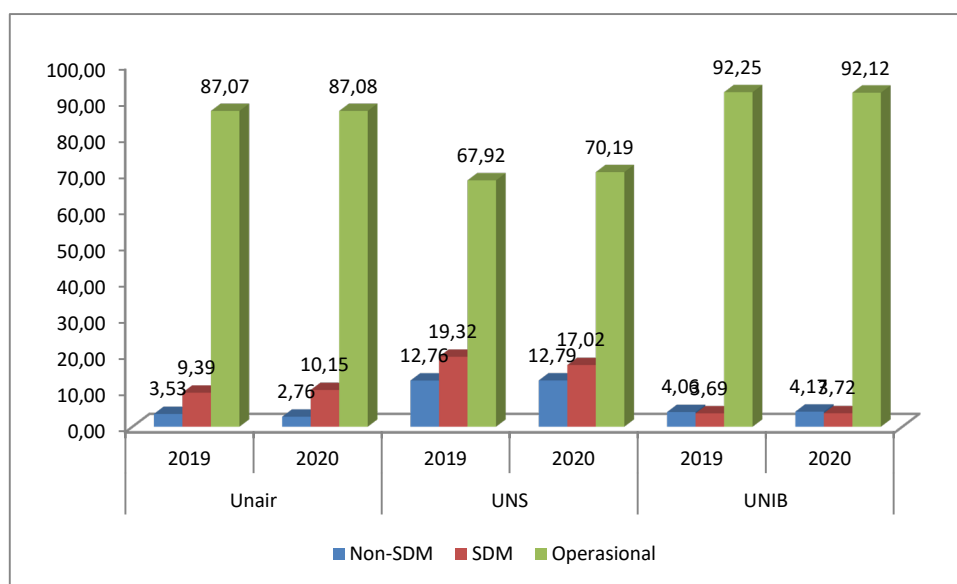
No.	Variabel	Universitas Airlangga (Unair)		Universitas Sebelas Maret (UNS)		Universitas Bengkulu (UNIB)		% Perkembangan		
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Unair	UNS	UNIB
	Data									
1	Prodi	44	44	66	66	44	44	1	1	1
2	Mahasiswa	36.253	35.790	37.489	39.306	24.158	25.078	-1,28	4,85	3,81
3	Dosen tetap	1.778	1.778	1.666	1.666	902	902	1	1	1
4	Biaya non-SDM	31.282.728.000	28.042.451.388	38.062.043.087	33.097.428.771	4.411.205.000	4.538.734.000	-10,36	-13,04	2,89
	a. Kelas	6.359.533.000	7.821.477.000	8.178.570.000	7.111.800.000	617.998.000	627.600.000	22,99	-13,04	1,55
	b. Laboratorium	6.293.468.000	7.870.712.388	6.191.814.787	5.384.186.771	2.445.145.000	2.541.667.000	25,06	-13,04	3,95
	c. Tugas Akhir	717.533.000	618.350.000	11.040.000.000	9.600.000.000	492.673.000	502.066.000	-13,82	-13,04	1,91
	d. Bimbingan dan Counseling	17.912.194.000	11.731.912.000	12.651.658.300	11.001.442.000	855.389.000	867.401.000	-34,50	-13,04	1,40
5	Biaya SDM	83.185.633.000	103.008.150.000	57.639.077.118	44.055.437.771	4.014.807.000	4.048.745.000	23,83	-23,57	0,85
	a. KTM	26.396.892.000	34.567.122.000	3.271.428.000	2.844.720.000	443.684.000	450.375.000	30,95	-13,04	1,51
	b. UTS/UAS	3.732.345.000	4.010.987.000	6.799.605.000	5.912.700.000	41.695.000	43.123.000	7,47	-13,04	3,42
	c. Tutorial	259.714.000	510.500.000	2.862.499.500	2.489.130.000	0	0	96,56	-13,04	-
	d. Tugas, kuis	0	0	2.044.642.500	1.777.950.000	0	0	-	-13,04	-
	e. Praktikum laboratorium	1.976.676.000	2.868.125.000	9.469.839.830	3.178.545.430	743.631.000	749.976.000	45,10	-66,44	0,85
	f. Praktik lapangan	13.759.761.000	11.993.548.000	2.687.411.288	2.205.641.341	135.254.000	137.950.000	-12,84	-17,93	1,99
	g. KKN	3.497.926.000	4.010.000.000	9.743.535.000	6.908.497.000	118.200.000	123.600.000	14,64	-29,10	4,57
	h. Tugas akhir	17.680.991.000	23.364.890.000	7.331.250.000	6.375.000.000	100.445.000	104.269.000	32,15	-13,04	3,81
	i. Ujian komprehensif	878.900.000	1.127.450.000	2.070.000.000	1.800.000.000	49.976.000	53.319.000	28,28	-13,04	6,69
	j. Seminar proposal	4.526.161.000	6.344.274.000	6.468.750.000	5.625.000.000	13.554.000	15.776.000	40,17	-13,04	16,39
	g. Wisuda	7.006.717.000	7.107.074.000	1.662.986.000	2.132.054.000	2.188.368.000	2.189.257.000	1,43	28,21	0,04
	h. Bimbingan akhir	3.469.550.000	7.104.180.000	3.227.130.000	2.806.200.000	180.000.000	181.100.000	104,76	-13,04	0,61
6	Biaya operasional	770.972.474.000	883.611.153.300	202.643.509.467	181.676.018.510	100.332.275.000	100.367.472.000	14,61	-10,35	0,04
	a. Orientasi mahasiswa baru	6.890.137.000	7.946.843.100	14.468.811.000	5.417.363.000	463.561.000	469.214.000	15,34	-62,56	1,22
	b. Pengembangan diri mhs dan dosen	10.910.024.000	14.016.681.200	11.969.928.662	24.276.500.000	42.500.000	45.000.000	28,48	102,81	5,88
	c. Administrasi umum	396.433.679.000	409.606.661.000	56.186.947.805	64.101.301.510	78.358.357.000	78.372.206.000	3,32	14,09	0,02
	d. Pengoperasian dan pemeliharaan	188.400.193.000	176.458.853.000	19.361.571.000	19.863.620.000	16.439.931.000	16.449.661.000	-6,34	2,59	0,06
	e. Pengembangan institusi	156.941.647.000	232.348.188.000	16.318.396.000	12.177.349.000	30.815.000	32.232.000	48,05	-25,38	4,60
	f. Lainnya	11.396.794.000	43.233.927.000	84.337.855.000	55.839.885.000	4.997.111.000	4.999.159.000	279,35	-33,79	0,04
	Jumlah biaya Non-SDM, SDM, Operasional	885.440.835.000	1.014.661.754.688	298.344.629.672	258.828.885.052	108.758.287.000	108.954.951.000	14,59	-13,24	0,18

Tabel 1 dan Grafik 4 menunjukkan persentase biaya tiga jenis biaya, yaitu non-SDM, SDM, dan operasional.

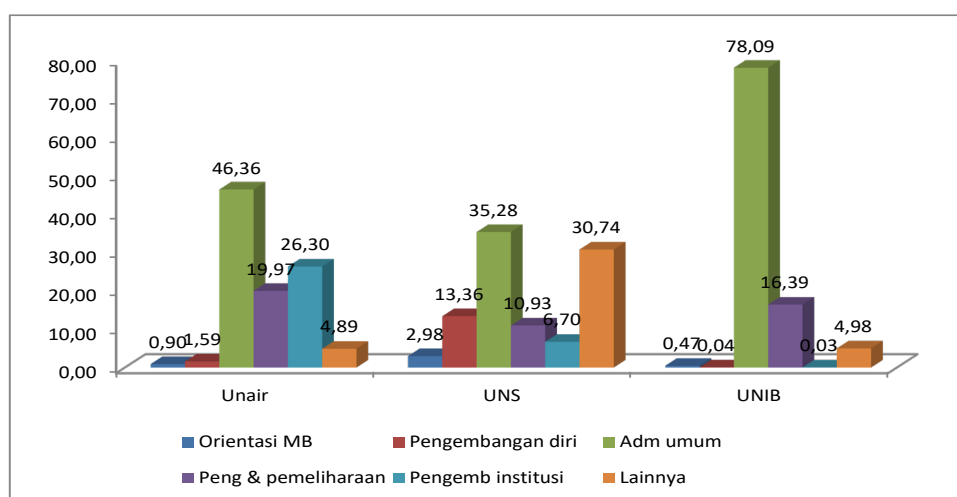
Berdasarkan Grafik 4.4, biaya operasional terbesar pada UNIB dari sebesar 92,25% tahun 2019 menjadi 92,12% tahun 2020 atau menurun 0,13% dan terkecil pada UNS dari sebesar 67,92% tahun 2019 menjadi 70,19% tahun 2020 atau meningkat 2,27%. Biaya non-SDM jenis yang terkecil pada Unair dan UNS masing-masing dari 3,53% tahun 2019 menjadi 2,76% tahun 2020 atau menurun 0,77% dan dari 12,76% tahun 2019 menjadi 12,79% tahun 2020 atau meningkat 0,03%, kemudian biaya SDM pada UNIB yang terkecil dari 3,69 tahun 2019 menjadi 2,72% tahun 2020 atau meningkat 0,02%.

Dengan melihat biaya operasional yang terbesar di 3 PT negeri, Tabel 1 dan Grafik 5 menjelaskan ada 6 variabel biaya operasional, yaitu 1) orientasi mahasiswa baru, 2) pengembangan diri mahasiswa dan dosen, 3) administrasi umum, 4) pengoperasian dan pemeliharaan, 5) pengembangan institusi, dan 6) lainnya.

Grafik 4 Perkembangan Persentase Biaya Menurut Jenis Tiga PT Negeri Tahun 2019--2020



Grafik 5 Persentase Biaya Operasional Menurut Jenis Tiga PT Negeri Tahun 2020



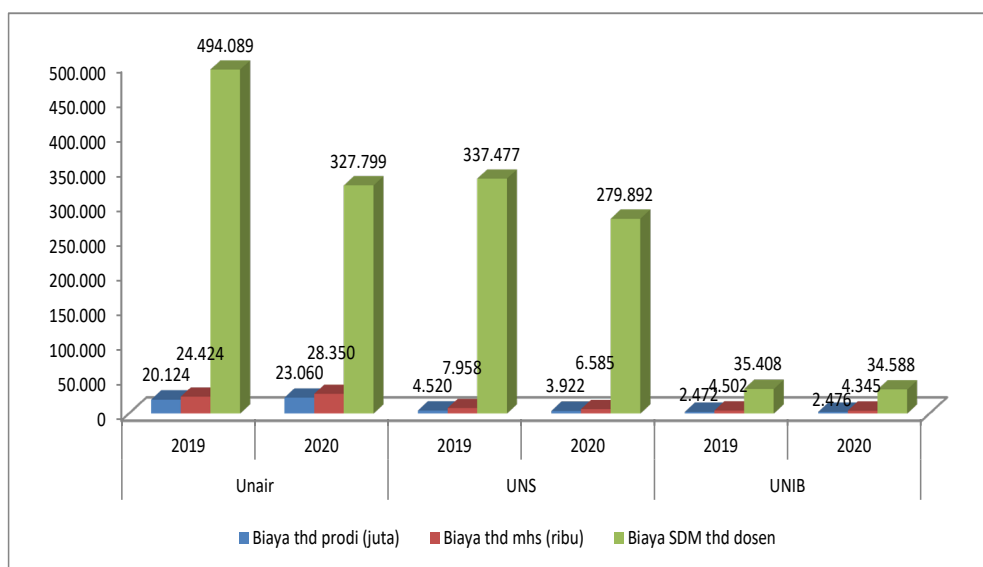
Berdasarkan Grafik 5 khusus data tahun 2020, administrasi umum merupakan biaya yang terbesar di 3 PT negeri, yang terbesar pada UNIB sebesar 78,09% dan terkecil pada UNS sebesar 35,28%. Bila dilihat per PT negeri, untuk Unair terbesar kedua adalah pengembangan institusi sebesar 26,30% dan terkecil adalah orientasi mahasiswa baru sebesar 0,90%. Untuk UNS terbesar juga administrasi umum sebesar 35,28% dan terkecil juga orientasi mahasiswa baru sebesar 2,98%. Untuk UNIB yang terkecil adalah pengembangan institusi sebesar 0,03%.

Dengan membandingkan antara jumlah biaya dengan prodi dan mahasiswa serta biaya SDM dengan dosen tetap, dapat dihitung rasio biaya terhadap prodi dan mahasiswa serta rasio biaya SDM terhadap dosen tetap.

Tabel 2 Rasio Biaya terhadap Prodi dan Mahasiswa serta Biaya SDM terhadap Dosen Tetap Tiga PT Negeri Tahun 2019--2020

No.	Variabel	Universitas Airlangga (Unair)		Universitas Sebelas Maret (UNS)		Universitas Bengkulu (UNIB)		% Perkembangan		
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Unair	UNS	UNIB
1	Rasio Jumlah Biaya thd Prodi	20.123.655.341	23.060.494.425	4.520.373.177	3.921.649.774	2.471.779.250	2.476.248.886	14,59	-13,24	0,18
2	Rasio Jumlah Biaya thd Mahasiswa	24.423.933	28.350.426	7.958.191	6.584.971	4.501.957	4.344.643	16,08	-17,26	-3,49
3	Rasio Jumlah Biaya SDM thd Dosen Tetap	494.089	327.799	337.477	279.892	35.408	34.588	-33,66	-17,06	-2,32

Grafik 6 Rasio Biaya terhadap Prodi dan Mahasiswa serta Biaya SDM terhadap Dosen Tetap Tiga PT Negeri Tahun 2019--2020



Berdasarkan Tabel 2 dan Grafik 6, rasio biaya terhadap prodi terbesar pada Unair dari sebesar Rp20,1 miliar tahun 2019 menjadi Rp23,1 miliar tahun 2020 atau meningkat 14,59% dan terkecil pada UNIB dari sebesar Rp2,472 miliar tahun 2019 menjadi Rp2,476 miliar tahun 2020 atau meningkat 0,18%, sedangkan UNS dari sebesar Rp4,5 miliar tahun 2019 menjadi Rp3,9 miliar tahun 2020 atau menurun 13,24%. Hal yang sama pada rasio biaya terhadap mahasiswa pada Unair sebesar Rp24,4 juta tahun 2019 menjadi Rp28,4 juta tahun 2020 atau meningkat 16,08% dan terkecil pada UNIB dari sebesar Rp4,5 juta tahun 2019 menjadi Rp4,4 juta tahun 2020 atau menurun 3,49%, sedangkan UNS dari sebesar Rp7,9 juta tahun 2019 menjadi Rp6,6 juta tahun 2020 atau menurun 17,26%. Hal yang sama terhadap biaya SDM terhadap dosen tetap pada Unair sebesar Rp494,1 ribu tahun 2019 menjadi Rp327,8 ribu tahun 2020 atau menurun 33,66% dan terkecil pada UNIB dari sebesar Rp35,4 ribu tahun 2019 menjadi Rp34,6 ribu tahun 2020 atau menurun 2,32%, sedangkan UNS dari sebesar Rp6,4 juta tahun 2019 menjadi Rp5,5 juta tahun 2020 atau menurun 17,06%.

3. Perkembangan Biaya dan Indikator 3 PT Swasta

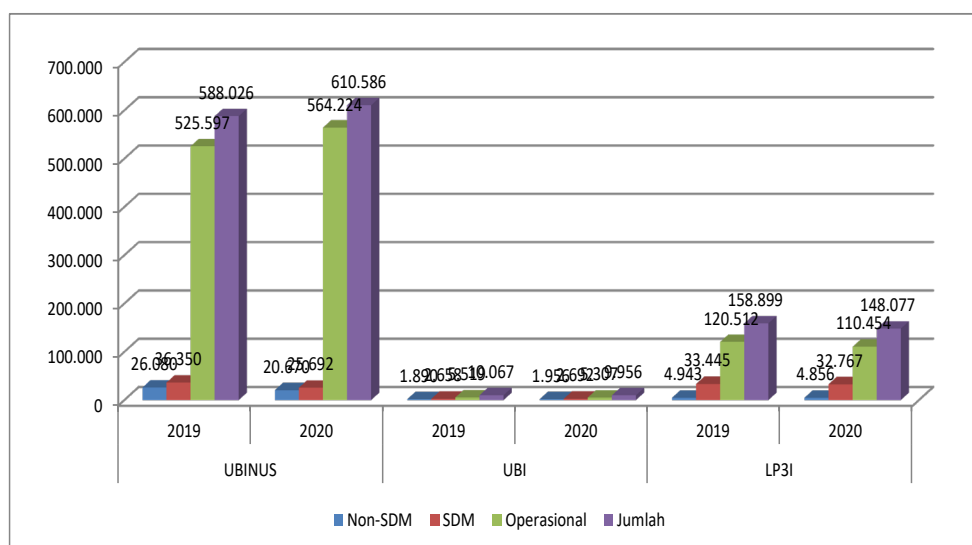
Berdasarkan Tabel 3 dan Grafik 7 maka biaya non-SDM terbesar pada Ubinus dari sebesar Rp26,1 miliar tahun 2019 menjadi Rp20,7 miliar tahun 2020 atau menurun 20,74% dan terkecil pada UBI dari sebesar Rp1,9 miliar tahun 2019 menjadi Rp1,96 miliar tahun 2020 atau meningkat 3,51%. Biaya operasional menunjukkan biaya yang terbesar di semua 3 PT swasta dengan rincian terbesar pada

Ubinus dari Rp525,6 miliar tahun 2019 menjadi Rp564,2 miliar pada tahun 2020 atau meningkat 7,35%. Biaya SDM yang terkecil pada Ubinus yang terbesar dari Rp36,3 miliar tahun 2019 menjadi Rp25,7 juta pada tahun 2020 atau menurun 29,32%, dan UBI dari Rp2,66 miliar tahun 2019 menjadi Rp2,69 miliar pada tahun 2020 atau meningkat 1,30%.

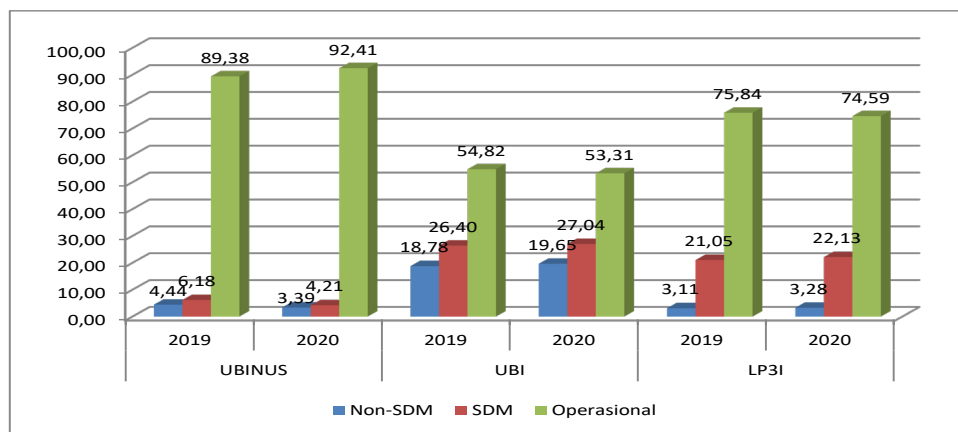
Tabel 3 Perkembangan Biaya menurut Jenis dan Rinciannya Tiga PT Swasta Tahun 2019-2020

No.	Variabel	Universitas Bina Nusantara (UBINUS)		Universitas Bina Insani (UBI)		LP3I		% Perkembangan		
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	UBINUS	UBI	LP3I
1	Biaya non-SDM	26.079.644.128	20.670.275.472	1.890.110.000	1.956.400.000	4.942.500.000	4.855.873.000	-20,74	3,51	-1,75
	a. Kelas	24.043.695.995	18.828.161.284	677.690.000	725.100.000	55.000.000	65.000.000	-21,69	7,00	18,18
	b. Laboratorium	418.419.033	360.361.388	169.420.000	181.300.000	55.000.000	65.000.000	-13,88	7,01	18,18
	c. Tugas Akhir	1.398.613.000	1.434.350.000	737.000.000	740.000.000	3.712.500.000	3.593.700.000	2,56	0,41	-3,20
	d. Bimbingan dan Counseling	218.916.100	47.402.800	306.000.000	310.000.000	1.120.000.000	1.132.173.000	-78,35	1,31	1,09
2	Biaya SDM	36.349.772.254	25.692.132.668	2.657.753.000	2.692.400.000	33.445.100.000	32.767.000.000	-29,32	1,30	-2,03
	a. KTM	23.428.838.595	18.649.673.784	1.025.117.000	1.035.000.000	25.364.100.000	25.120.000.000	-20,40	0,96	-0,96
	b. UTS/UAS	667.578.200	209.597.500	242.790.000	250.000.000	644.000.000	658.000.000	-68,60	2,97	2,17
	c. Tutorial	0	0	0	0	721.000.000	620.000.000	-	-	-14,01
	d. Tugas, kuis	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	e. Praktikum laboratorium	418.419.033	360.361.384	533.420.000	535.000.000	736.000.000	523.000.000	-13,88	0,30	-28,94
	f. Praktik lapangan	2.227.875.000	1.989.750.000	0	0	432.000.000	437.000.000	-10,69	-	1,16
	g. KKN	2.227.875.000	1.989.750.000	0	0	230.000.000	235.000.000	-10,69	-	2,17
	h. Tugas akhir	1.213.000.000	1.058.650.000	109.713.000	110.600.000	937.500.000	943.800.000	-12,72	0,81	0,67
	i. Ujian komprehensif	0	0	11.853.000	12.200.000	1.800.000.000	1.860.000.000	-	2,93	3,33
	j. Seminar proposal	1.398.613.000	1.434.350.000	97.860.000	99.600.000	337.500.000	326.700.000	2,56	1,78	-3,20
	g. Wisuda	4.767.573.426	0	493.000.000	498.000.000	2.105.000.000	1.902.500.000	-100,00	1,01	-9,62
	h. Bimbingan akhir	0	0	144.000.000	152.000.000	138.000.000	141.000.000	-	5,56	2,17
3	Biaya operasional	525.596.738.399	564.223.689.715	5.518.753.000	5.306.900.000	120.511.800.000	110.454.000.000	7,35	-3,84	-8,35
	a. Orientasi mahasiswa baru	1.210.738.399	582.689.715	15.000.000	7.000.000	240.000.000	255.000.000	-51,87	-53,33	6,25
	b. Pengembangan diri mhs dan dosen	8.470.000.000	4.460.000.000	420.848.000	280.000.000	865.000.000	755.000.000	-47,34	-33,47	-12,72
	c. Administrasi umum	456.800.000.000	503.300.000.000	4.132.450.000	4.250.000.000	16.402.500.000	16.767.000.000	10,18	2,84	2,22
	d. Pengoperasian dan pemeliharaan	55.955.000.000	54.500.000.000	668.455.000	609.000.000	720.500.000	615.000.000	-2,60	-8,89	-14,64
	e. Pengembangan institusi	261.000.000	281.000.000	37.794.000	30.500.000	43.800.000	62.000.000	7,66	-19,30	41,55
	f. Lainnya	2.900.000.000	1.100.000.000	244.206.000	130.400.000	102.240.000.000	92.000.000.000	-62,07	-46,60	-10,02
	Jumlah biaya Non-SDM, SDM, Operasional	588.026.154.781	610.586.097.855	10.066.616.000	9.955.700.000	158.899.400.000	148.076.873.000	3,84	-1,10	-6,81

Grafik 7 Perkembangan Biaya Menurut Jenis Tiga PT Swasta Tahun 2019-2020 (Jutaan Rupiah)



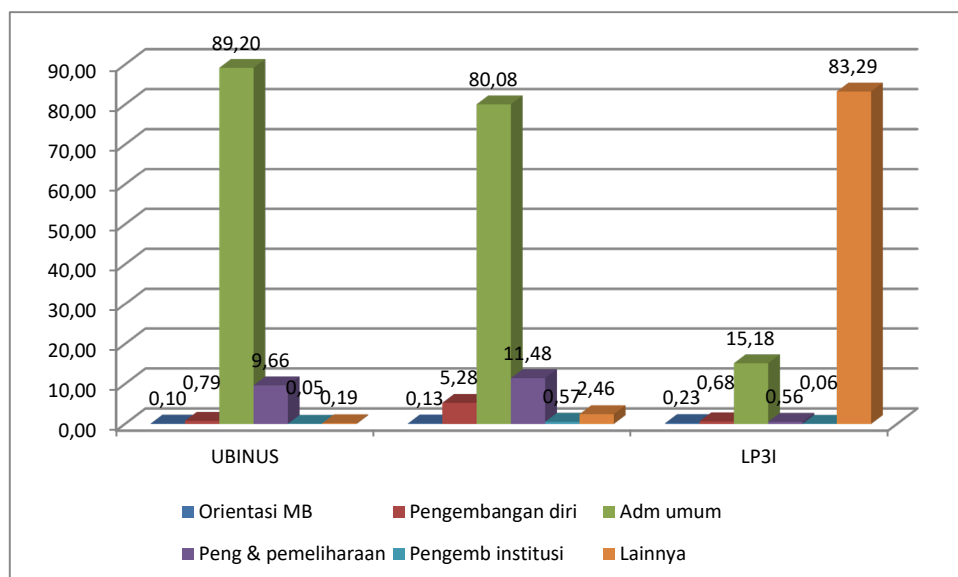
Grafik 8 Perkembangan Persentase Biaya Menurut Jenis Tiga PT Swasta Tahun 2019-2020



Berdasarkan Grafik 8 maka biaya operasional terbesar pada Ubinus dari sebesar 89,38% tahun 2019 menjadi 92,12% tahun 2020 atau meningkat 3,02% dan terkecil pada UBI dari sebesar 54,82% tahun 2019 menjadi 53,31% tahun 2020 atau menurun 1,52%. Biaya non-SDM jenis yang terkecil pada LP3I dan Ubinus masing-masing dari 3,11% tahun 2019 menjadi 3,28% tahun 2020 atau menurun 0,17% dan dari 4,44% tahun 2019 menjadi 3,39% tahun 2020 atau menurun 1,05%, kemudian biaya SDM pada UBI yang terkecil dari 18,78 tahun 2019 menjadi 19,65% tahun 2020 atau meningkat 0,88%.

Dengan melihat biaya operasional yang terbesar di semua 3 PT swasta, Grafik 9 menjelaskan ada 6 variabel biaya operasional, yaitu 1) orientasi mahasiswa baru, 2) pengembangan diri mahasiswa dan dosen, 3) administrasi umum, 4) pengoperasian dan pemeliharaan, 5) pengembangan institusi, dan 6) lainnya.

Grafik 9 Persentase Biaya Operasional Menurut Jenis Tiga PT Swasta Tahun 2020



Berdasarkan Grafik 9 khusus data tahun 2020, administrasi umum merupakan biaya yang terbesar di 3 PT swasta, yang terbesar pada Ubinus sebesar 89,02% dan terkecil pada LP3I sebesar 15,18%. Bila dilihat per PT swasta, biaya terbesar kedua adalah pengoperasian dan pemeliharaan sebesar 9,66% dan

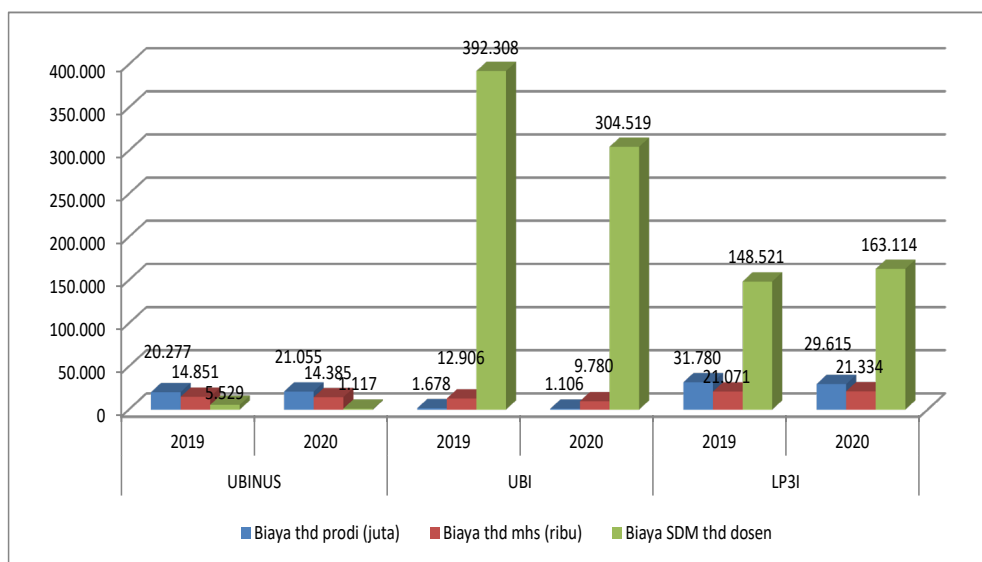
terkecil adalah pengembangan institusi sebesar 0,05%. Untuk UBI terbesar juga administrasi umum sebesar 80,08% dan terkecil orientasi mahasiswa baru sebesar 0,13%. Untuk LP3I yang terkecil adalah pengembangan institusi sebesar 0,06%.

Tabel 4 Rasio Biaya terhadap Prodi dan Mahasiswa serta Biaya SDM terhadap Dosen Tetap Tiga PT Swasta Tahun 2019—2020

No.	Variabel	Universitas Bina Nusantara (UBINUS)		Universitas Bina Insani (UBI)		LP3I		% Perkembangan		
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	UBINUS	UBI	LP3I
1	Rasio Jumlah Biaya thd Prodi	20.276.763.958	21.054.693.029	1.677.769.333	1.106.188.889	31.779.880.000	29.615.374.600	3,84	-34,07	-6,81
2	Rasio Jumlah Biaya thd Mahasiswa	14.851.396	14.385.348	12.905.918	9.779.666	21.071.396	21.333.651	-3,14	-24,22	1,24
3	Rasio Biaya SDM thd Dosen Tetap	5.529	1.117	392.308	304.519	148.521	163.114	-79,80	-22,38	9,83

Berdasarkan Tabel 4 dan Grafik 10, rasio biaya terhadap prodi terbesar pada Ubinus dari sebesar Rp20,3 miliar tahun 2019 menjadi Rp21,1 miliar tahun 2020 atau meningkat 3,84% dan terkecil pada UBI dari sebesar Rp1,678 miliar tahun 2019 menjadi Rp1,106 miliar tahun 2020 atau menurun 34,07%, sedangkan LP3I dari sebesar Rp31,8 miliar tahun 2019 menjadi Rp29,6 miliar tahun 2020 atau menurun 6,81%. Rasio biaya terhadap mahasiswa terbesar pada LP3I sebesar Rp21,1 juta tahun 2019 menjadi Rp21,3 milyar tahun 2020 atau meningkat 1,24%, Ubinus sebesar Rp14,8 juta tahun 2019 menjadi Rp14,4 juta tahun 2020 atau menurun 3,14% dan terkecil pada UBI dari sebesar Rp4,5 juta tahun 2019 menjadi Rp4,4 juta tahun 2020 atau menurun 24,22%. Rasio biaya SDM terhadap dosen tetap pada UBI sebesar Rp392,3 ribu tahun 2019 menjadi Rp304,5 ribu tahun 2020 atau menurun 22,38% dan terkecil pada Ubinus dari sebesar Rp5,5 ribu tahun 2019 menjadi Rp1,1 ribu tahun 2020 atau menurun 79,80%, sedangkan LP3I dari sebesar Rp148,5 juta tahun 2019 menjadi Rp163,1 juta tahun 2020 atau meningkat 9,83%.

Grafik 10 Rasio Biaya terhadap Prodi dan Mahasiswa serta Biaya SDM terhadap Dosen Tetap Tiga PT Swasta Tahun 2019 --2020



2. Sumber Pendanaan

Pendanaan PT bersumber dari PT negeri dan PT swasta. Perbedaan sumber pendanaan PT negeri dan PT swasta karena adanya dua variabel yang berbeda, yaitu uang kuliah tetap (UKT) atau uang sistem kredit semester (SKS) dan biaya operasional PT negeri (BOPTN). Sumber dana PT negeri ada

lima variabel, yaitu 1) sumber dana dari UKT (PT negeri) atau SKS (PT swasta), 2) BOPTN (PT negeri), 3) dana dari masyarakat, 4) dana dari kerja sama antar-PT, dan 5) dana dari kerja sama dengan dunia usaha dunia industri (DUDI).

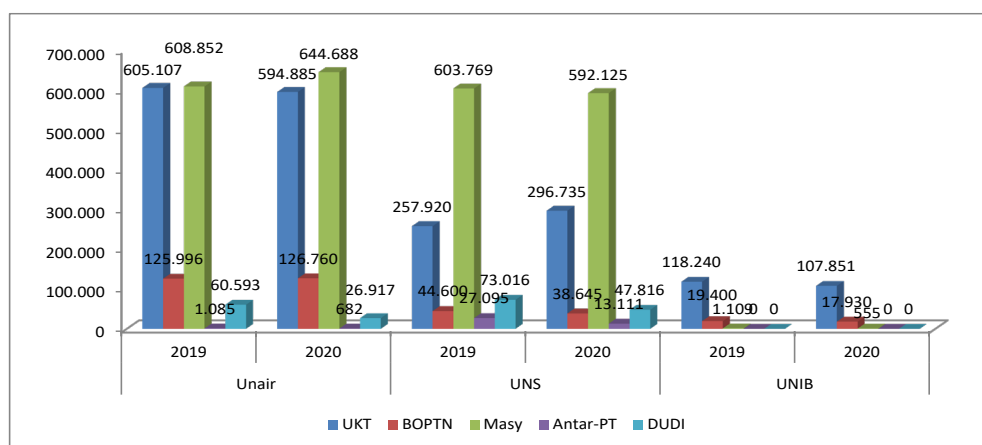
a. Perkembangan Sumber Dana Tiga PT Negeri

Sumber dana pada PT negeri terdiri atas lima variabel, yaitu 1) dari dana UKT, 2) dana BOPTN, 3) dana masyarakat, 4) dana kerja sama antar-PT dan 5) dana kerja sama DUDI. Berdasarkan kelima data tersebut, ada lima persentase, yaitu 1) dana UKT, 2) dana BOPTN, 3) dana masyarakat, 4) dana kerja sama antar-PT, dan 5) dana kerja sama DUDI. Berdasarkan Tabel 5 dan Grafik 11, sumber terbesar terjadi pada Unair dari Rp1.401,6 miliar tahun 2019 menjadi Rp1.393,9 miliar tahun 2020 atau menurun 0,55%. Sebaliknya, jumlah dana terkecil pada UNIB dari Rp138,7 miliar tahun 2019 menjadi Rp126,3 miliar tahun 2020 atau menurun 8,95%, sedangkan UNS dari Rp1.006,4 miliar tahun 2019 menjadi Rp988,4 milyar tahun 2020 atau menurun 1,79%.

Tabel 5 Perkembangan Sumber Dana Tiga PT Negeri Tahun 2019--2020

No.	Variabel	Universitas Airlangga (Unair)		Universitas Sebelas Maret (UNS)		Universitas Bengkulu (UNIB)		% Perkembangan		
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Unair	UNS	UNIB
	Data									
1	Jumlah dana dari UKT	605.107.410.709	594.884.790.939	257.919.587.729	296.735.081.953	118.240.446.812	107.851.177.779	-1,69	15,05	-8,79
2	Jumlah dana BOPTN	125.996.260.000	126.760.032.000	44.600.000.000	38.645.222.000	19.400.000.000	17.930.325.000	0,61	-13,35	-7,58
3	Jumlah dana dari masyarakat	608.851.891.679	644.688.101.639	603.768.626.889	592.124.876.851	1.109.362.975	554.585.317	5,89	-1,93	-50,01
4	Jumlah dana dari kerja sama antar-PT	1.084.837.500	681.500.000	27.095.261.038	13.111.205.479	0	0	-37,18	-51,61	-
5	Jumlah dana dari kerja sama DUDI	60.592.707.376	26.917.210.250	73.016.122.168	47.815.708.976	0	0	-55,58	-34,51	-
	Jumlah sumber dana	1.401.633.107.264	1.393.931.634.828	1.006.399.597.824	988.432.095.259	138.749.809.787	126.336.088.096	-0,55	-1,79	-8,95
	Indikator									
1	Persentase dana UKT thd jumlah	43,17	42,68	25,63	30,02	85,22	85,37	-0,49	4,39	0,15
2	Persentase dana BOPTN thd jumlah	8,99	9,09	4,43	3,91	13,98	14,19	0,10	-0,52	0,21
3	Persentase dana masyarakat thd jumlah	43,44	46,25	59,99	59,91	0,80	0,44	2,81	-0,09	-0,36
4	Persentase dana kerja sama antar-PT thd jumlah	0,08	0,05	2,69	1,33	0,00	0,00	-0,03	-1,37	0,00
5	Persentase dana kerja sama DUDI thd jumlah	4,32	1,93	7,26	4,84	0,00	0,00	-2,39	-2,42	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

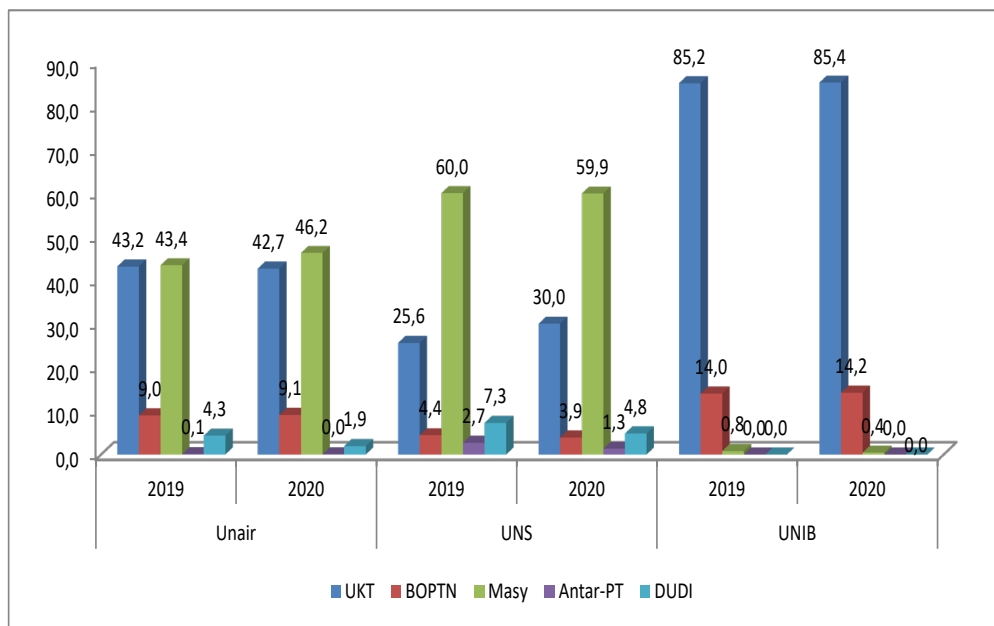
Grafik 11 Perkembangan Sumber Dana Tiga PT Negeri Tahun 2019—2020



Berdasarkan Tabel 5 dan Grafik 12, untuk Unair sumber terbesar adalah dari masyarakat dari 43,44% tahun 2019 menjadi 46,25% tahun 2020 atau meningkat 2,81%, sumber terbesar kedua dari UKT dari 43,17% tahun 2019 menjadi 42,68% tahun 2020 atau menurun 0,49%, sedangkan terkecil adalah dana

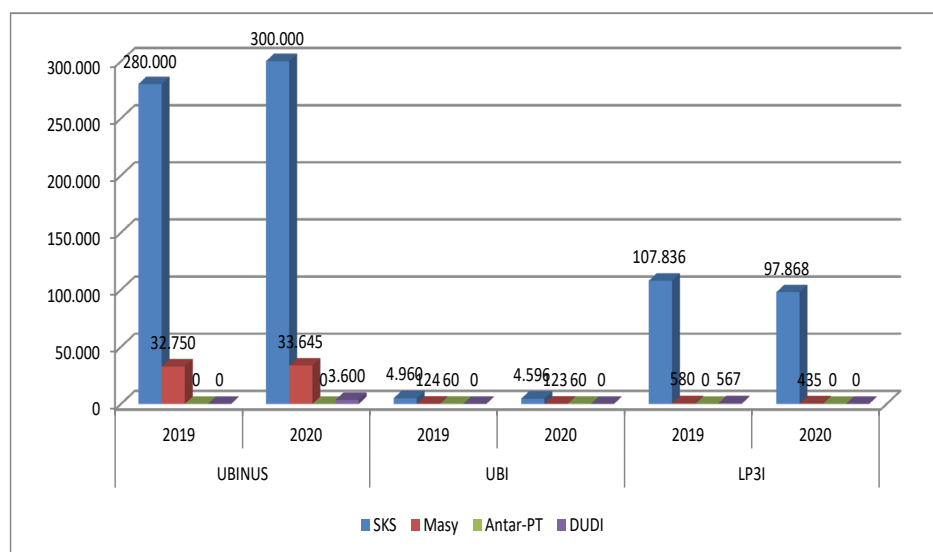
kerja sama antar-PT dari 0,08% tahun 2019 menjadi 0,05% tahun 2020 atau menurun 0,03%. Untuk UNS sumber terbesar adalah juga dari masyarakat dari 59,99% tahun 2019 menjadi 59,91% tahun 2020 atau menurun 0,09%, sumber terbesar kedua dari UKT dari 25,63% tahun 2019 menjadi 30,02% tahun 2020 atau meningkat 4,39%, sedangkan terkecil adalah dana kerja sama antar-PT dari 2,69% tahun 2019 menjadi 1,33% tahun 2020 atau menurun 1,37%. Selanjutnya, untuk UNIB dana dari sumber hanya UKT dan BOPTN dan sumber terbesar adalah UKT dari 85,22% tahun 2019 menjadi 85,37% tahun 2020 atau meningkat 0,15% dan BOPTN dari 13,98% tahun 2019 menjadi 14,19% tahun 2020 atau meningkat 0,21%.

Grafik 12 Perkembangan Persentase Sumber Dana Tiga PT Negeri Tahun 2019—2020

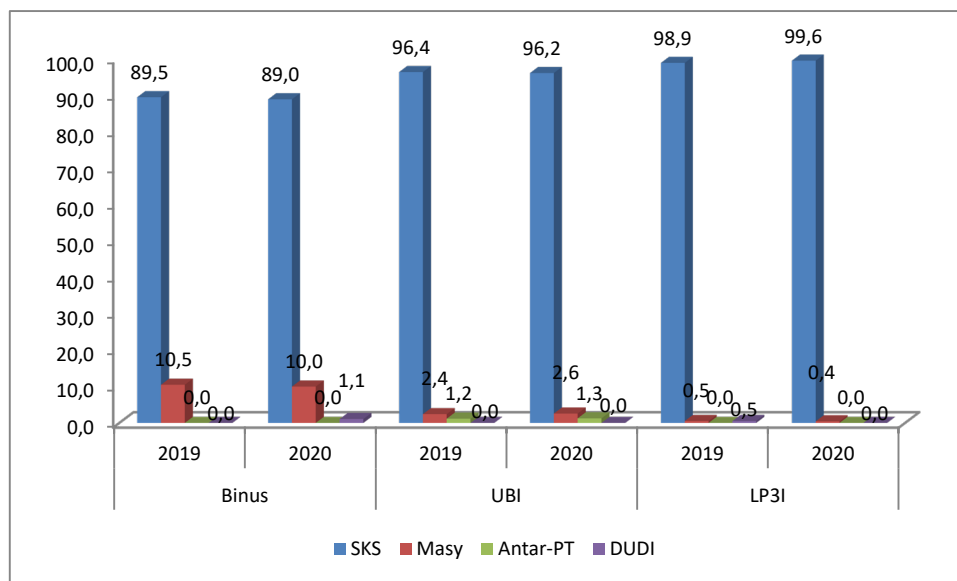


b. Perkembangan Sumber Dana Tiga PT Swasta

Grafik 13 Perkembangan Sumber Dana Tiga PT Swasta Tahun 2019--2020



Grafik 14 Perkembangan Persentase Sumber Dana Tiga PT Swasta Tahun 2019—2020



C. Strategi dan Pemanfaatan Dana yang Dilakukan oleh PT

Strategi yang dilakukan oleh PT dalam menghimpun dana ada empat variabel, yaitu 1) mekanisme keringanan atau pembebasan biaya kuliah, 2) menghimpun dana dari masyarakat, 3) menghimpun dana kerja sama antar-PT, dan 4) menghimpun dana kerja sama dengan DUDI.

Selain itu, pemanfaatan dana yang dilakukan PT ada lima variabel, yaitu 1) pemanfaatan UKT/SKS, 2) pemanfaatan BOPTN (khusus PTN), 3) pemanfaatan dana dari masyarakat, 4) pemanfaatan dana dari kerja sama antar-PT, dan 5) pemanfaatan dana dari kerja sama dengan DUDI.

D. Kesimpulan

1. Kebutuhan biaya operasional baik di PTN maupun di PTS adalah untuk membiayai SDM, non-SDM, dan biaya operasional lainnya. Dari komponen biaya operasional tersebut, proporsi terbesar adalah untuk biaya operasional lainnya atau selain biaya SDM dan non-SDM. Biaya operasional tersebut meliputi (1) biaya orientasi mahasiswa baru, (2) pengembangan diri mahasiswa dan dosen, (3) administrasi umum, (4) pengoperasian dan pemeliharaan, (5) pengembangan institusi, (6) biaya lainnya. Dari keenam komponen biaya operasional tersebut, biaya yang terbesar adalah untuk biaya administrasi umum. Hal ini terjadi baik di PTN maupun PTS.
2. Sumber pendanaan baik di PTN maupun di PTS terbesar adalah bersumber dari mahasiswa, kecuali Unair dan UNS, yang sumber dana terbesarnya adalah dari masyarakat di luar orang tua mahasiswa.
3. Penggalan dana di PTN cenderung lebih bervariasi, seperti UNAIR dan UNS yang telah menggali berbagai sumber dana selain dari Pemerintah (BOPTN), yaitu dari mahasiswa, masyarakat, kerja sama antar-PT, dan kerja sama dengan DUDI. UNIB masih belum melakukan penggalan dana yang bersumber dari kerja sama dengan PT lain dan juga dengan DUDI. Untuk PTS fokus penggalan dana masih pada mahasiswa melalui SPP. Walaupun Universitas Binus dan LP3I telah melakukan penggalan dana melalui kerja sama dengan DUDI dan UBI, penggalan dana dilakukan melalui kerja sama dengan PT lain, tetapi belum maksimal.

E. Rekomendasi

Berdasarkan ketiga kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Kebutuhan biaya operasional proses pembelajaran, baik di PTN maupun PTS, pada dasarnya harus dapat dipenuhi seluruhnya agar proses pembelajaran tersebut dapat berlangsung dengan optimal sehingga mahasiswa memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan prodinya masing-masing.
2. Sumber pendanaan yang ada dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin agar mahasiswa dapat memperoleh kompetensi yang maksimal.
3. Bagi PTN dan PTS yang belum maksimal dalam menggali sumber dana yang ada dapat memaksimalkan potensi sumber dana yang ada, khususnya penggalan dana, baik melalui kerja sama antarperguruan tinggi maupun kerja sama dengan DUDI.

DAFTAR PUSTAKA

Kontan.(2020)<https://nasional.kontan.co.id/news/asyik-semua-mahasiswa-bisa-dapat-keringanan-biaya-kuliah-alias-utk-ini-rinciannya> d Jumat, 19 Juni 2020 / 17:44 WIB

PPRI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi

Sofian Effendi, Strategi pembiayaan perguruan tinggi guru besar kebijakan publik dan mantan rektor universitas gadjah mada ditulis pada tahun 2004 saat beliau menjadi rektor

UURI nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Kamis, 3 Desember 2020
Jadwal Paparan	: Panel No: 1
Ruang	: Kelompok 5
Waktu	: 09.00 – 12.00 WIB
Judul Penelitian	: Kesiapan Perguruan Tinggi dalam Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka
Penyaji	: 1. Dr. Iskandar Agung, M.Si. 1. Sarwanto 2. Catur Dyah Fajarini
Pembahas	: 1. Prof. Dr. Sasmoko, M. Pd., Binus 2. Didi Rustam, Setditjen Dikti
Moderator	: Ferdi Widiputera
Notulis	: 1. Noviyanti 2. Genardi Atmadireja 3. Khairur Raziqiin

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : (Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)	1. Dr. Iskandar Agung, M.Si. ❖ Sebagai kebijakan Mendikbud, tentang kesiapan, suatu kebijakan tidak bisa melihat kesiapan, namun sebagai proses antisipatif, responsif, sejauh mana PT melakukan penyiapan dalam mengantisipasi, merespon kebijakan Kampus Merdeka (KM). ❖ Kesiapan implementasi KM, ada beberapa aspek yang diliput dalam KM: ❖ Pembukaan prodi baru, merupakan terobosan dan angin segar karena selama ini terjadi moratorium secara tidak tertulis untuk menunda pembukaan PT dan prodi baru. Prodi dibutuhkan dalam dunia kerja untuk antisipasi dan merespon ke depan, menjawab tantangan, kompetensi, daya saing dan siap kerja. Dengan teknologi digital tersedia ribuan peluang kerja baru yang bisa dihasilkan oleh PT. ❖ Akreditasi PT diperbaharui secara otomatis, kecuali ada penurunan mutu. PT akreditasi BC bisa meningkatkan kapanpun jika sudah siap. Prodi yang sudah kerjasama dengan PT internasional bisa mendapatkan akreditasi A dengan ketentuan sesuai Dikti. ❖ PTNHB, lama harus akreditasi A dg ketentuan memiliki fleksibilitas finansial dan kurikulum. Saat ini PTN BLU dan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		satker dapat mengajukan bh jika sudah siap dg criteria sesuai permendikbud 4 2020 mjd peluang PTN yg blm Bh mjd BH ❖ Pemenuhan HB mhs selama 3 sem di luar prodi: 2 semster diluar prodi PT dan 1 sem dluar prodi PT sama dg 8 program pilihan yg sudah ditentukan (praktik kerja) dg dibimbing oleh sdosen PT yg bersangkutan ❖ Persoalan KM adalah tentang bagaimana kesiapan dan tantangan PT yang perlu diatasi dan alternatif solusinya? ❖ Akibat pandemi dilakukan penyesuaian strategi untuk pengumpulan data, dilakukan secara daring melalui diskusi dan membuat daftar isian sesuai daerah sampel, mencari dokumentasi yang dimiliki PT terkait persoalan KM. Karena keterbatasan, hanya 3 sampel yang dipakai UNY (A), UNS (A), Universitas Bengkulu (B). UNY 80% prodi sudah terakreditasi A lainnya BC, UNS 50% A lainnya BC, Univ. Bengkulu banyak BC. ❖ Analisis kualitatif dengan mengumpulkan informasi lapangan, di 3 universitas. Pelaksanaan penelitian bulan Maret-Agustus 2020. ❖ Hasil penelitian: a) kesiapan 3 PT yang dikaji sudah membentuk tim pengembang implementasi KM, b) ada perbedaan realisasi sesuai dengan situasi dan kondisi peringkat akreditasi PT dan prodi yang dimiliki, c) upaya pemenuhan 2 semester diluar prodi luar kampus didasarkan pada pedoman Dikti no3 th 2020 yaitu pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/KKN tematik. ❖ Tantangan: 1) kesulitan mendirikan prodi baru karena banyak prodi belum memenuhi dosen homebase, 2) menyusun kurikulum perubahan yang tadinya 8 semester menjadi 5 semester, 3) pengaturaan beban dosen yang tidak masuk dalam perkuliahan, 4) sosialisasi yang belum luas, 5) pendanaan mahasiswa dalam melaksanakan KM, siapa yang menanggung (mahasiswa, kampus atau pemerintah), 6) rekognisi pencapaian hasil kesiapa ... benar2 dpr memenuhi yg diharapkan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		❖ Rekomendasi: 1) perlu penyederhaan jumlah dosen home base dalam pembukaan prodi baru agar fleksibel, 2) perluasan bantuan pendampingan insentif dana bagi kampus dan mahasiswa yang akan melaksanakan hak belajar di luar prodi, 3) sosialisasi meluas dan pemahaman dengan MoU berbagai stakeholder tentang pelaksanaan hak belajar 2 semester, 4) pengembangan tim kerja untuk menentukan kriteria standar proses dan rekognisi hasil kegiatan agar menjamin mutu kompetensi, daya saing dan pembentukan kesiapan kerja. 3. Catur Dyah Fajarini • Penelitian ini ditujukan untuk meneliti bagaimana perguruan tinggi mengatur strateginya dalam mengelola dana yang dihimpun oleh perguruan tinggi. • Pembiayaan perguruan tinggi yang dibahas dalam penelitian meliputi strategi pembiayaan selama masa pandemic juga masa sebelum pandemic. • Pembiayaan perguruan tinggi yang menjadi objek penelitian ini, hanya pembiayaan yang terkait dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi, sehingga pembiayaan yang terkait dengan 2 unsur Tridharma perguruan tinggi lainnya, yakni penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tidak menjadi pembahasan dalam penelitian. • Pembiayaan perguruan tinggi diantaranya bersumber dari BOPTN, SPP, UKT, BKT serta peran serta masyarakat serta dunia usaha dan industry dalam pembiayaan perguruan tinggi, yang diizinkan oleh peraturan perundangan. • Penelitian berfokus pada pembiayaan yang bersifat recurrent cost, atau biaya lancer dalam pengelolaan perguruan tinggi. • Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kuantitatif deskriptif dan juga study komparatif. • Sample dalam penelitian ini ditujukan untuk mengakomodir keterwakilan setiap jenis PT, baik yang Berbadan Hukum, Badan Layanan Umum, Politkenik, baik negeri maupun swasta. • Pengelompokan sample berdasarkan status perguruan tinggi didasarkan oleh aturan bahwa terdapat keragaman dalam pengelolaan pembiayaan perguruan tinggi berdasarkan status perguruan tinggi dimaksud.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		• Sample yang dipilih dalam penelitian ini terdiri atas 11 perguruan tinggi, diantaranya Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Bengkulu, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bina Nusantara, Universitas Indonesia, Universitas Bina Insani, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik LP3i Jakarta dan STIE Tribhakti. • Pemilihan sample yang terbatas karena terkait dengan keterbatasan waktu yang diberikan, selain itu juga terkait dengan keterbukaan perguruan tinggi dalam memberikan data keuangan perguruan tingginya. • Biaya – biaya yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi biaya Operasional kampus terkait proses pengajaran, biaya pengembangan SDM dan biaya non SDM. • Pengumpulan data lapangan dengan menggunakan diskusi secara daring maupun penyebaran kuesioner secara online kepada perguruan tinggi yang menjadi sample dalam penelitian ini. • Dalam perjalanan proses penelitian, tim mengalami kesulitan untuk melakukan pengumpulan data dari perguruan tinggi yang menjadi sample. • Tidak semua perguruan tinggi sample memberikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, perguruan tinggi tidak terlalu terbuka dalam memberikan data keuangan perguruan tingginya. • Sampai saat penelitian ini dipaparkan, hanya baru 6 perguruan tinggi yang mengirimkan data yang diminta kepada tim penelitian, antara lain Universitas Airlangga, Universitas Bengkulu, Universitas Bina Insani, Politeknik LP3i Jakarta, Politeknik Manufaktur Bandung dan Universitas Bina Nusantara. • Dari data yang diperoleh dari perguruan tinggi, dilakukan perbandingan atau rasio pembiayaan masing – masing pos pembiayaan terhadap total pembiayaan, yang kemudian diperbandingkan, antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. • Terdapat perbedaan cara pengelolaan biaya penyelenggaraan perguruan tinggi antara perguruan tinggi negeri dan swasta. • Pembiayaan dan penghimpunan dana perguruan tinggi pada masa pandemic mengalami penurunan, selain karena penyelenggaraan perkuliahan secara daring, juga karena pengurangan jumlah mahasiswa terutama yang terdampak secara langsung oleh kondisi pandemic.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		• Rasio yang disajikan masih bersifat secara umum per program study, secara riil setiap prodi memiliki kebutuhan yang berbeda, sesuai dengan mayor nya, terutama apabila dibandingkan antara jurusan sains dan non sains. • Kajian ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh penelitian selanjutnya, yang membutuhkan durasi pengerjaan yang lebih Panjang, dan juga perlu dijalin Kerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk mendapatkan data yang lebih rinci terkait penghimpunan dan penggunaan dana pada perguruan tinggi. • Banyak perguruan tinggi yang belum memaksimalkan Kerjasama dengan pihak eksternal perguruan tinggi untuk pendanaan perguruan tinggi. • Kerjasama dengan eksternal perguruan tinggi dapat dilakukan dengan menjalin Kerjasama antar perguruan tinggi, juga dapat dengan menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
a.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	1. Profesor Iskandar Agung Prof. Sasmoko, Binus ✚ Kesiapan KM belum ada acuan riset terdahulu, padahal sudah banyak jurnal yang meneliti kesiapan KM di beberapa negara, mengenai kesiapan pendidikan dalam menyongsong teknologi 4.0 bisa menjadi rujukan. ✚ Dalam sistematika dari masalah langsung ke metodologi, belum melihat apa yang akan dilakukan dalam konteks KM. Belum menentukan KM yang diimplementasikan di Indonesia seperti apa, yang siap kriteria seperti apa, dan setelah ditemukan bangunan teorinya merupakan sebuah novelty dan bisa profiling. ✚ Dalam kajian ini riset gap belum terlihat. Kelayakan menyebut pentingnya kesiapan belum kuat, bagaimana kesiapan PT merespon Kampus Merdeka? Tolak ukur yang dipakai seperti apa, acuan belum ada, mohon justifikasinya. ✚ Hambatan apa yang ada di PT mengenai KM terkait prodi sudah menjadi berita di media, yang perlu diungkap kesiapan PT seperti

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		apa, lembaga personilnya, jika mengetahui posisinya baru kemudian perlu membuat kebijakan supaya semua PT siap. ✚ Diskusi online, platform penyebaran kuesioner dasar apa, isinya apa, informan kunci yang diundang, diskusi seperti apa? Disambungkan antara masalah, kondisi PT yang sudah KM dengan suasana pandemic/new normal, skenario KM seperti apa berdasar kajian teorinya. Untuk itu dipotret kesiapannya, sehingga dasar rekomendasi ada dan matang, strategi dan upaya yang dilakukan apa? Kesiapan harusnya seperti apa dipotret, adanya pandemic, power Dikbud dapat data lebih mudah, kalau hanya daring lebih efektif pakai google form dan lebih mudah. ✚ Kalau hasil ini untuk dasar kebijakan maka PT melihat hanya internal saja, karena tanpa melakukan penelitian sudah dapat data ini, tidak ada kaitan antara rekomendasi dengan tujuan. PT disebut siap sebagai KM kriterianya seperti apa, aspek apa saja belum di temukan. ✚ Rekomendasi harus bicara dari hasil penelitian, Riset harus mengacu pada fenomena, industry 4. Pendidikan harus adaptasi dengan kesiapan PT di Indonesia, kesiapan KM di Indonesia dalam suasana pandemic sebetulnya seperti apa. Kekuatan sistematis, literatur review, profiling dan kebijakan belum nyambung. ✚ Kampus Merdeka memotret dari lapangan BEDA dengan kesiapan yang sebenarnya. Didi Rustam, Setditjen Dikti ✚ Feedback Prof Sasmoko sudah luar biasa dari segi akademik riset method dan teoritical background. Mewakili Dikti terkait dengan kebijakan KM melalui kesiapan PT, belum menemukan kampus yang diteliti yang paling siap mana, dari instrumen untuk melihat kesiapan belum ada sehingga tidak bisa menjadi acuan mana yang paling siap, agar kami bisa memanfaatkan hasil penelitian ini. ✚ KM&MB merupakan upaya pemerintah memberikan kemerdekaan pada kampus, ada 4 kriteria yang merupakan bagian upaya memerdekakan kampus (sisi kelembagaan). Disisi lain ada Merdeka Belajar pada sisi SDM, dosen dan mahasiswa di kirim keluar kampus, dan dari dudi dibawa ke kampus.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		✚ Harapan agar terealisasi KM, kira-kira variabel apa saja yang disiapkan sehingga dapat memenuhi target, akan tau mana yang sudah siap melakukan KM&MB agar bisa intervensi dengan kebijakan. Karena kampus ada beberapa jenis, yang mana yang paling siap? Diharapkan institusi bisa lebih siap untuk kebijakan 2021. Mengharapkan ada rekomendasi variabel pengukuran yang dikatakan siap agar bisa dijadikan kebijakan 2021. 3. Catur Dyah Fajarini Prof. Dr. Sasmoko : • Terdapat perbedaan antara pembiayaan dan pendanaan, sumber rujukan juga akan berbeda, sehingga perlu dilakukan penajaman kembali. • Belum ditemukan strategi yang dapat dilakukan pada penelitian, terakait pendanaan/pembiayaan. • Strategi seharusnya ada sebuah Langkah taktis dalam pengelolaan pendanaan pendidikan tinggi. • Perlu dilakukan pendalaman terhadap penelitian terdahulu yang membahas strategi pendanaan pendidikan tinggi. • Strategi pendanaan pendidikan tinggi dimasa pandemic juga belum tercover dalam penelitian. • Perlu pengkayaan literatur sebagai daftar Pustaka, dengan literatur terbaru. • Penelitian seharusnya dapat memberikan bagaimana rekomendasi terkait pengambilan keputusan yang akan diambil oleh pengambil keputusan. • Perlu penguatan sampling frame, agar penelitian yang dilakukan lebih representative secara nasional, perlu penjelasan pengambilan sample. • Daftar Pustaka perlu dimutakhirkan, agar penelitian yang dilakukan terkesan tertinggal jaman. Didi Rustam (Dit Belmawa Kemdikbud) : • Rekomendasi atau model terkait strategi untuk pendidikan tinggi dimasa pandemic belum ditemukan dalam penelitian. • Untuk strategi pembiayaan di masa pandemi agar lebih dipertajam, untuk melihat efektifitas pembelajaran secara daring.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		• Pengembangan teknologi pembelajaran secara digital perlu dibahas juga, untuk melihat kesiapan perguruan tinggi. • Penghematan yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi juga harus dapat melihat alokasi alternatif agar anggaran yang telah disediakan dapat bermanfaat bagi pengembangan perguruan tinggi. • Perlu dilakukan penyusunan strategi penempatan dana perguruan tinggi, agar anggaran yang telah diterima perguruan tinggi mampu meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Tanggapan : • Tim peneliti menerima masukan dari pembahas untuk pengayaan kajian strategi pendanaan pendidikan tinggi. • Keterbatasan hasil penelitian tidak terlepas dari keterbatasan dalam hal waktu penelitian serta keterbatasan dalam melakukan kontak dengan perguruan tinggi. • Data yang didapat akan diusahakan untuk dapat menjawab apa yang diharapkan dari kajian strategi pendanaan pendidikan tinggi.
b.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	Tidak ada sesi tanya jawab karena waktunya terbatas, hanya melalui kolom <i>chat</i> saja dan tidak ada pertanyaan yang ditujukan untuk Prof Iskandar. Respon Prof Iskandar Agung, Puslitjak ❖ Ketika belum terkena wabah pandemi covid, sudah direncanakan dengan desain dan literatur kesiapan PT dalam implementasi KM, termasuk dalam penyajian teoritis berbagai persyaratan PT dan Prodi yang ingin menuju reputasi dunia, mencoba menjabarkan dalam indikator dan variabel untuk memotret kesiapan PT tentang KM dari manajemen, ketenagaan, dosen, sarpras, sampai pemilihan, indeks rujukan, dan penelitian unggulan. ❖ Kami perlu mendesain, sejauh mana penelitian memotret di lapangan apakah instrumen yang sudah dikembangkan bisa diterapkan di lapangan. Sudah menentukan sampel agar bisa mewakili padahal disparitas tinggi agar bisa mewakili PT akreditasi A dan Internasional, BC.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		❖ Pendanaan terbatas dan larangan untuk ke lapangan, sehingga mencari PT yang mewakili kualitas berbeda sulit, sehingga terpaksa menggunakan pendekatan pengenalan dan pengenalan. ❖ Kami mencoba suatu penelitian hanya didasarkan atas pertemuan singkat, dari lapangan lebih memberikan informasi antisipatif, responsive, perilaku, program yang dijalankan dalam KM. Memberikan info didasarkan atas dokumentasi yang diserahkan oleh universitas. ❖ Pertemuan dibatasi 3 PT dan terbatas, sehingga jauh dari idealitas. Yang didapatkan informasi mengenai operasional, mencoba menanggapi dan merespon tentang KM. Daftar isian dari pengembangan teoritis, tidak ada data yang di dapatkan, sehingga hanya memotret segala sesuatu yang menjadi hambatan dan tantangan bisa cepat diselesaikan. ❖ Persoalan krusial 2 semester diluar kampus perlu melibatkan berbagai stakeholder, bukan hanya indstri, perlu disosialisasikan luas sehingga mendapat dukungan dari berbagai stakeholder. ❖ Pendanaan terbatas, bantuan UKT, pulsa dan transportasi hanya untuk 20 mahasiswa saja, bagaimana yang mahasiswanya banyak? ❖ Pertukaran pelajar, akreditasi A dengan akreditasi A ke BC, rekognisi mahasiswa yang melakukan praktek kerja magang, industri ada perbedaan besar kecil usahanya, kompetensi dan hubungan persoalan dengan pemenuhan kredit poin SKS. ❖ Rekomendasi <i>team work</i> untuk mengatasi tiap-tiap aspek dalam menentukan standar proses dan hasil supaya sesuai dengan standar kebijakan KM. ❖ Perlu dipikirkan kriteria standar proses, kompetensi, mengenai variabel dudi dengan melibatkan berbagai stakeholder, yang menjadi acuan berhasil tidaknya suatu KM, terutama hak belajar diluar kampus. Bagaimana standar proses dan kualitas kompetensi dengan program kemanusiaan, asistensi mengajar dll? ❖ PT tidak memiliki otonomi dalam rekognisi pelaksanaan kerjasama dengan luar negeri, karena rekognisi di Dikti. Closing Statement Prof Sasmoko Karena di bawah payung pusat penelitian Dikbud, hasil akhir harus disuguhkan secara baik. Penelitian apapun bentuknya, strategi dan upaya, data dari lapangan harus didukung teori yang kuat. Ketiga kajian mengukur yang tidak seharusnya diukur, alat ukur tidak sesuai dengan yang diukur. Harapan diperbaiki agar menjadi kebijakan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		yang bagus, karena hampir semua kajian " <i>riset gap</i> " lemah. Orientasi pada kebijakan, jadi harus diselesaikan agar bagus (dengan membaca riset-riSET sebelumnya, banyak sekali peluang) agar dapat digunakan sebagai masukan/dasar dalam pengambilan kebijakan.
c.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 12.02 WIB

VI

Tata Kelola dan Peningkatan Kompetensi Guru

PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA GURU UNTUK MENUNJANG PROFESIONALISME GURU BERBASIS TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PLATFORM ANDROID

Suyanta, Anik Ghuftron, Pujianto, Esti Swastika Sari, Woro Sri Hastuti

Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui efektivitas sistem penilaian kinerja guru berbasis teknologi *artificial intelligence* dalam *platform Android* untuk peningkatan kemampuan mengembangkan inovasi pembelajaran; (2) mengetahui efektivitas sistem penilaian kinerja guru berbasis teknologi *artificial intelligence* dalam *platform Android* untuk peningkatan kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas; dan (3) mengetahui efektivitas sistem penilaian kinerja guru berbasis teknologi *artificial intelligence* dalam *platform Android* untuk peningkatan kemampuan menulis ilmiah hasil pelaksanaan PTK. Penelitian dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi guru dalam mencapai profesionalismenya. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Desain model pengembangan mengadopsi model Dick & Carey yang meliputi tahap (1) analisis (*analyze*) yang memuat tiga langkah, yaitu menganalisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan (*asses needs to identity goals*), menganalisis intruksional (*conduct instructional analysis*), dan menganalisis pebelajar dan konteks (*analysis learners and contexts*); (2) pengembangan (*develop*); (3) desain (*design*); (4) implementasi (*implement*) langkah-langkah prosedural setelah melakukan tahapan analisis kebutuhan; dan (5) evaluasi (*evaluate*). Produk yang dikembangkan berupa aplikasi dalam *platform android*. Data diperoleh melalui uji coba aplikasi secara *online* kepada responden dan dianalisis hasilnya secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang telah dikembangkan: (1) efektif dalam meningkatkan kemampuan guru dalam memunculkan ide inovasi pembelajaran; (2) efektif dalam meningkatkan kemampuan guru melakukan penelitian tindakan kelas; dan (3) efektif dalam meningkatkan keterampilan guru untuk menyusun artikel ilmiah hasil PTK. Keseluruhan peningkatan ini sangat mendukung kinerja guru dalam program keprofesionalan berkelanjutan (PKB).

Kata kunci : kinerja guru, profesionalisme, *artificial intelligence*, android

A. Pendahuluan

A danya ketidakseimbangan kebutuhan dan ketersediaan guru memicu persoalan pendidikan yang menimbulkan efek domino. Isu tentang ketidakseimbangan ketersediaan guru ini tidak hanya terjadi pada guru kelas, tetapi juga pada guru mata pelajaran. Hal ini terus terjadi, bahkan sampai menjadi kendala utama, baik pada jenjang satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Kondisi demikian berdampak pada terhambatnya pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan. Permasalahan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. Berbagai negara berkembang di lingkup Asia juga merasakan dampak yang ditimbulkan ketidakseimbangan ketersediaan guru dengan kebutuhan di lapangan (Blomeke, Suhl, & Dohrman, 2013; Cher Ping Lim, 2013; Dobinson, 2012). Munculnya gagasan kelas rangkap, sekolah satu atap, kewenangan tambahan dan beberapa strategi program terobosan pemerintah untuk mengatasi hal ini belum memberikan dampak nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintah daerah sebagai ujung tombak yang mengetahui jumlah kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan beberapa kebijakan sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Bersama 5 Menteri Tahun 2011, khususnya Pasal 3 ayat 1. Beberapa kebijakan yang telah dibuat, antara lain:

1. Menteri Pendidikan Nasional menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunda pemberian formasi guru PNS;
3. Menteri Keuangan atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan;
4. Menteri Dalam Negeri atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penilaian kinerja kurang baik.

Kebijakan- yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut dimaksudkan agar tercapai ukuran kecukupan dan relevansi serta pemerataan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan. Kondisi penumpukan jumlah guru di daerah perkotaan dan kekurangan guru di daerah pinggiran dapat dihindari melalui pengambilan kebijakan- yang telah dibuat tersebut.

Mutu pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pendidik (guru) dan tenaga pendidikan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja yang selama ini telah dilakukan guru. Penumpukan jumlah guru mata pelajaran di suatu daerah menyebabkan guru kekurangan jam dalam memenuhi jumlah minimal mengajar 24 jam. Kondisi demikian memicu aktivitas guru untuk mencari tambahan jam mengajar di beberapa sekolah. Daerah yang kekurangan guru mengalami kondisi sebaliknya. Seorang guru harus merangkap beberapa mata pelajaran untuk memenuhi kebutuhan jumlah guru di sekolah. Hal ini akan berdampak pada penilaian kinerja guru. Guru kesulitan mengembangkan keterampilan, kompetensi (pedagogik dan profesional), karier, kepegangannya, dan jabatannya.

Kinerja guru secara tidak langsung akan berdampak pada kemajuan belajar peserta didik (Bing & Zhiling, 1991). Guru yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogik sangat baik akan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan kompetensinya sehingga mampu bersaing di era global. Guru berkepribadian dan berperilaku baik serta memiliki pengetahuan yang global dapat menjadi contoh (*role model*) bagi peserta didik (Hakim & Dalli, 2016). Meskipun demikian, belum semua guru dapat terpantau kinerjanya dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik di sekolah, laboratorium atau di forum- akademik. Kinerja guru selama ini dilihat berdasarkan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan setiap provinsi melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) juga menyelenggarakan penilaian kinerja guru (PKG). Meskipun demikian, hasilnya belum menunjukkan kinerja yang benar-benar terukur dan menggambarkan ketercapaian program keprofesian berkelanjutan.

Kegiatan seminar ilmiah, lomba inovasi pembelajaran (inobel), pemilihan guru dan tenaga pendidikan berprestasi, penawaran beasiswa studi lanjut, diklat penyusunan proposal penelitian tindakan kelas (PTK) dan *lesson study* telah diselenggarakan dan difasilitasi, dinas pendidikan maupun mitra LPTK. Belum semua kegiatan tersebut mampu mendorong kinerja guru. Diperlukan sebuah sistem yang secara terintegrasi mampu memonitor kinerja guru sehingga dapat diketahui aspek- mana saja yang memerlukan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru.

Temuan peneliti pada penelitian tahun 2019 tentang pengembangan aplikasi yang memandu guru dalam melakukan program PKB menunjukkan bahwa masih banyak guru mengalami kendala dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pelaksanaan PTK. Hal ini ditambah kesulitan guru dalam pengelolaan kelas yang mendukung aktivitas belajar peserta didik di dalam dan luar kelas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dini, Utami, dan Bambang (2017) terhadap g-guru bidang studi Bahasa Inggris menunjukkan hal yang sama. Guru-guru memanfaatkan forum MGMP, seminar,

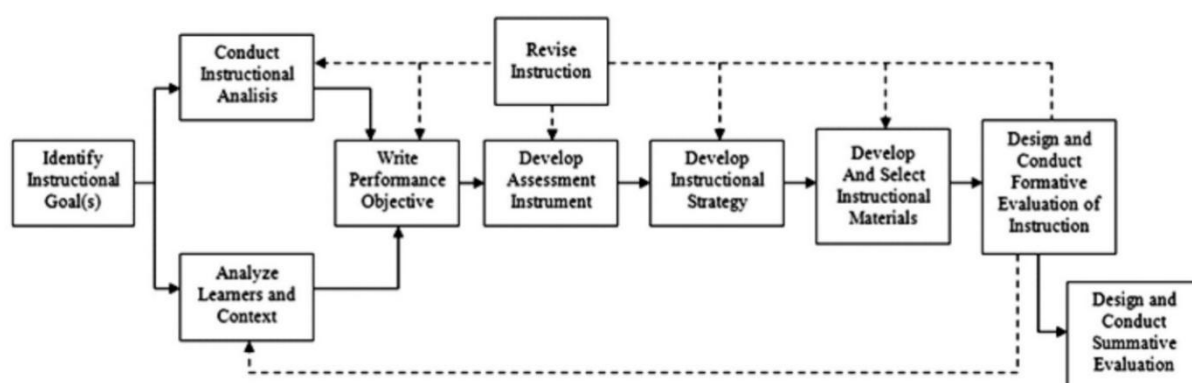
-lomba dan *workshop* serta pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mendukung profesi keberlanjutan. Belum semua guru memanfaatkan forum- tersebut sehingga kinerja guru belum terkontrol dan peserta yang aktif cenderung memusat di salah satu wilayah yang dekat dengan LPTK atau lembaga yang menawarkan kegiatan- pendukung PKB.

Pada saat ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) telah menyediakan SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Program Keprofesian Berkelanjutan). Setiap guru disarankan memiliki *account* dan *username* untuk masuk ke login SIM PKB. *Website* SIM PKB terintegrasi ke laman info GTK. Meskipun demikian, SIM PKB masih belum bisa membuka layanan info GTK disebabkan oleh proses *merger* data dari dapodik ke info GTK belum selesai. Kondisi demikian menyebabkan guru belum sepenuhnya dapat memanfaatkan laman ini dengan maksimal untuk menunjang keprofesian berkelanjutan yang dikehendakinya.

Era Revolusi Industri 4.0 memungkinkan aktivitas akses informasi tanpa mengenal dimensi ruang dan waktu dengan dikenalkannya teknologi digital dan *big data*. Semua hal dapat diinformasikan kapan saja dan di mana saja dengan syarat adanya fasilitas jaringan internet. Berkembangnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan aktivitas *mobile learning* khususnya *platform android* sangat memungkinkan terbantunya hal-hal yang tidak dapat dilakukan secara manual. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk aspek-aspek pembelajaran dan pendidikan termasuk pemanfaatannya bagi penilaian kinerja guru. Berdasarkan pemikiran tersebut, diperlukan inovasi untuk memanfaatkan peran teknologi *artificial intelligence* sebagai sarana untuk menunjang sistem penilaian kinerja guru.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Desain model pengembangan mengadopsi model Dick & Carey (2015) yang meliputi tahap: (1) analisis (*analyze*) yang memuat tiga langkah yaitu: menganalisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan (*asses needs to identity goals*), menganalisis intruksional (*conduct instructional analysis*), dan menganalisis pebelajar dan konteks (*analysis learners and contexts*); (2) pengembangan (*develop*); (3) desain (*design*); (4) implementasi (*implement*) langkah-langkah prosedural setelah melakukan tahapan analisis kebutuhan, dan (5) evaluasi (*evaluate*).



Gambar 1 Alur Tahapan Desain Pengembangan Dick & Carey (2015)

Uji produk dilakukan pada tiga kelompok, yakni (1) guru SD (guru kelas), (2) guru SMP (guru mata pelajaran), dan (3) guru SMA/SMK (guru mata pelajaran). Untuk mengetahui efektivitas produk, dilakukan uji lapangan yang semuanya dilaksanakan secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan. Data penelitian berupa kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran, melaksanakan

pembelajaran (daring dan luring), melakukan evaluasi pembelajaran, pendampingan kegiatan peserta didik, pembuatan karya ilmiah, penyusunan penelitian tindakan kelas (PTK), keaktifan dalam himpunan profesi (KKG dan MGMP), dan pembuatan karya inovasi pembelajaran. Keseluruhan aspek penilaian ini dikontrol menggunakan aplikasi dalam *platform android* yang dimiliki oleh setiap guru sebagai subjek penelitian

C. Tinjauan Pustaka

Tahapan untuk mengetahui ketercapaian suatu kegiatan atau proses sering disebut sebagai penilaian. Penilaian merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi sebagai data, proses pengolahan data, analisis dan menginterpretasinya sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu kesimpulan. Penilaian kinerja guru diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009. Penilaian kinerja guru adalah penilaian setiap aspek (butir) kegiatan tugas utama guru dalam rangka keperluan pembinaan karir, jabatan, dan kepangkatan.

Pelaksanaan tugas utama guru erat kaitannya dengan kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Sistem penilaian kinerja guru meliputi sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya yang dilaksanakan sesuai tugasnya.

Penilaian kinerja guru dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas dalam rangka mengukur kompetensi guru (Fien, 2010). Fungsi penilaian kinerja guru adalah penilaian kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi, keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Cara menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah dilakukannya pada tahun tersebut.

Pendidikan dianggap sebagai proses pemerolehan informasi atau pengetahuan dalam rangka menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Proses pendidikan meliputi transfer pengetahuan, keterampilan dari satu orang ke orang lain dengan dan/atau tanpa media perantara. Kemajuan teknologi baru-baru ini telah memengaruhi hampir setiap bidang kehidupan. Perkembangan teknologi tersebut menentukan bagaimana sistem komunikasi yaitu cara berkomunikasi dengan orang lain, cara bekerja bersama, sistem belajar dan mengajar serta strategi pengelolaan pembelajaran tak terbatas ruang dan waktu.

Pembelajaran pada era abad ke-21 merupakan perspektif yang berbeda. Pembelajaran dapat terjadi di mana saja, setiap saat, pada topik (tema) apa pun yang disadari atau pun tidak akan berpengaruh pada pembentukan gaya belajar. Peserta didik yang hebat adalah hasil kerja keras guru-guru hebat. Prestasi siswa dipengaruhi oleh banyak faktor. *Influencer* yang paling penting adalah guru yang inspiratif dan memiliki akses informasi tak terbatas. Kondisi demikian merupakan salah satu ciri guru yang dibutuhkan pada era abad ke-21.

Para guru pada abad ke-21 harus mampu mempertimbangkan jenis kebutuhan peserta didik dan membekali serta mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Sebagian guru menganggap tugas atau pekerjaan ini sangat rumit dan banyak tuntutan tanggung jawab. Keberadaan program pengembangan guru profesional yang berkualitas tinggi merupakan salah satu

sarana yang dapat digunakan guru untuk mempersiapkan tantangan pekerjaan tersebut. Program pengembangan harus menggabungkan penggunaan integrasi teknologi dalam pengajaran (Jan, 2017).

Tuntutan Revolusi Industri 4.0 dan keterampilan abad ke-21 menjadi pertimbangan guru dalam menentukan pola strategi, metode, dan/atau model pembelajarannya di dalam atau di luar kelas. Peserta didik difasilitasi menggali kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya dengan akses informasi sebanyak-banyaknya. Guru sebagai fasilitator mengarahkan peserta didik menentukan gaya belajar sesuai motivasi intrinsik yang dimilikinya sehingga informasi atau pengetahuan ditemukannya sendiri melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dirancang guru.

Era Revolusi Industri 4.0 memungkinkan peserta didik sebagai tuan rumah teknologi dan produsen konten digital. Peserta didik lebih ramah dan familiar dengan perkembangan teknologi baru dan terbaik meskipun jarang menggunakannya untuk keperluan komunikasi dengan teman, anggota keluarga dan komunitasnya. Setiap peserta didik memiliki perangkat (*gadget*) berteknologi yang mampu digunakan untuk menghasilkan blog sebagai media komunikasi dengan dunia luar. Meskipun demikian, pada waktu pembelajaran di kelas yang tidak diperlukan bantuan *gadget*, guru diperkenankan untuk mengondisikan agar semua peserta didik mematikan semua jenis *gadget* dan fokus pada kemampuan berpikir kritis melalui forum diskusi antar teman sebaya. Aktivitas dapat dilanjutkan dengan strategi penugasan membuat blog kreatif yang mengulas cerita dan pendapatnya terhadap suatu topik yang sedang dibahas sehingga akan menumbuhkan rasa bangga dalam diri peserta didik ketika mampu berbagi informasi dengan orang lain. Kondisi demikian memungkinkan bagi guru profesional abad ke-21 dan Era Revolusi Industri 4.0 sebagai agen perubahan (Badley, 2006).

Istilah kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sebenarnya mengacu pada kecerdasan manusia yang ditanamkan dalam mesin dan diberikan program untuk meniru gerak manusia dan tindakannya. Istilah AI ini juga dapat diterapkan pada mesin apa pun yang menunjukkan sifat yang terkait dengan pikiran manusia. Proses yang termasuk di dalamnya adalah pembelajaran (perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi), penalaran (menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti) dan koreksi diri.

Kecerdasan buatan didasarkan pada prinsip bahwa kecerdasan manusia dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga mesin dapat dengan mudah menirunya dan menjalankan tugas, dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Tujuan kecerdasan buatan meliputi pembelajaran, penalaran, dan persepsi. Pengertian ini akan selalu dinamis dan bergeser mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi AI terus berkembang sehingga banyak peran manusia digantikan oleh mesin berteknologi AI.

AI memiliki dua kategori, yaitu lemah atau kuat. AI lemah (*weak AI*) yang juga dikenal sebagai AI sempit adalah sistem AI yang dirancang dan dilatih untuk tugas tertentu. Asisten pribadi virtual, seperti Apple Siri, adalah bentuk AI yang lemah, sedangkan AI kuat (*strong AI*), juga dikenal sebagai kecerdasan buatan umum adalah sistem AI dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Ketika disajikan dengan tugas khusus, sistem AI kuat dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia (www.cnbcindonesia.com).

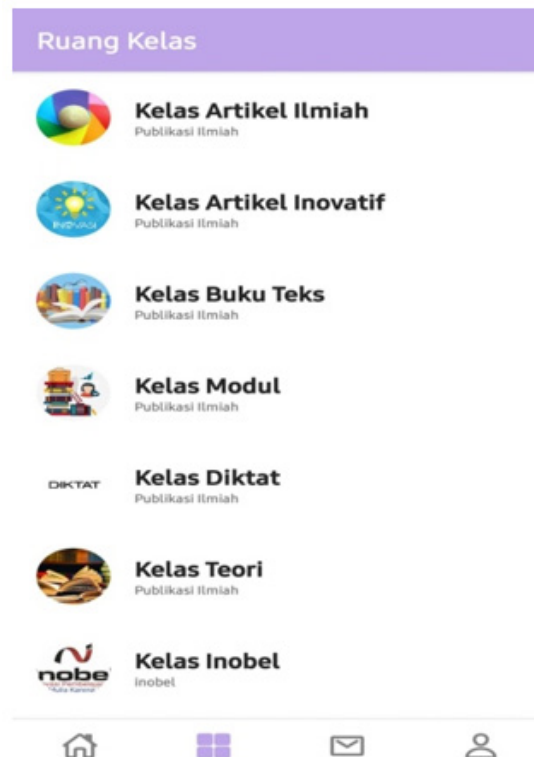
Karakteristik AI yang memadukan teknologi dan alur algoritma yang dikembangkan mulai algoritma sederhana sampai algoritma kompleks memungkinkan dikembangkannya AI untuk bidang pendidikan. Serangkaian tugas yang direncanakan oleh guru dan harus diselesaikan oleh peserta didik dapat disajikan dalam *learning management system* (LMS). Penugasan yang membutuhkan peran manual oleh guru dapat tergantikan dengan keberadaan AI (Popenici & Kerr, 2017). AI dapat dihadirkan dalam bentuk *software* atau sistem aplikasi terintegrasi dengan *database* yang telah disiapkan oleh pengembang program. Penggunaan AI untuk keperluan bidang pendidikan telah dicoba di berbagai negara dan mendapatkan hasil yang bervariasi. AI telah membantu para guru melaksanakan tugas

rutin secara manual menjadi lebih sistematis (Timms, 2016; Barnes *et al*, 2017; Nicols & Holmes, 2018; Karsenti, 2019; Mohammed, 2019; Walkington & Bernacki, 2019).

D. Hasil dan Pembahasan

Pada tahap awal penelitian telah dilakukan analisis kebutuhan. Kebutuhan pengguna, yaitu guru (baik pada jenjang SD, SMP/MTs, dan SMA/K) difokuskan pada komponen mana saja yang merupakan bagian pengembangan kemampuan professional yang dibutuhkannya. Hasil analisis kebutuhan ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam aplikasi menjadi kelas-kelas yang ditawarkan untuk membekali keterampilan yang dikehendaki pengguna. Kelas tersebut adalah kelas artikel ilmiah, kelas artikel inovatif, kelas buku teks, kelas modul, kelas diktat, kelas teori dan kelas inobel.

Kelas teori diberikan sebagai bahan belajar untuk semua pengguna karena di dalamnya disajikan teori-teori, bukupanduan yang menambah pemahaman pengguna (guru) dalam mengikuti kegiatan per kelas. Adapun sajian tampilan menu kelas tersebut seperti berikut ini.



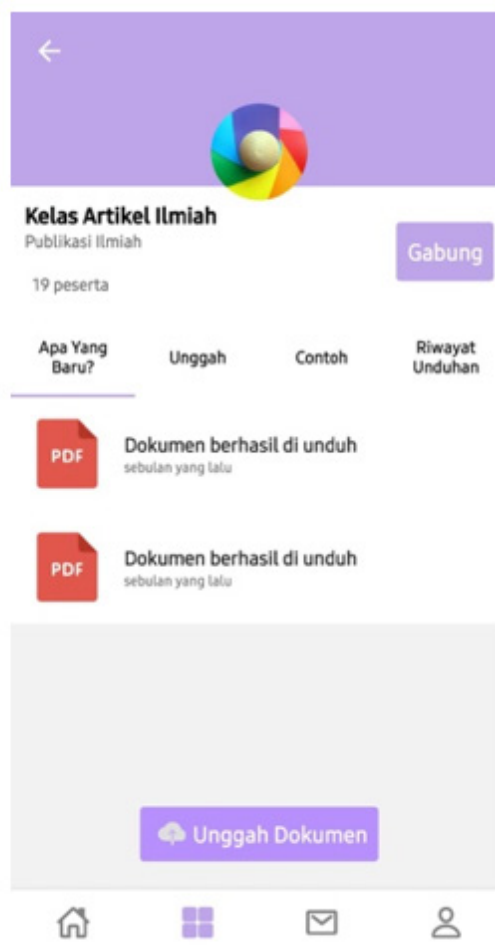
Gambar 2 Kelas yang disediakan pada aplikasi

Kemudahan komunikasi antarpengguna dan adanya peserta yang memilih kelas yang sama difasilitasi melalui menu pesan. Peserta dapat *updating* profil sehingga memudahkan diskusi lebih lanjut ketika menemukan topik yang dianggap sangat menarik untuk menjadi bahan diskusi.

Fitur- berikut sangat membantu para peserta untuk tetap terhubung dengan topik diskusi yang diangkat oleh para peserta. Peserta mudah bergabung dengan kelas yang dikehendaki hanya dengan klik menu “gabung”.



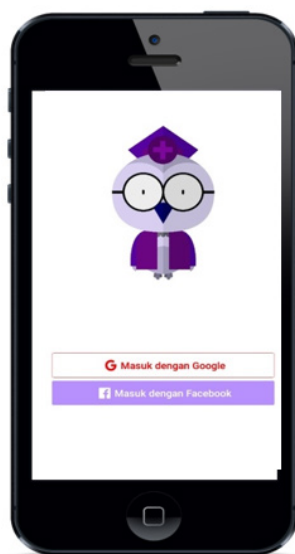
(a)



(b)

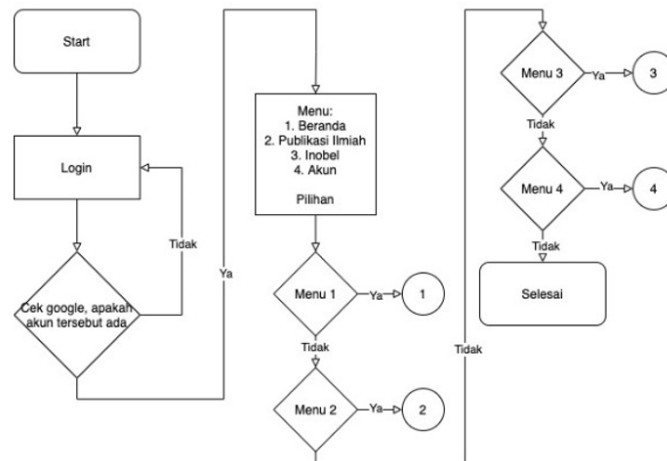
Gambar 3 (a) Menu Diskusi sebagai Penghubung Antarpengguna Aplikasi; (B) Menu di Salah Satu Kelas Menyediakan Fasilitas “Gabung”.

Para pengguna mudah menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan karena untuk mendaftarkan diri hanya memerlukan *account google* atau *facebook*.



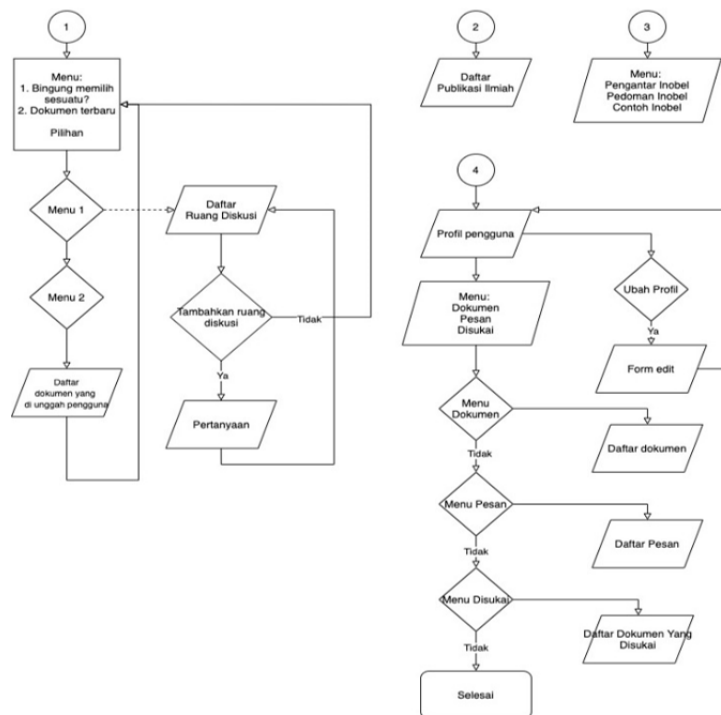
Gambar 4 Menu Registrasi Menggunakan *Accout Google* atau *Facebook*

Adapun algoritma yang digunakan untuk proses entri tersebut dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 5 Diagram Alir Sistem Entri Pengguna dan Sajian Menu Pendampingan yang Ditawarkan

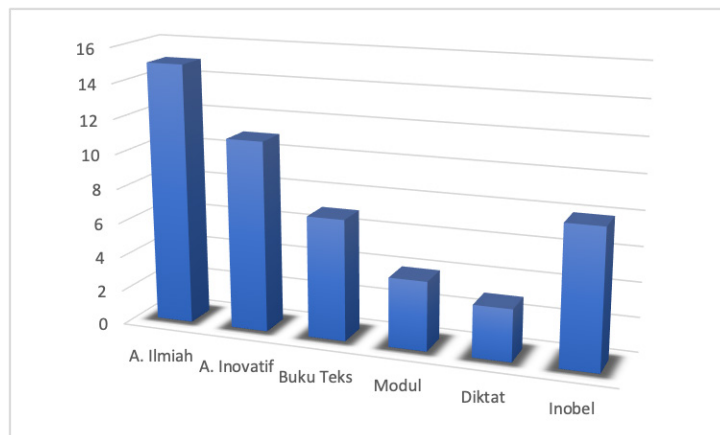
Adapun mekanisme penggunaan aplikasi dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut.



Gambar 6 Diagram Alir Mekanisme Penggunaan Aplikasi untuk Perbaikan Dokumen

Pelacakan dokumen dan koding jenis layanan difasilitasi *AI* sehingga pengguna dengan cepat mendapatkan tanggapan untuk dilayani sesuai keterampilan apa yang dibutuhkan. Guru dapat memilih pendampingan pembuatan inovasi pembelajaran (inobel), penyusunan karya ilmiah dan laporan PTK. Ketiga jenis layanan tersebut digunakan sebagai indikator pengukuran kinerja PKB guru.

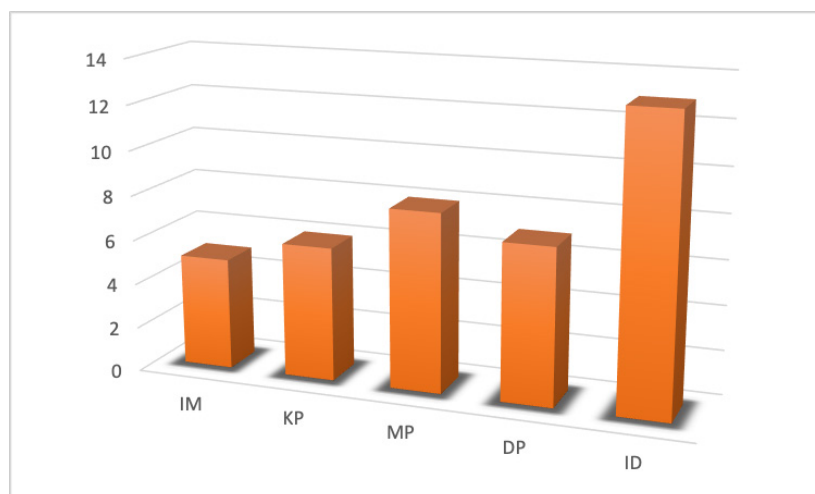
Aplikasi sistem penilaian kinerja guru untuk menunjang profesionalisme guru ini telah diujicobakan kepada 35 guru di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Guru-guru yang terlibat tersebar mulai guru kelas di SD, guru mata pelajaran di SMP dan SMA. Adapun sebaran setiap peminat kelas yang ditawarkan disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 7 Sebaran Jumlah Peserta Pada Setiap Kelas yang Ditawarkan Aplikasi

Peserta pada kelas artikel ilmiah dan artikel inovatif jumlahnya menempati urutan pertama dan kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa guru memerlukan pendampingan lebih lanjut dalam keterampilan menyusun artikel ilmiah dan artikel inovatif. Kedua artikel ini berbeda peruntukannya. Artikel ilmiah lebih menekankan hasil-penelitian yang telah dikerjakan guru, termasuk hasil-l pelaksanaan PTK. Artikel inovatif merupakan pendamping produk inovasi pembelajaran yang setiap tahun diselenggarakan oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Inobel berupa pengembangan karya inovatif yang memanfaatkan teknologi sebagai pendukung pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jan (2011) bahwa pengembangan keprofesian guru harus menggabungkan penggunaan integrasi teknologi dalam pengajaran.

Hasil analisis terhadap pendampingan pada kelas penyusunan artikel ilmiah dibagi dalam beberapa permasalahan yang sering ditemukan oleh peserta, yaitu identifikasi masalah (IM), kajian pustaka (KP), metode penelitian (MP), desain penelitian (DP), dan interpretasi data (ID). Subpermasalahan dalam menyusun artikel ilmiah ini dirasakan oleh peserta sebagai salah satu penyebab bahwa selama ini sulit mengembangkan karya berupa artikel ilmiah. Atas penjelasan lima belas peserta di kelas artikel ilmiah, sebaran permasalahan yang masih ditemukan oleh peserta seperti tersaji pada diagram di bawah ini.



Gambar 8 Sebaran Identifikasi Kesulitan Peserta dalam Penyusunan Artikel Ilmiah

Komponen interpretasi data dan metode penelitian menjadi temuan kesulitan terbanyak pada kelas artikel ilmiah. Peserta lebih sering menyajikan data atau temuan penelitian dalam bentuk tabel, diagram atau grafik. Namun, data tersebut belum diinterpretasikan maksud dan maknanya. Hal ini berdampak pada artikel ilmiah yang disajikan menjadi kurang informatif dan sering mengalami penolakan ketika dikirim ke jurnal penelitian atau media publikasi ilmiah lainnya.

Adanya perkembangan kemajuan pendampingan keprofesian guru di berbagai kelas dapat dimonitor oleh pengawas atau kepala sekolah apabila mereka ikut bergabung ke kelas- tersebut. Hal ini disebabkan oleh laporan kemajuan secara kualitatif dapat dilihat berdasarkan pemberian penilaian oleh pembahas berupa n tanda bintang mulai bintang satu sampai dengan bintang lima yang merupakan penanda kemajuan setiap program. Cara ini dimaksudkan sebagai pendukung sistem penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas dalam mengukur kompetensi guru (Fien, 2010).

E. Penutup

Program keprofesionalan berkelanjutan (PKB) yang dilakukan guru memerlukan proses yang bertahap dan dukungan berbagai pihak. Pendampingan oleh kepala sekolah dan pengawas sangat membantu mengarahkan profesionalitas guru, baik dalam perencanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan aspek manajerial persekolahan, maupun praktik nonmengajar lainnya. Produk hasil pengembangan yang telah diujicobakan menunjukkan efektivitasnya , mendampingi guru untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya dalam meningkatkan profesionalismenya. Capaian target setiap kemajuan program dalam kelas yang ditawarkan mengindikasikan adanya peningkatan yang efektif dalam kinerja guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas dan menyusun artikel ilmiah sebagai bagian program keprofesionalan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badley, G. 2006. The teacher as change agent. *Journal of In-service Education*. Vol. 12:3 p. 151-158. Doi: 10.1080/0305763860120305
- Barnes *et al.* 2017. Preface for the special issue on AI-supported education in computer science. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 27(1), 1-4
- Benhard Farraz. 2019. Mengenal artificial intelligence dan kegunaannya. [http: www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) diakses pada 15 Desember 2019)
- Bing, L., & Zhiling, Y. 1991. Teacher education innovations in the Asia Pasific Region. Action in teacher education fall 1991 Vol XIII No. 3
- Blomeke, S., Suhl, U., & Dohrman, M. 2013. Assessing strength and weaknesses of teacher knowledge in Asia, Eastern Europe, Western Countries, differential item functioning in TEDs-M. *International Journal of Science and Mathematics Education* (2013). Vol. 11 p. 795-817
- Cher Ping Lim. 2013. Strengthening the research practice nexus: A special issue as a springboard for building the capacity of teacher education institution in Asia. *Internet and Higher Education* 16 (2013) p. 32-35
- Dick, W., Carey, W., & Carey, L.O. 2015. The systematic design of instruction. 8th Edition. Pearson: USA
- Dini K., Utami W., & Bambang Y. 2017. How do indonesian professional english teacher develop their pedagogical competence in teaching implementation?.*Arab World English Journal* (AWEJ) Volume 8 Number 2 June, 2017 Pp. 293-307 DOI: <https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol8no2.21>
- Dobinson, T. 2014. Out of Asia: Learning re-examined, teacher education re-configured. *Asia Pacific Journal of Education* Vol 32. No. 2 June 2012 p. 167-179
- Fien. 2010. Sustaining action research and professional development in teacher education for

- sustainability: A case study from Asia and the Pasific. *International Research on Geographical and Environmental Education*. 7: 3 p. 251-254
- Hakim, L. & Dalli, C. 2016. To be professional is a never ending journey: Indonesian early childhood practitioners views about the attitude and behaviours of a proffessional teacher. *Early Years An International Research Journal* ISSN: 0957-5146
- Jan, H. 2017. Teaccher of 21st century: Characteristics and development. *Journal of Research on Humanities and Social Sciences* Vol. 7 No. 9, 2017
- Karsenti. 2019. Artificial intelligence in education: The urgent need to prepare teachers for tomorrow's schools. *Journal of Formation et profession*, 27(1), 112-116.
- Mohammed. 2019. Towards inclusive education in the age of artificial intelligence: Perspectives, challenges, and opportunities. *Journal of Artificial Intelligence and Inclusive Education*(pp. 17-37). Springer, Singapore
- Nicols & Holmes. 2018. Don't do evil: Implementing artificial intelligence in universities. *Towards Personalized Guidance and Support for Learning*, 109.
- Popenici, SA., & Kerr, S. 2017. Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. *Journal Research and Practice in Technology Enhanced Learning* (2017) 12:22 DOI 10.1186/s41039-017-0062-8
- Timms. 2016. Letting artificial intelligence in education out of the box: Educational cobots and smart classrooms. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 26(2), 701-712.
- Walkington & Bernacki. 2019. Personalizing algebra to students' individual interests in an intelligent tutoring system: Moderators of impact. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 29(1), 58-88

PROGRAM PENDAMPINGAN LITERASI BERBASIS DARING PADA MASA TATANAN BARU BAGI GURU SMP NEGERI

Ilza Mayuni, Eva Leilyanti, Tara Mustikaning Palupi
Universitas Negeri Jakarta

Abstrak. Literasi kebijakan prioritas Merdeka Belajar Kemendikbud mempersyaratkan hadirnya guru dengan kompetensi yang mumpuni untuk memfasilitasi peningkatan literasi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terkait bagaimana meningkatkan kompetensi literasi dan pedagogik guru melalui program pendampingan literasi daring selama masa pandemi COVID-19. Penelitian *Participatory Action Research* ini dilaksanakan dalam dua siklus selama 14 minggu, 22 sesi (44 jam) dengan menerapkan Model *Sheltered Instruction Observation Protocol* (SIOP). Program ini diikuti oleh 42 guru (9 di antaranya sebagai *coach*) Bahasa Inggris SMPN dari 16 provinsi di Indonesia. Data dikumpulkan berbentuk kuantitatif (hasil tes dan rubrik penilaian *microteaching*) dan kualitatif (observasi, rekaman video, dokumen, jurnal reflektif, dan diskusi terpumpun), dan dianalisis serta diinterpretasikan dengan menggunakan *convergent design*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pendampingan literasi secara signifikan meningkatkan kompetensi guru dalam mengajarkan literasi, berdasarkan penilaian protokol observasi SIOP pada *microteaching* (dari 64% menjadi 71%), dan dalam merancang pembelajaran (dari 73% menjadi 75,5%). Meskipun berdasarkan hasil *pre-test* (60.00) dan *post-test* (61.46) tidak terlihat peningkatan yang berarti dalam hal literasi guru, temuan ini menunjukkan bahwa pola pendampingan yang berbasis daring, kolaboratif, dan praktik reflektif berhasil membangkitkan pemahaman guru terhadap literasi digital, praktik reflektif, dan kemandirian guru dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kata kunci: literasi, pendampingan daring, SIOP, praktik reflektif

A. Pendahuluan

Laporan PISA 2018 (dirilis Desember 2019) menyiratkan bahwa Indonesia harus bekerja lebih keras meningkatkan literasi siswa, terutama tingkat SMP. Penurunan skor yang sangat signifikan, terutama pada literasi membaca (371) sebesar 26 poin (dibanding tahun 2015) mengindikasikan bahwa sebagian besar (7 dari 10) siswa usia 15 tahun memiliki kemampuan literasi bahasa di bawah kompetensi minimal. Siswa hanya mampu mengidentifikasi informasi eksplisit dari bacaan pendek serta prosedur sederhana (Kemendikbud, 2019).

Temuan dua kajian kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Pusat Penelitian dan Kebijakan (Puslitjak) dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan potret serupa dengan hasil PISA. Studi Puslitjak (2019) menemukan bahwa lebih dari dua pertiga (71%) provinsi di Indonesia memiliki indeks kegiatan literasi yang kurang memuaskan. Tidak satu pun dari 34 provinsi yang mencapai indeks tertinggi, hanya 26% di antaranya yang mencapai tingkat menengah. Hasil penelitian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud (2018), mengindikasikan kondisi serupa. Studi ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan literasi siswa kelas 9 SMP di 34 provinsi dengan mengacu pada kriteria PISA. Meskipun terdapat peningkatan, kemampuan membaca siswa berada di bawah pada rerata PISA (489). Siswa pada level skor ini hanya mampu menyelesaikan tugas membaca dengan kompleksitas sedang (81.2%), hanya 18,8% yang

mencapai skor tinggi. Studi ini juga menunjukkan bahwa kemampuan siswa juga berkorelasi positif terhadap kegiatan literasi guru, yakni semakin sering guru membaca dan melakukan kegiatan literasi, semakin tinggi kemampuan membaca siswa.

Studi tentang praksis gerakan literasi pada 39 SMP negeri di Jakarta menunjukkan bahwa Gerakan Literasi Sekolah (GLS) belum berdampak secara signifikan terhadap peningkatan literasi siswa (Mayuni *et.al.*, 2020). Gerakan ini berhasil diimplementasikan pada tataran kegiatan pendukung literasi, seperti sosialisasi dan pembiasaan melalui kegiatan 15 menit membaca, sudut baca, atau kegiatan lain. Meskipun demikian, GLS belum berhasil mencapai esensi kegiatan literasi yang diharapkan.

Ketiga hasil studi di atas menyiratkan bahwa kompetensi guru merupakan kunci utama dalam meningkatkan literasi membaca siswa. Kendati guru mengklaim mereka paham atas materi yang diajarkan, menurut Mayuni *et.al* (2020), bahwa guru memiliki keterbatasan dalam mengembangkan strategi membaca yang bermakna. Dari studi Badan Bahasa (2018), kemampuan ini termasuk dalam hal memfasilitasi siswa mampu mengolah informasi dan menjawab pertanyaan interpretasi, analisis, sintesis, refleksi, dan evaluasi serta menavigasi soal-soal dalam bentuk tampilan digital. Dengan mencermati perkembangan TIK yang semakin masif dewasa ini, ICT literacy panel (2002, dalam Ting, 2015) menemukan bahwa siswa tidak hanya mampu mengakses, mengatur, dan mengevaluasi informasi, tetapi juga menguji dan mengintegrasikan informasi secara kritis dan bermakna (Greene, Yu, & Copeland, 2014). Dengan demikian, tugas guru memfasilitasi siswa memahami berbagai jenis teks di internet dan menumbuhkan literasi dan teknologi di kelas menjadi sebuah keniscayaan (Schmar-Dobler, 2003).

Untuk menjawab permasalahan di atas diperlukan pelatihan intensif dan berkelanjutan berupa pendampingan literasi (*literacy coaching*). Model pendampingan literasi sendiri sudah lama dikembangkan di berbagai negara sebagai bagian dari pengembangan profesi berkelanjutan dan terbukti efektif membantu guru belajar bersama, memecahkan masalah dan merefleksi diri serta mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi siswa (Moran, 2007; Rodgers & Rodgers, 2007; Powell, Steed, & Diamond, 2010; Bincarosa, Brynk, and Dexter, 2010; Stephens, *et.al.*, 2011; dan Dozier, 2016). Namun, model pendampingan literasi yang telah dikembangkan para ahli tersebut tidak didesain sepenuhnya dalam konteks pendampingan jarak jauh.

Pola pendampingan literasi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memerlukan adaptasi digital yang sejalan dengan kebutuhan dan kesiapan calon peserta. Studi Mayuni, *et.al.* (2020, *forthcoming*) menemukan, dari 150 guru SMPN yang berasal dari 16 provinsi di Indonesia, 93% guru mengaku membutuhkan program pendampingan literasi. Sebagian besar (88%) di antaranya mengalami kesulitan mengajarkan literasi terutama dalam hal strategi pembelajaran, pengetahuan dan *literacy skills*. Dalam menghadapi tantangan kondisi pandemi ini, 73% guru mengatakan bersedia mengikuti program pendampingan literasi melalui daring. Selain itu, materi pendampingan yang paling mereka butuhkan adalah pada *reading comprehension* (cara bagaimana memahami isi teks), *genre*, dan praktik reflektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana meningkatkan kompetensi literasi dan pedagogik guru melalui program pendampingan literasi daring dalam kondisi pandemi COVID-19 ini?”

Masa tatanan normal baru ini menjadi titik berangkat pelaksanaan pola pendampingan jarak jauh (PJJ) dengan standar penjaminan mutu dalam seluruh proses pendampingan. Program ini selaras dengan tren pendidikan pada Era Revolusi Industri 4.0 yang mempersyaratkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, belajar dari pengalaman lapangan, kapan pun, dan di mana pun untuk meningkatkan penalarannya, dan tidak ada lagi menggunakan *platform* konvensional (Gibson,

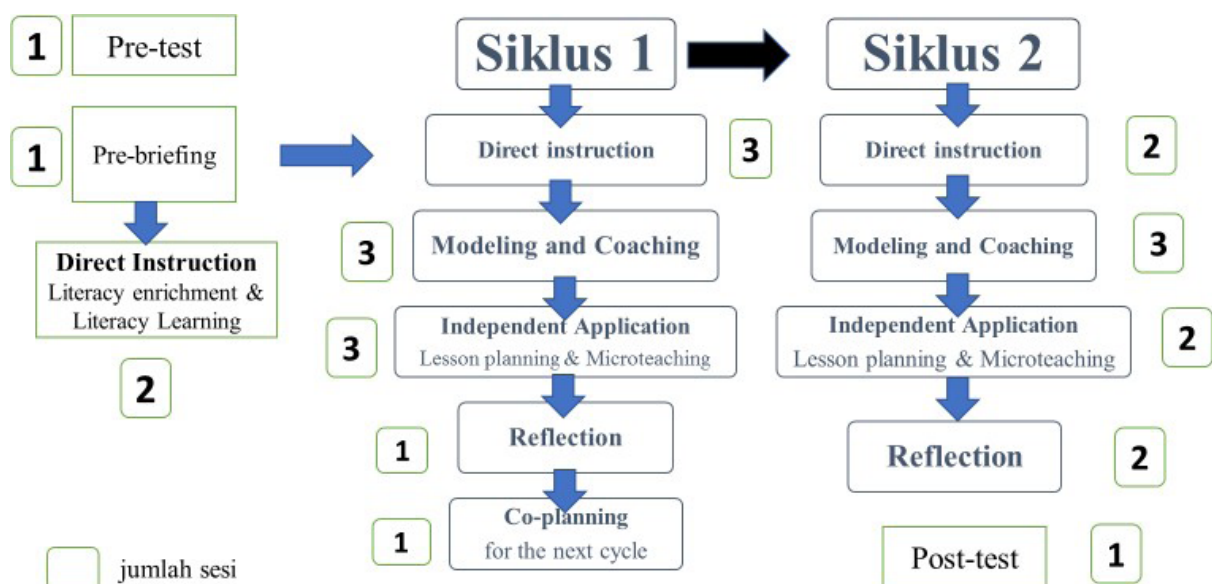
Ostashevski, Flintoff, Grant, & Knight, 2015; Fisk, 2017).

B. Metode

Penelitian ini berbentuk *participatory action research* (Martler, 2009) dalam bentuk program daring pendampingan literasi. Partisipan dalam penelitian ini adalah 42 guru Bahasa Inggris di SMPN yang memiliki pengalaman menjadi instruktur minimal di tingkat kabupaten/kota. Guru ini berasal dari 30 kabupaten/kota dari 16 provinsi di Indonesia (dari Sumatra sampai Papua). Proses rekrutmen dan penetapan partisipan dilakukan dengan merujuk pada kriteria pengalaman mengajar, menjadi instruktur, sebaran wilayah, dan ketersediaan fasilitas internet dan kesediaan mengikuti program pendampingan sampai selesai. Sembilan dari peserta dipilih sebagai fasilitator (*coach*) berdasarkan kriteria kompetensi dan pengalamannya menjadi instruktur Bahasa Inggris di tingkat nasional. Peneliti dalam konteks ini memosisikan diri sebagai partisipan yang terlibat langsung dalam semua tahap proses pendampingan: merancang, mengoordinasikan, memberikan pembekalan kepada *coach* dan materi pendampingan, tahap refleksi dan penuntasan pendampingan.

Program pendampingan ini menerapkan *the sheltered instruction observation protocol* (SIOP) yang dikembangkan Echevarria, Vogt, dan Short (2008), yakni salah satu model pembelajaran berbasis riset yang terbukti berhasil merespons kebutuhan guru dalam meningkatkan pengetahuan literasi siswa (McCall, 2018) dengan mengintegrasikan *language* dan *content* bagi guru dan siswa (Short *et al.*, 2012). Sebelumnya tim peneliti telah menyusun dua modul sebagai acuan bagi *coach* dan guru yang didampingi (*coachee*) dalam merancang, mengembangkan materi pembelajaran, mempraktikkan, dan merefleksikannya. Modul yang pertama adalah “Pengayaan Literasi” (untuk membekali peserta dengan substansi literasi dengan mengacu pada Kurikulum 2013. Modul kedua berupa “Pembelajaran Literasi” yang memuat strategi pembelajaran literasi berbasis SIOP.

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan proses sebagai berikut.



Gambar 1 Desain Penelitian

Dengan mengadopsi model pendampingan literasi kolaboratif (Mayuni, *et.al.*, 2020, *forthcoming*), program pendampingan dilakukan dalam 22 sesi (@ 120 menit) pertemuan setiap Selasa dan Kamis malam pada akhir Juli hingga November 2020. Sesi ini tidak termasuk pembekalan yang diberikan sebelumnya kepada *coach* sebanyak tiga sesi. Mekanisme pendampingan tiap tahapan dapat dibaca

dalam subbagian temuan dan pembahasan.

Pengumpulan dan analisis data menggunakan pendekatan *mixed-method*. *Pre-test* dan *post-test* dilaksanakan untuk melihat perkembangan peningkatan literasi partisipan selama proses pendampingan dan rubrik SIOP untuk menilai RPP dan penampilan *coachee* pada kegiatan *microteaching*. Pengolahan dan analisis data dari *pre-test* dan *post-test* menggunakan statistika deskriptif dengan uji perbandingan (*paired sample t-test*) pada SPSS. Data diperoleh melalui observasi, rekaman *microteaching*, analisis dokumen, diskusi terpumpun dan jurnal reflektif dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya, *convergent design* (Creswell, 2015) digunakan untuk menyandingkan dan mengonfirmasi temuan yang diperoleh dari data kuantitatif dan data kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Sebelum pemaparan hasil penelitian, berikut dijelaskan tahapan dua siklus penelitian yang terkait langsung dengan hasil penelitian. Pertama, *pre-test* dilaksanakan secara daring, dilanjutkan dengan *pre-briefing* tentang pengenalan program dan modul yang menjadi materi pokok pendampingan. Pada awal siklus pertama, *direct Instruction*, tim peneliti menyampaikan materi inti dan strategi pembelajaran literasi terintegrasi. Selama tiga sesi diberi pembekalan untuk memahami dua modul terkait dengan pemahaman literasi) dan pembelajaran literasi Mulai dari sesi *modeling coach* dan *coachee* bekerja dalam kelompok kecil. Pada tahap ini *coach* mendemonstrasikan materi dan strategi pembelajaran yang ada pada kedua modul, dilanjutkan dengan *coaching* dimana partisipan bekerja dalam kelompok kecil menerapkan *skills* yang sudah diperagakan dan difasilitasi oleh *coach*. Pada tahap *independent application* setiap kelompok didampingi oleh *coach* menyusun program pembelajaran dan secara bertahap bekerja mandiri. Pada bagian akhir tahap ini dilakukan *microteaching* secara daring di kelas yang diampu *coachee* di sekolahnya. Selanjutnya, pada sesi *reflection*, *coach* dan *coachee* melakukan refleksi terkait dengan kinerja *coachee* dalam merancang pembelajaran dan praktik mengajar. Selain itu, refleksi mandiri juga dilakukan *coachee* melalui pengisian jurnal reflektif setiap akhir sesi. Siklus pertama diakhiri dengan *co-planning* berdasarkan hasil refleksi untuk perbaikan pada siklus berikutnya.

Siklus kedua mengikuti alur yang sama dengan siklus sebelumnya, tetapi diakhiri dengan refleksi tentang *microteaching* dan seluruh rangkaian pendampingan, modul, praktik, baik lintas kelompok maupun pengalaman partisipan selama mengikuti program pendampingan. Sebelum penutupan program, *coachee* melaksanakan *post-test*. Selama proses pendampingan, tim peneliti secara terpisah juga mengadakan sesi khusus dengan *coach* untuk berkoordinasi, menindaklanjuti hasil observasi, refleksi, dan pemantapan program pendampingan. Secara paralel setiap *coach* juga memberikan pendampingan, melalui *whatsapp* dan/atau daring, untuk menyiapkan rancangan pembelajaran dan penampilan *coachee* pada *microteaching*.

Berikut dipaparkan hasil penelitian dan pembahasannya untuk menjawab pertanyaan penelitian.

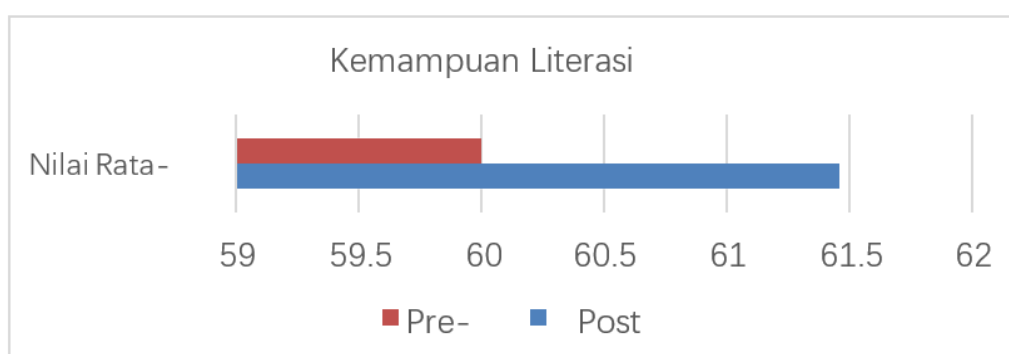
1. Bagaimana program pendampingan dapat meningkatkan literasi guru?

Berdasarkan hasil *pre-test* and *post-test*, peningkatan kemampuan literasi guru tidak begitu signifikan.

Paired Samples Test				
		T	df	Sig. (2 tailed)
Pair 1	Pre_test - Post_test	-0.781	23	0.443

Tabel. Hasil Uji Perbedaan Pre-test dan Post-Test Literasi Guru

Hasil uji t berpasangan (*paired sample t-test*) dari data nilai *pre-test* dan *post-test* diperoleh $\text{sig.} = 0.443/2 = 0,222 > 0,05$, artinya tidak ada peningkatan yang berarti pada literasi guru. Perbedaan skor terkonfirmasi sebesar 1,46 poin, pada skor rerata *pre-test*, 60 menjadi 61.46 pada *post-test*, sebagaimana digambarkan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 2 Kemampuan Literasi Guru

Tidak adanya peningkatan (secara kuantitatif) pada literasi guru dapat dijelaskan dari sisi keterbatasan waktu dan dari tingkat kesulitan tes. Pertama, waktu pembekalan modul *literacy enrichment* hanya 3 sesi (2 sesi pada siklus pertama dan 1 sesi pada siklus kedua), tidak seimbang dengan banyaknya materi yang harus dikuasai guru. Dorongan agar guru mempelajarinya di luar sesi pendampingan ternyata tidak efektif mengingat kesibukan guru mengajar virtual di sekolah masing-masing. Kedua, materi tes disusun dengan merujuk kepada Kurikulum 2013, berbasis *higher order thinking* (HOTS) yang mencakup literasi berbasis *genre*, kelindan konsep teks, konteks dan *genre*. Bagi guru yang sudah berpengalaman menjadi instruktur di tingkat kabupaten/kota, materi ini masih dianggap baru dan berat sehingga rerata skor *post-test* hanya 61,46 (dari rentangan 0 – 100). Meskipun demikian, data kualitatif menunjukkan bahwa literasi guru meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman mereka tentang modul pengayaan literasi.

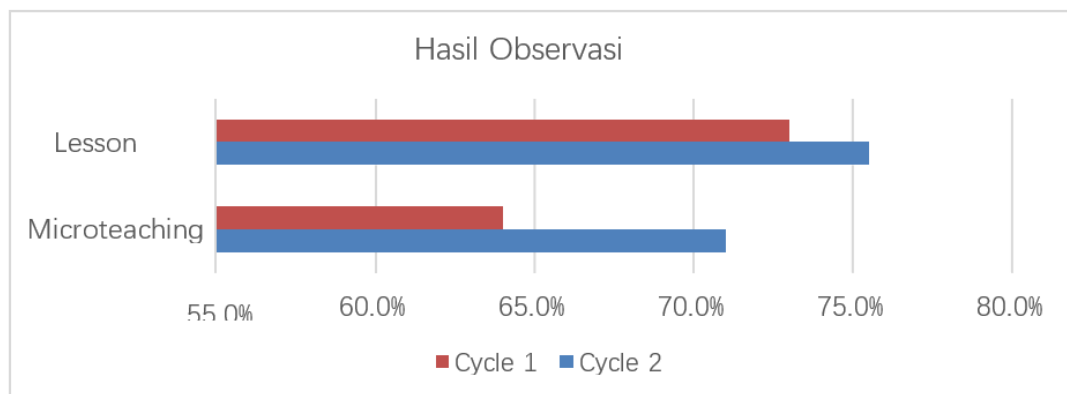
Berikut adalah pernyataan yang dipetik dari kegiatan refleksi jelang akhir program pendampingan:

“Saya senang bisa mengikuti program ini karena Modul Pengayaan Literasi membantu meningkatkan kemampuan literasi saya, bagaimana memahami dan mengevaluasi suatu materi dan teks. Kemudian, soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skill) yang ada di modul meningkatkan kemampuan berpikir kritis saya dan siswa.” – CN-02.

“Awalnya pengetahuan literasi saya terbatas, namun setelah mengikuti program ini, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang literasi yang nantinya bisa diterapkan untuk mengajar siswa. Modul yang diberikan sangat berguna bagi saya sebagai pengajar untuk meningkatkan kemampuan literasi.”- CN-06.

Pernyataan di atas menggambarkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis guru, terutama dalam membaca pemahaman terkait teks berbasis *genre* dan mengindikasikan bahwa peserta belajar banyak saat berperan sebagai pembelajar dan berpartisipasi lebih aktif selama pendampingan literasi (Dozier, 2008).

Selain hasil tes, data kuantitatif dari rubrik penilaian observasi SIOP juga menunjukkan dampak positif program pendampingan ini, tidak hanya terhadap kompetensi pedagogik, tetapi juga peningkatan literasi guru.



Gambar 3 Hasil Protokol Observasi SIOP

Seperti terlihat pada gambar di atas, rerata skor penyusunan RPP 73% pada siklus 1 menjadi 75,5 pada siklus 2 menunjukkan terjadinya peningkatan meskipun hanya 2,5%. Hal ini berarti bahwa pemahaman guru dalam penyusunan RPP cukup baik, tetapi mereka perlu waktu untuk belajar menerapkan model SIOP dalam RPP. Perubahan rerata skor yang sangat berarti pada *microteaching*, dari 64% menjadi 71%, menunjukkan meningkatnya pemahaman guru terhadap materi pendampingan seiring dengan kompetensi pedagogiknya. Guru merasa lebih mudah dalam menyusun RPP dan melakukan praktik mengajar pada siklus 2 karena telah belajar dari siklus 1 terkait hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan pada tiap sesinya. Guru juga mengungkapkan bahwa peningkatan ini tidak terlepas dari umpan balik yang mereka terima baik dari *coach* maupun dari tim peneliti. Hal ini sejalan dengan temuan Weber-Mayrer *et al.* (2018) bahwa frekuensi dan durasi pendampingan berkorelasi positif dengan hasil pengetahuan pendidik.

Berikut adalah salah satu pernyataan guru dan contoh strategi pengajaran membaca komprehensif yang berhasil diterapkan oleh guru.

“Semua materi yang diberikan dalam program ini sangat berguna bagi saya, terutama dalam merancang RPP yang dicontohkan dalam Modul Pengayaan Literasi. Setelah mengikuti program ini saya mendorong siswa saya untuk maju selangkah dengan belajar literasi sehingga saya bisa merancang RPP saya lebih baik dari sebelumnya.” – CN-03.

Berdasarkan hasil analisis dokumen RPP, terlihat bahwa guru menerapkan pengetahuan mengenai teks, konteks, dan *genre* yang ada pada “Modul Pengayaan Literasi”. Hal ini juga berarti bahwa model SIOP dapat meningkatkan pengetahuan literasi dengan mengintegrasikan *language* dan *content* bagi guru dan siswa (Short *et al.*, 2012). Selain itu, guru dapat mengaplikasikan strategi pengajaran membaca komprehensif sebagaimana diklasifikasikan oleh Ness (2011) dalam penyusunan RPP yang meliputi pembelajaran kosakata, memprediksi, memonitor pemahaman, struktur teks, menjawab pertanyaan, membuat pertanyaan, dan merangkum.

2. Bagaimana program pendampingan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru?

Hasil analisis data refleksi, observasi lapangan, dan rekaman video menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru meningkat, dimulai dari tahap penyusunan RPP sampai praktik mengajar dengan menerapkan model SIOP.

"Model SIOP membantu saya untuk lebih sistematis dalam mengajar khususnya strategi mengajar, merancang RPP, dan mengajarkan (cara) berpikir kritis." – LM-05.

"Program ini meningkatkan keterampilan mengajar saya. Saya sangat senang karena saya dapat membuat RPP seperti yang dimodelkan oleh Coach dengan Model SIOP yang sederhana sehingga siswa dapat memahami materi dengan mudah. Terlebih dalam merancang model dan teknik mengajar. Selain itu, sangat memudahkan saya dalam membuat penilaian harian siswa." – CN-04.

Dua pernyataan di atas mengindikasikan bahwa model pendampingan yang mengadaptasi protokol SIOP sesuai dengan kebutuhan guru mengajar bahasa. Berikut adalah pernyataan seorang guru tentang manfaat menerapkan model SIOP dalam perencanaan pembelajaran yang efektif:

"Tahapan pengajaran literasi dan model yang diajarkan di program ini sangat membantu dan dapat saya gunakan dalam meningkatkan dan mengajarkan literasi kepada siswa. Kemudian, model yang sudah dicontohkan oleh Coach sangat bermanfaat untuk pembuatan RPP berdasarkan SIOP Model yang mudah untuk diterapkan dan menarik." – AS-01.

Penelitian ini membuktikan bahwa dengan model SIOP, fokus RPP pada *language* dan *content objectives* dapat didefinisikan, ditampilkan, dan ditinjau secara lisan bersama antara *coach* dan *coachee*. Dalam proses perencanaan pembelajaran, *coach* dan *coachee* mampu menyiapkan, mengevaluasi, dan mempertimbangkan *content* and *vocabulary* dengan berbagai bahan ajar dan kegiatan yang bermakna (Vogt & Echevarría, 2008). Penelitian ini juga sekaligus mengonfirmasi hasil penelitian yang dilakukan oleh McCall (2018) yang berpendapat bahwa model SIOP terbukti berhasil diterapkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Temuan penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari peran *coach*, pengembangan literasi digital, dan praktik reflektif guru selama proses pendampingan. Peran *coach*, misalnya, diakui guru berkontribusi positif terhadap peningkatan literasi dan pedagogiknya. Dari hasil analisis jurnal reflektif ditemukan bahwa *coachee* memiliki pandangan positif terhadap *coach*, terutama dalam pemodelan mekanisme SIOP diterapkan.

Berikut komentar mereka tentang bagaimana penggunaan strategi yang dimodelkan oleh *coach* di dalam kelompok.

"Banyak hal yang saya pelajari terutama dalam peningkatan pengajaran saya. Contohnya, ketika saya menerapkan RPP yang saya lihat dari modeling oleh Coach, siswa saya menjadi tertarik untuk mengikuti pelajaran." – CN-05.

"Pemodelan yang ditunjukkan para coach sangat menginspirasi. Muncul ide-ide untuk dapat memodifikasi (proses pengajaran) seperti apa yang dilakukan para Coach. Ini merupakan hal yang sangat menarik, dan baru. Dimana kita bisa menirukan dan memodifikasi untuk meningkatkan keterampilan mengajar kita." – KH-03.

Coachee memandang pemodelan oleh *coach* sangat membantu mereka merancang dan menerapkan strategi pengajaran, dan termotivasi untuk mengambil risiko menggunakan model pengajaran baru.

Dengan demikian, pemodelan sebagai mekanisme memperkenalkan materi dan metode (Walpole & McKenna, 2004), dalam hal pendampingan literasi menunjukkan hasil yang positif (Vanderburg & Stephens, 2010). Dengan penerapan model *Collaborative Literacy Coaching* (Mayuni, *et al.*, *forthcoming*), tim peneliti, *coach* dan *coachee* dapat melepaskan diri dari relasi kuasa yang tidak berimbang dengan menempatkan semua pihak pada posisi yang setara, saling belajar, dan saling mengisi sebagai mitra kolaboratif guna meningkatkan kompetensi literasi siswa.

Selain peran *coach*, proses pendampingan secara virtual juga turut mendukung peningkatan literasi digital guru, sebagaimana dapat disimak dari pernyataan berikut.

“Banyak perubahan dalam diri saya, termasuk bagaimana menggunakan Zoom saat mengajar dan menayangkan video yang selama ini menjadi masalah bagi saya. Alhamdulillah kami mendapatkan sesi pendampingan literasi digital pada siklus kedua.” CN-03

“Pada siklus pertama saya berjuang keras bagaimana melaksanakan praktik mengajar secara daring dan memanfaatkan video. Untungnya masalah ini dapat saya atasi dengan pendampingan tim peneliti dan coach terutama setelah adanya sesi khusus digital literasi pada siklus kedua.” CN-06

Pada awalnya pengembangan literasi digital guru tidak menjadi materi khusus dalam perancangan pendampingan mengingat pada saat rekrutmen guru menyatakan sudah siap untuk menerima pendampingan secara daring. Namun, berdasarkan hasil refleksi pada akhir siklus pertama, guru mengalami kesulitan dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran sehingga diberikan pembekalan khusus di sesi *direct instruction* pada siklus kedua. Pembekalan ini berdampak pada peningkatan rasa percaya diri guru dalam menyusun RPP dan praktik mengajar. Selama pendampingan, guru menjadi semakin terbiasa menggunakan piranti teknologi, termasuk dalam menyusun bahan ajar, mempelajari strategi belajar mengajar melalui youtube, dan praktik mengajar di kelas yang sesungguhnya.

Selain pengembangan literasi digital, praktik reflektif yang menjadi ciri program pendampingan ini memberikan makna khusus bagi peningkatan literasi dan kompetensi pedagogik guru. Aktivitas refleksi pada setiap bagian akhir siklus dan pengisian jurnal reflektif pada setiap akhir sesi turut mendorong proses pembiasaan guru untuk melakukan refleksi setiap saat. Proses ini menjadi bagian penting bagi pengembangan profesional guru.

“Refleksi itu penting karena saya mengetahui di tahap mana saya merasa kesulitan. Saya juga mengamati apa yang sedang dilakukan orang lain sehingga menjadi masukan bagi saya. Lalu, saya mencoba untuk merefleksikan dan menerima masukan dari Coach. Dengan melihat refleksi orang lain, saya bisa belajar hal positif dari mereka.” --LM-04

“Sesi refleksi dalam program literasi ini menginspirasi saya untuk menerapkan refleksi pada sesi mengajar. Sebaiknya refleksi diri dilakukan setiap hari dengan melakukan perbaikan dan meningkatkannya. Jadi, refleksi diri sangat penting.”

KH-05.

Pernyataan di atas merupakan bukti empiris yang menunjukkan signifikansi refleksi diri guna memastikan perbaikan pembelajaran, sekaligus pengembangan profesional guru yang berkelanjutan (Bates & Morgan, 2018). Kegiatan refleksi ini memfasilitasi guru (dalam hal ini *coach* dan *coachee*) untuk berintrospeksi, menimbang dan menerapkan praktik guna nantinya meningkatkan keterampilan belajar siswa (Abbott *et al.*, 2016). Dalam kerangka ini, guru mampu melakukan penyesuaian dengan kebutuhan siswa, melihat hal yang luput selama praktik mengajar untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, serta memecahkan masalah yang muncul di dalam kelas (Kissel *et al.*, 2011; Pletcher *et al.*, 2019).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Program pendampingan dapat meningkatkan literasi dan kompetensi pedagogik guru terkait pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat SMP. Meskipun secara kuantitatif tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada kompetensi literasi guru, karena keterbatasan kemampuan dan waktu untuk pengayaan literasi, program pendampingan ini terbukti dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru, sekaligus pemahamannya tentang materi pengayaan dan pembelajaran literasi. Materi pendampingan yang mengadopsi dan mengadaptasi model SIOP digabungkan dengan pembelajaran literasi berbasis *genre* (mengikuti tuntutan kurikulum bahasa Inggris 2013) terbukti dapat meningkatkan kompetensi literasi dan pedagogik guru.
2. Konsep pendampingan yang berbasis kemitraan yang dikembangkan dari model *collaborative literacy coaching* dan praktik reflektif juga berkontribusi dalam mendorong peningkatan kompetensi sosial dan karakter guru dalam rangka membangun budaya kerja sebagai guru penggerak.
3. Proses pendampingan yang secara keseluruhan dilakukan melalui daring, juga berkontribusi meningkatkan literasi digital guru. Pengalaman mengikuti pendampingan bertatap maya secara langsung selama 22 sesi (untuk *coach* 25 sesi) dan pembekalan pembelajaran dengan menggunakan *platform zoom* (meski hanya dilaksanakan satu kali) dipandang guru berhasil meningkatkan literasi digital mereka. Proses pembiasaan ini berpotensi meningkatkan kreativitas dan kemampuan guru dalam memecahkan masalah dan belajar mandiri.

E. Saran

Berikut ini beberapa saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

1. Dengan mencermati saran, antusiasme, dan komitmen peserta (42 dari 48 guru berhasil menuntaskan program ini), pendampingan literasi berbasis kemitraan ini perlu dilanjutkan untuk peserta yang sama pada tahun berikutnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sesuai dengan hasil penelitian, beberapa hal perlu ditingkatkan, terutama mengalokasikan waktu yang mencukupi untuk pengayaan literasi dan sesi literasi digital.
2. Dengan mengantisipasi potensi pandemi pada tahun mendatang, program pendampingan virtual berbasis *web* perlu dikombinasikan dengan *platform* yang menggunakan *video conference* dan/atau diintegrasikan langsung dengan menu *video conference*. Upaya ini dimaksudkan untuk efektivitas dan efisiensi pendampingan, sekaligus untuk mengembangkan literasi digital guru terutama dalam pembelajaran.
3. Dalam rangka perluasan praktik baik, program pendampingan dapat melibatkan lebih banyak guru dari provinsi lain di seluruh Indonesia. Dengan kemudahan teknologi diharapkan peserta dapat berbagi praktik baik (*sharing best practices*) dengan guru-guru, tidak hanya yang bertugas di sekolah yang sama tetapi juga yang tergabung dalam MGMP di wilayah masing-masing.
4. Untuk mendukung gerakan literasi sekolah, program pendampingan berbasis kemitraan ini dapat dikembangkan untuk semua guru mata pelajaran, terutama di SMP untuk mendukung peningkatan skor PISA. Dua modul elektronik (untuk pengayaan dan pembelajaran literasi) yang menjadi luaran dari penelitian ini dapat diadopsi dan adaptasi untuk program pendampingan bagi guru pengampu mata pelajaran yang variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, M., Beecher, C., Petersen, S., Greenwood, C. R., & Atwater, J. (2016). A team approach to data-driven decision-making literacy instruction in preschool classrooms: Child assessment and intervention through classroom Team Self-Reflection. X X (X) , 1–16. <https://doi.org/10.1177/1096250615602297>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2018). *Laporan kajian bahan kebijakan teknis literasi nasional*. Jakarta
- Bates, C. C., & Morgan, D. N. (2018). Literacy leadership: The importance of soft skills. *reading teacher*, 72(3), 412–415. <https://doi.org/10.1002/trtr.1755>
- Biancarosa, G., Bryk, A. S., & Dexter, E. R. (2010). Assessing the value-added effects of literary collaborative professional development on student learning. *The Elementary School Journal*, 111(1), 7–34
- Creswell, J. (2015). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. New York: Pearson.
- Dozier, C. (2008). Literacy coaching: Engaging and learning with teachers. *Language and Literacy Spectrum*, 18, 11–19.
- Dozier, C. (2016). *Responsive literacy coaching: Tools for creating and sustaining purposeful change*. USA: Stenhouse Publishers Portland
- Echevarria, J., Vogt, M. E., & Short, D. J. (2017). Making content comprehensible for English learners: *The SIOP Model*. Fifth Edition. Boston: Pearson.
- Echevarria, J., & Short, D. (2000). Using multiple perspectives in observations of diverse classrooms. *Observational Research in US*, 25.
- Fisk, P. (2017). Education 4.0 the future of learning will be dramatically different, in school and throughout life. Retrieved from <http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together>
- Gibson, D., Ostashewski, N., Flintoff, K., Grant, S. & Knight, E. (2015). Digital badges in education. *Education and Information Technologies*, 20(2), 403-410. Retrieved November 2 5 , 2020 from <https://www.learntechlib.org/p/160208/>.
- Greene, J. A., Yu, S. B., & Copeland, D. Z. (2014). Measuring critical components of digital literacy and their relationships with learning. *Computers & Education*, 1–48. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.03.008>
- McCall, A. (2018). *Teacher Perceptions of Online SIOP professional development* [University of Maryland]. file:///C:/Users/youhe/Downloads/kdoc_o_00042_01.pdf
- Mayuni, I., Leiliyanti, E., Agustina, N., Yulianti, V., Chen, Y., Fang, C. (2020). School literacy movement and its implications towards students' learning: A comparative case study in Jakarta and Taiwan. *International Journal OfAdvanced Science and Technology*, 29, 155–1569.
- Mayuni, I, Leiliyanti, E., Agustina, N., Yulianti, V., Antoro, B. (2020). The praxis of literacy movement in indonesian context. In *International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences*, KnE Social Sciences, Pages 897-909. DOI 10.18502/kss.v4i14.7946.
- Mayuni, I, Leiliyanti, E., Agustina, N., Yulianti, V., Chen, Y., (forthcoming). Determining teachers' needs and readiness for online literacy coaching during the COVID-19 Pandemic.

- Mayuni, I, Leiliyanti, E., Agustina, N., Yulianti, V., Chen, Y., (forthcoming). Designing literacy coaching model for language teachers of junior high school.
- Moran, M.C. (2007). *Differentiated literacy coaching: Scaffolding for student and teacher success*. Virginia:ASCD.
- OECD (2019). *PISA 2018 Results (Volume I): What students know and can do*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>.
- Kissel, B., Mraz, M., Algozzine, B., & Stover, K. (2011). Early Childhood literacy coaches' role perceptions and recommendations for change early childhood literacy coaches' role perceptions and recommendations for change. *Journal of Research in Childhood Education*, 37–41. <https://doi.org/10.1080/02568543.2011.580207>
- Mertler, C. A. (2009). *Action research: Teachers as researchers in the classroom*. Los Angeles: Sage.
- Ness, M. (2011). Explicit reading comprehension instruction in elementary classrooms: Teacher use of reading comprehension strategies. *Journal of Research in Childhood Education*, 25(1), 98–117. <https://doi.org/10.1080/02568543.2010.531076>
- Pletcher, B. C., Hudson, A. K., & Watson, K. (2019). “I Want to learn from them as much as i want them to learn from me”: Finding a balance of coaching and consulting through the analysis of a literacy coach ' s conversations “ i want to learn from them as much as i want them to learn. *Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts*, 58(1).
- Powell, D. R., Steed, E. A., & Diamond, K. E. (2010). Dimensions of literacy coaching with Head Start teachers. *Topics in Early Childhood Special Education*, 30, 148–161.
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. *Indeks aktivitas literasi membaca 34 provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Schmar-Dobler, E. (2003). Reading on the internet: The link between literacy and technology. *Journal of Adolescent and Adult Literacy*, 47(1), 80–85.
- Short, D. J., Fidelman, C. G., & Louguit, M. (2012). developing academic language in English language learners through sheltered instruction. *TESOL Quarterly*, 46(2), 334–361. <https://doi.org/10.1002/tesq.20>
- Ting, Y. (2015). Tapping into students ' digital literacy and designing negotiated learning to promote learner autonomy. *Internet and Higher Education*, 26, 25–32. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.04.004>
- UNESCO 2015. *Education for all global monitoring report 2015: education for all 2000-2015 - Achievements and Challenges*. Paris: UNESCO.
- Vanderburg, M., & Stephens, D. (2010). The Impact of Literacy Coaches: What teachers value and how teachers change. *The Elementary School Journal*, 111(1), 141–163. <https://doi.org/10.1086/653473>
- Weber-Mayrer, M. M., Piasta, S. B., Ottley, J. R., Justice, L. M., & O'Connell, A. A. (2018). Early childhood literacy coaching: An examination of coaching intensity and changes in educators' literacy knowledge and practice. *Teaching and Teacher Education*, 76, 14–24. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.07.013>
- Walpole, S., & McKenna, M. C. (2004). *The literacy coach's handbook: a guide to research-based practice* (First). The Guilford Press.

PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi Covid -19

Sylviana Murni, Nadiroh, dan Shandy Aditya
Univesitas Negeri Jakarta

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi berupa *Policy Brief* Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19: Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi Covid -19. Penelitian ini menggunakan metode survei terhadap 478 orang guru SD dan SMP di DKI Jakarta dengan menyebarkan kuesioner terbuka dan tertutup. Temuan penelitian ini adalah bahwa (1) pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi Covid 19 pada pendidikan dasar di DKI Jakarta menggunakan berbagai *platform*, belum dirancang secara sistemik, sistematis, dan holistik ; (2) pelaksanaan pembelajaran jarak jauh belum dirancang mulai dari hulu sampai hilir, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendaliannya (3) PJJ/BDR sudah terlaksana, tetapi masih terkendala oleh ketersediaan sinyal dan kuota. Pembelajaran jarak jauh adalah solusi pada masa pandemi COVID-19, tetapi tidak boleh dipermanenkan bagi pendidikan dasar karena membutuhkan internalisasi literasi karakter dalam membentuk akhlak mulia sejak dini. Pemerintah telah memberikan jaminan kepastian pelaksanaan pembelajaran di sekolah meskipun memerlukan adaptasi dan transformasi dengan model *blended* atau *hybrid learning* secara sistemik, sistematis, dan terpadu (KURANG JELAS MAKSUDNYA)

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim Anwar Makarim telah menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan nasional berupa “Merdeka Belajar”, yang meliputi ujian sekolah berstandar nasional (USBN), ujian nasional (UN), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi. Penyelenggaraan USBN dimulai pada tahun 2020. Bentuk dan sifat ujian tersebut akan menilai kompetensi siswa, baik dalam bentuk tes tertulis maupun penilaian yang lebih komprehensif, seperti instrumen penilaian portofolio

Pelaksanaan UN akan menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, seperti kemampuan bernalar/berbahasa (*literasi*), kemampuan matematika (*numerasi*), dan penguatan pendidikan karakter bagi siswa kelas 4, 8, dan 11.

Kebijakan Merdeka Belajar dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen sehingga guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Ketiga komponen inti RPP adalah tujuan Pembelajaran, kegiatan pembelajaran; dan asesmen. Dengan demikian diharapkan tata penulisan RPP dapat lebih efisien dan efektif sehingga guru akan mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran.

Kebijakan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap menggunakan sistem zonasi dengan adaptasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Daerah diberi kewenangan dalam menentukan proporsi dan menetapkan wilayah zonasi. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, selebihnya jalur prestasi 0--30%.

Empat program pokok kebijakan pendidikan nasional tersebut harus terealisasi dengan baik sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas SDM Kemendikbud berharap Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dapat bergerak bersama dalam mengimplementasikan empat program kebijakan pendidikan nasional melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

- a. a. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar dan delapan SNP. Upaya mencapai standar mutu pendidikan hendaknya dilakukan melalui kajian evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar.
- b. Dalam RPP proses belajar – mengajar pada era digitalisasi harus sesuai dengan tuntutan kekinian dan kebijakan Merdeka Belajar
- c. Standar kualifikasi lulusan pada pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan tantangan Era Industri 4.0 dan Indonesia Maju.
- d. Pemanfaatan media sosial dalam mencapai kebijakan Merdeka Belajar sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan.

Penelitian ini membatasi kajiannya pada KBM dalam mencapai standar pendidikan dan hasil pembelajaran pada pendidikan dasar secara maksimal. Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar perlu dicarikan solusi yang tepat sasaran dan efektif

Wabah Covid -19 membuat beberapa aktivitas pembelajaran tatap muka tertunda meskipun merupakan suatu keniscayaan. Untuk itu, perlu dicarikan solusi agar guru dan orang tua siswa pendidikan dasar di DKI Jakarta dapat meningkatkan kinerja pembelajarannya meskipun melalui fasilitas virtual atau internet.

Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan solusi atau rekomendasi terbaik dalam mencapai Indonesia Maju 2045 melalui pendidikan dasar di DKI Jakarta dengan cara *blended learning* atau *hybrid learning*.

Pembangunan sumber daya manusia dalam mencapai Indonesia Maju yang dicanangkan oleh Pemerintah tidak akan bisa tercapai jika proses pendidikannya tidak bermutu dan berkeadilan. Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang mengupayakan terwujudnya sumber daya manusia melalui proses pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi

Salah satu hal penting dalam mendukung pendidikan formal pada pendidikan dasar adalah pendidikan nonformal dalam kehidupan masyarakat, termasuk keluarga. Keluarga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kekuatan sumber daya manusia yang unggul.

Sebagaimana diketahui, kondisi ketahanan keluarga kita masih sangat rentan, yang dalam bahasa umum disebut gagal tumbuh kembang secara normal. Jika permasalahan ini tidak bisa diselesaikan segera akan sangat memengaruhi kualitas SDM pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan keluarga dengan memperbaiki pengetahuan keluarga menjadi sangat penting dilakukan.

Pendidikan yang mengintegrasikan keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan yang telah dirintis oleh Ki Hajar Dewantara dengan ekosistem pendidikan. Pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan akan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan, antara lain gizi buruk pada keluarga, terutama untuk calon ibu, juga permasalahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga. Faktor lain yang sangat memengaruhi untuk mendapatkan SDM unggul adalah pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Penelitian ini difokuskan pada pendidikan dasar.

2. Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian adalah jawaban atas pertanyaan:

- a. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembelajaran jarak jauh pada pendidikan dasar di DKI Jakarta pada masa pandemi Covid 19?
- b. Apakah penerapan metode pembelajaran jarak jauh berjalan efektif dalam mengatasi kesenjangan capaian pembelajaran?
- c. Bagaimana dampak belajar dari rumah terhadap kesenjangan pembelajaran antara proses dan hasil yang dicapai?
- d. Bagaimana rumusan skema pendidikan di tengah pandemi COVID-19 sesuai dengan tujuan pada satuan pendidikan di DKI Jakarta?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode survei terhadap guru pada pendidikan dasar SD dan SMP dengan menyebarkan instrumen kuesioner secara luring dan daring kepada responden sebanyak 478 guru SD dan guru SMP di DKI Jakarta.

C. Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan analisis data, hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Proses pendidikan pada masa pandemi Covid 19 pada pendidikan dasar di DKI Jakarta dilaksanakan dengan berbagai *platform*, tetapi masih berupa mengalihkan pembelajaran tatap muka ke pertemuan tatap maya atau belum dirancang secara holistik dengan berbagai moda (*hybrid learning*);
2. Pembelajaran jarak jauh belum dirancang secara sistematis dan sistemik.
3. Pembelajaran pada masa pandemi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian sebagai implementasi dari Merdeka Belajar selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya meskipun melalui PJJ/BDR.
4. Pembelajaran jarak jauh masih mengalami kendala bagi siswa yang di lokasi tempat tinggalnya sinyal kurang bagus dan/atau kuota pulsanya terbatas. Bantuan kuota gratis menjadi solusi terbaik bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu..

D. Kesimpulan dan Implikasi

1. Kesimpulan

- a. Pembelajaran jarak jauh merupakan solusi pada masa pandemi COVID-19, tetapi tidak boleh dipermanenkan bagi pendidikan dasar karena membutuhkan internalisasi literasi karakter dalam membentuk akhlak mulia sejak dini.
- b. Pemerintah telah memberikan jaminan kepastian pembelajaran di sekolah meskipun masih membutuhkan adaptasi dan transformasi dengan model *blended atau hybrid learning* secara sistemik, sistematis, dan terpadu, baik perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun peningkatan layanannya.

2. Implikasi

- a. Dalam mewujudkan efektivitas pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19, hal terpenting yang perlu diupayakan adalah peningkatan *skill*/ kompetensi guru menggunakan aplikasi pendidikan berbasis teknologi.
- b. Guru (pengguna) hendaknya memahami setiap perbedaan gaya belajar dan karakteristik belajar siswa sesuai dengan aplikasi yang digunakan

E. Rekomendasi

1. Dalam pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 perlu ditingkatkan efektivitas pembelajaran sekolah dasar dengan (1) kebijakan PJJ berbasis *smart education*; (2) pengembangan *skill*/ kompetensi berbasis TIK yang inovatif dan kreatif bagi pengguna/guru sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar dari siswa; (3) pengembangan kerangka kerja *smart education* dalam membuat pendidikan adaptif dan transformatif, yang pengembangannya dilakukan secara dinamis sehingga dapat diserap oleh berbagai kalangan
2. Kepala sekolah, pengawas, guru, dan orang tua hendaknya dapat berpikir kritis dan inovatif dalam menangani karakteristik dan gaya belajar siswa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah hendaknya bersinergi dalam melaksanakan program pendidikan di setiap wilayah di DKI Jakarta atau wilayah lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. H. S. (2020). Dampak COVID-19 pada pendidikan di Indonesia: Sekolah, keterampilan, dan proses pembelajaran. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(5), 395–402.
- Alcaide, Teresa C. Herrador; Solis, Montserrat Hernandez; dan Galvan, Ramon Sanguino (2020). Feelings of satisfaction in mature students of financial accounting in virtual learning environment: An experience of measurement in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 1-19.
- Al Shafi, Md. Abdullah. (2020). COVID-19 pandemic: A viewpoint from Asia. *Bulletin of the National Research Centre*, 44(80), 1-7.
- Bajaj, Richa and Vidushi Sharma. (2018). Smart education with artificial intelligence based determination of learning styles. *Procedia Computer Science*, 132, 834-842.
- Bates, Tony. (2018). The 2017 national survey of online learning in canadian post secondary education:

- Methodology and results. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 1-17.
- Basset, Mohamed Abdel; Manogaran, Gunasekaran; Mohamed, Mai; dan Rushdy, Ehab. (2018). Internet of things in smart education environment: Supportive framework in the decision making process. *Concurrency Computat Pract Exper*, 1-12.
- Duraku, Z. H., & Hoxha, L. (2020). The impact of COVID-19 on education and on the well being of teachers, parents, and students: Challenges related to remote (online) learning and opportunities for advancing the quality of education.
- El Janati, Salma, Abdelilah Maach, and Driss El Ghanami. (2018). Smart Education Framework for Adaptation Content Presentation. *Procedia Computer Science*, 127, 436-443.
- Fidalgo, Patricia, Joan Thormann, Oleksandr Kulyk, dan Jose Alberto Lencastre. (2020). Students perceptions on distance education: A multinational study. *international journal of educational technology in higher education*, 17, 1--18.
- Giannakos, Michail N., Demetrios G. Sampson, dan Lukasz Kidzinski. (2016). Introduction to smart learning analytics: Foundations and developments in video based learning. *Smart Learning Environments*, 3(12), 1-9.
- Grupta, Varun, Durg Singh Chauhan, dan Kamlesh Dutta. (2013). Incremental development & revolutions of e-learning software sytems in education sector: A case study approach. *Human Centric Computing and Information Sciences*, 3(8), 1--14.
- Huang, Ronghui, Ahmed Tlili, Ting Wen Chang, Xiangling Zhang, Fabio Nascimbeni, dan Daniel Burgos. (2020). Disrupted classes, undisrupted learning during Covid=19 outbreak in China: Application of open educational practices and resources. *Smart Learning Environment*, 7, 1-15.
- Lee, Jeong Sook, and Sung Wan Kim. (2020). Validation of a tool evaluating educational apps for smart education. *Journal of Educational Computing Research*, 1--16.
- Lin, Jinjiao, Haitao Pu, Yibin Li, dan Jian Lian. (2018). Intelligent recommendation system for course selection in smart education. *Procedia Computer Science*, 129, 449--453
- Lister, Penelope J. (2018). A smarter knowledge commons for smart learning. *Smart Learning Environments*, 5(8), 1-15.
- Lyapina, Innara, Elena Sotnikova, Olga Lebedeva, Tatiana Makarova, dan Nataliya Skvortsova. (2019). Smart technologies: Perspectives of usage in higher education. *International Journal of Education Management*, 1--19.
- Minuto, Andrea, Fabio Pittarello, dan Anton Nojholt. (2015). DMS2015 Short-13: Smart material interfaces for education. *Journal of Visual Language and Computing*, 1--7.
- Muller, Fabian Alexander, dan Torsten Wulf. (2020). Technology supported management education: A systematic review of antecedents of learning effectiveness. *International Journal of Education Technology in Higher Education*, 17(47), 1--33.
- Phoong, Seuk Yen, Seuk Wai Phoong, Sedigheh Moghavvemi, dan Ainin Sulaiman. (2019). Effect of smart classroom on student achievement at higher education. *Journal of Educational Technology*, 1--14.
- Price, Jon K. (2015). Transforming learning for the smart learning environment: Lesson learned from the intel education initiatives. *Smart Learning Environments*, 2(16), 1--16

- Sad, Suleyman Nihat. (2012). An attitude scale for smart board use in education: Validity and reliability studies. *Computers & Education*, 58, 900-907.
- Singh, Gurbhej *at.al* (2020). Active surveillance with telemedicine in patients on anticoagulants during the national lockdown (COVID-19 phase) and comparison with pre-COVID-19 phase. *The Egyptian Heart Journal*, 72(70), 1--7.
- Uskov, Vladimir L., Robert J. Howlett, dan Lakhmi C. Jain. (2019). Smart innovation, systems and techonologies. Singapore: Springer.
- Verma, Prabal, Sandeep K. Sood, dan Sheetal Kalra. (2017). Smart computing based student performance evaluation framework for engineering education. *Comput Appl Eng Educ*, 1--15.
- Zhang, Hao *at.al* . (2020). A learning style classification approach based on deep belief network for largescale online education. *Journal of Cloud Computing Advances, Systems and Applications*, 9(26), 1-17.
- Zhao, Gang, Bingbing Di, Hui He, dan Wenjuan Zhun. (2020). Digital education transaction object authentication service based on blockchain technology. *Internet Technology Letters*, 3, 1--6.
- Zhuang, Rongxia, Sisis Tang, Jihong Li, dan Ronghuai Huang. (2017). Citizen experiences of smart learning in China's cities. *smart learning environments*, 4(5), 1--9.
- Zuin, Vania Gomes dan Borgonove, Carolina Motta. (2016). Environmental education in distance learning in environmental engineering at Federal University of Sao Carlos, Brazil: Potentialities and limitations towards a critical techno scientific education. *Braz J Sci Technol*, 3(7), 1--14.

NOTULEN

Hari/Tanggal	: Kamis, 3 Desember 2020
Jadwal Paparan	: Panel No: 3
Ruang	: Kelompok 6 Tata Kelola dan Peningkatan Kompetensi Guru
Waktu	: 14.10 WIB
Judul Penelitian	: 1. Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Guru Untuk Menunjang Profesionalisme Guru Berbasis Teknologi <i>Artificial Intelligence (AI)</i> dalam <i>Platform Android</i> 2. Program Pendampingan Literasi (Literacy Coaching) Berbasis Daring Pada Masa Tatanan Baru bagi Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3. Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19 (Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid -19)
Penyaji	: 1. Prof. Suyanta 2. Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A 3. Prof. Nadiroh
Pembahas	: Dr. Syaikh Usman dan Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.
Moderator	: Dr. Teguh Supriyadi
Notulis	: 1. Dr. Pujiyanto, MPd. 2. Tara Mustikaning Palupi, M. Hum. 3. Dr. Faisal Madani, M. Sc. Ed

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : (Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)	1. Prof. Suyanta - 2. Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A Literasi - kebijakan prioritas Merdeka Belajar Kemendikbud - mempersyaratkan hadirnya guru dengan kompetensi yang mumpuni untuk memfasilitasi peningkatan literasi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terkait “bagaimana menerapkan program pendampingan literasi daring untuk meningkatkan kompetensi literasi dan pedagogik guru pada masa tatanan baru.” Penelitian <i>Participatory Action Research</i> ini dilaksanakan dalam dua siklus selama 14 minggu, 22 sesi (44 jam) dengan menerapkan Model <i>Sheltered Instruction Observation Protocol (SIOP)</i> .

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Program ini diikuti oleh 42 guru (9 diantaranya sebagai <i>coach</i>) Bahasa Inggris SMPN dari 16 Provinsi di Indonesia. Data dikumpulkan berbentuk kuantitatif (hasil tes, rubrik penilaian <i>microteaching</i>, dan angket) dan kualitatif (observasi, rekaman video, dokumen, jurnal reflektif, dan diskusi terpumpun), dan dianalisis serta diinterpretasikan dengan menggunakan <i>convergent design</i>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pendampingan literasi secara signifikan meningkatkan kompetensi guru dalam mengajarkan literasi, berdasarkan penilaian Protokol Observasi SIOB pada <i>microteaching</i> (dari 64% menjadi 71%), dan dalam merancang pembelajaran (dari 73% menjadi 75,5%). Meskipun berdasarkan hasil <i>pre-test</i> (60.00) dan <i>post-test</i> (61.46) tidak terlihat peningkatan yang berarti dalam hal literasi guru, temuan ini menunjukkan bahwa pola pendampingan yang berbasis daring, kolaboratif, dan praktik reflektif berhasil membangkitkan pemahaman guru terhadap literasi digital, praktik reflektif, dan kemandirian guru dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. 3. Prof. Nadiroh Penyaji menyampaikan hasil penelitian secara singkat dan comprehensive dengan memberikan gambaran hasil penelitian yang datanya di kumpulkan melalui Instrumen yang telah disebar melalui Google Form, dan melakukan wawancara kepada Kepala sekolah dan juga orang tua siswa, setelah itu dilakukan pengolahan data sebagai mana yang telah ada dalam laporan, penyaji juga menyampaikan bahwa dalam rangka menindak lanjuti hasil penelitian ini maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperlumuskan hasil penelitian dalam bentuk formulasi kebijakan dalam pelaksanaan “Internalisasi Literacy Karakter dengan SMART EDUCATION” agar bisa terlaksana secara terukur dalam rangka Pengembangan Karakter siswa sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Penyaji juga menyampaikan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		bahwa penelitian ini juga telah menghasilkan artikel yang dalam proses submit ke jurnal terindeks scopus.
a.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	1. Prof. Suyanta Pembahas: Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. 1. Latar belakang sebaiknya ditambahkan ulasan upaya yang selama ini telah dilakukan Ditjen GTK apa dan ketercapaiannya sejauh mana. 2. Identifikasi kelemahan peningkatan kinerja guru selama ini apakah sudah terpetakan dengan baik, jika belum apa kendalanya 3. Metode pengembangan ADDIE dapat diadaptasi dan dikembangkan lebih lanjut. 4. Pembahasan tentang efektivitas kinerja guru belum terlihat karena keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian, sehingga sebaiknya penelitian ini dilanjutkan untuk implementasi lebih lanjut agar dapat diketahui perbedaan kinerja guru yang menggunakan layanan aplikasi dan tanpa layanan aplikasi. 5. Implementasi artificial intelligence lebih diperjelas dalam penerapan penilaian kinerja guru Pembahas: Dr. Syaikh Usman 1. Bagian latar belakang dilengkapi selama ini apakah sudah ada upaya penggunaan aplikasi serupa dan ketercapaiannya bagaimana 2. Tambahkan informasi apakah kinerja keprofesian guru selama ini sudah menunjukkan berdampak ke kemajuan hasil belajar peserta didik 3. Hasil ujicoba menunjukkan adanya peminat pada upaya penulisan PTK, ulas lebih lanjut apakah hal ini mengindikasikan ke arah peningkatan kualitas pembelajaran atau pemenuhan angka kredit kenaikan pangkat bagi guru 4. Aplikasi yang dikembangkan sangat membantu guru mengetahui apa yang harus ditingkatkan, perluas lagi sebaran pengguna aplikasi agar dapat diketahui efektivitas penggunaan aplikasi dan kaitannya terhadap kinerja guru.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		2. Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A Pembahas: Prof. Nunuk Suryani Sesdikjen GTK 1. Penelitian ini menarik dan sangat diapresiasi terutama dalam merespons tantangan pengembangan profesi guru di masa pandemi. 2. Metode yg digunakan berupa Participative Action Research (PAR) dengan Model SIOP ini relatif baru di Indonesia dan perlu dikembangkan untuk meningkatkan mutu guru. 3. Pada bagian simpulan secara kualitatif sudah terlihat keefektifannya terutama dalam meningkatkan kompetensi pedagogik , meskipun bila melihat hasil pretest dan post test secara statistik peningkatan belum signifikan. 4. Program Literacy Coaching ini sangat bagus untuk dikembangkan dan sudah ada produknya yang sudah diHAKI kan. 5. Fokus literasi perlu diperjelas, apakah hanya literasi bahasa? Pembahas: Dr. Syaikh Usman 1. Selamat! Penelitian ini jernih, jelas fokusnya. 2. Pengumpulan dan analisis data dg mixed method perlu dipaparkan bagaimana pengalaman dan langkah2 praktik empiriknya dalam rangka berbagi praktik baik. 3. Perlu diperjelas langkah-langkah operasional penerapan Model SIOP. 3. Prof. Nadiroh Pembahas 1. Prof. Dr. Nunuk Suryani Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan: a. Penelitian pemetaan pelaksanaan PJJ sebaiknya disarankan agar lebih menyeluruh dari aspek pelaksanaan maka tidak hanya mengambil data dari guru tetapi juga sebaiknya mengumpulkan data persepsi orang tua, siswa, dan kepala sekolah meskipun dalam penjelasan ada data dari orang

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		tua dan kepala sekolah, namun dalam abstrak belum dimasukkan. b. Luaran yang akan dihasilkan dalam penelitian lanjutan, sebaiknya draft rancangannya sudah dijelaskan dalam laporan penelitian apa itu SMART EDUCATION dalam Internalisasi literasi karakter yang akan dirancang untuk tahun berikutnya Pembahas 2. Dr. Syaikh Usman Peneliti dari The SMERU Research Institute: a. Dalam Abstrak temuannya diformulasikan dengan narasi yang operasional dan bukan normatif dan berbasis data penelitian b. Latar belakang masalah terkait Stunting tidak relevan lebih cocok masalah status sosial ekonomi c. Perlu ditambahkan pembahasan akibat PJJ terhadap ketidak tercapaian mutu hasil belajar yang terkendala bahkan diperlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan perbaikan mutu akibat ketertinggalan capaian pembelajaran selama PJJ. d. Perlu dijelaskan istilah Model pembelajaran yang holistic, sistematis dan sistemik agar jelas maknanya.
b.	Diskusi/Tanya Jawab (via Chat): <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	1. Prof. Suyanta a. Perwakilan IGI, apakah aplikasi ini akan disosialisasikan ke guru-guru selain di kabupaten Sleman Yogyakarta? b. Bagaimana pengguna mengetahui tingkat kemajuan belajarnya, apakah dimungkinkan adanya komunikasi pengguna dengan peserta lain yang sama-sama menggunakan aplikasi 2. Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A Tanya: Windawati Prof Dr. Ilza, Literasi yang ibu maksud disini hanya literasi baca dan tulis saja atau seluruh literasi? Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan terbesar sebagai guru adalah

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		membuat siswa untuk gemar membaca dan menulis secara suka rela. Mereka cenderung banyak menghabiskan waktunya dengan gawai utk bermain games atau sekedar eksis di sosial media. Pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan minat siswa untuk membaca/menulis sehingga hal tersebut dapat menjadi kebutuhan mereka bukan karena diminta guru. Jawab: Bu Winda, terima kasih responsnya. Memang penelitian kami fokus pada literasi bahasa Inggris. Namun materinya juga mencakup literasi dasar lain, terutama literasi digital. Tanya: Lisna Prof. Dr. Ilza Mayuni, adakah kriteria guru yang menjadi sampel atau yang ikut dalam pelatihan penelitian ibu? Jawab: Bu Lisna, kriterianya: berpengalaman menjadi instruktur minimal di tingkat kabupaten/kota, mengajar minimal 3 tahun, memiliki akses internet, mendapat izin dari Kepala Sekolah. Tanya: Zulfiah Ulfa, Kab Maros Menjadi salah satu peserta Literacy Couching dari Prof Ilza dan Team dari UNJ bekerjasama dengan Balitbang saya merasakan dan mengalami peningkatan kemampuan Literasi dan Implementasi dalam pengajaran. Semoga berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak guru. Jawab: Bu Zulfiah, senang jumpa lagi. Alhamdulillah bisa bergabung di sini. Ibu jadi <i>eye witness</i> ya. Tanya: Retno Tri Andayani, SMPN 1 Cimaragas, Kab. Ciamis_ Prof. Ilza Mayuni_Bagaimana meningkatkan budaya literasi untuk menanggulangi hoax dimasa pandemi seperti sekarang ini? Jawab: Bu Retno, salah satu kunci untuk memerangi hoaks adalah dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, tidak hanya melalui kegiatan baca tulis secara konvensional tetapi dengan literasi digital, antara lain memfasilitasi siswa mengakses, mengkritisi, dan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		memanfaatkan informasi yang diperoleh dari internet secara bijak. 3. Prof. Nadiroh Penanya: Danang guru yang juga mahasiswa S3 UNJ Apa yang dimaksud SMART EDUCATION dalam Internalisasi Literasi Pembentukan Karakter? Jawaban dari Penyaji terhadap pertanyaan dari Perwakilan Guru sebagai berikut: SMART EDUCATION merupakan transformasi pembelajaran yang terukur sehingga pembelajaran yang secara komprehensif dapat menghasilkan perubahan perilaku yang berdasarkan olah pikir dan olah rasa, kita memahami bahwa setiap proses pembelajaran merupakan upaya meningkatkan aspek kognitif, affective dan psikomotor siswa, hasil pembelajaran akan merupakan internalisasi dari suatu proses perubahan perilaku siswa, dalam upaya pembentukan karakter dalam pendekatan SMART EDUCATION melalui internalisasi literacy karakter merupakan suatu jawaban. Proses ini tentu akan melibatkan semua komponen yang berada di sekolah, di Dinas Pendidikan, di LPTK dan ini merupakan suatu proses quality improvement yang harus terjadi di semua lembaga yang menangani Pendidikan. Semoga proses ini dapat kita lakukan dalam penelitian lanjutan di tahun ke dua. Jawaban dari Penyaji Prof.Dr. Nadiroh, M.Pd terhadap pembahas 1 sebagai berikut: Terima kasih atas masukannya penelitian ini selain menjaring data melalui wawancara terhadap kepala Sekolah SMP dan Orang Tua Siswa untuk triangulasi data yang dijaring melalui google form digital, sehingga data masih terus bergerak namun karena keterbatasan waktu maka pada waktu penulisan laporan kami hanya menggunakan 478 data dari Responden yang sudah kami olah secara sistematis dalam laporan tahun pertama yang sudah kami laporkan. Sedangkan data Kepala Sekolah dan Orang Tua dalam jumlah yang banyak jika dimungkinkan akan kami olah dan susun laporannya

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		untuk tahun depan sesuai dengan apa yang disarankan oleh pembahas 1. Penulisan abstrak akan diperbaiki dengan memasukan data orang tua dan Kepala Sekolah sehingga dalam abstrak akan dapat menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan “Internalisasi karakter dengan Smart Education” Dalam laporan tahun pertama penjelasan luaran yang akan dihasilkan tahun berikutnya sudah dijelaskan dalam tindak lanjut hasil penelitian tahap pertama. Kami juga mengucapkan terimakasih atas saran yang diberikan, kami laporkan bahwa saat ini kami sedang menyempurnakan hasil penelitian tahap 1 ini untuk segera di Hakikan. Perlu juga kami sampaikan bahwa Luaran hasil penelitian dalam proses publikasi terstandar Scopus Jawaban dari Penyaji terhadap Pembahas 2 sebagai berikut: Masukan dari Pembahas 2 lebih pada upaya perbaikan laporan akan kami perhatikan dalam penyempurnaan laporan, untuk itu kami berterima kasih; Terkait permasalahan Stunting, mengapa dijadikan dasar penting, karena kesehatan peserta didik menjadi salah satu prasyarat dalam mencapai keberhasilan belajar peserta didik, sudah banyak hasil penelitian bahwa jika anak terkategori stunting akan mempengaruhi hasil belajar belajar siswa baik secara luring, apalagi dalam pendekatan PJJ melaui daring, karena apabila anak-didik sehat dan cerdas dan lincah upaya keberhasilan PJJ lebih efektif, namun demikian bisa juga stunting menjadi salah satu dari penyebab rendahnya status sosial ekonomi masyarakat, sehingga juga diperlukan upaya dalam meningkatkan status ekonomi masyarakat melalui literacy ekonomi masyarakat. Memang perlu dilakukan upaya perbaikan dalam pendekatan PJJ, jangan sampai PJJ hanya merubah pembelajaran yang bersifat luring menjadi daring, untuk melaksakana pembelajaran daring memerlukan pemahaman yang baik bagi guru terhadap sistem

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		pembelajaran daring, untuk itu diperlukan upaya yang sistematis dan sistemik dalam meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui daring dalam sistem PJJ. Sehingga dapat mengatasi permasalahan pencapaian yang hasil belajar yang seharusnya dicapai dalam setiap pembelajaran. Setiap proses pembelajaran mustinya mengarah pada model pembelajaran yang holistik, sistematis dan sistemik, karena setiap proses pembelajaran yang baik merupakan upaya perubahan perilaku siswa baik yang merupakan hasil transformasi belajar yang akan merubah olah pikir, olah rasa dan perilaku siswa dan inilah yang akan dicapai dalam internalisasi literacy karakter dalam SMART EDUCATION, mudah-mudahan upaya ini akan dapat ditindak lanjut dalam penelitian tahun ke dua.
c.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 15.50 WIB.

VII

Tata Kelola Pendidikan Vokasi

KAJIAN ALTERNATIF MODEL PENGGABUNGAN SMK DENGAN SMA

Idris HM Noor, Sri Hidayati, Relisa, Sisca Fujianita
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK Kebutuhan tenaga kerja terampil yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan industri sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, SMK harus menyediakan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, sebaliknya SMA harus meningkatkan kompetensi siswa agar bisa masuk ke perguruan tinggi. Berdasarkan UU tersebut terdapat penekanan yang berbeda antara pendidikan umum (SMA) dan pendidikan kejuruan (SMK). Namun, sampai saat ini SMA yang bertujuan untuk mendidik siswa agar mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Kurang dari setengah (38 persen) lulusan SMA/SMK tidak memasuki pendidikan tinggi dan tidak cukup siap untuk transisi ke pekerjaan (Kompas.com-12/11/2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggabungan SMA dan SMK agar dapat dibuatkan konsep model atau strategi integrasi pendidikan SMA dan SMK untuk mengatasi ketidakcapaian *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam pendidikan menengah. Penelitian *Desk Study* ini mengkaji dokumen terkait dengan pendidikan SMK dan SMA ditambah dengan data primer dari kepala sekolah yang dijangkau melalui diskusi kelompok terpusat (DKT)/ *focus group discussion* (FGD) dan penyebaran kuesioner secara *online*. Data kuantitatif dari hasil kuesioner dianalisis secara persentase dari masing-masing jawaban butir kuesioner, sedangkan data kualitatif dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian adalah penggabungan SMA dengan SMK sulit dilaksanakan walaupun SMA dan SMK swasta yang dikelola oleh yayasan. Walaupun demikian, untuk mencapai *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam pendidikan menengah diperlukan sebuah model integrasi SMK dan SMA yang disebut “Program Kolaborasi Sekolah Menengah”.

Kata Kunci: SMK, SMA, penggabungan, tenaga kerja, model kolaborasi

A. PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 15 menyebutkan bahwa pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat dalam dua kelompok yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Pendidikan umum baik dasar maupun menengah bertujuan menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sedangkan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Selanjutnya, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan kejuruan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja menengah terampil sesuai dengan kebutuhan industri. Berdasarkan UU tersebut terdapat penekanan yang berbeda antara pendidikan umum (SMA) dan pendidikan kejuruan (SMK). Namun, sampai saat ini SMA yang bertujuan untuk mendidik siswa agar mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Kurang dari setengah (38 persen) lulusan SMA/SMK tidak memasuki pendidikan tinggi dan tidak cukup siap untuk transisi ke pekerjaan (Kompas.com - 12/11/2020, 11:50 WIB). <https://www.kompas.com/edu/read/2020/11/12/115000971/kemendikbud--lulusan-sma-smk-yang-diserap-perguruan-tinggi>.

Kebutuhan tenaga kerja terampil yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan industri sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka sekolah kejuruan harus menyediakan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Untuk itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMK melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah (Pemda) dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI). Kerjasama tersebut adalah untuk memberikan kesempatan praktek kerja lapangan (PKL) siswa dan guru serta tenaga kependidikan SMK di industri dan balai latihan kerja (BKL) termasuk sumber daya (*resource sharing*), dan mendorong industri untuk mengembangkan *teaching factory* dan infrastruktur, sertifikasi lulusan SMK dalam bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, dan industri kreatif sehingga lulusan SMK dapat dimanfaatkan oleh DU/DI, serta pengembangan SMK unggulan di daerah.

Pemenuhan kebutuhan tersebut didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia mencakup penyelarasan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan pengguna lulusan SMK (*link and match*). Namun praktik penyelenggaraan SMK di Indonesia saat ini menunjukkan beberapa kelemahan-kelemahan, antara lain:

- Kebanyakan SMK saat ini menyiapkan siswanya hanya untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu sebagai pekerja/karyawan/pegawai. Sangat sedikit sekali SMK yang sengaja menyiapkan siswanya untuk menjadi wirausahawan (pengusaha).
- Tidak ada bukti bahwa secara umum, SMK saat ini memberikan hasil pekerjaan yang lebih baik untuk lulusan sekolah daripada SMA
- Pengetahuan yang dipelajari di SMK tidak sesuai dengan dunia kerja, lulusan SMK menjadi pekerja kasar, misalnya lulusan program akuntansi bekerja menjadi OB
- Berlanjutnya ekspansi cepat SMK kecil semakin menarik siswa ke sekolah-sekolah kecil berkualitas rendah yang tidak dapat memenuhi janji pelatihan kejuruan berkualitas
- Sebagian besar SMK swasta kecil (rata-rata jauh lebih kecil dari SMK negeri, dan lebih kecil dari SMA) dan berkualitas buruk
- Kompetensi guru di bidang kejuruan sangat lemah
- SMK kekurangan guru-guru produktif yang berpengalaman di industri sehingga membatasi kesempatan siswa untuk memperoleh keterampilan yang relevan.
- SMK kecil semakin menarik siswa ke sekolah-sekolah kecil berkualitas rendah yang tidak dapat memenuhi janji pelatihan kejuruan berkualitas.
- SMK kecil menampung siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri dan SMK bagus karena mahal. SMK kecil tidak punya sumber daya yang memadai
- Belum ada keseriusan kerjasama antara sekolah dengan industri secara nasional,
- Kerjasama dengan industri lemah, pengembangan standar kompetensi industri di SMK tidak memadai dan penerimaan sertifikasi di pasar tenaga kerja terbatas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggabungan SMA dan SMK untuk mendapatkan konsep model atau strategi integrasi pendidikan SMA dan SMK yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketidakcapaian **Das Sollen dan Das Sein** dalam pendidikan menengah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *Desk Study* yaitu mengkaji dokumen terkait dengan pendidikan SMK dan SMA ditambah dengan data primer dari kepala sekolah yang dijangkau melalui diskusi kelompok terpusat (DKT)/*focus group discussion* (FGD) dan penyebaran kuesioner secara *online*. Data kuantitatif dari hasil kuesioner dianalisis secara persentase dari masing-masing jawaban butir kuesioner, sedangkan data kualitatif dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Jumlah sekolah, peserta didik, rombel, guru, tendik secara nasional semester ganjil tahun 2020/2021 Per 26 September 2020 00:00:00

Tabel 1. Jumlah sekolah, peserta didik, rombel, guru, tendik

Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Guru	Jumlah Tendik
SMA	13.932	4.963.311	165.187	309.721	84.934
SMK	14.269	5.164.143	184.604	301.413	78.819
Jumlah	28.201	10.127.454	349.791	611.134	163.753
Rata-Rata	14.101	5.063.728	174.896	305.568	81.877

Sumber: <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>

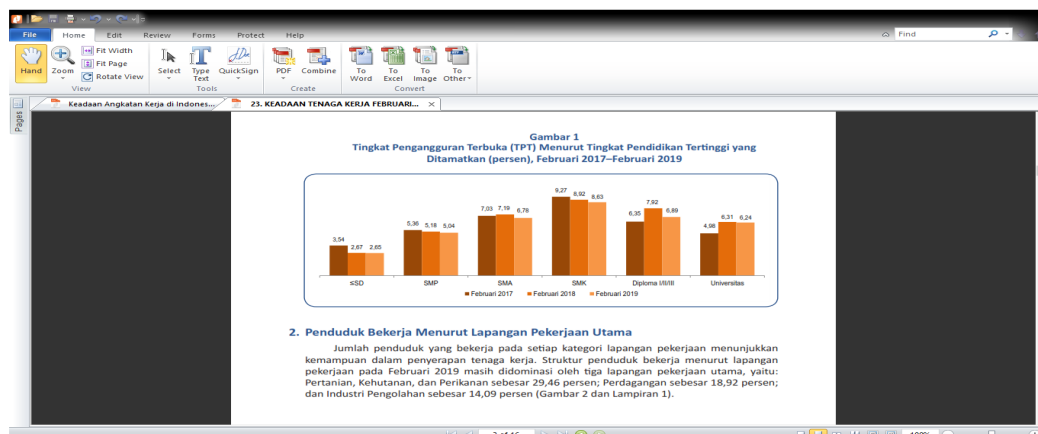
*: Guru dan Tendik yang masuk dalam penghitungan rekap adalah Guru dan Tendik yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk

Berdasarkan data tersebut, jumlah SMK lebih banyak dari SMA. Namun tenaga guru dan tenaga pendidikan antara SMA dan SMK, SMK lebih sedikit. Kalau dilihat dari jumlah tenaga guru produktif yang menjadikan SMK lebih profesional dalam pembelajaran, tenaga guru produktif yang mempunyai keahlian dalam bidang skill tertentu masih sangat sedikit, apalagi tenaga guru produktif yang mempunyai pengalaman industri bisa dikatakan sangat sedikit. Ini merupakan salah satu penyebab pembelajaran di SMK kurang baik dan tentu saja akan menghasilkan lulusan yang kurang mampu atau lulusan yang kompetensinya dalam bidang keahlian kurang sesuai dengan kebutuhan industri.

II. Angka pengangguran

Berdasarkan grafik 1, pengangguran didominasi oleh lulusan SMK. Hal ini disinyalir oleh banyaknya lulusan sekolah kecil yang kurang bermutu karena mutu lulusannya kurang mempunyai kompetensi terutama *soft skill*. Salah satu penyebab banyaknya kurangnya pembelajaran di sekolah yang kurang bermutu. Ada berbagai aspek yang berkontribusi pada rendahnya hasil pembelajaran peserta didik. Pertama, pedagogi dan efektivitas pengajaran para gurunya masih perlu diperbaiki. Masih banyak guru yang sering bertindak sebagai penerus pengetahuan, bukan fasilitator pembelajaran. Banyak guru disinyalir tidak memfokuskan pengembangan karakter dan membangkitkan keinginan belajar. Misalnya, guru mengajukan pertanyaan, sekitar sembilan puluh persen (90%) dari tanggapan siswa hanya berupa jawaban satu kata. Cara guru bertanya bersifat dangkal, belum mendukung munculnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran.

Grafik 1. Pengangguran terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan (persen), Februari 2017-Februari 2019



Sumber: Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2019. No. 41/05/Th. XXII, 06 Mei 2019

Pengangguran ini berbeda dengan keterserapan lulusan pendidikan rendah SD dan SMP dimana lulusan tersebut mengisi pekerjaan-pekerjaan kasar seperti *cleaning service*, buruh kasar penyapu jalan, dan berbagai pekerjaan yang tidak diminati oleh lulusan SMK. Demikian halnya lulusan pendidikan tinggi juga tidak sebanyak lulusan SMA dan SMK yang menganggur. Hal ini disebabkan pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh lulusan pendidikan tinggi tidak banyak yang dapat dimasuki oleh lulusan SMK.

III. Hasil FGD

Tabel 2. Pendapat narasumber mengenai penggabungan SMK dan SMA

No	Setuju digabung	Tidak setuju digabung	Alternatif penggabungan
1		Tidak digabung dan penguatan SMK yang ada dan buka baru penggabungan dua sekolah dengan visi, misi dan dasar filosofi yang berbeda akan memakan banyak waktu dan tenaga	- Upaya penggabungan SMA dan SMK pada tahun 2017 disebut dengan <i>double track</i>. Dalam konsep <i>double track</i> tadi, siswa SMA melalui ekstrakurikuler dibekali <i>life skill</i> selama satu tahun. Sementara siswa SMK dibekali konten keilmuan sebagaimana di SMA - Karena penggabungan dua sekolah dengan visi, misi dan dasar filosofi yang berbeda akan memakan banyak waktu dan tenaga sampai pada proses implementasinya - Lebih baik SMK yang ada atau penambahan SMK baru difokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi sebagai prioritas - Kalau digabung, maka konten yang akan diintegrasikan, model kelembagaan atau unit institusi baru

No	Setuju digabung	Tidak setuju digabung	Alternatif penggabungan
2	Mengintegrasikan SMK ke dalam SMA		Integrasi <i>double tracking</i> dengan sistem akademik dan vokasi atau Sekolah Menengah Terintegrasi (SM-T) berguna: • Meningkatkan kualitas sekolah dan memberikan peluang penghasilan bagi siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang rendah • Memadukan jalur akademik dan vokasi tersebut berdampak positif bukan hanya pada penguasaan akademik dari siswa dengan latar belakang status sosial ekonomi yang rendah tapi juga berdampak pada kesiapan kerjanya (Aakvik, Salvanes, dan Vaage (2010) • Penguasaan soft-skills menjadi lebih baik sehingga reformasi pendidikan tersebut mampu meningkatkan mobilitas pendapatan lulusan (Kerr, Pekkarinen, dan Uusitalo, 2012). • SM-T ini adalah di samping memberikan kemampuan akademik juga memberikan keterampilan/keahlian kepada siswa agar jika tidak melanjutkan ke perguruan tinggi mereka memiliki kemampuan untuk terjun ke dunia kerja baik di perusahaan maupun bekerja secara mandiri. Vokasi tidak sekedar dilaksanakan dalam kegiatan ekstra kurikuler namun menjadi kegiatan kurikuler yang wajib dipilih oleh setiap siswa sesuai dengan bakat dan minatnya.
3		Tidak bisa digabung	• Perbedaan yang jauh dalam visi dan misi antara SMK dan SMA. SMA dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sedangkan SMK dipersiapkan untuk bekerja di industri atau menciptakan kerja sendiri. Selain itu, kurikulumnya berbeda. • Jumlah jam pelajaran materi umum terutama untuk kelas 11 dan 12 di SMA dan SMK berbeda. Selain itu pada pelajaran peminatan, untuk SMA terdiri atas IPA, IPS, dan Bahasa sedangkan SMK memiliki 146 kompetensi keahlian (jurusan) yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri

No	Setuju digabung	Tidak setuju digabung	Alternatif penggabungan
4	Penggabungan dengan model model Spacial Education Skill Modle (SESM)		• Penggabungan dengan model SESM yaitu mengkoneksikan antara lembaga dengan industri dan lembaga dengan program • Diperlukan reorientasi <i>approach</i>, sehingga SMK bisa adaptif dengan kebutuhan masyarakat. (1) Orientasi <i>Supply Driven</i> ke <i>Demand Driven</i>, (2) Dari pendidikan berbasis sekolah (<i>school based program</i>) ke sistem berbasis ganda (<i>Dual Based Program</i>), (3). Dari model pengajaran yang mengajarkan mata-mata pelajaran ke model pengajaran berbasis kompetensi, (4) Perubahan dari pemisahan antara pendidikan dengan pelatihan kejuruan, ke sistem baru yang mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu, dan (5). Manajemen sentris ke pola manajemen otonomi (Prinsip desentralisasi).
5			• Lebih penting fokus dalam meningkatkan kualitas belajar SMA dan SMK. Untuk penggabungan SMA-SMK harus melihat visibilitas/kemungkinannya • Banyaknya lulusan SMA yang menganggur salah satunya disebabkan oleh siswa SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. • Konsep penggabungan lebih ke substansinya bukan penggabungan lembaganya: Lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi bisa dibuatkan program sertifikasi: magang atau menempuh program sertifikasi di SMK-SMK tertentu. • Untuk SMK-SMK kecil yang tidak perform bisa dilakukan perankingan agar diketahui oleh publik, kemudian nantinya SMK kecil tersebut dibina oleh sekolah lain.

No	Setuju digabung	Tidak setuju digabung	Alternatif penggabungan
6			Kalau digabung harus buat kriteria standar yang ketat Apabila SMK yang tidak memenuhi standar tersebut Maka SMK-SMK itu bisa digabung menjadi satu SMK yang sudah maju dan bagus SMK SMK kecil dan SMA digabung menjadi SMU • Memperbaiki standar institusinya, standar yang applicable. Memetakan standar atau kriteria untuk masing-masing satuan pendidikan baik SMA maupun SMK. Misalnya untuk SMK Bisnis Manajemen harus memiliki link dengan dunia usaha/ industri, SMK Teknologi Mesin harus memiliki mesin, dll. Ketika tidak bisa memenuhi standar tersebut maka SMK-SMK itu bisa digabung menjadi satu. 1. Bisa SMK-SMK digabung menjadi “SMK gabungan” 2. SMK yang tidak memenuhi standar tersebut berubah menjadi SMA, karena SMA tidak serumit SMK. 3. Atau SMK-SMK kecil dan SMA digabung menjadi SMU. 4. Program Kolaborasi Sekolah Menengah • Alternatif yang ke 4 ini yang sangat mungkin dapat dintegrasikan atau digabungkan, dan ini perlu ada model Penggabungannya • Konsep SMK membantu SMK, SMA membantu SMA sudah dijalankan salah satunya oleh SMA 8 DKI Jakarta. Bantuan non akademik: peminjaman fasilitas sekolah seperti lapangan olahraga. Bantuan akademik: mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru

No	Setuju digabung	Tidak setuju digabung	Alternatif penggabungan
7			- Karakteristik SMA dan SMK sangat berbeda. SMA mengajarkan struktur konsep, sedangkan SMK mengutamakan keterampilan diajarkan Belajar Mengenal Berwirausaha(BMW). Untuk saat ini cukup sekolah besar menggandeng sekolah-sekolah kecil. Untuk menggabungkan sekolah-sekolah akan membutuhkan proses yang panjang. Jika akan digabung harus melihat kompetensi keahlian sekolah-sekolah yang digabung tersebut. - Untuk sertifikasi kompetensi siswa dari SMK kecil digandeng dengan SMK besar sebagai sekolah binaan. SMK besar juga melakukan pembinaan. Jika dalam satu wilayah atau rayon tidak ada SMK kecil sejenis maka lompat ke wilayah yang terdekat. Jenis pembinaan yang dapat dilakukan: pengembangan SDM kompetensi sekolah, pengembangan BLUD, pembinaan pengelolaan lingkungan - SMK yang sudah maju banyak mendapatkan bantuan dari Dit SMK terutama dalam revitalisasi. Sekolah ini membantu juga sekolah-sekolah kecil diwilayah itu seperti SMK 57 membantu SMK Patria wisata, SMK Adi Luhur di Jakarta Timur, dan SMK LP3 istana - Sekola kolaborasi Kalau saya tulisnya 57 berbagi - Di Jakarta ada SMK di ruko, rukonnya menyewa, kantinnya jelek perpustakaannya jelek. Siswanya kelas 10 ada 14, pokoknya jumlah siswanya di bawah 100. Lab nggak punya ya komputernya cuman beberapa biji

No	Setuju digabung	Tidak setuju digabung	Alternatif penggabungan
8			• Akan sulit untuk menggabungkan sekolah, lebih memungkinkan untuk menggabung pemanfaatan sarana-prasarana, pembelajaran bersama, pembinaan kompetensi softskill. Salah satu kendala jika sekolah digabung yaitu standar biaya, ada SMK dengan biaya masuk rendah, ada SMK dengan biaya masuk tinggi. • Jika memang SMA-SMK digabung, di semua semester ada pelajaran yang sama. Di SMK ada Mata Kuliah Dasar Umum(MKDU) dan penjurusan, di SMA ada kurikulum wajib dan peminatan. Untuk MKDU dan kurikulum wajib mungkin sama seperti agama, PKn. Namun jika sudah penjurusan dan peminatan sulit. Selain itu juga SMA-SMK orientasinya berbeda • Untuk mengurangi jumlah lulusan SMK menganggur, SMK harus mengikuti perkembangan industri. • Siswa harus memiliki minat dahulu terhadap kompetensi yang diambil. Selain itu ketersediaan sarana prasarana juga berpengaruh terhadap meningkatnya motivasi pembelajaran siswa dan kemampuan softskillnya. • Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan dengan guru magang diperusahaan, melakukan pembelajaran antar teman sejawat, pelatihan-pelatihan dari MGMP/MKKS.

No	Setuju digabung	Tidak setuju digabung	Alternatif penggabungan
9			• Untuk menggabungkan SMA-SMK harus dilakukan pemetaan yang lebih detail tentang kompetensi masing-masing sekolah. • Bukan menggabungkan sekolahnya tetapi lebih ke pola kolaborasi, ini bisa diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah SMK-SMA juga. Kolaborasi mengarah ke teknik kuliah, siswa pelajarannya seperti Kurikulum 2013 terbaru, ada lintas minat: siswa jurusan IPA belajar pelajaran IPS dan sebaliknya, agar nantinya siswa IPA bisa masuk ke jurusan IPS dan sebaliknya, atau dulu disebut dengan program IPC (campuran). atau siswa SMA pada 4 bulan terakhir dikelas 11 magang di SMK agar mendapat <i>technical skill</i>, siswa SMK magang di SMA untuk mendapat managerial skill. • Prinsip kolaborasi cluster (kolaborasi sekolah dalam cluster) yang sama: 1. Kondisi lapangan sudah dipahami bersama 2. Karakteristiknya tidak jauh berbeda 3. Karakter masyarakatnya itu lebih mudah dipahami bisa jadi heterogen nantinya jadi dari yang homogen bisa jadi heterogen • Di DKI Jakarta ada program Sekolah Kolaborasi. SMA besar menggandeng SMA kecil yang kekurangan sarana prasarana, kurang baik manajemen kurikulumnya. Selain itu juga SMA-SMA saling berbagi ilmu, masing-masing sekolah kelebihannya dimana, nantinya sekolah yang kekurangan dalam bidang tersebut datang melakukan kunjungan untuk belajar/sharing. Dilakukan program pendampingan untuk peningkatan kualitas SDMnya juga. • Sekolah-sekolah buram (sekolah yang kurang perform) dipetakan kelebihannya, kemudian dikembangkan sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai salah satu keunggulan sekolah tersebut.

No	Setuju digabung	Tidak setuju digabung	Alternatif penggabungan
10		Tidak bisa digabung	Konsep pendirian SMK dan SMA beda. Dalam satu yayasanpun, SMK dan SMA tidak bisa digabung karena banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain biaya, guru dan programnya tidak sama. Di SMK, programnya lebih spesifik yaitu mempelajari skill khusus seperti program kendaraan ringan, program komputer jaringan.

Hasil Kuesioner

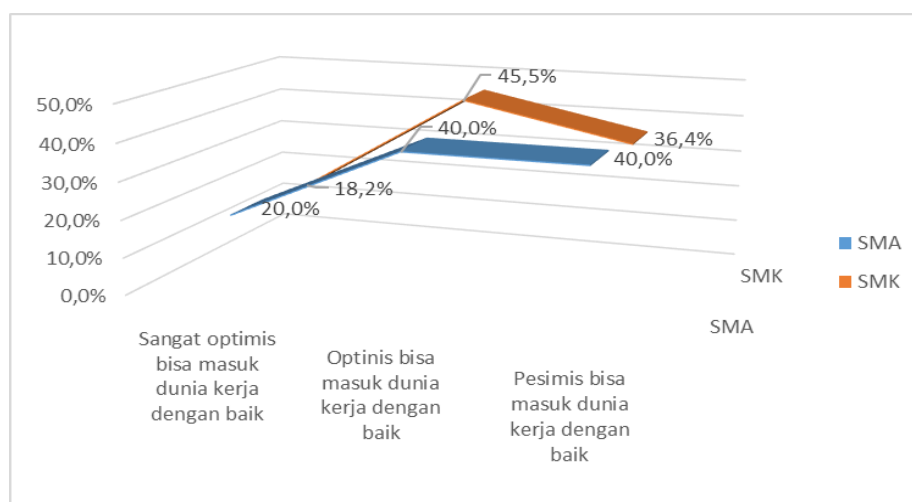
Penggabungan SMK dan SMA sebagai institusi yang memungkinkan mampu meningkatkan mutu lulusan untuk mengatasi pengangguran dan tidak terserapnya lulusan di industri seperti yang terlihat pada data pengangguran terbuka pada grafik 1 mendapatkan berbagai persepsi dari kepala SMK dan SMA di beberapa daerah. Sebagian besar kepala SMK dan SMA (90.0%) dan SMA (91.7%) tidak setuju penggabungan SMK dan SMA. Ketidaksetujuan kedua kepala SMK dan SMA dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain:

- Penggabungan dua sekolah dengan visi, misi dan dasar filosofi yang berbeda akan memakan banyak waktu dan tenaga sampai pada proses implementasinya.
- Jumlah jam pelajaran materi umum terutama untuk kelas 11 dan 12 di SMA dan SMK berbeda. Selain itu pada pelajaran peminatan, untuk SMA terdiri atas IPA, IPS, dan Bahasa sedangkan SMK memiliki 146 kompetensi keahlian (jurusan) yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri
- Biaya, guru dan programnya tidak sama. Di SMK, programnya lebih spesifik yaitu mempelajari skill khusus seperti program kendaraan ringan, program komputer jaringan, dan lainnya.

Dari kendala kendala tersebut, penggabungan SMK dan SMA sulit dilaksanakan sehingga kecil kemungkinan secara institusi penggabungan dapat dilaksanakan.

Usaha peningkatan mutu lulusan SMK telah banyak dilakukan untuk meningkatkan mutu lulusan agar mendapatkan kesempatan bekerja di industri sesuai dengan minat dan kompetensi lulusan. Kepala SMK dan SMA diminta tanggapannya mengenai kesempatan lulusannya untuk bekerja, persepsi mereka bervariasi.

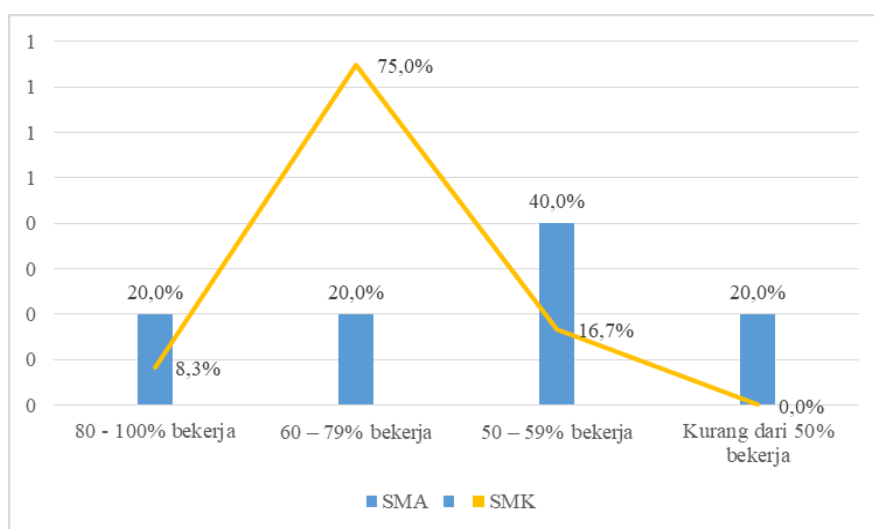
Grafik 2. Kesempatan lulusan bekerja



Data menunjukkan bahwa kepala SMA dan SMK optimis lulusan mereka bisa masuk dunia kerja dengan baik seperti yang dikatakan 45.5 persen kepala SMK dan 40 persen kepala SMA. Sementara kepala SMK yang mengatakan sangat optimis sebanyak 18.2 persen dan kepala SMA sebanyak 20 persen. Sebaliknya, mereka yang mengatakan pesimis bisa masuk kerja dengan baik ditunjukkan oleh 36.4 persen kepala SMK dan 40 persen kepala SMA. Berdasarkan data tersebut bahwa baik kepala SMK maupun kepala SMA sama-sama optimis bahwa lulusan SMK dan SMA dapat masuk dunia kerja dengan baik.

Pendapat kedua kepala sekolah tersebut dibandingkan dengan data pengangguran SMA berada pada 6.78 persen pada tahun 2019 dan 8.63 persen lulusan SMK (BPS: 2019). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapat kepala SMK dan kepala SMA mengenai kesempatan lulusan mereka masuk dunia kerja masih mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kurangnya sarana prasarana pendukung di sekolah dan kurangnya guru produktif SMK yang berpengalaman di industri.

Lulusan SMK dan SMA yang bekerja dapat dilihat pada grafik 3 berikut.



Grafik 3. Lulusan dari sekolah SMA dan SMK yang bekerja

Berkaitan dengan persentase lulusan sekolah yang bekerja, data menunjukkan bahwa kepala SMA yang mengatakan 60-100 persen bekerja hanya 40 persen, sementara yang mengatakan kurang dari 50 persen sampai 59 persen sebanyak 60 persen. Ini mengindikasikan bahwa lulusan SMA yang bekerja lebih sedikit daripada yang bekerja. Hal ini bertolak belakang dengan optimisme kepala SMA yang mengatakan bahwa lulusannya bisa masuk kerja dengan baik.

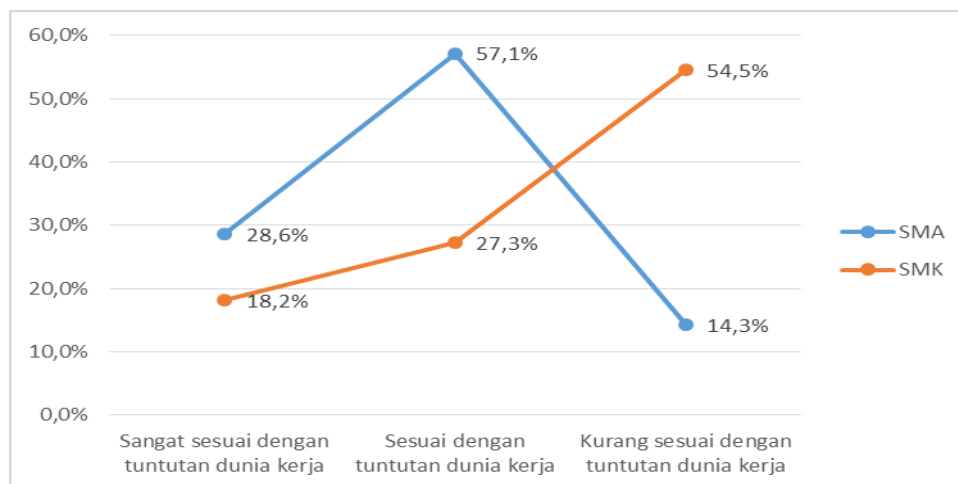
Berbeda dengan pendapat kepala SMK yang mengatakan bahwa 60-100 persen bekerja sebanyak 75 persen. Hal ini juga bertolak belakang dengan optimisme kepala SMK yang mengatakan bahwa lulusan SMK yang kurang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Klaim kepala SMK dan kepala SMA yang bekerja berbanding terbalik dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2019. No. 41/05/Th. XXII, 06 Mei 2019 yang mengatakan bahwa bulan Februari 2019, pengangguran yang paling banyak diantara lulusan SD sampai universitas adalah lulusan SMK berturut-turut mulai Februari 2017 (9.22 %), Februari 2018 (8.92%), sampai Februari 2019.

Proses pembelajaran di SMA/SMK

Kenyataan bahwa masih banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan lulusan SMK yang juga tidak mendapatkan pekerjaan industri seperti yang terlihat pada data pengangguran terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan (persen), Februari 2017-Februari 2019 yaitu pengangguran yang paling banyak diantara lulusan SD sampai

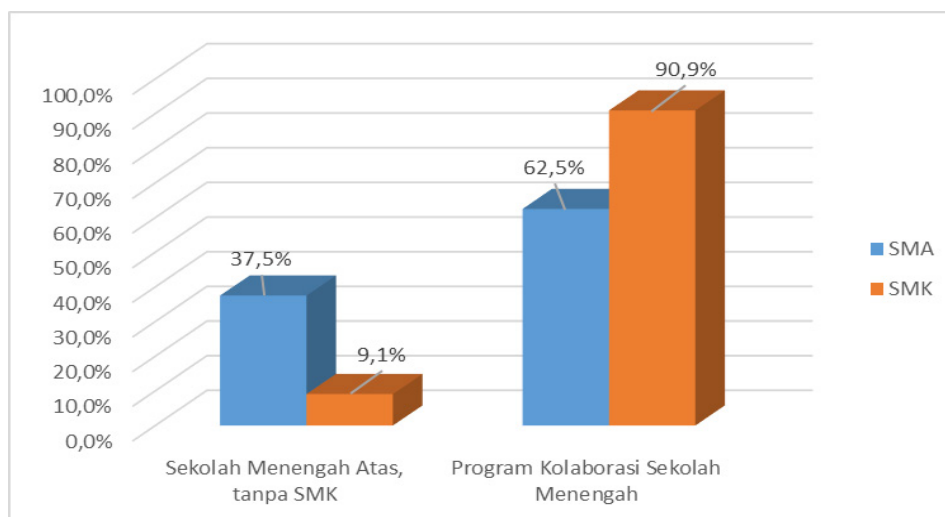
universitas adalah lulusan SMK berturut dari bulan Februari 2017 (9.22 %), Februari 2018 (8.92%), dan Februari 2019. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya mutu lulusan yang dihasilkan oleh SMK.



Grafik 4. Proses pembelajaran di SMA/SMK

Proses pembelajaran di SMK mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja agar lulusan dapat diterima di industri. Kebutuhan tenaga terampil yang sesuai dengan pekerjaan yang ada di industri memerlukan kesiapan sekolah untuk dapat menyesuaikan pembelajar di sekolah dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Ketentuan itu harus dapat dilaksanakan oleh sekolah khususnya SMK. Namun, berbanding terbalik dengan jawaban yang diberikan oleh kepala SMK, sebagian besar (54,5 persen) kepala SMK berpendapat bahwa proses pembelajaran di SMK kurang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, dan hanya sebagian kecil (27,3 persen) yang menyatakan proses pembelajarannya sudah sesuai dan sangat sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Sebaliknya, 57,1 persen kepala SMA menganggap proses pembelajaran di SMA sudah sesuai dengan tuntutan dunia kerja, 28,6 persen mengatakan sangat sesuai, dan 14,3 persen proses pembelajaran di SMA kurang sesuai dengan tuntutan kerja.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50 persen kepala SMA menganggap proses pembelajaran di SMA sudah sesuai dengan tuntutan dunia kerja, sedangkan lebih dari 50 persen kepala SMK menganggap proses pembelajaran di SMK tidak sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan umum, salah satunya SMA seharusnya mengutamakan perluasan pengetahuan peserta didik guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan proses pembelajarannya di SMK diharapkan mampu mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu.



Grafik 5. Bentuk satuan pendidikan yang mungkin bisa dilakukan apabila SMA dan SMK digabung

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas kepala SMA dan kepala SMK memilih **Program Kolaborasi Sekolah Menengah** yang mungkin bisa dipilih sebagai opsi apabila dilakukan penggabungan antara SMA dengan SMK, dengan rincian: dipilih oleh 62,5 persen kepala SMA dan 90,9 persen kepala SMK. Selain itu, 37,5 persen kepala SMA dan 9,1 persen kepala SMK memilih opsi Sekolah Menengah Atas tanpa SMK.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kondisi SMK saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa SMK yang banyak berkontribusi terhadap pengangguran adalah SMK swasta dan SMK kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Persentase sumbangan pengangguran oleh SMK SMK tersebut dilihat dari perbandingan jumlah SMK negeri, SMK yang besar dan SMK kecil dan swasta, maka kecenderungan lebih banyak kontribusi pengangguran adalah dari SMK kecil dan SMK swasta.

Persentase penduduk yang bekerja juga didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Sementara lulusan SMA dan SMK menduduki peringkat menengah di atas lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. Ini berarti ketercapaian program lulusan SMK yang dipersiapkan untuk bekerja belum memenuhi target. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lulusan SMK yang program dan proses pembelajaran, sarana, fasilitas, guru produktif, dan perusahaan partner tidak memenuhi syarat.

Pengangguran banyak dihasilkan oleh lulusan SMK walaupun tidak sedikit juga dari lulusan SMA. Berdasarkan data pengangguran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa lulusan SMK banyak menyumbang pengangguran.

Berdasarkan kondisi nyata dari hasil diskusi dengan nara sumber kepala-kepala SMA dan SMK, serta hasil survei, maka penggabungan SMA dengan SMK sulit dilaksanakan walaupun SMA dan SMK swasta yang dikelola oleh yayasan.

Tabel 3. Hasil Focus Group Discussion (FGD) dan hasil kuesioner

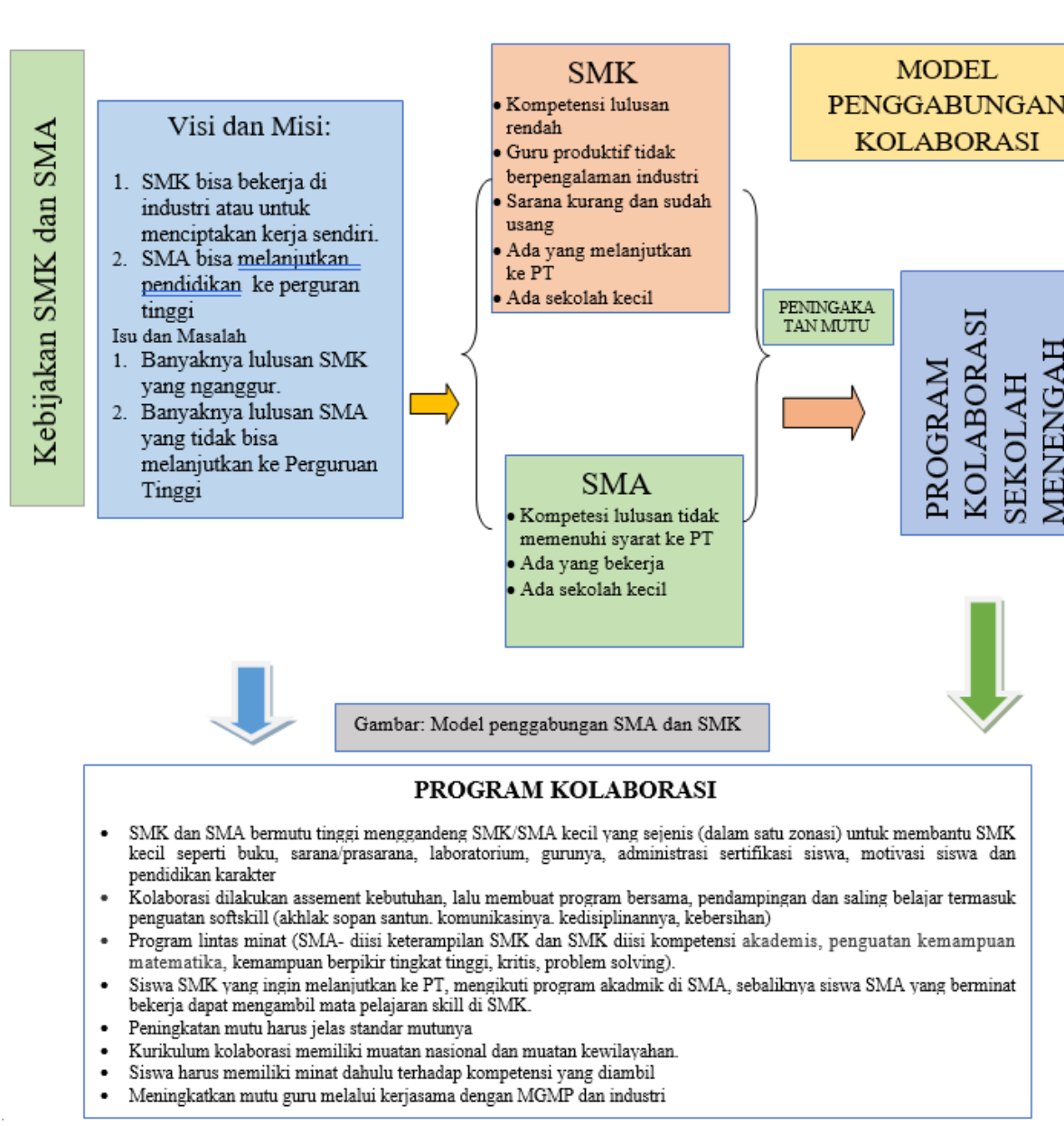
FGD/Kuesioner	Kondisi dan Alternatif Penggabungan	SMA	SMK
FGD	Kesetujuan penggabungan SMK dan SMA	Tidak setuju	Tidak setuju
Kuesioner	Sekolah Menengah Umum	62.5 persen	90.9 persen
FGD/Kuesioner	Sekolah Menengah Atas tanpa SMK	37.5 persen	9.1 persen
	Model	Kolaborasi	Link and Match dan Kolaborasi

Alasan yang paling utama adalah konsep pendidikan SMA dan SMK berbeda yaitu SMA ditujukan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sedangkan lulusan SMK dipersiapkan untuk bekerja, walaupun kedua lulusan tersebut masih sama-sama ada yang bekerja dan ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Disamping itu, kalau dikaji penggabungan baik penggabungan siswanya atau penggabungan institusinya (fisik SMK dan SMA), maka akan terkendala dengan lokasi dan tempat kedudukan SMA dan SMK yang berbeda dan tidak berada dalam satu lokasi atau tidak berada dalam satu zonasi.

Walaupun penggabungan SMK dan SMA sulit dilaksanakan, FGD memberi alternatif penggabungan dengan pola kolaborasi yaitu program SMK dan SMA diintegrasikan dalam satu sistem yaitu pembelajaran yang serumpun di SMK dan SMA dapat dipelajari pada satu sekolah yaitu dibentuk dengan nama **“Program Kolaborasi Sekolah Menengah”**. SMK dan SMA pada program integrasi pada kelas awal (kelas 10) dan memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih program khusus pada kelas 11 dan 12.

E. SARAN

Gambar 1. MODEL INTEGRASI SMK DAN SMA



Berdasarkan simpulan penelitian di atas, walaupun penggabungan SMK dan SMA tidak bisa dilakukan karena berbagai kendala, namun untuk mengatasi masalah ketidaktercapaian [Das Sollen dan Das Sein](#) SMK dan SMA dalam memenuhi tujuannya dan untuk meningkatkan mutu SMK dan SMA yang bermasalah tersebut, maka diusulkan alternatif model pengintegrasian yaitu model **Kolaborasi**, sebagaimana gambar 1.

I. Konsep

Program kolaborasi sekolah menengah adalah yang dilakukan oleh SMK dan SMA dengan mengoptimalkan sumber daya ada untuk meningkatkan mutu pendidikan agar dapat mengurangi pengangguran.

II. Prinsip

1. Program kolaborasi dapat dilakukan dengan dengan pola kolaborasi antara SMA dengan SMA, SMK dengan SMk, dan SMK dan SMA. Untuk membantu siswa SMK yang ingin melanjutkan ke PT dan SMA yang ingin bekerja.
2. Peningkatan mutu harus jelas standar mutunya
3. Kurikulum kolaborasi memiliki muatan nasional dan muatan kewilayahan

III. Program

1. SMK dan SMA bermutu tinggi menggandeng SMK/SMA kecil yang sejenis (dalam satu zonasi) untuk membantu SMK kecil seperti buku, sarana/prasarana, laboratorium, guru, administrasi sertifikasi, siswa, motivasi siswa, dan pendidikan karakter
2. Kolaborasi dilakukan assement kebutuhan, lalu membuat program bersama, pendampingan dan saling belajar termasuk penguatan softskill (akhlak sopan santun. komunikasinya. kedisiplinannya, kebersihan)
3. Program lintas minat (SMA- diisi keterampilan SMK dan SMK diisi kompetensi akademis, penguatan kemampuan matematika, kemampuan berpikir tingkat tinggi, kritis, problem solving).
4. Siswa SMK yang ingin melanjutkan ke PT, mengikuti program akadmik di SMA, sebaliknya siswa SMA yang berminat bekerja dapat mengambil mata pelajaran skill di SMK.
5. Siswa harus memiliki minat dahulu terhadap kompetensi yang diambil
6. Meningkatkan mutu guru melalui kerjasama dengan MGMP dan industri

Keterangan

Kelas 10: Kurikulum yang digunakan di kelas 10 adalah kurikulum yang memuat mata pelajaran umum/ kelompok wajib yang terdiri atas: (Pendidikan Agama, Panca Sila, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Sejarah Indonesia, Seni Budaya, Prakarya, Penjaskes).

Kelas 11. Mata pelajaran yang diajarkan di kelas 11 adalah mata pelajaran pilihan yang menjadi kekhasan

atau penjurusan yang dipilih oleh siswa baik jurusan untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi atau jurusan untuk menjadi dasar dalam persiapan untuk kerja

Kelas 12. Mata pelajaran yang diajarkan adalah mata pelajaran pilihan khusus untuk memperkuat kompetensi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan penguatan kompetensi keahlian untuk persiapan kerja di industri

Kejuruan . IPA dan IPS diberi peluang belajar lintas minat. Ada kurikulum kehidupan sehari-hari.

IV. Kekuatan

1. Akses layanan pendidikan yang bermutu yang sesuai dengan kebutuhan (pribadi, masyarakat, DU/DI).
2. Fleksibilitas dan efisiensi penyelenggaraan.
3. Kontekstual sesuai dengan kondisi sekolah (budaya, karakteristik, kondisi).
4. Siswa SMA memperoleh skill untuk bekerja sebaliknya siswa SMK mendapatkan pembekalan bidang akademis untuk persiapan ke PT.
5. Program lintas minat (SMA-diisi keterampilan SMK dan SMK diisi kompetensi akademis).
6. Model sekolah kolaborasi ini sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar, untuk memberikan pilihan pada siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
7. Sistemnya menganut “Bottom up” model pengembangan program sesuai dengan kondisi sekolah dan siswa dan kebutuhan siswa.
8. Mengikuti alur Zonasi dalam pemerataan mutu.

V. Kelemahan

1. Pengaturan kurikulum memerlukan waktu yang lama dan sulit untuk memenuhi kebutuhan SMK dan SMA yang berbeda tujuan pendidikannya
2. Struktur penggabungan SMK dan SMA memerlukan arah dan hasil yang dicapai yang jelas, sementara program SMK dan SMA berbeda
3. Perlu penjaminan visi dan misi gabungan kedua program ini sehingga akhir dari pembelajaran di tingkat SMU mempunyai kompetensi untuk kerja dan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi
4. Memerlukan komitmen bersama antara yayasan atau sekolah untuk bersama meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- Aakvik, A., Salvanes, K.G., & Vaage, K. (2010). Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. *European Economic Review Volume 54, Issue 4, May 2010, Pages 483-500*.
- Badan Pusat Statistik Berita Resmi Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019 No. 91/11/Th. XXII, 05 November 2019
- Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. Arah Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2015. Jakarta
- Kerr, S.P., Pekkarinen, T., & Uusitalo, R. (2012). School Tracking and Development of Cognitive Skills. *Journal of Labor Economics* <https://www.jstor.org/stable/10.1086/669493>
- http://penyelarasan.kemdiknas.go.id/uploads/file/Materi_Sosialisasi_Penyelarasan.pdf
- <https://www.kompas.com/edu/read/2020/11/12/115000971/kemendikbud--lulusan-sma-smk-yang-diserap-perguruan-tinggi->
- <https://www.bing.com/search.dapo.dikdasmen.kemdikbud.go+id+login&cvid>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- VET-European Agency <http://www.european-agency.org/agency-projects/vocational-education-and-training>

UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN LULUSAN PKBM DI PROVINSI PAPUA BARAT DAN PAPUA MELALUI PEMBELAJARAN VOKASI FUNGSIONAL

Etty Sisdiana, Yendri Wirda, Nur Listiawati, Fransiska Nur Aini

**Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

ABSTRAK Tujuan kajian adalah mengembangkan konsep model tentang pembelajaran vokasi fungsional di PKBM yang dapat menghasilkan lulusan yang berdaya secara ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Barat dan Papua. Kegiatan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur, pengisian angket, wawancara, dan FGD yang seluruhnya secara virtual. Lokasi pengumpulan data: Sorong, Jayapura dan Merauke. Sumber informasi mencakup: Dinas Pendidikan, Pengelola PKBM, LSM, Pemerhati Pendidikan, Pusat Kurikulum dan direktorat terkait. Hasil kajian: (i) warga belajar PKBM umumnya berusia dewasa, miskin, (ii) kompetensi umum warga belajar umumnya baik tetapi tidak untuk keterampilan abad-21 dan daya juang, (iii) vokasi fungsional sangat diperlukan di PKBM karena lulusannya dapat mencari kerja atau berwirausaha, namun kekurangan dana menyebabkan masih sedikit PKBM yang melaksanakannya, (iv) instruktur untuk vokasi fungsional sudah memadai namun sarana belum memadai, (v) vokasi fungsional yang diberikan berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari dan IT, (vi) potensi wilayah sangat mendukung ragam vokasi fungsional, (vii) pemda belum menunjukkan perannya, (ix) sertifikat vokasi fungsional masih terkendala. Rekomendasi, perlu dikembangkan model pembelajaran vokasi fungsional yang memperhatikan kultur, adat istiadat dan potensi wilayah, dengan melibatkan berbagai komponen sebagai sebuah sistem untuk memenuhi aspek-aspek: pendekatan andragogi, daya juang, zona substansi, perencanaan, kewirausahaan, sertifikasi, pembelajaran daring dan luring, serta kolaborasi.

Kata kunci: PKBM, vokasi fungsional, warga belajar, Papua Barat, Papua

A. PENDAHULUAN

Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua (PB dan P) merupakan dua provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan paling tinggi. Wilayah Papua merupakan salah satu dari tujuh wilayah di Indonesia yang dikelompokkan sebagai daerah tertinggal sehingga diprioritaskan untuk dilakukan percepatan pembangunan (Peraturan Presiden Nomor 21, 2018). Salah satu butir Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Oleh sebab itu, pembangunan di daerah tertinggal merupakan perwujudan adanya upaya keberpihakan negara kepada masyarakat di provinsi PB dan P.

Data per Maret 2019, proporsi penduduk miskin di Provinsi Papua Barat adalah 22,17 % sedangkan di Provinsi Papua proporsi penduduk miskin bahkan lebih tinggi lagi yakni 27,53 % (BPS, 15 Juli 2019). Terdapat 33 (78,57 %) dari 42 kabupaten/kota di PB dan P, yang dikategorikan tertinggal. Banyak kondisi yang menyebabkan ketertinggalan di wilayah tersebut. Kemiskinan penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi PB dan P disumbang oleh tamatan SD/SMP atau tidak tamat SD di masing-masing kabupaten/kotanya.

Secara umum, terdapat enam penyebab ketertinggalan dimaksud yakni: faktor ekonomi, aksesibilitas, SDM, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah. Dari enam penyebab ketertinggalan di wilayah Papua, terdapat tiga aspek yang menjadi penyebab ketertinggalan di sebagian besar kabupaten/kota, yaitu ekonomi, aksesibilitas, dan sumber daya manusia (Perpres No. 21/2018). SDM, di PB dan P perlu ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan, dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang diterima di dunia kerja atau mampu berwirausaha sehingga ketertinggalan di PB dan P dapat diatasi. Melalui pendidikan akan terjadi proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (Pasal 4 Ayat 3 UUSPN No 20 tahun 2003).

Agar memberikan manfaat, pendidikan dimaksud perlu memperhatikan karakteristik masyarakat di PB dan P pada umumnya yang memerlukan penanganan secara berbeda dengan wilayah lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga hasil belajarnya dapat diimplementasikan di dalam kehidupannya kelak kemudian hari. Pendidikan ini diharapkan akan menghasilkan lulusan yang lebih berdaya baik untuk kehidupannya sendiri maupun keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Kondisi ini secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketertinggalan wilayah Papua.

Salah satu jalur pendidikan yang dapat diberikan kepada masyarakat di PB dan P adalah pendidikan non formal (PNF). Hal ini mengingat bahwa PNF merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional atau vokasi fungsional (vf) serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. (UU no. 20 tahun 2003). PKBM adalah salah satu satuan PNF yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat (Kemendikbud, 2013). Keberadaan PKBM di PB dan P merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya menuntaskan kemiskinan melalui peningkatan SDM. Di dalam Peraturan Presiden No 21 tahun 2018, dinyatakan bahwa strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan SDM dan IPTEK di wilayah Papua antara lain dengan pengembangan pendidikan kesetaraan paket A, Paket B, dan Paket C. Sebagaimana ketentuannya bahwa PKBM juga dapat melaksanakan program pendidikan kesetaraan.

PKBM sebagai institusi pendidikan berfungsi agar semua warga masyarakat bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal meningkatkan pendapatannya melalui pembelajaran, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah-masalah pendidikan masyarakat serta kebutuhan akan pendidikan masyarakat (kemendikbud, tanpa tahun). Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 memuat bahwa tujuan penyelenggaraan PKBM yaitu agar warga masyarakat : 1) memperoleh pengetahuan dan keterampilan, 2) memperoleh keterampilan kecakapan hidup, 3) mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, 4) mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau, dan 5) melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu rumpun pendidikan PKBM terdiri atas: 1) Kejar Paket-A yaitu memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 2) Kejar Paket-B yaitu memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, dan 3) Kejar Paket-C yaitu memiliki keterampilan berwirausaha (Kemendikbud, 2017). Sejauh ini, di PB dan P jumlah PKBM Swasta jauh lebih banyak daripada PKBM Negeri sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah PKBM di Provinsi PB dan P

No	Provinsi	Jumlah PKBMN	Jumlah PKBM S	Jumlah Total
1	Provinsi Papua Barat	23	412	435
2	Provinsi Papua	16	84	100

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index31.php>, diolah

Salah satu yang membedakan pendidikan kesetaraan dengan satuan pendidikan lainnya adalah pencapaian VF. Di dalam Kurikulum pendidikan kesetaraan Paket B maupun Paket-C (Kemendikbud, 2017) dimuat bahwa struktur kurikulum program pendidikan kesetaraan dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 dengan orientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai vf yang menjadi kekhasan program-program pendidikan kesetaraan.

PB dan P memiliki kultur, budaya dan adat istiadat masyarakat yang dapat menjadi modal bagi kegiatan pembelajaran di PKBM. Selain itu PB dan P juga memiliki potensi wilayah yang sangat beragam yang juga dapat dijadikan sebagai modal bagi pembelajaran vf. Modal kultur, budaya, dan adat istiadat serta potensi wilayah ini menjadi penting bagi pembelajaran vf di PKBM di PB dan P mengingat bahwa mata pelajaran kelompok khusus yang berisi program pengembangan kecakapan hidup mencakup keterampilan okupasional, fungsional, vokasional, sikap dan kepribadian profesional dan jiwa wirausaha mandiri yang dapat diberikan dengan memperhatikan variasi potensi sumber daya daerah yang ada, kebutuhan peserta didik dan peluang kesempatan kerja yang tersedia (Kemendikbud, 2017).

Merujuk pada berbagai uraian terdahulu, dapat dimaknai bahwa PKBM terutama Kejar Paket B dan Kejar Paket-C dapat menjadi pilihan yang dapat memberikan aktivitas pembelajaran yang bermanfaat karena memberikan bekal keterampilan yang menjadi kebutuhan warga belajar masyarakat di PB dan P. Se jauh ini, belum diketahui pembelajaran VF yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat berupa bekal kemandirian, produktif dan karakter yang dapat membantu meningkatkan keberdayaan ekonomi WB di PKBM sesuai dengan karakteristik WB dan kondisi di PB dan P.

Rumusan masalah kajian ini adalah model Pembelajaran vf pada PKBM yang bagaimanakah yang dapat meningkatkan kualitas SDM yang mandiri, produktif dan berkepribadian sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat PB dan P?

Adapun tujuan umum kajian ini adalah Menghasilkan konsep model pembelajaran VF pada PKBM yang dapat menghasilkan SDM yang mandiri, produktif dan berkepribadian dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat PB dan P. Tujuan khusus kajian adalah Melakukan pengkajian tentang: 1) profil PKBM di PB dan P penyelenggara pembelajaran VF, 2) profil warga belajar PKBM di PB dan P penyelenggara pembelajaran VF, 3) pelaksanaan pembelajaran VF pada PKBM di PB dan P, 4) Potensi PB dan P sebagai modal pelaksanaan pembelajaran VF pada PKBM, 5) peran pemangku kepentingan pada pelaksanaan pembelajaran VF di PB dan P, 6) pemberian sertifikat kelulusan VF kepada warga belajar, 7) faktor pendukung dan kendala keterlaksanaan pembelajaran VF pada PKBM di PB dan P.

B. METODE PENELITIAN

Kegiatan menggunakan metode kualitatif dengan analisis disajikan secara diskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: pengisian angket, wawancara, studi literatur dan FGD. Pengisian angket dilakukan oleh informan secara online menggunakan fasilitas email/whatsapp. Wawancara dilakukan menggunakan telpon. Sedangkan FGD dilakukan secara *video conference* melalui aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan pengumpulan data dilakukan di lokasi yang akan memanfaatkan hasil kajian ini, yakni provinsi PB dan P yang diwakili oleh Kota Sorong, Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke. Sumber informasi kegiatan terdiri atas: unsur dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, dinas pendidikan, pengelola PKBM, profesional, dan pemerhati pendidikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Profil PKBM di PB dan P penyelenggara pembelajaran VF

Keberadaan PKBM di PB dan P secara umum dapat membantu masyarakat khususnya yang terkendala mengikuti pendidikan formal karena alasan ekonomi sehingga dapat menikmati layanan pendidikan setara dengan sekolah formal sekaligus siap untuk memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. Berdasarkan pengelola PKBM, dinyatakan bahwa alasan mendirikan PKBM yakni banyaknya warga masyarakat yang putus sekolah karena berbagai sebab, diantaranya lokasi wilayah yang jauh dari kota, akibat kenakalan remaja, kondisi ekonomi keluarga, dan atas usulan masyarakat setempat. Di tiga kabupaten/kota yang menjadi lokus pengumpulan data ini, terdapat 41 PKBM dengan rincian seperti dimuat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan di Tiga Wilayah

No	Wilayah	Jumlah PKBM		
		Negeri	Swasta	Total
1	Kota Sorong	3	2	5
2	Kota Jayapura	0	18	18
3	Kab. Merauke	0	18	18

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index31.php?kode=320000&level=1>

Apabila seluruh PKBM di kota Sorong, Jayapura dan Merauke melaksanakan pembelajaran VF, dapat dibayangkan bahwa akan banyak warga belajar yang siap untuk bekerja atau berwirausaha. Namun pada kenyataannya, berdasarkan pernyataan unsur pimpinan dinas pendidikan di tiga lokasi tersebut hanya PKBM di kota Jayapura saja yang sudah melaksanakan pembelajaran VF. Alasan PKBM belum melaksanakan pembelajaran vf antara lain: warga belajar pernah bersekolah secara formal ingin melanjutkan lagi tetapi terbentur usia yang sudah tua dan tidak tersedianya dana untuk melaksanakan pembelajaran vf. Dana, sebagaimana disampaikan saat FGD, merupakan kebutuhan yang utama, karena WB harus belajar sambil praktek dan PKBM harus mendampingi sampai WB dapat berdiri sendiri. Sementara itu alasan PKBM di Jayapura melaksanakan pembelajaran VF adalah warga perlu meningkatkan 'skill' yang telah mereka miliki sehingga hasil belajar VF dapat dimanfaatkan WB untuk membuka lapangan pekerjaan, misalnya kerajinan kain perca. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh unsur dinas pendidikan kota Jayapura ini, tampaknya keragaman pembelajaran VF ini dapat membuka peluang dan kesempatan WB di Jayapura secara luas.

PKBM di kota Jayapura yang melaksanakan pembelajaran VF yang menjadi sumber informasi kajian ini yakni PKBM: Wansepa, Puspita dan Harapan. Berdasarkan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikannya, diketahui bahwa: ketiga PKBM baik untuk Paket-B maupun Paket-C sudah memiliki guru mata pelajaran umum dengan jumlah yang memadai, namun masih ada guru yang berlatar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Sementara itu berkenaan dengan instruktur, ditemukan bahwa ketiga PKBM memiliki instruktur dengan jumlah yang memadai yang seluruhnya memiliki keterampilan bervariasi mencakup Dasar, Terampil dan Mahir. Tidak ada instruktur di tiga PKBM dengan keahlian tingkat Ahli. Dalam hal kesesuaian dengan mata pelajaran yang diampunya, pengelola PKBM Puspita dan PKBM Harapan menyatakan sebagian instruktur nya sesuai, sedangkan Pengelola PKBM Wansepa menyatakan bahwa seluruh instruktur nya sesuai.

II. Profil warga belajar PKBM di PB dan P penyelenggara pembelajaran VF

Sebagaimana telah disampaikan terdahulu bahwa WB PKBM adalah mereka yang tertunda atau terhalang bersekolah secara formal. Dengan kondisi demikian, dijumpai adanya WB yang memasuki PKBM dengan usia melampaui usia jenjang pendidikannya. Sesuai jawaban pangelola tiga PKBM, diketahui bahwa berdasarkan usianya, hampir seluruh WB berusia diatas usia tingkat dan jenjang pendidikannya, atau dikatakan bahwa mereka umumnya adalah pebelajar dewasa. Pemberian layanan bagi WB dewasa tentunya berbeda dengan layanan kepada peserta didik yang sesuai dengan tingkat akademisnya. Usia WB tiga PKBM dimuat pada Tabel 3.

Tabel 3. Usia Warga Belajar PKBM Kota Jayapura

Usia	Jumlah WB Paket-B Sesuai Usia			Usia	Jumlah WB Paket-C Sesuai Usia		
	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX		Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
14-15	0	0	0	16-17	2	0	0
15-16	5	0	0	17-18	0	0	0
16-17	0	0	2	18-19	2	3	1
17-18	10	7	0	19-20	2	3	33
18-19	1	7	5	20-21	1	7	48
>19	26	38	40	>21	32	57	73

Sumber: data, diolah

Berdasarkan kondisi ekonomi orang tua WB di tiga PKBM diperoleh informasi bahwa pendidikan tertinggi yang dicapai orang tua WB adalah SMA dan Paket-C. Namun pendidikan orang tua WB yang paling banyak adalah SD dan SMP dan sebagian diantaranya tidak bersekolah dan tamat SD. Pekerjaan orang tua WB di tiga PKBM yang terbanyak adalah petani, sebagian sebagai nelayan. Terdapat juga orang tua WB yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan swasta. Pekerjaan orang tua WB ini tampaknya berhubungan dengan kondisi ekonomi karena pada umumnya kurang mampu, meskipun terdapat orang tua WB di satu PKBM yang kondisi ekonominya cukup. Kondisi yang memprihatinkan adalah dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu tersebut, ternyata tiga pengelola PKBM menyatakan bahwa orang tua WB umumnya tidak memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Kondisi sosial ekonomi WB ini tentunya memerlukan upaya melalui PKBM yang dapat meningkatkan keberdayaan secara ekonomi yakni lulusan PKBM yang dapat beradaptasi dengan dunia kerja atau siap untuk berwirausaha. Pembelajaran di PKBM yang dapat mempersiapkan WB agar siap bekerja dan atau berwirausaha adalah VF.

Profil WB di tiga PKBM penyelenggara pembelajaran VF dikaji juga pada aspek capaian kompetensi secara umum, capaian keterampilan abad-21 dan daya juang. Berdasarkan jawaban tiga pengelola PKBM tentang WB kompetensi secara umum, diperoleh informasi yang dimuat pada Tabel 4 berikut

Tabel 4. Capaian Kompetensi Secara Umum WB PKBM menurut Pengelola

Kompetensi Secara Umum	Persepsi Pengelola PKBM tentang Capaian Kompetensi							
	Sbgn Kecil		Sebagian		Sbgn Besar		Seluruh	
	B*	C*	B*	C*	B*	C*	B*	C*
1. Membaca dengan baik						1	3	2
2. Menulis dengan baik					2	1	1	2

Kompetensi Secara Umum	Persepsi Pengelola PKBM tentang Capaian Kompetensi							
	Sbgn Kecil		Sebagian		Sbgn Besar		Seluruh	
	B*	C*	B*	C*	B*	C*	B*	C*
3. Berhitung			1		2	3		
4. Bernalar/logika			2	1	1			
5. Berkesenian			1	1	1	2	1	
6. Budaya setempat			1	1	1	1	1	1
7. Olahraga					2	2	1	1
8. Prakarya			1	1	2	2		
9. Berbahasa Indonesia					1		2	3
10. Berbahasa Inggris	2	1	1	2				
11. Tepat memanfaatkan perangkat IT			1	2	2			1

Sumber: Jawaban tiga Pengelola PKBM, diolah.

Keterangan: B*: WB Paket B C*: WB Paket C

Merujuk pada Tabel 4, terlihat bahwa dengan dewasanya usia sebagian besar WB (Tabel 3), tampaknya mendukung capaian kompetensi umum mereka. Hal tersebut karena kompetensi secara umum sebanyak 11 butir, ternyata hanya kompetensi berbahasa Inggris saja yang dikuasai oleh sebagian kecil WB baik Paket B maupun Paket C. Capaian kompetensi secara umum oleh WB ini bisa mejadi salah satu modal bagi keterlaksanaan pembelajaran VF bagi WB di PKBM.

Dalam hal capaian keterampilan Abad-21 WB, diperoleh jawaban dari tiga pengelola PKBM penyelenggara pembelajaran VF.

Tabel 5. Persepsi Pengelola PKBM tentang Capaian Keterampilan Abad-21 oleh WB

Komponen Keterampilan Abad-21	Capaian Keterampilan Abad-21 menurut Pengelola							
	Sbgn Kecil		Sebagian		Sbgn Besar		Seluruh	
	B*	C*	B*	C*	B*	C*	B*	C*
1. Berbahasa dan memahami teks			1		1	1	1	2
2. Matematika/numerasi			3	1		2		
3. Berfikir ilmiah	1	1	2			1		1
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi			2	1	1	1		1
5. Mengelola keuangan pribadi	1	1	1		1	1		1
6. Hak-kewajiban sebagai warganegara			2	1		1	1	1
7. Berfikir kritis	1		1	1	1	1		1
8. Kreatif	1		1		1			
9. Berkomunikasi			1		1	2	1	1
10. Bekerjasama/kerjasama			2	1		1	1	1
11. Rasa ingin tahu			1	1	1	1	1	1
12. Berinisiatif-produktif	1			1	2	2		
13. Mengatasi masalah dan bertahan sampai selesai	1			1	2	1		1
14. Menyesuaikan diri			1	1	1	1	1	1

Komponen Keterampilan Abad-21	Capaian Keterampilan Abad-21 menurut Pengelola							
	Sbgn Kecil		Sebagian		Sbgn Besar		Seluruh	
	B*	C*	B*	C*	B*	C*	B*	C*
15. Memimpin kelompok	1	1	1		1	2		
16. Menyikapi keragaman sosial dan budaya			1	1	1	1	1	1

Sumber: Jawaban tiga Pengelola PKBM, diolah.

Apabila Tabel 3 dikaitkan dengan Tabel 5, tampaknya ada 'keuntungan' tersendiri dengan WB di tiga PKBM yang umumnya dewasa. Karena dengan usia WB tersebut, terlihat bahwa WB memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan Abad-21. Dengan memperhatikan Tabel 5 yakni pencapaian butir-butir keterampilan Abad-21 oleh sebagian besar dan seluruh WB, maka pembelajaran VF diduga dapat diterima oleh WB di tiga PKBM tersebut.

Dalam hal daya Juang WB, diperoleh informasi berdasarkan persepsi tiga pengelola PKBM yang melaksanakan pembelajaran VF. Daya juang WB di tiga PKBM di muat pada Tabel 6.

Tabel 6. Persepsi Pengelola PKBM tentang Daya Juang WB

Komponen Daya Juang	Persepsi Pengelola PKBM tentang Daya Juang WB							
	Sbgn Kecil		Sebagian		Sbgn Besar		Seluruh	
	B*	C*	B*	C*	B*	C*	B*	C*
1. Menyadari kesalahan pekerjaan	2			2			1	1
2. Memperbaiki pekerjaan yg gagal	2			2			1	1
3. Bekerja keras	2			2			1	1
4. Bertanggung jawab	2			2			1	1
5. Mau beradaptasi	1		1	2			1	1
6. Mau melakukan hal baru	1		1	2	1			1
7. Mengatasi masalah pekerjaan sulit	1		1	2	1			1
8. Melakukan pekerjaan menantang	2	1	1	1		1		
9. Mengambil tanggung jawab lebih banyak	3	1		1		1		
10. Mampu bertahan pada segala situasi	2		1	2				1

Sumber: Jawaban tiga Pengelola PKBM, diolah

Pada Tabel 6 terlihat bahwa kesepuluh komponen daya juang dimiliki oleh sebagian kecil WB Paket-B dan dimiliki oleh sebagian WB Paket-C. Informasi ini merupakan perhatian bahwa WB di dua PKBM perlu mendapatkan aktivitas yang dapat mengembangkan daya juang mereka. Sementara itu, di satu PKBM terlihat bahwa seluruh WB Paket C telah memiliki 8 dari 10 butir Daya Juang yang artinya WB memiliki kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja setelah lulus dari PKBM.

III. Pelaksanaan Pembelajaran VF pada PKBM di PB dan P

Pembelajaran VF bagi WB PKBM di PB dan P memerlukan kebijakan atau peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya dan hasil belajarnya dapat memberikan manfaat finansial kepada WB. Sejauh ini, PKBM menggunakan Standar Kompetensi Lulusan (Kemendikbud, 2016a),

Standar Isi (Kemendikbud, 2016b), dan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (Kemendikbud, 2016c) sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum kesetaraannya khususnya untuk kelompok umum. Pembelajaran VF, sebagaimana dinyatakan oleh pengelola PKBM pada FGD, belum ada ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Pembelajaran VF ini menggunakan potensi sumber daya dan kekayaan lainnya yang ada di lingkungan PKBM, sehingga tidak dapat distandarkan oleh pemerintah. Pencapaian VF oleh WB merupakan kekhasan perogram pendidikan kesetaraan, oleh sebab itu selayaknya kalau VF terlihat ‘menonjol’ di dalam struktur kurikulumnya. Faktanya, pada mata pelajaran kelompok khusus Paket B, VF tidak dimuat secara eksplisit di dalam struktur kurikulum (Kemendikbud, 2017a), sedangkan Paket C memuat mata pelajaran VF bersama-sama dengan Pemberdayaan (Kemendikbud, 2017b). ‘Keberadaan’ VF di dalam struktur kurikulum ini menurut pimpinan dinas pendidikan kota Jayapura dan pengelola PKBM menyebabkan pembelajaran VF masih kurang berdaya memotivasi WB untuk mengikuti pembelajarannya. Aksi maksimal yang dapat dicapai oleh PKBM adalah bekerjasama dengan BUMN untuk menjual hasil karya WB, belum sampai pada tahap kemandirian WB.

Pembelajaran VF diberlakukan dalam upaya mengembangkan potensi WB secara maksimal agar mandiri secara ekonomi baik melalui lapangan kerja maupun berwirausaha. Jawaban tiga pengelola PKBM di Jayapura juga menunjukkan bahwa pembelajaran VF yang dilaksanakan di lembaga pendidikannya berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi WB. Jawaban dimaksud yakni agar WB bisa: 1) mendapatkan dana untuk keperluan rumah tangga mereka, 2) berwirausaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya, dan 3) mempunyai penghasilan tambahan. Selain itu, berkenaan dengan pembelajaran VF tiga pengelola PKBM memiliki persepsi tentang kompetensi yang diharapkan dimiliki setelah WB mengikuti pembelajaran VF. Terdapat 15 kompetensi dimaksud, yakni: 1) membaca dengan baik agar WB dapat membaca dengan cepat, 2) menulis dengan baik agar dapat membuat catatan dengan baik, 3) berhitung agar dapat menghitung untung rugi, 4) bernalar/logika agar dapat menafsirkan kemampuannya, 5) berkesenian agar dapat mengangkat hasil seni daerah, 6) budaya setempat agar dapat menjaga kekayaan budaya, 7) olahraga untuk menjaga kesehatan pribadi, 8) prakarya agar mengembangkan ide kreatif yang dimiliki dan menghasilkan produk yang dapat dijual, 9) Bahasa Indonesia sebagai syarat sebagai warga negara, 10) Berbahasa Inggris wajib dilakukan, 11) TIK untuk menghadapi era globalisasi, memperdalam pengetahuan dan dapat menjual produk yang baik, 12) mengelola keuangan agar dapat melakukan perhitungan dalam berwirausaha, 13) kreatif agar siap bersaing dalam berkarya, 14) berkomunikasi agar dapat mengembangkan diri, serta 15) kolaborasi untuk kehidupan sehari-hari dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Salah satu daya yang dapat mendorong adanya pembelajaran VF adalah ‘kekayaan’ yang dimiliki oleh wilayah tempat PKBM berada. Kekayaan dimaksud bisa berupa kultur/budaya, dan adat istiadat serta potensi wilayah. Pada verifikasi dengan salah satu unsur pimpinan dinas pendidikan kota Jayapura diperoleh informasi bahwa kultur dan adat istiadat masyarakat Papua seperti kekayaan bahasa daerah yang begitu banyak, keragaman kesenian tradisional yang dipengaruhi oleh lingkungan alam dan zona ekologis, adanya perbedaan karakter budaya masyarakat pesisir dan pedalaman, adanya budaya lokal yang sangat tinggi seperti suku ‘Asmat’, serta adanya peran kepala suku. Selain itu informan yang sama juga menjelaskan tentang kekayaan di wilayah Papua yang berpotensi bagi penyelenggaraan pembelajaran VF yang mencakup: melimpahnya sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, pertambangan, keragaman hasil hutan, pertanian, serta perikanan. Keberadaan kawasan pariwisata dan kawasan industri serta perdagangan juga merupakan modal yang dapat dimanfaatkan bagi pembelajaran VF.

Dalam hal jenis pembelajaran VF, unsur pimpinan dinas pendidikan kota Jayapura memberikan pernyataan bahwa banyak sekali keterampilan yang dapat diberikan di PKBM, diantaranya: otomotif, kuliner, budi daya ikan air tawar, pengolahan sampah, pengrajin sandal rumahan memanfaatkan kulit kayu, IT, dan cinderamata. Nara sumber dari Jayapura ini menyampaikan bahwa jenis keterampilan tersebut sudah berdasarkan analisis potensi kota Jayapura yakni: sebagai kota transit, memiliki pantai,

pertanian, sumber pangan, perkebunan dan budaya lokal. Berkenaan dengan keragaman pembelajaran VF di PKBM, ternyata di tiga PKBM memberikan pembelajaran VF yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembelajaran VF TIK ini diharapkan dapat mendukung kesiapan WB menghadapi kehidupan Abad-21. Selain itu, ada juga PKBM yang memberikan pembelajaran VF pariwisata berupa tata boga, kecantikan dan tata busana, serta ada juga PKBM yang memberikan agrobisnis tentang cara bercocok tanam atau bertani. Seluruh pembelajaran VF ini diatur sebagai mata pelajaran tersendiri, terpadu atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Pembelajaran VF di tiga PKBM ini diberikan secara tatap muka, tutorial dan mandiri karena menyesuaikan dengan ketersediaan waktu WB.

Pembelajaran VF membutuhkan kesiapan PKBM agar dapat terlaksana sesuai harapan. Pengelola tiga PKBM yang mengikuti FGD menyatakan tentang kesiapan PKBM melaksanakan pembelajaran VF dalam tiga aspek, yaitu instruktur, sarana dan prasarana serta perangkat IT. Dalam hal instruktur, tiga PKBM tersedia dengan jumlah dan keahlian yang memadai. Salah satu PKBM menyatakan bahwa PKBM nya pernah mengundang warga setempat sebagai instruktur pada pembelajaran VF. Sementara itu dalam hal sarana dan prasarana, ternyata masih ada disatu PKBM yang tidak tersedia secara lengkap. Namun pengelola PKBM menyatakan tidak terlalu bermasalah dengan minimnya sarana dan prasarana tersebut karena PKBM masih bisa mengoptimalkan yang tersedia. Sama halnya dengan sarana dan prasarana, berkenaan dengan perangkat IT yang tersedia secara lengkap di dua PKBM saja. Keterbatasan ketersediaan perangkat IT ini menurut Pengelola tidak menghalangi keterlaksanaan pembelajaran VF.

Perencanaan pembelajaran VF sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan pembelajaran, telah disiapkan oleh tiga PKBM dalam bentuk silabus dan RPP. Ketiga PKBM tersebut ingin menyusun silabus dan RPP yang memperhatikan kondisi dan lingkungan WB agar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat kepada WB. Namun pada FGD, tiga pengelola PKBM mengakui bahwa instruktur atau tutor VF masih kurang mampu menyusun silabus dan RPP. Untuk mengatasi keterbatasannya, ada instruktur yang mencari informasi dari guru SMK. Jawaban pengelola PKBM ini mengindikasikan bahwa PKBM berkeinginan menyiapkan pembelajaran VF namun terkendala oleh penguasaan penyusunan silabus dan RPP khusus untuk pembelajar VF. Pengelola yang mencari informasi kepada guru SMK merupakan pertanda bahwa pengelola PKBM mau melakukan berbagai upaya agar pembelajaran VF direncanakan dengan baik agar dapat terlaksana dengan baik pula.

Pelaksanaan pembelajaran VF, menurut pengelola PKBM berlangsung menggunakan Lembar Tugas atau Modul. Kegiatan tatap muka jarang dilakukan karena WB banyak memiliki kesibukan. Keadaan ini menjadi kendala bagi instruktur saat WB harus tatap muka bersama-sama. Pembelajaran VF ini juga melibatkan WB untuk melakukan praktik langsung, dengan bahan yang disediakan oleh WB maupun pihak PKBM. Pembelajaran secara daring, jarang dilakukan mengingat banyak WB yang tidak memiliki gadget dan biaya pulsa. Hasil belajar VF ini ada yang dimanfaatkan langsung oleh DUDI seperti VF tentang TIK atau oleh masyarakat yang membeli hasil karya WB PKBM. Karena WB umumnya adalah pembelajar dewasa sehingga umumnya mereka bersemangat mengikuti aktivitas praktik secara tatap muka. Menurut pengelola PKBM, WB dewasa kadangkala tidak dapat mengikuti pelajaran VF terutama kalau berkaitan dengan teori.

IV. Pemberian sertifikat kelulusan VF kepada warga belajar

Sertifikat adalah tanda kelulusan yang bisa 'menaikan penghasilan' saat lulusan bekerja di DUDI yang sesuai dengan VF yang didapatkan WB di PKBM. Namun sesuai dengan ketentuannya, PKBM tidak diijinkan untuk menerbitkan sertifikat kelulusan VF (kemendikbud, 2017b). Pada FGD dengan pengelola PKBM dan unsur dinas pendidikan, WB yang sudah menyelesaikan tugas Pembelajaran VF

di PKBM sampai saat ini belum mendapatkan sertifikatnya. Hal tersebut mengingat sertifikat hanya diberikan kepada WB yang mengikuti kegiatan keterampilan pilihan yang merupakan titipan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Dalam hal ini, PKBM yang menyelenggarakan pembelajaran VF tidak dapat menerbitkan sertifikat yang sebetulnya dapat dimanfaatkan oleh lulusan PKBM untuk mencari pekerjaan atau mendapatkan kemudahan mengurus pengadministrasian apabila WB akan melakukan wirausaha. PKBM yang menyelenggarakan pembelajaran VF dengan kompetensi yang sama dengan kompetensi pada LKP, tidak mendapatkan kewenangan menerbitkan sertifikat. Permasalahan yang muncul adalah, sertifikat yang diterbitkan oleh LKP harus dibayar oleh WB yang tentunya memberatkan WB. Selain itu, tempat uji kompetensi (TUK) jumlahnya terbatas dan lokasinya ada yang sulit dijangkau oleh WB yang ingin mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat. Di sisi lain, menurut pengelola PKBM beberapa DUDI tidak mensyaratkan sertifikat keterampilan ketika mencari tenaga kerja. Dengan kondisi yang demikian, upaya meningkatkan kemandirian WB melalui pembelajaran VF seharusnya dapat memberdayakan PKBM dalam hal penerbitan sertifikat yang dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pula, sebaiknya PKBM mendapatkan pembinaan untuk dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi VF sesuai dengan karakteristik PKBM dan WB dengan mengikuti aturan atau ketetapan pemerintah.

V. Peran pemangku kepentingan pada pelaksanaan pembelajaran vf di PB dan P

Pemangku kepentingan dalam pembelajaran VF di PKBM terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta. Masing-masing pemangku kepentingan ini memiliki peran pada keterlaksanaan pembelajaran VF di PKBM di PB dan P baik dirumuskan dalam peraturan dan perundangan maupun pada langkah aksinya. Pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Dit PMPK) Kemendikbud, sebagaimana disampaikan oleh nara sumber dari Dit PMPK, telah berupaya menjalankan perannya sesuai yang tertuang dalam Pasal 109 Permendikbud nomor 9 tahun 2020 (Kemendikbud, 2020a). Dit PMPK juga berperan dalam menyiapkan petunjuk teknis yang merupakan bagian dari pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Namun karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh dinas pendidikan kota Jayapura maupun pengelola PKBM. Sementara itu peran pemerintah daerah sebagaimana disampaikan oleh tiga pengelola PKBM dan pimpinan dinas pendidikan Kota Jayapura pada FGD adalah: 1) pendataan dan rekrutmen, 2) penyiapan sumber daya berupa dana, pendidik dan sarana prasarana, 3) koordinasi dan pembinaan pembelajaran, 4) memfasilitasi kemitraan PKBM dengan pihak swasta, 5) evaluasi, 6) memberikan penghargaan, 7) membantu pemasaran hasil kerja WB, dan 8) sosialisasi. Pendataan PKBM dan WB secara akurat adalah peran yang sangat diharapkan dapat dijalankan oleh pemda karena dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan. Peran yang dijalankan oleh pemda ini, ada yang sudah dan ada yang belum dirasakan oleh PKBM misalnya pemasaran hasil WB yang hanya terjadi di PKBM tertentu saja. Peran yang diemban masyarakat yang utama adalah menyelenggarakan PKBM karena sangat sedikitnya PKBM yang didirikan oleh pemerintah. Peran masyarakat lainnya yakni sebagai tutor, instruktur, tenaga ahli, motivator, dan donatur. Masyarakat diantaranya: kepala suku, tokoh masyarakat, alumni dan pihak yang berpengaruh di lingkungan adalah yang berperan pada pembelajaran VF. Dalam hal ini pengelola PKBM harus jeli untuk melakukan pendekatan. Pihak swasta atau DUDI juga berperan pada keterlaksanaan pembelajaran VF, diantaranya: 1) menyediakan tutor saat WB melakukan praktek kerja, 2) berupa CSR memberikan sarana prasarana yang diperlukan PKBM, 3) menjadi mitra praktek kerja, 4) menjadi tempat bekerja lulusan PKBM.

VI. Faktor pendukung dan kendala keterlaksanaan pembelajaran VF

Pembelajaran VF di PKBM memerlukan faktor pendukung agar dapat terlaksana secara baik, salah satunya adalah keragaman VF. Hal tersebut mengingat banyaknya jenis VF membuat WB memiliki

banyak pilihan yang sesuai dengan kebutuhan masa depannya. Selain itu, kesiapan PKBM dalam hal sarana dan prasarana serta instruktur yang tepat juga merupakan faktor pendukung keterlaksanaan pembelajaran VF. Pada FGD dengan pengelola PKBM, ditemukan bahwa kondisi WB dapat menjadi faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran VF. Kondisi WB dimaksud yakni: 1) WB yang umumnya berusia dewasa lebih mudah mempelajari VF, 2) adanya kesenangan WB untuk mempelajari keterampilan yang diberikan PKBM, dan 3) WB merasakan bahwa pada keterampilan membuat mereka dapat memperbaiki pekerjaan yang selama ini dilakukannya sehari-hari misalnya cara menanam yang baik. Salah seorang pengelola PKBM menyatakan bahwa PKBM yang dipimpinnya sangat memerlukan dukungan pemerintah agar pembelajaran VF dapat berjalan dengan baik. Ketiga pengelola PKBM menyatakan sangat memerlukan dukungan dana yang dapat digunakan untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta kegiatan praktek pada pembelajaran VF.

Pembelajaran VF di PKBM menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaannya. Unsur pimpinan dinas pendidikan menyatakan bahwa sampai saat ini belum dapat melaksanakan pembelajaran VF bagi WB PKBM di wilayahnya karena tidak tersedianya dana yang mencukupi. Kendala tentang dana ini juga disampaikan oleh pengelola PKBM sehingga tidak dapat melaksanakan pembelajaran VF secara maksimal. Selain itu, ada PKBM yang menyatakan bahwa peralatan yang tua dan ketersediaannya dalam jumlah yang minim, merupakan kendala yang dihadapi oleh PKBM. Kurang tersedianya informasi secara memadai menyebabkan PKBM tidak mengetahui adanya peran pemerintah terhadap pembinaan PKBM. Kendala yang dihadapi berkenaan dengan instruktur yakni: 1) kurangnya kompetensi IT instruktur, dan 2) belum baiknya penghargaan yang belum baik. Dari aspek WB, kendala yang dihadapi yakni: 1) kehadiran WB dewasa yang rendah pada pertemuan tatap muka, 2) tidak seluruh WB memiliki komputer, 3) rendahnya motivasi WB, 4) daya tangkap WB yang umumnya rendah, dan 5) WB yang harus bekerja. Sementara itu, kendala yang berhubungan dengan sertivikat VF yakni: 1) banyak WB yang enggan mengikuti uji kompetensi karena berbiaya, 2) DUDI ada yang tidak mensyaratkan sertifikat VF kepada calon tenaga kerjanya, 3) PKBM tidak dapat memberikan sertifikat atas VF yang dilaksanakannya, dan 4) tempat uji kompetensi tidak tersedia di semua daerah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian terdahulu, ternyata masih sedikit PKBM di PB dan P yang melaksanakan pembelajaran VF. Alasan belum dilaksanakannya VF adalah tidak tersedianya dana untuk itu. Pembelajaran VF diperlukan oleh WB PKBM karena hasilnya dapat dimanfaatkan lulusan untuk berwirausaha. Instruktur untuk pembelajaran VF tersedia di PKBM secara memadai, namun kurang untuk sarana prasarana. WB di PKBM umumnya berusia dewasa dengan kondisi ekonomi yang kurang namun umumnya memiliki kompetensi secara umum dengan baik, namun masih sebagian WB saja yang memiliki capaian Keterampilan abad 21. Yang masih memerlukan perhatian adalah masih banyak WB yang tidak memiliki daya juang.

Pembelajaran VF banyak yang berhubungan dengan TIK karena adanya anggapan bahwa yang diperlukan WB saat ini adalah kemampuan IT. Pembelajaran VF lainnya berhubungan dengan pekerjaan WB sehari-hari seperti bertani, atau sebagai bekal untuk mandiri seperti kerajinan noken. PB dan P memiliki potensi budaya dan kekayaan alam serta potensi lainnya yang belum dimanfaatkan oleh pemda mendukung pelaksanaan pembelajaran VF. Pembelajaran VF secara daring belum maksimal dilaksanakan mengingat tidak semua WB memiliki gadget.

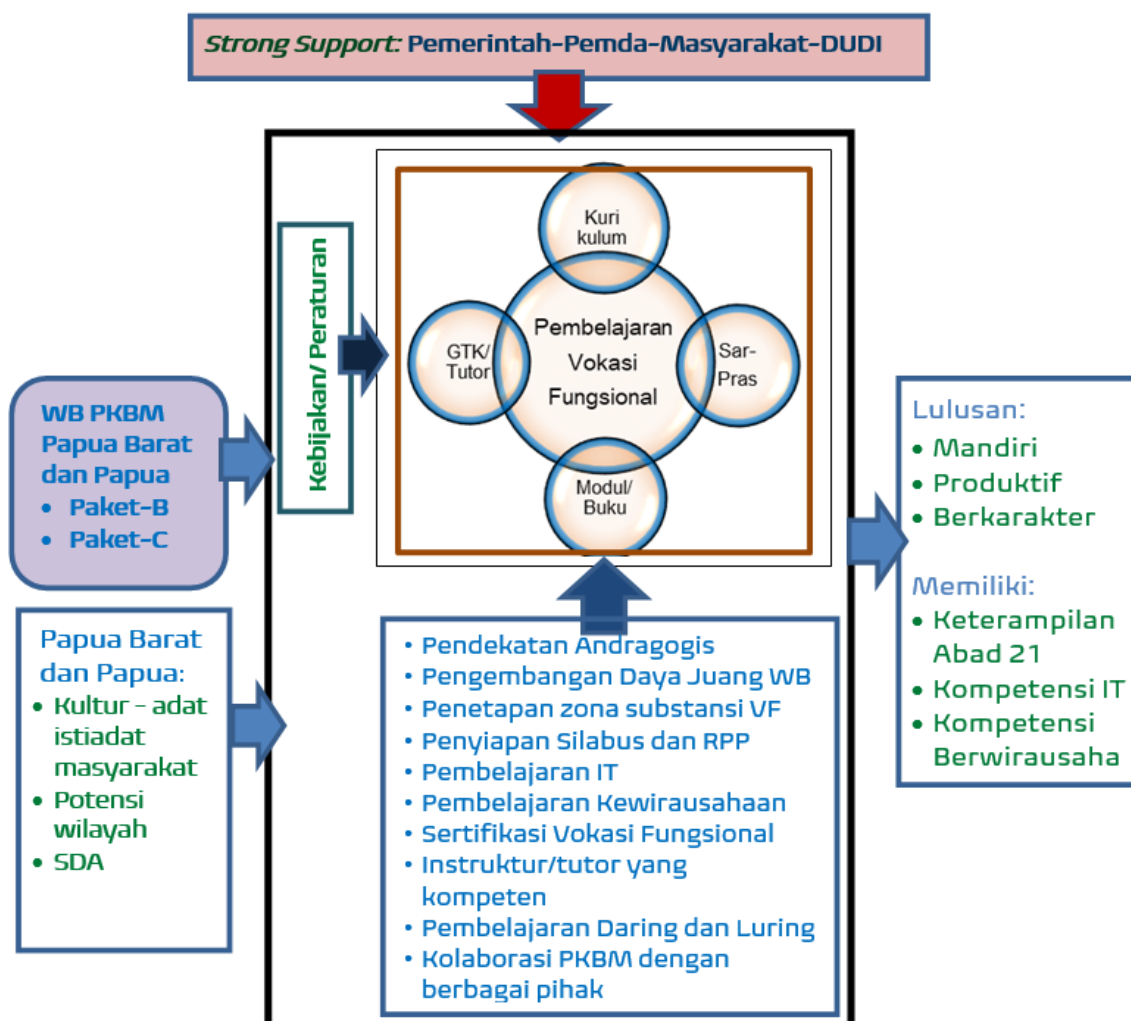
Pemangku kepentingan pada pembelajaran VF yang sudah menunjukkan perannya adalah pemerintah, Masyarakat dan DUDI. Pemda masih belum maksimal berperan. Namun demikian, pembelajaran VF di PKBM PB dan P ini sangat memerlukan peran ketiga pemangku kepentingan agar PKBM dapat lebih berdaya dalam melaksanakan pembelajaran VF.

Berkenaan dengan sertifikat bagi WB yang telah mengikuti pembelajaran VF, sampai saat ini masih menjadi kendala mengingat hanya bisa diterbitkan oleh LKP dan tempat uji kompetensi bagi WB berjauhan dengan lokasi PKBM. Sertifikat yang harus dibayar oleh WB juga merupakan kendala, sedangkan belum semua DUDI mensyaratkan sertifikat saat penerimaan pegawai baru.

Berbagai faktor pendukung dan kendala pada pelaksanaan pembelajaran VF, dapat dijadikan sebagai komponen bagi pengembangan model pembelajaran VF di PKBM PB dan P. Faktor pendukung dapat menjadi penguat sedangkan kendala yang dijumpai perlu dicari solusi agar pembelajaran VF dapat terlaksana dan bermanfaat secara finansial kepada WB.

E. SARAN

Pembelajaran VF di PKBM di PB dan P tidak dapat hanya diatasi secara parsial pada bagian-bagian atau komponen tertentu saja. Upaya agar pembelajaran VF dapat bermanfaat bagi lulusan PKBM di PB dan P utamanya untuk meningkatkan keberdayaan mereka secara ekonomi, diperlukan upaya secara makro sebagai sebuah sistem melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan dengan memberikan langkah-langkah aksi agar dapat diterapkan dan berhasil guna. Oleh sebab itu, saran utama pada pembelajaran VF adalah model pembelajaran VF bagi WB PKBM PB dan P yang dituangkan dalam bentuk diagram model berikut.



Gambar 1. Model Pembelajaran Vokasi Fungsional bagi WB PKBM di PB dan P

Model Pembelajaran VF seperti dimuat dalam Diagram 1 sepenuhnya sudah mensinergikan berbagai potensi PB dan P, diantaranya: 1) kultur adat istiadat masyarakat setempat, 3) potensi wilayah seperti gunung, pantai, hutan, kota besar, kota kecil, desa, dan 3) sumber daya alam. Namun VF ini memerlukan pemenuhan aspek-aspek pendukung mencakup: 1) pendekatan andragogi karena WB umumnya berusia dewasa yang memiliki keterbatasan, 2) daya juang bagi WB, 3) penetapan zona substansi VF sesuai dengan tingkat 'maju-tertinggal' dan zona ekologis alam wilayah, 4) penyiapan silabus dan RPP, 5) pemberian pembelajaran kewirausahaan sebagai bekal 'pendamping' pembelajaran VF, 6) sertifikasi VF, 7) pembelajaran daring dan luring sesuai kemajuan jaman dan sesuai dengan kesiapan WB, dan 8) keberdayaan pengelola PKBM untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Model pembelajaran VF ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan DUDI. Pemerintah dalam hal ini sebaiknya dapat mengkaji kembali berbagai kebijakan tentang PKBM dan struktur kurikulumnya untuk memastikan pembelajaran VF bermanfaat bagi WB PKBM di PB dan P. Selain itu, sebaiknya pemerintah dapat menterjemahkan pemenuhan 8 aspek pembelajaran VF dalam bentuk pembinaan teknis, petunjuk teknis, pedoman, panduan dan sebagainya. Berbagai kebijakan yang berhubungan dengan aspek pelaksanaan pembelajaran VF juga sebaiknya dapat dilakukan oleh pemerintah. Komponen pembelajaran VF terdiri atas: kurikulum, sarana prasarana, instruktur, dan modul ajar atau buku. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah dapat membantu PKBM dalam bentuk: sarana prasarana, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran VF, penyediaan tutor/instruktur yang kompeten, dan penyediaan modul atau bahan ajarnya. Sedangkan pemda sebaiknya: 1) melakukan kajian tentang potensi wilayah yang dapat dijadikan modal pembelajaran VF, 2) mendata PKBM secara lengkap termasuk WB, 3) mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mandiri secara mandiri yang dapat ditempuh melalui pembelajaran VF di PKBM, 4) dapat menjadi sumber informasi dari pemerintah terkait dengan pembelajaran VF, 5) mendorong munculnya mata anggaran pembelajaran VF pada rencana daerah, dan 6) mendorong PKBM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran VF. Agar pembelajaran VF dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka pengelola PKBM sebaiknya: 1) melakukan berbagai upaya pendekatan ke warga agar mau mengikuti aktivitas pembelajaran VF di PKBM, 2) mencari berbagai informasi praktik baik pembelajaran VF yang dapat diadopsi atau diadaptasi, 3) membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, dan 4) berkoordinasi dengan pemda. Sementara itu DUDI sangat dibutuhkan dukungannya dalam hal: menerima WB untuk kerja praktik, memberi lulusan PKBM terutama yang memiliki sertifikat hasil pembelajaran VF, melatih instruktur PKBM tentang substansi VF.

Lebih lanjut, model ini masih berupa konsep yang sebaiknya dapat ditindak lanjuti dalam bentuk aksi oleh direktorat terkait dan kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi tentang keterlaksanaannya termasuk hasil belajar VF.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019 Biro Pusat Statistik No. 56/07/Th.XXII 15 Juli 2019.
- Kemdikbud (tanpa tahun). Konsep Dasar Pendidikan Non-Formal (PKBM dan LKP), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Diunduh dari [https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/08.%20Konsep%20Dasar%20PNF%20\(PKBM%20dan%20LKP\)_1557310762.pdf](https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/08.%20Konsep%20Dasar%20PNF%20(PKBM%20dan%20LKP)_1557310762.pdf)
- Kemendikbud (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Kemendikbud (2016a). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta, 2016.

Kemendikbud (2016b). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta, 2016.

Kemendikbud (2016c). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta, 2016.

Kemendikbud (2017a). Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan Paket B. Direktorat Pembinaan Pendidika Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2017.

Kemendikbud (2017b). Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan Paket C. Direktorat Pembinaan Pendidika Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2015 – 2019.

Kemendikbud (2020a). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PENDIDIKAN VOKASI: MENJAGA RELEVANSI SMK DI ABAD 21

Agus Amin Sulistiono, Sudiyono, Widodo, Khairur Raziqin, Sri Merajiwaty Doenggio
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAKAntisipasi menjaga relevansi SMK di abad 21 penting dilakukan untuk menghadapi transformasi Revolusi Industri 1.0 masa kini ke Revolusi Industri 4.0 abad 21. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kondisi SMK pada saat ini; kekuatan revolusi industri 4.0; dan analisis relevansi SMK di abad 21. Data diperoleh melalui data sekunder dari perguruan tinggi, lembaga/kementerian, sekolah, dan lembaga tenaga kerja. Pengolahan dan analisis data dengan teknik deskriptif statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang peningkatan jumlah SMK mengakibatkan kenaikan pesat pertumbuhan sekolah, terutama swasta namun tidak diiringi dengan peningkatan rasio jumlah siswa per sekolah, kondisi ini berbeda dengan sekolah negeri. Dilihat dari mutu, kualitas input maupun output masih lebih rendah dari siswa SMA. SMK juga masih kekurangan perpustakaan dan laboratorium. Guru umum lebih banyak dibandingkan dengan guru kejuruan, skor UKG juga lebih rendah dibandingkan SMA. Saat ini lulusan SMK menganggur sebanyak 10,42% dari angkatan kerja, sedangkan lulusan 1 tahun terakhir sebanyak 44,50%. Revolusi Industri 4.0 abad 21 memiliki tiga ciri pokok yaitu: inovasi, otomatisasi, dan transfer informasi. Secara garis besar mencakup: *critical thinking*, *creativity*, *communication*, dan *collaboration* (4Cs). Agar lulusan SMK bermutu dan relevan perlu perubahan tata kelola dan perubahan kurikulum berorientasi STEAM, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, serta *link and match*.

Kata kunci: Relevansi, SMK, Abad 21, Tata-kelola, kurikulum

A. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia sesuai RPJMN tahun 2020-2024 bertujuan menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan manusia Indonesia didasarkan pada tiga pilar yaitu: (i) layanan dasar dan perlindungan sosial, (ii) produktivitas dan (iii) pembangunan karakter. Salah satu bidang pembangunan dalam pilar produktivitas yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi. Bentuk pendidikan dan pelatihan vokasi dalam prioritas pembangunan secara spesifik dinyatakan berupa pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia industri. Pengembangan SMK pada masa mendatang dalam arahan Presiden dalam percepatan pembangunan SDM unggul 2020-2024 disebutkan bahwa pendidikan kejuruan, SMK di daerah-daerah dihubungkan dengan industri-industri agar lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dan siap terhadap hal-hal baru terutama pada era Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 merupakan tahapan perubahan fundamental di bidang industri. Revolusi Industri generasi keempat ini ditandai dengan munculnya supercomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, *editing genetic* dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia dapat memaksimalkan fungsi otak. Era RI-4.0 memiliki tiga ciri pokok jika dibandingkan dengan era sebelumnya yaitu: inovasi, otomatisasi, dan transfer informasi. Pada ciri pertama, semua bidang kehidupan berlomba menghasilkan berbagai inovasi yang memudahkan kehidupan. Eksistensi negara, lembaga, perusahaan sangat ditentukan seberapa intensifnya menghasilkan inovasi. Karakteristik

kedua, otomatisasi terlihat masifnya perusahaan atau industry mengurangi tenaga kerja manusia dan menggantinya dengan tenaga mesin. Transformasi ini berakibat pada perubahan pada sistem produksi, manajemen, dan tata kelola lembaga. Ciri ketiga dari era RI-4.0 yaitu transfer informasi yang berlangsung secara cepat. Kecepatan transfer informasi karenan didukung oleh teknologi internet. Banyak jenis pekerjaan yang dilakukan dengan memanfaatkan internet.

Dalam era RI-4.0, jenis lapangan pekerjaan yang tumbuh mengalami pergeseran. Jenis lapangan pekerjaan yang berkembang pada era RI-4.0 dalam laporan *World Economic Forum* (2018) di antaranya: pengembang dan analis *software* dan aplikasi, analis data dan ilmuwan, spesialis sumberdaya manusia (*human resources*), dan spesialis *robotics* dan insinyur (*engineers*). Sedangkan jika dilihat dari bidang lapangan pekerjaan, jenis lapangan pekerjaan yang relevan di era RI-4.0 yaitu industry 4.0, teknologi informasi, kesehatan, profesional, seni kreatif, instruktur, konstruksi, manajer, perikanan, pertanian-kehutanan, pariwisata, dan logistik. Menurut McKinsey¹, pada tahun 2030 diprediksi terjadi otomatisasi dan akan tercipta jenis pekerjaan baru. Walaupun terjadi otomatisasi permintaan pekerjaan dan tenaga kerja akan mengalami peningkatan. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang sebagian didorong oleh pertumbuhan produktivitas dan kemajuan teknologi. Proses otomatisasi sejalan dengan tingkat kemajuan sebuah negara. Semakin maju sebuah negara maka otomatisasi akan semakin besar. Di Indonesia diperkirakan akan terjadi otomatisasi pekerjaan sekitar 12 persen.

Dalam upaya mendongkakan mutu lulusan SMK, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program. Salah satu kebijakan yang dinilai strategis adalah revitalisasi SMK yang dituangkan dalam Inpres Nomor 9 tahun 2016. Dalam Inpres tersebut ada enam point penting yang perlu dilakukan dalam merevitalisasi SMK. Keenam point penting itu yakni: 1) membuat peta jalan pengembangan SMK, 2) pengembangan dan penyelarasan kurikulum, 3) inovasi pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, 4) Kerjasama sekolah dengan dunia usaha, industri, serta perguruan tinggi, 5) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, dan 6) membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.

Salah satu strategi yang sedang dilakukan untuk merevitalisasi SMK yaitu dengan mengembangkan sarana dan prasarana serta *teaching factory*. Untuk mengembangkan sarana dan prasarana SMK, pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud No. 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, serta Permendikbud No. 8 tahun 2018 tentang DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK. Kedua peraturan tersebut menjadi standar terutama bagi pengelola bengkel dan laboratorium SMK. *Teaching factory* dikembangkan sebagai perpaduan dari konsep pembelajaran *Competency-based Training* (CBT) dan *Production-based Education and Training* (PBET) yang mempelajari kompetensi dasar dan mengaplikasikan kompetensi. Dalam *teaching factory*, skill/keterampilan didesain dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang otentik untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pada saat ini jumlah sekolah, siswa dan rasio siswa per sekolah telah mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun yang lalu, seperti pada table berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Sekolah, Siswa SMK, dan Rasio Siswa/Sekolah

Status	SEKOLAH		SISWA		RASIO SISWA/KELAS	
	2008/2009	2019/2020	2008/2009	2019/2020	2008/2009	2019/2020
Negeri	2,003	3,622	1,040,833	2,300,629	520	635
Swasta	5,583	10,679	2,050,871	2,948,520	367	276

Sumber: Pusdatin Kemendikbud (2020), diolah

Tabel 2. Jumlah Siswa SMK Menurut Bidang Keahlian

Bidang Keahlian	SMK Negeri	SMK Swasta	Total
Teknologi dan Rekayasa	757.076	910.833	1.667.909
Bisnis dan Manajemen	447.900	777.661	1.225.561
Teknologi Informasi dan Komunikasi	452.116	716.835	1.168.951
Pariwisata	250.458	166.924	417.382
Agribisnis dan Agroteknologi	174.292	44086	218.378
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	29.409	179.113	208.522
Kemaritiman	66.303	23.899	90.202
Seni dan Industri Kreatif	55.01	12.92	67.93
Energi dan Pertambangan	9.721	4.83	14.551
Total	2.242.285	2.837.101	5.079.386

Sumber: Dapodikdasmen, 2019

Teknologi dan rekayasa, bisnis dan manajemen, serta teknologi informasi dan komunikasi merupakan tiga bidang keahlian dengan jumlah siswa terbanyak. Keadaan guru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Komposisi Guru Umum dan Guru Kejuruan SMK

Status	Guru Umum	%	Guru Kejuruan	%	Total	%
Negeri	71.414	53,4	62.332	46,6	133.746	100
Swasta	76.439	57,8	55.907	42,2	132.346	100
Total	147.853	55,6	118.239	44,4	266.092	100

Sumber: Ditjen GTK (2019), diolah

Berdasarkan mata pelajaran yang diajarkan, proporsi guru mata pelajaran non-kejuruan lebih besar dibandingkan guru kejuruan atau guru produktif. Kesenjangan lebih tinggi terutama terjadi di SMK swasta.

Kondisi tenaga kerja yang berasal dari lulusan SMK berdasarkan data Sakernas BPS Agustus 2019 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. Kondisi Tenaga Kerja Total dan SMK tahun 2019

Pendidikan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
	Bekerja	Pengangguran	Sub Jumlah		
SMK	14,840,920	1,727,164	16,568,084	4,621,677	21,189,761
Total	126,515,119	7,044,680	133,559,799	64,344,071	197,903,870

Sumber: Sakernas BPS (2019), diolah

Pengangguran lulusan SMK sebanyak 10,42%

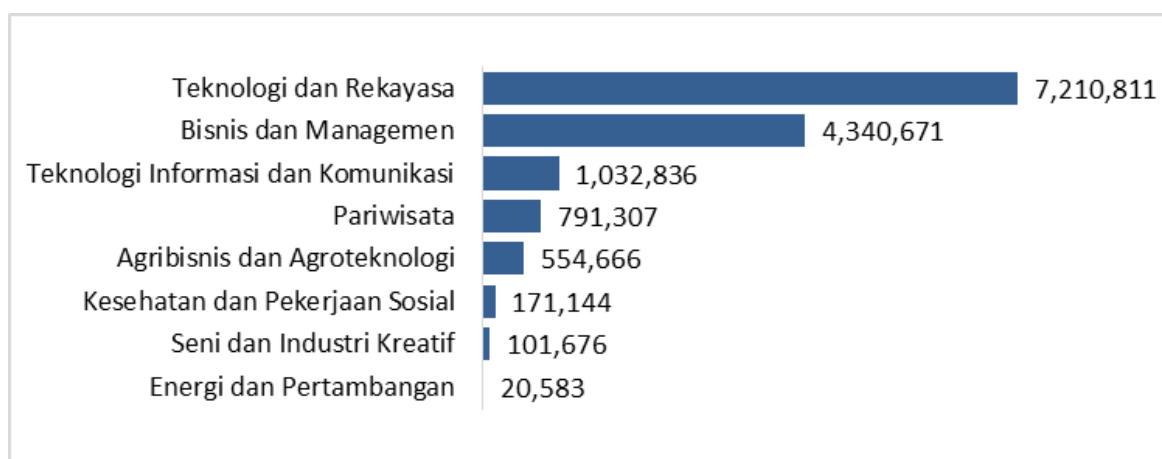
Tabel 5. Kondisi Tenaga Kerja Total dan SMK Lulusan 1 Tahun Terakhir

Pendidikan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
	Bekerja	Pengangguran	Sub Jumlah		
SMK	570,396	457,405	1,027,801	370,675	1,398,476
Total	2,115,586	1,098,545	3,214,131	3,239,280	6,453,411

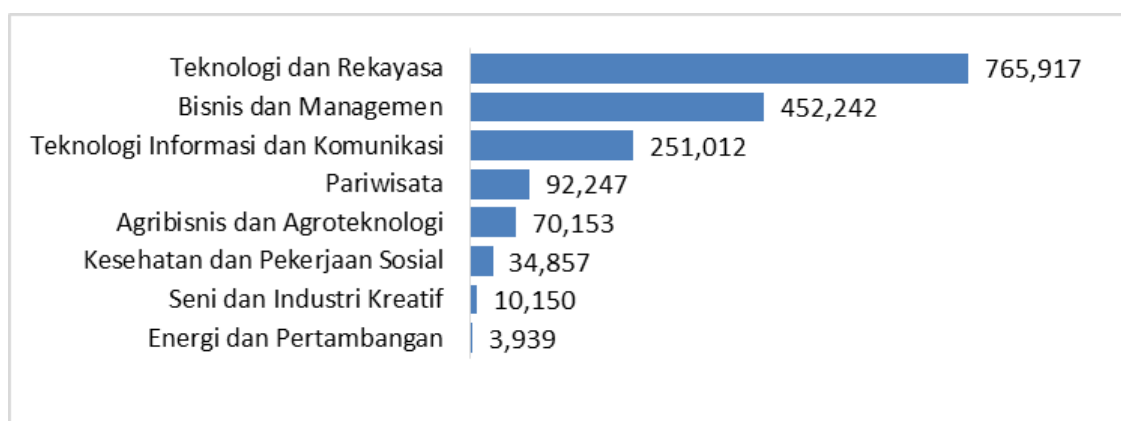
Sumber: Sakernas BPS (2019), diolah

Pengangguran sebanyak 44,5%

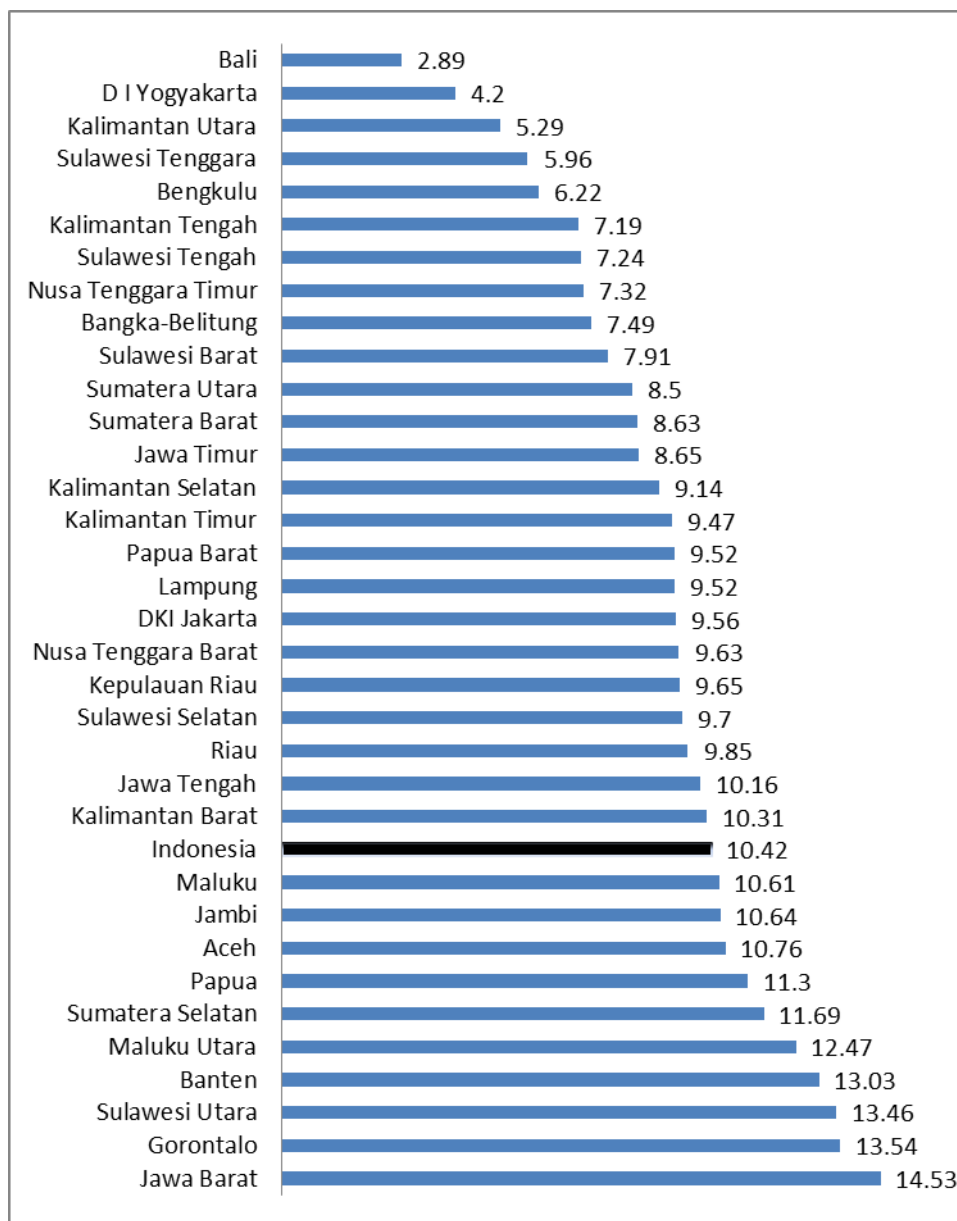
Grafik 1. Penduduk Bekerja menurut Bidang Keahlian - SMK



Grafik 2. Jumlah Pengangguran SMK menurut Bidang Keahlian



Grafik 3. TPT SMK per Provinsi 2019



Melihat hal tersebut diatas pada saat ini masih 10,42% lulusan SMK sesuai angkatan kerja yang masih menganggur.

Dalam konteks ini, hasil analisa Suryadi (2010) menunjukkan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan (SMK) di Indonesia, diindikasikan masih terdapat gejala yang konsisten bahwa program pendidikan di SMK terisolasi dengan kebutuhan riil DU/DI. Program pendidikan bersifat “*supply driven*” karena jenis program studi, materi pendidikan, cara mengajar, media belajar, evaluasi dan sertifikasi lebih ditentukan oleh *provider* utama, yaitu Pemerintah. Program pendidikan kejuruan di sekolah kaku dan tidak lentur terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja. Program pendidikan belum berorientasi terhadap kebutuhan pasar kerja yang berubah, sehingga terjebak ke dalam pemoe “*membidik sasaran yang bergerak*” (*aimed at the moving target*). Jumlah rumpun dan program studi

juga “relatif tetap” tidak selaras dengan kebutuhan lapangan kerja yang berubah-ubah. Ditambah dengan kekuatan revolusi industri 4.0 maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi SMK pada saat ini; mengetahui kekuatan revolusi industri 4.0; dan analisis relevansi SMK di abad 21.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif diperkuat dengan data kualitatif. Data kuantitatif berupa data skunder, yang diperoleh melalui studi dokumen dari berbagai sumber yang terkait dengan pendidikan SMK. Sedangkan data primer diperoleh melalui *focus group discussion* (FGD) berupa data kualitatif. Dengan demikian, sifat dari kajian ini adalah kajian deskriptif kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif.

Variabel penelitian Pertumbuhan Jumlah SMK, Kebekerjaan Lulusan SMK, Profil Sosio-Ekonomi Siswa dan Lulusan SMK, Kualitas Input Siswa SMK Negeri, Performa Siswa SMK, Capaian Akademik Siswa SMK, Dominasi SMK Swasta Kecil, Dampak SMK Kecil pada Sistem, Meningkatnya Kebutuhan Dunia Kerja terhadap, Keterampilan Aras Tinggi (*High-Order Skills*), Revolusi Industri 4.0 dan Disrupsi Pekerjaan, Jenis Pekerjaan dan Keterampilan Masa Depan, Keterampilan Abad 21 sebagai Kunci,

Teknik pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan cara mengoleksi data skunder yang berbentuk dokumen yang berasal dari berbagai instansi/lembaga, antara lain: 1) Pusdatin; 2) Puspendik; 3) Ditjen GTK; 4) Dapodik; 5) *World Economic Forum*, tahun 2015, 2016 dan 2018; 6) McKinsey, 2018; 7) *OECD* 2019; 8) Sakernas 2017, 2018, dan 2019; 9) Susenas 2019.

Pengolahan dan analisis data kuantitatif dilakukan dengan teknik deskriptif, yaitu berupa angka rerata dari setiap permasalahan/tema. Sedangkan pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan dengan pembuatan kode (*Coding*), klasifikasi, reduksi, triangulasi, dan pembuatan kesimpulan pada setiap tema.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Hasil

Kondisi SMK pada saat ini dibandingkan dengan kondisi 10 tahun yang lalu menunjukkan ada perubahan. **Dilihat dari sekolah/lembaga SMK**, terjadi yaitu kenaikan jumlah sekolah sebesar 80,8% pada SMK Negeri dan 91,4% pada SMK Swasta. Proporsi jumlah sekolah adalah pada tahun 2008/2009 SMK Negeri sebanyak 26,4% dan 73,6% SMK Swasta, sedangkan pada tahun 2019/2020 proporsinya adalah 33,7% SMK Negeri dan 66,3% SMK Swasta. Kenaikan jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan sekolah negeri, secara proporsional jumlah sekolah swasta juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan negeri. **Dilihat dari siswa SMK**, terjadi kenaikan jumlah siswa sebanyak 121,0% pada SMK Negeri dan 43,8% pada SMK Swasta. Proporsi jumlah siswa adalah pada tahun 2008/2009 adalah siswa SMK Negeri sebanyak 33,7% dan 66,3% siswa SMK Swasta, sedangkan pada tahun 2019/2020 proporsinya adalah 43,8% siswa SMK Negeri dan 56,2% siswa SMK Swasta. Kenaikan jumlah siswa SMK negeri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan swasta, walaupun secara proporsional masih lebih tinggi siswa SMK swasta dibandingkan negeri. **Dilihat dari Rasio siswa/sekolah**, terjadi kenaikan sebesar 22,1% pada SMK Negeri sedangkan SMK Swasta sebaliknya terjadi penurunan sebanyak 24,8%. Hal ini berarti SMK Swasta mendominasi sistem dan jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 10 tahun lalu. Namun, peningkatan jumlah SMK swasta ini tidak diiringi oleh peningkatan rasio jumlah siswa per sekolah. Hal ini berbeda dengan sekolah negeri.

Dilihat dari proporsional guru umum dan kejuruan, menunjukkan guru umum lebih banyak

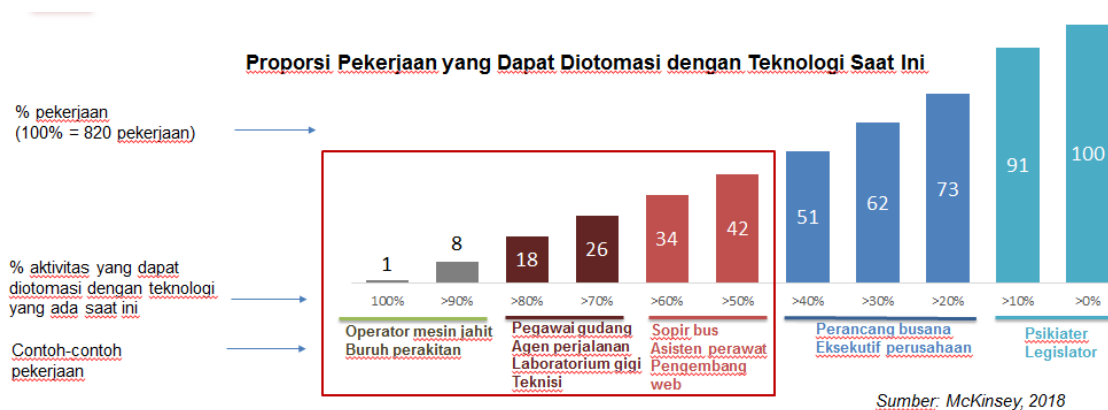
dibandingkan dengan guru kejuruan yaitu 55,6% guru umum dan 44,4% guru kejuruan, dimana sekolah swasta kesenjanganannya lebih besar jika dibandingkan dengan negeri yaitu 15,6% dan 6,8%.

Kondisi jumlah sekolah, siswa, rasio siswa/kelas, dan guru sangat mempengaruhi keterserapan lulusan terhadap dunia kerja. Kebekerjaan lulusan SMK dibedakan angkatan kerja (Bekerja dan menganggur) dan bukan angkatan kerja (melanjutkan sekolah, membantu rumah tangga, dan lainnya). pada saat ini berdasarkan sumber sakernas agustus 2019, jumlah angkatan kerja 78,2% dan 21,8% bukan angkatan kerja. Jumlah yang bekerja dari seluruh lulusan sebesar 70,0% dan yang melanjutkan sekolah sebesar 3,8%, menganggur 8,2%, dan bekerja tidak sesuai sebesar 18,1%.

Pada era revolusi industri 1.0 saat ini jumlah lulusan yang bekerja tidak sesuai dengan keahlian masih cukup besar, selain harus memperhatikan juga jumlah pengangguran. Pada era revolusi industri 4.0 sebagai tahap perkembangan sosial memberikan tantangan dan peluang sebagai turbulensi terhadap SMK sekarang ini yang ditandai dengan tiga ciri pokok yaitu: inovasi, otomatisasi, dan transfer informasi. ditandai dengan munculnya supercomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, *editing genetic* dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia dapat memaksimalkan fungsi otak.

Dengan teknologi yang ada saat ini, terdapat 9% pekerjaan yang 90% - 100% aktivitasnya dapat diotomasi (mis. buruh perakitan dan operator mesin). Selain itu, masih terdapat 42% pekerjaan yang lebih dari 50% aktivitasnya dapat diotomasi. Pekerjaan yang membutuhkan kemampuan bernalar dan interpersonal seperti psikiater dan legislator merupakan di antara jenis pekerjaan yang tidak banyak terdampak otomasi. Grafik di bawah ini menunjukkan beberapa pekerjaan yang dapat diotomatisasi berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi saat ini.

Grafik 4. Proporsi Pekerjaan yang dapat Diotomasi dengan Teknologi Saat Ini



WEF 2015 menunjukkan dalam kurun hampir setengah abad, 1960-2009, terjadi tren penurunan permintaan tenaga kerja untuk pekerjaan manual dan rutin. Namun sebaliknya, terjadi peningkatan secara konstan permintaan tenaga kerja untuk pekerjaan non rutin yang membutuhkan kemampuan interpersonal dan analitis. Secara rata-rata, empat tahun lagi, sepertiga keterampilan yang dibutuhkan oleh mayoritas okupasi akan terdiri dari keterampilan-keterampilan yang belum dianggap penting hari ini.

Dengan melihat kecenderungan beberapa pekerjaan saat ini, dunia kerja saat ini dan yang akan datang akan terdiri dari banyak *start-up*, usaha kecil, kewirausahaan, dan ekonomi digital. Perubahan karir akan lebih sering terjadi dan dibutuhkan fleksibilitas dalam pola kerja. Semua lulusan harus menjadi lebih siap menghadapinya dan memenuhi tuntutan Industri 4.0. Ada beberapa jenis pekerjaan dan keterampilan yang akan berkembang di Indonesia, antara lain seperti tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 5.

Software and application developers and analyst	Creativity, originality, initiative
Human Resources specialists	Complex problem-solving

Sumber: World Economic Forum, 2018

Selain itu, secara global terdapat sejumlah jenis pekerjaan yang bertahan, muncul, dan hilang. Memperhatikan prediksi kedepan tersebut, jasa pendidikan memegang peranan vital penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, akan tetapi minat dan perhatian pada aspek kualitas pada pendidikan bisa dikatakan baru berkembang dalam satu dekade terakhir. Keberhasilan jasa pendidikan ditentukan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pengguna jasa pendidikan tersebut (peserta didik dan masyarakat).

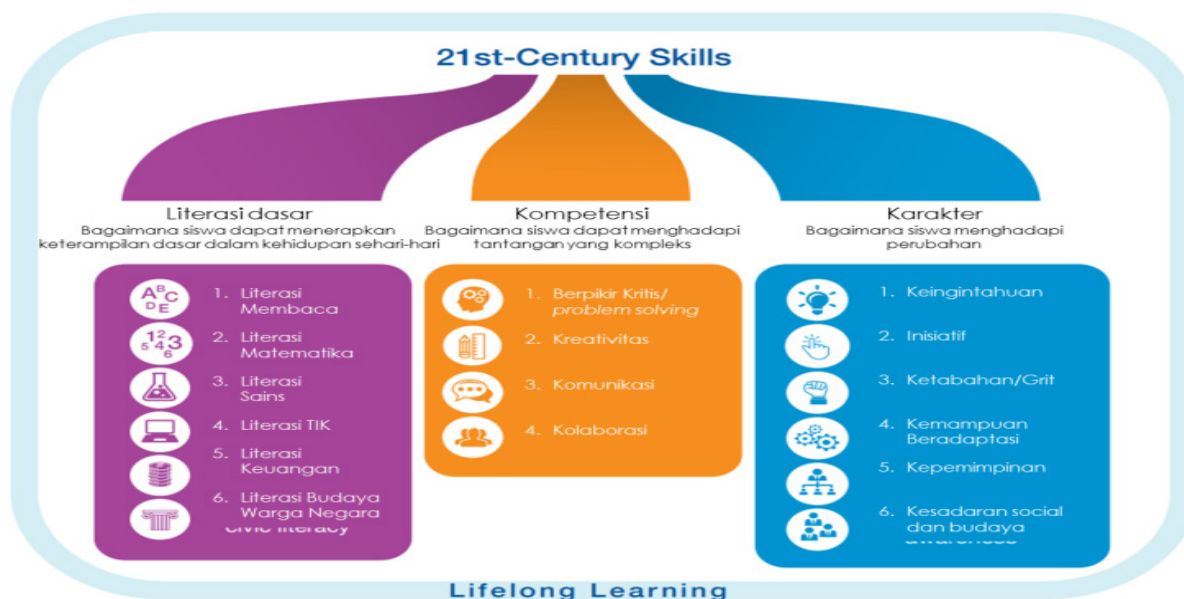
Tabel 6.

Managing director dan Chief Executive	Data Analyst	Data entry clerks
Financial and Investment Advisers	Big Data Specialist	Accountants and Auditors
University and Higher Education Teachers	Information Technology Services	Mechanics and Machinery Repairers

Sumber: World Economic Forum, 2018

Hasil *meta-analysis* WEF mengidentifikasi 16 keterampilan yang diperlukan di pasar kerja abad 21, Keterampilan tersebut didominasi oleh literasi dasar, kompetensi dan karakter, Tidak ada pengetahuan teknis teridentifikasi. Untuk itu, sudah sepantasnya peserta didik dibekali dengan keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan siswa adalah: (1) kualitas karakter, (2) literasi dasar, dan (3) kompetensi. Tuntutan keterampilan abad 21 mewajibkan kompetensi guru sesuai dengan tuntutan tersebut. Uraian selengkapnya tentang keterampilan abad 21 disajikan dalam gambar berikut ini.

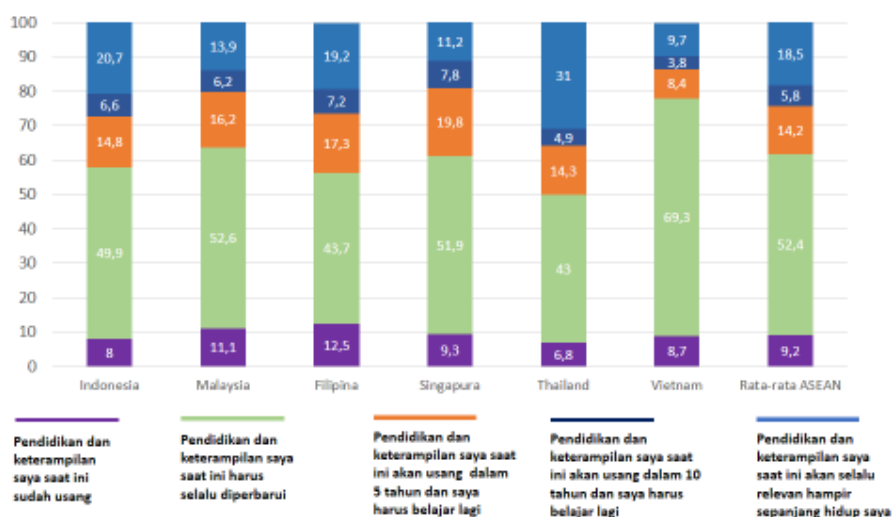
Gambar 1. Keterampilan Abad 21



Sumber: World Economic Forum, 2018

Komitmen anak-anak muda **Indonesia** pada *growth mindset* dan *lifelong learning* cukup tinggi, namun masih di bawah rata-rata anak muda di ASEAN

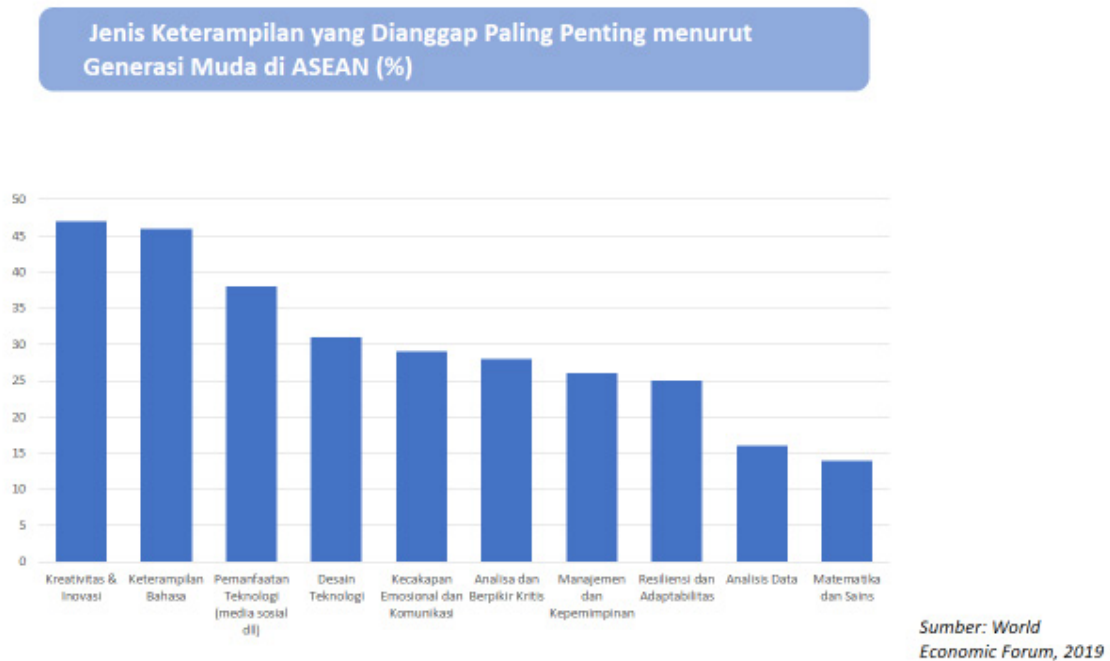
Grafik 5. Persepsi Generasi Muda ASEAN mengenai Growth Mindset dan Lifelong Learning (%)



Sumber: World Economic Forum, 2019

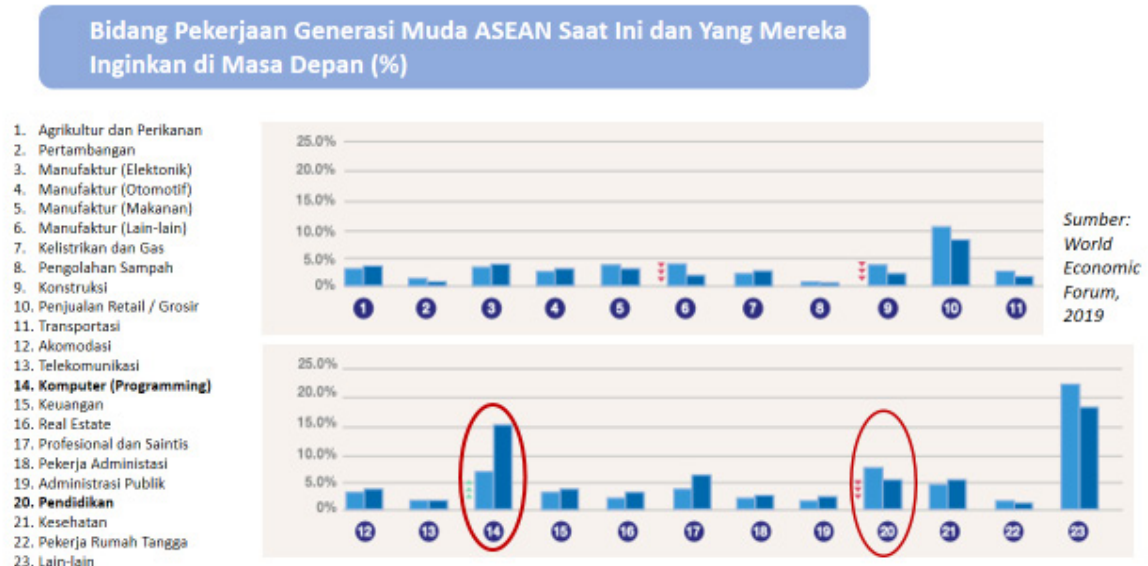
Generasi muda di ASEAN menganggap bahwa *soft skills* seperti kreativitas dan inovasi lebih penting dibandingkan *hard skills* seperti kemampuan analisis data dan STEM (setiap responden diminta menentukan 3 keterampilan yang dianggap paling penting)

Grafik 6. Jenis Keterampilan yang Dianggap Paling Penting menurut Generasi Muda di ASEAN (%)



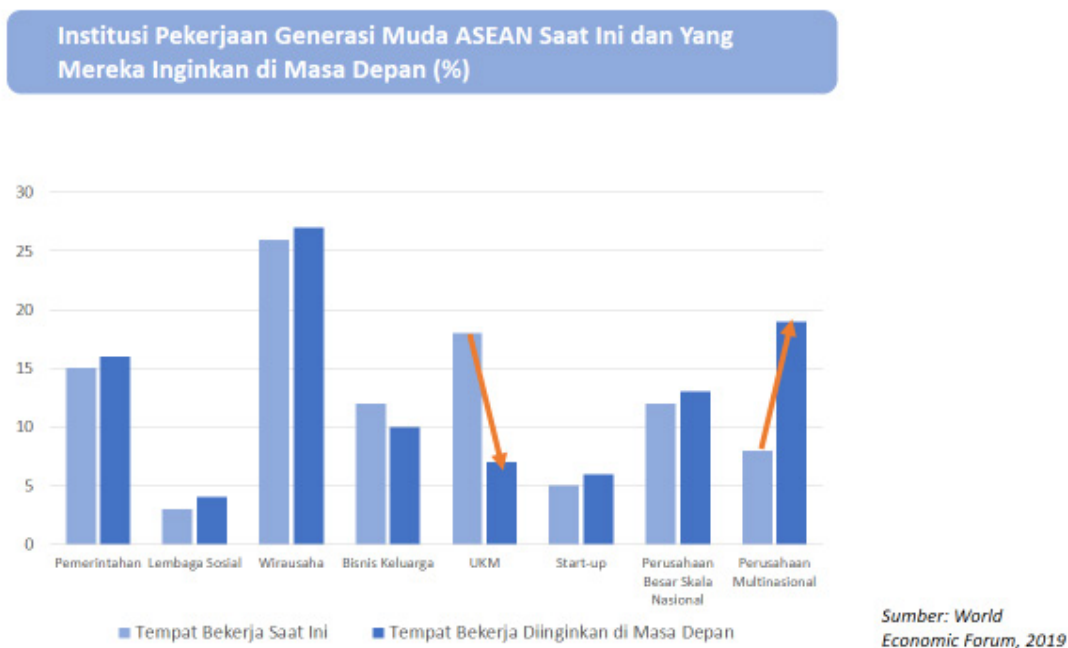
Pekerjaan dalam bidang teknologi komputer dan pemrograman (14) adalah pekerjaan paling diminati di masa depan oleh generasi muda di ASEAN. Yang menarik, pekerjaan pada sektor pendidikan (20) akan semakin tidak populer di masa depan

Grafik 7. Bidang Pekerjaan Generasi Muda ASEAN Saat Ini dan Yang Mereka Inginkan di Masa Depan (%)



Menjadi wirausahawan dan bekerja pada perusahaan multinasional adalah yang paling diinginkan oleh generasi muda ASEAN. Sementara itu minat bekerja pada UKM akan semakin menurun di masa depan

Grafik 8. Institusi Pekerjaan Generasi Muda ASEAN Saat Ini dan Yang Mereka Inginkan di Masa Depan (%)



II. Pembahasan

1. Relevansi SMK

Pengembangan kurikulum vokasi harus diselaraskan dengan permintaan Dunia Industri dan Dunia Usaha (DUDI) dengan tiga kriteria utama, yaitu permintaan pasar tenaga kerja (*demand-driven*), keterhubungan antara pemberi kerja (industri) dengan lembaga pendidikan vokasi (*link*) dan kecocokan antara lulusan vokasi dengan pemberi kerja/industri (*match*) dimana tingkat keberhasilan pendidikan vokasi terukur dengan keterserapan lulusan vokasi sesuai kompetensi dan bidang keahliannya.

Yang selama ini terjadi adalah masing-masing pihak yang terlibat dalam pendidikan vokasi seperti sekolah, industri dan lembaga kursus tidak mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain (*supply-driven*) yang menyebabkan ketika lulus, siswa SMK dihadapkan pada kondisi pasar tenaga kerja yang kurang sesuai dengan pembekalan yang diberikan selama berada di bangku sekolah.

Rencana integrasi pendidikan vokasi yang dirancang oleh Kemendikbud bertujuan untuk menjembatani kebutuhan industri dengan kompetensi yang lebih kompatibel yang dimiliki oleh lulusan SMK dan diharapkan kedepannya, pendidikan vokasi menjadi lebih *demand-driven*.

Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan juga Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) agar kondisi lulusan SMK lebih sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industri. Saat ini dari 142 kompetensi keahlian SMK, baru ada sekitar 23 kompetensi yang sudah memiliki SKKNI yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Perindustrian sehingga perlu dilakukan percepatan penyusunan SKKNI pada level SMK agar kompetensi lulusan SMK bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industry.

Kurangnya ketersesuaian kurikulum pada pendidikan vokasi seperti terlalu banyaknya mata pelajaran

dasar umum berupa Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Sejarah, Seni Budaya dan Penjaskes yang diajarkan kepada siswa SMK sementara pembekalan terhadap muatan kejuruan yang berisi kompetensi keahlian masih dinilai kurang menyebabkan perlu adanya perubahan terhadap kurikulum vokasi agar lebih relevan dan berbasis kompetensi kejuruan sehingga lulusan SMK kedepannya dapat memiliki *handson-experience* sebagai nilai tambah agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai spesifikasi industri. Oleh karena itu, diperlukan desain ulang terhadap bobot mata pelajaran yang ada sehingga bobot mata pelajaran kejuruan menjadi lebih besar yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan analisa *link and match* antara dunia vokasi dan industri agar adanya keselarasan antara kebutuhan industri dan pemenuhan keterampilan tenaga kerja oleh pihak SMK.

2. Menuju Transformasi SMK Abad 21

Bagi sebagian generasi muda, pendidikan menengah atas adalah jenjang terakhir sebelum mereka memasuki pasar tenaga kerja, sehingga memastikan transisi dari pendidikan menengah atas menuju pasar tenaga kerja adalah hal penting. Di Indonesia, 40% siswa SMA Indonesia terdaftar di jalur kejuruan, sementara 60% terdaftar di jalur umum. Analisis terhadap *imbal-hasil* pendidikan dan hasil pasar tenaga kerja yang dibahas pada bagian awal menunjukkan bahwa hasil kedua jalur tersebut di pasar tenaga kerja sama.

Kedua jalur pendidikan SMA, umum dan kejuruan, perlu memastikan bahwa lulusan dibekali dengan keterampilan yang cukup untuk melakukan apa yang telah dirancang agar bisa dilakukan. Ada perbedaan pokok antara kedua jalur. Jalur umum dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa menjalani pendidikan lebih lanjut sehingga lebih fokus pada pengembangan keterampilan berpikir (*thinking skills*).

Sebaliknya, jalur kejuruan dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa memasuki pasar tenaga kerja, sehingga lebih banyak fokus pada pengembangan keterampilan teknis. Akan tetapi, perlu untuk memastikan bahwa lulusan kedua jalur memiliki keterampilan dasar yang kuat yang memungkinkan mereka mengejar pendidikan lebih lanjut atau memasuki pasar tenaga kerja. Berdasarkan survei pengusaha tahun 2008, keterampilan dasar adalah yang paling penting. Menariknya, kurang dari 15% pengusaha menyatakan ada kesenjangan keterampilan dasar. Sekitar 30% pengusaha mengatakan bahwa keterampilan berpikir dan keterampilan berperilaku sangat penting dan hampir 40% mengatakan bahwa terdapat kesenjangan pada kedua keterampilan tersebut. Oleh karena itu, selain membekali siswa dengan keterampilan dasar, perlu juga mereka dibekali dengan keterampilan berpikir dan keterampilan berperilaku.

3. Kurikulum dan Bidang Keahlian

Persoalan yang mendasar kelemahan lulusan SMK memasuki dunia kerja salah satu diantaranya adalah kurangnya relevansi kurikulum SMK dengan bidang keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kurikulum SMK (K13) lebih menitikberatkan pada kompetensi umum yang belum banyak memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Contoh sederhana saja mengenai kurikulum dan kompetensi. kurikulum yang terdapat di sekolah belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan saat ini. Tuntutan industri yang terus menerus berubah ubah dalam hitungan tahun menjadikan kurikulum yang terdapat di sekolah menjadi tidak sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh industri. Bukan hanya kebutuhan industri yang terus menerus berubah ubah, akan tetapi *jobdesc* yang dimiliki industri terus update, hal ini menjadikan kurikulum yang terdapat di sekolah tidak sesuai dan tidak selaras dengan kebutuhan industri yang berakibat rendahnya daya serap bagi lulusan SMK.

Kompetensi yang dituntut oleh industri tidak hanya sebatas kompetensi mengenai pengetahuan akan

tetapi kompetensi perilaku. Kompetensi perilaku ini salah satu aspek untuk menentukan lulusan SMK dapat terserap di industri. Beberapa contoh kompetensi perilaku yang dimiliki perusahaan adalah kemampuan komunikasi, daya tahan kerja, ketelitian, motivasi, inisiatif, sosial, dan lain lain.

Untuk dapat menyelaraskan kurikulum SMK yang terdapat di sekolah dengan pihak industri perlu dilakukan penyelarasan kurikulum SMK dengan kompetensi dan jobdesc yang terdapat di industri sebagai pengguna lulusan SMK dalam konteks link and match. Oleh karena itu, beberapa cara mentransformasi SMK terkait penyelarasan kurikulum dengan bidang keahlian antara lain:

Pertama, memperkuat kurikulum literasi dan kemampuan dasar di SMK. Agar peserta didik SMK memiliki fleksibilitas dan kemampuan literasi seperti yang dimiliki oleh lulusan SMA dalam memasuki dunia kerja, maka perlu penyetaraan materi kemampuan dasar di SMK kelas 10 dengan materi yang diajarkan di SMA. Penyetaraan materi kemampuan dasar SMK dan SMA di kelas 10 dimaksudkan bahwa siswa SMK akan mempelajari pelajaran umum di kelas 10 dan pada kelas 11 dan 12 mengikuti kelas penjurusan yakni akademik dan kejuruan. Artinya pada kelas 10 siswa mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan penguatan mata pelajaran sebagai bekal penentuan penjurusan sesuai bakat dan minat. Pada tahun 10 semua siswa akan memiliki program bersama dengan mata pelajaran tambahan berdasarkan kebutuhan mereka dan minat yang diproyeksikan untuk studi utama. Untuk Tahun 11 dan 12, siswa melanjutkan beberapa mata pelajaran inti umum dan memilih spesialisasi akademik, kreatif atau kejuruan sebagai studi utama mereka. Mereka tidak dibatasi oleh jenis sekolah yang mereka hadiri. Siswa akan memilih pola kerja dan studi yang memenuhi kebutuhan karir mereka dan memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berubah - termasuk pembelajaran online, pelatihan tempat kerja yang didanai pemberi kerja, Politeknik, Community Colleges, Universitas, studi internasional.

Kedua, mengembangkan kurikulum yang memperkuat kompetensi dasar dan karakter untuk abad-21 seperti: kompetensi berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi dan berkolaborasi dan memperkuat karakter siswa untuk menjadi pembelajar yang siap kerja seperti memiliki keingintahuan yang tinggi, inisiatif untuk belajar, semangat tidak mudah menyerah, dan memiliki nilai kepemimpinan.

Ketidakselarasan kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan DU/DI bukan hanya akibat dari kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi (out of date), maupun kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan pihak industri, akan tetapi faktor lainnya ialah siswa siswi itu sendiri. Pihak industri tidak hanya menyerap lulusan SMK yang berprestasi akan tetapi juga memilih calon karyawan yang memiliki perilaku yang baik misalnya: sikap (attitude) dan kedisiplinan. Lulusan SMK mungkin tidak menyadari hal ini. Oleh karena itu perlu adanya pengetahuan seputar dunia kerja yang disosialisasikan ke siswa siswi SMK agar siap menghadapi dunia kerja, misalnya: seminar pengetahuan dunia kerja yang diikuti siswa siswi dan lulusan SMK

Ketiga, Memperkuat kerja sama SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri. SMK harus memperkuat kerjasama dengan DU/DI, masyarakat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi khususnya politeknik dalam pendidikan dan pelatihan SMK yang sesuai dengan bidang garapan industri dan potensi SDA lokal atau kearifan lokal, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing tempat SMK berada.

Transformasi ini diarahkan pada peningkatan partnership dengan industri dan masyarakat, program afirmasi, job matching bagi lulusan SMK. Bidang keahlian yang perlu dilakukan adalah kompetensi kerja lulusan SMK, ICT, bahasa asing, kewirausahaan, dan membangun partnership antara sekolah dengan dunia bisnis. Pelaksanaan partnership antara sekolah dan DU/DI perlu didukung oleh terciptanya mekanisme pembelajaran di SMK dengan bantuan pemerintah dan bimbingan dari industri. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah memperkuat kerjasama sekolah dengan industri dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan dan mendorong industri membantu untuk melatih siswa SMK

agar mampu menjadi calon tenaga kerja terampil serta mengembangkan kompetensi guru produktif atau menyediakan guru yang memiliki praktik dari Industri.

4. Pembelajaran

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah penerapan Merdeka Belajar yang merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Merdeka Belajar memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan siswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills siswa akan terbentuk dengan kuat.

Konsep Merdeka Belajar selayaknya adalah untuk mengimplementasikan peningkatan mutu SMK dan peningkatan kompetensi siswa agar dapat mempersiapkan diri menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (agile learner) berdasarkan konsep multi entry dan multi exit, sehingga nantinya menjadi lulusan SMK yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Dengan demikian, Merdeka Belajar adalah salah satu cara mentransformasi SMK dengan mengembangkan sistem Multi-Entry and Multi-Exit yang diakui bersama oleh jenjang SMK, Pendidikan Tinggi dan Dunia Usaha dan Industri. Merdeka Belajar memungkinkan siswa untuk menimba pengalaman melalui praktik bekerja di dunia industri yang dapat diakui baik oleh SMK ataupun Pendidikan Tinggi. Merdeka Belajar juga memungkinkan siswa untuk mengambil mata pelajaran atau materi di luar materi inti dari bidang keahlian yang diambilnya. Misalnya, Siswa SMK dengan bidang keahlian Teknik Mesin yang tertarik untuk berwirausaha terkait mesin dapat mengambil mata kuliah Akuntansi yang ditawarkan SMK bidang keahlian Manajemen Perkantoran. Juga dibuka kemungkinan bagi siswa SMA yang ingin memperoleh kemampuan vokasi untuk mengambil mata pelajaran vokasi.

Kebijakan Merdeka Belajar juga memungkinkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan vokasi dengan pengakuan atas kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan di SMK dan pengalaman kerja yang dimilikinya.

5. Pengelolaan SMK

Dengan memperhatikan kondisi yang berjalan selama ini terhadap penyelenggaraan SMK, maka perlu penataan kembali pendidikan SMK. Tidak hanya revitalisasi, tetapi transformasi harus dilakukan. Transformasi terhadap tata kelola terkait dengan penyelenggaraan SMK antara lain:

- a) Memperkuat pengelolaan perijinan SMK untuk menghindari tumbuhnya SMK kecil, atau dengan Program Keahlian yang tidak relevan dengan konteks DU/DI di mana SMK itu berada. SMK kecil yang sudah ada harus dipertimbangkan untuk dihentikan menerima siswa baru, digabung dengan SMK lain – atau konversi menjadi SMA
- b) b. Memperkuat branding SMK dengan meningkatkan akses lulusan terhadap dunia kerja atau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui penguatan keterampilan dasar dan pendidikan karakter abad-21. Dapat dipertimbangkan untuk mengurangi ketegasan batas antara SMA dan SMK, dan antar Program/Kompetensi Keahlian yang ditawarkan SMK untuk menjaga kemungkinan penyesuaian aspirasi karir siswa SMK agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan minat-bakat anak.

D. KESIMPULAN

Pertumbuhan SMK dalam 12 tahun terakhir mengalami kenaikan baik jumlah sekolah maupun jumlah siswa. SMK swasta mendominasi sistem dan jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat. Peningkatan tersebut tidak diiringi peningkatan rasio jumlah siswa per sekolah bahkan mengalami penurunan sebesar 24,8%, berbeda dengan sekolah negeri mengalami kenaikan sebesar 22,1%. Secara kuantitas, jumlah SMK setiap tahun terus mengalami peningkatan, namun mutunya masih belum sesuai harapan, akreditasi minimal B masih sebesar 71,89 persen. Keterbatasan sarana dan prasarana di SMK terlihat pada ketersediaan fasilitas perpustakaan dan laboratorium. Jumlah SMK yang tidak dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan sebanyak 35,4%. kekurangan fasilitas laboratorium sebesar 80,5% dari kebutuhan sesuai SNP. Proporsional guru umum dan kejuruan, menunjukkan guru umum lebih banyak dibandingkan dengan guru kejuruan, sekolah swasta kesenjangananya lebih besar jika dibandingkan dengan negeri. Hal tersebut mempengaruhi ke bekerjaan lulusan SMK. Ke bekerjaan lulusan SMK sebagian besar yaitu 70% sudah bekerja, sebagian kecil melanjutkan sekolah, sedangkan yang menganggur dan bekerja tidak sesuai dengan keahliannya masih cukup besar.

Perubahan mendasar di bidang industry pada abad 21 yaitu munculnya supercomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, *editing genetic* dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia dapat memaksimalkan fungsi otak. Tiga ciri pokok jika dibandingkan dengan era sebelumnya yaitu: inovasi, otomatisasi, dan transfer informasi.

Perubahan kondisi pada era RI-4.0 berdampak pada penyelenggaraan bidang pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, daya saing global, dan skill yang relevan dengan era mendatang. *World Economic Forum* (2016) merilis sepuluh jenis skill yang diperlukan oleh pasar kerja pada tahun 2020. Kesepuluh skill tersebut secara prioritas yaitu 1) pemecahan masalah, 2) berpikir kritis, 3) kreativitas, 4) manajemen SDM, 5) kemampuan berkoordinasi, 6) kemampuan emosional, 7) pengambilan keputusan, 8) orientasi pelayanan, 9) negosiasi, dan 10) fleksibilitas kognitif. Agar lulusan SMK bermutu dan relevan dengan perkembangan era mendatang, pendidikan SMK dituntut untuk menerapkan pembelajaran abad 21, pembelajaran berorientasi STEAM, perubahan kurikulum, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, serta *link and match*.

E. SARAN

Untuk menjaga relevansi SMK di abad 21 perlu penataan pada 2 aspek yaitu aspek pengelolaan dan aspek kurikulum dan pembelajaran.

Pada aspek pengelolaan perlu memperhatikan hal berikut: analisis efektivitas tata kelola kelembagaan sekolah, terutama pada sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit; Pemerintah daerah perlu sementara waktu melakukan moratorium pendirian SMK dan melakukan merger sekolah kecil dengan mutu yang belum baik; Pemerintah daerah perlu melakukan *refocusing* bidang keahlian sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan pasar kerja di masing-masing daerah; Opsi penggabungan SMA dan SMK dapat dipertimbangkan di mana vokasi menjadi salah satu peminatan siswa. Hal ini mempertimbangkan fakta bahwa lulusan SMA selama ini lebih siap latih dan belajar berbagai keterampilan baru dibandingkan lulusan SMK.

Pada aspek Kurikulum dan Pembelajaran perlu memperhatikan hal berikut: Sinkronisasi kurikulum antara SMK dan Dunia Usaha/Industri dengan mempertimbangkan kompetensi global; Pembelajaran keterampilan teknis tidak boleh mengalahkan pembelajaran *soft skills* dan kompetensi abad 21 (4Cs); Reorientasi kurikulum pendidikan vokasi yang bersifat *demand driven* dan relevan dengan kebutuhan pekerjaan masa depan; Perluasan penerapan *teaching factory/teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industry; Penguatan karakter kewirausahaan baik melalui

pembelajaran maupun pemagangan; Mengintensifkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industry; Alokasi waktu mata pelajaran umum/normatif adaptif pada SMK perlu disesuaikan berdasarkan kedalaman substansi materi; Mata pelajaran kelompok A (muatan nasional) di SMK perlu dilakukan kontekstualisasi sesuai dengan kompetensi keahliannya; Waktu yang ada dapat dialokasikan ke mata pelajaran keahlian/produktif terutama pada kelas XI dan XII; Kelas XI dan XII lebih difokuskan pada muatan keahlian dan praktik sesuai peminatan siswa

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi.2010. “Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan Peningkatan Relevansi Pendidikan (Studi Relevansi Pendidikan Kerjasama UPI dengan balitbang Kemendiknas”.http://file.upi.edu/Direktori/PROCEEDING/Seminar_Internas.NFE
- Badan Pusat Statistik. 2019. Potret Pendidikan Indonesia, Statistik Pendidikan Indonesia 2019. Jakarta. BPS
- Badan Pusat Statistik, 2019. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik
- Bappenas, 2017. Visi Indonesia 2045. Bahan Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Disampaikan pada orasi ilmiah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, 26 September 2017.
- Bappenas, 2019. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia 2020-2024
- Era Revolusi Industri 4.0: Perlu Persiapkan Literasi Data, Teknologi dan Sumber Daya Manusia. (2018). Diambil 28 Maret 2018 dari <http://belmawa.ristekdikti.go.id/2018/01/17/era-revolusi-industri-4-0-perlu-persiapkan-literasi-data-teknologi-dan-sumber-daya-manusia/>
- Frinces, Z. H. (2011). Persaingan & Daya Saing Kajian Strategis Globalisasi Ekonomi. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Guilford, J. P dan Benjamin Frucher. 1978. Fundamental Statistics in Psychology and Education. Tokyo : Mc Graw-Hill Kogakusha, Ltd
- INSEAD, 2017. The Global Talent Competitiveness Index
- McKinsey & Company. (2017). A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity January 2017(Executive Summary). Mckinsey Global Institute.
- Raymond S. Ross. 1996. Speech Communication: Fundamentals and Practice. Edisi ke6. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice –Hall
- World Economic Forum. (2018). The Future of Jobs Report 2018. Geneva: Centre for the New Economy and Society 9

NOTULA

Hari/Tanggal	: Kamis/03 Desember 2020
Jadwal Paparan	: Panel No: 1
Ruang	: Kelompok 7
Waktu	: 13.40 WIB
Judul Penelitian	: 1. Kajian Alternatif Model Penggabungan Smk Dengan Sma 2. Upaya Meningkatkan Kemandirian Lulusan Pkbn Di Provinsi Papua Barat Dan Papua Melalui Pembelajaran Vokasi Fungsional 3. Pendidikan Vokasi: Menjaga Relevansi Smk Di Abad 21
Penyaji	: 1. Idris HM. Noor 2. Etty Sisdiana 3. Agus Amin Sulistiono
Pembahas	: Prof. Muchlas Samani
Moderator	: Yendri Wirda
Notulis	: 1. Sisca Fujianita 2. Fransisca Nur'aini 3. Khairur Raziqiin

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : (Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)	1. Idris HM. Noor 1) Latar Belakang a. Kelemahan SMK yaitu memproduksi pengangguran terbanyak pada tingkat pendidikan menengah dibandingkan dengan SMA dan pendidikan lainnya seperti terlihat pada grafik berikut b. SMK kecil swasta yang banyak muncul di berbagai daerah menghasilkan lulusan yang kurang bermutu atau anak-anak yang kurang pandai c. Proses perekrutan siswa baru: • Lulusan SMP yang baik/pintar dan didukung oleh ekonomi orang tua yang tinggi akan masuk SMA Negeri yang bermutu/favorit • Lulusan SMP yang tidak diterima di SMA negeri

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		yang baik akan masuk ke swasta yang bermutu tinggi • Lulusan SMP yang baik akan masuk ke SMKN favorite • Mereka yang tidak bisa ke SMAN baik, SMKN/SMK swasta yang baik akan masuk ke SMK swasta yang bermutu rendah/jelek dan murah d. Pendirian SMK yang baik memerlukan investasi besar yang menurut beberapa studi 2.5-3.0 kali besar biayanya dibanding SMA dengan mutu yang setara. e. Walaupun anak SMA dipersiapkan untuk kuliah, tetapi data nasional menunjukkan yang melanjutkan hanya 58%. Artinya ada 42% lulusan SMA yang ternyata tidak melanjutkan. Diduga mereka ini yang kemudian bersaing dengan lulusan SMK memasuki dunia kerja f. Pada bulan Agustus 2019, jumlah pengangguran terbuka berjumlah 7,05 juta orang. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) masih didominasi oleh lulusan SMK sebesar 10,42 persen (BPS) g. Hasil studi internasional PISA 2018, dua pertiga siswa tidak memenuhi standar kompetensi minimum dalam literasi dasar yang mereka butuhkan untuk hidup di masa depan. h. Tidak ada bukti bahwa SMK lebih baik dari SMA atau sebaliknya i. Mahasiswa baru 1.732.308, siswa SMA yg ikut UN: 4.1 juta, lebih banyak yang bekerja dari pada melanjutkan ke PT. (Statistik PT, Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018) j. Masalah: guru bidang kejuruan/produktif yang berpengalaman di bidang industry sangat kurang, Alat praktik yang masih ketinggalan daripada alat di industry, SMK kurang kerjasama dengan DUDI, sebagian besar SMK kecil berkualitas buruk. 2) Tujuan Penelitian

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Menganalisis apakah integrasi pendidikan SMA dan SMK perlu dilakukan untuk mengatasi ketidakcapaian <u>Das Sollen dan Das Sein</u> dalam pendidikan menengah. 3) Metode Penelitian Desk Study yaitu mengkaji Data Sekunder: Dokumen terkait dengan pendidikan SMK dan SMA Data primer: DKT/FGD, kuesioner online. 4) Hasil Penelitian Hasil FGD: banyak yang tidak setuju dengan penggabungan SMA-SMK secara institusional dengan banyak rasional. Hasil kuesioner: sama dengan FGD, banyak yang menyatakan tidak setuju dengan penggabungan SMA-SMK. 5) Rekomendasi a. Diusulkan alternatif model pengintegrasian yaitu model Kolaborasi b. Direktorat perlu menerapkan sistem MEES bagi SMK dan SMA kecil yang kurang bermutu (Sudah ada dalam UUSPN) 2. Etty Sisdiana Latar Belakang Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wilayah termiskin di Indonesia. Penyebab kemiskinan di Papua antara lain: rendahnya tingkat pendidikan masyarakat usia 15 tahun yang tidak tamat SD, ataupun tamatan SD/SMP yang tidak melanjutkan. Penduduk Papua barat usia lebih dari 15 tahun yang bekerja didominasi oleh tamatan SD/MI (BPS Prov. Papua Barat, 2019). Masyarakat Papua perlu dibekali dengan kompetensi agar siap menghadapi tantangan masa depan melalui jalur pendidikan. PKBM sebagai salah satu wadah yang diselenggarakan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		oleh dan untuk masyarakat meraih pendidikan. Warga belajar di Papua dan Papua Barat umumnya masyarakat miskin, pengangguran dewasa. Pembelajaran program vokasi fungsional yang bagaimana yang dapat meningkatkan kualitas SDM yang mandiri, produktif, dan berkepribadian Tujuan: Menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam bentuk Model Pelaksanaan Pembelajaran Vokasi Fungsional melalui PKBM di Papua Barat dan Papua Hasil dan Pembahasan Tipologi pembagian daerah Papua dan Papua Barat: 1. Daerah maju 2. Daerah sedang 3. Daerah kurang Pelaksanaan pembelajaran Vokasi fungsional (VF) pada PKBM Dari tiga lokus (Kota Jayapura, Kota Sorong, dan Kab Merauke), pembelajaran VF baru terjadi di Kota Jayapura dengan alasan bahwa WB dirasakan perlu meningkatkan skill yang telah dimilikinya Kota Sorong dan Kab. Merauke belum menyelenggarakan VF karena terkendala oleh dana dan ketersediaan sarana prasarana Hasil analisis terhadap kultur, budaya dan adat masyarakat dengan potensi wilayah Papua dan Papua Barat, maka sebenarnya banyak alternatif jenis keterampilan vokasional yang dapat dikembangkan di Papua dan Papua Barat, antara lain: otomotif; pertukangan kayu; kuliner; budidaya ikan air tawar; pengelolaan sampah; pengrajin sandal rumahan; IT bidang jaringan dan editing video; dan cinderamata khas. Profil Warga Belajar - sebagian besar usia dewasa (jauh di atas jenjang yang seharusnya) - sebagian besar WB pekerja/ buruh, sebagian pengangguran

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		- hampir seluruh WB sulit mengatur waktu belajar akademis - diperlukan pendekatan andragogis Persepsi pengelola PKBM terhadap kompetensi WB Persepsi pengelola PKBM terkait daya juang WB Sedikit sekali WB yang memiliki daya juang Persepsi pengelola tentang ketrampilan abad 21 WB Baru sebagian WB yang memiliki ketrampilan abad 21 Pembelajaran VF - beragam: memudahkan WB menentukan masa depan - tersendiri atau terintegrasi - disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Di dalam Kurikulum Paket C Pendidikan Kesetaraan VF tidak muncul tersendiri, tetapi terintegrasi dalam Ketrampilan Fakta Pembelajaran VF yang dilakukan PKBM di Kota Jayapura - pembelajaran secara daring jarang dilakukan karena sebagian besar WB tidak memiliki gawai - Pemberian sertifikat kepada WB berbayar - Pembelajaran IT belum optimal - pembelajaran kewirausahaan terkendala oleh sarana termasuk bahan praktek dan dana Konsep Model yang disarankan Pembelajaran VF di PKBM di Papua dan Papua Barat Saran Rekomendasi 1. Perlu disebutkan secara eksplisit nomenklatur Pembelajaran Vokasi Fungsional 2. Pengkajian kembali kurikulum ketrampilan 3. Agus Amin Sulistiono - Penelitian dilakukan untuk menelusuri kesiapan SMK untuk menghadapi tantangan pendidikan vokasi abad 21., agar siswa SMK siap untuk menghadapi

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		tantangan dunia kerja di abad 21. - Data yang digunakan untuk melengkapi penelitian diperoleh dari Sakernas BPS, World Economic Forum (WEF), dan dari pihak swasta, diantaranya Jobstreet.com - Latar belakang berangkat dari pembangunan Indonesia berdasarkan RPJMN tahun 2020 – 2024 - Revitalisasi SMK dengan 6 poinnya juga menjadi latar belakang penelitian ini. - Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual SMK terkait kesiapan menghadapi revolusi industri. - Untuk mengetahui kekuatan revolusi industry 4.0 - Untuk menganalisis relevansi SMK di abad 21. - Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan Teknik analisis kuantitatif deskriptif. - Pertumbuhan SMK secara jumlah, terus mengalami penambahan dari tahun ke tahun, baik SMK swasta maupun SMK negeri. - Pertumbuhan SMK swasta cenderung lebih cepat daripada SMK negeri, baik dari jumlah Lembaga maupun dari jumlah siswanya. - Mayoritas SMK, lebih dari 70 persen merupakan SMK kecil, yang perlu diberikan perhatian dan intervensi pemerintah untuk menjaga keberlangsungannya, apakah akan digabung atau dialihkan atau bentuk intervensi lainnya dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. - Apabila dibandingkan dengan SMA, akreditasi SMK lebih sedikit yang masuk dalam akreditasi minimal B. - Apabila dilihat dari jumlah siswa baru SMK, secara rata – rata nilai UN lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA nilainya lebih besar dari lulusan SMP yang melanjutkan ke SMK. - Secara umum prestasi akademik siswa SMA lebih tinggi dari pencapaian prestasi akademik siswa SMK. - Berdasarkan data yang disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud, ketersediaan sarana dan prasarana SMK masih banyak SMK yang kurang memadai

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		ketersediaan sarana dan prasarannya, terutama ketersediaan perpustakaan dan laboratorium. - Dari sisi tenaga pengajar, lebih dari 50 persen guru SMK merupakan lulusan dari pendidikan umum, sedangkan yang menempuh pendidikan kejuruan kurang dari 50 persen. - Keterserapan lulusan SMK pada dunia kerja memiliki kecenderungan lebih sedikit dari lulusan SMA. - Bidang kerja yang banyak digeluti oleh lulusan SMK, terdapat pada bidang teknologi dan rekayasa. - Pengangguran SMK yang menganggur, mayoritas lulusan dari SMK dengan bidang keahlian teknologi dan rekayasa. - Berdasarkan paparan WEF, dimasa yang akan datang, dunia kerja akan semakin banyak menyerap Angkatan kerja dengan keterampilan aras tinggi. - Dimasa yang akan datang keterampilan inti yang dibutuhkan oleh dunia kerja akan terkait dengan kemampuan dalam pengetahuan yang mencakup keahlian literasi kompetensi dan karakter. - Komitmen anak muda Indonesia cenderung lebih kecil dalam pengembangan mindset dan pembelajaran jangka Panjang, bila dibandingkan dengan negara – negara lainnya dalam Kawasan ASEAN. - Berdasarkan paparan WEF, dimasa yang akan datang, pemuda ASEAN lebih tertarik pada kemampuan computer dan pendidikan. - Pada saat ini pemuda ASEAN lebih meminti untuk menjadi wirausahawan dan bekerja pada perusahaan multinasional, namun peminatan pada UKM dimasa yang akan datang akan semakin berkurang. - Transformasi SMK diperlukan untuk memperbaiki kemampuan akademis siswa SMK, untuk mempertahankan keberadaan SMK kecil dengan berbagai alternatif pengembangannya, pemutakhiran pengetahuan guru SMK dengan keahlian yang mutakhir, untuk memperbaiki tingkat keterserapan lulusan SMK pada dunia kerja, untuk menyesuaikan kebutuhan keterampilan dunia kerja dengan bidang

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		keahlian yang terdapat pada SMK saat ini, untuk semakin menarik dunia kerja dan dunia industry untuk menjalin Kerjasama dengan SMK. - Untuk menjaga relevansi SMK di abad 21, perlu penataan pada 2 aspek yaitu aspek pengelolaan SMK serta aspek kurikulum dan pembelajaran SMK. - Pertumbuhan SMK yang semakin bertambah jumlahnya, perlu juga dilakukan berbagai perbaikan agar sejalan juga dengan pertumbuhan kualitas lulusan SMK. - Untuk memperbaiki aspek pengelolaan dan aspek kurikulum dan pembelajaran SMK perlu dilakukan intervensi oleh pemerintah.
a.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	1. Idris HM Noor a. Sistematika Secara prinsip sistematika sudah bagus. Namun, karena penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dan menyangkut keberadaan institusi (SMA dan SMK) yang tercantum di UU Sisdiknas dan masing-masing punya PP serta sudah eksit bertahun-tahun di Indonesia, maka kajian keterlaksanaan perlu mendapat perhatian. Dengan menggunakan logika penelitian kebijakan, penelitian ini sebaiknya difahami baru sampai policy option (berupa pilihan-pilihan kebijakan) yang masih harus dilanjutkan dengan tahap policy negotiation untuk melihat kemungkinan keterlaksanaan dengan memperhatikan berbagai variabel lapangan yang terkait. Baru setelah itu ditemukan pilihan kebijakan yang secara konsep tepat dan dapat dilaksanakan. b. Keterkaitan antara masalah studi dengan kebijakan pendidikan yang ada Sangat bagus. Ketika era disrupsi yang ditopang kemajuan teknologi digital melanda segala aspek kehidupan, termasuk pola kerja sangat cepat berubah, maka kebijakan pemilahan secara kaku antara SMA, SMK dan kursus keterampilan, bahkan Diploma perlu diteliti kembali. Namun demikian karena juga terkait dengan UU

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Sisdiknas dan turunannya, maka studi perlu dilakukan lebih komprehensif. Studi sebaiknya tidak hanya menyangkut SMA dan SMK, tetapi juga BLP, Kursus Keterampilan dan bahkan Diploma. Mumpung sedang ada arah menyempurnaan UU Sisdiknas, sehingga hasil studi ini dapat menjadi salah satu bahannya. c. Keterkaitan masalah dengan tujuan dan kesimpulan Analisis terhadap masalah perlu dilakukan lebih dalam, sebelum mencari alternatif sebagai solusi yaitu penggabungan SMA dan SMK. Problem ketidakterserapan lulusan SMK dan kekurangan guru, perlu dianalisis lebih dalam. Perlu dikaji penelitian lain yg sudah pernah dilakukan. Kebijakan meningkatkan jumlah SMK yang tidak diikuti dengan penyediaan sarana dan guru terbukti menumbuhkan SMK “sastra” yang menghasilkan pengangguran. Catatan: Mohon dilihat penelitian David Newhouse dan Daniel Suryadarma (2009). Dilakukan kajian yg komprehensif terhadap fenomena pengangguran dan kekurangan guru maupun sarana di SMK. Dengan menggunakan pola pikir kedokteran, fenomena tersebut baru symptom dan bukan penyakit, sehingga harus didiagnosa dulu secara cermat. Baru setelah itu menemukan obat (solusi untuk mengatasi). d. Rekomendasi yang bersifat operasional dan bukan yang bersifat normatif Rekomendasi belum memperhatikan kondisi lapangan. Maukah SMA/SMK besar membantu SMA/SMK kecil? Merger sekolah yang sudah lama digaungkan juga sulit diterapkan, khususnya pada sekolah swasta. Pada hal sebagian besar SMK adalah swasta yang walaupun besar harus berjuang menghidupi diri sendiri. Lebih realistis, SMK/SMA besar dan memiliki sarana bagus diberi mandat menyelenggarakan kursus keterampilan yang marketable skills. Sementara SMK

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		yang tidak memenuhi syarat dikonversi menjadi SMA dan siswanya ikut kursus di SMK besar dan atau BLK. Dengan begitu siswanya lulus SMA tetapi memiliki keterampilan yang cukup untuk bekerja. Pola SMA vokasi yang dirintis di Jawa Timur dapat menjadi kajian pembandingan. e. Kontribusi terhadap pengembangan kebijakan Sangat bagus. Tetapi studinya diperluas, tidak hanya menggabungkan SMA dan SMK tetapi termasuk kursus keterampilan dan diploma. Pengalaman awal berfirinya TAFE di Australisa dapat menjadi bahan banding. Penelitian diperluas. Dibuat grand design penelitian untuk mengkaji pendidikan vokasi masa depan. Penelitian ini difahami merupakan bagian penelitian besar tersebut. Penelitian besar tersebut dapat dirancang sebagai bagian dari revisi UU Sisdiknas. Tanggapan untuk pembahas 1: Kita akan mencoba mengungkap kembali regulasi MESS yang sudah masuk dalam sistem UU. Dan dicoba lagi program kolaborasi: SMA yang ingin bekerja diberi tambahan skill dan siswa SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mendapat tambahan mata pelajaran yang dibutuhkan. Tidak hanya mulok tetapi juga bidang keahlian dan akademik. SMA bisa mendapat skill jika ingin bekerja, smk mendapat ilmu pengetahuan jika ingin melanjutkan sekolah. Perusahaan biasanya mentraining pekerja yang baru diterimanya, makanya softskill siswa SMK harus terus ditingkatkan. SMA-SMK yang digabung yaitu yang tidak memiliki kemampuan/meningkatkan kompetensi siswanya. 2. Etty Sisdiana a. Sistematika Pada prinsipnya sudah bagus. Namun perlu dipertanyakan ini penelitian pengembangan untuk menemukan model

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		atau penelitian evaluasi untuk melihat pelaksanaan pendidikan VF di PKBM di Papua dan Papua Barat. Dipastikan, ini penelitian apa. Penelitian pengembangan model atau penelitian kebijakan atau penelitian evaluasi. Jika itu sudah pasti baru dapat dilakukan konsolidasi data dsb. b. Keterkaitan antara masalah studi dengan kebijakan pendidikan yang ada Pendidikan VF bagi PKBM sangat penting dan berbagai data menunjukkan itu belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu penelitian mencari model pendidikan VF yang cocok di PKBM sangat tepat dilaksanakan, sebagai landasan kebijakan ke depan. Namun data yang dihasilkan baru memetakan kondisi lapangan pendidikan VF di PKBM saat ini. Belum menemukan modelnya. Model yg ditunjukkan pada hal 16 baru model hipotetik dan sepertinya tidak didasarkan pd data lapangan. Penelitian ini diubah saja menjadi penelitian evaluasi untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan VF di PKBM di Papua dan Papua Barat. Dan beradarkan itu dilakukan penelitian lanjutan untuk menemukan model Pendidikan VF yang cocok di PKBM di Papua dan Papua Barat. Untuk tahap berikutnya lebih baik dilakukan dengan penelitian kebijakan atau penelitian pengembangan. c. Keterkaitan masalah dengan tujuan dan kesimpulan Sepertinya pertanyaan umum penelitian dengan rincinya tidak begitu sinkron. Masalah umumnya: Model pembelajaran VF yang bagaimana yang dapat meningkatkan kemandirian, produktivitas, dan kepribadian sehingga dapat meningaktkkan kualitas hidup masyarakat. Namun dari 7 kajian yang dilakukan tidak menjawab masalah tsb. Karena yang ditanyakan model VF jawabannya kurikulum, pola pelaksanaan dsb dsb. Perlu ditataulang, sebenarnya penelitian ini merupakan penelitian evaluative untuk mengkaji pelaksanaan pendidikan VF di PKBM seperti 7 tujuan khusus itu atau

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		mencari model pendidikan VF di PKB. Jika dipilih yang pertama yaitu penelitian evaluasi, maka rumusan masalah (pertanyaan penelitian) perlu diubah. Jika pertanyaan penelitian dipertahankan (dan itu yang justru penting), maka penelitian perlu ditataulang d. Rekomendasi yang bersifat operasional dan bukan yang bersifat normatif Rekomendasi pada hal 16 masih perlu diuji apakah dapat dilaksanakan. Jika menggunakan kacamata analisis kebijakan, model itu baru merupakan kerangka konsep dan belum merupakan alternatif kebijakan. Dengan demikian tentu belum merupakan rekomendasi operasional. Jika memang ingin ditemukan model pendidikan VF di PKBM di Papua dan Papua Barat, penelitian ini difahami saja sbg penelitian pendahuluan untuk mendapatkan gambaran “what’s going on”. Baru setelah itu dicari modelnya dengan penelitian pengembangan atau penelitian kebijakan. e. Kontribusi terhadap pengembangan kebijakan Jika dilakukan sampai tuntas dapat memberikan kontribusi besar tdd kebijakan pendidikan VF. Sayang baru berupa pemetaan problem dan ajuan konsep. Perlu dilanjutkan dengan pengembangan model yang dapat diuji secara empirik sehingga menjadi model yang teruji. 3. Agus Amin a. Sistematika Makna “menjaga relevansi” belum terjelaskan dengan baik. Akibatnya sulit mengatakan apakah sistematika penelitian ini sudah pas atau belum. Jika dikaitkan dengan tujuan penelitian (di halaman) juga tidak gayut, karena tujuannya mengetahui kondisi SMK, kekuatan Revolusi Industri 4.0 dan relevansi SMK dg abad 21. Lebih baik diperjelas dahulu, apa yang ingin dihasilkan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		oleh penelitian ini. Kondisi SMK seharusnya sudah ada di Dit PSMK. Penjelasan tentang RI 4.0 sudah banyak dimuat di berbagai studi, misalnya terbitan WEF. Jika ingin mengkaji relevansi SMK dengan kebutuhan Abad 21 bagus. Namun tentu harus komprehensif. b. Keterkaitan antara masalah studi dengan kebijakan pendidikan yang ada Rumusan masalah belum di dirumuskan dengan jelas dalam naskah ini (mungkin ada di laporan lengkap). Hanya dapat dipetik dari data pengangguran dan penelitian Suryadi (2010) bahwa SMK terisolasi dari DUDI dan menganut supply driven. Masalah tersebut memang terkait erat dengan kebijakan pendidikan, namun sudah menjadi pengetahuan umum. Sayangnya masalah tersebut justru tidak dianalisis mengapa terjadi, sehingga dapat dicarikan alternatif solusinya. Jika memang penelitian untuk menemukan solusi dari masalah klasik tersebut, penelitian harus dilakukan secara komprehensif, dengan melihatnya dari berbagai aspek, antara lain regulasi, perkembangan iptek, kondisi sosial ekonomi dsb. c. Keterkaitan masalah dengan tujuan dan kesimpulan Karena rumusan masalah tdk ada sulit diketahui gayut tdknya dengan simpulan. Namun jika rumusan masalah seperti pada butir 1, maka tidak gayut dengan simpulan kaena memang tidak dianalisis. Dipastikan lebih dahulu, rumusan masalahnya apa? Apa yang ingin dihasilkan berdasarkan rumusan masalah itu. Baru dapat dilanjutkan. d. Rekomendasi yang bersifat operasional dan bukan yang bersifat normatif Rekomendasi (saran) yang diajukan sudah menjadi pengetahuan umum dan sudah banyak disarankan oleh para ahli dan pemerhati pendidikan. Pelaksanaan secara operasional dari rekomendasi itulah yang justru

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		diperlukan. Hasil penelitian ini difahami sebagai penelitian pendahuluan untuk mengkaji lebih komprehensif dan dalam bagaimana agar SMK atau pendidikan vokasi secara umum sesuai dengan perkembangan DUDI di abad 21 e. Kontribusi terhadap pengembangan kebijakan Jika penelitian dilakukan dan menjawab masalah yang tersirat di butir 1 akan berkontribusi dlm pengembangan kebijakan. Namun karena yang dihasilkan hanya kondisi SMK dan trend DUDI yang sudah dimuat banyak buku, maka temuan menjadi kurang bermakna. Sebaiknya dilakukan lebih dalam untuk menjawab dua masalah mendasar di pendahuluan sehingga dapat digunakan sebagai landasan kebijakan ke depan.
b.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	1. Idris HM Noor 1) Sudiyo: Klarifikasi penganggur SMK terbanyak (nominal), atau tetinggi persentase (TPT). mungkin perlu juga kajian literatur vokasi di Australia VET dan TAFE yg tidak mengenal dikotomi SMA dan SMK. tapi hanya Pendidikan menganh dengan mengambil mapel vokasi. Jawaban: Persentase 90 menyatakan tidak bisa digabung. Meski begitu kami menyampaikan beberapa opsi untuk mengatasi jumlah pengangguran SMK. Kami juga mengkaji vokasi jerman, Australia, namun tidak sempat ditampilkan. Seperti di amerika tidak ada vokasi. 2) Lucas Wattimena: Dari ketiga hasil Penelitian ini apakah Sekolah SMK akan digabungkan ataukah di rubah ke sekolah Non formal ataukah SMK di Tingkatkan. Momon ijin saran Baiknya Sekolah Vokasi dibawah Pusat Langsung karna kalo pemza ataukah Pemkot SMK kurang berkembang, Karena kurang keras berpikir

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		memajukan SMK. Apakah Sudah dipetakan Sebaran SMK di Nusantara yang terakreditasi.. agar masyarakat pun mau menyekolahkan anaknya merasa berguna bagi nusa dan bangsa ketika di smk. Terima kasih Jawaban: Tujuannya meningkatkan mutu SMK kecil bukan menghilangkan sekolah-sekolah tersebut. Ketika kita memberikan alternatif memberikan pilihan untuk meningkatkan kompetensi akademik. Penutup: Yang diharapkan dari kajian ini hasilnya bisa dimanfaatkan. Teman-teman SMK mungkin bisa membahasa bersama lebih lanjut. Merinci konsep agar lebih detail. Semoga dari pertemuan ini bisa bermanfaat juga untuk penelitian=penelitian yang akan datang. 2. Etty Sisdiana Eru Achmad dit Vokasi Menjadi salah satu telaahan, kami sangat terbuka jika di tahun mendatang ada aktivitas penelitian mendalam terkait vokasi Saya kebetulan menangani dapodik, kalau bicara data dan PKBM kebetulan dengan saya. Sangat terbuka jika ada rekan di Puslitjak untuk mendapatkan data terkait PKBM atau vokasi.Semua data vokasi menjadi tanggungjawab dit vokasi. Untuk Ibu Etty, PKBM fungsional, yang saya ingin tambahkan adalah PKBM atau pusat belajar mengajar adalah yang diselenggarakan ole swasta/ masyarakat. Untuk yang dikelola pemerintah disebut dengan SKB Papua dan papua barat ada PKBM yang menyelenggarakan vokasi fungsional, pada prinsipnya semua PKBM boleh menjalankan program kursus. Di vokasi sendiri kami sangat fokus terhadap kejuruan tadi Setiap direktorat yang di vokasi harus fokus di dua program utama. Misal kursus ada PKK dan PKW; program

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		kecakapan kerja dan program kewirausahaan Anak-anak bisa ikut sertifikasi kompetensi. PKBM biasanya mendapatkan bantuan dari ditjen vokasi Tanggapan Bu Etty Data PKBM memang kami dapatkan langsung dari tiga dinas pendidikan di Kab kota yang menjadi sasaran VF tidak muncul sebagai matapelajaran sehingga tidak bisa mendapatkan sertifikat Kalau untuk kursus memang WB bisa mengambil sertifikasi, tetapi PKBM tidak menyediakan. WB harus membayar Bantuan untuk PKBM itu darimana pak? Pak Erhu Bantuan ada berdasarkan jumlah WB PKBM juga memperoleh bantuan untuk program kursus yang diselenggarakan Program kursus kecakapan kerja adalah untuk anak usia sekolah yang tidak sekolah dan tidak kerja Bu Etty Yang menjadi kendala adalah PKBM dan pihak dinas tidak mengetahui adanya pemberian dana-dana ini Oleh karena itu di dalam salah satu saran kami adalah perlunya dinas mencari informasi dan menjadi agen informasi bagi PKBM yang menjadi binaannya Ketika kami berdiskusi dengan Puskurbuk, banyaknya PKBM lebih mewadahi kesetaraannya. Khusus untuk masyarakat lokal di Papua dan Papua Barat lebih membutuhkan ke vokasi fungsionalnya. Mereka sudah punya sumber atau potensi lokal, sehingga yang perlu dibantu adalah menyusun panduan untuk vokasi fungsional sehingga kami Prof

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Sebaiknya Kabalitbang mengundang dit SMA, SMK, Kursus, Vokasi untuk merumuskan terkait beberapa hasil kajian ini sehingga dapat menjadi masukan untuk rumusan revisi UU Sisdiknas Penutup Sebagaimana disampaikan pada paparan kami, model ini masih berupa konsep yang sebenarnya masih memerlukan beberapa tindak lanjut Kerjasama dengan berbagai pihak seperti dinas terkait, direktorat terkait, profesional, itu sangat diperlukan Mudah-mudahan model ini bisa dimanfaatkan oleh Papua dan Papua Barat dan bisa menjadi babon Model untuk daerah 3T 3. Agus Amin - Penelitian Pak Agus dan Pak idris bagus kalau dikawinkan menjadi satu kesatuan. Penelitian Pak Agus ini menjadi rasional. Mengapa Banyak menyumbang pengangguran krn dr data memang inputnya dan sarana serta gurunya kurang bagus drpd SMA. (Sri Hidayati) - Ditujukan ke Pak Agus Amin. Mengapa yang banyak diserap pekerjaan dan juga yang menganggur dari 3 jurusan yg sama? Kira-kira sebab apa. apakah memang jumlah siswanya yg juga banyak di jurusan tsb? (Sri Hidayati) - Lucas Wattimena_tanya : 1) dari ketiga hasil Penelitian ini apakah Sekolah SMK akan digabungkan ataukah di rubah ke sekolah Non formal ataukah SMK di Tingkatkan. Momon ijin saran Baiknya Sekolah Vokasi dibawah Pusat Langsung karna kalo pemza ataukah Pemkot SMK kurang berkembang, Karena kurang keras berpikir memajukan SMK. 3) Apakah Sudah dipetakan Sebaran SMK di Nusantara yang terakreditasi.. agar masyarakat pun mau menyekolahkan anaknya merasa berguna bagi nusa dan bangsa ketika di smk. - Eru Achmad (Ditjen Vokasi) : perlu dilakukan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		tindaklanjut untuk melakukan penelitian terkait pendidikan vokasi yang lebih mendalam, data – data terkait pendidikan vokasi dimasa yang akan datang akan lebih lengkap dan koprehensif. Ditjen menguatkan 4 fokus penguatan vokasi, pada bidang – bidang yang dibutuhkan pada abad 21. Pelayanan jasa saat ini lebih hidup, daripada service robotic. Kurikulum vokasi berbasis industry sedang disiapkan oleh ditjen vokasi. DUDI dan dunia kerja akan diperkuat kurikulumnya. Ditjen vokasi sedang melakukan tracing lulusan SMK tahun 2019, untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi lulusan SMK dilapangan. Yang mejadi pekerjaan Ditjen Vokasi kedepan adalah bagaimana menyelaraskan lulusan SMK dengan bidang pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikan yang dijalankan di sekolah. Tanggapan: - Banyak hal terinformasikan kepada tim penelitian, untuk melakukan sinkronisasi data yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian. - Tingkat pengangguran dan keterserapan yang disediakan pada data sakrenas tidak spesifik ukuran tahun lulusan siswa SMK, sehingga perlu dilakukan komparasi data dengan yang disediakan oleh Ditjen Vokasi. Data 3 jurusan SMK yang menganggur terbanyak berdasarkan data yang disajikan oleh data Sakernas, karena memang secara nominal banyak juga, namun secara persentase akan sama pada semua jurusan SMK. - Perlu banyak informasi yang ditambahkan terkait penelitian relevansi pendidikan vokasi, agar keluaran penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan kebijakan. - Perlu dilakukan diskusi – diskusi dengan intensitas yang lebih banyak, agar terdapat masukan – masukan yang dapat memperkaya masukan atau usulan bagi pengembangan pendidikan vokasi yang akan datang. - Perlu dikaji lebih mendalam, agar kedepan pendidikan vokasi perlu lebih diberi perhatian agar lulusan dan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		keterserapan lebih berkualitas.
c.	Penutupan	: Paparan seminar selesai pukul 16.35WIB.

VIII

Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya

MENYEMAI DAMAI, MENAPIS INTOLERANSI DI SEKOLAH

Muhammad Najib Azca, Hakimul Ikhwan, Mustaghfiroh Rahayu, Moh. Zaki Arrobi
Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) dan Departemen Sosiologi Fisipol
Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat persemaian budaya damai dengan melakukan identifikasi praktik (in)toleransi di kalangan siswa sekolah menengah atas (SMA). Riset ini menggunakan metode campuran, yaitu survei dan wawancara mendalam di enam sekolah di Yogyakarta, Surakarta, dan Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan sikap dan persepsi toleransi yang tinggi dan cukup kondusif bagi persemaian budaya damai, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Para siswa di Cianjur terlihat lebih intoleran pada empat dimensi keberagaman—agama, etnik, politik, dan ekonomi—tetapi secara umum masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya oleh LaKIP tahun 2011 dan INFID, Gusdurian, dan NU *online* tahun 2017. Para siswa di Cianjur terlihat lebih intoleran dibandingkan para siswa di Yogyakarta dan Surakarta yang dipengaruhi oleh perbedaan struktur sosiokultural di ketiga kota tersebut. Faktor kebijakan pemerintah di bidang pendidikan juga berperan penting terhadap penurunan sikap dan persepsi intoleran di kalangan siswa.

Kata kunci: budaya damai, toleransi, sekolah, keberagaman

A. Pendahuluan

Indonesia pascaruntuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru menghadapi sejumlah tantangan serius menyangkut pasang naik komunalisme, intoleransi, dan radikalisme di kalangan warganya. Belakangan ini potret buram kebinekaan tampak mulai menjangkiti kampus dan sekolah di Indonesia. Riset Farha Ciciek (2008) menemukan proses radikalisasi bisa dilakukan oleh guru yang mengajarkan mata pelajaran nonkeagamaan. Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta terhadap 500 guru agama dan 200 siswa SMA menemukan pola keberagaman intoleran di tengah masyarakat memiliki basis kuat di sekolah-sh umum, terutama di Jawa (PPIM, 2008).

Hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada Oktober 2010--Januari 2011 juga menemukan berkembangnya pemahaman radikal dan antitoleransi yang sudah masuk ke lembaga pendidikan. Dari sampel 100 SMP dan SMA umum di Jakarta dan sekitarnya yang disurvei, diperoleh data sebagai berikut: dari 993 siswa yang disurvei sekitar 48,9 persen menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral. Sisanya, 51,1 persen menyatakan kurang setuju atau sangat tidak setuju. Di antara 590 guru agama yang menjadi responden, 28,2 persen menyatakan setuju atau sangat setuju atas aksi-aksi kekerasan berbaju agama (LaKIP, 2011).

Potret serupa juga ditemukan dalam riset kualitatif yang dilakukan di dua kota pelajar utama di Jawa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Riset yang dilakukan oleh Salim dkk. (2011) dan Supraja dkk. (2013) di Yogyakarta dan Surakarta menunjukkan bahwa sekolah dijadikan sebagai arena kontestasi berbagai kelompok ideologis Islamis. Riset Supraja dkk. (2013) di tujuh SMA di Surakarta menunjukkan bahwa kerohanian islam (rohis) telah menjadi salah satu aktor utama dalam proses pengerasan identitas

keagamaan di antara para siswa yang mengarah pada munculnya pandangan dan aksi intoleran. Riset Salim dkk. (2011) di tiga sekolah favorit di Yogyakarta telah menunjukkan secara meyakinkan dominasi identitas keislaman di ruang publik yang mendorong perspektif keagamaan eksklusif.

Sejumlah riset survei yang belakangan juga menguatkan potret meningkatnya intoleransi dan radikalisme di kalangan anak muda pada era digital ini. Sebuah survei yang dilakukan oleh INFID, Gusdurian, dan NU *Online* (2017) terhadap 1.200 anak muda berusia 15 -- 30 di enam kota (Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, and Makassar) menemukan bahwa angka intoleransi di kalangan anak muda tergolong cukup tinggi, khususnya ketika terkait dengan mereka yang beragama lain. Sejumlah 48 persen responden muslim menyatakan bahwa mengucapkan *Selamat Hari Natal* kepada penganut Katolik dan Kristen atau epada penganut agama lainnya pada hari besar mereka. Namun n, menariknya, tingginya sikap intoleransi tersebut tidak berarti mereka setuju penggunaan kekerasan atas nama agama. Sebesar 88,2 persen responden menolak penggunaan kekerasan untuk membela agama mereka (www.infid.org).

Hasil riset tersebut juga diperkuat oleh riset lain yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah (2018). Dalam sebuah survei cukup ekstensif di 34 provinsi di Indonesia. Dari setiap provinsi dipilih satu kota/kabupaten secara acak (random) sebagai sampel, yaitu sebanyak 2.181 orang, yang terdiri atas 1.522 siswa dan 337 mahasiswa serta 264 guru dan 58 dosen pendidikan Agama Islam. Dari survei tersebut diperoleh 58,5% sampel memiliki pandangan radikal, sementara pandangan intoleran terbagi ke dalam dua kategori, yaitu intoleransi internal sebanyak 51,1% dan intoleransi eksternal sebesar 34,3%. Riset lain yang dilakukan oleh Alvara Research Centre (2018) menemukan bahwa terjadi tren peningkatan radikalisme di antara siswa SMA yang terlihat dari 23,3% siswa mendukung perjuangan mendirikan negara Islam dan 21,9% siswa mendukung implementasi syariah Islam di Indonesia. Studi PPIM juga menengarai bahwa pada level tindakan, para responden pemuda ini tergolong moderat/toleran. Mereka yang tergolong dalam kategori radikal (di level tindakan), hanya berjumlah 7,0% dan 17,3% untuk tindakan intoleransi eksternal, sementara intoleransi internal di level tindakan lebih tinggi yaitu sebesar 34,1%.

Sejumlah riset tersebut menunjukkan sekurangnya dua hal penting. Pertama, pandangan dan sikap intoleran telah dimiliki oleh sejumlah besar anak muda. Kedua, pandangan dan sikap intoleran tersebut menyebabkan munculnya tindakan intoleran dan radikal meskipun tidak secara signifikan. Terjadinya peristiwa pengeboman yang melibatkan sejumlah anak muda di Surabaya pada 2019 lalu telah menimbulkan pertanyaan lebih jauh benarkah anak muda kita tidak mendukung tindakan intoleran? Apa yang mesti dilakukan untuk mencegah hal serupa terjadi pada waktu mendatang?

Berdasarkan sejumlah studi yang dilakukan sebelumnya, kami mengidentifikasi sekurangnya empat faktor dalam reproduksi intoleransi di kalangan generasi muda, termasuk siswa SMA. Pertama adalah peran kelompok sebaya (Azca, Ikhwan & Arrobi, 2019). Kelompok sebaya terbukti memainkan peran utama dalam pengerasan identitas eksklusif dan promosi aksi intoleran dan kekerasan di kalangan anak muda. Kedua, dominasi narasi Islamisme dan konten intoleran dalam literatur keagamaan di kalangan kaum muda. Riset CONVEY PPIM UIN Syarif Hidayatullah (2018) juga menemukan literatur keagamaan kaum muda didominasi oleh literatur Islamisme. Riset lain yang kami lakukan di sejumlah masjid di Yogyakarta juga menemukan bahwa narasi intoleransi cukup banyak diselipkan di dalam dakwah yang dilakukan oleh sejumlah ulama radikal (Ikhwan dkk., 2015). Hal tersebut terutama acap terjadi pada saat kontestasi politik memanas sehingga rumah ibadah kerap juga digunakan sebagai piranti mobilisasi politik (Lussier, Azca, Ikhwan & Kustiningsih, 2020). Faktor ketiga adalah peranan teknologi digital dalam menyuburkan kaum muda intoleran sebagaimana terjadi pada kasus Siska Nur Azizah, seorang mahasiswi belia yang berupaya untuk membantu kelompok narapidana jihadis-teroris yang ditahan di Mako Brimob. Faktor lain adalah kegagalan sistem pendidikan di sekolah untuk melawan radikalisme dan mengembangkan toleransi dan budaya damai di kalangan siswa. Kurangnya

kesadaran dan tiadanya kurikulum multikulturalisme yang sistematis telah menghasilkan maraknya intoleransi di kalangan siswa (Salim dkk., 2011; Supraja dkk., 2013).

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur tersebut, riset merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) apa ragam intoleransi di kalangan siswa SMA?; (2) bagaimana proses sosial dan individual yang dialami oleh siswa sehingga bersikap dan berperilaku intoleran?; (3) apa kapasitas dan sumberdaya yang tersedia untuk membangun budaya damai di SMA?

B. Metode

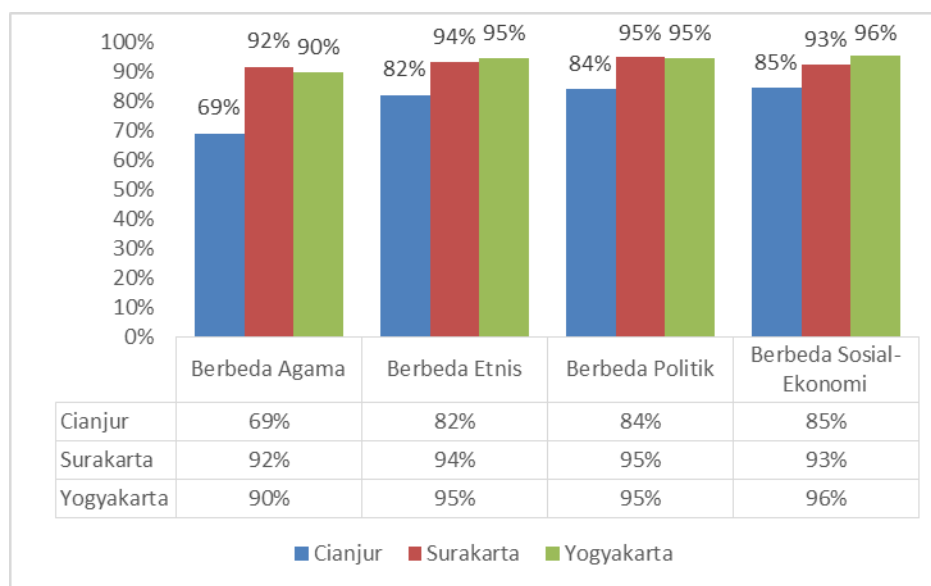
Riset ini menggunakan metode campuran (survei dan kualitatif) yang dilakukan di enam sekolah di Yogyakarta, Surakarta, dan Cianjur. Beberapa riset sebelumnya (Supraja, 2013; Salim (dkk., 2011) menyebutkan bahwa Yogyakarta dan Surakarta cukup menonjol ketika berbicara mengenai radikalisme di kalangan anak muda. Sementara itu, di Cianjur, penelitian Fercha Ciciek menemukan 13 persen siswa mendukung gerakan radikal dan 14 persen setuju dengan aksi terorisme. Di ketiga kota tersebut, kami memilih enam sekolah yang menunjukkan keragaman latar belakang, lingkungan akademik, budaya sekolah, hubungan siswa – alumni, kegiatan siswa, kegiatan sekolah, dan juga perspektif para guru mengenai in/toleransi. Enam sekolah tersebut adalah SMA Negeri 3 Yogyakarta, SMA 5 Yogyakarta, SMA 3 Surakarta, SMA 5 Surakarta, SMA 1 Cianjur, dan SMA 1 Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur yang mewakili sampel sekolah yang beragam dan kurang beragam, favorit dan kurang favorit, status sosial ekonomi orangtua siswa yang atas dan menengah. Semua sekolah dalam riset ini adalah sekolah negeri yang memiliki mandat untuk mendidik semua anak Indonesia tanpa diskriminasi, baik agama, etnik, ras, maupun golongan.

Survei dilaksanakan pada November 2020 terhadap 300 siswa di enam sekolah. Data dari survei ini diolah menjadi bahan untuk menyusun instrument. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif ini melalui tetnik wawancara dan observasi lingkungan sekolah. Wawancara dilakukan terhadap siswa, kepala sekolah dan wakilnya, serta guru.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sikap dan Persepsi Siswa terhadap Keberagaman

Penelitian ini mengidentifikasi sikap dan persepsi siswa SMA di Yogyakarta, Surakarta, dan Cianjur terkait dengan empat dimensi keberagaman, yaitu agama, etnik, politik, dan ekonomi. Grafik 1 menunjukkan para siswa di Cianjur memiliki persepsi dan sikap yang paling rendah terkait dengan keempat dimensi keberagaman. Dalam hal keberagaman agama, para siswa di Surakarta terlihat paling menonjol, yaitu 92 persen siswa menerima keberagaman agama, diikuti kemudian oleh siswa di Yogyakarta (90 persen), dan Cianjur (69 persen). Terkait dengan perbedaan etnik dan politik, para siswa di Surakarta dan Yogyakarta memiliki potensi menerima keberagaman yang relatif sama besar, yaitu pada 94 dan 95 persen, sementara para siswa di Cianjur memiliki sikap dan persepsi yang jauh lebih rendah, yaitu 82 persen untuk perbedaan etnik dan 84 persen untuk perbedaan politik. Para siswa di Yogyakarta terlihat lebih menonjol dalam menerima perbedaan sosial ekonomi, yaitu 96 persen, berbanding dengan Surakarta sebesar 93 persen, dan Cianjur jauh lebih rendah pada 85 persen.



Grafik 1 Cianjur, Yogyakarta, dan Surakarta dalam Empat Dimensi Keberagaman

Hasil survei ini menemukan data berbeda dengan survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga lain. Misalnya, dalam hal paham kekerasan di kalangan siswa, survei ini menemukan persentase siswa yang setuju dengan tindak kekerasan fisik atas nama agama yang jauh lebih kecil, yaitu 15 persen untuk Cianjur, 9 persen Surakarta, dan 6 persen Yogyakarta dibandingkan dengan survei LaKIP (2011) terhadap 100 SMP dan SMA Umum di Jakarta yang menunjukkan 48,9 persen siswa setuju kekerasan atas nama agama.

Dalam hal reproduksi paham dan sikap intoleransi, survei ini juga menemukan data berbeda dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya oleh Salim dkk. (2011) dan Supraja dkk. (2013). Survei ini menemukan data kegiatan ekstrakurikuler sekolah justru menjadi medium persemaian budaya damai di sekolah. Pengalaman dalam keberagaman agama, etnik, politik, dan ekonomi justru didapatkan oleh para siswa dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Data ini berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Salim dkk. (2011) dan Supraja dkk. (2013) yang mengindikasikan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya kerohanian Islam (rohis) sebagai inkubasi bagi reproduksi penguatan identitas keagamaan.

a. Keberagaman Agama

Penelitian ini menggunakan beberapa indikator untuk melihat dimensi keberagaman agama, seperti pelaksanaan ibadah keagamaan, pengetahuan dan paham keagamaan, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial keagamaan. Dari indikator tersebut diperoleh data religiusitas para siswa SMA dan sikap mereka terhadap agama dan keberagaman agama. Agama sangat penting bagi para siswa di Cianjur, jauh melebihi sikap siswa di Surakarta dan Yogyakarta. Di Cianjur terdapat 76 persen siswa yang menjadikan agama sangat penting dalam kehidupan mereka. Di Surakarta dan Yogyakarta persentasenya jauh lebih kecil, yaitu 55 persen dan 46 persen. Besarnya peran agama bagi para siswa di Cianjur berkorelasi terhadap tingginya keterlibatan para siswa dalam organisasi keagamaan di sekolah. Terdapat 50 persen siswa yang aktif mengikuti organisasi keagamaan sekolah di Cianjur. Di Surakarta sebesar 45 persen dan di Yogyakarta 32 persen siswa yang mengikuti organisasi keagamaan di sekolah.

Dalam hal kegiatan keagamaan di luar sekolah, siswa di Cianjur paling rendah partisipasinya dibandingkan dengan siswa di Yogyakarta dan Surakarta. Aktivitas dalam organisasi keagamaan di luar sekolah justru paling diminati oleh para siswa di Surakarta. Terdapat 39 persen siswa di Surakarta yang menyatakan mengikuti organisasi keagamaan di luar sekolah. Angka ini jauh lebih

besar dibandingkan dengan para siswa di Cianjur (21 persen) dan Yogyakarta (25 persen). Di luar jam sekolah, siswa di Surakarta terlihat lebih antusias untuk terlibat dalam organisasi sosial kepemudaan dibandingkan dengan siswa di Cianjur dan Yogyakarta. Terdapat 41 persen siswa di Surakarta terlibat dalam organisasi sosial kepemudaan dibandingkan dengan 23 persen siswa di Cianjur dan 29 persen siswa di Yogyakarta.

Hasil survei menemukan bahwa siswa SMA di Cianjur memiliki pengalaman terlibat dalam kegiatan sosial dengan teman berbeda agama paling rendah dibandingkan dengan siswa di Surakarta dan Yogyakarta. Hanya 69 persen siswa di Cianjur yang pernah bekerja sama, atau memiliki pengalaman bekerja sama dengan teman berbeda agama. Sebanyak 95 persen siswa di Yogyakarta dan 94 persen siswa di Surakarta pernah memiliki pengalaman bekerja sama dengan teman sebaya berbeda agama.

Para siswa SMA di Surakarta cenderung lebih positif dan kondusif terhadap perbedaan agama sebagaimana tercermin dalam penerimaan ketua OSIS berbeda agama, perayaan hari besar keagamaan, berteman dengan beda agama, dan penolakan kekerasan fisik berbasis agama. Persentase tertinggi siswa yang menoleransi kekerasan fisik berbasis agama dimiliki oleh siswa di Cianjur sebesar 15 persen. Di Yogyakarta 6 persen siswa dan di Surakarta 9 persen siswa yang menoleransi kekerasan fisik berbasis agama. Sikap para siswa SMA di Surakarta juga lebih positif dalam perayaan hari besar agama, dan Yogyakarta paling positif terhadap pertemanan beda agama. Di Cianjur persentase siswa yang menolak mengucapkan selamat hari besar keagamaan sangat menonjol, yaitu sebesar 34 persen siswa, berbanding 11 persen siswa di Yogyakarta dan 0 persen di Surakarta. Penolakan penggunaan fasilitas sekolah oleh pihak berbeda agama juga tertinggi di Cianjur, yaitu 20 persen berbanding 5 persen di Surakarta dan Yogyakarta. Siswa di Cianjur juga memiliki penolakan sangat besar terhadap ketua OSIS beda agama, yaitu 37 persen, berbanding 10 persen di Yogyakarta dan 4 persen di Surakarta.

Para siswa di Cianjur memiliki pengalaman keseharian berteman dengan teman berbeda agama paling rendah dibandingkan dengan para siswa di Yogyakarta dan Surakarta. Terdapat sebanyak 45 persen siswa di Cianjur yang menyatakan tidak memiliki teman dekat berbeda agama. Di Yogyakarta dan Surakarta hanya 13 persen dan 8 persen siswa yang tidak memiliki teman dekat berbeda agama. Pengalaman pertemanan ini membentuk sikap para siswa Cianjur yang cenderung lebih tertutup terhadap perbedaan agama dibandingkan dengan para siswa di Surakarta dan Yogyakarta.

Hasil survei ini menemukan data berbeda dengan riset sebelumnya oleh LaKIP (2011) terkait dengan sikap para siswa terhadap kekerasan fisik berbasis agama. Survei LaKIP terhadap 100 SMP dan SMA Umum di Jakarta periode Oktober 2010--Januari 2011 menunjukkan 48,9 persen siswa setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral. Hanya 51,1 persen siswa yang kurang setuju atau sangat tidak setuju. Data survei PSKP-Sosiologi UGM November 2020 di enam SMA di Yogyakarta, Surakarta, dan Cianjur menemukan persentase yang jauh lebih kecil, yaitu 15 persen di Cianjur, 9 persen di Surakarta, dan 6 persen di Yogyakarta yang mentoleransi tindak kekerasan fisik berbasis agama.

Survei ini juga menemukan data penolakan perayaan hari besar agama yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan riset sebelumnya oleh INFID, Gusdurian dan NU Online (2017) yang menunjukkan 48 persen anak muda menolak mengucapkan Selamat Hari Natal. Dalam survei PSKP-Sosiologi UGM ini persentase penolakan mengucapkan Selamat Hari Natal jauh lebih kecil, yaitu 11 persen di Yogyakarta, bahkan 0 persen di Surakarta. Penolakan cukup tinggi terjadi di Cianjur, yaitu 34 persen. Namun, angka tersebut masih lebih rendah dari hasil survei INFID, Gusdurian dan NU Online tersebut.

b. Keberagaman Etnik

Para siswa di Yogyakarta, Surakarta, dan Cianjur memiliki exposure keberagaman etnik yang relatif kaya melalui teman sebaya yang berasal dari beragam etnik, seperti Bali, Cina, Jawa-Arab, Jawa-Batak, Jawa-Cina, Jawa-Makassar, Jawa-Minangkabau, Jawa-Sunda, Jawa-Sunda-Cina, dan Sumatra-Cina. Siswa SMAN 3 Yogyakarta terlihat memiliki keberagaman etnik yang cukup tinggi sebagaimana terlihat dari beragamnya latar belakang etnik para siswa. Para siswa di SMAN 1 Ciluku terlihat memiliki komposisi etnik yang relatif paling homogen dibandingkan dengan lima sekolah lain yang disurvei dalam penelitian ini.

Etnik Jawa mendominasi komposisi etnik di sekolah SMA di Yogyakarta dan Surakarta dengan persentase lebih dari 80 persen. Di Cianjur dominasi latar belakang etnik siswa adalah Sunda, bahkan di SMAN 1 Ciluku etnik Sunda sangat dominan dan cenderung terjadi homogenitas etnik di sekolah. Dari enam sampel sekolah yang disurvei dalam riset ini, komposisi etnik Jawa terbanyak di SMAN 5 Yogyakarta dan terendah di SMAN 3 Surakarta. Komposisi etnik Sunda di SMAN 1 Cianjur dan SMAN 1 Ciluku relatif sama dengan keragaman etnik yang sedikit lebih banyak di SMAN 1 Cianjur.

Keberagaman komposisi etnik terlihat memiliki pengaruh dalam menciptakan ruang pengalaman siswa dalam kegiatan sosial bersama dengan teman sebaya dari etnik lain. Siswa di sekolah SMA 3 di Yogyakarta memiliki pengalaman kegiatan sosial bersama etnik berbeda tertinggi, yaitu 94 persen, diikuti oleh sekolah SMAN 5 Surakarta (92 persen), dan SMAN 3 Surakarta dan Sekolah SMA 5 Yogyakarta memiliki persentase yang sama sebesar 86 persen. Di Cianjur para siswa di SMAN 1 Ciluku memiliki 38 persen siswa yang tidak memiliki pengalaman kegiatan sosial dengan teman berbeda etnik. Angka ini sekaligus merupakan persentase tertinggi dari enam sekolah. Secara umum para siswa di Cianjur—tecemin dari SMAN 1 Cianjur dan SMAN 1 Ciluku—memiliki pengalaman keberagaman etnik paling rendah dibandingkan dengan sekolah di Yogyakarta dan Surakarta.

Rendahnya pengalaman dalam keberagaman etnik memengaruhi sikap para siswa di Cianjur terhadap tindak kekerasan fisik berbasis etnik, akses terhadap fasilitas sekolah, dan ketua OSIS berbeda etnik. Dalam hal kekerasan fisik berbasis etnik, terdapat 13 persen siswa yang cenderung dapat menoleransi tindakan tersebut. Di Yogyakarta dan Surakarta persentasenya jauh lebih kecil, yaitu 6 persen dan 8 persen. Penolakan penggunaan fasilitas sekolah oleh etnik berbeda juga sangat menonjol di Cianjur, yaitu 20 persen siswa menolak. Di Yogyakarta dan Surakarta penolakan dilakukan oleh 2 persen dan 1 persen siswa. Kecenderungan yang sama juga terjadi dalam pemilihan ketua OSIS dengan 13 persen siswa di Cianjur menolak ketua OSIS berbeda etnik, sementara di Surakarta dan Yogyakarta penolakan dilakukan oleh 2 dan 4 persen siswa.

c. Keberagaman Politik

Penelitian ini melakukan survei untuk mengetahui aktivitas para siswa yang memiliki keterkaitan dengan pilihan dan pandangan politik mereka tecermin. Pertama, keterlibatan para siswa dalam gerakan petisi. Kedua, penggunaan sosial media oleh para siswa untuk merespons isu atau momen politik tertentu. Ketiga, keterlibatan para siswa dalam aksi demonstrasi. Keempat, tindakan aksi mogok yang dilakukan oleh para siswa sebagai sikap politik. Dari keempat aktivitas tersebut terlihat bahwa menyampaikan pendapat dan pandangan melalui medium petisi merupakan praktik atau aktivitas politik yang paling banyak dilakukan oleh para siswa. Berikutnya, dengan level intensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan petisi, para siswa juga menggunakan media sosial untuk menyampaikan pandangan dan pilihan politik mereka. Sangat sedikit siswa yang memiliki pengalaman keterlibatan dalam aksi demonstrasi atau aksi mogok.

Sikap para siswa di Cianjur berbeda cukup signifikan dengan para siswa di Yogyakarta dan Surakarta

dalam hal perbedaan politik. Terdapat sejumlah 16 persen siswa di Cianjur tidak setuju memiliki ketua OSIS dari kelompok yang berbeda pandangan politik, sementara di Surakarta dan Yogyakarta prosentasi penolakan sebesar 4 dan 7 persen. Perbedaan cukup menonjol juga terlihat dalam penolakan terhadap penggunaan fasilitas sekolah oleh kelompok berbeda pandangan politik yang menunjukkan penolakan oleh 17 persen siswa di Cianjur. Di Yogyakarta dan Surakarta penolakan siswa sebesar 3 persen. Terdapat 6 dan 8 persen siswa di Yogyakarta dan Surakarta menolak ketua OSIS dari kelompok berbeda pandangan politik, sementara persentase penolakan lebih besar ditunjukkan oleh 14 persen siswa di Cianjur.

Data survei menunjukkan para siswa di Cianjur cenderung lebih tertarik terhadap isu politik dibandingkan dengan para siswa di Yogyakarta dan Cianjur. Terhadap 74 persen siswa di SMAN 1 Cianjur dan 80 persen siswa di SMAN 1 Ciluku yang cukup tertarik dan sangat tertarik terhadap isu politik. Persentase ini melebihi ketertarikan para siswa di empat sekolah di Surakarta dan Yogyakarta. Minat yang tinggi para siswa di Cianjur terhadap politik tecermin dalam pengalaman mereka melakukan presentasi tentang organisasi di depan orang yang berbeda pandangan politik. Terdapat 59 persen siswa di Cianjur yang pernah melakukan presentasi tentang organisasi mereka dihadapan orang yang berbeda pandangan politik. Presentasi ini jauh di atas para siswa di Yogyakarta (48 persen) dan Surakarta (42 persen). Para siswa di Surakarta memiliki pengalaman paling minimal dalam presentasi di hadapan orang berbeda pandangan politik.

Dibandingkan dengan isu politik, para siswa di enam sekolah terlihat lebih tertarik terhadap persoalan publik, yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dan keterpenuhan kebutuhan warga masyarakat. Isu publik telah menjadi perhatian lebih dari 80 persen siswa di Cianjur dan Yogyakarta, bahkan di SMAN 5 Yogyakarta ketertarikan siswa mencapai 90 persen. Meskipun demikian, para siswa di Surakarta terlihat memiliki ketertarikan yang paling rendah terhadap isu publik dibandingkan dengan para siswa di Cianjur dan Yogyakarta sebagaimana tecermin dari 74 persen dan 78 persen siswa saja di Surakarta yang tertarik terhadap isu publik.

Dalam hal pengalaman berkegiatan sosial bersama teman berbeda pandangan politik terlihat para siswa di Surakarta memiliki pengalaman paling rendah dibandingkan dengan para siswa di Yogyakarta dan Cianjur. Di Surakarta terdapat 79 persen siswa yang memiliki pengalaman tersebut, sementara di Yogyakarta mencapai 89 persen dan di Cianjur sebesar 82 persen.

d. Keberagaman Ekonomi

Data survei menunjukkan para siswa di Yogyakarta dan Surakarta memiliki exposure cukup tinggi dalam pergaulan dengan teman sebaya yang berbeda strata sosial ekonomi. Di Yogyakarta semua siswa memiliki pengalaman berkegiatan sosial bersama teman yang berbeda strata sosial ekonomi. Di Surakarta hanya terdapat 2 persen siswa yang menyatakan tidak pernah berkegiatan sosial bersama teman yang berbeda strata sosial ekonomi. Berbeda dengan para siswa di kedua kota tersebut, terdapat persentase cukup tinggi siswa yang tidak memiliki pengalaman aktivitas sosial bersama teman berbeda status ekonomi.

Tingginya pengalaman para siswa di Surakarta dan Yogyakarta berinteraksi dengan teman sebaya berbeda strata sosial ekonomi membentuk sikap mereka untuk menolak kekerasan fisik berbasis sentimen kelas sosial tersebut. Di kedua kota tersebut, lebih dari 90 persen siswa menyatakan penolakan mereka terhadap tindak kekerasan fisik berbasis kelas sosial ekonomi. Di Cianjur penolakan tersebut lebih rendah.

Dari keempat dimensi keberagaman—agama, etnik, politik, dan ekonomi—terlihat para siswa di Yogyakarta dan Surakarta memiliki modalitas paling tinggi dalam perbedaan strata sosial ekonomi.

Hal ini tecermin dari dua hal. Pertama, para siswa memiliki pengalaman paling tinggi dalam kehidupan sosial keseharian berinteraksi dengan teman sebaya yang berlatar strata sosial ekonomi berbeda. Kedua, para siswa memiliki sikap yang sangat kondusif dalam keberagaman strata sosial ekonomi dengan menolak terjadinya kekerasan fisik berbasis stratifikasi sosial ekonomi.

Dengan menggunakan tiga indikator *civic skills*, yaitu presentasi di hadapan kelompok berbeda, melakukan pendampingan kepada kelompok berbeda, dan aktivitas sosial bersama kelompok berbeda dapat diketahui bahwa mayoritas siswa—lebih dari 50 persen—memiliki exposure dengan tiga ragam *civic skills* tersebut. *Civic skills* tertinggi yang dimiliki oleh para siswa di Yogyakarta, Surakarta, dan Cianjur adalah melakukan aktivitas sosial bersama kelompok agama, etnik, politik, dan status ekonomi berbeda. Beberapa sekolah memiliki persentase di atas 90 persen, bahkan dua sekolah mencapai 100 persen, dalam aktivitas sosial terhadap kelompok berbeda secara agama, etnik, politik, dan ekonomi.

Modalitas *civic skills* tertinggi kedua dimiliki oleh para siswa di Yogyakarta, Surakarta, dan Cianjur adalah melakukan presentasi di hadapan kelompok berbeda agama, etnik, politik, dan status ekonomi. Keenam sekolah memiliki kemampuan *civic skill* dalam presentasi dengan kisaran 40--60 persen siswa. Presentasi dengan perbedaan kelas sosial-ekonomi memiliki angka tertinggi di antara tiga perbedaan lainnya. *Civic skill* terendah—dari tiga kategori *civic skill*—adalah aktivitas pendampingan kepada kelompok agama, etnik, politik, dan status ekonomi berbeda. Rata-rata kurang dari 50 persen siswa di SMA Yogyakarta, Surakarta, dan Cianjur tidak memiliki pengalaman pendampingan terhadap kelompok berbeda.

2. Faktor Pembentuk Budaya Damai dan Toleransi di Sekolah

Modalitas budaya damai dan toleransi yang cukup tinggi sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, berasal dari kombinasi faktor lingkungan keluarga, pertemanan sebaya, baik media massa *online* maupun *offline* serta media sosial. Sebaliknya, konten dan materi intoleransi seringkali ditemukan para siswa melalui faktor yang tersebut di atas. Data survei menunjukkan hal yang menarik tentang pertanyaan mengenai akses siswa pada informasi yang terkait dengan isu-isu toleransi dan intoleransi, seperti ujaran kebencian, larangan mengucapkan selamat pada hari besar agama lain, dan larangan memilih pemimpin yang berbeda latar belakang.

Pada pertanyaan mengenai sumber pesan terkait dengan ujaran kebencian, mayoritas responden siswa di empat sekolah mengemukakan faktor sosial media, media *online*, dan televisi yang paling dominan. Mereka menyatakan paling banyak menemukan pesan yang terkait dengan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial instagram, media *online*, teman, TV, *whatsapp*, *instagram*, *twitter*, FB, keluarga, buletin/selebaran, *line*, mading, dan terakhir radio. Tampak jelas bahwa akses terhadap informasi yang terkait dengan ujaran kebencian didominasi oleh media berbasis *platform digital* (media *online* dan media sosial), pertemanan dan televisi. Tren dominasi media *online* dan media sosial juga terjadi ketika responden ditanyakan mengenai sumber akses larangan mengucapkan selamat pada hari besar agama lain.

Sekali lagi faktor yang paling signifikan memengaruhi siswa dalam akses konten mengenai larangan ucapan selamat hari besar agama lain adalah media *online*, media sosial instagram, dan pertemanan. Akses informasi siswa pada larangan ini bersumber pada, berturut-turut dari yang terbesar ke terkecil, adalah media *online*, instagram, teman, keluarga, TV, WA, FB, *twitter*, buletin/selebaran, mading, *line*, dan radio. Meskipun urutannya sedikit berubah, tiga besar teratas tetaplah sama dengan pertanyaan akses tentang pesan terkait dengan ujaran kebencian, yakni media *online*, media sosial instagram, dan pertemanan. Hal yang menarik, faktor keluarga cukup signifikan dalam akses siswa pada isu larangan mengucapkan selamat pada hari besar agama lain. Keluarga menempati urutan keempat sebagai sumber informasi yang paling sering diakses.

Data survei ini dapatlah dibaca bahwa para siswa di enam sekolah yang kami teliti memiliki akses yang sangat tinggi pada dunia digital khususnya pada media berbasis *online* dan media sosial. Di kedua pertanyaan tersebut, media massa dan media sosial berbasis *platform online* mendapat proporsi yang signifikan. Baik media *online* maupun media sosial selalu masuk dalam dua sumber yang paling banyak diakses para siswa terkait dengan pesan ujaran kebencian dan larangan mengucapkan hari besar agama lain. Media sosial di sini yang paling dipilih paling banyak dalam survei adalah instagram, WA, FB, *twitter*, dan *line* yang menempati tempat terakhir di media sosial disebabkan oleh menurunnya jumlah penggunaanya.

Faktor kedua yang paling signifikan dalam akses informasi dan pembentukan pandangan serta nilai (in)toleran siswa adalah lingkungan pertemanan. Faktor pertemanan sebaya menempati posisi teratas ketiga dalam dua diagram di atas. Artinya, setelah media masa *online* dan media sosial, lingkungan pertemanan merupakan dimensi pembentuk akses dan pandangan siswa yang paling signifikan dalam isu-isu toleransi dan intoleransi. Hal ini senada dengan temuan riset kami sebelumnya yang mendemonstrasikan pentingnya peranan teman sebaya (*peer group*) dalam proses formasi pandangan dan sikap radikal di kalangan anak muda di Yogyakarta (Ikhwan dkk., 2015). Hal ini pulalah yang mendorong kami untuk fokus pada penguatan ekosistem budaya damai melalui pendekatan teman sebaya.

Menariknya, meskipun media masa *online* dan media sosial mendapat skor yang tinggi dalam survei yang berarti sering diakses oleh para siswa, media konvensional seperti TV tidak serta- merta ditinggalkan. Pada pertanyaan mengenai sumber akses Larangan Memilih Pemimpin Berbeda Latar Belakang, survei menemukan TV menjadi salah tiga akses informasi yang paling sering ditemui para siswa. TV menempati posisi ketiga setelah media online dan media sosial Instagram sebagai sumber yang paling sering diakses dalam menemukan konten larangan memilih pemimpin berbeda latar belakang.

Pada pertanyaan ini urutan yang paling sering diakses dalam informasi larangan memilih pemimpin berbeda latar belakang adalah (berurutan): media *online*, instagram, televisi, teman, keluarga, *whatapps*, FB, *twitter*, buletin/selebaran, *line*, *madding*, dan radio. Selain TV yang menjadi faktor penting, faktor keluarga juga terlihat cukup signifikan dalam menyediakan akses informasi ini. Selengkapnya dapat dilihat dalam began di atas.

Dari tiga diagram di atas mengenai akses informasi pada konten toleransi dan intoleransi, ditemukan pola bahwa tiga faktor terpenting berkontribusi dalam proses pembentukan pandangan dan sikap (in) toleran siswa. Ketiga faktor tersebut adalah media khususnya media *online* dan media sosial (instagram), lingkungan pertemanan, dan juga keluarga. Tiga faktor di atas ini secara konsisten muncul di ketiga pertanyaan mengenai akses informasi terhadap nilai toleransi dan intoleransi. Tiga faktor ini muncul secara signifikan juga ketika dilakukan *zoom in* data di tiap sekolah.

D. Kesimpulan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, riset ini menemukan sejumlah fakta yang mengantarkan kesimpulan yang berbeda dibandingkan dengan sejumlah riset lain sebelumnya bahwa potensi toleransi dan budaya damai masih cukup tinggi di kalangan siswa di enam SMA negeri di Yogyakarta, Surakarta, dan Cianjur yang diteliti. Sekalipun dibandingkan dengan empat sekolah di Yogyakarta dan Surakarta, para siswa di dua sekolah di Cianjur terlihat memiliki potensi toleransi dan budaya damai yang paling rendah. Hal ini diduga terkait dengan konteks historis dan sosiologis Jawa Barat yang lebih rentan terhadap isu intoleransi dan radikalisme karena merupakan basis gerakan radikal Darul Islam (DI) pada tahun 1950-an dan mengalami transformasi ke dalam bentuk baru pada tahun 2000-an.

Hasil riset ini terlihat berbeda dengan riset lain sebelumnya bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penurunan sikap dan persepsi intoleransi di kalangan siswa merupakan hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, pimpinan sekolah, siswa, maupun alumni di sekolah- tersebut. Seperti diketahui, sejak munculnya sejumlah laporan riset yang mengabarkan tingginya tingkat intoleransi dan radikalisme di berbagai sekolah di tanah air, sejumlah pihak melakukan upaya intervensi, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, pihak pimpinan sekolah yang menjadi sorotan, para siswa dan alumni sekolah- tersebut, juga berbagai lembaga sosial dan keagamaan, termasuk lembaga kajian dan advokasi kebijakan.

E. Saran

Berdasarkan hasil riset dan advokasi yang dilakukan oleh tim PSKP-Sosiologi UGM tersebut, disusun sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan riset dan advokasi bina damai dalam skala yang lebih luas, baik di Kota Yogyakarta, Surakarta, dan Cianjur maupun di wilayah lain di Indonesia. Program advokasi yang berbasis riset sangat berguna untuk mengetahui dan memetakan masalah dan potensi yang ada di wilayah riset sehingga upaya advokasi yang disusun lebih tepat dan mengena terhadap sasaran program.
2. Perlu strategi dan upaya kreatif dalam melakukan program bina damai di kalangan anak muda, khususnya di kalangan siswa SMA. Pendekatan konvensional yang menggunakan kerangka analisis trend intoleransi dan radikalisme di kalangan anak muda terkadang justru bersifat kontraproduktif karena berpotensi stigmatik dan justru mengundang resistensi, baik dari siswa, guru, maupun pimpinan sekolah.
3. Penggunaan terminologi bina damai atau *peace building* ataupun istilah lain yang memfokuskan dimensi dan kapasitas positif yang dimiliki oleh siswa dan sekolah berpeluang untuk merangsang inisiatif, partisipasi, dan kolaborasi aktif dari siswa maupun

DAFTAR PUSTAKA

- Azca, M.N., Ikhwan, H., Arrobi, Moh. Zaki. (2019). a tale of two royal cities: The narratives of islamists' intolerance in Yogyakarta and Solo *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* volume 57 No.1. IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. DOI: <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.25-50>
- Ikhwan, Hakimul; Azca, M.N.; Arrobi, M.Z.; dan Aidulsyah, F. (2020). *Jejak islamisme di Yogyakarta dan Surakarta*. Laporan Penelitian. Tidak dipublikasikan
- LaKIP. (2010). Radikalisme di kalangan pelajar dan guru. Laporan Hasil Penelitian.
- Lussier, D.; Azca, M.N.; Ikhwan, H.; dan Kustiningsih, W. (2020). *From pulpit to protest: Religious practice and political participation in Indonesia*. New York: Pace University Press.
- Pribadi, Khelmy K. & Fitriyana, Pipit Aidul (Ed.). (2018). *Menjaga benteng kebinekaan di sekolah: Studi kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon*. Jakarta: Maarif Institute.
- PPIM UIN Jakarta. (2018). *Gen Z: Kegagalan Identitas keagamaan*. Editor: Didin Syafruddin, & Ismatu Ropi. Jakarta: PPIM UIN Jakarta.
- Salim H.S.; Hairus, Najib Kailani; dan Nikmal Azekiyah. (2011). *Politik ruang publik sekolah: negosiasi*

dan resistensi di SMUN di Yogyakarta. Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM.

Supraja, Muhammad, Aidulsyah Fachry. (2013). *Kerentanan, kekerasan dan reproduksi sosial; kaum muda dan radikalisme (Studi kasus radikalisme rohis di eks-Karesidenan Surakarta).* Laporan Riset. Yogyakarta: Departemen Sosiologi, Universitas Gadjah Mada.

Tadjoeddin, Mohammad Zulfan. (2002). *Anatomy of social violence in the context of transition: The case of Indonesian 1990-2001.* Working Paper. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR)

Tajfel, H.; Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin; S. Worchel (eds.). *The social psychology of intergroup relations.* Monterey, CA: Brooks/Cole. pp. 33–47.

Tajfel, H.; Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behaviour. In S. Worchel; W. G. Austin (eds.). *Psychology of Intergroup Relations.* Chicago, IL: Nelson-Hall. pp. 7–24.

Wahid Foundation. (2016). Riset potensi radikalisme di kalangan aktivis rohani Islam sekolah-sekolah negeri. Laporan Hasil Penelitian.

KAMPUNG ADAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Zaenal Abidin Eko Putro
Indonesia' Centre of Asian Studies (Cenas)

ABSTRAK Keberadaan kampung adat sedemikian penting karena dipandang sebagai salah satu pertahanan budaya bangsa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat peduli dengan keberadaan kampung adat di wilayahnya. Salah satu kampung adat yang cukup dikenal luas di Jawa Barat adalah Kampung Adat Cirendeuy yang terletak di wilayah Kota Cimahi, Jawa Barat. Walaupun berada di daerah urban, Kampung Adat Cirendeuy ini mampu menampilkan kekayaan budaya lokal khas kesundaan, mulai dari bahasa, aksara, tarian, dan gamelan khas kesundaan. Kampung adat ini membuka diri bagi kunjungan wisatawan untuk mengenali dan memahami seni dan budaya Sunda. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, riset ini diarahkan untuk melihat bagaimana bentuk perhatian pemerintah dan upaya internal masyarakat adat dalam mendukung kampung adat ini menjadi objek dan daya tarik wisata (ODTW). Penelitian ini juga akan melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sosial dan ekonomi kampung adat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah dan upaya masyarakat adat cukup besar dalam mewujudkan kampung ini sebagai kampung adat di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Sejauh ini belum ditemukan kasus penularan COVID-19, tetapi dapat dimaklumi bahwa menurunnya jumlah pengunjung ke kampung adat ini adalah akibat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang digalakkan oleh Pemerintah.

Kata kunci: daya tahan, kampung adat, pandemic COVID-19, wisata budaya

A. Pendahuluan

Keberadaan kampung adat di suatu wilayah menjadikan daya tarik tersendiri bagi wilayah tersebut. Secara umum eksistensi kampung adat tidak terpisahkan dari masyarakat penyangganya, yaitu masyarakat adat. Inisiatif dan kreativitas masyarakat yang memegang teguh adat-istiadat menjadikan kampung adat memiliki keunikan tersendiri di tengah perubahan sebagai akibat globalisasi dan industrialisasi yang sedemikian masif.

Salah satu kampung adat yang tetap melestarikan kebudayaan Sunda di wilayah Bandung Raya adalah Kampung Adat Cirendeuy yang terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Upaya masyarakat untuk mengembangkan budaya setempat dalam beberapa tahun belakangan mengundang perhatian Pemerintah Kota Cimahi, di antaranya menjadikan kampung adat ini sebagai sarana diplomasi kuliner (*gastro diplomacy*) tahun 2019 sesuai dengan kajian Bidang Litbang Bappeda Cimahi. Ide untuk menerapkan diplomasi kuliner ini berawal dari adanya keunikan pada warga adat Cirendeuy yang tidak memakan nasi, tetapi memilih mengonsumsi singkong. S Dalam diplomasi kuliner ini juga diintegrasikan aktivitas berkesenian, belajar kearifan pertanian, dan lingkungan hidup, (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/mengubah-paradigma-pangan-melalui-gastrodiplomacy>). (KURANG JELAS!!)

Gastrodiplomacy merupakan diplomasi budaya dengan bertumpu pada makanan untuk meningkatkan keunggulan *brand* suatu bangsa. Tujuannya untuk meningkatkan interaksi dan kerja sama internasional. Budaya kuliner dianggap mengandung citra negara dan mampu merepresentasikan negara dengan cara yang lebih halus dan diterima oleh masyarakat. *Gastrodiplomacy* juga terkait dengan turisme, baik

dalam pengembangan kampanye suatu bangsa maupun diplomasi masyarakat (*citizen diplomacy*) di tingkat akar rumput dengan menitikberatkan sektor makanan (Pujayanti, 2017; Ramadhan, Rezasyah, & Dermawan, 2019; Suntikul, 2019).

Kampung adat juga mempunyai peran penting dalam penguatan pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Pendidikan yang berbasis budaya lokal dengan berbagai kearifan lokal akan membentuk watak dan potensi diri daripada pendidikan yang bersumber dari budaya luar. Begitu pula, kearifan lokal kampung adat terkait dengan konservasi alam dan rusaknya lingkungan alam bisa menimbulkan bencana, walaupun cara pemeliharaannya dilakukan melalui mitos dan aturan adat (Dewi, Istiadi, & Istiadi, 2016; Maryani & Yani, 2014).

Kampung adat dengan turisme juga sangat erat relevansinya. Studi kampung adat Morten di Melaka menyebutkan adanya pola kunjungan wisatawan terhadap sejarah kampung tersebut dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai tuan rumah. Beberapa rumah menyediakan *homestay* bagi pengunjung sehingga pengunjung dapat menikmati keunikan suasana kampung adat dan juga sejarah kampung adat tersebut (Rosniza Aznie, Nor Amirah, MZ., & L., 2016). Hampir mirip dengan keberadaan kampung Morten di Melaka ini, Kampung adat Cirendeu memiliki keunikan tersendiri, terutama terkait dengan ketahanan pangan Masyarakat adat Cirendu lekat dengan kearifan lokal dalam menjaga ketahanan pangan selama satu abad lebih, terhitung sejak 1918 hingga saat ini. Kemampuan mereka menjaga ketahanan pangan tidak lepas dari proses pewarisan budaya yang tetap terjaga dari generasi ke generasi (Widyanti, 2016). Kekuatan lain, jenis wisata ini dapat meningkatkan peran masyarakat lokal dan kesejahteraannya, yaitu pengembangan desa ekowisata berbasis *community based ecotourism* (CBE). Ekowisata komunitas ini berpotensi menjadi daya tarik wisata (ODTW) berupa atraksi alam, sumber daya pertanian, ketahanan pangan, dan budaya (Attar, Hakim, & Yanuwadi, 2013; Cobbinah, 2015; Stronza & Gordillo, 2008).

Keberadaan kampung adat sebagai situs wisata yang menarik minat pengunjung juga dapat dilihat pada eksistensi kampung adat Orang Huaulu. Sebagai desa wisata, kampung ini mengutamakan sumber daya budaya bendawi, antara lain *pertama*, potensi pariwisata arsitektur dan permukiman serta bangunan rumah orang Huaulu bentuk dan jenis peruntukannya. Pola permukiman berdasarkan kaidah monodualisme (baik buruk, atas bawah, pamali dan tidak pamali) serta pengetahuan tentang siklus hidup orang Huaulu terhadap lingkungan serta manusia di luar kelompok. *Kedua*, potensi pariwisata seni dan kerajinan tradisional, ragam pola hias dan motif Orang Huaulu, serta pengarusutamaan gender dalam pengelolaan dan pengerjaan kerajinan tradisional (Wattimena, 2016).

Studi Astuti & Issundari (Astuti & Issundari, 2016) menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta berkontribusi dalam mempromosikan Indonesia melalui seni, budaya, adat, dan makanan untuk masyarakat internasional. Desa wisata yang terletak di Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta (disebut sebagai kampung pariwisata) berhasil menarik orang asing untuk tinggal dan hidup sebagai warga desa, menikmati desa setiap hari dan belajar budaya Jawa.

Datangnya pandemi COVID-19 belakangan ini menjadikan keberlanjutan *gastro diplomacy* dengan mengandalkan keelokan kampung adat, seperti kampung adat Cirendu ini. W Di kampung adat ini diberlakukan protokol kesehatan, juga bagi para pengunjung (<https://ayobandung.com/read/2020/11/17/153646/menghadapi-pandemi-covid-19-ala-warga-kampung-adat-cirendeu>), tetapi intensitas kunjungan wisatawan berkurang cukup tajam.

Dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata memang cukup jelas, antara lain berkurangnya volume kerja para pekerja di sektor jasa pariwisata (Sugihamretha, 2020). Semakin lama pandemi COVID-19, semakin berpengaruh terhadap penurunan pendapatan pendapatan tempat wisata. Indikator pendapatan tempat wisata dan hiburan yang paling dominan adalah jumlah penerimaan asli daerah

dari sektor pajak wisata dan hiburan (Soehardi, Permatasari, & Sihite, 2020). Kalangan pelaku pariwisata juga menyadari bahwa dalam situasi akibat pandemi COVID-19 ini, perlu dilakukan pembenahan. Salah satunya berupa penyempurnaan sistem sanitasi dan pariwisata yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan (*self-distancing*) (Bagus, Paramita, Gede, Purnama, & Putra, 2020).

Tulisan ini menitikberatkan deskripsi perhatian pemerintah daerah Cimahi dan masyarakat adat Cirendeude dalam mewujudkan kampung adat ini menjadi objek dan daya tarik wisata (ODTW). Berjangkitnya pandemi COVID-19 yang melanda dunia wisata juga akan dilihat bagaimana dampaknya Bagi Kampung Adat Cirendeude.

B. Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi tentang subjek yang diteliti (Bryman, 1995; Mohajan, 2018), yaitu masyarakat Kampung Cirendeude, Cimahi, Jawa Barat, baik sebagai kampung adat maupun sebagai objek wisata pada masa pandemi COVID-19 Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, yakni studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. (BERBELIT beet!?) Publikasi yang diteliti berupa artikel jurnal ilmiah dan pemberitaan media sosial. Wawancara mendalam dan observasi dilakukan pada awal November 2020,

C. Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Kampung Adat Cirendeude

Cirendeude berasal dari nama pohon *reunde* karena sebelumnya di kampung ini banyak sekali tumbuh pohon *reunde*, sejenis pohon untuk bahan obat herbal. . Kampung ini terletak di pinggiran Kota Bandung, tepatnya di Cimahi, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Lokasi kampung adat ini berada di perbatasan antara Kota Cimahi dan Kecamatan Batujajar (Kabupaten Bandung Barat). Lokasinya berdekatan dengan bekas tempat pembuangan sampah di Kelurahan Leuwigajah Wilayah Kampung Cirendeude dikelilingi Gunung Gajah Langu (lebih kurang 890 m dpl) dan Gunung Jambul di sebelah utara, Gunung Cimenteng di sebelah selatan, Gunung Puncak Salam di sebelah timur, serta Pasir Panji, TPA Leuwigajah dan Gunung Kunci di sebelah barat. Kampung ini dihuni 60-an kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa, yang sebagian besar bermata pencaharian bertani ketela. Kampung adat Cirendeude memiliki luas 64 ha terdiri atas 60 ha untuk pertanian dan 4 ha untuk permukiman. Luas area untuk budi daya singkong sekitar 25 hektar. Sebagian besar penduduknya hingga saat ini memeluk kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka selalu konsisten menjalankan ajaran kepercayaan serta melestarikan budaya dan adat-istiadat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka (<https://cimahikota.go.id/artikel/detail/386>).

Data Diskopindagtan (2009) yang dikutip Tishaeni (2010: 31–33) menyebutkan kondisi tanah Kampung Cirendeude dan sekitarnya, di antaranya berjenis latosol dan sebagian podsolik merah kuning dengan topografi datar, bergelombang, sampai berbukit. Selain itu, masih terdapat lahan seluas 800 hektar yang merupakan areal tanah di sepanjang bukit, mulai dari Pasir Panji, Gunung Jambul, Gunung Gajah Langu, Gunung Puncak Salam, Gunung Cimenteng sampai berbatasan dengan Kecamatan Batujajar (Bandung Barat).

Secara administratif, Kampung Cirendeude berada dalam wilayah RT 02, 03, dan 05 dari 5 RT di RW 10 Kelurahan Leuwigajah. Dua RT lainnya merupakan perkampungan biasa, yang warganya mencari nafkah sebagai pemulung ketika TPA Leuwigajah masih berfungsi. Jumlah komunitas adat Cirendeude, menurut data RW 10 tahun 2008, terdiri atas 56 KK. Mereka tergabung dalam Sunda Wiwitan. Penganut agama lain di Leuwigajah, Islam sebanyak 35.198 jiwa, Katolik 47 jiwa, Kristen 111 jiwa,

Hindu 25 jiwa, dan Buddha 113 jiwa (Tishaeni, 2010: 31–33).

Masyarakat adat di kampung ini adalah bagian dari penganut Sunda Wiwitan, yang disebut agama Jawa-Sunda (ADS) berpusat di daerah Cigugur-Kuningan-Cirebon Mereka meneruskan ajaran Madrais. Dalam hal perkawinan, masyarakat adat Cirendeui belum terakomodasi dalam undang-undang perkawinan sehingga banyak ditemukan perkawinan di bawah tangan (HC, Judiasih & Nugroho, 2018).

2. Hamparan Kebudayaan dan Kesenian Sunda

Masyarakat adat Cirendeui sangat memegang teguh kepercayaan, kebudayaan, serta adat-istiadat mereka. Terdapat prinsip yang kuat, yaitu *Ngindung Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman*. *Ngindung Ka Waktu* dalam arti sebagai warga kampung adat memiliki cara, ciri, dan keyakinan masing-masing. *Mibapa Ka Jaman* memiliki arti masyarakat Kampung Adat Cirendeui tidak melawan akan perubahan zaman, tetapi mengikutinya, seperti tidak menolak hadirnya teknologi, televisi, alat komunikasi berupa *hand phone*, dan penerangan (Rohmatulloh, Aan Hasanah, & Ruswandi, 2020).

Dalam ucapan salam sehari-hari, mereka menggunakan ucapan *sampurasun* yang menjadi ciri khas pembeda komunitas ini dengan komunitas lainnya. Sebagaimana ucapan salam lainnya, *sampurasun* juga memiliki makna mendalam terkait dengan relasi antarmanusia.

Pada intinya ucapan itu mengajak orang yang diberi dan memberi salam untuk terus melakukan perbaikan. *Sampurasun* itu artinya ‘*sampurna insun*’ atau ‘manusia yang sempurna’. Jawabannya, *rampes* yang menyatakan persetujuan atas kalimat yang diucapkan sebelumnya, (Wawancara, Emen, 3 September 2018).

Sebagai masyarakat kampung adat, di tengah perkampungan adat Cirendeui ini terdapat *bale* dan panggung pertunjukan. Di tempat itu pertunjukan kesenian Sunda sering dimainkan. Begitu pula pada momen tertentu, seperti pada upacara bulan Sura (Muharram) yang diselenggarakan upacara tutup tahun. Dalam peristiwa kesenian itu, masyarakat Kampung Cirendeui masih mempertahankan kesenian gondang, *karinding*, serta angklung buncis, dan seterusnya.

Komunitas ini masih mempertahankan penggunaan aksara Sunda, seperti dapat dilihat dari beberapa tulisan yang tertempel di berbagai sudut. Tulisan aksara Sunda ini dapat dilihat pada makam tokoh-tokoh adat Cirendeui, pada papan di *saung* yang menunjukkan ketahanan pangan, di depan *guest house*, dan beberapa tempat yang lain. Salah satu penggerak aksara Sunda ini pernah mendapat penghargaan dari Kemendikbud pada acara Hari Aksara Nasional di Deli Serdang, September 2018. Pengetahuan olah makanan dan ketahanan pangan terkait dengan keyakinan Sunda Wiwitan, memang diajarkan oleh para leluhur kampung adat ini bahwa ada keterkaitan antara makanan dan dunia spiritual. Dari sejak jaman penjajahan dulu, kalau tidak mau terjajah, ya jangan makan nasi beras. Karena berasnya tidak ada, padinya tidak ada di sini. Hari ini di Bandung, lahan-lahan telah beralih fungsi. Lalu bagaimana nanti, tidak makan asal kuat. Buktinya kami sudah 100 tahun tidak makan nasi. Saya tidak pernah makan nasi. Abah Emen sudah 82 tahun, tidak makan nasi. Hari ini orang kota melupakan dewi kehidupan. Banyak makanan namun malah bisa melahirkan malapetaka. Menimbulkan penyakit. Karena melupakan kehendak Tuhan yang Esa dengan keharuman bunga yang tidak pernah mengada-ada, (wawancara dengan Yana, 4 September 2018).

Atas dasar keyakinan tersebut, di kampung ini terdapat makanan unik yang dinamai *rasi* (beras singkong) (Gulfa, 2017), yaitu singkong yang telah dilembutkan, lalu dibentuk seperti beras, yang dapat bertahan hingga enam bulan lamanya atau sampai pada masa panen singkong berikutnya. Pengetahuan akan alternatif makanan pokok, selain beras ini, juga ada pengetahuan lokal tentang budi daya makanan olahan berbahan dasar singkong. Aneka makanan olahan berbahan dasar singkong ini kini menjadi komoditas andalan orang Sunda Wiwitan di kampung ini.

Berdasarkan hasil observasi, ketika memasuki wilayah adat di Cirendeui ini, terpampang sebuah prinsip

atau pedoman tertulis dalam bahasa Sunda tentang ketahanan pangan. Tulisan tersebut terpampang pada dinding sebuah *saung* dari bambu yang berbunyi sebagai berikut: *Teu boga sawah, asal boga pare* (tidak punya sawah, asal punya padi), *Teu boga pare, asal boga beas* (tidak punya padi, asal punya beras), *Teu boga beas, asal bisa nyangu* (tidak punya beras, asal bisa masak nasi), *Teu nyangu, asal dhahar* (tidak bisa masak nasi, asal bisa makan), *Teu dhahar, asal kuat* (tidak bisa makan, asal kuat).

Tulisan tersebut menunjukkan falsafah masyarakat untuk mencari alternatif bahan makanan pokok selain beras. Dengan tidak bertumpu pada beras dan sawah, mereka tidak betergantung pada bahan makanan pokok yang dikonsumsi secara meluas di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, ketika banyak diberitakan soal ketahanan pangan, -tokoh nasional banyak berdatangan ke kampung ini, seperti Aburizal Bakri menjabat Ketua Umum Partai Golkar (Wawancara 2 September 2018).

3. Perhatian Pemerintah Kota Cimahi terhadap Kampung Adat Cirendeudeu

Sejauh ini masih terdapat kendala pelayanan administrasi kependudukan di kampung adat Cirendeudeu, layanan perkawinan. Akibatnya, banyak warga terpaksa menikah dengan orang beragama lain supaya anak mereka mendapatkan akte kelahiran, tidak hanya disebutkan telah lahir anak dari seorang ibu tanpa menyebut nama ayahnya. (Yana, tokoh pemuda kampung adat Cirendeudeu, 4 September 2018).

Menurut pengakuan Jajat, Ketua RW 10, masyarakat Sunda Wiwitan terkenal dengan gotong-royongnya. Mereka tanpa diminta akan datang membantu tetangganya ketika mempunyai hajatan ataupun membangun rumah. IKURANG JELAS!!

Dinas Pendidikan Kota Cimahi juga memperhatikan inisiatif masyarakat kampung adat dalam melestarikan aksara Sunda. Yana menuturkan pernah mendapat penghargaan sebagai penggiat aksara Sunda dalam acara Hari Aksara di Deli Serdang, September 2018.

Dalam beberapa acara yang diselenggarakan kepolisian dan militer setempat, kelompok adat dari Cirendeudeu juga sering dilibatkan, misalnya mengikuti Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan Tingkat Jawa Barat, termasuk lomba mencari tanda tangan terbanyak dalam waktu dua hari.

Di Kampung Adat Cirendeudeu terdapat empat kelompok penggerak pariwisata, yaitu pengolah *rasi*), kelompok kesenian, kegiatan alam ke Puncak Salam dan *homestay*. Banyak juga di sana pengusaha travel yang rutin membawa turis domestik dan mancanegara ke Cirendeudeu (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/mengubah-paradigma-pangan-melalui-gastrodiplomacy>).

Kampung Adat Cirendeudeu terus berbenah dalam memperkuat ekowisata berbasis adat Sunda. Selain kebudayaan Sunda yang ditawarkan, pendukung ekowisata juga diperhatikan, seperti pemanfaatan rumah warga sebagai tempat bermalam (*homestay*) serta dibukanya jalur pendakian ke Puncak Salam, gunung berketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Mereka juga sering mendapat bantuan dalam upaya pelestarian adat Sunda, seperti seperangkat gamelan dan angklung. Selain itu, mereka juga mendapat dukungan dari kalangan akademisi di wilayah Bandung dan sekitarnya.

4. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kampung Adat Cirendeudeu

Datangnya pandemi COVID-19 memberi dampak yang luar biasa di kalangan pengusaha industri jasa. Pariwisata menjadi salah satu sektor usaha yang terkena dampak cukup parah, paling tidak dilihat dari menurunnya kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Hal ini tentu saja juga berpengaruh pada sektor bisnis transportasi yang menjadi penunjang sektor pariwisata. Usaha sektor transportasi juga mengalami penurunan pemasukan sebagai akibat menurunnya jumlah penumpang.

Dampak pandemic COVID-19 di Kampung Adat Cirendeui ini menunjukkan penurunan angka kunjungan dan tertundanya beberapa agenda pengembangan ekowisata, termasuk rencana *gastrodiplomacy* yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Jumlah kunjungan wisatawan yang menurun turut pula menjadi perhatian para pengelola kampung adat ini. Namun, mereka masih terus eksis membuat inovasi untuk memperkuat kampanye kampung adat mereka sebagai objek wisata dengan memproduksi video tentang jatidiri mereka.

Terkait dengan hantaman krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini, dalam kenyataannya tidak terlalu terpengaruh karena masyarakat adat Cirendeui telah terbiasa dengan makanan *rasi*. ????

Kelemahan justru datang dari pengunjung yang akan mengakses kampung adat ini. Mereka tidak dapat lagi menikmati eksotismenya wilayah kampung adat ini dan juga mempelajari budaya Sunda. Kampung adat ini sebenarnya tidak melarang kedatangan wisatawan, tetapi wisatawan itu sendiri yang mengurangi aktivitas luar rumah, termasuk mengunjungi kampung adat ini. Akibatnya, pelayanan terhadap wisatawan cenderung menurun.

5. Kampung Adat Cirendeui dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Dukungan pemerintah terhadap Kampung Adat Cirendeui sejak ini cukup dirasakan oleh warga, padahal dikenal sebagai benteng kebudayaan Sunda di wilayah Cimahi. Dukungan pemerintah daerah memang tampak dalam berbagai bentuk, mulai dari pelestarian aksara Sunda, kelengkapan seni dan music Sunda hingga pencanangan *gastrodiplomacy*. *Gastrodiplomacy* ini berpotensi menjadi kekuatan diplomasi halus (*soft diplomacy*), yaitu diplomasi lewat budaya seperti yang dipraktikkan oleh negara lain (Bestor, 2018; Zhang, 2015). Namun, dukungan yang sifatnya mendasar, seperti pemenuhan hak-hak sipil dan perkawinan belum sepenuhnya terpenuhi.

Beberapa agenda untuk pengembangan ekowisata, termasuk rencana *gastrodiplomacy* yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Datangnya pandemi Covid19 sekarang ini cukup menurunkan semangat para pelaku penyedia wisata di kampung ini. Jumlah kunjungan wisatawan yang menurun turut pula menjadi perhatian bagi pengelola kampung adat ini. Terkait dengan hantaman krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini, dalam kenyataannya sebenarnya tidak terlalu terpengaruh karena masyarakat adat Cirendeui telah lama terbiasa dengan makanan pokok *rasi*. PENGULANGAN!!

3. Kesimpulan

Masyarakat yang menempati kampung ini sebagian merupakan penganut Sunda Wiwitan dan belakangan mengembangkannya sebagai Kampung Adat Sunda. Melalui penguatan kampung adat ini, mereka merevitalisasi kesenian dan kebudayaan Sunda. Untuk itu, Pemerintah Kota Cimahi mendukung keberadaan Kampung Adat Cirendeui lewat berbagai program.

Pandemic COVID-19 sekarang ini menurunkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kampung Adat Cirendeui. Meskipun demikian, masyarakat dan pengelola kampung adat ini masih tetap eksis membuat inovasi dan memiliki ketahanan pangan berupa beras singkong (*rasi*). Ancaman kerugian lainnya sebagai akibat pandemi COVID-19 bahwa para wisatawan membatasi diri berkunjung atau mengakses kampung adat ini. Untuk sementara waktu mereka tidak dapat lagi menikmati eksotismenya wilayah kampung adat ini, termasuk dalam mempelajari budaya Sunda.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M., & Issundari, S. (2016). Desa wisata sebagai aset soft power Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*. <https://doi.org/10.20473/mkp.v29i22016.68-78>
- Attar, M., Hakim, L., & Yanuwidi, B. (2013). Analisis potensi dan arahan strategi kebijakan pengembangan desa ekowisata di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*.
- Bagus, I., Paramita, G., Gede, I., Purnama, G., & Putra, A. (2020). New normal bagi pariwisata bali di masa pandemi Covid 19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*.
- Bestor, T. C. (2018). Washoku, far and near: UNESCO, Gastrodiploamacy, and the cultural politics of traditional Japanese cuisine. In *Devouring Japan: Global Perspectives on Japanese Culinary Identity*.
- Bryman, A. (1995). Qualitative methods in leadership research: Introduction. *The Leadership Quarterly*.
- Cobbinah, P. B. (2015). Contextualising the meaning of ecotourism. *Tourism Management Perspectives*. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.07.015>
- Dewi, I. K., Istiadi, Y., & Istiadi, Y. (2016). Mitigasi bencana pada masyarakat tradisional dalam menghadapi perubahan iklim di Kampung Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya (Disaster mitigation on traditional community against climate change in Kampong Naga Subdistrict Salawu Tasikmalaya). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. <https://doi.org/10.22146/jml.18782>
- Gulfa, S. & R. P. (2017). Kearifan budaya lokal Kampung Adat Cirendeui dan konsep swasembada pangan. *Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa Kota*, 451–458.
- HC, I. N., Judiasih, S. D., & Nugroho, B. D. (2018). Hak waris anak yang lahir dari perkawinan warga Kampung Adat Cireundeui dengan orang luar Kampung Adat Cireundeui dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum waris adat. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*. <https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.165>
- Maryani, E., & Yani, A. (2014). Kearifan lokal masyarakat Sunda dalam memitigasi bencana dan aplikasinya sebagai sumber pembelajaran IPS berbasis nilai. *Jurnal Penelitian Pendidikan UPI*.
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(85654), 23–48.
- Pujayanti, A. (2017). Gastrodiploamasi-upaya memperkuat diplomasi Indonesia. *Politica*.
- Ramadhan, F., Rezasyah, T., & Dermawan, W. (2019). Budaya kuliner sebagai soft power: Studi perbandingan Thailand dan Korea Selatan. *Insignia: Journal of International Relations*. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.2.1530>
- Rohmatulloh, R., Aan Hasanah, A. H., & Ruswandi, U. (2020). Character education of food local culture. *Jurnal Pendidikan Karakter*.
- Rosniza Aznie, C., Nor Amirah, M., MZ., R., & L., N. (2016). Pengurusan kampung tradisional di Kampung Morten Melaka. *Journal of Social Sciences and Humanities*.
- Soehardi, S., Permatasari, D. A., & Sihite, J. (2020). Pengaruh pandemik COVID-19 Terhadap pendapatan tempat wisata dan kinerja karyawan pariwisata di Jakarta. *Jurnal Kajian Ilmiah*. <https://doi.org/10.31599/jki.v1i1.216>
- Stronza, A., & Gordillo, J. (2008). Community views of ecotourism. *Annals of tourism research*. <https://doi.org/10.1016/j.astr.2008.03.001>

doi.org/10.1016/j.annals.2008.01.002

- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon kebijakan: Mitigasi dampak wabah COVID-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.113>
- Suntikul, W. (2019). Gastrodiplomacy in tourism. *Current Issues in tourism*. <https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1363723>
- Tishaeni, H. (2010). *Keberlanjutan komunitas adat Kampung Cireundeu Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi* (IPB (Bogor Agricultural University)). Retrieved from <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41066>
- Wattimena, L. (2016). Wisata Kampung Adat Huaulu di Pulau Seram, Maluku. *Kapata Arkeologi*. <https://doi.org/10.24832/kapata.v1i1.282>
- Widyanti, T. (2016). Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya masyarakat Kampung Adat Cireundeu sebagai sumber pembelajaran IPS. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1452>
- Zhang, J. (2015). The foods of the worlds: Mapping and comparing contemporary gastrodiplomacy campaigns. *International Journal of Communication*.

TRANSMISI PENGETAHUAN LOKAL MELALUI RITUAL MALAM OPAT BELAS PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CISUNGSANG, LEBAK, BANTEN

Muhammad Agus N., Mahmudah Nur, Abdul Basid
Balai Litbang Jakarta, Kementerian Agama

ABSTRAK Masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, Lebak, Banten merupakan salah satu komunitas yang masih mempertahankan pengetahuan lokal untuk keberlangsungan kehidupan dan eksistensi mereka. Tradisi malam *opat belas* di bulan Mulud menjadi medium untuk membuka semua pengetahuan yang dimiliki oleh para tetua untuk para generasi muda. Malam itu menjadi proses terbukanya semua pengetahuan para sesepuh masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Kajian deskriptif yang menekankan data kualitatif fenomenologis dengan pendekatan folklor ini bertujuan untuk mengungkap transmisi pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kajian ini menunjukkan bahwa tradisi malam *opat belas* di bulan Mulud menjadi wadah bagi masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang untuk bertukar pengetahuan. Pengetahuan yang ditransmisikan terbagi dua, yaitu pengetahuan yang bersifat sakral dan pengetahuan yang bersifat profan. Pengetahuan yang bersifat sakral bersumber dari para pewaris langsung, sedangkan pengetahuan yang bersifat profan bersumber dari para sesepuh yang mengetahui berbagai mantra atau *jangjawokan*. Pengetahuan sakral adalah berbagai mantra yang dibaca dalam berbagai tradisi ritual, sedangkan pengetahuan profan adalah berbagai mantra yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: transmisi, pengetahuan lokal, masyarakat Kasepuhan Cisungsang

A. Pendahuluan

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian mengenai transmisi pengetahuan budaya pada ritual *Opat Belas Bulan Mulud*/Maulid yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang Lebak, Banten. Tradisi ritual malam *opat belas* adalah tradisi yang biasa dilakukan masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Seperti dikemukakan Yusanto (2011), malam *opat belas* adalah waktu pada saat komunikasi tradisi dilakukan oleh para *rendangan* di Kasepuhan Cisungsang dengan pemimpin adat. Namun, ritual malam *opat belas* pada bulan Maulid ini memiliki perbedaan dengan ritual pada bulan-bulan lainnya. Ritual malam *opat belas bulan Mulud* tidak saja menjadi ajang bertemunya berbagai tokoh adat, tetapi juga menjadi ajang dibukanya berbagai pengetahuan tradisi yang pada waktu lain, selain pada malam tersebut, seperti tabu dikemukakan. (Fadillah, Baedhaw, dan Sujana, 2015; Yusanto, Sihabudin, dan Hatra, 2017; Nur, 2019).

Pentingnya ritual malam *opat belas* harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai pewarisan pengetahuan di tengah ancaman menghilangnya berbagai tradisi lokal akibat gerusan modernisasi dan berbagai ancaman sosial lainnya. Konteks pertama dikemukakan Humaeni (2018) bahwa masyarakat Kasepuhan Cisungsang adalah masyarakat semimodern. Di satu sisi, mereka masih mempertahankan adat tradisi yang diwariskan leluhur dan masih taat pada aturan adat kasepuhan, tetapi di sisi lain mereka juga tidak menutup diri dari hal-hal yang bersifat modern. Hal ini dicirikan dengan banyaknya

masyarakat yang mengenyam pendidikan, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Masyarakat juga tidak menolak teknologi karena hampir setiap rumah memiliki TV, bahkan rumah ketua adat sendiri sudah dilengkapi TV dan perabotan elektronik lainnya. Penggunaan *handphone* (HP) juga sudah menjadi hal yang biasa.

Konteks lain yang tak kalah penting adalah bagaimana berbagai tradisi masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang ini bisa bertahan di tengah Provinsi Banten yang berubah. Banten sendiri adalah daerah yang sangat unik akibat dari posisi geografisnya; memiliki ciri tradisi kota dagang seperti Melayu dan memiliki tradisi yang dipraktikkan pada kesultanan-Jawa, daerah kosmopolit yang dihuni oleh penduduk dari berbagai latar belakang, termasuk juga agama (Guillot, 2008; Lubis, 2003; Tjandrasmita, 2011). Banten pada masa kini dihuni oleh penduduk dengan berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan agama. Sebagian besar penduduk Banten memeluk Islam, sebagian lainnya memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Chu. Berbagai keragaman latar belakang penduduk ini tidak saja menjadikan Banten sebagai wilayah yang menarik, tetapi juga menyimpan potensi konflik (Guillot, 2008; Lubis, 2003; Tihami, 2017a; Humaeni dan Ulumi, 2017).

Meski banyak penduduk Banten yang memegang teguh ajaran Islam, tidak sedikit juga yang masih memegang teguh keyakinan yang diwariskan oleh leluhur mereka (Tihami, 2017b; Humaeni, 2017a; Humaeni, 2017b; Ulumi, Humaeni, dan Heryatun, 2018; Humaeni dan Juhri, 2019). Tradisi ini mungkin saja diwariskan oleh Sultan Hasanuddin yang menyebarkan Islam dengan menggunakan -cara atau tradisi yang dikenal oleh masyarakat setempat, seperti menyabung ayam atau mengadu kesaktian (Lubis, 2003). Oleh karena itu, konflik yang kerap terjadi selalu berkaitan dengan kontestasi antara penganut agama (Islam) dan penganut berbagai keyakinan lokal yang masih dipegang oleh sebagian warga Banten, terutama yang berdiam dalam komunitas kasepuhan. Humaeni (2019) menyatakan bahwa terjadi kontestasi antara agama dan tradisi pada masyarakat adat kasepuhan berlangsung secara subtil. Meski kemudian memunculkan tradisi keagamaan yang akulturatif dan akomodatif terhadap tradisi budaya setempat, -benih konflik dan disintegrasi internal dan antarpemeluk agama masih terasa.

Berbagai studi mengenai masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang atau berbagai kajian lain mengenai masyarakat adat kasepuhan lebih terfokus pada ritual *Seren Taun*. Ada beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh Halimah dan Guntara (2017) bahwa ritual *seren taun* yang diadakan sebagai upaya para sesepuh adat merawat kearifan lokal. Hasil kajian serupa ditemukan dalam berbagai ritual *seren taun* dalam komunitas masyarakat adat lain, seperti hasil kajian Utami, Mulyana, dan Itarisanti (2016), dan Isana (2017). Kajian lain mengenai ritual *seren taun* dilakukan Malik (2017a), Malik (2017b), dan Juhendi (2018). Ketiga kajian ini menyimpulkan bahwa ritual *seren taun*, saat ini tidak lagi sekadar ritual sacral, tetapi telah menjadi media komunikasi masyarakat adat dengan dunia luar. Banyaknya kajian mengenai *seren taun* ini karena ritual ini merupakan ritual puncak penghormatan terhadap Dewi Sri, sosok yang dianggap sebagai penjaga padi, sumber utama makanan komunitas masyarakat adat yang agraris. Karena merupakan ritual puncak, kegiatan ini kerap diselenggarakan secara meriah. Melalui *seren taun*, masyarakat adat menegaskan eksistensi diri mereka dan tak jarang menjadi alat tawar bagi masuknya berbagai program pembangunan.

Kajian lain mengenai masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dilakukan oleh Sihabudin (2013) dan Framanik, Winangsih, Dimiyati, dan Ikom (2019) yang memfokuskan kajian mereka pada pola komunikasi pada masyarakat Kasepuhan Cisungsang. Sihabudin, yang mengambil studi kasus terhadap pelaksanaan ritual *bulan purnama opat belas* menjelaskan bahwa ritual ini menjadi salah satu sarana komunikasi Sesepuh Adat Kasepuhan Cisungsang, Abah Usep Suyatma, dengan warganya yang diwakili oleh para pemimpin adat (*rendangan*). Framanik, Winangsih, Dimiyati, dan Ikom menemukan bahwa setidaknya terdapat dua bentuk komunikasi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, pertama *nyarita* yang merupakan bentuk komunikasi vertikal antara pemimpin adat

dengan anggota kasepuhan, dan kedua *adu renyom*, yaitu bentuk komunikasi horizontal di antara para *rendangan*.

Kajian yang lebih bersifat deskriptif etnografis mengenai masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang juga bisa dikatakan tidak sedikit. Hasil penelusuran ke berbagai sumber setidaknya ada empat hasil kajian dalam kelompok ini. Kajian yang dilakukan Fadillah, Baedhawiy, dan Sujana (2015) bisa dibilang merupakan kajian mengenai masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang paling tua, yang selesai ditulis pada tahun 2008. Kajian ini berisi berbagai adat-istiadat dan tradisi ritual masyarakat Kasepuhan Cisungsang. Kajian lain adalah mengenai komunikasi intra budaya masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, baik dalam keseharian maupun pada waktu-waktu tertentu (Yusanto, Sihabudin, Hatra, 2017). Kajian terbaru dilakukan oleh Ulumi, Humaeni, dan Heryatun (2018) dari Bantenologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Jika Yusanto, Sihabudin, Hatra mendeskripsikan pola komunikasi masyarakat adat, kajian yang dilakukan oleh Ulumi, Humaeni, dan Heryatun mendeskripsikan berbagai ritual dan berbagai budaya yang dihasilkan (makanan, obat-obatan, peribahasa, dan lainnya) oleh masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai proses dan bentuk transmisi pengetahuan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang untuk mempertahankan eksistensi diri dan tradisi mereka. Dengan mengetahui proses dan bentuk tradisi ini, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai masa depan keberlangsungan tradisi lokal pada masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dan memberikan berbagai saran kebijakan dalam rangka menjaga, melindungi, dan mempertahankan berbagai tradisi tersebut.

Transmisi pengetahuan budaya didefinisikan sebagai proses dengan berbagai elemen budaya yang berbentuk sikap, nilai, keyakinan, dan tata perilaku diwariskan dan diajarkan dari generasi ke generasi di dalam kelompok komunitas (Bisin & Verdier, 2008; Taylor & Thoth, 2011). Berbagai kajian menjelaskan bahwa proses ini berperan penting dalam merawat berbagai tradisi lokal. Seperti hasil kajian Inman, Howard, Beaumont, & Walker (2007), ingatan terhadap identitas etnik warga India di Amerika dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam perayaan dan kegiatan budaya. Memahami transmisi pengetahuan budaya adalah kunci untuk memahami perilaku manusia. Banyak aspek perilaku manusia dipengaruhi oleh pembelajaran sosial, termasuk beberapa fitur yang sering digunakan untuk membedakan manusia dari hewan lain (misalnya teknologi atau bahasa yang kompleks) dan penjelasan biologis murni untuk menjelaskan evolusi perilaku (Smith, Kalish, Griffiths, and Lewandowsky, 2008). Transmisi pengetahuan budaya ini juga penting dalam suatu komunitas selain untuk memberikan ciri khas pada kelompok mereka juga untuk mereproduksi kembali berbagai elemen kebudayaan mereka (Gergely & Csibra, 2006; Marno & Gergely, 2015).

Transmisi pengetahuan budaya dikategorikan dalam tiga tipe: (1) *vertikal*, yang merupakan transmisi dari orang tua atau pengasuh ke anak-anak; (2) *miring* atau *oblique* yang merupakan transmisi pengetahuan budaya dari anggota komunitas budaya ke pada generasi penerusnya; dan (3) *horisontal* yang merupakan transmisi pengetahuan budaya yang terjadi di antara sesama generasi penerus kebudayaan (Bisin & Verdier, 2008; Taylor & Thoth, 2011; Ram, Liberman, Feldman, 2019).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif fenomenologis (Ritchie, 2003; Snape & Spencer, 2003; Bernard & Gravelee, 2015) dengan teknik pengamatan langsung tidak terlibat dan wawancara sebagai metode pengumpulan data utamanya. Pengamatan dilakukan selama prosesi ritual *opat belas* berlangsung pada tanggal 30 hingga 31 Oktober 2020. Ritual *opat belas bulan Mulud* yang diamati adalah ritual yang dilaksanakan di kediaman Jaro Deris, salah seorang perangkat adat Kasepuhan Cisungsang. Selain di kediaman Jaro Deris, di kediaman perangkat adat lain juga diselenggarakan

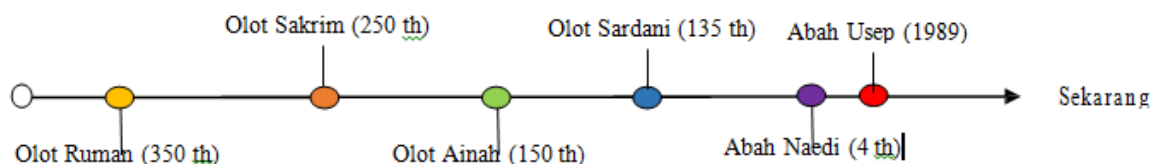
ritual ini. Namun, karena keterbatasan sumber daya dan akses dalam mengakses ritual di kediaman perangkat adat lainnya, pengumpulan data difokuskan pada ritual yang diselenggarakan di kediaman Jaro Deris. Ritual malam *opat belas bulan Mulud* yang utama dilakukan di Imah Gede, kediaman Abah Usep selaku Ketua Adat Kasepuhan Cisungsang, yang tahun ini--karena merebaknya wabah--diselenggarakan pada malam ketiga belas bulan Maulid. Wawancara dilakukan kepada Jaro Deris, yang memimpin ritual, Pak Agus yang membaca doa, beberapa peserta ritual yang merupakan tetua/sesepuh, anak-anak muda, pria dan wanita. Analisis data penelitian ini merujuk saran Danandjaja (2015) melalui pendekatan folklor.

C. Hasil dan Pembahasan

Kasepuhan Cisungsang mencakup wilayah yang sulit dijelaskan jika menggunakan batas-batas fisik. Anggota komunitasnya sendiri tersebar setidaknya di banyak desa yang terpencar di berbagai kecamatan di Kabupaten Lebak. Meski kerap diadakan ritual *cacah jiwa*, tidak diketahui berapa jumlah warga anggota komunitas kasepuhan ini. Data yang dapat diperoleh adalah jumlah *rendangan* yang hadir pada ritual *cacah jiwa* tahun 2020 mencapai 120 orang. Para *rendangan* ini berasal dari berbagai desa dan membawahi kasepuhan yang jumlahnya tidak seragam. Menurut beberapa sumber lapangan, yang belum dapat diverifikasi kebenarannya, jumlah anggota masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang lebih dari tiga ribu jiwa.

Secara geografis Kasepuhan Cisungsang terletak di salah satu punggung Pegunungan Halimun. Asal-usul kasepuhan ini masih menjadi misteri karena banyak versi yang diceritakan oleh masyarakat, bukan dari sumber tertulis. Versi yang paling diyakini adalah masyarakat Kasepuhan Cisungsang, sebagai bagian dari masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul, adalah keturunan keluarga dan kerabat kerajaan yang melarikan diri akibat kalah perang melawan Kesultanan Banten. Beberapa bukti yang menjelaskan bahwa mereka adalah bagian dari Kerajaan Pajajaran adalah penggunaan bahasa Sunda, penggunaan atribut yang melambangkan Pajajaran, seperti harimau pada tempat-tempat tertentu. Kisah-kisah mengenai asal-usul dan kehebatan Pajajaran dan Prabu Siliwangi masih dapat disimak dalam berbagai cerita tutur yang disampaikan, baik dalam keseharian maupun dalam ritual adat. Selain itu, mereka masih memegang teguh apa yang disebut sebagai *tatali paranti karuhun* (Fadillah, Baedhawiy, dan Sujana, 2015; Malik, 2016; Yusanto, Sihabudin, Hatra, 2017; Nur, 2019).

Masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang memiliki perangkat adat dalam menjalankan sistem sosial mereka. Sebelum adanya pemerintahan desa, masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang sudah memiliki perangkat adat. Kepemimpinan tertinggi masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang adalah ketua adat yang biasa dipanggil *olot*, *kolot*, atau *abah*. Kepemimpinan Kasepuhan Cisungsang diwariskan secara turun-temurun sebagaimana yang ditunjukkan pada garis horisontal di bawah ini:

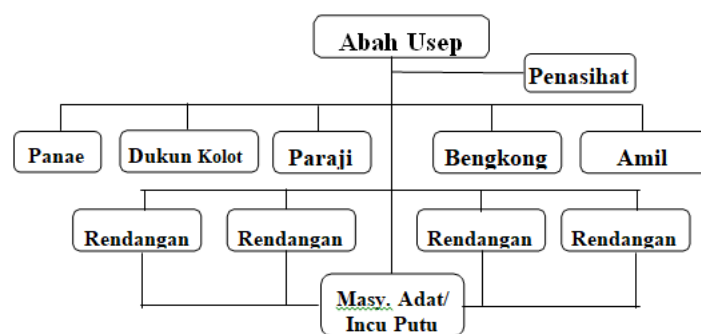


Gambar 1 Garis Pewarisan Ketua Adat Kasepuhan Cisungsang

Ketua adat, dalam menjalankan tugasnya untuk melayani dan melindungi masyarakat, dibantu oleh seperangkat adat, seperti terlihat pada Gambar 2 (Fadillah, Baedhawiy, dan Sujana, 2015; Yusanto, Sihabudin, dan Hatra, 2017), yang terdiri atas *rendangan*, *dukun kolot*, *amil*, *paraji* atau *inung berang*, dan

panae. *Rendangan* adalah kepala kampung adat yang mengemban tugas sebagai kepanjangan tangan *abah* dalam menjalankan tradisi, baik dalam bidang pertanian maupun kehidupan keseharian. Segala titah, nasihat, dan bekal dari ketua adat disampaikan kepada *rendangan* untuk disampaikan kepada masyarakat (*incu putu*). Bekal yang dimaksud di sini adalah bekal dari *abah* berupa *kemenyan* dan *bangle/pangley*. Bekal yang kecil tersebut secara simbolik diberikan kepada *rendangan*, kemudian oleh *rendangan* diberikan kepada *incuputu* bila akan mengadakan ritual- *Rendangan* bisa menambahkan/ mencampurkan *kemenyan* atau *bangle/pangley* agar cukup dibagikan kepada *incuputu* sebelum bekal dari *abah* habis.

Ada dua belas *rendangan* yang tersebar di dua belas kampung. *Dukun kolot* bertanggung jawab pada kesehatan dan wabah yang terjadi pada masyarakat adat dan lingkungannya. *Bengkong* adalah perangkat adat yang bertugas menyunat anak-anak laki-laki, sedangkan *paraji* atau *inung berang* perangkat adat yang ditugaskan untuk mengurus kehamilan dan kelahiran, dijabat oleh Mak Naena. Ada pula *amil*, yaitu perangkat adat yang bertanggung jawab pada prosesi kelahiran, pernikahan dan kematian. Di Kasepuhan Cisungsang, *amil* dan *bengkong* dijabat oleh Pak Ujang Purhedi. Selanjutnya, ada *panae* yang merupakan perangkat adat yang bertugas untuk membuat perkakas dari logam untuk kebutuhan bercocok tanam dan kebutuhan lainnya. Terakhir terdapat *ulu-ulu* yang bertugas mengatur irigasi untuk kebutuhan pengairan sawah/ladang dan kebutuhan rumah tangga.



Gambar 2 Struktur Organisasi Adat Kasepuhan Cisungsang

Ritual malam *opat belas* bulan *Mulud* yang dilaksanakan di kediaman Jaro Deris adalah ritual tahunan yang diselenggarakan pada malam tanggal empat belas bulan Rabiul Awal (bulan *Mulud* dalam penyebutan warga setempat) dalam kalender Hijriah. Disebut malam *opat belas* bulan *Mulud* karena pada bulan ini bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, utusan Tuhan pembawa ajaran Islam ke muka bumi. Atas alasan apa ritual ini diselenggarakan pada malam keempat belas di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang bias menjelaskan dengan pasti. Jaro Deris, perangkat adat yang memimpin ritual, hanya menjawab sudah dari dulunya, dari ajaran *karuhun*, saat ditanya mengapa dilaksanakan pada malam keempat belas bulan kelahiran Nabi.

Ritual malam *opat belas* bulan *Mulud* dalam deskripsi masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang adalah malam, yang segala pengetahuan mengenai berbagai tradisi adat boleh dipelajari dan diturunkan dari generasi tua kepada generasi muda. Pengetahuan ini mencakup berbagai mantera (*jangjawokan*), sejarah, hingga pusaka adat. Berbagai hal yang dianggap tabu dalam perbincangan sehari-hari, dibolehkan untuk dibicarakan pada malam itu. Menurut Kang Ewang, salah seorang perangkat adat yang bertugas di Imah Gede, dahulu *malam opat belas* menjadi seperti ajang adu jago karena berbagai ilmu *kanuragan* diperagakan. Namun, semenjak sekitar tiga puluh tahun belakangan tradisi tersebut, menurut Jaro Deris, ditiadakan. Ia mengatakan, “Sudah bukan masanya lagi mempertontonkan ilmu-ilmu kayak gitu. Khawatir jatuhnya sombong!”

Hasil pengamatan selama pelaksanaan tradisi tersebut, ritual inti malam *opat belas* bulan *Mulud* terletak pada prosesi pembacaan tahlil dan berbagai doa menjelang tepat tengah malam. Sebelum acara inti digelar, anggota masyarakat yang terdiri atas orang tua dan anak-anak muda, baik pria dan wanita, sudah berkumpul di rumah Jaro Deris setelah salat magrib. Selama waktu menunggu hingga acara inti, mereka mengeluarkan berbagai pusaka, seperti golok, keris, tombak, kujang, dan berbagai benda lain yang dianggap pusaka. Berbagai benda ini menurut mereka ada yang berusia di atas seratus tahun dan merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Setelah dikumpulkan benda-benda pusaka ini, kemudian dibasuh dengan perasan jeruk nipis dan bunga kecombrang. Tidak ada ritual dan pembacaan mantra khusus sebelum pencucian pusaka ini.

Dengan mengamati berbagai pusaka yang dikeluarkan, setidaknya hal itu bisa menjelaskan mengapa ritual ini dilakukan pada malam *opat belas* di bulan *Mulud*. Selain sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap Baginda Nabi SAW, pemilihan waktu malam keempat belas tentu saja karena malam tersebut adalah malam paling terang karena waktu penuh purnama muncul. Dengan terangnya cahaya purnama tersebut, berbagai pusaka yang dikeluarkan dapat dibersihkan dengan baik karena dahulu kala belum tersedia penerangan yang baik. Seperti secara tersirat disampaikan oleh Jaro Deris, “Mengapa harus tanggal 14 Maulid?” Jawabnya supaya hati kita terang seperti terang bulan malam 14 bulan Maulid. Pemilihan malam keempat belas juga bisa jadi menjadi bukti perpaduan budaya Islam dan tradisi lama, yang dalam hal ini tradisi lama dipertahankan dengan penerimaan tradisi baru yang masyarakat adatnya menghormati Kanjeng Nabi SAW yang sering dilukiskan “bagai purnama”.

Setelah seluruh pusaka dicuci, berbagai benda ini kemudian diletakkan di tengah ruangan utama sambil menunggu acara inti dilaksanakan. Anggota masyarakat yang hadir juga berkumpul di dalam ruangan tersebut. Selama menunggu hingga dilaksanakannya kegiatan inti, mereka berbagi cerita mengenai banyak hal. Antara orang-orang tua dan anak-anak muda menempati ruangan yang berbeda. Orang tua-tua yang berkumpul saling berbagi pengetahuan adat dan cerita. Ada yang berusaha mempelajari berbagai mantra untuk aktivitas harian, ada yang mempelajari tata cara perhitungan hari baik dan hari buruk dalam beraktivitas, dan sebagainya.

Di ruangan yang berbeda, anak-anak muda saling mengingatkan berbagai mantra yang mereka pelajari dari para orang tua. Tidak hanya anak-anak muda lelaki, di ruangan tersebut juga ada satu orang remaja perempuan yang tidak merasa risih berada dalam satu ruangan mempelajari berbagai mantra adat. Di ruangan ini juga setidaknya ada dua orang dewasa yang membimbing mereka dalam menghafal berbagai mantra dan menceritakan berbagai sejarah Kasepuhan Cisungsang. Salah seorang anak muda menjelaskan bahwa tidak semua mantra yang dikenal di Kasepuhan Cisungsang bisa dipelajari. Ada tata aturan mempelajari berbagai mantra tersebut.

Jaro Deris menjelaskan bahwa -mantra yang diajarkan kepada siapa pun tidak semuanya diajarkan dalam satu waktu. Mereka hanya boleh diajari satu mantra pada malam *opat belas* bulan *mulud* tersebut. Proses mempelajari mantra ini tidak membolehkan aktivitas menulis atau mencatat, jadi seluruh proses berlangsung lisan. Namun, pada saat penelitian ini berlangsung sudah ada beberapa anak muda, juga orang tua, yang berusaha mencatat berbagai mantra tersebut. Beberapa orang tua mengatakan bahwa dengan mencatat mantra sebenarnya akan mengurangi sakralitas berbagai mantra yang diajarkan dan membuat orang menjadi malas berusaha untuk mengingat. Siapa pun harus sudah hafal pada malam *opat belas* bulan *mulud* tahun berikutnya jika menginginkan mantra yang lain. Proses ujian hapalan mantra tersebut dilakukan pada waktu tengah malam setelah ritual inti. Model ujian hapalan mantra ini menyerupai model *ngaji sorogan* di -pondok pesantrean, yang siswanya maju ke hadapan seorang guru untuk membaca kitab yang ditugaskan untuk dipelajari. Artinya, selama masa menunggu hingga ritual inti ini merupakan masa pengulangan hapalan oleh mereka yang hendak ujian hapalan mantra.

Berbagai mantra yang diajarkan adalah ai mantra yang dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari, seperti bertani, bepergian, dan bersolek. Berbagai mantra yang digunakan dalam berbagai ritual

utama masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang hanya diajarkan oleh perangkat adat yang berwenang kepada keturunan mereka. Misalnya, mantra yang dibacakan oleh *dukun kolot* pada saat *seren taun* hanya dapat diajarkan kepada keturunannya. Ritual inti malam *opat belas* bulan *Mulud* kemudian dimulai tepat menjelang tengah malam. Acara dipimpin oleh Jaro Deris yang dimulai dengan merapal mantra yang tidak terdengar di depan dupa. Acara inti dilanjutkan dengan pembacaan surat Alfatihah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, alim ulama yang menyebarkan ajaran Islam, dan para *karuhun* Kasepuhan Cisungsang. Selesai pembacaan surat Alfatihah, dilanjutkan dengan pembacaan berbagai surat pendek dalam Alquran, zikir, tahlil, tahmid, dan ditutup dengan doa. Doa yang dibacakan adalah doa berbahasa Arab bercampur bahasa Sunda. Pembacaan berbagai surat dalam Alquran dan berbagai doa yang berpadu antara bahasa Arab dan bahasa Sunda mengindikasikan terjadinya akulturasi budaya antara kedua budaya ini. Kedua tradisi kebudayaan ini saling berkelindan sebagai tradisi atau kebudayaan baru yang membentuk Kasepuhan Cisungsang seperti sekarang ini. Kedua tradisi itu tidak saling berkontestasi dan tidak saling menegasikan keberadaan mereka.

Selesai pembacaan doa pengajian, dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Pak Agus, salah seorang warga yang ditugasi oleh Jaro Deris. Pembacaan doa ini dilakukan tidak dengan suara yang terdengar, tetapi dirapal dengan hening. Mantra ini dibacakan khusus untuk berbagai pusaka yang telah dibasuh sebelumnya. Setelah beragam ritual inti selesai, dilanjutkan dengan makan bersama dengan hidangan sederhana khas masyarakat Kasepuhan Cisungsang. Setelah makan bersama, baru dilaksanakan ujian hapalan mantra yang dilakukan oleh anak-anak muda di hadapan para sesepuh. Ritual malam *opat belas* bulan *Mulud* selesai menjelang pukul dua dini hari.

Transmisi pengetahuan tradisi oleh masyarakat Kasepuhan Cisungsang melibatkan tiga tipe transmisi pengetahuan budaya, yaitu transmisi pengetahuan secara vertikal, transmisi pengetahuan dari jalur samping (*oblique*), dan transmisi pengetahuan secara horizontal. Transmisi pengetahuan yang dilakukan secara vertikal biasanya dilakukan oleh orang-orang tua kepada anak-anak mereka dan ini hanya berlaku pada mantra dan pengetahuan khusus yang sifatnya diwariskan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan langsung.

Transmisi pengetahuan yang dilakukan pada malam *opat belas* bulan *Mulud* mengambil bentuk menyamping dan horizontal. Bentuknya menyamping karena transmisi pengetahuan mengenai berbagai mantra dan tradisi keseharian, berbagai cerita, sejarah, dan berbagai hal yang dianggap tabu dibicarakan dalam keseharian ditransmisikan oleh para orang tua setempat kepada anak-anak muda yang bukan dari garis keturunan langsung. Bentuk horizontal transmisi pengetahuan juga terjadi karena orang-orang tua dan anak-anak muda saling berbagi pengetahuan mengenai tradisi dan sejarah leluhur mereka.

Proses transmisi pengetahuan pada masyarakat Kasepuhan Cisungsang juga mengelompokkan berbagai pengetahuan tradisi menjadi pengetahuan yang bersifat sakral dan pengetahuan yang bersifat profan. Pengetahuan yang bersifat sakral hanya dapat diajarkan atau diwariskan kepada pewaris langsung perangkat adat dari garis keturunan. Pengetahuan yang bersifat sakral ini mencakup berbagai mantra dan ritual yang dibawakan pada ritual utama Kasepuhan Cisungsang, seperti *seren taun* dan *prah-prahan*. Sementara pengetahuan yang bersifat profan dapat diajarkan kepada siapa pun dan dapat diajarkan dan diwariskan pada malam *opat belas* bulan *Mulud* setiap tahunnya. Pengetahuan yang bersifat profan adalah pengetahuan mengenai mantra, hitungan hari baik dan buruk, dan berbagai pengetahuan lain yang dipergunakan dalam aktivitas keseharian mereka.

Meski berbagai pengetahuan profan dapat dipelajari oleh siapa pun pada malam tersebut, tata aturan tetap melekat pada proses transmisi pengetahuan mereka. Mereka, misalnya, tidak diperkenankan meminta diajarkan mantra lain jika mantra sebelumnya yang mereka minta tidak kunjung dihapal. Proses menambah satu mantra pun memakan waktu lama, yaitu satu tahun, yang menyiratkan agar

warga kasepuhan bersungguh-sungguh mengamalkan berbagai mantra yang mereka pelajari. Hal ini juga mengajarkan agar mereka tidak serakah dan mengetahui benar kebutuhan pengetahuan yang mereka perlukan dalam keseharian mereka.

Secara simbolis, ritual malam *opat belas* bulan *Mulud* memiliki makna yang sarat nilai-nilai pendidikan bagi generasi penerus masyarakat Kasepuhan Cisungsang. Berbagai ritual pada malam itu, termasuk juga mencuci berbagai pusaka, seperti dikemukakan Jaro Deris,

Maksudnya (adalah) mengasah atau mempertajam. Syariatnya kan golok, hakikatnya mantra-mantra yang sudah diwariskan leluhur. Diasah lagi tanggal 14 bulan *Mulud*. Syariatnya harus tajam goloknya, soalnya kalau tidak tajam tidak berguna. Termasuk hakikatnya juga, tajam pemikiran kita lah. Harus hati-hati dan waspada, harus ingat apa yang diamanatkan leluhur.

Malam *opat belas* bulan *Mulud* seperti menjadi waktunya kembali bagi seluruh masyarakat Kasepuhan Cisungsang: kembali mengingat siapa mereka dan dari mana mereka berasal, untuk apa mereka berada, mengasah nurani dan pikiran. Tanpa nurani dan pikiran yang terasah dengan baik, tentu hidup mereka tidak akan berguna, diri dengan nurani dan pikiran yang tumpul tentu akan merusak. Ritual malam *opat belas* bulan *Mulud* mengajarkan masyarakat Kasepuhan Cisungsang bahwa individu yang berguna adalah individu yang bermanfaat, yang mampu menyinari lingkungannya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan, tradisi yang masih berkembang di masyarakat adat memerlukan perhatian serius dari pihak terkait untuk mengapresiasi, memelihara, dan melestarikannya. Dalam hal ini, diperlukan kerja sama semua pihak agar tujuan tersebut dapat tercapai, yaitu Kementerian Agama, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dinas kebudayaan setempat, serta balai pelestarian nilai budaya di setiap wilayah/provinsi.

Kementerian Agama, melalui Badan Litbang dan diklat perlu melakukan kajian tentang harmoni antara agama dan tradisi masyarakat adat, lalu hasilnya dipublikasikan secara massif, baik dalam bentuk cetak, *e-book* maupun video pendek yang dapat disebarluaskan melalui media *online*. Hal ini perlu dilakukan untuk menguatkan bahwa tradisi mereka tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, juga untuk menghindari justifikasi kelompok pemahaman keagamaan tertentu terhadap pelaku tradisi sebagai pelaku bidah, syirik, dan khurafat. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tradisi-tradisi lokal yang bersentuhan dengan perkembangan Islam Nusantara baik seperti tradisi *opat belas* dan lainnya, dapat dimasukkan dalam materi ajar muatan lokal di madrasah dan perguruan tinggi keagamaan sebagai upaya pengenalan tradisi Nusantara.

Dinas kebudayaan setempat serta balai pelestarian nilai budaya di setiap wilayah juga dipandang perlu melakukan pendataan, penataan, dan pembinaan terhadap kelompok-pelestari tradisi tersebut. Hal itu dimaksudkan guna mencegah kepunahannya serta memberikan perhatian, baik berupa materi maupun nonmateri. Para guru, dosen, peneliti, wartawan, dan budayawan hendaknya juga turut serta menyebarkan keberadaan tradisi tersebut sebagai salah satu warisan budaya leluhur agar lebih dikenal oleh masyarakat. Apresiasi terhadap tradisi masyarakat adat ini bertujuan untuk mengenalkan tradisi kepada khalayak dan menguatkan nilai-nilai yang sudah melekat pada masyarakat Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard, HR., and Gravelee, CC. 2015. On method and methods in anthropology. In HR. Bernard and CC. Gravelee (ed.) *Handbook of Methods in Cultural Anthropology* (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
- Bisin, A., Verdier, T. 2008. In; Palgrave Macmillan (ed.), *The new palgrave dictionary of economics*. DOI [10.1057/978-1-349-95121-5_2798-1](https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_2798-1)
- Danandjaja, James. 2015. Pendekatan folklor dalam penelitian bahan-bahan tradisi lisan. Dalam *Metodologi kajian tradisi lisan* (Edisi revisi, Ed. Pudientia MPSS). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor dan Asosiasi Tradisi Lisan.
- Fadillah, M.A., Baedhowy, R.A., dan Sujana, D. 2015. *Mokaha urang cisungsang* (Cet. Ke-2). Serang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.
- Framanik, NA., Winangsih, R., Dimyati, I., dan Ikom, DM. 2019. Traditional communication model of traditional leaders in maintaining local wisdom in custom tribe, Kasepuhan Cisungsang, South Banten, Banten Province, Indonesia. Prosiding *Advances in social science, education and humanities research*, International Conference of Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019) Volume 367, pp. 89-92.
- Gergely, G., and Csibra, G. 2006. Sylvia's recipe: The role of imitation and pedagogy in the transmission of cultural knowledge. In N. J. Enfield & S. C. Levenson (Eds.) *Roots of Human Sociality: Culture, Cognition, and Human Interaction* (pp. 229-255), Oxford: Berg Publishers.
- Halimah, L., dan Guntara. 2017. Budaya seren taun sebagai kearifan lokal masyarakat Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat. *Journal of Moral and Civic Education*. Vol. 1 (1), 2017, hal. 1-13. DOI: [10.24036/8851412020171117](https://doi.org/10.24036/8851412020171117).
- Humaeni, A. 2017a. *Mantra Banten*. Serang: Laboratorium Bantenologi UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Humaeni, A. 2017b. *Magic dan demokratisasi lokal di Banten*. Serang: Laboratorium Bantenologi UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Humaeni, A. 2019. *Kontestasi agama (Islam) dan adat pada masyarakat kasepuhan: Studi kasus di Kasepuhan Cisungsang, Citorek, Cicarucub Lebak dan Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi Jawa Barat*. Serang: LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Humaeni, A., dan Ulumi, HFB. 2017. *Magic di pesantren Banten* (Cet. ke-2). Serang: Laboratorium Bantenologi UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Humaeni, A., dan Juhri. 2019. *Akulturası agama dan budaya lokal dalam mantra nusantara; Studi pada masyarakat Banten, Jawa Barat, Madura, Bali, dan Bugis Makassar*. Serang: LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Inman, A. G., Howard, E. E., Beaumont, R. L., & Walker, J. A. 2007. Cultural transmission: Influence of contextual factors in Asian Indian immigrant parents' experiences. *Journal of Counseling Psychology*, 54(1), 93–100. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.54.1.93>
- Isana, W. 2017. Upacara adat seren taun upaya mempertahankan nilai kearifan lokal masyarakat Kampung Sodong Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis Tahun 2003--2011. *Jurnal Al-Tsaqafa* Vol. 14 No. 2 Januari 2017, hal. 249-264.
- Juhendi. 2018. Aktivitas komunikasi ritual seren taun; studi etnografi aktivitas komunikasi ritual seren taun di Kasepuhan Cisungsang. Skripsi (tidak diterbitkan) pada Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Hubungan Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

- Lubis, Nina. 2003. *Banten dalam pergumulan sejarah: Sultan, ulama, jawara*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Malik, Abdul. 2016. *Berjuang menegakkan eksistensi: Komunikasi politik masyarakat adat masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul*. Serang: Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten.
- Malik, Abdul. 2017a. Seren taun sebagai medium komunikasi adat. *Jurnal Lontar* Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2017, hal. 1-16. DOI: [10.30656/lontar.v5i1.482](https://doi.org/10.30656/lontar.v5i1.482).
- Malik, Abdul. 2017b. Ketua adat sebagai aktor pembangunan. *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan (Senasset) 2017*, Serang 25 November 2017, hlm. 115-120.
- Marno, H., and Csibra, G. 2015. *Toddlers favor communicatively presented information over statistical reliability in learning about artifacts*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0122129>
- Nur, Mahmudah. Nilai-nilai pendidikan agama pantun Raden Galuh Pakuan Pajajaran dalam seren taun Kasepuhan Cisungsang Lebak Banten. Makalah disampaikan pada International Conference on Islam and Global Issues, November 27-28, 2019.
- Ram, Y., Liberman, U., Feldman, MW. 2019. Vertical and oblique cultural transmission fluctuating in time and in space. In *Theoretical Population Biology*, Vol. 125, 2019, Pages 11-19. <https://doi.org/10.1016/j.tpb.2018.11.001>
- Ritchie, Jane. 2003. The applications of qualitative methods to social research. In Jane Ritchie and Jane Lewis (ed.), *Qualitative Research Practice; A Guide for Social Science Students and Researchers*. SAGE Publications.
- Sihabudin. Ahmad. 2013. Literasi media dengan memberdayakan kearifan lokal. *Jurnal Communication* Vol. 4. No. 2 Oktober 2013, hal. 1-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.36080/comm.v4i2.55>.
- Smith, K., Kalish, ML., Griffiths, TL., dan Lewandowsky, S. 2008. Introduction cultural transmission and evolution of human behavior. *Philosophical Transactions Royal Society B* (2008) 363, 3469–3476. DOI: <https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0147>
- Snape, D. and Spencer, L. 2003. The foundations of qualitative research. In Jane Ritchie and Jane Lewis (ed.), *Qualitative Research Practice; A Guide for Social Science Students and Researchers*. SAGE Publications.
- Taylor M.J., Thoth C.A. 2011. Cultural transmission (in Goldstein S., Naglieri J.A. eds) *Encyclopedia of Child Behavior and Development*. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-79061-9_755
- Tihami, MA. 2017a. *Kiai dan Jawara di Banten*. Serang: Laboratorium Bantenologi UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Tihami, MA. 2017b. *Peribahasa masyarakat Banten*. Serang: Laboratorium Bantenologi UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Tjandrasasmita, Uka. 2011. *Banten abad XV-XXI: Pencapaian gemilang penorehan menjelang*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama. Ulumi, HFB., Humaeni, A., Heryatun, Y. 2018. *Budaya Masyarakat Kasepuhan Cisungsang*. Serang: LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Utami, A., Mulyana, dan A., Itaristanti. 2016. Peran tradisi seren taun dalam upaya meningkatkan pewarisan nilai-nilai sosial dan budaya di kalangan remaja Kelurahan Cigugur Kecamatan

Cigugur Kabupaten Kuningan. *Jurnal Edueksos* Vol. V No. 1 Juni 2016, hal. 99-113.

Yusanto, Yoki. 2011. Tradisi komunikasi anggota kelompok rendangan dengan kepala adat: Studi etnografi komunikasi dalam ritual adat bulan purnama opat belas di komunitas adat Kesepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak, Banten. Thesis (tidak diterbitkan) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

Yusanto, Y., Sihabudin A., dan Hatra H. 2017. *Kasepuhan Cisungsan: Komunikasi intra budaya* (Cet. Ke-2). Serang: Pustaka Getok Tular dan Kemitraan Energi Industri.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Kamis/03 Desember 2020
Jadwal Paparan	: Panel No: 1
Ruang	: Kelompok 8
Waktu	: 13.30 WIB
Judul Penelitian	: 1. Promoting Culture of Peace Senior High School Students through Intolerance Early Warning and Early Response System (i- EWERS) 2. Peta Jalan Penelitian Inovasi dan Pengayaan Seni dalam Mendukung Industri Kreatif untuk Pemajuan Kebudayaan 3. Kampung Adat di Tengah Pandemi Covid-19 4. Transmisi Pengetahuan Lokal Melalui Ritual Malam Opat Belas Pada Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang, Lebak-Banten
Penyaji	: 1. Muhammad Najib Azca 2. Ihya Ulumuddin 3. Zaenal Abidin Eko Putro 4. Muhammad Agus Noorbani
Pembahas	: 1. Dr. Ali Akbar, S.S., M.Hum 2. Sjamsul Hadi, S.H., M.M.
Moderator	: Irawan Santoso Suryo Basuki
Notulis	: 1. Hakimul Ikhwan 2. Irna Trilestari 3. Noviyanti 4. Erni Hariyanti

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : (Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)	1. Muhammad Najib Azca Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa intoleransi di kalangan anak muda tergolong ‘cukup tinggi’ khususnya ketika berkaitan dg mereka yang ‘beragama lain’ 49% responden Muslim menolak mengucapkan “Selamat Natal”

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		• 85.5% sampel berpandangan intoleran; terdiri 51.1% intoleransi internal/sama agama, dan 34.3% intoleransi beda agama • 23.3% responden mendukung penegakkan negara Islam • 21.9% responden mendukung implementasi syariah Islam Faktor determinan intoleransi • Peranan peer-group dalam penyebaran radikalisi dan intoleransi • Narasi Islamisme & intoleran dominan dalam referensi keagamaan kaum muda • Peranan teknologi digital dalam menyebarkan narasi radikal dan intoleran di kalangan kaum muda • Kelemahan sistem pendidikan dalam menangkal radikalisme dan mempromosikan toleransi & budaya damai. Metode Penelitian • Desk Study • Survey • Wawancara 4 Dimensi Keberagaman • 92% siswa di Surakarta menerima keberagaman agama, diikuti Yogyakarta (90%) dan Cianjur (69%) • Siswa di Surakarta dan Yogyakarta memiliki potensi menerima keberagaman yang relative sama besar, yaitu pada 94 dan 95%, sementara siswa di Cianjur jauh lebih rendah, yaitu 82 dan 84% untuk perbedaan etnis dan politik. • Para siswa di Yogyakarta terlihat lebih menonjol dalam menerima perbedaan sosial ekonomi, yaitu 96%, Surakarta 93%, dan Cianjur 85% • Para siswa di Cianjur memiliki persepsi dan sikap yang paling rendah terhadap keberagamaan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Terkait reproduksi paham kekerasan, survei ini menemukan persentase siswa yang setuju dengan tindak kekerasan fisik atas nama agama yang jauh lebih kecil, yaitu 15% di Cianjur, 9% Surakarta, dan 6% Yogyakarta. Angka ini jauh lebih rendah dibanding survei LaKIP (2011) terhadap 100 SMP dan SMA Umum di Jakarta yang menunjukkan 48,9 persen siswa setuju kekerasan atas nama agama. Para siswa di Cianjur memiliki pengalaman keseharian berteman dengan teman berbeda agama paling rendah di bandingkan para siswa di Yogyakarta dan Surakarta. Terdapat 45% siswa di Cianjur tidak memiliki teman dekat berbeda agama. Sementara di Yogyakarta dan Surakarta sebesar 13% dan 8%. Pengalaman pertemanan ini membentuk sikap para siswa Cianjur yang cenderung lebih tertutup terhadap perbedaan agama dibandingkan para siswa di Surakarta dan Yogyakarta. Modalitas mengembangkan budaya damai didapat para siswa dari pengalaman beraktivitas dalam organisasi sosial keagamaan dan non-keagamaan di luar sekolah. Terdapat 29% siswa di Yogyakarta, 33% di Surakarta, dan 29% di Cianjur memiliki pengalaman keterlibatan dalam organisasi sosial di luar sekolah Bahkan, para siswa di Surakarta memiliki antusiasme cukup tinggi untuk terlibat dalam organisasi keagamaan di luar sekolah sebagaimana tergambar dalam 39% siswa berbanding 25% siswa Yogyakarta, dan 21% di Cianjur Para siswa di Surakarta juga memiliki ketertarikan cukup tinggi untuk aktif dalam organisasi kepemudaan di luar sekolah, yaitu 41% siswa. Sementara di Yogyakarta, persentase minat siswa untuk terlibat dalam organisasi kepemudaan di luar sekolah sebesar 29%, dan Cianjur sebesar 23% Modalitas budaya damai dan toleransi berasal dari kombinasi faktor lingkungan keluarga, pertemanan sebaya, media massa <i>online</i> maupun <i>offline</i> serta media sosial.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Sumber pesan-pesan terkait ujaran kebencian, mayoritas responden mengemukakan sosial media, media <i>online</i>, dan televisi. Mereka menemukan ujaran kebencian (<i>hate speech</i>) melalui media sosial Instagram, media <i>online</i>, teman, TV, Whatsapp, Instagram, Twitter, FB, keluarga, Bulletin/Selebaran, LINE, Mading dan terakhir radio. Nampak jelas akses terhadap informasi berbasis <i>platform digital</i> 2. Ihya Ulumuddin Judul Awal Pengayaan Seni dalam bentuk Integatif untuk Pemajuan Kebudayaan, karena pesan terakhir dari Kapus bagaimana hasil kajian ini menjadi peta jalan penelitian untuk bisa mendukung penelitian pusat riset nasional (PRN) judul menjadi Peta Jalan Penelitian Inovasi dan Pengayaan Seni dalam Mendukung Industri Kreatif untuk Pemajuan Kebudayaan. Ada beberapa point yang akan disampaikan: Latar belakang, posisi Puslitjak, bentuk produk dari PRN itu apa, tujuannya apa dan empat pilar yang menjadikan basis peta jalan yang seperti apa. Pertama, sudah diketahui potensi seni dan budaya kita yang menjadi satu potensi strategis seperti sebagaimana yang disampaikan bapak Jokowi dalam konferensi rektor Indonesia tahun 2017 dimana beliau merefleksikan diri menyatakan seni dan budaya menjadisebut DNA nya budaya Indonesia. Dalam bidang seni dan kebudayaan Selaras dengan tekad untuk pemajuan kebudayaan di tengah peradaban dunia, sesuai dengan pasal 32 UUD tahun 45 dan dalam pasal 1 UUD No. 5 tahun 2017. Kita punya banyak sekali warisan tak benda yang tercatat secara nasional bahwa yang sudah ditetapkan sudah berjumlah ribuan, namun kita juga memahami untuk membuat suatu inovasi dan pengayaan tersebut dinilai belum kontekstual yang disampaikan oleh Dirjen kebudayaan tahun 2019. Perlu dipahami bersama bahwa warisan tak benda tentunya tidak semua bisa

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		diarahkan menjadi hilir yang ke arah industri, seperti itu. Secara nasional dan internasional, tim ini juga mendorong ekonomi kreatif, disana juga ada program program yang pesannya adalah membentuk dimensi kebudayaan yang erat ketika ingin mengembangkannya lebih jauh, dalam konteks kreatifitas. Dalam melihat konsep seni menurut pandangan Munro beserta interelasinya 17 subsektor yang ada di dalam ekonomi kreatif dalam konteks seni memberi kontribusi yang nyata kalau melihat fokus ekonomi kreatif dari tahun 2015 sd. 2019 kontribusinya ada 800an triliun, setiap tahunnya hampir ratusan triliun. Mengalami suatu peningkatan yang cukup berarti. Begitu juga tahun 2020 cukup signifikan sumbangan ekraf yang 7 sektor mencapai 1100 triliun. Begitu juga penyerapan tenaga kerja yang ada di dalamnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong juga bagaimana kreatifitas ini diupayakan lebih maju lagi melalui suatu kegiatan kegiatan yang dilakukannya dan kajian ini diarahkan suatu penelitian yang bertujuan dari berbagai kementerian, lembaga yang terkait untuk mendukung suatu konsep nasional industri kreatif untuk pemajuan kebudayaan. Sekilas tentang PRN, dalam peraturan presiden NO. 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017-2045. RIRN merupakan pedoman bagi Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan Pemangku Kepentingan untuk menyusun rencana aksi dalam pelaksanaan Riset Nasional (pasal 2). Bidang Riset dalam PRN meliputi: a) Pangan, b) energi, c. Kesehatan, d) transportasi, e) produk rekayasa keteknikan, f) pertahanan dan keamanan, g) kemaritiman, h) sosial humaniora, i) bidang riset lainnya. Posisi kita ada di h). Sosial Humaniora, posisi Puslitjak untuk bisa memberikan kontribusi yang berarti mengkoordinir mitra mitra, kolaborasi dan sebagainya. Tujuan ini adalah menyusun peta jalan penelitian untuk mewujudkan seni yang dapat mendukung industri kreatif dalam kerangka pemajuan kebudayaan.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Outputnya bagaimana menghasilkan rekomendasi kebijakan, konsep, strategi, maupun haki dan sebagainya yang bisa memperkuat posisi inovasi yang dapat mendukung industri kreatif dalam kerangka pemajuan kebudayaan. Siklus atau mata rantai yang digagas oleh kawan kawan pakar disini termasuk dari LIPI, Rektor ISBI Bandung, dan beberapa jaringannya. Dari empat hal itu Revitalisasi, komodifikasi, ekosistem maupun penguatan literasi dan apresiasi publik itu mewujudkan satu rekomendasi. Menghasilkan satu HAKI, publikasi dan sebagainya. Dari empat pilar tersebut di puslitjak mencoba membaginya setiap tahunnya. misalnya: Tahun pertama penguatan ekosistem, tahun kedua revitalisasinya, tahun ketiga komodifikasi seni, tahun keempat pada penguatan literasi dan apresiasi publik dan tahun kelimanya menjadi satu model yang utuh. Selain juga ada karya tulis ilmiah, police brief. Metode lebih ke arah desk risert, dengan didukung oleh diskusi diskusi yang cukup intensif, sekian bulan, sekian kali dengan para pakar dibidangnya di empat point tadi. Dalam UUD no,5 tahun 2-17 tentang pemajuan kebudayaan sangat terlihat sekali bagaimana ekosistem yang sering disampaikan pak Dirjen agak sedikit berbeda dengan di Ekraf tapi tidak terlalu jauh dalam membangun mata rantai. mulai proses kreasi, distribusi, ekibisi, konsumsi, ini terjadi dan diekraf ada istilah konservasi Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah ada jurusan magister tentang tata kelola seni, misalnya di ISI Yogya dan ISBI Bandung. Dalam melihat konteks bagaimana membangun ekosistem seni tidak terlepas dari konteks dari program UNESCO. Kreativities City network maupun Indonesia city network. Kalau mau kejar beberapa tahun kedepan menjadi hal yang menarik dengan membangun suatu kota yang bisa memperkuat ekosistem tata kelola seni. Defenisi ekosistem seni dan kreatif itu kota membangun ekosistem ekonomi kreatif itu bukan suatu jejaraing yang

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		mengagetkan proses kreasi, produksi, distribusi, konsumen dan konservasi berdasarkan UU Ekraf. Sementara tata kelola mempunyai kemampuan terbatas dalam mengelola jaringan dan kebijakan dalam mengembangkan seni dalam konteks ekonomi kreatif. Pendapat dari para peneliti secara natural seni itu bukan dalam kontek ekonomi culture tetapi estetika, dan sebagainya. Kolaborasi mengapa ini penting karena banyak sekali singungan singgungan element didalamnya kementerian lembaga lainnya. Ini perlu karena masing masing elemen, kemudian menuju pembangunan yang lebih keberlanjutan. Bagaimana juga interleasiyang dibangun antar elemen yang ada, misalnya dari akademisi, bisnis, komunitas, maupun media bisa berkolerasi dengan baik ketika kolaborasi menjadi titik yang penting. Meskipun diawak konektifitasnya agak sulit diawal tapi ketika suda menjadititik point tertentu menjadi suatu keberhasilan bagi kawab kawa yang melakukannya, misalnya di Bandung creative city forum. Dari ekosistem ingin membangun kolaborasi dengan baik, bagaimana sebenarnya revitalisasi bisa membangun satu hal yang tidak tersentuh oleh berbagai pihak. Kemudian kita bisa mendorong bagaimana posisi yang ada bisa menjadi bangkit dan bisa diterima oleh masyarakat sebagai suatu konstruksi. Kalau melihat dari konteks komodifikasi ada banyak titik lemah disana, dalam mereduksi nilai nilai tertentu dalam sebuah seni. Tetapi ada juga ... jika kita ingin membangun kekuatan besar, seni untuk menggabung industri kreatif, misalnya muncul suatu inisiatif upaya pelestaian seni dan tidak dikenal sebelumnya. Ada suatu upaya juga bagaimana literasi budaya dan kesenian menjadi tuntutan pasar maka terjadi reduksi nilai di dalamnya, juga iakut mengenalkan, menjaga eksistentsi seni dan budaya pada fase tradisional sehingga bisa menjadi bahan tersendiri dalam proses akomodasi sosial pada fase berikutnya. Untuk penguatan literasi, banyak sekali konsep-kosep

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		yang ada. Ketika kita bisa membangun satu atau kondisi masyarakat atau publik dalam konteks seni, maka harapankami adalah mereka bisa mengapresiasi dan terlibat dalam kegiatan kesenian, hal ini mungkin bukan hanya dalam konsep materi uang, tetapi bagaimana pandangan mereka terhadap seni juga lebih bisa diterima oleh masyarakat secara umum, dan ini lebih banyak pengalaman dari para praktisi mampu melihat ketika disentuh dari awal, adari anak-anak, terbangun satu kekuatan, satu modal nilai yang merasuk dalam dirinya menjadi satu pegangan mereka bagaimana memahami seni secara baik. Rekomendasi 1. Puslitjak perlu melakukan langkah-langkah untuk bisa mendukung bagaimana menjaga proses itu dengan baik sesuai dengan amanah yang sudah tertuang dalam Permenristek Dikti no. 38 tahun 2019 maupun akan ditevisi kembali, ketika rapat beberapa waktu lalu dengan Kemenristek Dikti. 2. Perlu satu upaya terus melakukan langkah koordinasi dengan kemenristek Dikti, BRIN-LPDP selaku pemberi dana. 3. Menjalin komunikasi yang erat dengan mitra kolaborasi riset misalkan dgn ISBI Bandung, UGM, sekaligus dengan calon mitra kolaborasi riset PRN. Terus melakukan upaya yang lebih menfokuskan pada target yang diharapkan (Rekomendasi kebijakan, model, HAKI, Publikasi Ilmiah, dll), khususnya terkait penguatan ekosistem dana tata kelola seni, revitalisasi seni, komodifikasi seni maupun penguatan literasi dan apresiasi publik terhadap seni yang diharapkan dapat terwujud suatu inovasi dan pengayaan seni yang dapat mendukung industri kreatif untuk kemajuan kebudayaan. 3. Zaenal Abidin Eko Putro • Keberadaan kampung adat penting sebagai salah satu benteng pertahanan budaya bangsa. • Salah satu kampung adat yang cukup dikenal luas di Jawa Barat adalah kampung adat Cirendeui, terletak di wilayah Kota Cimahi, Jawa Barat.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		• Tujuan penelitian: untuk melihat bagaimana perhatian pemerintah kota Cimahi, upaya kampung masyarakat adat dalam mendukung menjadi objek dan daya tarik wisata (ODTW), melihat bagaimana dampak yang dialami kampung adat akibat pandemi COVID-19. • Menggunakan metode penelitian kualitatif, <i>case study</i>, pengumpulan data dengan studi dokumen, wawancara mendalam dan observasi lapangan. • Kajian teoritik/<i>gastro diplomacy</i>, dengan kearifan lokal untuk membentuk watak dan mengembangkan potensi diri bangsa Indonesia. • Secara administrative kampung Cireundeu tidak terlalu besar, yang menonjol di 2 RT ada 60 KK, kampung ini merupakan bagian dari kelompok Sunda Wiwitan. • Yang menonjol adalah tuturan yang berkembang yaitu makan tidak perlu nasi, tidak perlu makan kenyang, untuk bertahan yang penting kuat. • Sering menjadi “<i>icon</i>” daerah, tahun 2019 ada diplomasi kuliner (<i>gastro diplomacy</i>). • Melestarikan kesenian gondang, <i>kariding</i>, dang angklung buncis. Aksara Sunda masih dipertahankan terlihat dari beberapa tulisan yang tertempel di beberapa sudut di kampung. • Ketahanan pangan: singkong karikil, selama pandemic ketahanan pangan tidak terpengaruh. • Kampung adat ini membuka diri bagi kunjungan wisatawan untuk mengenali dan memahami seni dan budaya Sunda. • Wisata budaya: sangat piawai dalam membungkus paket wisata dengan sarana <i>guest house</i>, homestay, hiking ke Puncak Salam, kesenian gamelan dan tarian Sunda, memopulerkan dengan Youtube. Mereka merevitalisasi kesenian dan kebudayaan Sunda. • Pandemi menyebabkan pengunjung menurun drastis, penurunan pengunjung tidak berpengaruh terhadap kemampuan mereka untuk bertahan di tengah pandemi. • Selama pandemic pengunjung tidak dapat menikmati dan belajar seni dan budaya Sunda, paket wisata juga

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		tidak disediakan. 4. M. Agus Noorbani Masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, Lebak-Banten merupakan salah satu komunitas yang masih mempertahankan pengetahuan lokal untuk keberlangsungan kehidupan dan eksistensi mereka. Tradisi malam opat belas di bulan mulud menjadi medium untuk membuka semua pengetahuan yang dimiliki oleh para tetua untuk para generasi muda. Malam itu menjadi proses terbukanya semua pengetahuan yang dimiliki para sesepuh masyarakat adat kasepuhan Cisungsang. Kajian deskriptif yang menekankan kepada data kualitatif fenomenologis dengan pendekatan foklor ini bertujuan mengungkap transmisi pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kajian ini menunjukkan bahwa tradisi malam opat belas di bulan Mulud menjadi wadah bagi masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang untuk bertukar pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan yang ditransmisikan terbagi menjadi dua, yaitu pengetahuan yang bersifat sakral dan pengetahuan yang bersifat profan. Pengetahuan yang bersifat sakral dibuka oleh mereka yang memilikinya kepada para pewaris langsung yang merupakan keturunan mereka. Sedangkan pengetahuan yang bersifat profan dibuka kepada siapapun oleh para sesepuh yang mengetahui berbagai mantra atau jangjawokan. Pengetahuan sakral adalah berbagai mantra yang dibaca pada berbagai ritual tradisi sedangkan pengetahuan profan adalah berbagai mantra yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketertarikan pada Cisungsang, salah satunya adalah pada budaya keseharian mereka. Masyarakat yang masih memegang adat tsb, adalah masyarakat adat kasepuhan. Salah satunya yang kami pertanyakan adalah bagaimana mantra-mantra yang dilafalkan seperti menggumam, bisa diikuti oleh para pewaris tradisi. Kata mereka kemampuan mengucapkan mantra itu diturunkan.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Dari abah kalau berkenan menunjuk seorang pewaris budaya, maka orang tersebut akan bisa dengan sendirinya, tanpa pelatihan. Belakangan ada info bahwa ada waktunya mereka diajarkan berbagai mantra ritual-ritual tersebut. Masyarakat Banten mulai tidak menerima adat budaya tersebut. Rekomendasi: bagaimana budaya adat ini menjadi materi ajar muatan local di sekolah
a.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	1. Muhammad Najib Azca Sjamsul Hadi (Direktur di Dirjen Kebudayaan) Dari sisi potret realitas bagus karena melihat sisi problem dan potensi, tapi rekomendasi belum terlalu jelas Menteri punya perhatian serius yang ditangani oleh stafsus. Perlu disinkronkan dg hasil kajian dan rencana yang sudah disusun oleh tim tsb. Perlu ditambahkan kearifan local dari jogja, solo dan cianjur sebagai bagian dari upaya dan strategi bina damai di sekolah Perlu mendapatkan draft yang sudah disusun oleh stafsus Perlu juga difikirkan pengemasan konten, khususnya yang sesuai untuk anak muda Dr. Ali Akbar (Dosen FIB UI): Perlu definisi intoleransi dan radikalisme sebagai basis untuk uraian dan analisis Hal 2. Uraian yang belum tuntas ttg ucapan Natal. Perlu dicek dan dilengkapi Pada uraian hasil riset Alvara: terjadi trend peningkatan radikalisme... Tidak disertai samplingnya, jumlah responden... Hal 3. Faktor peranan teknologi digital terhadap anak muda, belum memunculkan data kualitatif. Apresiasi terhadap keberagaman yang bervariasi, tidak hanya dimensi agama melainkan juga etnik, politik dan sosek Intoleransi: Natal, Fasilitas dan Ketua OSIS untuk berbeda agama... Pada uraian ttg keberagaman dan toleransi di Cianjur yang lebih tinggi dibanding yang lain, disebutkan bahwa faktor

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		DI/TII bisa berpengaruh kepada Cianjur. Perlu diperjelas bahwa hal tersebut merupakan data yang dikumpulkan dari responden/informan atau analisis peneliti? Rekomendasi: rumusan rekomendasi belum sinkron antara di paper dan di PPT. Perlu rekomendasi yang lebih operasional. 2. Ihya Ulumuddin Dr. Ali Akbar (Dosen FIB UI): Pembahas dalam kerangka saling melengkapi. Peta Jalan. Peta jalan itu tetapi di makalah yang diberikan samapai 74 hamanan. Diujungnya tidak ada, mungkin luput. Di pemikiransaya peta jalanitu gambar dua dimensi meskipun saat ini sudah tiga dimensi, secara umum gambar dua dimensiyang menunjukkan posisi sekarang dimana? Lalu mau melewati apa saja, di tahun berapa saja? Lalu ujungnya. Ujungnya misalnya industri kreatif yang mendukung pemajuan kebudayaan, peta itu belum disampaikan. Jadi uraian sepanjang 74 halaman belum dijadikan petanya, tapi ini mudah uraian itu sudah ada tinggal di buat petanya. Yang belum dimuat di uraian ini adalah permasalahan, jadi kalau tidak salah dari latar belakang langsung ke tujuan, belum ada permasalahan. tetapi ini yang akan dibahas. Tetapi darai formulir yang diberikan panitia masalah harus ada, dan ini tidak sukar, masalah biasanya kalimat akhir dari latar belakang kalau gaya penulisannya tidak menulis permasalahan kalimat akhirnya biasanya permasalahan, itu bisa di modifikasi. Halaman 17, dari laporan, diambil contoh Filandia, ada istilah prosumer? Bagaimaina konsumen berinteraksi dengan produsernya, sehingga mereka gabungan untuk menghasilkan karya seni. Contoh ini jika ingin ditetapkan di Indonesia maka cukup jauh untuk bisa diterapkan mengingat Filandia tergolong masyarakat sudah sangat sejahtera seperti di eropa. Kemudian tingkat literasi seninya juga sangat tinggi. Konseumennya bukan hanya merasa seni saja tetapi mereka inginterlibata dalam proses produksi. Jika ini ingin diterapkan istilah prosumer, Maka

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		di rekomendasi dituliskan: apa yang harus dicapai terlebih dahulu untuk mencapai tingkatan itu. Ini yang harus terlihat di peta penelitian. Halaman 22. Point. 4.1.4 tentang manager kesenian, ini mirip dengan halaman 17. Halaman 32. kita mulai berkenalan dengan istilah komoditas, suatu tahap karya seni orang ekspresi seni saja. Kalau menjadi komoditas menjadi barang dagangan istilahnya. Untuk masuk ke industri maka tidak cukup kalau menjadi barang dagangan ttp harus masuk kategori komoditas. Kategori komoditas adalah dagangannya menjadi barang dagangan utama bisa lihat di KBBI. Komoditas bukan hanya barang dagangan, tetapi barang dagangan yang utama dan memenuhi standar ada nilai lebihnya. Standarnya siapa? standarnya internasional. Bukan hanya sekedar industri kreatif, ini bayangkan ini adalah pabrik. Produksi cukup banyak dan standarnya standar tinggi, Di bagian rekomendasi: di laporan belum ada. Rekomendasi karena isinya peta maka isi ada awal ada ujung, istilahnya balap, kapan ada etape etapenya, kalau mau keluar kota maka modal apa yang dipunya ketika berangkat dan perlengkapan apa ketika di jalan. Ada kotemplasi, untuk menambah proses proses imajinasi ini yg belum dituliskan, Di rekomendasi kebijakan maka ada kata kata siapa yang pihak mana lembaga mana atau unsur masyarakat mana yang menjadi ATM, unsur mana, lembaga mana yang menjadi tempat rest Area, unsur mana yang menjadi tempat makan dst, ini belum tergambarkan dalam laporan ini. Ini bisa dibuat dgn segera dengan melihat titik awal diteruskan sampai ujung sampai ke industri kreatif untuk pemajuan kebudayaan. Syamsul Hadi Dari sisi kekuatan dan kelemahan dari hasil potret seperti apa? Rekomendasi untuk membangun ekosistem sistem pengayaan seni pointnya apa saja, untuk membangun ekosistem apa saja yang terlibat.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Bukan saja kebudayaan tetapi juga pariwisata juga kementerian dalam negeri yang sebagai Ada satu praktek baik dari kajian ini bisa berwujud nyata, bisa menjadi model Langkah Langkah. Dari Direktorat Pemanfaatan dan Pengembangan. Bagaimana strategi membangun ... Pemotretannya cukup bagus,\ perlu ada penajaman penajaman. Lebih fokus yang mana. Seni tari, rupa lebih fokus, penanganan dari tinjauan pariwisata dan ekonomi kreatif sama sama luasnya. 3. Zaenal Abidin Eko Putro Dr. Ali Akbar, SS., M.Hum, FIB UI • Tidak bisa membahas mengenai riset yang dilakukan karena tidak ada laporan yang kirimkan. • Cirendeu cukup sering dilakukan penelitian, literatur sudah ada beberapa yang membahas ketahanan pangan. • Diferensiasi dengan riset apa belum jelas karena tidak ada laporan, kebaruannya apa juga belum jelas. • Kampung adat ditengah pandemic akan berbeda dengan sebelumnya, karena sebelumnya belum ada pandemic. • Kemungkinan temuan tidak terlalu terdampak karena masyarakat yang awalnya hidup dengan apa adanya, belakangan baru ada wisata, jadi tidak tergantung dengan wisata tetap hidup dengan budayanya. • Ada kebijakan saat ini pemerintah sedang mengembangkan <i>food estate</i>, kota Sumsel Kalteng, Papua, pemerintah saat ini berpikir ada lahan besar kosong bisa digunakan untuk membuat hasil pertanian atau perkebunan, sangat arbiter, mungkin bisa menekankan bahaw akan lebih tahan pangan jika berbasis kearifan lokal. Masyarakat yang mengerjakan yang terbiasa dengan pangan mereka, sudah bisa melakukan, penambahan modal dan penambahan teknologi.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		• Dari segi budaya tidak ada resistensi karena sudah terbiasa dengan itu. Sjamsul Hadi, S.H., MM, Direktur Kepercayaan Terhadap TYME • Strategi memotret masih kurang mendalam, perlu menggali banyak sekali kajian mensitir, mengangkat kearifan lokal di kampung adat tersebut. Cirendeu ada kearifan lokal memproteksi diri, dengan pola makan bisa membentengi keberadaan Covid. • Keterhubungan ketahanan masyarakat adat dalam memposisikan apa praktek baiknya apa, wilayah sedikit tertutup, hal-hal apa saja yang positif bisa dilakukan di dalam rumah, banyak membuat kerajinan, melakukan ritual berdoa supaya warga diberikan kesehatan semua, hal-hal seperti ini bisa menjadi praktek baik. Di pasca pandemi peluang positif apa yang perlu diangkat. • Tata kelola membuka diri, apa saja dengan kekuatan kearifan lokal menjaga ekosistem dari sisi data, dari generasi muda, masyarakat tunduk tatanan adat. • Posisi perbatasan dengan modernisasi, terbuka teknologi, mengangkat ekonomi kerakyatan dari rumah seperti apa. • Potret makanan atau kuliner bisa diangkat, menjadi hasil kajian yang benar-benar tajam. • Rekomendasi yang harus dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, melakukan praktek baik bisa dikembangkan. • Dirjen kebudayaan ada khusus menangani kepercayaan dan masyarakat adat, sejauh mana, wilayah Jawa kompleksitas tidak terlalu tinggi, justru daerah protektif lebih dari Jawa, melarang orang keluar masuk untuk menjaga, apabila ada keluarga masuk, ada proses karantina di Kalimantan. • Di Cirendeu ada tidak, kekuatan-kekuatan dan rekomendasi Dirjen apa? misal mengangkat kearifan lokal dalam masa pandemi, memberikan ruang masyarakat adat melalui jalur bersifat online, untuk mendukung pariwisata, peran dinas pariwisata, pemda

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		yang terbangun ekosistem sungguh potret kemandirian, warga sudah modern tapi tetap nguri-uri adat lokal, kelebihan dan kekuatan yang menjadi konsentrasi 4. M. Agus Noorbani Dr. Ali Akbar, SS., M.Hum, FIB UI Kalimat: “Bahkan ketua adat sendiri sudah dilengkapi dengan TV dan alat elektronik lainnya, termasuk memegang HP juga”. Karakter ketua kampung adat ini berbeda. Mengkaitkan dengan banten, tapi kultur sunda, karena dulu wilayah jawa barat. Uraian tentang agama Islam dari Hasanudin tidak tepat dengan Cisungsang. Kultursnya lebih dekat dengan pelabuhan ratu. Interpretasi dikaitkan lebih pas dengan daerah selatan banten spt sukabumi. Doa yang dibaca berbahasa arab dan sunda, karena memang asal nya adalah daerah jawa barat. Rekomendasi kebijakan jangan normative, sebaiknya operasional terkait dengan hasil kajian ini. Seperti pendekatan khusus ke ketua adat, karena ketua adat yang memberi warna seluruh kegiatan di masyarakat adat tersebut. Budaya transfer pengetahuan seperti yang dilakukan di cisungsang perlu di tindaklanjuti, atau perlu diujicoba di tempat lain. Agar pengetahuan dapat sampai ke generasi muda secara efektif. Sjamsul Hadi, S.H., MM, Direktur Kepercayaan Terhadap TYME Penerimaan manfaat kajian ini adalah direktorat jenderal kebudayaan. Pengemasan sudah bagus belum ada penajaman transmisi pengetahuan karena diajarkan secara lisan. Transmisi pengetahuan bersifat mantra, dalam mata ajar mungkin tidak, tapi lebih ke kearifan local. Bagaimana ekosistem masyarakat adat sejak manusia lahir sampai meninggal itu sebaiknya yang dipotret, bukan soal

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		mantra2nya Mantra2 biasanya mereka tertutup Rekomendasi untuk ditjen kebudayaan itu apa. Kepercayaan adat seperti apa Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa apa Praktik baik apa saja yang dijalankan di masyarakat adat kasepuhan, baik tatanan adatnya dan transfer pengetahuan ke generasi muda. Tidak hanya melalui pendidikan formal, tapi juga melalui media di luar pendidikan formal. Penguatan transmisinya bisa dibangun melalui sekolah adat, misalnya. Keberlanjutan masyarakat adat tetap terjaga. Karena ada dekadasi krisis, sehingga pemuka adat sudah mulai merasakan dan mulai menata masyarakat adat agar tidak luntur. Generasi muda yang sekolah ke kota, balik ke kampung adat sudah berbeda. Ada pemikiran bahwa generasi muda yang tumbuh di masyarakat adat dijadikan siswa (bukan dalam arti lembaga sekolah formal) dalam pembelajaran adat di masyarakatnya, jangan sampai terserabut dari akar budayanya. Untuk itu perlu adanya transmisi pengetahuan. Program baru mas menteri saat ini adalah kuliah merdeka, KKN budaya. Ekosistem ini agar berkelanjutan, maka perlu pengemasan desa adat.
b.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat perpoint tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	1. Muhammad Najib Azca - 2. Ihya Ulumuddin Tanggapan Ali Akbar Finlandia :Kenyataan di Indonesia sudah mengarah kearah sana Rekomendasi mencoba untuk melihat lagi apa yang ingin dicapai, ada catatan sendiri ttp belm kami masukkan, produk apa saja dan aspek apa saja, berdasarkan priotitas tertemti. Dapat memberikan stu gambaran utuh, puslitjak

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		sebagai koordinator dan puslitjak sebagai... Samsul Hadi Seni sebagai ssatu yang luasa Rekomendasi, peran peran sepeti apa, lantas strategi untuk membangun ekosistem seni, merupakan penelitian lanjutan kami, di puslitjak sebagai peta jalannya. 3. Zaenal Abidin Eko Putro Mudarwan: Menarik sekali bahwa ada makanan seperti dari nasi singkong (terkait kuliner). Nah bagaimana dengan hasil kreasi kriya seperti hasil tenun atau batik atau hal lainnya. Apakah juga turut dikembangkan di kampung Adat tersebut? Mungkin dapat menjadi salah satu hal yang menarik dari kampung adat tersebut Yufriidawati: Bagaimana ketahanan sosial ekonomi dari kampung adat tersebut di saat kurangnya pengunjung? Tanggapan Sengaja membuat untuk kepentingan publikasi saja, ada data yang lebih utuh, kurang mendalam karena yang secara mendalam sudah digunakan untuk publikasi lain. Hubungan Cirendeudeu dengan Cigugur, bagaimana komunitas Cirendeudeu berinteraksi dengan komunitas diluar, bisa melihat bagaimana mereka tetap eksis. Kebudayaan sebagai benteng nilai-nilai karakter, bagaimana survival, fokusnya bagaimana ketahanan budaya dalam kondisi pandemi. Cirendeudeu pangan dari mereka, bagaimana mengolah singkong menjadi makanan pokok dan tidak beracun, kesenian Sunda: aksara Sunda dan kebudayaan Sunda merupakan bagian dari <i>eco-tourism</i>. 4. Mahmudah Nur -
c.	Penutupan	: Paparan seminar selesai pukul 16.35WIB.



ISBN 978-623-6044-02-5 (jil. 1)

